

NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

BUKU PANDUAN  
**SEKOLAH ANALISIS SOSIAL**  
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)



Diterbitkan atas solidaritas, dukungan dan kerjasama:  
Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS),  
Komunitas Diskusi Progressif: Eye On The Revolution &  
Revolusi Demokratik, Jaringan Inti Ideologis Pergerakan  
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). **Anti-Copyright © 2014**,  
dicetak, diterbitkan dan disebarakan untuk kebutuhan amunisi  
intelektual Kader Inti Ideologis dan kebutuhan gerakan sosial.

**BUKU PANDUAN  
SEKOLAH ANALISIS SOSIAL  
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)**

Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.

© Insphisos, Eye On The Revolution & Revdem, PMII, 2014.

[PARADIGMA ILMU-ILMU SOSIAL & PERUBAHAN SOSIAL ■ DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA ■ PROTES SOSIAL, REFORMASI POLITIK DAN GERAKAN SOSIAL ■ STRATEGI GERAKAN SOSIAL: MEMBEDAH RELASI NEGARA & MASYARAKAT ■ MARXISME, IDEOLOGI KAPITALISME, SOSIALISME, KOMUNISME ■ KERANGKA PIKIR REVOLUSI SOSIAL & REVOLUSI POLITIK ■ ANALISIS GEO-EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK ■ PETA DAN LANGKAH PRAXIS ANALISIS SOSIAL ■ STUDI DASAR ADVOKASI ■ MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK ■ ANALISIS WACANA MEDIA (MEDIA DISCOURSE ANALYSIS) ■ PARADIGMA ANALISIS WACANA MEDIA (MODEL TEUN A VAN DIJK) ■ TEHNIK AGITASI, ORASI & PROPAGANDA ■ TEHNIK DAN MANAJEMEN AKSI MASSA ■ TEHNIK LOBBY DAN NEGOSIASI ■ PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CO)]

**Disusun Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

Cetakan Kelima, Maret 2014  
Front & Back Cover + 241 Halaman

Penyunting : Tim Insphisos & Revdem  
Cover & Lay-out : Tim Insphisos & Revdem

**Diterbitkan atas solidaritas, dukungan dan kerjasama:**

Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS),  
Komunitas Diskusi Progressif: Eye On The Revolution & Revolusi Demokratik,  
Jaringan Inti Ideologis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

**Anti-Copyright © 2014.**

Dengan mencantumkan penulis sebagai hak dan pengakuan intelektual penulis, maka penulis dan penerbit memperbolehkan untuk mengutip, mereproduksi atau memperbanyak, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dengan cara elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, scanner, microfilm, vcd & cd-room, rekaman suara atau dengan teknologi apapun dengan izin atau tanpa seizin penulis dan penerbit.

Dokumen intelektual ini dicetak, diterbitkan dan disebar untuk kebutuhan amunisi intelektual Kader Inti Ideologis dan kebutuhan gerakan sosial. Bukan Panduan Sekolah Analisis Sosial ini adalah edisi khusus komunitas gerakan progresif untuk agitasi & propaganda wacana kiri. Untuk kader inti ideologis jaringan sayap kiri. Sebarkan dan berorganisasilah! Baca & Lawan!

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS—[ 4 ]

GRAND-DESIGN & ALUR PEMBELAJARAN SAS—[ 7 ]

Hand-Out 01: PARADIGMA ILMU-ILMU SOSIAL & PERUBAHAN SOSIAL—[ 12 ]

Hand-Out 02: DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA—[ 30 ]

Hand-Out 03: PROTES SOSIAL, REFORMASI POLITIK DAN GERAKAN SOSIAL—[ 36 ]

Hand-Out 04: STRATEGI GERAKAN SOSIAL: MEMBEDAH RELASI NEGARA & MASYARAKAT—[ 47 ]

Hand-Out 05: MARXISME, IDEOLOGI KAPITALISME, SOSIALISME, KOMUNISME—[ 53 ]

Hand-Out 06: KERANGKA PIKIR REVOLUSI SOSIAL & REVOLUSI POLITIK—[ 91 ]

Hand-Out 07: ANALISIS GEO-EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK—[ 101 ]

Hand-Out 08: PETA DAN LANGKAH PRAXIS ANALISIS SOSIAL—[ 155 ]

Hand-Out 09: STUDI DASAR ADVOKASI—[ 162 ]

Hand-Out 10: MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK—[ 166 ]

Hand-Out 11: ANALISIS WACANA MEDIA (*MEDIA DISCOURSE ANALYSIS*) —[ 182 ]

Hand-Out 12: PARADIGMA ANALISIS WACANA MEDIA (*MODEL TEUN A VAN DIJK*) —[ 190 ]

Hand-Out 13: TEHNIK AGITASI, ORASI & PROPAGANDA—[ 201 ]

Hand-Out 14: TEHNIK DAN MANAJEMEN AKSI MASSA—[ 208 ]

Hand-Out 15: TEHNIK LOBBY DAN NEGOSIASI—[ 214 ]

Hand-Out 16: PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CO)—[ 224 ]

TENTANG PENULIS—[ 239 ]

## PENGANTAR PENULIS



SEJARAH ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966 – 1998) kebablasan karena paham internasional liberalisme cum neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing.

Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan. Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah.

Sistem ekonomi liberal yang dianut suatu negara untuk mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi pasar, telah menyebabkan makin meningkatnya angka kesenjangan dan kemiskinan di mana lebih dari 1,2 milyar penduduk bumi ini hidup dalam kemiskinan yang ekstrem—kurang dari satu dollar AS/ hari karena repatriasi keuntungan investasi dan utang yang ditanamkan di negara-negara miskin—sementara pemilik perusahaan Microsoft Bill Gates, berpendapatan US\$95 per detik. Bahkan kekayaan perusahaan-perusahaan multinasional—General Motors pada tahun 1997 telah mencapai US\$ 164 milyar—sementara GDP Norwegia mencapai US\$ 153 milyar, dan GDP Indonesia US\$ 52,3 milyar. Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut, oleh Adam Smith diilustrasikan dengan sangat jelas: “Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan ia kejar adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat (*the invisible hands*) untuk mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti suatu yang lebih buruk dari masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kepentingan publik”. Premis ini di kemukakan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* pendahuluan dan catatan pinggir oleh Edwin Cannan, New

York: The Modern Library, 1973. Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah “*a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned*”. (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat). Jorge Larrain memahami kapitalisme dengan menghadirkan paham komunisme. Ia mengemukakan “kapitalisme dicirikan oleh dominasi obyek atas subyek, modal atas pekerja, kondisi produksi atas produsen, buruh mati atas buruh hidup”. Bahkan menurut Karl Marx kapitalisme adalah hasil dari praktek reproduksi manusia.

Denis Goulet dalam bukunya *The Cruel Choice* (1973) melihat keterbelakangan (underdevelopment) tidak semata-mata sebagai kemelaratan dan pendapatan yang rendah. Underdevelopment merupakan bentuk dehumanisasi, karenanya untuk dapat menghayatinya, orang harus memahami alam pikiran keterbelakangan tadi. Bagi Goulet, pembangunan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kemanusiaan. Karenanya tolok ukur keberhasilan pembangunan menurutnya adalah, life sustenance, self esteem, dan liberation. Alberto Guerreiro Ramos (1976) melihat terjadinya kecenderungan pembangunan nasional untuk menumbuhkan dominasi manusia oleh enclave pasar, pada hakekatnya telah menumbuhkan proses uni-dimensionalisasi kehidupan manusia menjadi makhluk yang hanya peka terhadap rangsangan-rangsangan yang ditumbuhkan oleh mekanisme pasar. Oleh Karena itu upaya untuk membebaskan manusia dari dominasi pasar, Ramos mengidealkan sebuah masyarakat yang ia sebut sebagai masyarakat isonomi, dimana pasar hanya merupakan salah satu enclave dalam realita sosial yang bersifat multi-sentrik; sedangkan individu hanyalah secara kebetulan bersifat sebagai pemaksimum manfaat.

David Mc Clelland dalam bukunya *The Achieving Society* (1963) menunjuk faktor mikro individual dalam mencari penyebab keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Faktor mikro individual tadi adalah faktor internal psikologis yang disebutnya sebagai “achievement motivation” atau N-ach. Alex Inkeles menyatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan pembangunan diakibatkan oleh faktor mikro atau psikologi individual yang berproses ke arah modernitas melalui transformasi karakteristik dari pribadi tradisional ke pribadi modern sebagai akibat proses belajar dari lingkungan eksistensi dan pengalaman hidup.

Daniel Lerner dalam hasil laporan penelitian yang ditulis dalam buku *The Passing of Traditional Society* (1968) melihat bahwa proses modernisasi sebagai problem kemanusiaan yang memerlukan transformasi yang sistematis terhadap gaya hidup seseorang. Modernisasi dipandang sebagai pergerakan atau pergeseran dari masyarakat non-participant yang ditandai dengan sempitnya cakrawala masyarakat dan ideologi nasional, menuju masyarakat partisipan dimana public affairs yang melintasi batas lokal dibuat oleh anggota masyarakat.

Berangkat dari perdebatan diatas, sudah seharusnya bagi insan muda eksponen intelektual mahasiswa—menjadi bagian dari perubahan akan realitas sosial.

Dus, Dinamika politik untuk membangun masyarakat yang demokratis harus dibarengi dengan suatu upaya-upaya yang sistematis untuk membangun sistem sosial – politik dan nilai-nilai yang demokratis. Upaya membangun nilai demokrasi harus melewati tiga tahap. *Pertama*, pengembangan institusi yang demokratis. *Kedua*, menciptakan kondisi sosial dan individu-individu yang mendukung terwujudnya demokrasi. *Ketiga*, mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis.

Organisasi masyarakat sipil (civil society) merupakan salah satu institusi/lembaga yang memiliki visi dan orientasi untuk membangun dan mempertegas tahapan nilai demokrasi Agar visi yang ditegaskan oleh institusi/lembaga dan nilai yang hendak dicapai sungguh menjadi orientasi utama dalam masyarakat sipil maka dibutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan demokratis yang mampu menggerakkan individu dan masyarakat sipil untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan penegakkan demokrasi sehingga berpengaruh pada sistem sosial dan politik yang lebih adil. Di tingkat masing-masing individu juga dibutuhkan kepemimpinan diri yang visioner agar seluruh aktivitasnya digerakkan oleh motivasi pribadi yang kuat dan mendalam.

Baiklah, peras otak anda untuk bisa memahami apa yang akan saya utarakan pada pengantar buku panduan ini! Sepanjang beberapa dekade imperialisme telah menjadi bahan perdebatan serius diantara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm dan Vladimir Lenin adalah diantara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang meneorisasikan imperialisme. Seorang penggerak revolusi Rusia, Vladimir Ilyich mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme.

Tentu dari pemaparan diatas seharusnya kita menjadi berfikir bahwa mata pisau imperealisme akan terus menancap dan menggoreskan luka sejarah revolusi sosial, dimana akan tertumpah darah dari masyarakat tertindas. Adalah sebuah keniscayaan bahwa kapitalisme-imperealisme yang menancap dibanyak otak kaum borjuis akan terus mewabah menjadi penyakit sosial, dimana keuntungan individu dengan *menegasikan* kepentingan masyarakat selalu menjadi kepentingan utama. Akibat dari pergulatan sosialisme dan kapitalisme timbullah masyarakat miskin yang membutuhkan peranan manusia yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan sosial.

Apa yang hendak kita lakukan adalah melawan kelas penindas! banyak para pencibir tolol yang tidak faham: kata mereka tidak mungkin menghilangkan kelas! ini ada statement tanpa dasar dan penalaran ilmiah. Dalam perspektif filsafat sosial yang harus dihilangkan adalah hakekat penindasan itu, spirit revolusi sosialis adalah bagaimana sebuah gerakan sosial mampu mengembalikan tatanan sosial masyarakat pada posisi egalitarianisme. Aksi Nyata, Analisis Sosial dan Gerakan Sosial sebagai sebuah pilihan gerak akan menghasilkan nilai yang berarti jika diiringi dengan kebulatan tekad bahwa sejauh mana manusia bisa memberi manfaat pada orang lain. Lawan penindasan!

Maret 2014.

*Ponpes Al-Madaniyyah As-Salafiyyah Cilacap.*

**Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

### GRAND-DESIGN & ALUR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH ANALISIS SOSIAL (SAS)

Sekolah Analisis Sosial (SAS) ini disesuaikan dengan kerangka paradigma kritis yang berimplikasi pada pendekatan metode-metode pembelajaran andragogi. Konsep dan teknik pelatihan yang dikembangkan merupakan perpaduan dengan model pembelajaran experiential learning. Desain pembelajaran dibawah ini dimaksudkan sebagai acuan proses atau alur pola pikir dalam Sekolah Analisis Sosial (SAS) yang disusun sebagai berikut:

SESI	MATERI 01-16	DESKRIPSI PROSES PEMBELAJARAN	METODE BELAJAR
<b>Pra-Pelatihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MENGAWALI PELATIHAN DENGAN BINA SUASANA</li> <li>KONTRAK BELAJAR DAN NEED ASSECEMENT</li> <li>APPERSEPSI MATERI DAN ISSUE STRATEGIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk menunjang proses pembelajaran yang partisipatoris peserta perlu mengenal satu dengan yang lain. Maka sebelum proses pemebelajaran dimulai peserta perlu tahu kepribadian masing-masing peserta dengan berbagai metode atau permainan perkenalan.</li> <li>Keberhasilan pelatihan ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh peserta terlibat, dan keterlibatan dipicu oleh excitement. Sessi ini merangsang keterlibatan peserta belajar melalui proses pembelajaran andragogy melalui berbagai aktivitas yang hidup dan partisipatif.</li> <li>Peserta mendengarkan presentasi materi kemudian melakukan sharing idea dengan pemateri. Peserta diharapkan mampu menyerap materi dan menyerap nilai-nilai pengetahuan sebagai kerangka kritik dan bertindak di ranah sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brainstorming</li> <li>Diskusi Kelompok</li> <li>Presentasi</li> </ul>
<b>SESI 01</b>	<b>Materi 01: PARADIGMA ILMU-ILMU SOSIAL &amp; PERUBAHAN SOSIAL</b> <b>Materi 02: DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA</b>		
	<b>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD):</b> <i>Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peserta menganalisis dinamika perubahan sosial Indonesia, dengan menggunakan pemetaan paradigma sosial yang diuraikan oleh salah seorang penganut mazhab Frankfurt, terutama Jurgen Habermas. 1) Paradigma <i>'instrumental'/ paradigma positivismel/ instrumental knowledge</i>, 2) Paradigma <i>interpretative/hermeneutic knowledge</i>, 3) Paradigma kritik <i>/critical-emancipatory knowledge</i>.</li> <li>Peserta menganalisis dinamika perubahan sosial Indonesia, dengan menggunakan kerangka paradigma sosiologi: 1) Paradigma Fungsionalis, 2) Paradigma Interpretatif (Fenomenologi), 3) Paradigma Humanis Radikal, 4) Paradigma Strukturalis Radikal.</li> <li>Peserta melakukan analisis peta kesadaran masyarakat, dengan pendekatan peta kesadaran Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi: Peta Kesadaran Freire: 1) Kesadaran Magis (<i>magical consciousnesses</i>), 2) Kesadaran Naif (<i>naïval consciousnesses</i>) dan 3) Kesadaran Kritis (<i>critical consciousness</i>).</li> <li>Peserta menganalisis dinamika perubahan sosial Indonesia, dengan menggunakan tiga paradigma menurut Ritzer, yaitu: 1) Paradigma Fakta Sosial, 2) Paradigma Definisi Sosial, dan 3) Paradigma Pertukaran Sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brainstorming</li> <li>Studi Kasus</li> <li>Diskusi Kelompok</li> <li>Presentasi</li> </ul>



SESI 02	<b>Materi 03: PROTES SOSIAL, REFORMASI POLITIK DAN GERAKAN SOSIAL</b> <b>Materi 04: STRATEGI GERAKAN SOSIAL: MEMBEDAH RELASI NEGARA &amp; MASYARAKAT</b>		
	<p><i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Definisi Perubahan Sosial, Tingkat Analisis Perubahan Sosial, Perspektif Teori Perubahan Sosial</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Mekanisme Perubahan Sosial, Pola Perubahan Sosial, Komponen &amp; Dimensi Perubahan Sosial, Aspek Multidimensional/ Hubungan Sosiokultural Dalam Perubahan Sosial</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Jenis Proses Sosial [Tipologi], Hasil Akhir Proses Sosial, Penyebab Perubahan Sosial Menurut Penganut Determinisme Sosial, Tingkatan proses sosial.</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali tipe aksi: protes social, gerakan social, revolusi social.</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali awal dari terbentuknya suatu gerakan sosial, yang selanjutnya dapat ditahapkan sebagai berikut (Dawson, Gettys 1934) : 1) <i>Unrest</i>, (muncul kekacauan, sikap frustrasi, merasakan ketidakadilan), 2) <i>Excitement</i>, ( menuju pada sublimasi, keinginan yang mengebu untuk bertindak menentang), 3) <i>Formalization</i>, (perumusan konsep dan ideologi perjuangan), 4) <i>Institutionalization</i>, (pelembagaan / organisasi pergerakan), 5) <i>Dissolution</i> (akhir dari tujuan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brainstorming</li> <li>▪ Studi Kasus</li> <li>▪ Diskusi Kelompok</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>
SESI 03	<b>Materi 05: MARXISME, IDEOLOGI KAPITALISME, SOSIALISME, KOMUNISME</b> <b>Materi 06: KERANGKA PIKIR REVOLUSI SOSIAL &amp; REVOLUSI POLITIK</b>		
	<p><i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali 3 komponen dasar marxisme: (1) Filsafat Materialisme, (2) Kritik Ekonomi Politik, (3) Doktrin Sosialisme-Komunisme dan Perjuangan Kelas. Serta menguraikan Tentang Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis.</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Penalaran tentang Ideologi Kapitalisme, Ideologi Sosialisme dan Ideologi Komunisme.</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Komponen dasar Revolusi dan menganalisis perbedaan &amp; persamaan Revolusi Sosial dan Politik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brainstorming</li> <li>▪ Studi Kasus</li> <li>▪ Diskusi Kelompok</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>
SESI 04	<b>Materi 07: ANALISIS GEO-EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK</b> <b>Materi 08: PETA DAN LANGKAH PRAXIS ANALISIS SOSIAL</b>		
	<p><i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta menganalisis dinamika perubahan sosial Indonesia, pada level ekonomi, social dan politik.</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Signifikansi Analisa Sosial, Orientasi Analisa Sosial, Prinsip-Prinsip Analisa Sosial, Tahap-Tahap Analisa Sosial, Model Telaah dalam Analisa Sosial.</li> <li>▪ Peserta merumuskan langkah pada 3 tahap:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brainstorming</li> <li>▪ Studi Kasus</li> <li>▪ Diskusi Kelompok</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap menetapkan posisi, orientasi: pada intinya dalam tahap ini, pelaku analisa perlu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen (ideologis) dari tindakan ansos.</li> <li>2. Tahap pengumpulan dan penyusunan data: tujuan dan maksud dari tahap ini, agar analisa memiliki dasar rasionalitas yang dapat diterima akal sehat. Ujung dari pengumpulan data ini adalah suatu upaya untuk merangkai data, dan menyusunnya menjadi diskripsi tentang suatu persoalan.</li> <li>3. Tahap analisa: pada tahap ini, data yang telah terkumpul diupayakan untuk dicari atau ditemukan hubungan diantaranya.</li> </ol>	
<b>SESI 05</b>	<b>Materi 09: STUDI DASAR ADVOKASI</b> <b>Materi 10: MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK</b>		
	<i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali tahap advokasi dan tahap menyelesaikan konflik.</li> <li>▪ Peserta menganalisis kasus tertentu dan merumuskan bagaimana cara melakukan advokasi serta cara menyelesaikan konflik. Proses Manajemen Konflik</li> <li>▪ STRATEGIC PLANNING (6 LANGKAH): Peserta membuat rencana strategis proses analisis social dan rencana kerja dilapangan sesuai dengan isu yang telah ditentukan di masing-masing kelompok. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis sosial/ pemetaan issue strategis</li> <li>2. Penysadaran masyarakat</li> <li>3. Kerja pengorganisasian masyarakat</li> <li>4. Melibatkan stakeholder</li> <li>5. Data base/ sumber informasi</li> <li>6. Mobilisasi massa/ publik issue</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brainstorming</li> <li>▪ Studi Kasus</li> <li>▪ Diskusi Kelompok</li> <li>▪ Roll Playing</li> </ul>
<b>SESI 06</b>	<b>Materi 11: ANALISIS WACANA MEDIA (MEDIA DISCOURSE ANALYSIS)</b> <b>Materi 12: PARADIGMA ANALISIS WACANA MEDIA (MODEL TEUN A VAN DIJK)</b>		
	<i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Teori Wacana dan Bahasa, Memahami Makna, Media, Simbol, Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat, Pendekatan Analisis Wacana, Wacana Tulis, Teks dan Konteks, Wacana dan Ideologi, Karakteristik Analisis Wacana, Kerangka Analisis Wacana</li> <li>▪ Peserta menganalisis Media Cetak dengan Elemen-elemen Struktur Wacana, sbb: <b>Tematik, Skematik, Semantik, Sintaksis, Stilistik, Retoris.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasus Media</li> <li>▪ Diskusi Kelompok</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>
<b>SESI 07</b>	<b>Materi 13: TEHNIK AGITASI, ORASI &amp; PROPAGANDA</b> <b>Materi 14: TEHNIK DAN MANAJEMEN AKSI MASSA</b>		
	<i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Istilah agitasi, propaganda, dan retorika atau orang sering menyebutnya AGITOP.</li> <li>▪ Peserta menganalisis dan menguraikan kembali Dorongan terpokok yang melahirkan aksi massa adalah keinginan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brainstorming</li> <li>▪ Studi Kasus</li> <li>▪ Diskusi Kelompok</li> <li>▪ Simulasi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>massa akan perubahan.</li> <li>Peserta melakukan simulasi pembacaan issue, membuat panitia aksi dan perangkat aksi.</li> </ul>	
<b>SESI 08</b>	<b>Materi 15: TEHNIK LOBBY DAN NEGOSIASI</b> <b>Materi 16: PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CO)</b>		
	<i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Theoretical Review &amp; Case Study Emancipatory</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peserta menganalisis dan menguraikan kembali teknik lobby dan negosiasi serta pengorganisasian masyarakat.</li> <li>Peserta merumuskan langkah strategis cara pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kasus tertentu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brainstorming</li> <li>Studi Kasus</li> <li>Diskusi Kelompok</li> <li>Simulasi</li> </ul>
<b>SESI 09</b>	Rencana Strategis 01: PERUMUSAN KERANGKA ANALISIS SOSIAL & ADVOKASI Rencana Strategis 02: STRATEGIC PLANNING & ACTION PLANN	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mengelola perubahan dengan perumusan issue strategis:</b> Peserta melakukan diskusi kelompok dengan metode brainstorming, peserta merumuskan dan melakukan pembacaan issue strategis yang akan diperjuangkan.</li> <li><b>Kerangka kerja analisis sosial dan advokasi:</b> Peserta mendiskusikan suatu kasus kemudian dianalisis menggunakan peta analisis social. Peserta juga mendiskusikan suatu kasus untuk mengidentifikasi unsur-unsur advokasi dan merangkumnya ke dalam alur. Alur pemahaman peserta kemudian dikomparasikan dengan kerangka kerja Alur Advokasi untuk melengkapi pemahaman peserta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi kelompok</li> </ul>
<b>SESI 10</b>	Rencana Strategis 03: PRAKTIK ANALISIS SOSIAL & ADVOKASI DI LAPANGAN Rencana Strategis 04: PRAKTIK PENGORGANISIRAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peserta melakukan proses analisis social sesuai dengan kerangka teori yang sudah dipelajari dengan narasumber.</li> <li>Peserta melakukan praktek pengorganisasian masyarakat sesuai dengan isu yang telah ditentukan di masing-masing kelompok.</li> <li><b>Langkah taktis advokasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan Adanya Kepemimpinan Organisasi Yang Kuat</li> <li>Melakukan Investigasi Isu Yang Mendesak</li> <li>Pembacaan, analisis data atau isu/ pencarian dan penelitian Fakta</li> <li>Merumuskan Strategi Dinamis <ul style="list-style-type: none"> <li>Statement misi (<i>Mission statement</i>)</li> <li>Tujuan dan sasaran advokasi</li> <li>Rancangan strategi dan tindakan</li> <li>Rencana aksi (<i>plan of actions</i>)</li> </ul> </li> <li>Mencari Dukungan Yang Besar Dari Konstituen Atau Kelompok Pendukung</li> <li>Mobilisasi Dan Aksi Yang Terlibat <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan pembuat keputusan</li> <li>Pertemuan para pelanggar HAM</li> <li>Interview media massa</li> <li>Public Hearing/ Public Meeting</li> <li>Parlementary Hearing</li> <li>Kesaksian Pengadilan</li> <li>Pengajuan Petisi</li> <li>Boikot, Pawai Protes, Aksi Massa</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turun lapangan</li> </ul>

<p><b>SESI 11</b></p>	<p>Rencana Strategis 05: REVIEW &amp; PRESENTASI HASIL ANSOS &amp; PRAKTIK LAPANGAN</p> <p>Rencana Strategis 06: RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RTKL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pengemasan issue dengan framing dan reframing</b> Prinsip pengemasan media diterapkan secara langsung dengan menganalisis wacana media, dengan cara mempelajari dengan framing analisis wacana media</li> <li>▪ <b>Advokasi Media</b> Media massa memiliki kekuatan menembus batas yang luar biasa. Mengadvokasi media berarti memiliki chanel dan transmisi pesan yang memainkan peran untuk mempengaruhi keberhasilan persuasi.</li> <li>▪ <b>Strategi Hearing</b> Dengar pendapat adalah suatu aktivitas advokasi yang menuntut persiapan yang tinggi. Sessi ini memastikan peserta memahami peran masing-masing dan aturan-aturan yang berlaku.</li> <li>▪ <b>Simulasi/ Praktek hearing dengan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Stakeholder terkait.</b> Peserta mempelajari pengalaman dengan melakukan dengar pendapat dengan parlemen, sehingga peserta dapat mengidentifikasi persoalan dengan lebih komprehensif terkait dengan otoritas, tugas, wewenang, untung-rugi dari berbagai stakeholder yang terkait dengan issue yang akan dianalisis dan diadvokasi.</li> <li>▪ <b>Tentukan Segmentasi Gerak/ Pilihan Issue-Kasus Strategis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Langkah strategis 1: _____</li> <li>▪ Langkah strategis 2: _____</li> <li>▪ Langkah strategis 3: _____</li> <li>▪ Langkah strategis 4: _____</li> <li>▪ Langkah strategis 5: _____</li> </ul> </li> <li>▪ Peserta membuat rekapitulasi proses analisis social dan advokasi partisipatif ini, dengan menyempurkanakan proses atau alur pikir dan tindakan di lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Sharing idea</li> </ul>
-----------------------	---	---	--

KETERANGAN:
▪ <b>Tematik:</b> Informasi yang paling penting atau inti pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator.
▪ <b>Skematik:</b> dalam konteks penyajian berita ada dua kategori skema besar, 1) <i>Summary</i> , yang ditandai judul ( <i>head line</i> ) & teras berita ( <i>lead</i> ), 2) <i>Story</i> , isi berita secara keseluruhan.
▪ <b>Semantik:</b> makna tertentu dalam suatu bangunan teks, dimensi teks, presupposition, makna yang implisit atau eksplisit, makna yang sengaja disembunyikan. Struktur wacana juga bisa menggiring kearah tertentu dari suatu peristiwa.
▪ <b>Sintaksis:</b> seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan frase. Dianalisis dari koherensi, bentuk kalimat, kata ganti.
▪ <b>Stilistik:</b> gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan maksudnya. Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Pilihan <i>leksikal</i> atau <i>diksi</i> pada dasarnya menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atau frase atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.
▪ <b>Retoris:</b> gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Misalnya <i>hiperbolik</i> (pemakaian kata yang berlebihan), <i>repetisi</i> (pengulangan), <i>aliterasi</i> (pemakaian kata seperti sajak), <i>interaksi</i> (bagaimana penulis menempatkan diri di antara khalayak), <i>metafora</i> (makna kiasan) <i>visual image</i> (membuat anggapan).

NB:

- PRESENTASI MASING-MASING SESI 01 – 08 MAX. 3 JAM
- FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MAX. 1,5 JAM
- UNTUK SESI 09, 10, 11 PESERTA TERJUN KE LAPANGAN, MEMBUAT MIND-MAP & RENCANA AKSI (ACTION PLAN).
- SETIAP PESERTA DARI MASING-MASING DAERAH HARUS MENENTUKAN SEGMENTASI GERAKAN SOSIAL.

## **Hand-Out 01** **PARADIGMA ILMU-ILMU SOSIAL & PERUBAHAN SOSIAL**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **RETHINKING TEORI PERUBAHAN SOSIAL<sup>1</sup>**

#### **Prawacana**

Sudah lama dirasakan adanya jurang yang memisahkan antara dunia teoretis dari kalangan akademisi yang membicarakan teori perubahan sosial maupun paradigma pembangunan dan dunia para praktisi perubahan sosial untuk keadilan sosial (*social justice*) yang bekerja di dalam berbagai aksi maupun proyek perubahan sosial bersama kelompok-kelompok marginal seperti kaum buruh, para petani dan nelayan, perempuan miskin di pedesaan, maupun anak jalanan serta masyarakat adat di berbagai daerah. Terdorong oleh keinginan untuk menjembatani dialog antara teori dan praktik perubahan sosial di akar rumput, maka suatu refleksi kritis ini disistematisasikan dan dinarasikan sebagai bahan yang memfasilitasi terjadinya perenungan dan pembangkitan kesadaran kritis para teoritis maupun praktisi lapangan. Sebagai suatu refleksi, tulisan ini tidak berpretensi menjadi acuan teoretik mengenai teori perubahan sosial. Tulisan ini ditulis karena didorong oleh keinginan untuk membuka ruang dialog kritik ideologi terhadap proses dan teori perubahan sosial, bukan ditulis dari hasil studi akademik dari kalangan universitas, melainkan lebih banyak refleksi dari aksi dan dialog yang panjang dari bahan bacaan yang diperoleh secara tidak sistematis maupun hasil refleksi dari keterlibatan dengan berbagai program bersama rakyat di akar rumput di dunia selatan.

Meskipun demikian, tulisan ini memang tidak dimaksud untuk memberikan uraian teoretik tentang teori perubahan sosial dan pembangunan. Akan tetapi, lebih didasarkan pada refleksi terhadap pengalaman dan pengamatan penulis serta sejumlah aktivis pergerakan sosial di Indonesia, untuk merefleksikan kaitan teori-teori perubahan sosial dan praktik lapangan program-program pemberdayaan masyarakat serta dorongan untuk menghentikan kecenderungan ketimpangan dalam dunia teori sosial dalam pengertian semakin kuatnya monopoli informasi dan pengetahuan oleh kalangan akademisi elitis, yakni mereka yang mempunyai kesempatan luas untuk membaca, membahas, dan mendiskusikan paradigma dan berbagai teori pembangunan di dalam lingkungan universitas, sementara mereka yang bekerja di masyarakat, yakni aktivis sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan yang terjun ke masyarakat untuk melakukan aksi sosial, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai teori tersebut di universitas. Dengan demikian, tulisan ini ditulis dengan keinginan ganda. Selain menyediakan bahan bacaan untuk khalayak umum dan aktivis lapangan tentang paradigma dan teori pembangunan, juga didorong oleh suatu semangat untuk merobohkan anggapan bahwa urusan ideologi, paradigma, dan teori perubahan sosial hanya patut dan khusus dibaca, dipahami, dan dikontrol oleh kalangan akademisi dan birokrasi, dan tabu untuk dibaca oleh kalangan masyarakat biasa. Dengan kata lain, tulisan ini melakukan demistifikasi terhadap bahan kajian ilmiah untuk menjembatani jarak antara para aktivis lapangan dan berbagai paradigma dan teori ilmu sosial di universitas.

Selain itu, semangat penulisan tulisan ini juga didorong oleh adanya gejala timbulnya kerancuan teoretik dan paradigmatis dari banyak aktivis lapangan. Yang dimaksudkan dengan kerancuan teoretik ini adalah persoalan yang dihadapi oleh mereka yang bekerja untuk melakukan perubahan sosial di lapangan, yakni para pekerja sosial masyarakat, baik kalangan aktivis lapangan ornop maupun tokoh keagamaan, yang tanpa disadari telah menggunakan dasar teoretik dan visi ideologis mengenai suatu perubahan sosial yang menjadi landasan dan aktivitas praktis sehari-hari, tetapi sesungguhnya hakekat teori yang sedang dipraktikkannya tersebut secara teoretik bertolak belakang dengan tujuan yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, tuntutan akan perlunya pema-

---

<sup>1</sup> Sebuah pengantar diadaptasi dan diulas kembali dari, Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001) h. 1-16.

haman mengenai paradigma dan berbagai teori perubahan sosial yang mereka jadikan pijakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menangani masalah-masalah kemasyarakatan semakin meningkat. Lemahnya visi ideologi dan teori mengenai perubahan sosial ini juga mempengaruhi metodologi yang diterapkan, seperti bagaimana banyak organisasi sosial menempatkan masyarakat sebagai obyek, padahal sementara itu bercita-cita melakukan pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya dalam merencanakan, menyusun, dan menetapkan program pengembangan masyarakat, maupun dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Kegiatannya banyak mencerminkan anti-pemberdayaan masyarakat. Ketidakjelasan visi dan teori ini tidak saja telah melahirkan inkonsistensi antara cita-cita dan teori yang digunakan, tetapi juga telah berakibat menghambat peran atau partisipasi masyarakat dalam perubahan sosial, yakni peranan masyarakat sipil (*civil society*) sebagai pelaku sejarah utama dalam upaya demokratisasi ekonomi, politik, budaya, gender, serta aspek sosial lainnya.

Gejala kerancuan teoretik ini terlihat dalam bagaimana para aktivis sosial di lapangan mendefinisikan masalah kemasyarakatan dan memandang teori '*mainstream*' perubahan sosial pembangunan dewasa ini. Namun demikian, sesungguhnya di kalangan aktivis sosial telah timbul kesadaran akan perlunya secara kritis mempertanyakan kembali paradigma, teori, serta implikasinya terhadap metodologi dan teknik lapangan. Kegairahan di kalangan aktivis sosial untuk memahami berbagai teori politik ekonomi dan perubahan sosial dalam pendidikan politik dan advokasi mendorong penulis untuk segera merampungkan tulisan teori perubahan sosial ini.

Namun demikian, secara garis besar motivasi utama penyusunan tulisan ini didorong untuk memenuhi kebutuhan bacaan teoretis dan memfasilitasi perdebatan teoretik bagi mereka yang bekerja di lapangan. Secara umum tulisan ini merupakan pengkajian teoretis dan mendasar, membahas kerangka ideologi, paradigma, dan teori tentang perubahan sosial, yang diharapkan mampu memacu pembaca untuk merefleksikan kegiatan lapangan mereka dengan berbagai ideologi dan aliran teori perubahan sosial. Selain itu tulisan ini juga merupakan refleksi kritik terhadap posisi teoretik berbagai teori yang dominan tentang perubahan sosial dan pembangunan. Kritik ini diharapkan akan memberikan bekal teoretik bagi pembaca, khususnya yang terlibat dalam proses perubahan sosial dan yang sedang memikirkan paradigma alternatif perubahan sosial. Terakhir, secara khusus tulisan ini disajikan bagi aktivis lapangan untuk mendorong mereka melakukan refleksi dan dialog tentang berbagai teori perubahan sosial sebagai bagian dari aktivitas lapangan sehari-hari.

### **Sebuah Refleksi Teoretik bagi Aktivis Sosial**

Maksud terutama penyusunan tulisan ini adalah dalam rangka memfasilitasi para praktisi untuk melakukan refleksi terhadap aksi yang selama ini mereka lakukan di tingkat akar rumput. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa seorang aktivis lapangan atau praktisi perubahan sosial dalam memperjuangkan "*social justice*", politik dan ekonomi yang demokratis, serta pengembangan masyarakat menuju masyarakat adil sejahtera sangat membutuhkan teori sebagai acuan, refleksi, maupun motivasi. Tugas utama suatu teori sosial pada dasarnya tidak sekedar memberi makna terhadap suatu realitas sosial sehingga memungkinkan lahirnya kesadaran dan pemahaman terhadap suatu realitas sosial. Akan tetapi, teori sosial juga bertugas untuk "*mengubah realitas sosial*" yang dianggapnya bermasalah dan tidak adil sehingga sampai sekarang masalah tersebut masih diperdebatkan. Tanpa disadari setiap pekerja dan aktivis sosial seperti guru, aktivis sosial, wartawan, dan pemimpin agama terlibat dalam pertarungan teoretis secara nyata. Pertarungan tersebut berupa penerapan teori dalam kegiatan mereka sehari-hari dan tanpa disadari teori sosial juga memiliki dimensi penerapan. Dengan demikian, penulis berpendirian bahwa tugas ilmu sosial tidak sekedar mencoba memahami suatu realitas sosial, tetapi juga mengubahnya.

Berbagai teori sosial, ekonomi, politik, dan budaya lahir tidak saja dalam rangka pertarungan memberi makna terhadap suatu realitas sosial, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sosial karena pada dasarnya perubahan sosial dibangun di atas pemahaman teoretik dan suatu teori sangat berpengaruh dalam membentuk suatu program aksi di lapangan. Meskipun pada realitas sosial yang sama, dua teori selalu memberi makna berbeda atau bahkan bertolak belakang dan

akibatnya akan membawa perubahan sosial secara berbeda pula. Misalnya saja dalam melihat hubungan ‘buruh-majikan’ satu teori melihatnya sebagai hubungan yang ‘saling menguntungkan’, tetapi teori lain justru menganggapnya sebagai hubungan eksploitasi. Atas asumsi teoretik ini, bagaimana suatu perubahan hubungan masa depan antara buruh dan majikan akan diproyeksikan. “*Rekayasa sosial*” yang oleh satu teori dianggap sebagai keharusan pendekatan, tetapi oleh teori lain justru dianggap sebagai suatu bentuk dominasi dan ‘penindasan’ dari ilmuwan sosial terhadap masyarakat. Perbedaan asumsi tersebut tidak saja mempengaruhi berbagai metode penelitian dan pendidikan sosial, tetapi juga membawa perbedaan visi dan orientasi hubungan antara ilmuwan sosial dan masyarakat dalam proses perubahan sosial. Dengan demikian, teori sosial membantu aktivis lapangan ataupun pekerja sosial untuk menyadari apa yang mereka lakukan serta kemana dan model apa suatu perubahan sosial akan dituju. Tanpa pemahaman akan teori ilmu sosial, dalam menjalankan program sosial ekonomi di masyarakat, seorang aktivis tidak saja bekerja tanpa visi dan orientasi, tetapi juga bisa melakukan kegiatan yang sesungguhnya bertentangan dengan keyakinannya. Seorang aktivis sosial akan selalu dihadapkan pada pilihan untuk memihak antara *status quo* dan perubahan; antara pertumbuhan dan keadilan; antara rekayasa sosial dan partisipasi, antara tirani dan demokrasi, dan seterusnya. Dalam kaitan itulah teori sangat membantu memahami relasi sosial secara kritis.

Dalam praktik lapangan, dewasa ini terdapat dua paham teori sosial yang kontradiktif yang melibatkan setiap pekerja sosial, yakni antara teori-teori sosial yang digolongkan pada “*teori sosial regulasi*” berhadapan dengan *teori-teori sosial emansipatori* atau juga yang dikenal dengan kritis. Teori sosial regulasi yang bersemboyan bahwa ilmu sosial harus mengabdikan pada stabilitas, pertumbuhan, dan pembangunan, bersifat objektif serta secara politik netral dan bebas nilai. Dalam pandangan ini teori sosial dikontrol oleh teorisi sedangkan masyarakat dilihat hanya sebagai obyek pembangunan mereka. Pandangan teori sosial ini berhasil memunculkan kaidah ‘rekayasa sosial’ yang menempatkan masyarakat sebagai obyek para ahli, direncanakan, diarahkan, dan dibina untuk berpartisipasi menurut selera yang mengontrol. Teori sosial telah menciptakan birokrasinya: di mana teorisi memiliki otoritas kebenaran untuk mengarahkan praktisi dan masyarakat. Dalam hubungan ini aktivis sosial lapangan dan masyarakat hanya diletakkan sebagai pekerja sosial tanpa kesadaran ideologis dan teoretis secara kritis.

Sementara itu, bagi aliran kritis tugas ilmu sosial justru melakukan penyadaran kritis masyarakat terhadap sistem dan struktur sosial ‘*dehumanisasi*’ yang membunuh kemanusiaan. Gramsci menyebut proses ini sebagai upaya counter hegemoni. Proses dehumanisasi tersebut terselenggara melalui mekanisme kekerasan, baik yang fisik dan dipaksakan, maupun melalui cara penjinakan yang halus, yang keduanya bersifat struktural dan sistemik. Artinya, kekerasan dehumanisasi tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali. Kemiskinan struktural misalnya, pada dasarnya adalah suatu bentuk kekerasan yang memerlukan analisis untuk menyadarinya. Bahkan, kekerasan sebagian besar terselenggara melalui proses hegemoni, yakni cara pandang, cara berpikir, ideologi, kebudayaan, bahkan ‘*selera*’ golongan yang mendominasi telah dipengaruhi dan diterima oleh golongan yang di dominasi. Dengan begitu kegiatan sosial bukanlah arena netral dan apolitik. Kegiatan sosial tidaklah berada dalam ruang dan masa yang steril, tetapi merupakan kegiatan politik menghadapi sistem dan struktur yang bersifat hegemonik.

Bagi paham kritis, dalam dunia yang secara struktural tidak adil, ilmu sosial yang bertindak tidak memihak, netral, objektif, serta berjarak atau *detachment* adalah suatu bentuk sikap ketidakadilan tersendiri, atau paling tidak ikut melanggengkan ketidakadilan. Paham ini menolak objektivitas dan netralitas ilmu sosial dengan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dan tidak mungkin pernah netral. Oleh karena itu, teori sosial haruslah subjektif, memihak dan penuh atau sarat dengan nilai-nilai demi kepentingan politik dan ekonomi golongan tertentu. Teori ilmu-sosial, termasuk juga paham kebudayaan dan pandangan keagamaan dalam paradigma kritis ini selalu memihak dan mengabdikan demi kepentingan tertentu. Masalahnya, kepada golongan yang mana suatu teori sosial harus mengabdikan. Itulah maknanya, dalam pandangan ini, teori sosial dan praktik pengabdian masyarakat yang netral dan objektif, sementara masyarakat berada pada suatu

sistem dan struktur sosial yang tidak adil dan dalam proses '*dehumanisasi*', ilmuwan dan pekerja sosial dianggap menjadi tak bermoral karena ikut melanggengkan ketidakadilan.

Sesungguhnya sudah cukup lama diperdebatkan mengenai masalah objektivitas, hakikat, dan tugas ilmu sosial. Apakah teori sosial dan aktivis sosial harus netral, tidak memihak, ataukah harus mengabdikan demi kepentingan tertentu seperti golongan lemah. Namun, dalam perspektif teori sosial kritis, ilmu sosial tidaklah sekedar diabdikan demi kepentingan golongan lemah dan tertindas, tetapi lebih mendasar daripada itu, teori sosial haruslah berperan dalam proses pembangkitan kesadaran kritis, baik yang tertindas maupun yang menindas, terhadap sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Teori sosial harus mengabdikan pada proses transformasi sosial yakni terciptanya hubungan (*struktur*) yang baru dan lebih baik. Dengan kata lain, dalam perspektif teori sosial kritis, ilmu sosial tidaklah sekedar memihak kepada yang tertindas dan yang termarginalisasi belaka, tetapi lebih berusaha menciptakan ruang yang akan menumbuhkan kesadaran, baik bagi golongan menindas dan yang tertindas untuk menyadari bahwa mereka telah berada dalam sistem sosial yang tidak adil. Teori sosial harus membangkitkan kesadaran kritis, baik bagi yang mendominasi maupun yang didominasi, untuk perubahan menuju terciptanya suatu hubungan (*struktur*) dan sistem sosial yang secara mendasar lebih baik, yakni suatu sistem masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa penindasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, tugas teori sosial adalah memanusiakan kembali manusia yang telah lama mengalami dehumanisasi, baik yang menindas maupun yang ditindas.

### **Teori Perubahan Sosial dan Teori Pembangunan: Suatu Penjelasan**

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, '*pembangunan*' disejajarkan dengan kata "*perubahan sosial*". Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial.

Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata '*pembangunan*' itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Dalam pandangan yang disebut terakhir ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu "aliran" dan keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai perubahan sosial. Dengan demikian, dalam pengertian yang kedua ini pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan sosial. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia, ataupun teori lain. Oleh karena itulah banyak orang menamakan teori pembangunan sebagai pembangunanisme (*developmentalism*). Dengan demikian pengertian seperti ini menolak teori-teori, seperti teori pembangunan berbasis rakyat, atau teori integrated rural development, atau bahkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan merupakan alternatif dari pembangunanisme, melainkan variasi-variasi lain dari ideologi pembangunanisme.

Oleh karena itu, tulisan ini pada dasarnya lebih memfokuskan pembahasan mengenai seluk-beluk paradigma dan teori perubahan sosial, yakni teori tentang bagaimana suatu masyarakat berubah serta dinamika dan proses sekitar perubahan tersebut. Dengan demikian, teori dan kritik terhadap pembangunan yang banyak dibahas dalam tulisan ini nanti, dalam hubungan ini dipahami dan diletakkan sebagai salah satu ideologi dan teori serta salah satu bentuk dari teori perubahan sosial. Dengan kata lain, salah satu dari teori perubahan sosial yang akan dibahas adalah teori pembangunan. Sebagai salah satu dari berbagai teori perubahan sosial, teori pembangunan, dewasa ini telah menjadi mainstream dan teori yang paling dominan mengenai perubahan sosial. Pembangunan sebagai salah satu teori perubahan sosial adalah fenomena yang luar biasa, karena



sebuah gagasan dan teori begitu mendominasi dan mempengaruhi pikiran umat manusia secara global, terutama di bagian dunia yang disebut sebagai “*dunia ketiga*”. Gagasan dan teori pembangunan, bagi banyak orang bahkan mirip ‘agama baru’ yakni menjanjikan harapan baru untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di dunia ketiga.

Istilah pembangunan atau development tersebut kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua negara, khususnya dunia ketiga, dengan setelah diterjemahkannya ke dalam bahasa dengan menggunakan kata yang sesuai dengan bahasa lokal di masing-masing negara. Di negara-negara Amerika Latin, misalnya, kata ini disamakan dengan kata *desarrollo*. Bahkan, di negara yang belum memiliki bahasa nasional seperti Filipina, misalnya, kata yang digunakan untuk melokalkan ‘*development*’ adalah dalam tiga bahasa daerah utama, yakni *pang-unlad* untuk bahasa Tagalog, sedang dalam bahasa Ilongo adalah *Pag-uswag*, dan dalam bahasa Ilocano menjadi *progreso*. Di Indonesia, kata *development* diterjemahkan dengan ‘*pembangunan*’.

Kata ‘pembangunan’ menjadi diskursus yang dominan di Indonesia erat kaitannya dengan munculnya pemerintahan orde baru. Selain sebagai semboyan mereka, kata ‘pembangunan’ juga menjadi nama bagi pemerintahan orde baru, hal itu bisa dilihat bahwa nama kabinet sejak pemerintahan orde baru selalu dikaitkan dengan kata ‘pembangunan’, meskipun kata ‘pembangunan’ sesungguhnya telah dikenal dan digunakan sejak masa orde lama. Kata pembangunan dalam konteks orde baru, sangat erat kaitannya dengan *discourse-development* yang dikembangkan oleh negara-negara Barat. Uraian berikut mencoba melakukan penyelidikan secara kritis terhadap discourse development, yang menjadi sumber dari diskursus ‘*pembangunan*’ di Indonesia. Oleh karena itu, perhatian uraian ini tidaklah mengusahakan tinjauan dari segi bahasa, tetapi mencoba menstudi politik ekonomi dalam permulaan discourse development, dan bagaimana development disebar-serapkan ke dunia ketiga, serta hubungannya dengan diskursus ‘pembangunan’ di Indonesia sejak pemerintahan militer orde baru, yakni suatu pemerintahan militer selama 32 tahun, yakni sejak militer Indonesia mengambil alih kekuasaan Presiden Sukarno tahun 1967 hingga kejatuhan rezim militer ini oleh suatu revolusi sosial tahun 1998.

Namun, jika dilihat secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya, pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam konteks, dan seringkali digunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang mempunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progres, dan modernisasi. Dari kata-kata tersebut hanya istilah perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah lebih positif. Oleh karena makna pembangunan bergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa, uraian mengenai pengertian pembangunan akan dilihat dari konteks sejarah bagaimana istilah tersebut dikembangkan.

Pertanyaan dasarnya adalah apakah konsep “pembangunan” itu adalah suatu kategori tersendiri, atau jenis dari suatu yang lebih besar. Dalam tulisan ini penulis meletakkan pembangunan sebagai suatu teori dibawah payung teori perubahan sosial. Dengan kata lain, salah satu bahasan dalam ilmu-ilmu sosial adalah masalah perubahan sosial. Banyak teori dan dimensi pendekatan perubahan sosial, di antaranya: dimensi evolusi dan revolusi sosialistik dan kapitalistik, dan dimensi-dimensi lainnya. Salah satu teori perubahan sosial tersebut adalah teori pembangunan. Lambat-laun, pembangunan sebagai teori berubah dan menjadi suatu pendekatan dan ideologi, bahkan menjadi suatu paradigma dalam perubahan sosial. Selama orde baru, bahkan pembangunan oleh para birokrat dan akademisi diperlakukan lebih dari sekedar teori perubahan sosial. Selain berhasil menjadi ideologi orde baru, pembangunan juga dinamakan kabinet selama kekuasaan orde baru dibawah presiden Suharto.

## PARADIGMA DAN PERANNYA DALAM MEMBENTUK TEORI PERUBAHAN SOSIAL<sup>2</sup>

### Prawacana

Sebelum dibahas lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya mengenai berbagai aliran ideologi dan keyakinan serta teori tentang perubahan sosial dan kritik pembangunan, maka terlebih dahulu dalam bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai apa latar belakang yang mempengaruhi terbentuknya teori-teori tersebut. Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk suatu teori adalah apa yang dikenal dengan istilah paradigma (*paradigm*). Untuk itu uraian pada bagian kedua buku ini akan memfokuskan pembahasan untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaksud dengan paradigma, mengapa dan bagaimana suatu paradigma terbentuk, serta apa pengaruh paradigma terhadap terbentuknya teori-teori perubahan sosial dan praktik pembangunan. Pembahasan mengenai masalah paradigma ini perlu dilakukan mengingat pentingnya paradigma dalam membentuk dan mempengaruhi teori maupun analisis seseorang. Pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satunya bergantung pada paradigma yang dipergunakan. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut, uraian ini akan dimulai dengan menjawab pertanyaan dasar apa sesungguhnya yang dimaksud dengan paradigma itu?

Paradigma secara sederhana dapat diartikan bagai kacamata atau alat pandang. Namun, pengertian yang lebih akademis dapat dipahami dari beberapa pemikiran yang akan diuraikan berikut. Pada dasarnya, istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Khun menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Dalam buku itu Khun menjelaskan tentang model bagaimana suatu aliran teori ilmu lahir dan berkembang menurutnya disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang lain. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori tersebut.

Selain Khun, peneliti pemikir lain seperti Patton (1975) juga memberikan pengertian paradigma yang tidak jauh dengan apa yang didefinisikan oleh Khun, yakni sebagai “*a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world*”<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, selain dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial.<sup>4</sup> Paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu realitas. Justru kekuatan sebuah paradigma terletak pada kemampuannya membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta apa metode yang kita gunakan dalam meneliti dan berbuat. Paradigma, sebaliknya, mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin kita ketahui.<sup>5</sup> Oleh karena itu, jika ada dua orang

<sup>2</sup> Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001) h. 17-43.

<sup>3</sup> Lihat: Michael Quin Patton, *Alternative Evaluation Research Paradigm*. Grand Forks: University North Dakota, 1970.

<sup>4</sup> Definisi ini meminjam uraian Popkewitz. Lihat Popkewitz, Thomas. *Paradigm and Ideology in Educational Research*. New York: Palmer Press, 1984.

<sup>5</sup> Thomas Khun (1970) dikenal orang pertama yang membuat terkenal istilah paradigma. Ia tertarik pada perkembangan dan revolusi ilmu pengetahuan, dengan menganalisis hubungan antara berbagai paradigma dan

melihat suatu realitas sosial yang sama, atau membaca ayat dari sebuah kitab suci yang sama, akan menghasilkan pandangan berbeda, menjatuhkan penilaian dan sikap yang berbeda pula. Paradigma pulalah yang akan mempengaruhi pandangan seseorang tentang apa yang “*adil dan yang tidak adil*”, bahkan paradigma mempengaruhi pandangan seseorang ataupun teori tentang baik buruknya suatu program kegiatan. Misalnya saja hubungan lelaki perempuan pada suatu masyarakat, atau hubungan antara majikan dan buruh, oleh suatu paradigma pemikiran disebutkan sebagai “*harmonis saling membantu*” dan tidak ada masalah, oleh paradigma yang lain, akan dilihat sebagai hubungan hegemonik, dominasi gender ataupun bahkan dianggap eksploitatif. Dalam hal perbedaan paradigma seperti itu, tidak relevan membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena masing-masing menggunakan alasan, nilai, semangat, dan visi yang berbeda tentang fenomena tersebut.

Oleh karena itu, dominasi suatu paradigma terhadap paradigma yang lain sesungguhnya bukanlah karena urusan “salah atau benar, yakni yang benar akan memenangkan paradigma yang lain. Ritzer (1975) mengungkapkan bahwa kemenangan satu paradigma atas paradigma yang lain lebih disebabkan karena para pendukung paradigma yang menang ini lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan (*power*) dari pengikut paradigma yang dikalahkan, dan sekali lagi bukan karena paradigma yang menang tersebut lebih benar atau ‘lebih baik dari yang dikalahkan’”.<sup>6</sup> Demikian halnya dalam memahami dipilihnya atau diterapkannya suatu aliran teori perubahan sosial maupun pembangunan juga erat kaitannya dengan kekuasaan penganut paradigma perubahan sosial yang bersangkutan untuk memenangkannya. Dengan demikian, dominasi atau berkuasanya suatu teori perubahan sosial ataupun teori pembangunan, adalah lebih karena teori tersebut yang merupakan hasil atau dibentuk oleh suatu paradigma tertentu, ada kaitannya dengan kekuatan dan kekuasaan bagi penganut teori tersebut, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kebenaran teori tersebut. Lantas pertanyaannya mengapa dan bagaimana kita harus memilih satu paradigma atau teori perubahan sosial tertentu?

Meskipun penjelasan Kuhn sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana paradigma mempengaruhi terciptanya teori, tetapi penjelasan Kuhn tentang proses pergantian paradigma menurutnya berjalan secara revolusioner. Dengan kata lain, bergantinya suatu paradigma melalui pergantian, paradigma lama mati dan diganti oleh paradigma baru. Penjelasan mengenai pergantian paradigma ini sudah banyak dibantah orang. Dalam kenyataannya telah terjadi berbagai fenomena yang tidak dibayangkan oleh Kuhn dalam teorinya. Pertama telah terjadi pluralitas dan konvergensi teori. Kuhn berpendapat bahwa paradigma akan selalu menggantikan posisi paradigma lama, dan jika tidak, para ilmuwan tidak memiliki kerangka kerja yang mapan. Dalam ilmu alam, pandangan seperti ini memang terjadi. Namun, dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial menunjukkan kecenderungan semakin menguatnya pertikaian antar paradigma, atau bahkan terjadi dialog antara dua paradigma atau lebih pada era yang sama. Bahkan, proses teori pada dasarnya adalah terjadinya saling dialog antar teori dan proses kemampuan teori untuk menyesuaikan diri. Marxisme, misalnya, telah berkembang setelah berdialog dengan semakin canggihnya kapitalisme. Sebaliknya, terjadi penguatan gejala dimana teori-teori sosial yang bersandar pada keyakinan kapitalisme berkembang ke arah penyesuaian diri terhadap kritik. Dalam perkembangan Marxisme, misalnya, perkembangan dan kritik interen terhadap praktik perkembangannya, hal ini menghasilkan masuknya analisis hegemoni kultur dan ideologi dalam Marxisme, sesuatu yang membuat analisis Marxisme saat ini telah bergeser dari pikiran Marx pertama kali yang lebih memfokuskan pada analisis ekonomi. Demikian halnya maraknya perkembangan teologi pembebasan (*liberation theology*) di Amerika Latin dan tempat-tempat lain adalah suatu adaptasi akibat dari suatu dialog paradigma. Demikian halnya, perkembangan paham dan teori kapitalisme dalam perkembangannya hingga seperti saat ini justru belajar dan mendapat keuntungan dari kritik yang dilakukan oleh teori

---

penelitian ilmiah. Untuk uraian mengenai paradigma lihat: Thomas Kuhn. *The Structures of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

<sup>6</sup> Lihat Ritzer, “*Sociology: A Multiple Paradigm Science*” dalam *Jurnal The American Sociologist* No. 10, 1975. hal: 156-157.

Marxisme. Kapitalisme sesungguhnya banyak belajar dan menyesuaikan diri karena mendapat kritikan dari Marxisme.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa manfaat dan sikap yang diperlukan dalam memahami paradigma sosial. Pada dasarnya memahami paradigma dan teori perubahan sosial seharusnya tidak sekedar untuk mempelajari dan memahaminya. Suatu teori ataupun paradigma dipelajari dan dipahami dalam rangka menegakkan komitmen untuk suatu proses emansipasi, keadilan sosial dan transformasi sosial. Persoalan pilihan terhadap paradigma dan teori perubahan sosial maupun teori pembangunan pada dasarnya bukanlah karena alasan benar dan salahnya teori tersebut, pilihan suatu teori lebih karena dikaitkan dengan persoalan mana teori yang akan berakibat pada penciptaan emansipasi dan penciptaan hubungan-hubungan dan struktur yang secara mendasar lebih baik. Oleh karena itu, memilih paradigma dan teori perubahan sosial adalah suatu pemihakan dan berdasarkan nilai-nilai tertentu yang dianut. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah siapa dan dengan tujuan apa sesungguhnya kegiatan dan aksi kita diabdikan? Masalah siapa yang ingin kita pecahkan melalui aksi dan program kegiatan kita? Jadi, masalahnya bukanlah apakah kita harus memihak, karena pemihakan adalah mustahil untuk dapat dihindarkan bagi semua teori perubahan sosial dan teori pembangunan, tetapi masalahnya adalah kepada siapa atau kepada apa pemihakan tersebut diabdikan.<sup>7</sup> Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan pemahaman paradigma sosiologi yang menjadi kacamata dan dasar bertindak dibalik setiap teori perubahan sosial maupun pembangunan.

### **Paradigma-paradigma Ilmu-ilmu Sosial**

Untuk memberikan bingkai bagaimana memahami teori perubahan sosial, termasuk di dalamnya teori pembangunan, kita perlu mengenal peta paradigma dalam ilmu sosial. Ada beberapa peta pendekatan yang telah dihasilkan oleh para ahli ilmu sosial. Dalam rangka itu, berikut diuraikan beberapa model paradigma dalam melihat masalah sosial. Pertama adalah model pemetaan paradigma sosial yang diuraikan oleh salah seorang penganut mazhab Frankfurt, terutama Jurgen Habermas. Model pembagian paradigma kedua adalah dengan mengikuti tokoh pemikir pendidikan kritis asal Brazil, Paulo Freire. Sedangkan model ketiga adalah peta paradigma sosiologi yang dibuat oleh Bernal dan Morgan (1979).

### **Ilmu Sosial Paradigma Dominatif Lawan Emansipatoris**

Meminjam analisis Habermas yang secara sederhana membagi paradigma ilmu-ilmu sosial menjadi tiga paradigma, dapat digunakan untuk memahami suatu sudut perbedaan paradigma dalam ilmu-ilmu sosial. Habermas pada dasarnya membagi paradigma ilmu sosial dalam pembagian yang secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut. Menurutnya ilmu sosial dapat dibedakan menjadi tiga paradigma yang dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut;

*Pertama*, yang disebutnya sebagai *instrumental knowledge*. Dalam perspektif paradigma '*instrumental*' ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang dimaksud Habermas dengan paradigma pengetahuan instrumental ini sesungguhnya adalah *paradigma positivisme*. *Positivisme* pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjam dari pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Positivisme adalah aliran filsafat yang berakar pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni dengan kepercayaan adanya *universalisme* dan *generalisasi*, melalui metode determinasi, *fixed law* atau kumpulan hukum teori (Schoyer, 1973). Positivisme berasumsi bahwa penjelasan sifat universal, artinya cocok atau *appropriate* untuk semua, kapan saja, di mana saja suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa riset sosial harus didekati dengan metode ilmiah, yakni obyektivitas, netral, dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang bersifat universal, prosedur harus dikuantifikasi dan diverifikasi dengan metode

---

<sup>7</sup> Pertanyaan ini kami adaptasi dan pinjam dari Becker, yang membahas tentang pilihan-pilihan dalam paradigma dan teori penelitian. Lihat tulisan Becker, "*Whose side are we on?*" dalam buku yang di edit oleh W.J. Fiske (Ed.). *Qualitative Methodology* Chicago: Markham, 1970.

scientific atau ilmiah. Dengan kata lain, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai (*values*) dalam rangka menuju pemahaman objektif atas realitas sosial.

Sebutan “*kaum positivist*” berkesan sentimen dan merupakan diskursus yang di dalamnya memuat suatu strategi daripada mengacu pada pengertian bahasa yang mendalam dan bermanfaat untuk menjelaskan kata positif lawan yang negatif dari konsep itu. Istilah itu digunakan untuk mengacu pada suatu sikap dan pendirian epistemologis tertentu. Positivisme sering dicampur-adukkan dengan ‘*empirisme*’ sehingga membuat rancu beberapa pengertian pokoknya. Pendirian epistemologis kaum positivis kalau ditelaah lebih dalam didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam “ilmu alam,” atau dengan kata lain, lebih jelas dapat dikatakan bahwa ilmu sosial positivistik, pada dasarnya meminjam cara, metodologi, sikap dan visi bagaimana ilmu alam menghadapi objek studi mereka yakni benda dan fenomena alam. Perbedaan utamanya terletak pada istilah yang digunakan dan objek yang dihadapi. Dalam ilmu alam objeknya adalah benda dan fenomena alam, sedangkan positivisme memberlakukan masyarakat atau manusia seperti ilmu alam memperlakukan benda dan fenomena alam. Tatanan sosial dapat dibuktikan kebenarannya melalui penelitian eksperimental, atau laboratorium, meskipun sering terjadi hipotesis keliru yang tak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Kaum *verifikasionis* (membuktikan kebenaran, dan *falsifikasionis* (membuktikan kekeliruan) hipotesis tentang tatanan sosial, sependapat bahwa pengetahuan hakikatnya merupakan proses akumulasi di mana pemahaman baru diperoleh sebagai tambahan atas kumpulan pengetahuan atau penghapusan atas hipotesis salah yang pernah ada.

Dengan pendekatan seperti itu, ilmu sosial dengan paradigma positivisme lebih mensyaratkan sikap-sikap tertentu yang tercermin dalam metodologi dan teknik kajian mereka. Di antara banyak sikap yang kemudian disebutkan sebagai sikap “ilmiah” tersebut adalah bahwa ilmu sosial dan penelitian sosial haruslah bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, ilmu sosial bagi paradigma positivisme juga tidak boleh bersifat subjektif, melainkan harus objektif, rasional, tidak boleh emosional, komitmen dan empati. Ilmu sosial juga harus mampu menjaga jarak (*detachment*) terhadap objek studi dan hasil kajian, bersikap universal, dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja.

Untuk memahami lebih lanjut pendirian paradigma positivisme, kita dapat memahaminya melalui pendirian teori-teori anti-positivisme. Meskipun epistemologis kaum antipositivis beragam jenisnya, semuanya tidak menerima berlakunya kaidah-kaidah universalitas, bahwa yang terjadi pada suatu tatanan sosial tertentu tidak secara serta merta akan berlaku pada semua tatanan atau peristiwa sosial. Realitas sosial adalah nisbi, hanya dapat dipahami dari pandangan orang per orang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial tertentu. Mereka menolak kedudukan sebagai ‘*peneliti*’ dan ‘*pengamat*’ atau pengembang masyarakat ahli luar seperti layaknya kedudukan kaum positivis. Seorang hanya bisa “*mengerti*” dengan ‘*memasuki*’ kerangka pikir orang yang terlibat langsung atau diri mereka sendiri sebagai peserta atau pelaku dalam tindakan. Seseorang hanya mengerti dari sisi dalam, bukan dari luar realitas sosial, betapa pun ahlinya karena ilmu sosial bersifat subjektif, dan menolak anggapan bahwa ilmu pengetahuan dapat ditemukan sebagai pengetahuan objektif.

Kalau kita pelajari secara mendalam, sesungguhnya ada dua tradisi pemikiran besar yang mewarnai perkembangan ilmu dan analisis sosial selama lebih dari dua ratus tahun terakhir, yakni pertikaian antara positivisme dan idealisme Jerman. Aliran ini mewakili pandangan yang berusaha menerapkan cara dan bentuk penelitian alam ke dalam pengkajian peristiwa kemanusiaan. Realitas sosial disamakan dengan realitas alam. Dengan meniru kaum realis dalam ontologinya, epistemologi kaum positivis, pandangan deterministik mengenai sifat manusia dan nomotetis metodologinya. Sementara itu, lawannya adalah tradisi “idealisme Jerman”. Aliran ini menyatakan bahwa realitas tertinggi bukan kenyataan lahir yang dapat dilihat indera, tetapi justru pada “ruh” atau gagasan”. Oleh karena itu epistemologi mereka anti-positivis di mana sifat subjektivitas dari peristiwa kemanusiaan lebih penting dan menolak cara dan bentuk penelitian ilmu alam.

*Kedua*, adalah paradigma interpretative. Latar belakang perkembangan paradigma interpretatif ini dapat ditelusuri dari pergumulan dalam teori ilmu sosial sebelum tahun 1970 ketika telah mulai berkembang suatu tradisi besar terutama di bidang filsafat sosial dengan munculnya fenomenologi, etnometodologi dan teori-teori aksi. Aliran-aliran filsafat sosial ini selain

menyatakan pendiriannya sendiri sering juga menentang aliran sosiologi positivisme. Aliran-aliran ini dapat dipahami dengan baik dengan mengenali perbedaan-perbedaan anggapan dasarnya masing-masing. Aliran *hermeneutic knowledge* atau juga dikenal dengan *paradigma interpretative*, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pengetahuan dan khususnya ilmu-ilmu sosial dan penelitian sosial dalam paradigma ini ‘hanya’ dimaksud untuk memahami secara sungguh-sungguh. Dasar filsafat paradigma interpretative adalah *phenomenology* dan *hermeneutics*, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk memahami. Semboyan yang terkenal dari tradisi ini adalah “*biarkan fakta bicara atas nama dirinya sendiri*”. Namun dalam paradigma ini pengetahuan tidak dimaksudkan sebagai proses yang membebaskan. Misalnya saja yang termasuk dalam paradigma ini adalah *ethnography* dalam tradisi kalangan antropolog.

Ketiga, adalah paradigma yang disebut sebagai “*paradigma kritik*” atau *critical/emancipatory knowledge*. Ilmu sosial dalam paradigma ini lebih dipahami sebagai proses *katalisasi* untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan. Melalui kritik yang mendasar terhadap ilmu sosial yang mendominasi (*instrumental knowledge*), paradigma kritis ini menganjurkan bahwa ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu sosial tidak boleh dan tidak mungkin bersifat netral. Paradigma kritis memperjuangkan pendekatan yang bersifat holistik, serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik. Oleh sebab itu, mereka selalu melihat realitas sosial dalam perspektif kesejarahan. Paradigma kritis tidak hanya terlibat dalam teori yang spekulatif atau abstrak, tetapi lebih dikaitkan dengan pemihakan dan upaya emansipasi masyarakat dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari.

Implikasi dari kritik paradigma ini terhadap positivisme menyadarkan kita akan perlunya perenungan tentang moralitas ilmu dan penelitian sosial. Oleh karena teori dan penelitian sosial begitu berpengaruh terhadap praktik perubahan sosial seperti program pembangunan, maka paradigma ilmu dan penelitian sosial adalah faktor penting yang menentukan arah perubahan sosial. Itulah mengapa paradigma kritik selalu mempertanyakan “mengapa rakyat dalam perubahan sosial” selalu diletakkan sebagai *passive objects* untuk diteliti, dan selalu menjadi objek “*rekayasa sosial*” bagi penganut positivisme. Positivisme percaya bahwa rakyat tidak mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Perubahan sosial harus didesain oleh ahli, perencana yang bukan rakyat, kemudian dilaksanakan oleh para teknisi. Rakyat dalam hal ini dilihat sebagai masalah dan hanya para ahli yang berhak untuk memecahkannya.

Sebaliknya, pandangan paradigma kritik justru menempatkan rakyat sebagai subjek utama perubahan sosial. Rakyat harus diletakkan sebagai pusat proses perubahan dan penciptaan maupun dalam mengontrol pengetahuan mereka. Inilah yang menjadi dasar sumbangan teoretik terhadap perkembangan *participatory research*. Kritik terhadap positivisme dilontarkan karena pengetahuan tersebut menciptakan dominasi yang irasional dalam masyarakat modern. Ilmu sosial harus mampu memungkinkan setiap orang untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya. Pemikiran tersebut mempengaruhi arah ilmu sosial kritis yang menekankan pentingnya subjektivitas manusia, pemihakan dan kesadaran dalam proses membangun teori. Paradigma kritis inilah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan, yang tadinya dianggap ‘tidak ilmiah’ tersebut. Itulah sebabnya paradigma kritik sekaligus merupakan kritik terhadap paradigma dominasi dan interpretasi.

Dengan kerangka peta pembagian paradigma seperti itu, kita dapat memahami dan menyadari segenap perkembangan, asumsi, dan konflik antar berbagai teori perubahan sosial dan kritik terhadap teori-teori pembangunan yang menjadi fokus utama pembahasan-pembahasan dalam berbagai uraian pada bagian-bagian berikutnya.

### **Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi**

Arena perbedaan paradigma yang lain yang juga berpengaruh dalam perkembangan dan kajian teori perubahan sosial dan teori pembangunan adalah dengan meminjam pembagian paradigma yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Ketika Freire (1970) menerbitkan buku *Pedagogy of the Oppressed* yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1970, umumnya orang menyangka bahwa ia sedang melakukan kritik terhadap dunia pendidikan. Namun, dengan

membaca karya Freire lainnya, terutama mendengar dialognya dengan tokoh *social movement* Amerika Serikat, Miles Horton, yang dibukukan dengan judul *We Making the Road by Walking* (1990), orang baru sadar bahwa Freire sedang berbicara soal yang lebih luas dari dunia pendidikan yakni mengenai paradigma perubahan sosial. Dia mengakui sangat dipengaruhi oleh Gramsci, seorang pemikir kebudayaan yang radikal yang pertama kali mengupas bahwa sesungguhnya peperangan yang terpenting pada abad modern ini adalah ideologi, yang disebutnya sebagai proses '*hegemony*'. Dari situlah orang baru menyadari bahwa Freire sedang membicarakan pendidikan dalam kaitannya dengan struktur dan sistem budaya, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang disebutnya sebagai *conscientizacao* atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas, yakni suatu sistem dan struktur. Proses dehumanisasi yang membunuh kemanusiaan. Gramsci menyebut proses ini sebagai upaya *counter hegemony*. Proses dehumanisasi tersebut terselenggara melalui mekanisme kekerasan, baik yang fisik dan dipaksakan, maupun melalui cara penjinakan yang halus, yang keduanya bersifat struktural dan sistemik. Artinya kekerasan dehumanisasi tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali. Kemiskinan struktural, misalnya, pada dasarnya adalah suatu bentuk kekerasan yang memerlukan analisis untuk menyadarinya. Bahkan, kekerasan sebagian besar terselenggara melalui proses hegemoni: cara pandang, cara berfikir, ideologi, kebudayaan, bahkan selera, golongan yang mendominasi telah dipengaruhi dan diterima oleh golongan yang didominasi. Dengan begitu, pendidikan dan ilmu pengetahuan, sebagaimana kesenian, bukanlah arena netral tentang estetika belaka. Kesenian dan kebudayaan tidaklah berada dalam ruang dan masa yang steril, melainkan dalam sistem dan struktur yang bersifat hegemonik.

Freire (1970) membagi ideologi teori sosial dalam tiga kerangka besar yang didasarkan pada pandangannya terhadap tingkat kesadaran masyarakat.<sup>8</sup> Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah "*proses memanusiakan manusia kembali*". Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, menjadikan masyarakat mengalami proses '*dehumanisasi*'. Pendidikan, sebagai bagian dari sistem masyarakat, justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naif (*naïval consciousness*) dan kesadaran kritis (*critical consciousness*). Bagaimana kesadaran tersebut dan kaitannya dengan sistem pendidikan dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut.<sup>9</sup>

Pertama, *kesadaran magis*, yakni suatu keadaan kesadaran, suatu teori perubahan sosial yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja suatu teori yang percaya akan adanya masyarakat miskin yang tidak mampu, kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar manusia, baik *natural* maupun *super natural*. Dalam teori perubahan sosial jika proses analisis teori tersebut tidak mampu mengaitkan antara sebab dan musabab suatu masalah sosial, proses analisis teori sosial tersebut dalam perspektif Freirean disebut sebagai teori sosial *fatalistik*. Suatu teori sosial bisa dikategorikan dalam model pertama ini jika teori yang dimaksud tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Masyarakat secara dogmatik menerima 'kebenaran' dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami 'makna' ideologi setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Yang *kedua* adalah apa yang disebutnya sebagai "*Kesadaran Naif*". Keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat 'aspek manusia' sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini 'masalah etika, kreativitas, '*need for achievement*' dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi analisis kesadaran ini, adalah disebabkan oleh kesalahan masyarakat

<sup>8</sup> Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Praeger, 1986.

<sup>9</sup> Lihat Smith, *Themaning of Conscientacao: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy* Amherst: Center for International Education, UMASS, 1976.



sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya ‘pembangunan’, dan seterusnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, *man power development* adalah sesuatu yang diharapkan, akan menjadi pemicu perubahan. Teori perubahan sosial dalam konteks ini berarti suatu teori yang tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor given dan, oleh sebab itu, tidak perlu dipertanyakan. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai paradigma perubahan yang bersifat reformatif dan bukanlah paham perubahan yang bersifat transformatif.

Kesadaran *ketiga* adalah yang disebut sebagai kesadaran kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan bagaimana kaitan tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam teori perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi ‘ketidakadilan’ dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas teori sosial dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu proses dialog “penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil”. Kesadaran ini pula yang disebut sebagai kesadaran transformatif.

Peta analisis kesadaran masyarakat, Paulo Freire (1970)

<b>KESADARAN MAGIS</b>	<b>KESADARAN NAIF</b>	<b>KESADARAN KRITIS</b>
<i>Magical Consciousness</i>	<i>Naival Consciousness</i>	<i>Critical Consciousness</i>
Perubahan sosial ditentukan oleh: NATURAL, SUPERNATURAL	Perubahan sosial ditentukan oleh: ETIKA, KREATIFITAS, NEED FOR ACHIEVEMENT	Perubahan sosial ditentukan oleh: SISTEM SOSIAL, EKONOMI, POLITIK & BUDAYA
Berimplikasi pada: Kesadaran Fatalistik	Berimplikasi pada: Kesadaran Reformatif	Berimplikasi pada: Kesadaran Transformatif

Dengan menggunakan paradigma yang dikembangkan Freire ini membantu kita untuk dapat memahami bagaimana logika berbagai teori sosial yang akan dibahas dikembangkan. Dengan demikian, teori modernisasi dan pembangunan serta berbagai teori pendukung setelahnya dalam epistemologi, atau menurut paradigma kesadaran Freire dapat digolongkan dalam kesadaran naif, karena bukan struktur yang lebih dipersoalkan melainkan manusianya dan oleh karenanya bersifat reformatif. Sementara itu, paradigma dan teori perubahan sosial kritik yang dibahas dalam bab berikutnya dalam perspektif Freire dapat digolongkan dalam kesadaran kritis dan merupakan proses perubahan sosial menuju lebih adil yang bersifat transformatif.

Uraian pembagian peta paradigma yang dipinjam dari analisis Freire tersebut, selain dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dan memetakan teori-teori perubahan sosial dan teori-teori pembangunan, peta paradigma tersebut juga sangat berpengaruh terhadap para praktisi pengembangan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat di akar rumput. Banyak praktisi

<sup>10</sup> Pemikiran yang bisa dikategorikan dalam analisis ini adalah para penganut modernisasi dan developmentalisme. Paham modernisasi selanjutnya menjadi aliran yang dominan dalam ilmu-ilmu sosial. Misalnya saja dalam antropologi, pikiran Kuncaraningrat tentang budaya pembangunan sangat berpengaruh bagi kalangan akademik dan birokrat. Paham modernisasi juga ‘berpengaruh’ dalam pemikiran Islam di Indonesia. Adanya yang salah dalam teologi fatalistik yang dianut umat Islam dianggap sebagai penyebab keterbelakangan. Asumsi itu dianut oleh kaum modernis sejak Muhammad Abduh atau Jamaluddin Afgani sampai kelompok pembaharu saat ini seperti Nurcholish Madjid c.s. Lihat: Dr. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1978. serta majalah ulasan tentang “Gerakan Pembaharuan Islam” dalam *Ulumul Quran* tahun 1993.

pembangunan dalam berhadapan maupun mengembangkan program-programnya di masyarakat dipengaruhi oleh jenis kesadaran yang mendominasi pemikiran dan analisis para praktisi sehingga sangat berpengaruh terhadap pendekatan maupun metodologi program mereka. Para praktisi pengembangan masyarakat yang mengembangkan program “pemberdayaan masyarakat”, tetapi dalam melakukan analisis terhadap “masalah kemiskinan” masyarakat bersandar pada analisis kesadaran naif dan reformatif, akan melahirkan program yang berbeda dengan jika mereka dipengaruhi oleh analisis yang bersandar pada kesadaran kritis untuk transformasi sosial.

### **Paradigma-paradigma Sosiologi**

Untuk lebih mempertajam pemahaman dan seluk-beluk peta paradigma yang dapat digunakan untuk memahami teori-teori perubahan sosial dan teori pembangunan, maka perlu juga kita memetakan secara lebih luas paradigma dalam ilmu sosiologi. Untuk itu dalam bagian ini dikemukakan dan disajikan peta paradigma sosiologi yang dikembangkan oleh Burnell dan Morgan (1979). Burnell dan Morgan membuat suatu pemetaan paradigma sosiologi yang dapat membantu kita untuk memahami ‘cara pandang’ berbagai aliran dan teori ilmu-ilmu sosial. Mereka membantu memecahkan sumber utama keruwetan peta teori ilmu sosial dengan mengajukan peta filsafat dan teori sosial.<sup>11</sup> Secara sederhana mereka mengelompokkan teori sosial ke dalam empat kunci paradigma. Empat paradigma itu dibangun atas pandangan yang berbeda mengenai dunia sosial. Masing-masing pendirian dalam kebenarannya dan melahirkan analisis tentang kehidupan sosial. Sejak tahun 1960-an sesungguhnya telah muncul berbagai aliran pemikiran sosiologi yang dalam perkembangannya justru tidak membantu untuk memperjelas peta paradigma sosiologi. Namun pada awal tahun 1970-an terjadi kebutuhan dalam perdebatan sosiologi mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat seperti halnya terjadi pada tahun 1960-an. Untuk memecahkan kebuntuan itu mereka usulkan untuk menggunakan kembali unsur penting dari perdebatan 1960-an, yakni cara baru dalam menganalisis empat paradigma sosiologi yang berbeda. Empat paradigma itu ialah: Humanis Radikal, *strukturalis radikal*, interpretatif dan Fungsionalis. Keempat paradigma itu satu dengan yang lain memiliki pendirian masing-masing, karena memang memiliki dasar pemikiran yang secara mendasar berbeda.

Sifat dan kegunaan empat paradigma tersebut adalah selain untuk memahami dan menganalisis suatu praktik sosial, juga untuk memahami ideologi dibalik suatu teori sosial. Paradigma sebagai anggapan-anggapan meta-teoretis yang mendasar yang menentukan kerangka berpikir, asumsi dan cara bekerjanya teori sosial yang menggunakannya. Di dalamnya tersirat kesamaan pandangan yang mengikat sekelompok penganut teori mengenai cara pandang dan cara kerja dan batas-batas pengertian yang sama pula. Jika ilmuwan sosial menggunakan paradigma tertentu, berarti memandang dunia dalam satu cara yang tertentu pula. Peta yang digunakan di sini adalah menempatkan empat pandangan yang berbeda mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat yang didasarkan pada anggapan-anggapan meta-teoretis. Empat paradigma itu merupakan cara mengelompokkan kerangka berpikir seseorang dalam suatu teori sosial dan merupakan alat untuk memahami mengapa pandangan-pandangan dan teori-teori tertentu dapat lebih menampilkan sentuhan pribadi dibanding yang lain. Demikian juga alat untuk memetakan perjalanan pemikiran teori sosial seseorang terhadap persoalan sosial. Perpindahan paradigma sangat dimungkinkan terjadi, dan hal ini sama bobotnya dengan pindah agama. Misalnya, apa yang pernah terjadi pada Karl Marx yang dikenal Marx tua dan Marx muda, yakni perpindahan dari humanis radikal ke strukturalis radikal. Perpindahan ini disebut *epistemological break*.

---

<sup>11</sup> Burnell and Morgan, *Sociological Paradigms and Organizational Analysis* London: Heinemann, 1979.

## Paradigma Fungsionalis

Paradigma fungsionalisme sesungguhnya merupakan aliran pemikiran yang paling banyak dianut di dunia. Pandangan fungsionalisme berakar kuat pada tradisi sosiologi keteraturan. Pendekatannya terhadap permasalahan berakar pada pemikiran kaum obyektivis. Pemikiran fungsionalisme sebenarnya merupakan sosiologi kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, kesetiakawanan, pemuasan kebutuhan, dan hal-hal yang nyata (empirik). Oleh karenanya, kaum fungsionalis cenderung realis dalam pendekatannya, positifis, deterministik dan nomotetis. Rasionalitas lebih diutamakan dalam menjelaskan peristiwa atau realitas sosial. Paradigma ini juga lebih berorientasi pragmatis, artinya berusaha melahirkan pengetahuan yang dapat diterapkan, berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa langkah-langkah praktis untuk pemecahan masalah praktis juga. Mereka lebih mendasarkan pada "*filsafat rekayasa sosial*" (*social engineering*) sebagai dasar bagi usaha perubahan sosial, serta menekankan pentingnya cara-cara memelihara, mengendalikan atau mengontrol keteraturan, harmoni, serta stabilitas sosial.

Paradigma ini pada dasarnya berusaha menerapkan metode pendekatan pengkajian masalah sosial dan kemanusiaan dengan cara yang digunakan ilmu alam dalam memperlakukan objeknya. Paradigma ini dimulai di Prancis pada dasawarsa pertama abad ke-19 karena pengaruh karya Comte, Spencer, Durkheim, dan Pareto. Aliran ini berasal dari asumsi bahwa realitas sosial terbentuk oleh sejumlah unsur empirik nyata dan hubungan antar semua unsur tersebut dapat dikenali, dikaji, diukur dengan pendekatan dan menekankan alat seperti yang digunakan dalam ilmu alam. Menggunakan kias ilmu mekanika dan biologi untuk menjelaskan realitas sosial pada dasarnya adalah prinsip yang umumnya digunakan oleh aliran ini. Namun demikian, sejak awal abad ke-20, mulai terjadi pergeseran, terutama setelah dipengaruhi oleh tradisi pemikiran idealisme Jerman seperti pemikiran Max Weber, Gerooge Simmel dan George Herbet Mead. Sejak saat itu banyak kaum fungsionalis mulai meninggalkan rumusan teoretis dari kaum obyektivis dan mulai bersentuhan dengan paradigma interpretatif yang lebih subjektif. Kias mekanika dan biologi mulai bergeser melihat manusia atau masyarakat, suatu pergeseran pandangan menuju para pelaku langsung dalam proses kegiatan sosial.

Pada tahun 1940-an pemikiran sosiologi "perubahan radikal" mulai menyusupi kubu kaum fungsionalis untuk meradikalisasi teori-teori fungsionalis. Sungguhpun telah terjadi persentuhan dengan paradigma lain, paradigma fungsionalis tetap saja secara mendasar menekankan pemikiran obyektivisme dan realitas sosial untuk menjelaskan keteraturan sosial. Karena persentuhan dengan paradigma lain itu sebenarnya telah lahir beragam pemikiran yang berbeda atau campuran dalam paham fungsionalis.

## Paradigma Interpretatif (Fenomenologi)

Paradigma interpretatif sesungguhnya menganut pendirian sosiologi keteraturan seperti halnya fungsionalisme, tetapi mereka menggunakan pendekatan obyektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan mereka dengan sosiologi keteraturan bersifat tersirat. Mereka ingin memahami kenyataan sosial menurut apa adanya, yakni mencari sifat yang paling dasar dari kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang mengamati.

Pendekatannya cenderung nominalis, antipositivis dan ideografis. Kenyataan sosial muncul karena dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang. Karenanya, mereka berusaha menyelami jauh ke dalam kesadaran dan subjektivitas pribadi manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada di balik kehidupan sosial. Sungguhpun demikian, anggapan-anggapan dasar mereka masih tetap didasarkan pada pandangan bahwa manusia hidup serba tertib, terpadu dan rapat, kemapanan, kesepakatan, kesetiakawan. Pertentangan, penguasaan, benturan sama sekali tidak menjadi agenda kerja mereka. Mereka terpengaruh langsung oleh pemikiran sosial kaum idealis Jerman yang berasal dari pemikiran Kant yang lebih menekankan sifat hakikat rohaniah daripada kenyataan sosial. Perumus teori ini yakni mereka yang penganut filsafat fenomenologi antara lain Dilttey, Weber, Husserl, dan Schutz.

### Paradigma Humanis Radikal

Para penganut humanis radikal pada dasarnya berminat mengembangkan sosiologi perubahan radikal dari pandangan subjektivis yakni berpijak pada kesadaran manusia. Pendekatan terhadap ilmu sosial sama dengan kaum interpretatif yaitu nominalis, antipositivis, volunteris dan ideografis. Kaum humanis radikal cenderung menekankan perlunya menghilangkan atau mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Namun demikian, pandangan dasar yang penting bagi humanis radikal adalah bahwa kesadaran manusia telah dikuasai atau dibelenggu oleh supra struktur ideologis di luar dirinya yang menciptakan pemisah antara dirinya dengan kesadarannya yang murni (*alienasi*), atau membuatnya dalam kesadaran palsu (*false consciousness*) yang menghalanginya mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. Karena itu, agenda utamanya adalah memahami kesulitan manusia dalam membebaskan dirinya dari semua bentuk tatanan sosial yang menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia. Penganutnya mengecam kemapanan habis-habisan. Proses-proses sosial dilibat sebagai tidak manusiawi. Untuk itu mereka ingin memecahkan masalah bagaimana manusia bisa memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka dalam pola-pola sosial yang mapan untuk mencapai harkat kemanusiaannya. Meskipun demikian, masalah-masalah pertentangan struktural belum menjadi perhatian mereka Paulo Freire misalnya dengan analisisnya mengenai tingkatan kesadaran manusia dan usaha untuk melakukan “konsientisasi”, yang pada dasarnya membangkitkan kesadaran manusia akan sistem dan struktur penindasan, dapat dikategorikan dalam paradigma humanis radikal.

### Paradigma Strukturalis Radikal

Penganut paradigma strukturalis radikal seperti kaum humanis radikal memperjuangkan perubahan sosial secara radikal tetapi dari sudut pandang objektivisme. Pendekatan ilmiah yang mereka anut memiliki beberapa persamaan dengan kaum fungsionalis, tetapi mempunyai tujuan akhir yang saling berlawanan. Analisisnya lebih menekankan pada konflik struktural, bentuk-bentuk penguasaan dan pemerosotan harkat kemanusiaan. Karenanya, pendekatannya cenderung realis, positivis, determinis, dan nomotetis.

Kesadaran manusia yang bagi kaum humanis radikal penting, justru oleh mereka dianggap tidak penting. Bagi kaum strukturalis radikal yang lebih penting justru hubungan-hubungan struktural yang terdapat dalam kenyataan sosial yang nyata. Mereka menekuni dasar-dasar hubungan sosial dalam rangka menciptakan tatanan sosial baru secara menyeluruh. Penganut paradigma strukturalis radikal terpecah dalam dua perhatian, pertama lebih tertarik pada menjelaskan bahwa kekuatan sosial merupakan kunci untuk menjelaskan perubahan sosial. Sebagian mereka lebih tertarik pada keadaan penuh pertentangan dalam suatu masyarakat.

Paradigma strukturalis radikal diilhami oleh pemikiran setelah terjadinya perpecahan epistemologi dalam sejarah pemikiran Marx, di samping pengaruh Weber. Paradigma inilah yang menjadi bibit lahirnya teori sosiologi radikal. Penganutnya antara lain Luis Althusser, Polantzas, Colletti, dan beberapa penganut kelompok kiri baru.

SUBYEKTIVIS	Keteraturan Subyektivis	<b>PARADIGMA INTERPRETATIF (FENOMENOLOGI)</b>	<b>PARADIGMA FUNGSIONALISME</b>	Keteraturan Obyektivis	OBYEKTIVIS
	Pertentangan Subyektivis	<b>PARADIGMA HUMANIS RADIKAL</b>	<b>PARADIGMA STRUKTURALIS RADIKAL</b>	Pertentangan Obyektivis	

**Diagram 1**

Peta Analisis Sosial Barnet & Morgan (1979)

Dalam dunia sosiologi, terdapat pula beberapa paradigma antara lain paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Dalam membahas masalah ini yang pertama akan dijelaskan pengertian paradigma dan perkembangannya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya akan diuraikan lebih detail dua paradigma yang sangat populer dalam dunia pendidikan, yaitu paradigma perilaku sosial atau behaviorisme, dan perspektif konstruktivisme.

## 1. Pengertian Paradigma dan Perkembangannya

Paradigma adalah cara seseorang memandang kenyataan dalam kehidupan. Ritzer ( 1983 ) memberi pengertian paradigma sebagai cara bertanya, cara menjawab, menentukan masalah, dan memecahkannya. Di dalam paradigma mengandung berbagai nilai dan asumsi yang dijadikan dasar seseorang mengajukan pertanyaan dan menjawabnya.

Istilah paradigma populer karena pemikiran Thomas Kuhn ( 1970 ) dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* ketika menjelaskan revolusi ilmu pengetahuan. Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari masa awal pembentukan, kemudian memperoleh pengakuan, dan kemudian berkembang menjadi sebuah paradigma. Pada tahap ini sebuah ilmu pengetahuan diakui sebagai suatu kebenaran dan dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam merumuskan pertanyaan dan cara menjawab.

Pada saat inilah sebuah teori ditempatkan sebagai sebuah paradigma, yakni sebuah pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan ( *subject matter* ) dari suatu cabang ilmu. *Normal science* adalah periode berikutnya, yang dalam hal ini terjadi akumulasi ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bekerja berdasarkan paradigma yang berpengaruh pada zamannya, asumsi yang mendasari dijadikan sebagai dasar memahami kenyataan.

Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan perubahan masyarakat, apa yang diyakini sebagai kebenaran itu kemudian mengalami kegoncangan hingga kemudian mengalami kekacauan ( *anomali* ) karena asumsi-asumsi paradigma lama tidak lagi mampu menjawab persoalan yang muncul. Akibatnya timbul krisis karena validitas paradigma lama benar-benar tidak lagi bisa dipertahankan. Pada saatnya inilah terjadi apa yang disebut Kuhn dengan masa terjadinya revolusi ilmu pengetahuan. Pada saat revolusi ilmu pengetahuan terjadi, maka asumsi dan dasar-dasar pemikiran paradigma yang berlaku saat itu tidak lagi di anggap relevan untuk merumuskan pertanyaan dan mengajukan jawaban terhadap fenomena atau kehidupan yang ada. Setelah terjadi revolusi akan ditemukan teori baru, dan dari sinilah dimulai muncul paradigma baru.

Dalam ilmu sosial, menurut Ritzer ada tiga paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma pertukaran sosial.

1. **Paradigma fakta sosial**, berakar pada pemikiran Emile Durkheim ( Perspektif Durkhemian ) dan mendasarkan pada filsafat positivisme dari August Comte yang menyatakan segala sesuatu serba teratur dan berkembang mengikuti hukum sebab akibat. Tindakan seseorang diasumsikan merupakan fungsi dari sistem atau struktur dalam masyarakat.
2. **Paradigma definisi sosial**, berdasar dari Max Weber. Asumsi dasarnya mengatakan bahwa tindakan seseorang bukan karena faktor dari luar, melainkan datang dari dorongan diri sendiri. Tindakan seseorang merupakan hasil dari keinginan, motivasi, harapan, nilai-nilai serta berbagai bentuk penafsiran manusia sebagai individu terhadap dunia dimana dia hidup.
3. **Paradigma pertukaran sosial**, muncul dari gagasan Skinner. Menurut paradigma ini manusia bertindak berdasarkan stimulus dari luar. Penganut perspektif ini memandang siapa mendapat apa. Mereka berasumsi bahwa stimulus yang bagus akan menghasilkan respon yang bagus pula, sebaliknya stimulus yang buruk akan menghasilkan respon yang buruk pula.

## 2. Paradigma Behavioristik

Dalam dunia pendidikan selama ini dikenal paradigma klasik yang disebut dengan paradigma behavioristik. Paradigma ini muncul terutama pada tahun ( 1930-an. Paradigma ini dipelopori oleh Pavlov ( 1849-1936 ), Watson ( 1878-1958 ), Skinner dan Thorndike ( 1874-1949 ).

Paradigma ini cukup berpengaruh dalam dunia pendidikan sampai pada tahun 1960-1970-an di Barat dan bahkan sampai 1990-an di Indonesia. Paradigma behavioristik atau perilaku sosial ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk pengembangan manajemen pendidikan yang didasarkan pada pemikiran positivisme empirisme, teknokrasi dan manajerialisme. Ia merupakan reaksi terhadap model pembelajaran sebelumnya yang menganut perpektif *gestalt* yang memfokuskan pada cara kerja pemikiran kognitif.

Perspektif yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky ini dianggap oleh penganut paradigma behavioristik memiliki kelemahan karena tidak memfokuskan langsung kepada gerakan-gerakan tubuh dan gejala-gejala internal tubuh yang bisa diamati.

## 3. Paradigma Konstruktivistik

Paradigma konstruktivistik pada filsafat humanisme dan fenomenologi. Dalam perkembangannya, paradigma ini juga mengambil sejumlah gagasan yang yang dikembangkan oleh filsafat rasionalisme dan bahkan juga positivisme, meskipun tidak sedominan seperti dalam paradigma behavioristik. Paradigma ini dikembangkan oleh Chomsky dalam linguistik, Simon dalam *Computer Scientist*, dan Bruner dalam pengetahuan kognitif dan belakangan beralih ke pendekatan sosial budaya. Dalam pendidikan dikaitkan dengan nama-nama seperti Piaget dan Vygotsky.

Ahli psikokanalisis juga bergabung dalam paradigma ini dan menambah perspektif ini menjadi lebih kaya, sehingga kemudian popularitas paradigma ini menggeser popularitas paradigma behavioristik pada tahun 1960-an.

Paradigma konstruktivisme muncul sebagai reaksi kelemahan paradigma behavioristik. Penganut paradigma konstruktivisme memandang pembelajaran berdasar paradigma behavioristik hanya menghasilkan pendidikan atau pembelajaran yang terfokus pada perilaku yang bisa diamati. Paradigma behavioristik memiliki kelemahan dalam mencermati perilaku yang sulit diamati seperti afeksi, pemahaman ( *understanding* ), cara berfikir dan memandang masalah ( *insight* )

## EPILOG

Paradigma-paradigma sosiologi tersebut sangat mempengaruhi bagaimana seorang pemikir sosial dalam mengembangkan teori sosial. Misalnya saja, penganut paradigma interpretatif atau sosiologi fenomenologis akan mengembangkan teori perubahan sosial yang sama sekali berbeda dengan penganut fungsionalisme. Penganut aliran fenomenologis, karena dasar filsafatnya adalah mencoba memahami dan mendengarkan kehendak masyarakat, maka perubahan sosial lebih diutamakan ke arah yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut. Berbagai metodologi dikembangkan, seperti "*etnografi*" ataupun "*riset observasi*", untuk menangkap dan memahami simbol-simbol kehendak masyarakat.

Sementara bagi penganut fungsionalisme yang bersandarkan pada paradigma positivisme, mereka merasa berhak untuk melakukan "rekayasa sosial" sehingga akan berpengaruh ketika mereka berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat dalam proses perubahan sosial model positivisme dan rekayasa sosial, ditempatkan sebagai "objek" perubahan. Oleh karenanya, mereka diarahkan, dikontrol, direncanakan, serta dikonstruksi oleh kalangan ilmuwan, birokrat, dan bahkan koordinator program LSM yang menganut paham positivisme tersebut. Mereka memisahkan antara masyarakat sebagai objek perubahan, ilmuwan dan peneliti atau bahkan tenaga lapangan sebagai tenaga-tenaga ilmiah yang objektif, rasional, tidak memihak, dan bebas nilai, dan birokrat atau negara dalam proses perubahan sosial berperan sebagai pengambil-pengambil keputusan. Dengan demikian, proses perubahan sosial penganut paradigma ini, teori perubahan sosialnya bersifat elitis.

Demikian halnya, penganut paradigma struktural akan memahami masalah sosial dan mengajukan teori perubahan sosial yang berbeda dibanding teori yang diajukan para penganut fungsionalis maupun fenomenologis. Bagi para penganut paradigma kritis transformatif, teori perubahan sosial dimaksudkan sebagai proses yang melibatkan korban untuk perubahan transformasi sistem dan struktur menuju ke sistem yang lebih adil. Dengan demikian proses perubahan sosial berwatak subjektif, memihak, tidak netral, dan untuk terciptanya keadilan sosial dan oleh karenanya berwatak populis.

Dengan memahami berbagai peta paradigma perubahan sosial tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa motivasi dan dasar pikiran suatu teori perubahan sosial dan pembangunan. Dengan memahami paradigma sosiologi yang dianut oleh pencetusnya, kita juga dapat memahami berbagai metodologi dan pendekatan proyek pembangunan maupun aksi sosial di akar rumput. Hal ini karena, pada dasarnya, metodologi dan teknik program perubahan sosial maupun pembangunan, serta teori-teori perubahan sosial yang dikembangkan oleh seseorang atau suatu organisasi sangat konsisten dalam mengikuti paradigma yang diyakini maupun yang dianutnya. Paradigma sosiologis yang dianut tidak saja mempengaruhi bagaimana suatu teori sosial memberi makna terhadap realitas sosial, tetapi juga mempengaruhi visi dan misi suatu teori sosial, bahkan mempengaruhi pula penentuan pendekatan ketika seseorang atau suatu organisasi melakukan penelitian serta aksi praktik manajemen pelaksanaan suatu teori sosial dalam bentuk program pengembangan masyarakat ataupun pembangunan, maupun pilihan pendekatan evaluasi terhadap program tersebut.[]



**Hand-Out 02**  
**DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA**  
**[Refleksi Atas Agenda dan Strategi Politik; Gerakan Sosial**  
**Di Indonesia Pasca Tumbangnya Rezim Soeharto]**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,  
Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama  
Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

**Proses Perubahan Sosial<sup>12</sup>**

Ada tiga hal yang berkenaan dengan proses perubahan sosial. Pertama, bagaimana ideas mempengaruhi perubahan-perubahan sosial. Kedua, bagaimana tokoh-tokoh besar dalam sejarah menimbulkan perubahan besar di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, sejauh mana peranan gerakan-gerakan sosial dan revolusi menimbulkan perubahan struktur sosial dan norma-norma sosial.

Dalam Marxisme, yang kita kenal sebagai materialisme sejarah (*historical materialism*), ada anggapan bahwa yang merubah sejarah, masyarakat dan bangsa bukanlah ide atau gagasan, tetapi teknologi, struktur ekonomi, atau penggunaan alat-alat produksi. Marx membagi struktur masyarakat ke dalam dua bagian: suprastruktur dan infrastruktur.

Yang termasuk infrastruktur suatu kebudayaan misalnya, struktur ekonomi atau teknologi kebudayaan itu sendiri; sedangkan suprastrukturnya adalah ideologi, kepercayaan, agama, *ideas*, *belief*, dan lain-lain. Menurut Marx, suprastruktur ditentukan oleh infrastruktur. Ideologi akan sangat ditentukan oleh ekonomi. Keadaan ekonomi misalnya akan menentukan kesadaran kelas; bukan sebaliknya. Agama kita sangat ditentukan oleh posisi ekonomi kita ditengah-tengah masyarakat. Versi-versi keberagaman kita sangat ditentukan oleh letak kita didalam status sosial ekonomi. Apa yang dirumuskan Marx sebetulnya merupakan antitesis dari; *ideas* akan menentukan sejarah.

Kekuatan sejarah akan sangat ditentukan oleh *ideas* (gagasan-gagasan). Ideologilah yang akan menentukan perubahan ekonomi, sistem sosial dan struktur politik. Jika ideologi suatu masyarakat berubah, berubah pulalah infrastruktur masyarakat itu. Berbeda dengan pandangan Marx, teori ini menganggap bahwa *ideas*-lah yang paling menentukan perubahan sosial. Teori yang sekaligus menjadi kritik terhadap Marx ini dikemukakan oleh Max Weber.

Suatu masyarakat dikatakan mengalami perubahan sosial jika sistem sosial juga berubah. Jadi, dalam perkembangan masyarakat itu, individu tidak berperan apa-apa. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang digerakkan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dulu, para sosiolog melacak perubahan-perubahan masyarakat pada perubahan-perubahan institusi; individu sama sekali tidak memegang peranan. Sebagai contoh utamanya dalam tesis Marx. Namun Weber membalikkan pandangan itu dengan mengatakan bahwa semua perubahan sosial dimulai dari perubahan tingkah laku manusia, perubahan dari *human actions*, perubahan dari tindakan-tindakan manusia yang ada di masyarakat. Karena itu, banyak ahli menganggap Weber sebagai pendiri dari apa yang kita sebut sebagai *sosiologi humanis*, sosiologi yang (kembali) menempatkan peranan manusia dalam perubahan-perubahan sosial. Kalau kita bicara tentang rekayasa sosial, basis teori yang kita pergunakan adalah *humanist sociology*, yakni bahwa kita, sebagai manusia dapat mempengaruhi perubahan sosial. Berbeda dengan Marx, Weber berpendapat bahwa *superstruktur*, *soft belief system*, *ideology* adalah faktor yang sangat aktif dan efektif dalam mengubah sejarah. Tesis Weber ini terbuksi dengan munculnya kapitalisme.

Kapitalis adalah sebuah sistem sosial yang ditegakkan diatas dasar pencarian keuntungan dan tindakan-tindakan rasional. Kata Max Weber, kapitalis adalah pengantar menuju masyarakat modern. Bersamaan dengan lahirnya kapitalisme, lahir pula institusi-institusi dan pengusaha-pengusaha baru yang independen. Pandangan baru tentang pasar (*market*) juga mulai muncul ke

---

<sup>12</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial; Reformasi atau Revolusi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I., 1999) h. 103-106.

permukaan. Menurut Weber, sebagai sebuah sistem sosial, kelahiran kapitalisme di Eropa Barat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manusia. Ada perubahan dalam tingkah laku manusia (*human actions*) menjelang kelahiran kapitalisme. Ada sekelompok orang yang perilakunya berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman itu. Kapitalisme muncul karena sekelompok orang—yang disebut Weber sebagai *new entrepreneur* (pengusaha-pengusaha baru)—melakukan serangkaian tindakan (*human actions*). Tindakan itu didasarkan pada semangat kapitalisme (*spirit of capitalism*). Semangat kapitalisme terdiri dari tiga hal; motif memperoleh laba (profit motive), hidup zuhud dan sederhana (*ascetic orientation*) semangat misi (*ideas of calling*).

### Konteks Perubahan di Indonesia

Kita melangsungkan diskusi ini ditengah situasi politik -ekonomi yang memiliki kecendrungan pada arah terciptanya krisis ekonomi dan politik yang semakin parah. Harga-harga bahan pokok semakin membumbung tinggi, kelangkaan minyak dimana-mana, para pejabat semakin terampil dalam melakukan korupsi, defisit anggaran negara yang semakin menganga, hutang pada pihak luar negeri yang semakin melilit dan konflik elit politik pun semakin menjadi-jadi.

Kita pahami betul bahwa situasi seperti ini sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Sudah lebih dari setengah abad Negara Republik Indonesia berdiri dan pembangunan nasional telah dijalankan selama lebih dari 40 tahun, namun penghidupan sosial-ekonomi dan politik massa rakyat tidak juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, rakyat Indonesia justru masih menghadapi kemiskinan dalam berbagai sektor kehidupannya. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan jaminan atas penghidupan yang manusiawi dengan tersedianya lapangan kerja yang mudah diakses semakin sulit diperoleh bagi rakyat kecil, mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Bagian terbesar dari penduduk miskin Indonesia yang berada di wilayah pedesaan dengan presentasi 63,41% dari jumlah total penduduk Indonesia. Mereka terdiri dari kaum tani, komunitas masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan para pemuda yang hidup di wilayah pedesaan. Konsentrasi penguasaan tanah di tangan sekelompok kecil orang yang memiliki modal besar dan hubungan kuat dengan pihak pemerintah membuat kehidupan kaum tani di wilayah pedesaan semakin mengalami kesulitan (untuk mempertahankan) hidup. Di samping monopoli penguasaan tanah di tangan sekelompok kecil pemilik modal, kaum tani Indonesia juga menghadapi konflik dan sengketa tanah yang seringkali disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat militer, kepolisian dan birokrasi yang berdimensi pelanggaran Hak-hak sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya.

Begitu pula dengan komunitas-komunitas masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah pedalaman/pegunungan, tidak diakui hak-hak dan kedaulatannya sebagai satuan masyarakat adat yang memiliki sistem sosial, ekonomi-politik, hukum dan budaya tersendiri yang mengatur berbagai segi kehidupan mereka. Klaim sepihak atas wilayah kedaulatan masyarakat adat atas nama kawasan ‘hutan negara’ masih terus-menerus dijalankan oleh pemerintah bagi pengembangan kawasan-kawasan hutan lindung, konservasi maupun hutan-hutan produksi. Kaum nelayan yang hidup di kawasan pesisir dan wilayah perairan hingga saat ini tidak memperoleh jaminan perlindungan hak-haknya atas wilayah tangkap, sarana produksi dan skema pasar yang menguntungkan nelayan. Praktek-praktek penggunaan Trawl, meskipun secara hukum telah dilarang operasinya dan telah memperoleh perlawanan yang cukup kuat dari nelayan, justru terkesan dibiarkan beroperasi oleh pemerintah untuk memonopoli wilayah tangkap di kawasan perairan yang pada akhirnya membuat tingkat pendapatan nelayan kecil semakin mengalami kemerosotan.

Pengembangan industri nasional yang bercorak kapitalistik yang dibangun di atas ‘politik upah murah’ benar-benar telah berhasil membawa pemiskinan massal di kalangan kaum buruh Indonesia akibat ketidak-mampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan upah yang terlalu rendah. Sistem kerja sub-kontak outsourcing, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pembatasan aksi mogok dan kebebasan berorganisasi, telah melucuti penghormatan dan perlindungan hak-hak kaum buruh Indonesia. Besaran atau nominal upah buruh yang telah

dikeluarkan di berbagai tingkatan (mulai dari sektoral, kabupaten/Kota, hingga Provinsi) sama sekali jauh dari kebutuhan hidup yang layak, apalagi jika dikaitkan dengan harga barang kebutuhan pokok yang justru selalu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

Di tengah penderitaan kaum tani, nelayan, masyarakat adat, dan kaum buruh Indonesia, bencana demi bencana silih berganti terjadi, mulai dari tsunami, kelaparan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, lumpur panas, flu burung, malnutrisi, demam berdarah, kecelakaan udara-laut-darat dan sebagainya, semakin menambah beban penderitaan rakyat yang memang sudah dimiskinkan secara sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana telah kita saksikan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, peristiwa-peristiwa bencana di berbagai daerah yang membawa korban jiwa dan materiil yang tidak sedikit, mengalami peningkatan tiga kali lipat dari masa-masa sebelumnya, tanpa upaya sistematis dan serius dari pemerintah untuk mencari solusi-solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa berbagai kenyataan dan persoalan-persoalan tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, tapi merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang lebih mengabdikan pada kepentingan ekonomi neo-liberal dengan mengorbankan kepentingan dan hak-hak rakyat banyak. Paket perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan misalnya, secara sistematis dirancang sedemikian rupa untuk melegalkan sistem kerja out-sourcing, memberi perlindungan dan keuntungan berlipat-ganda kepada investor, mengurangi pendapatan kaum buruh, dan membatasi ruang-gerak kaum buruh untuk memperjuangkan kepentingannya. Contoh paling mutakhir adalah upaya keras pemerintah di dalam merevisi Undang-undang No. 13 tahun 2003 (UUK No.13/2003) karena desakan dari rezim neo-liberal. Di bidang agraria, meskipun upaya amandemen Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 saat ini telah dihentikan untuk sementara waktu oleh pemerintah, namun berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang melegalisasi praktek perampasan sumber-sumber agraria milik rakyat untuk kepentingan modal besar seperti di bidang kehutanan, perkebunan, pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, sumber daya air, dan seterusnya, masih terus-menerus dipertahankan, bahkan berupaya direvisi kalau dibutuhkan bagi kepentingan modal. Perlindungan pemerintah kepada badan usaha pemilik HGU, HPH, Konsesi Pertambangan yang selama ini telah menyingkirkan rakyat dari wilayah kelolanya, tindakan-tindakan represi terhadap rakyat yang masih terus-menerus dijalankan secara terbuka baik oleh aparat militer, kepolisian, birokrasi maupun dengan menggunakan para militer sipil di berbagai level, mempertanyakan kesungguhan komitmen politik pemerintah di dalam menjalankan Reforma Agraria yang sejati.

Lalu bagaimana kondisi subyektif di kalangan gerakan rakyat di Indonesia di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi massa rakyat yang selama ini gigih memperjuangkan hak-haknya? Sebagaimana telah menjadi pemahaman bersama, kekuatan subyektif gerakan rakyat mengalami penurunan yang cukup tajam semenjak rezim Orde Baru berhasil ditumbangkan tahun 1998 yang lalu. Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari kesadaran obyektif massa rakyat yang masih cenderung terilusi dengan berbagai sogokan-sogokan reformasi, liberalisasi, demokrasi prosedural, otonomi daerah, dan seterusnya, yang diajakan dan disodorkan oleh rezim-rezim yang berkuasa pasca pemerintahan Orde Baru. Sekalipun demikian, penurunan (kuantitas dan kualitas) gerakan rakyat tidak patut ditimpakan semata-mata pada kesadaran obyektif massa rakyat yang cenderung terilusi oleh sogokan-sogokan dari rezim yang berkuasa. Ketidak-siapan atau kegagalan kalangan organisasi gerakan rakyat di dalam merespon dan memanfaatkan peluang dari perubahan-perubahan politik yang terjadi begitu cepat pasca tumbangannya rezim Orde Baru, pada level tertentu sesungguhnya telah turut pula memberikan kontribusi pada penurunan tingkat progresifitas gerakan rakyat. Jangankan mempersiapkan diri merespon atau memanfaatkan peluang dari perubahan-perubahan politik yang ada, dalam beberapa tahun belakangan ini kekuatan subyektif gerakan rakyat malahan sibuk dengan agenda organisasi, sektor, dan wilayah masing-masing, bahkan lebih parah lagi, mengalami fragmentasi kekuatan.

Dalam situasi seperti itu, kekhawatiran terhadap perubahan yang mengarah pada suatu keadaan yang disebut oleh Sorensen (1993) sebagai *frozen democracies* atau demokrasi yang membeku, yakni suatu keadaan dimana arus perubahan menuju masyarakat demokratik tiba di satu

titik balik atau mengalami pembusukan. Titik balik itu dapat terjadi manakala: (a) pemerintahan (atau pemerintahan-pemerintahan) baru yang berkuasa tidak mampu melakukan perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasar sesuai dengan tuntutan masyarakat – khususnya yang menyangkut kepentingan kaum miskin; (b) pemerintah yang baru gagal untuk menuntaskan sejumlah warisan permasalahan yang akut yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya, seperti kasus-kasus korupsi dan pelanggaran-pelanggaran HAM; (c) tata tertib dan iklim yang kondusif bagi kelangsungan proses demokratisasi gagal untuk diciptakan; dan (d) konsolidasi demokrasi itu sendiri tidak terjadi – yakni praktek-praktek demokrasi tidak berkembang dan tidak menjadi bagian dari budaya politik (Sorensen, 1993).

### **Alas Pikir dan Tindak Perjuangan Politik Gerakan Sosial**

Menghadapi sejumlah situasi yang tengah dihadapi tersebut, sesungguhnya muncul satu pertanyaan penting yang patut kita jawab bersama-sama: Apa yang hendak diperbuat aktor-aktor gerakan sosial di tengah-tengah proses transisi ini? Pertanyaan ini bukan saja relevan dalam konteks waktu dimana saat ini kita sedang berada di tengah-tengah proses transisi menuju demokrasi yang menurut suatu studi yang dipimpin oleh Adam Przeworski – seorang profesor ilmu politik dari Universitas Chicago – yang mengatakan bahwa pada masyarakat-masyarakat yang berada dalam transisi demokrasi akan muncul fenomena-fenomena seperti: berkembangnya ketidakpercayaan politik, skeptisisme, dan sikap apatis yang berhubungan erat dengan pengalaman panjang masyarakat yang hidup di tengah-tengah kediktatoran, sejarah kekacauan dan keterputusan hubungan-hubungan politik, ingatan-ingatan atas perilaku manipulatif, dan suatu transmisi nilai-nilai apolitis yang sistematis. Tetapi lebih jauh dari itu adalah budaya gerakan massa yang dapat melahirkan gerakan-gerakan sosial yang berumur panjang telah hilang dalam kehidupan sebagian besar rakyat di negeri ini.

Melalui buku terakhirnya, *Bebas dari Neoliberalisme*, Mansour Fakih menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sejumlah agenda penting gerakan sosial dalam proses transisi yang lebih banyak dipandu oleh faham neoliberalisme ini. *Pertama* adalah mempertahankan dan merebut kembali negara untuk menjadi pembela hak-hak rakyat dengan memastikan negara untuk menjaga dan melindungi hak ekonomi, budaya, dan sosial, serta mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB atas Hak Asasi Manusia. *Kedua*, terus menerus melakukan protes sosial untuk mengubah kebijakan negara dan mencermati kesepakatan negara dengan pasar bebas dan kebijakan neoliberal. *Ketiga*, PR terbesar dan tersulit yang mesti dihadapi setiap gerakan sosial adalah melakukan pengembangan kapasitas *counter discourse and hegemony* atas dominasi diskursus neoliberal terhadap demokratisasi, *good governance*, dan *civil society*. Kita di Indonesia kini tengah menyaksikan tahap awal perkembangan gerakan sosial melawan kebijakan neoliberal. Kita juga berharap dapat terus mengikuti pertumbuhan gerakan rakyat untuk mendekonstruksi diskursus dominan dari perspektif neoliberal. Termasuk di dalamnya adalah gerakan mendekonstruksi diskursus *civil society* dan menggantinya dengan ide gerakan sosial melawan kebijakan neoliberal di Indonesia.” (Fakih, 2003:147).

Karena itu, upaya-upaya untuk memperkuat daya ubah gerakan sosial di Indonesia tidak hanya sekedar mengembangkan sejumlah tindakan teknis yang diperlukan untuk kerja-kerja advokasi atau aksi-aksi kolektif itu sendiri, melainkan yang terpenting adalah: (1) bagaimana mengembalikan gerakan sosial ke dalam rel kehidupan politik yang sesungguhnya; dan (2) sebagai implikasinya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas berpolitik dari rakyat atau kelompok-kelompok rakyat yang selama ini terpinggirkan. Jadi, gerakan rakyat di Indonesia tidak lagi sekedar diletakkan sebagai upaya untuk mendorong perubahan kebijakan publik atau sekedar terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan publik, tetapi menjadi bagian dari manuver-manuver politik kelompok-kelompok rakyat yang selama ini terpinggirkan di dalam ruang-ruang politik untuk menggeser kekuasaan atau tegasnya dapat disebut sebagai ruang-ruang perebutan kekuasaan.

Sehubungan dengan perjuangan politik gerakan sosial, maka konsep umum mengenai kekuasaan itu berkaitan dengan kesadaran struktur peluang politik yang spesifik (hubungan dalam bidang politik), struktur mobilisasi (modal sosial), kerangka budaya (modal simbolik) dan identitas

bersama (habitus/disposisi para aktor untuk berpraktik). Sementara itu, kekuatan politik gerakan sosial sendiri sekurang-kurangnya bersumber pada 4 (empat) hal.

*Pertama*, sumber utama terletak ada pada relasi gerakan dengan aktor-aktor dan institusi kunci dalam bidang politik. Tarrow (1994) melihat bahwa ada struktur peluang politik yang kompleks dan dinamis yang dimanfaatkan oleh gerakan sosial untuk mencapai tujuan. Gerakan sosial ada dalam konteks politik kerja sama dan kompetisi di dalam masyarakat, yang merefleksikan hubungan formal dan informal diantara dan di dalam organ-organ masyarakat sipil (Della Porta dan Diani 1999). *Kedua*, kemampuan gerakan sosial untuk memobilisasi individu maupun kelompok dalam masyarakat juga merupakan sumber kekuatan politik lain. Mobilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur sosial seperti jaringan sosial dan institusi, baik bersifat formal maupun informal. *Ketiga*, kemampuan gerakan sosial untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan arti hak, isu, aktor dan kebijakan. Gerakan sosial pada umumnya berhasil memaknai ketidakadilan dan pelanggaran atas suatu kelayakan berdasarkan budaya yang ada (Zald 1996:226). Kekuatan ini dihadapkan pada suatu kerangka strategis yang aktif dan kompetitif yang terjadi di berbagai arena, baik dalam gerakan sosial itu sendiri maupun diantara aktivis dan otoritas sebagai modal simbolis, yaitu agar diakui sebagai perwakilan resmi suatu kelompok tertentu. *Keempat*, kekuatannya lainnya terletak pada kemampuan gerakan sosial untuk membangun refleksi identitas diri para aktornya. Partisipasi individual dalam aksi kolektif tidak berdasarkan pada realita yang ada melainkan berdasarkan persepsi dan interpretasi terhadap hal tersebut, dan gerakan sosial itu sendiri berperan aktif dalam membangun serta mengkomunikasikan identitas bersama tersebut. (Melucci 1996). Ini artinya, prinsip-prinsip pengelompokan dan prinsip-prinsip organisasi aksi dalam habitus merupakan sumber utama kekuatan aksi politik secara kolektif (Stokke 2002).

Lantas bagaimana gerakan sosial dapat mengukur maju-mundurnya, kuat-lemahnya dan perkembangan capaian-capaian atas gerakan yang dilakukan? Capaian gerakan tidak sesederhana sebagai produk dari karakteristik dan aktivitas gerakan itu sendiri, tapi lebih dari itu sebagai hasil dari interaksi antara organisasi gerakan sosial, organ-organ yang menjadi target perubahan dan aktor-aktor relevan pada lingkungan yang lebih luas, serta semua perjuangan untuk memperoleh sumberdaya dan cara memanfaatkannya untuk keuntungan mereka dibandingkan yang lain (Paul Burstein et al in the success of political movements; 1995, p.277). Mengukur tingkat sukses gerakan sosial harus memperhatikan relasi factor-faktor berikut ini: 1) karakteristik gerakan sosial; 2) karakteristik target gerakan (biasanya agen pemerintah); 3) karakteristik lingkungan; dan 4) factor-faktor yang berpengaruh pada bekerjanya berbagai sumberdaya yang terlibat (Jenkins 1983a; McAdam 1982). Dalam konteks agenda-agenda politik yang dijalankan gerakan sosial, tingkat kesuksesannya harus didefinisikan dalam bentuk tanggungjawab sistem politik pada organisasi gerakan sosial secara menyeluruh meskipun dapat dicapai setahap demi setahap. *Pertama*, capaian 'akses' yaitu kesediaan pemerintahan untuk mendengarkan apa yang menjadi konsern organisasi gerakan sosial. *Kedua*, capaian pada tingkatan agenda yaitu kesediaan pemerintahan untuk menempatkan agenda-agenda yang didesakkan organisasi gerakan sosial menjadi agenda-agenda politiknya. *Ketiga*, capaian kebijakan yaitu pemerintahan mengadopsi kebijakan baru yang mencerminkan berbagai tuntutan gerakan sosial. *Keempat*, capaian pada level output yaitu pemerintahan secara efektif mengimplementasikan kebijakan baru tersebut. *Kelima*, capaian pada level impak yaitu implementasi kebijakan baru tersebut memberikan dampak pada perbaikan kehidupan kelompok-kelompok rakyat marjinal yang terlibat dalam gerakan sosial. *Keenam*, capaian pada level struktur politik yaitu perubahan sistem politik untuk meningkatkan pengaruh gerakan sosial. Struktur kesempatan politik yang baru ini juga harus memberikan insentif pada aksi-aksi kolektif dan peningkatan posisi tawar gerakan sosial sehingga membuat upaya-upaya represi semakin sulit dan mahal

### **Dinamika Perjuangan Politik Gerakan Sosial di Indonesia: Konsolidasi Tak Berujung**

Telah menjadi kesadaran aktor-aktor gerakan sosial bahwa buah dari perubahan yang ditandai oleh jatuhnya rezim Soeharto lebih banyak dinikmati oleh aktor dan kekuatan-kekuatan status quo ketimbang membawa perubahan kehidupan bagi rakyat secara keseluruhan. Gerakan

sosial di Indonesia, umumnya berpendapat, proses transisi kini dalam bahaya. Demokrasi elektoral telah dibajak oleh elite, dijadikan sebagai kendaraan baru bagi mereka untuk mempertahankan basis kekuasaan lamanya dan melanggengkannya.

Meskipun nampak ada persetujuan pada tataran kesadaran umum tersebut, sesungguhnya kalau ditelusuri lebih lanjut nampak terdapat perbedaan cara pandang yang secara substansial berbeda dalam menyimpulkan betapa masa transisi sedang memburuk. Sebagian kelompok dalam gerakan sosial melihat, persoalan ini terjadi karena piranti penunjang transisi (kelembagaan, reformasi hukum, birokrasi, dan militer) tidak berjalan mulus. Sebabnya, karena itu tadi, demokrasi elektoral telah dibajak oleh elite. Solusinya, bagaimana agar gerakan sosial terus berusaha mendesak para elite (melalui demo atau lobi atau masuk dalam sistem), agar mau bersungguh-sungguh menjalankan amanat reformasi. Dalam kesungguhan ini, sadar tak sadar, mereka telah bersikap sebagai seorang teknokrat dengan posisi yang marginal.

Gerakan sosial yang lain, memandang defisit demokrasi ini terjadi karena sistem demokrasi yang diadopsi adalah demokrasi borjuis. Kelompok ini melihat, demokrasi elektoral memiliki sisi yang positif yakni, terbukanya sedikit ruang bagi pembangunan dan perluasan gerakan sosial. Tapi, harus disadari sejak awal, demokrasi borjuis ini sangat terbatas yakni, hanya melindungi dan menguntungkan posisi borjuasi. Melanggar batas-batas tersebut, berarti siap berhadapan dengan aparatus kekuasaan. Karena itu, jika gerakan rakyat sudah besar dan kuat, maka demokrasi borjuasi yang terbatas ini harus diganti dengan demokrasi yang sejati yakni, demokrasi yang benar-benar menjadikan rakyat sebagai dasar dan tujuan kekuasaan. Bukan berarti, mereka menolak berpartisipasi dalam arena demokrasi borjuasi tapi, sikap dasarnya tak pernah berubah: ketidakpercayaan pada demokrasi elektoral. Tanpa sadar, kelompok ini terjatuh pada dogmatisme mengenai dikotomi demokrasi borjuis dan demokrasi sejati tanpa batas.

### Catatan Kritis

Konsolidasi politik kekuatan-kekuatan status quo telah terbukti berhasil melanggengkan posisi dan dominasinya dalam berbagai relasi politik, ekonomi dan sosial hingga saat ini. Bukti yang cukup kuat adalah dari data penguasaan mereka dalam posisi-posisi kekuasaan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Kekuatan-kekuatan gerakan rakyat tidak kunjung terkonsolidasi ke dalam agenda politik persatuan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh persoalan psikologis dan kontestansi antar personal di kalangan gerakan sendiri ketimbang tajamnya perbedaan-perbedaan yang lebih bersifat ideologis. Selain itu, konsistensi dalam menjalankan agenda yang telah disepakati sangat lemah. Seringkali dari pertemuan ke pertemuan hanya berputar-putar pada persoalan dan agenda yang sama. Praktek politik elit juga sangat kental ditemukan. Secara umum basis massa rakyat masih ditempatkan sebagai objek mobilisasi politik bukan sebagai pihak penentu arah, agenda dan strategi politik itu sendiri. Dalam konteks ini, perjuangan politik rakyat rakyat terorganisir seharusnya menjadi karakter utama perjuangan politik gerakan sosial di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan dalam medan pertarungan politik, menempatkan setiap organisasi gerakan sosial pada sumbu horizontal maupun vertikal konsolidasi pembangunan kekuatan politik rakyat. Oleh karena itu, harus diperkuat agenda-agenda untuk memastikan agar organisasi rakyat :

- (i) Membangun Kekuatan Politiknya dengan indikasi: memiliki platform organisasi yang jelas (agenda-agenda perubahan sosial yang jelas dan terumuskan serta disepakati bersama), memiliki basis massa (konstituen) yang jelas dan makin membesar serta menguat, memiliki protokol yang jelas dalam membangun relasi dan jaringan kerja politik, memiliki sistem kaderisasi dan kepemimpinan yang sistematis, mengembangkan diri sebagai organisasi pembelajaran sosial (*social learning organization*); dan
- (ii) Memperbesar Pengaruh dan Dampak Politiknya dengan indikasi sejauhmana pemerintahan secara efektif menjalankan kebijakan-kebijakan baru sesuai dengan yang diperjuangkan organisasi-organisasi rakyat dan lebih jauh dari itu terjadi perubahan struktur kekuasaan yang semula dihegemoni kekuatan status quo bergeser pada kekuatan-kekuatan yang pro pada perjuangan rakyat.[]

### **Hand-Out 03**

## **PROTES SOSIAL, REFORMASI POLITIK DAN STRATEGI GERAKAN SOSIAL**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **Protes Sosial dan Reformasi Politik**

Reformasi adalah sebuah jargon politik yang sangat populer dalam *corpus* besar politik Indonesia selama beberapa tahun terakhir, menyusul gelombang krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan Juli 1997. Pada awal 1998 sejumlah intelektual terkemuka mempunyai ortodoksi baru bahwa krisis ekonomi tidak semata disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor politik. Spesialis Indonesia kenamaan, Andrew MacIntyre (1999) misalnya, memperlihatkan bahwa krisis ekonomi Indonesia disebabkan oleh penyakit institusional yang kronis seperti merosotnya kredibilitas pemerintah di mata publik, sistem politiknya yang tidak demokratis dan mekanisme pembuatan keputusan yang terpusat di tangan Presiden Soeharto. Tidak ada kekuatan institusional pada lembaga kepresidenan yang efektif, dan juga tidak ada lembaga-lembaga maupun aktor-aktor politik yang mampu mempengaruhi -- apalagi memveto -- pelaksanaan kebijakan yang ditempuh presiden dan memprakarsai kebijakan alternatif yang lebih fundamental. Oleh karena itu, reformasi politik waktu itu diyakini sebagai kata kunci untuk penyelesaian krisis ekonomi.

Sejumlah intelektual terkemuka waktu itu secara lantang menyuarakan reformasi politik yang secara luas dimaknai sebagai demokratisasi sistem politik. Wacana reformasi semakin meluas di ruang publik, tetapi tidak ada kesepakatan bersama dalam merumuskan agenda reformasi. Elemen-elemen pendukung *status quo* cenderung bersikap defensif dan tidak mau menerima konsep reformasi yang disuarakan publik. Oleh karena itu yang lebih banyak berbicara adalah parlemen jalanan, sebuah aksi protes sosial di bawah pimpinan mahasiswa dan didukung oleh serpihan oposisi kelas menengah kota. Target utama parlemen jalanan adalah mundurnya Soeharto dari singgasananya, yang diyakini sebagai titik awal reformasi politik yang lebih luas. Karena Soeharto sudah kehabisan legitimasi, maka dia tidak bisa membabi buta menghabiskan kekuatan parlemen jalanan dengan tangan-tangan baja militer. Puncak dari protes sosial di tingkat nasional adalah kejatuhan Soeharto di bulan Mei 1998, yang kemudian membawa Indonesia memasuki masa transisi menuju demokrasi.

Ciri khas utama transisi adalah ketidakpastian karena mandulnya lembaga-lembaga politik dan berlanjutnya mobilisasi massa (Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter, 1986). Jika sebelum Soeharto jatuh, reformasi yang berkobar di seluruh penjuru kota diarahkan pada reformasi politik nasional, maka mobilisasi massa yang menyuarakan reformasi setelah jatuhnya Soeharto mengalami penyebaran ke seluruh pelosok Indonesia. Reformasi politik menjadi komoditas publik sehari-hari. Isu yang disuarakan tidak lagi berskala nasional tetapi berskala lokal. Seperti reformasi awal yang mendesak mundur Soeharto, reformasi politik lokal adalah diawali oleh protes sosial dengan mobilisasi massa yang menuntut mundur para pejabat lokal, dari Bupati sampai Kepala Desa. Fenomena ini, menurut reportase *Kompas* (24/12/1998), merupakan bentuk kebangkitan rakyat pedesaan yang mendadak memperoleh kedaulatan setelah sekian lama hidup mereka sangat tertekan. Seperti halnya gerakan reformasi nasional lewat protes sosial yang dipimpin mahasiswa, semangat reformasi yang berkobar di tingkat lokal tampaknya hendak merombak tatanan politik lama yang tidak adil, dan yang lebih khusus adalah menjatuhkan para pemimpin lokal yang bermasalah atau mengidap penyakit "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Aksi reformasi yang mengangkat isu "KKN" di tingkat lokal berkobar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bupati Bantul, yang terkait dengan pembunuhan seorang wartawan Harian Bernas, Udin, dan juga disangka terlibat KKN dalam proses pemilihan sampai dengan penggunaan dana Inpres Desa Tertinggal (IDT), akhirnya harus *lengser* berkat aksi reformasi. Di Jawa Tengah, aksi reformasi dilancarkan pada para pejabat yang diduga KKN seperti Sekwilda Jateng, Bupati



Klaten, Bupati Magelang, Bupati dan Walikota Tegal, dan sebagainya. Di Jawa Timur, aksi serupa terjadi di Madiun, Malang, Tuban, Lamongan, dan sebagainya. Memang tidak setiap aksi berhasil “mengkudeta” para pejabat seperti Bupati/Walikota, tetapi aksi reformasi yang digelar oleh elemen-elemen masyarakat lokal memperlihatkan semakin menguatnya masyarakat, dan paling tidak mempunyai pengaruh psikologis yang kuat di kalangan elite lokal maupun masyarakat luas. Aksi reformasi telah mempengaruhi wacana publik dan membuat elite-elite lokal dihantui “ketakutan” akan bahaya tindak KKN.

Fenomena protes sosial pada tingkat lokal di Indonesia memang bukan fenomena baru. Jauh sebelum isu reformasi politik berkobar, di banyak daerah telah terjadi protes kaum tani atas penggusuran tanah atau demonstrasi buruh yang menuntut perbaikan hidup mereka. Kasus Kedungombo, Nipah, Cimaesan, Nitneo (NTT), Martoba (Sumatera Utara), Jenggawah, dan lain-lain merupakan rangkaian bukti meluasnya protes sosial (petani) atas penggusuran tanah, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Protes sosial mereka hadir di setiap hari tetapi selalu dapat dipadamkan oleh tangan-tangan baja militer.

Yang relatif baru pada era pasca-Soeharto adalah gelombang protes sosial yang menyebar di hampir daerah, dan setiap protes sosial tidak lagi mengangkat isu-isu kebijakan pemerintah atau penggusuran tanah, tetapi berkobar relatif seragam sebagai gerakan sehari-hari untuk menjatuhkan para pemimpin lokal. Protes sosial rupanya menjadi senjata utama bagi elemen-elemen masyarakat lokal untuk menyuarakan aspirasinya ketika saluran-saluran konvensional seperti partai dan parlemen tidak *legitimate* di mata publik. Mulai sekarang protes sosial tetap saja menjadi saluran partisipasi yang penting ketika *locus* politik mengalami pergeseran dari level nasional ke level lokal. Di satu sisi meluasnya protes sosial merupakan elemen penting gerakan sosial masyarakat sipil untuk memperkuat demokrasi lokal, yakni untuk mengontrol kinerja masyarakat politik dan negara, tetapi di sisi lain protes sosial pada level empirik selalu mengandung kerawanan yang serius seperti terjadinya kekerasan dan kerusuhan sosial. Kekerasan yang muncul dari masyarakat bagaimanapun merupakan bahaya bagi demokrasi, sebagaimana telah dibayangkan oleh para filsuf Yunani Kuno ketika mereka mengkritisi praktik demokrasi pada waktu itu.

### Reformasi Politik

Reformasi dipahami secara mendasar sebagai bentuk perubahan. Demikian juga dengan revolusi. Tetapi seorang jenderal di Indonesia mengatakan bahwa reformasi dan revolusi tidak berbeda, yakni sebagai perubahan politik secara total. Ia kelihatan phobi dengan istilah reformasi maupun revolusi, dan lebih suka menggunakan istilah pembaharuan secara gradual. Sang jenderal itu tentu saja sangat dihantui oleh ketakutan akan perubahan yang mengancam posisinya. Tetapi orang yang tidak dihantui oleh ketakutan akan perubahan biasa memahami secara berbeda antara reformasi dan revolusi.

Revolusi sering dipahami sebagai perubahan total dan cepat. Revolusi sosial, demikian Theda Skocpol (1979, 1994), adalah perubahan yang cepat dan mendasar dalam masyarakat dan struktur kelas suatu negara; dan revolusi tersebut dibarengi bahkan menyebabkan terjadinya pemberontakan kelas bawah. Revolusi sosial harus dipisahkan dari berbagai jenis konflik dan proses perubahan lainnya, terutama yang disebabkan oleh kombinasi dua kejadian yang timbul secara kebetulan bersamaan; yaitu terjadinya perubahan struktur masyarakat dan pergolakan kelas, serta terjadinya perubahan politik dan perubahan sosial. Pemberontakan misalnya, sekalipun bisa berhasil dengan baik, mungkin saja melibatkan pemberontakan kelas bawah, tetapi tidak menyebabkan timbulnya perubahan struktural. Transformasi sosial—yang hadir dalam bentuk industrialisasi, urbanisasi, monetarisasi, komersialisasi, sekularisasi dan sebagainya—dapat mengubah struktur sosial tanpa harus menimbulkan, atau diakibatkan oleh, pergolakan politik yang tiba-tiba atau perubahan politik yang mendasar. Sedangkan revolusi politik adalah perubahan struktur negara tetapi tidak mengubah struktur sosial, dan revolusi politik tersebut tidak perlu dilakukan melalui konflik kelas.

Berbeda dengan revolusi, makna dan cakupan reformasi hampir tidak pernah dirumuskan secara tegas. Tetapi pembicaraan tentang reformasi biasa merujuk pada gerakan protes Martin Luther dan kawan-kawan terhadap Gereja Katholik pada pertengahan abad ke-16, yang membuahkan pemisahan antara Katholik Ortodoks dan Kristen Protestan. Reformasi yang awalnya digerakkan oleh Luther dimaksudkan sebagai perlawanan untuk kebebasan, yaitu kebebasan umat dari peraturan ketat gereja Katholik, kebebasan dari kontrol kependetaan, kebebasan pejabat politik dari campur tangan gereja, kebebasan pendeta lokal dari Paus di Roma. Kaum Protestan membawa teologi reformasi ke dalam teori demokrasi. Karena semua orang berkedudukan sama di hadapan Tuhan, mereka harus berdiri sama di hadapan agen-agen politik Tuhan dalam sebuah negara. Karena Tuhan menjamin kebebasan hakiki manusia untuk hidup, maka negara harus menjamin kebebasan sipil. Negara harus menjamin kebebasan individu untuk berbicara, berkarya, berkumpul dan menjadi penguasa di masyarakat. Negara juga harus mempromosikan dan melindungi kemajemukuman institusi-institusi sosial, khususnya gereja, sekolah dan keluarga. Negara dan masyarakat harus dibangun atas dasar kontrak sosial dan konstitusi; yang keduanya mencerminkan gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, melindungi hak-hak sipil, dan membatasi kekuasaan penguasa. Kekuasaan harus dibagi dan saling kontrol antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pejabat politik harus dipilih oleh rakyat dan dibatasi oleh hukum. Jika pejabat politik melakukan penyelewengan mereka pantas diabaikan; jika mereka tetap menyeleweng maka mereka harus dilawan dan diganti dengan kekuatan massa (John Witte, Jr., 1996).

Teologi reformasi Lutheran bagaimanapun telah memberi inspirasi tumbuhnya komunitas gereja yang demokratis pada abad ke-16 sampai ke-17. Gereja Calvin di Inggris dan Amerika misalnya, telah diciptakan sebagai komunitas yang demokratis. Kekuasaan gereja dipilih secara demokratis dan memegang kekuasaan secara terbatas. Hukum-hukum gereja mengalami kodifikasi melalui badan perwakilan publik. Umat gereja sering menggelar pertemuan umum untuk menilai kinerja pejabat (pengurus) gereja dan dengan sengaja merubah doktrin, tata peribadatan dan pemerintahan.

Teologi reformasi Lutheran juga memberi inspirasi bagi reformasi politik yang demokrasi di zaman modern. Para pengikut Luther misalnya mendorong kota-kota di kawasan Skandinavia dan Jerman untuk membentuk undang-undang baru untuk melawan kaum feodal maupun kontrol gereja, menjamin warga sipil dari kejahatan, mendorong toleransi beragama, memperluas program pendidikan publik dan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Kaum Calvinis membawa tujuh provinsi bagian utara Belanda ke dalam revolusi melawan raja Spanyol pada tahun 1567. Mereka juga membantu merancang deklarasi kemerdekaan 1581, konfederasi republik Belanda dan kerangka kerja bagi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Di zaman modern, teologi reformasi memberi inspirasi bagi studi demokratisasi. Dalam studi demokratisasi, reformasi sering dimaknai sebagai liberalisasi politik yang dikendalikan oleh rezim atau transisi yang diawali oleh insiatif dari atas. Juan Linz (1978) misalnya, memperkenalkan konsep *reforma* (reformasi) yang dibedakan dengan *ruptura* (penggulingan). Menurut Linz, *reforma* adalah jalur transisi dari atas, yaitu ketika penguasa mengambil insiatif untuk memulai transisi antara lain dengan menggelar liberalisasi politik, mengurangi kontrol represifnya, merombak aturan main politik, serta menggelar pemilihan umum yang demokratis untuk mengakhiri rezim otoritarian. Sebaliknya *ruptura*, menurut Linz, adalah jalur transisi dari bawah yang diawali oleh gelombang aksi massa atau oposisi yang berhasil menggulingkan penguasa.

Reformasi sebagai jalur transisi menuju demokrasi banyak terjadi di sejumlah negara. Kasus paling populer terjadi di Uni Soviet, ketika Mikhail Gorbachev pada tahun 1986 meluncurkan *perestroika* dan *glasnosts*, yang mengakhiri totalitarisme dan sekaligus mengawali demokratisasi di negeri itu. Di Korea Selatan, Roh Tae Woo – seorang jenderal yang sebelumnya merupakan pendukung otoritarianisme -- memulai reformasi setelah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1987. Di Brazil, reformasi politik tanpa gelombang protes sosial telah diawali oleh liberalisasi politik presiden Ernesto Geisel (seorang jenderal berhaluan moderat) pada tahun 1973.

Reformasi yang dirintis oleh Geisel dan penerusnya membuahkan transisi menuju demokrasi setelah digelar pemilihan umum secara demokratis pada tahun 1985.

Keputusan rezim memulai reformasi menuju demokrasi biasanya terjadi karena didasari pertimbangan kelompok elite bahwa kepentingan-kepentingan mereka jangka panjang akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis. Tetapi jalur reformasi dari atas umumnya menghasilkan beberapa kecenderungan. *Pertama*, proses demokratisasi bisa saja dihentikan oleh pemegang kekuasaan karena situasi yang muncul pada masa liberalisasi itu dianggap terlalu mahal biayanya ketimbang biaya represi. *Kedua*, karena redemokratisasi dari atas itu dikaitkan dengan pemeliharaan kepentingan elite, maka kecenderungan yang terjadi adalah munculnya demokrasi terbatas. *Ketiga*, kekuatan militer akan terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan hak-haknya tetap ada dan hal ini sangat mengganggu proses redemokratisasi (Alfred Stepan, 1986).

Reformasi tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan yang disengaja oleh penguasa, tetapi juga mencakup perubahan dalam konteks pemerintahan (*governance*). Menurut Michael Bratton dan Nicholas van de Walle (1994), reformasi politik adalah reformasi atau perubahan pemerintahan (*governance*), yang mencakup tiga aspek utama: (1) perubahan sistem kerpartaian dan pemilihan umum yakni amandemen terhadap perangkat peraturan yang menjamin kompetisi aktor-aktor atau partai politik dan partisipasi publik secara bebas; (2) perubahan konstitusional yaitu amandemen terhadap konstitusi yang menghasilkan pembatasan kekuasaan penguasa atau negara; dan (3) perubahan administratif yang menciptakan birokrasi lebih rasional, efisien, fleksibel, dan bertanggung jawab. Rumusan Michael Bratton dan Nicholas van de Walle itu barangkali bisa dimaknai sebagai reformasi total bidang politik, yang menghasilkan perubahan struktur politik (pemerintahan) secara total. Lebih gampangnya, konsepsi itu bisa disebut sebagai “reformasi total”. Konsep “reformasi total” itu berbeda dalam soal derajat dengan konsep “reformasi parsial”. Yang terakhir ini hanya mencakup pergantian pemimpin atau pemerintahan tanpa disertai dengan perubahan politik secara menyeluruh. Merujuk pada Donald Share (1987), konsep “reformasi parsial” itu identik dengan ekstriksi, yakni kejatuhan penguasa (pemimpin) yang diikuti dengan eforia politik. Tentu saja ekstriksi dan eforia ini bukan semata karena kehendak penguasa atau karena konflik elite, tetapi muncul karena kebangkitan rakyat. Dengan kalimat lain, ekstriksi atau “reformasi parsial” adalah kejatuhan penguasa yang diikuti dengan liberalisasi politik. Sedangkan “reformasi total” tidak hanya mencakup kejatuhan penguasa, pergantian pemerintahan, dan liberalisasi politik, melainkan mencakup perubahan politik secara menyeluruh.

Di Indonesia, istilah “reformasi total” terkait dengan demokratisasi yang mulai populer sejak tahun 1998. Dalam wacana publik, reformasi rupayanya mempunyai dua target: (1) target maksimal yang mencakup pencabutan UU politik, amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi ABRI, penghapusan KKN dan penguatan otonomi daerah; dan (2) target minimal yaitu mundurnya Soeharto dari jabatannya. Target maksimal itu secara teoretis identik dengan “reformasi total” atau reformasi sedangkan target minimal identik dengan “reformasi parsial” atau ekstriksi. Yang terjadi ternyata bukanlah reformasi total, melainkan hanya ekstriksi (reformasi parsial), yakni kejatuhan Soeharto yang diikuti dengan pergantian pemerintahan dan liberalisasi politik. Setelah Soeharto jatuh, publik menikmati eforia politik yang luar biasa; mereka bisa meluapkan aspirasi politiknya secara bebas tanpa restriksi dari penguasa.

Dalam arena eforia itu, liberalisasi politik mengalami penyebaran ke seluruh penjuru Indonesia. Elemen-elemen masyarakat lokal langsung meluapkan aspirasinya dengan menggelar protes sosial untuk reformasi politik. Masyarakat bawah tidak begitu peduli dengan konsep reformasi total seperti dibayangkan oleh kaum kelas menengah kota, apalagi reformasi total ini gagal diwujudkan. Dalam wacana lokal di era liberalisasi politik, reformasi sangat populer dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pemimpin yang bermasalah. Seorang petani di desa misalnya bisa mengatakan: “Kepala Desa jatuh terkena reformasi”. Apa yang dimaksud dengan reformasi di mata masyarakat lokal sebenarnya hanya terbatas pada reformasi parsial atau ekstriksi. Pemaknaan ini merupakan sesuatu yang menarik, yang perlu dikaji lebih mendalam.

## Protes Sosial

Definisi “protes sosial” sangat bervariasi, tergantung pada tempat, waktu dan siapa yang melakukan observasi terhadap fakta. Konsep protes sosial sering tumpang tindih dengan konsep-konsep lainnya seperti pembangkangan, pemberontakan, perilaku kolektif, aksi kolektif, demonstrasi, unjuk rasa, kekerasan sipil, gerakan sosial dan lain-lain. Ahli gerakan sosial terkemuka, Charles Tilly (1981), rupanya lebih suka memakai istilah aksi kolektif ketimbang protes sosial, pembangkangan atau pemberontakan. Beberapa konsep yang terakhir itu, menurut Tilly, mencerminkan pendakwaan terhadap maksud dan posisi politik para aktor dariacamata pemegang kekuasaan.

Secara substansial aksi kolektif sebenarnya tidak berbeda dengan protes sosial. Keduanya merupakan bentuk tindakan bersama massa untuk menantang (melawan) pemegang kekuasaan. Sydney Tarrow (1994) misalnya, mendefinisikan aksi kolektif sebagai perlawanan bersama oleh rakyat (*people*) dengan upaya bersama dan solidaritas dalam interaksi yang berlanjut dengan elite, musuh-musuhnya dan pemegang kekuasaan. Aksi kolektif bisa hadir dalam bentuk asosiasi kepentingan, gerakan protes sosial, pemberontakan, pembangkangan, atau revolusi.

Tetapi studi ini lebih menyukai konsep protes sosial ketimbang aksi kolektif, meskipun keduanya bisa saling dipertukarkan. Mengapa? *Pertama*, dalam masyarakat selalu hadir penguasa dan rakyat yang dikuasai. Represi adalah sumberdaya yang dimiliki oleh penguasa, dan protes atau perlawanan adalah sumberdaya atau senjata milik rakyat (James Scott, 1985). *Kedua*, dibanding dengan aksi kolektif, protes sosial tampaknya jauh lebih eksplisit, provokatif dan lebih membumi dalam konteks masyarakat lokal di Indonesia. Aksi kolektif barangkali bisa hadir sebagai perlawanan pasif, sedangkan protes sosial adalah perlawanan secara aktif dan terbuka. *Ketiga*, protes adalah gerakan massa yang lebih jelas, yang tidak semata-mata karena tidak puas atau emosi untuk merusak tatanan sosial-politik, melainkan gerakan yang rasional dan disengaja untuk mengawali perubahan politik.

Di sisi lain, dalam berbagai literatur ditemukan sebuah pemahaman bahwa gerakan sosial tampil tidak sekadar protes, pembangkangan, pemberontakan dan sebagainya. Tetapi teori gerakan sosial “lama” yang sangat reduksionis dan dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural sama sekali tidak membedakan dengan tegas perbedaan antara protes sosial dan gerakan sosial. Protes sosial adalah strategi yang inheren dalam gerakan sosial. Gerakan sosial sering dipahami sebagai aksi bersama nonkelembagaan yang memiliki komponen-komponen pasti seperti ideologi, program atau seperangkat tujuan, taktik-taktik untuk mencapai tujuan, dan aktor sebagai pemimpin, serta menawarkan perubahan atau perlawanan terhadap suatu perubahan dalam masyarakat (Ralph Turner dan Lewis Killian, 1972). Bahkan Herberle (1951) melihat gerakan sosial sebagai bentuk perilaku politik kolektif nonkelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan.

Cara pandang yang reduksionis itu dikritisi oleh pendukung “teori baru” gerakan sosial. Para teoritis baru telah merumuskan kerangka kerja yang memandang gerakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kelompok atau kepentingan sosial dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas. Touraine (1971), misalnya mencatat bahwa dalam masyarakat pascaindustri, gerakan kelas buruh atau gerakan serikat buruh tidak berada lagi di pusat konflik masyarakat. Kelas buruh, demikian tulis Touraine (1971), bukan lagi pelaku sejarah yang istimewa, bukan karena gerakan buruh lemah atau tunduk kepada strategi partai politik tertentu, ataupun karena pemimpin yang buruk; tetapi lebih dikarenakan penggunaan kekuasaan di dalam perusahaan kapitalis tidak lagi menempatkan seseorang pada pusat sistem ekonomi dan konflik sosialnya.

Teori-teori baru gerakan sosial justru melihat gerakan sosial sebagai usaha untuk menghasilkan transformasi mendasar dalam hakikat praktek politik maupun teori tentang gerakan sosial itu sendiri. Mereka juga menjelaskan bahwa salah satu ciri gerakan sosial baru adalah penolakannya atas analisis sosial yang didasarkan kepada pembagian ruang politik menjadi dua kubu yang saling bertentangan secara tegas (*borjuis* dan *proletar*). Dalam situasi baru, keberagaman aktor sosial memapankan kehadiran ruang autonomi mereka dalam lingkungan sosial dan politik yang terfragmentasi. Berdasarkan analisis dan pengamatan mereka, dipahami bahwa untuk menilai

dampak gerakan sosial maka gerakan sosial harus dipahami dan ditempatkan dalam konteks proses demokratisasi yang sangat luas. Proses demokratisasi ini merupakan proses transformasi sosial atas aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, dan politik maupun aspek kehidupan lainnya.

Baik mengikuti “teori lama” maupun “teori baru” gerakan sosial, protes sosial tetap merupakan strategi dan taktik yang inheren dalam gerakan sosial. Protes sosial bisa dikatakan sebagai gerakan sosial berskala rendah atau sebagai embrio dari gerakan sosial yang menyeluruh untuk mendorong transformasi (perubahan) sosial. Ini bukan karena setiap gerakan selalu tampil dengan wajah yang keras dan ekstrem, tetapi karena protes sosial merupakan sumberdaya yang utama sebagian besar orang untuk melawan musuh-musuhnya yang mempunyai perlengkapan lebih komplet. Setiap protes sosial pasti mempunyai jaringan sosial rakyat, punya wacana ideologi, dan perjuangan politik.

Lingkaran protes sosial tentu tidak muncul begitu saja sebagai bentuk ekspresi spontan ketidakpuasan atau emosi yang meluap, melainkan mempunyai tahap-tahapan yang sistematis untuk mencapai sasarannya. Smelser menyatakan terdapat enam tahap dalam perkembangan suatu gerakan sosial. *Pertama, structural conduciveness* menunjukkan pada suatu kondisi atau keadaan yang memungkinkan munculnya suatu gerakan sosial, sebagai suatu contoh, masyarakat yang didominasi oleh kaum pria dimana kaum wanita dieksploitasi dan dijadikan warga kelas dua merupakan suatu kondisi awal bagi munculnya suatu gerakan perempuan. *Kedua, structural strain* terjadi apabila di dalam masyarakat yang secara struktural telah terkondusif bagi munculnya suatu gerakan, berlangsung perasaan tidak puas dikalangan anggota-anggotanya. Warga masyarakat dalam hal ini merasakan ketidakpuasannya terhadap kondisi yang ada di sekelilingnya. *Ketiga, growth an spread of generalized belief*. Pada tahap ini dikalangan anggota masyarakat ditumbuhkan dan disebarkan keyakinan atau kepercayaan yang sifatnya umum. Adapun artinya, kepada anggota masyarakat diyakinkan bahwa kondisi yang ada di sekelilingnya tidak memuaskan dan perlu diadakan perubahan. *Keempat, precipitating factors*. Tahap ini menunjukkan adanya suatu peristiwa tertentu yang dapat mempercepat dan mengobarkan munculnya suatu gerakan sosial. Tahap ini dapat dinyatakan tahap yang memacu kemunculan suatu gerakan sosial. *Kelima, mobilization of participants for action*. Tahap ini terjadi setelah berlangsungnya suatu peristiwa yang menyulut sentimen dan rasa solidaritas massa. Dengan adanya peristiwa tersebut maka massa atau anggota masyarakat dibujuk untuk terlibat dalam suatu gerakan. Dalam hal ini peran yang dipunyai pemimpin untuk memobilisir dan mengorganisir massa sangatlah penting. Tanpa adanya pengaruh dari pemimpin terhadap anggota masyarakat untuk bergerak, maka akan mudah sekali rintisan munculnya suatu gerakan sosial dapat digagalkan. *Keenam, application of social control*. Kontrol sosial pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan terhadap gerakan. Persoalannya adalah apakah yang ada pada tangan penguasa digunakan untuk menghancurkan gerakan ataukah justru kontrol sosial tadi menjadikan gerakan sosial tersebut semakin berkembang dimana solidaritas pengikut gerakan semakin tinggi.

Merujuk beberapa studi, mulai dari Smelser hingga Charle Tilly (1975) maupun Robert Ted Gurr (1970), setiap protes sosial melawati beberapa tahapan strategis. Tahap pertama, pernyataan spontan tentang ketidakpuasan bersama. Suatu gerakan sosial berawal ketika orang merasa tidak puas terhadap struktur sosial yang ada di sekelilingnya. Sebagian dari mereka kemudian mengelompokkan diri dan menyatakan pandangan tentang ketidak-puasannya. Dalam tahap ini suatu gerakan sosial menampilkan diri sebagai tindakan bersama yang sifatnya spontan. Fungsi yang penting dari tahap pertama ini adalah untuk menarik perhatian massa (publik) yang diharapkan dapat memberikan dukungan untuk berlangsungnya suatu gerakan sosial. Tahap kedua, pemilihan pimpinan gerakan. Tahap ini berawal ketika beberapa individu menyatakan bahwa perubahan sosial yang diusulkan mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil. Individu-individu ini biasanya akan berperan sebagai pimpinan dan sebagai pimpinan mereka mulai memberikan arah bagi berlangsungnya gerakan. Fungsi yang penting dari tahap ini adalah diterimanya beberapa individu sebagai pimpinan gerakan.

Tahap ketiga, transformasi tindakan tidak berstruktur menjadi tindakan yang terorganisir. Tahap ini sering disebut sebagai periode pengorganisasian dan perencanaan. Pada tahap ini tindakan yang tidak berstruktur yang terjadi pada tahap pertama ditransformasikan menjadi suatu tindakan yang terorganisir. Sehubungan dengan hal tersebut maka peranan pimpinan gerakan menjadi sangat penting. Pimpinan harus mampu merumuskan tujuan-tujuan antara yang membimbing tercapainya tujuan akhir dari gerakan. Dalam hal ini memang pimpinan gerakan harus melakukan banyak pekerjaan sebelum tindakan yang bersifat spontan dan tidak terorganisir berubah menjadi suatu gerakan sosial yang teratur dan terarah dengan baik. Salah satu tugas para pimpinan gerakan yang penting adalah menjelaskan tujuan yang dicanangkan kepada para pengikutnya sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas ke arah mana mereka bergerak.

Tahap keempat, konfrontasi dengan “musuh” gerakan. Pada tahap ini suatu gerakan sosial benar-benar dalam puncak keseriusan dan mengajukan tuntutan dan berusaha sekuat mungkin demi diterimanya tuntutan tadi. Pada periode ini gerakan berada dalam posisi berhadapan dengan “musuhnya”, yaitu pihak-pihak yang mengalami kerugian apabila kondisi “status quo” yang ada diguncang oleh gerakan. Tahap ini dapat merupakan tahap yang relatif singkat apabila gerakan dan “musuhnya” dapat dengan segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi dimungkinkan pula tahap ini merupakan periode yang relatif lama dan hal ini dapat berlangsung apabila gerakan dan “musuhnya” sama-sama mempunyai kekuatan yang seimbang dan tidak bersedia menyerah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini kedua-belah pihak, gerakan dan musuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan negosiasi dan pemecahan masalah yang dihadapi demi keuntungan masing-masing pihak. Esensi dari tahap ini adalah dapat dinyatakan sebagai periode dimana gerakan berkonfrontasi dengan “musuhnya” dan memaksa “musuhnya” tadi untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya.

Tahap kelima, pencapaian hasil. Tahap ini merupakan dimana orang menyaksikan apakah gerakan yang sudah dan tengah berlangsung mampu atau tidak mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berakhirnya suatu gerakan, masyarakat akan mengadaptasi pola tindakan yang baru yang muncul dari persaingan antara gerakan dan “musuhnya”. Jika gerakan sukses biasanya diperlukan waktu yang cukup untuk menyebarluaskan pola tindakan yang baru tadi ke seluruh lapisan masyarakat. Jika gerakan gagal, para partisipan membubarkan diri atau mungkin merumuskan kembali tujuan yang telah ditetapkan dan mencoba meraihnya melalui gerakan yang baru.

### **Protes Sosial dan Reformasi Politik**

Reformasi politik dan protes sosial adalah dua isu penting yang sudah lama menjadi perhatian ilmuwan sosial. Studi ini mengajukan argumen bahwa protes sosial dan reformasi politik adalah dua isu yang tidak bisa dipisahkan. Reformasi hampir tidak mungkin dihasilkan oleh tindakan voluntaristik dari penguasa, melainkan selalu diawali dengan protes sosial.

Protes sosial merupakan sebuah aksi kolektif berbasis massa yang berjuang mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi politik. Aksi kolektif, demikian tulis Sydney Tarrow (1994), adalah bentuk perjuangan untuk reformasi. Michael Bratton dan Nicolas van de Walle (1992) bahkan menemukan bukti-bukti empirik bahwa reformasi politik di sebagian besar negara di kawasan Afrika hampir tidak diawali oleh insiatif negara, melainkan merupakan bentuk respons negara terhadap gelombang protes massa. Di Indonesia, gelombang reformasi yang meruntuhkan Soeharto dan mengakhiri Orde Baru juga tidak semata karena perubahan politik yang diawali oleh liberalisasi politik atau inisiatif oleh penguasa, melainkan diawali dengan gelombang protes sosial yang berkobar di berbagai kota.

Bagaimana memahami secara konseptual keterkaitan antara protes sosial dan reformasi politik itu? Pemahaman tentang relevansi antara protes sosial dan reformasi politik sering merujuk pada dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang pertama adalah fungsionalisme struktural. Fungsionalisme cenderung melihat masyarakat dan pranata sosial sebagai sistem dimana seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerjasama guna menciptakan keseimbangan. Salah satu proposisi penting fungsionalisme adalah akan selalu ada reorganisasi internal karena

kebutuhan memperbaiki keseimbangan. Fungsionalisme menekankan kesatuan masyarakat dan apa yang dimiliki bersama oleh anggotanya. Karena itu, fungsionalisme memandang bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihindari karena bisa merusak keseimbangan relasi sosial dan harmoni dalam masyarakat. Protes sosial, sebagai sebuah konflik sosial, bagi fungsionalisme dipandang sebagai perilaku menyimpang, sporadis, spontan, tidak terorganisir, dan untuk merusak tatanan sosial yang sudah terpelihara secara mapan.

Ilmuwan politik terkemuka berhaluan struktural-fungsional, Gabriel Almond (1965), misalnya, memandang bahwa protes atau aksi kolektif adalah perwujudan saluran partisipasi nonkonvensional sporadis, yang dilakukan oleh kelompok kepentingan anomik. Sebagai penganut aliran struktural fungsional, Gabriel Almond menganjurkan bahwa sistem politik yang demokratis bisa dibangun berdasarkan interaksi secara seimbang di antara struktur-struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, dan partisipasi secara konvensional melalui pemilihan umum, partai dan parlemen. Apabila struktur-struktur dan fungsi-fungsi ini berinteraksi secara “seimbang” maka tidak bakal muncul protes sosial jalanan yang sebenarnya akan merusak sistem yang sudah terlembaga.

Tetapi pandangan struktural-fungsional telah kehilangan pengaruh di hadapan teoretisi politik kontemporer karena perspektif yang menekankan keseimbangan itu ternyata tidak bisa menjelaskan mengapa partisipasi politik nonkonvensional merajalela di setiap tempat, termasuk di negara-negara demokrasi yang mapan. Dalam studinya di 21 negara-negara demokrasi maju, Dalton (1995) memperlihatkan bahwa publik mengalami kejenuhan berpartisipasi politik lewat saluran konvensional. Ia misalnya menunjukkan rata-rata perilaku memilih sebesar 82% pada tahun 1960-an, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 76% pada tahun 1990-an. Di Amerika Serikat, merosotnya perilaku memilih (*turnout voting*) dalam pemilihan umum terkait dengan sikap publik yang sinis dan tidak percaya pada sistem politik yang terlembaga. (Pippa Norris, 1999). Aktivisme politik publik telah lama bergeser dari partisipasi konvensional menjadi partisipasi nonkonvensional dalam bentuk protes sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial.

Karena gagal memahami meluasnya protes sosial di berbagai negara, pendekatan struktural-fungsional dikritik habis oleh pendekatan konflik. Sebut saja ini pendekatan yang kedua. Pendekatan konflik ini lahir sebagai reaksi keras terhadap fungsionalisme. Teori konflik pada dasarnya mempunyai tiga asumsi dasar. *Pertama*, rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk mememuhinya. *Kedua*, kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya. *Ketiga*, nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, ketimbang sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.

Teori konflik berakar pada Marxisme tradisional yang didasarkan pada pendapat mereka bahwa revolusi adalah suatu kebutuhan yang disebabkan oleh memburuknya hubungan produksi yang memunculkan masa krisis ekonomi, depresi dan kehancuran. Berbeda dengan struktural-fungsional, pendekatan konflik melihat bahwa aksi kolektif bukanlah aksi yang spontan, emosional, menyimpang dan merusak sistem, melainkan aksi yang rasional dan dilakukan secara sadar untuk perubahan politik baik melalui reformasi politik maupun revolusi sosial.

Pemahaman tentang reformasi politik sebagai ekstriksi sangat paralel dengan pemahaman tentang protes sosial. Artinya protes sosial yang digerakkan oleh elemen-elemen masyarakat lokal adalah senjata yang menyebabkan ekstriksi. Tetapi sebagai bentuk-bentuk aksi kolektif, antara protes sosial, gerakan sosial dan bahkan revolusi sangat berbeda dalam hal strategi, durasi, sasaran dan hasil perubahan. Perbedaan ini digambarkan secara gamblang dalam tabel 2. Dalam tabel itu ditegaskan bahwa protes sosial adalah bentuk aksi kolektif yang paralel dengan reformasi politik, gerakan sosial paralel dengan transformasi sosial, dan revolusi sosial adalah bentuk aksi kolektif besar yang menghendaki perubahan mendasar struktur sosial dan politik. Protes sosial adalah perlawanan kolektif terhadap pemerintah yang berjangka pendek dan spontan untuk mencapai sasaran reformasi, yang bisa menghasilkan perubahan kebijakan pemerintah, runtuhnya pemerintahan dan perubahan struktur politik.

Tipe aksi	Protes Sosial	Gerakan Sosial	Revolusi Sosial
Strategi	Perlawanan kolektif massa terhadap pemerintah	Penyadaran dan penguatan masyarakat, pengorganisasian dan perlawanan kolektif	Radikalisasi, pengorganisasian yang matang, dan pemberontakan kelas bawah
Durasi	Pendek dan spontan	Jangka panjang, berkelanjutan	Spontan dan frontal ketika kondisi obyektifnya sedang matang
Sasaran	Reformasi politik	Transformasi sosial	Revolusi
Hasil perubahan	Perubahan kebijakan, runtuhnya penguasa, perubahan struktur politik	Perubahan gradual dan mendasar terhadap struktur sosial, budaya dan politik.	Perubahan mendasar struktur sosial dan politik.

Memahami protes sosial bukan sekadar perilaku menyimpang yang dilakukan secara kolektif oleh kumpulan orang-orang jalanan yang punya mental kerumunan (*crowded mental*), melainkan sebagai bentuk konflik yang tumbuh dalam konteks sosial masyarakat. Argumen yang pertama ini menampilkan pandangan fungsionalisme struktural yang selalu menilai protes sebagai perilaku kolektif yang merusak tatanan sosial yang mapan, dan sebaliknya lebih banyak merujuk pada tradisi Marxis. Akan tetapi konflik dalam protes sosial itu tidak dipahami dalam kerangka teori konflik “lama” yang berpusat pada konflik kelas, melainkan dipahami dalam kerangka teori konflik “baru” yang difokuskan pada konteks konflik antara masyarakat dan negara. Konflik sosial ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan negara seperti dibayangkan oleh Marxisme ortodoks, melainkan sebagai upaya untuk reformasi politik, serta sebagai embrio gerakan sosial untuk mendorong demokratisasi, mengurangi hegemoni negara di hadapan masyarakat, dan penguatan elemen-elemen masyarakat sipil. Aktor-aktor strategis dalam masyarakat yang terlibat dalam konflik (protes sosial) tidak lagi berpusat pada buruh dan tani, melainkan berpusat pada elemen-elemen kelas menengah perkotaan.

Dalam konteks konflik antara negara dan masyarakat itu pula, Vincent Boudreau (1996) secara menarik membuat dua tipe gerakan sosial. *Pertama*, adalah tipe “gerakan utara” (di kawasan negara-negara kapitalis-demokratis yang sudah mapan), yang ditandai dengan gerakan menekan dan merubah kebijakan pemerintah. *Kedua*, adalah tipe “gerakan selatan” (di negara-negara otoriter-kapitalis atau negara-negara kapitalis-demokrasi yang masih bayi) yang umumnya diarahkan untuk mengurangi kontrol negara, memperbesar sumberdaya masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dominasi negara. Di Indonesia, gelombang gerakan sosial dan protes sosial tampaknya bisa dikategorikan sebagai tipe yang kedua ketimbang yang pertama. Tampilnya berbagai organisasi sosial dan meluasnya protes sosial selama dua tahun terakhir merupakan upaya elemen-elemen masyarakat menekan negara (pemerintah) untuk mengawali reformasi, demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil. Di negeri ini, selama tiga dasawarsa terakhir, hampir tidak pernah muncul gerakan pemberontakan atau kudeta yang hendak menggantikan penguasa. Gelombang protes sosial yang menjatuhkan penguasa adalah awal dari reformasi politik menuju demokratisasi.

### Strategi Gerakan Sosial

Konsep gerakan sosial dimunculkan tahun 1842 oleh Lorenz von Stein, seorang sarjana Jerman, untuk menggambarkan gerakan sosial proletarian sosialis. Gerakan sosial dikategorikan sebagai gerakan yang dilakukan kelas pekerja atau buruh yang menuntut pembagian kesejahteraan ekonomi yang adil dalam konteks hubungan pekerja dan pemilik modal. Dalam istilah yang lebih strukturalis, gerakan sosial menuntut perubahan sosial yang lebih fundamental tatanan sosial masyarakat yang dianggap timpang dan tidak adil. Dalam perspektif Marxian, gerakan sosial diawali dari adanya proses alienasi dan marginalisasi buruh yang terjadi selama proses industrialisasi. Bagaimana alienasi dan marginalisasi terjadi, dikaitkan dengan proses pemiskinan kerja atau buruh akibat sistem pengupahan yang murah dan cenderung eksploitatif terhadap diri



pekerja. Pekerja adalah bagian dari mesin ekonomi atau komoditas produksi sama seperti bahan-baku yang harus ditekan sekecil mungkin cost nya untuk menghasilkan benefits yang sebesar-besarnya bagi pemilik kapaital. Persepsi pemilik modal terhadap pekerja (force of production) adalah identik dengan mesin produksi (means of production) sehingga menempatkan posisi pekerja secara ekonomi, sosial dan politik sebagai pihak yang dapat dieksploitasi secara fisik untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Posisi pekerja yang secara ekonomi dan sosial sebagai sub-ordinat pemodal ini mengawali terjadi proses alienasi sosial, ekonomi dan politik diri pekerja dari dunia sekitarnya.

Dalam perspektif strukturalis, mesinisasi pekerja sebagai mesin produksi tidak sebanding dengan upah yang mereka terima namun mereka tidak mampu meningkatkan posisi tawar ekonomi karena pekerja sudah sedemikian tergantung dengan upah yang rendah guna menjamin eksistensi kehidupan mereka. Upah rendah dan kemiskinan menjadi keseharian pekerja dan mereka menerima marginalisasi sebagai hal yang biasa, sehingga muncul istilah *class in itself* (class in itself) yaitu suatu bentuk penerimaan atas realitas sosial yang mengarah pada terjadinya proses pemiskinan pekerja sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Konsep yang tepat untuk menggambarkan keadaan demikian adalah kesadaran palsu (false consciousness) yang melingkupi kesadaran pekerja atas realitas sosial dan ekonomi yang eksploitatif. Dalam konteks teori gerakan sosial, perubahan kesadaran palsu menuju kesadaran yang sebenarnya (*class for it self*) membutuhkan proses penyadaran politik dan mobilisasi politik melalui pembentukan organisasi pekerja yang kuat. Fungsi utama penyadaran dan mobilisasi politik adalah untuk membongkar (unmask) realitas semu (palsu) yang ada dalam konstruksi pemikiran pekerja atas dunia sosial mereka yang tereksplotasi. Fase unmask atas realitas semu (palsu) guna menghasilkan kesadaran yang sebenarnya adalah awal dari terbentuknya suatu gerakan sosial, yang selanjutnya dapat ditahapkan sebagai berikut (Dawson, Gettys 1934) :

1. *Unrest*, (muncul kekacauan, sikap frustrasi, merasakan ketidakadilan)
2. *Excitement*, (menuju pada sublimasi, keinginan yang megebu untuk bertindak menentang)
3. *Formalization*, (perumusan konsep dan ideologi perjuangan)
4. *Institutionalization*, (pelembagaan / organisasi pergerakan)
5. *Dissolution* (akhir dari tujuan)

Menurut perspektif strukturalis, ide tentang gerakan sosial dihubungkan dengan struktur sosial yang ada seperti adanya ketimpangan dan ketidakadilan serta perasaan alienasi. Adanya faktor yang saling berkait dengan struktur sosial diungkapkan Heberly seperti adanya kaitan dengan:

1. Ideologi, keyakinan dan kohesi sosial kelompok
2. Faktor kepentingan psikologi sosial, sentimen dan kebencian/ dendam
3. Struktur internal gerakan sosial, distribusi kekuasaan dan pengaruh intern
4. Strategi gerakan
5. Fungsi gerakan dalam konteks perubahan sosial yang lebih besar

Sementara itu, Baldridge menghubungkan gerakan sosial dengan perilaku kolektif yaitu aksi yang dilakukan kelompok terorganisasi untuk memformulasikan adanya perubahan sosial atau memperjuangkan ide-ide perubahan (Baldridge, 1980:509). Dengan aspek perilaku kolektif, maka gerakan sosial dilihat sebagai reaksi psikologi atas situasi lingkungan sosial yang dianggap tidak adil oleh kelompok yang melakukan aksi protes dengan tujuan perubahan sosial. Faktor-faktor sosial yang menjadi sebab gerakan adalah aspek diskrepansi atau kesenjangan antara cita-cita/harapan yang ingin dicapai dengan kenyataan sosial yang ada. Akumulasi diskrepansi menyebabkan frustrasi sosial dan kekecewaan sosial sehingga menumpuk menjadi bentuk kesadaran massa (kolektif) menentang struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil. Selanjutnya ia merumuskan ciri-ciri gerakan sosial yaitu:

1. Berorientasi pada kekuasaan, yaitu perjuangan untuk mempengaruhi dan mengontrol sumber-sumber kekuasaan dalam masyarakat
2. Berorientasi pada nilai, yaitu adanya sistem nilai dan menyakinkan publik tentang nilai yang diperjuangkan melalui persuasi dan aksi -aksi protes misalnya yang terjadi di USA gerakan kebebasan perembuan dan gerakan penentangan diskriminasi ras
3. Adanya ekspresif personal, yaitu penemuan jati diri gerakan melalui figur personal yang kuat dan karismatis serta menjadi sentra ide-ide gerakan
4. Resistensi yaitu perlawanan dengan mempromosikan perubahan sosial atau bahkan menentang perubahan yang dipromosikan kelompok lain.

Gerakan sosial dapat diukur dari sejauhmana daya tahan gerakan dalam meng hadapi tekanan-tekanan kelompok luar. Gerakan sosial yang memiliki karakter kuat dalam kepemimpinan, sosialisasi ide-ide yang mengakar dan strategi merumuskan isu sebagai tema - tema krisis akan mampu bertahan relatif lama. Terkait dengan masalah tersebut suatu gerakan sosial ibarat embrio yang mengalami evolusi dan menghadapi tekanan -tekanan bahkan mendekati kehancuran kalau tidak mampu mengembangkan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengembangan gerakan;
2. Agitasi dan kesadaran ideologi gerakan;
3. Adanya ideologi atau keyakinan umum sebagai pemersatu gerakan;
4. Kebutuhan adanya kepemimpinan yang sentral sebagai figur pusat gerakan;
5. Interpretasi akan situasi sosial yang menyulut gerakan seperti kemiskinan, ketidakadilan,
6. Konflik akut dalam tubuh kekuasaan dan kondisi-kondisi sosial yang dianggap opresi dan diskriminasi rasial.

Sementara itu, dalam kaitan sebagai aksi massa kolektivitas, gerakan sosial berbeda dengan misalnya bentuk-bentuk protes sosial walaupun keduanya merupakan perilaku kolektif massa. Hal ini digambarkan oleh Lofland yang mengidentifikasikan tipe -tipe protes sosial sebagai bentuk aksi massa yang terjadi karena munculnya faktor -faktor krisis dalam kehidupan kelompok sosial. Protes sosial dikaitkan dengan bentuk pernyataan pendapat yang disampaikan beramai-ramai yang umumnya berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, boikot, pemogokan atau keengganan melakukan sesuatu terhadap kekuasaan dan mengeluarkan deklarasi yang menolak gagasan di muka umum (Lofland, 2003 :2-3). Reaksi protes sosial terhadap keadaan yang dipersepsikan sebagai krisis oleh kelompok protes lebih spontan dan tidak terstruktur sebagaimana sebuah gerakan sosial. Namun demikian, sebuah aksi protes sosial dapat berubah menjadi bentuk aksi gerakan sosial manakala terdapat kondisi-kondisi objektif seperti kondisi makro politik berubah tidak menguntungkan kelompok protes, adanya struktur organisasi yang permanen (*grassroot*) serta ideologi gerakan (Lofland, 2003:27). Menurutny, ada beberapa varian gerakan protes:

- 1) *Crowd* dengan emosi dominan pada aspek kecemasan, ketakutan, panik, teror, perasaan terancam;
- 2) *Mass* dengan emosi dominan pada ekspresi kerusuhan kolektif, frustrasi mendalam, ketidakberdayaan, terdapatnya perasaan kepuasan emosi (*ekstasi*) yang meluap-luap, menuju pada kerusuhan (*riot*) dan hysteria;
- 3) *Public* dengan emosi pada pemahaman sentimen umum yang relatif sama;
- 4) *Social movement* dengan emosi dominan pada tuntutan perubahan yang didahului pemahaman kolektif akan situasi politik yang tidak normal, krisis, ke mandegan yang merusak tatanan kelompok protes atau gerakan. Berbagai ketidaknormalan tersebut digambarkan sebagai masa-masa sulit dalam politik rasialisme di USA, aksi kaum gettho, gerakan kebebasan peremuan dan separatisme.[]

## **Materi 04**

### **GERAKAN SOSIAL; MEMBEDAH RELASI NEGARA, MASYARAKAT & KAPITALISME GLOBAL**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### **Pengantar**

Peran rakyat dalam arena publik tidak dapat dihindarkan dari konfrontasinya dengan peran negara. Konfrontasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari siklus politik-ekonomi (dan ideologi) yang berkembang. Pentingnya mendiskusikan isu ini, terutama pada dekade terakhir, erat terkait dengan wacana demokrasi yang bersifat dinamis. Paling tidak, ada empat kategori wacana demokrasi di Indonesia, yaitu wacana radikal, liberal, konservatif dan Islam. Setiap wacana tersebut pun terdiri dari variannya lagi, seperti Marxisme, Populisme Kiri, Feminisme dan Demokrasi Sosial mewakili wacana radikal; Liberalisme Politik dan Liberalisme Ekonomi, wacana Liberal, serta Modernisme Islam, Neo-Modernisme Islam dan Transformasi Islam, wacana Islam. Di Indonesia, wacana tersebut acap berhenti pada tataran konseptual atau jargon saja, oleh karena tradisi yang berkembang adalah tradisi antidemokrasi, di mana kekuasaan ditegakkan di atas kekerasan politik. Pembatasan terhadap pluralisme politik, kompetisi yang tidak fair untuk kepentingan penguasa, dan juga absennya kesetaraan dalam politik telah berlangsung lama sehingga melahirkan budaya otoritarianisme. Mungkin masih pekat dalam ingatan bagaimana Rezim Orde Baru dengan mapan mengandalkan seperangkat struktur ide untuk meligitimasi pemerintahannya yang otoriter.

#### **Hegemoni: Perampasan**

Anders Uhlin menyatakan bahwa budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, acap dianggap sebagai pendukung otoritarianisme.[1] Uhlin mencirikan tiga aspek budaya Indonesia yang melanggar hak asasi manusia (HAM), yaitu pertama, kepercayaan terhadap hirarki sosial berdasar pada gagasan Jawa tentang hubungan kawula dan gusti, kedua, obsesi terhadap keselarasan dan keteraturan, dan ketiga penekanan pada kewajiban yang melampaui pemenuhan haknya. Juga, AS Hikam (1996) dalam “Civil Society dan Demokrasi” menjelaskan bahwa Orde Baru dengan kebijakan politik ‘masa mengambang’nya (floating mass) telah efektif memarginalisasi partisipasi masyarakat. Argumennya adalah masyarakat perlu dilindungi dari konflik politik dan ideologis yang bakal memecah belah solidaritas tradisional mereka. Keberhasilan negara di bawah orde baru dalam memelopori proses restrukturisasi sosial, ekonomi dan politik, telah menempatkannya sebagai kekuatan dominan yang nyaris tanpa interupsi.

Birokrasi negara, terutama lembaga eksekutif, berkembang sebagai ‘aparatus efektif’ yang berkemampuan mengelola dan menangani mobilisasi politik untuk mendukung kebijakan negara. Selain itu, negara juga sukses mengontrol warga melalui berbagai korporatisasi dan mendapatkan konsensus politik melalui hegemoni ideologi. Hegemoni ini juga dilakukan dengan alasan bahwa pluralitas ideologi dipandang sebagai konsep Barat dan merupakan sumber pertentangan politik, oleh karena kecenderungannya dimanipulasi untuk puspa-ragam kepentingan kelompok. Persatuan ideologi dimaksudkan untuk membuat konflik ideologi dalam politik Indonesia di masa-masa mendatang sebagai irrelevan dan usang.

Hegemoni negara atas warganya tidak saja tampak dalam pengertian konstruksi ideologis negara yang formal, tetapi juga dalam proses produksi dan reproduksi sosial. Ini jelas terlihat dalam diskursus tentang modernitas. Artinya, negara menguasai diskursus tersebut, khususnya menyangkut pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Dus, negara tampil sebagai penerjemah dominan mengenai proses modernisasi, sedangkan warga masyarakat tertinggal dalam diskursusnya sendiri, dan ujungnya pengaruh negara menjadi tak tertandingi dalam proses sosial, ekonomi dan politik. Hegemoni tersebut diperkuat melalui jejaringan dan perangkat birokratis dan teknokratis. Pengaruh negara tersebut di bawah orde baru terjadi selama lebih dua dasawarsa, yang

mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap negara. Pada gilirannya, perkembangan civil society cenderung mengalami distorsi-distorsi dan akhirnya melemah. Singkatnya, orde baru sukses memobilisasi hegemoninya sehingga berakar dalam masyarakat.

### **Pergulatan di Arena Publik**

Arena publik selalu menarik untuk didiskusikan. John Friedman (1987) dalam *Planning in The Public Domain* menyatakan bahwa arena publik meliputi praktek administrasi, birokrasi, politik, sistem transformasi sosial dan sistem nilai. Dengan lingkup tersebut, Friedman mengajukan tiga tipe sistem perencanaan dan penyelenggaraan urusan publik, yaitu perencanaan alokasi (*allocative planning*), perencanaan inovatif (*innovative planning*), dan perencanaan radikal (*radical planning*). Perencanaan alokasi berfokus pada pengaturan sumber daya yang terbatas seperti dana, lahan, pekerjaan dan sebagainya; perencanaan inovatif berfokus pada perubahan institusional pada sistem sosial, dan perencanaan radikal berfokus pada semangat pengorganisasian kekuatan rakyat agar dapat memperkuat posisinya ke arah transformasi sosial. Lebih jauh, menurut Friedman, bahwa sebenarnya perencanaan merupakan akumulasi dari perkembangan tiga konsep dasar, yaitu *political philosophy* yang diantarkan oleh Arendt (1958), *macro sociology* yang diantarkan oleh Etzioni (1968) dan *Social Transformation* yang diwarnai oleh Marxisme dan Utopian Tradition.

Terlepas dari konsepsi diatas, praktek penyelenggaraan urusan publik acap menciut ke arena-arena teknis atau -banyak orang menyebutnya sebagai- *blue print oriented* yang tidak sensitif terhadap norma kemanusiaan. Selain itu, banyak pihak meragukan apakah perencanaan publik itu benar-benar pernah ada di negeri ini. Mengingat dalam realitanya, urusan publik acap menjadi bahan lobi-lobinya para elit saja, yang kadang-kadang hanya tefokus pada pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Prosesnya sendiri nyaris tidak ‘terjamah’ oleh kalangan masyarakat luas, khususnya kelompok marjinal. Sebagaimana yang dipaparkan di atas, seluruhnya adalah manifestasi dari siklus politik-ekonomi dan ideologi yang terjadi.

### **Terbangunnya Ruang Harapan?**

Banyak pihak yang optimis terhadap perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Indonesia berada di masa yang sangat bersejarah dalam kehidupan sebuah bangsa. Setelah bertahun-tahun di bawah dominasi penguasa, kini proses demokrasi telah dimulai. Harapan masyarakat agar suatu masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis dapat diwujudkan, sangatlah besar. Memang, mahal harganya yang harus ditebus bangsa ini untuk sampai pada siklus saat ini. Meskipun demikian, kondisi tersebut telah memberikan celah bagi setiap pihak di negeri ini untuk memulai perubahan. Fokus perhatian, dalam hal ini, banyak dicurahkan kepada usaha-usaha perubahan untuk memperkuat posisi rakyat atau publik yang selama ini hanya menjadi objek aliansi negara. Sebuah perubahan yang dapat menjamin rakyat, terlebih kelompok marjinal, memiliki ‘tempat’ yang adil dalam struktur sosial dan politik-ekonomi.

Dalam penyelenggaraan urusan publik, tantangan terbesarnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Melalui proses partisipasi warga diharapkan tercipta pembelajaran sosial, yang menghasilkan komitmen perubahan-perubahan sosial (*social change*). Selain itu, proses partisipasi tersebut dapat memperkuat dan memobilisasi masyarakat sebagai aktor dalam proses pembangunan mereka sendiri. Sekali lagi, ketika masyarakat miskin (marjinal) berpartisipasi dalam proses pembangunan, mereka dapat meningkatkan kemampuan serta membangun perilaku yang menjadi modal untuk menyatu dalam interaksi sosial yang lebih luas.

Dalam kondisi ini, wacana demokratisasi menjadi salah satu alternatif strategi. Dr. Amartya Sen, penerima Nobel Ekonomi tahun 1998, terang-terangan menyatakan “hal paling penting yang terjadi dalam abad XX adalah meluasnya fenomena demokrasi sebagai bentuk yang diterima oleh banyak pihak” (lihat catatan refleksinya Helen Lok, 1999). Masih dalam catatan refleksinya tersebut, Helen Lok memberikan dukungannya dengan menyatakan : “meskipun tak ada satu pun sistem yang bisa sempurna, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk paling memungkinkan untuk menjadi basis bagi sebuah masyarakat yang manusiawi, dimana dalam hal ini, masyarakat

yang melindungi hak-hak individual yang menjamin akses pertanggung jawaban dari para pemimpinnya, yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, politik dan ekonomi seluruh warga negara, serta yang memperbolehkan dan bahkan berkepentingan pada dialog terbuka bagi kestabilan pembangunan dalam hal prioritas dan nilai-nilai sosial”.[2]

Menanggapi hal ini, Mansour Fakih[3] menggarisbawahi bahwa ‘setiap perubahan sosial selalu ada persoalan, ke mana visi perubahan sosial tersebut serta mengapa perubahan sosial terjadi; yang lebih penting lagi, atas dasar kepentingan siapa perubahan terjadi, serta siapa yang akan menikmati perubahan sosial tersebut’. Ketika masalah tersebut dikaitkan dengan derasnya tuntutan demokratisasi, maka persoalan perubahan sosial adalah bagaimana membuat rakyat sebagai pusat perubahan sosial?. Ini mengisyaratkan adanya suatu proses perubahan mendasar dalam suatu formasi sosial, di mana rakyat menjadi subjek dan pusat perubahan, yang ujungnya perubahan sosial akan melindungi kepentingan mereka.

Karenanya, wacana demokrasi dengan agenda perubahan penyelenggaraan urusan publik menjadi relevan ketika ada semangat untuk mengembalikan ‘ruang’ yang luas bagi publik dalam pemutusan kebijakan publik. Mengapa publik penting dalam proses penentuan kebijakan publik, John Clayton Thomas (1995) menjawab: *“when successful, public participation can bring substantial benefits more effective public decision, a satisfied and supportive public, and most important, a stronger democracy ; but when it fails, and it has frequently failed, public participation can leave in its wake a dissatisfied and even restrictive public, ineffectual decision, and a weakened if not faltering democracy”*

Benjamin Barber (1984, 151) menambahkan bahwa pemerintahan baru dapat difungsikan jika terjadi demokrasi yang kuat. Barber’s menyatakan: *“strong democracy is defined by politics in the participatory mode ; literally, it is self-government by citizen rather than representative government in the name citizens. Active citizens govern themselves directly here, not necessarily at every level and every instance, but frequently enough and in particular when basic policies are being decided and when significant power is being deployed”*. Di lain kesempatan, Barber juga menekankan bahwa *“strong democracy should promote strong citizenship and strong society”*.

Karenanya, keterlibatan rakyat dalam proses penentuan kebijakan publik, terutama menyangkut permasalahan yang strategis bagi mereka, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perumusan kebijakan publik haruslah dengan matang mempertimbangkan partisipasi rakyat. Dengan demikian, pertimbangan pelibatan masyarakat tidak saja terbatas dalam proses penyusunan kebijakan, tetapi juga dalam hal kebijakan tersebut dapat diimplementasikan untuk kepentingan mereka.

Pertanyaan lain yang perlu dicarikan jawabannya adalah seberapa besar otoritas (keterlibatan) dibagi antara pemerintah dengan warga? dan bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan publik tersebut?. Jawaban atas pertanyaan pertama sangat lah bergantung kepada variasi isunya sendiri. Karena masing-masing isu memiliki keuntungan dan biaya yang berbeda-beda ketika publik turut terlibat. Jadi konsekuensinya, langkah pertama yang harus diambil adalah mengidentifikasi isu yang muncul sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga serta mengukur sejauh mana warga dapat terlibat dalam setiap isu tersebut.

Menurut Cleveland (1975), Cupps (1977) dan Neikin (1984) ketepatan penentuan keterlibatan publik sangat tergantung pada kebutuhan relatif antara kualitas dan penerimaan. Karena beberapa isu menekankan pada kebutuhan kualitas, seperti konsistensi pada profesional standar, mandat legislatif, batasan anggaran dan sebagainya. Sementara itu dilain pihak ada juga isu-isu yang lebih concern pada penerimaan publik, seperti preferensi kebutuhan, kualitas pelayanan, dan sebagainya. Dalam hal ini John Calyton Thomas (1995) pun menambahkan: *“varying in their extent of public involvement and influence: autonomous management decision, modified autonomous managerial decision, segmented public consultation, unitary public consultation dan public decision”*.

Mengenai jawaban atas pertanyaan yang kedua, harus lebih awal dipertanyakan siapa sebenarnya ‘publik’ yang relevan terlibat dalam penentuan kebijakan pada isu tertentu. John Clayton Thomas(1995) memberikan pandangannya, bahwa yang dimaksud dengan relevant public pada suatu isu tersebut adalah warga yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Mereka

merepresentasikan: pertama, sumber informasi mengenai preferensi konsumen (warga yang terlayani), atau kedua, potensi-potensi yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

### **Strategi Penguatan Organisasi Rakyat : Kontekstual-Sosial sebagai Basis**

Dalam konteks seperti itu, keterlibatan rakyat relatif lebih mudah dan posisinya lebih kuat ketika mereka terorganisir dalam satuan institusi sosial. Karena dalam kondisi yang terorganisir, maka di satu sisi komunikasi sosial lebih manageable, dan pada sisi yang lain posisi tawar publik pun relatif lebih kuat. Karenanya, mapannya institusi-institusi sosial tersebut, kekuatan-kekuatan individual dapat terakumulasi menjadi kekuatan publik secara kolektif, begitu juga biaya-biaya individual dapat ditanggung secara kolektif.

Contohnya, pada kondisi relevant public yang hanya terdiri dari satu institusi, maka pertemuan rutin di antara mereka menjadi bentuk yang relevan sebagai arena keterlibatan mereka dalam mempengaruhi keputusan publik, selain menjadi arena komunikasi sesama mereka. Pada kondisi relevant public terdiri dari satu institusi atau lebih, pertemuan rutin di masing-masing institusi masih cukup relevan dilakukan sebagai arena keterlibatan warga. Tetapi, harus diingat, arena yang berbeda juga akan menghasilkan rekomendasi yang berbeda pula. Karenanya, dalam kondisi seperti itu sebaiknya ada 'arena bersama' yang dapat digunakan sebagai 'arena transaksi' dari berbagai institusi sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kejadiannya akan menjadi rumit ketika tidak ada institusi atau organisasi sosial pada relevant public, oleh karena dalam kondisi seperti itu tidak ada 'arena' untuk keterlibatan rakyat dalam mempengaruhi keputusan publik. Selain itu, juga dikarenakan tidak adanya saluran komunikasi di antara mereka. Dalam kondisi seperti itu, public hearing menjadi pilihan yang relevan.

Nilai strategis keberadaan sebuah organisasi rakyat, sebagai satu institusi sosial, adalah untuk menjamin (mempermudah) keterlibatan rakyat dalam proses penentuan kebijakan publik. Selanjutnya, yang penting adalah bagaimana mendorong lahirnya (atau memperkuat keberadaan) institusi-institusi yang berbasis pada warga. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, permasalahan social context perlu difahami terlebih dahulu. Karena, kalau kita hendak membangun institusi berbasis rakyat, maka langkah pertama adalah memahami kontekstual-sosial di mana kita akan mendorong lahirnya (kuatnya) institusi-institusi tersebut.

Karena begitu luasnya variasi konteks sosial di Indonesia, maka saya hanya akan mengulas prinsip-prinsip atau karakteristik dasar untuk memahami hal tersebut, sejak dari pemahaman atas struktur sosial, determinan-determinan sosial, integrator-integrator sosial, dinamika sosial, sampai pada persepsi sosial terhadap lingkungannya.

### **Struktur Sosial**

Struktur di dalam suatu komunitas terdiri dari individu-individu yang tergabung dalam keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan tergabung lagi dalam institusi-institusi. Institusi tersebut bersama-sama dan secara menyeluruh membentuk apa yang dinamakan komunitas. Namun dalam konteks pembangunan, posisi dan peranan masing-masing unsur dari struktur tersebut akan mengarah kepada tujuan-tujuan tertentu pula, atau dikatakan bahwa seluruh sistem sosialnya adalah goal oriented. Maka jika mengacu pada tujuan masyarakat seperti dimaksudkan, diperlukan pengelompokan kembali elemen-elemen struktural yang tadi disebut. Pengelompokan baru ini harus dapat mencerminkan suatu konsistensi dalam interelasinya, agar terwujud suatu model sistem sosial dengan bentuk dan fungsi sebagai (semacam) management-models yang menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan kolektif. Sudah jelas bahwa posisi dan peranan masing-masing individu keluarga, kelompok, institusi tidak berkurang dalam arti dan maknanya, akan tetapi peranan-peranan institusional, yang terutama terarah dalam pembangunan.

Dalam hal ini, yang harus menjadi fokus perhatian adalah apa saja determinan-determinan yang mempengaruhi struktur sosial tersebut. John S. Nimpoeno (1980) menyatakan bahwa determinan tersebut adalah input atau masukan kepada sistem sosial yang diperlukan untuk berfungsinya sistem, seperti aspek ideologis, yang menjadi dasar pendorong landasan tata nilai dan norma yang menunjang, aspek teknis, yang mendorong dan memotivasi kegiatan-kegiatan

supaya berjalan secara efektif, dan aspek administratif, yang mendorong dan memperlancar usaha-usaha ke arah efisiensi.

### **Integrator-integrator Sosial**

Komunitas sebagai sistem teritorial dan sosial menunjukkan adanya interaksi antara komponen-komponennya yang bermakna dan berarti. Kelancaran dan komponennya ini dicapai melalui intergrator-integrator sosial. Yaitu berbagai macam bentuk dan komunikasi sosial yang terlembaga dalam masyarakat yang bersangkutan, cara dan bentuk lain yang secara kultural menjadi kelaziman untuk mengekspresikan diri sebagai pelaku dalam sistem sosial yang ada. Integrator-integrator ini banyak berakar dalam kebudayaan, sehingga tidak mungkin diabaikan sebagai faktor penyatu dari masyarakat setempat. Jika integrator tersebut berakar dalam kebudayaan, maka tidak mungkin integrator yang berlaku ini dengan sengaja atau paksaan dirubah sekaligus, oleh karena mungkin akan melahirkan social chaos.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting juga untuk menyoroti tingkah laku sosial, oleh karena tingkah laku tersebut selalu mempunyai penyebab, motif dan tujuan tertentu, seperti di atas tadi sudah dijelaskan. Maka, perubahan-perubahan pada sebab, motif atau tujuannya akan berpengaruh juga pada formasi sosial yang terjadi secara otomatis, yang akan berpengaruh juga pada strategi penguatan institusi dalam sistem sosial tersebut. Motif dan tujuan tersebut dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal, oleh karena kondisi internal dan eksternal berhubungan timbal balik dari suatu sistem sosial. Pada umumnya faktor internal merujuk pada kebutuhan-kebutuhan tertentu pada suatu saat, khususnya menurut tingkat desakannya. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksudkan dapat bersifat fisik-biologis, sosial maupun psikologis. Faktor eksternal pada umumnya menggambarkan tantangan dan ancaman yang berasal dari lingkungan. Stimulan yang kompleks ini juga dapat bersifat fisik-biologis, sosial maupun psikologi.

Faktor-faktor internal dan eksternal itu akan memberikan arah kepada tingkah laku si pelaku, sebab obyek yang menjadi tujuannya itu tentunya merupakan fungsi dari kebutuhan yang ada berserta tantangan lingkungan yang mendesaknya. Namun, seberapa jauh si pelaku dapat maju ke dapan menedekati objek tujuan, itu masih tergantung dari potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya (social self), dimana social self sendiri tergantung pada struktur dan kondisi teritorial, serta struktur dan dinamika sosial.

### **Persepsi Sosial Terhadap Lingkungan**

Secara kualitatif dan kuantitatif, meluasnya tantangan lingkungan yang disertai peningkatan kebutuhan menuntut pula suatu peningkatan dari social self. Perubahan identitas sosial tersebut akan merubah persepsi sosial terhadap lingkungannya. Lingkungan masyarakat tidak saja merupakan sumber segala macam tantangan, tetapi juga sekaligus menjadi wilayah sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhannya. Bagaimana lingkungan tersebut dipersepsikan sangat tergantung pada social self. Persepsi atas lingkungan penting ketika mempengaruhi formasi modal sosial yang terjadi. Karena formasi modal sosial pada akhirnya juga mempengaruhi pilihan strategi penguatan institusi-institusi yang berada di dalam lingkungan yang dipersepsikan tersebut. Dalam hal ini, John S. Nimpoeno (1980) mengklasifikasi persepsi sosial terhadap lingkungannya menjadi empat klasifikasi sebagai berikut:

- a. Lingkungan 'seadanya' (randinized, placid environment): di dalam lingkungan ini segala tantangan dan sumber kebutuhan tidak berubah dan terdistribusikan 'at random'. Justru karena situasi 'seadanya' ini dan yang berstruktur tenang, maka masyarakat pada tingkat persepsi ini cenderung untuk bergerak maju 'at random' pula atau tanpa memerlukan pemikiran dan perencanaan.
- b. Placid, clustered environment. Lingkungan ini dapat dipersepsikan oleh masyarakat yang dapat membedakan faktor-faktor lain di samping adanya sumber-sumber pendapatan dan tantangan-tantangan. Sumber dan tantangan dilihat sebagai cluster/pengelompokan yang memiliki nilai tertentu, misalnya : "wilayah yang menghasilkan dengan aman", " wilayah yang tidak menghasilkan walaupun aman", "wilayah yang menghasilkan tetapi berbahaya" dan "wilayah

yang tidak menghasilkan dan tidak aman”. Untuk bergerak maju dalam lingkungan seperti ini diperlukan pemikiran, pertimbangan dan juga organisasi. Atau dengan kata lain, diperlukan konsentrasi sumber daya operasional, ketaatan terhadap rencana umum dan pengembangan sistem-wewenang yang jelas, agar dapat mencapai tujuan. Masyarakat akan bertendensi untuk menyusun dirinya dalam pengorganisasian yang cukup rumit, dengan hirarki yang ketat dan dengan kontrol serta kondisi yang dipusatkan secara sentral.

- c. Disturbed-reactive environment: corak ini agak sama dengan tipe b, namun adanya kelompok-kelompok sosial lain, yang bergerak di dalam lingkungan yang sama. Gerakan kelompok-kelompok lain dapat dipersepsikan sebagai gangguan. Khususnya sebagai saingan kalau mempunyai tujuan sama dengan masyarakat itu sendiri. Jadi lingkungan tersebut tidak bersifat statis tenang melainkan memperlihatkan juga reaksi-reaksi terhadap gerakan masyarakat itu oleh kelompok-kelompok saingan tadi. Dengan demikian, gerakan maju masyarakat tidak hanya ditentukan oleh lokasi-lokasi lingkungan yang menguntungkan atau membahayakan, melainkan juga dipengaruhi oleh kapitalis dan kekuatan masyarakat itu untuk bergerak menurut rencana tertentu, yang mengindahkan saingan-saingan yang mempunyai kekuatan dan rencana juga.
- d. Disturbed Turbulent Field : lingkungan dipersepsikan sebagai sesuatu yang sangat kompleks dan dinamis. Berbeda dengan tipe c, dimana dinamika ditimbulkan oleh adanya intraksi antar kelompok-kelompok yang saling bersaing, maka tipe ini lingkungannya sendiri yang selalu berubah dan bergolak, disamping adanya interaksi antar berbagai kelompok sosial.

Mengingat pelbagai pertimbangan kontekstual-sosial tersebut, maka strategi pendekatan untuk penguatan institusi berbasis warga tidak bisa digeneralisir. Yang jelas (jangan sampai terlupakan), langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperkuat institusi berbasis warga adalah mengidentifikasi dan memahami situasi kontekstual-sosial dimana penguatan institusi tersebut dilakukan. Secara lebih sistematis, Norman Uphoff (1986) menjelaskan aspek-aspek (strategi) yang dapat dilakukan untuk mendorong penguatan institusi lokal, sangat tergantung pada kontekstual-sosial yang ada. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah :Pertama, Dukungan (Support), dimana bentuk dukungan terhadap sistem sosial yang ada sangat bervariasi. Menurut Uphoff, setidaknya-tidaknya ada tiga model dukungan yang bisa dilakukan, yaitu: *Pertama*, ‘Existing Local Institutional’: Source of Initiative Strong – Weak, Local – Assistance, Shared – Facilitation, Outside –Promotion. *Kedua*, Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bentuk dan aspek ini sangat beragam, mulai dari pendidikan, pelatihan sampai pada pembelajaran dari proses (learning by doing) yang mungkin akan terjadi peningkatan kapasitas ketika dihadapkan pada benturan-benturan ‘yang dialaminya. *Ketiga*, Penguatan legitimasi dan kapasitas institusi, seperti penguatan responsibilitas dan transparansi pada konstituennya, ‘chanelling dari berbagai pihak yang mempunyai hubungan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, penguatan jaringan informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Keempat, Penguatan manajemen mobilisasi sumber daya (resources mobilization management).[]

## Kepustakaan

- Frank, Andre Gunder & Fuentes, Marta, *Nine Theses on Social Movements*, H.Bosmansstraat, Amsterdam, Netherlands.
- Friedman, John, 1986, *Planning in The Public Domain*, Princeton University Press, Oxford
- Schijvers, Joke, 2000 *The Violence of “Development”: A Choice for Intellectuals*, University of Amsterdam
- Thomas, John Clayton, 1995 *Public Participation in Public Decisions: New Skills and Strategies for Public Managers*, Jossey-Bass Inc, Publisher, 350 Sansome Street, San Francisco, California
- Team, Henry Benedict, 1998, *Communitarianism: A New Agenda For Politics and Citizenship*, Macmillan Press Ltd, Houndmills, Hampshire and London
- Uphoff, Norman, 1986, *Local Institutional, Development: An analytical Sourcebook with Cases*, Kumarian Press.



## Hand-Out 05

### MARXISME, IDEOLOGI KAPITALISME, SOSIALISME, KOMUNISME

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### LATAR HISTORIS PEMIKIRAN KARL MARX

##### Riwayat Hidup Karl Marx

Karl Marx, lahir di bulan Mei 1818 di Trier, Jerman. Ayahnya seorang pengacara yang beberapa tahun sebelumnya pindah agama Yahudi menjadi Kristen Protestan. Pada masa-masa kuliahnya di Universitas Bonn, ia berada dibawah pengaruh Hegel, dan mempelajari filsafat bukannya hukum yang lebih diinginkan ayahnya. Selama hampir setahun ia menjadi pimpinan redaksi sebuah harian radikal 1843, sesudah harian itu dilarang oleh pemerintah Prussia, ia kawin dengan Jenny Von Westphalen, putri seorang bangsawan, dan pindah ke Paris. Di sana ia tidak hanya berkenalan dengan Friedrich Engels (1820-1895) yang akan menjadi teman akrab dan “penerjemah” teori-teorinya melainkan juga dengan tokoh-tokoh sosialis Perancis. Dari seorang liberal radikal ia menjadi seorang sosialis. Beberapa tulisan penting berasal waktu 1845, atas permintaan pemerintah Prussia, ia diusir oleh pemerintah Perancis dan pindah ke Brussel di Belgia. Dalam tahun-tahun ini ia mengembangkan teorinya yang definitif. Ia dan Engels terlibat dalam macam-macam kegiatan kelompok-kelompok sosialis. Bersama dengan Engels ia menulis Manifesto Komunis yang terbit bulan Januari 1848. Sebelum kemudian pecahlah apa yang disebut revolusi’48, semula di Perancis, kemudian juga di Prussia dan Austria. Marx kembali ke Jerman secara ilegal.

Tetapi revolusi itu akhirnya gagal. Karena diusir dari Belgia, Marx akhirnya pindah ke London dimana ia akan menetap untuk sisa hidupnya. Di London mulai tahap baru dalam hidup Marx. Aksi-aksi praktis dan revolusioner ditinggalkan dan perhatian dipusatkannya pada pekerjaan teoritis, terutama pada studi ilmu ekonomi. Tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun paling gelap dalam kehidupannya. Ia tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap dan hidup dari kiriman uang sewaktu-waktu dari Engels. Keluarganya miskin dan sering kelaparan. Karena sikapnya yang sombong dan otoriter, hampir semua bekas kawan terasing daripadanya. Akhirnya, baru 1867, terbit jilid pertama *Das Kapital*, karya utama Marx yang memuat kritiknya terhadap kapitalisme (jilid kedua dan ketiga baru diterbitkan oleh Engels sesudah Marx meninggal). Tahun-tahun terakhir hidupnya amat sepi dan tahun 1883 ia meninggal dunia. Hanya delapan orang yang menghadiri pemakamannya.

#### V.I. Lenin (1913): Tiga Sumber dan Tiga Komponen Marxisme<sup>13</sup>

Di segenap penjuru dunia yang beradab, ajaran-ajaran Marx ditentang dan diperangi oleh semua ilmu pengetahuan borjuis (baik yang resmimaupun yang liberal), yang memandang Marxisme semacam sekte yang jahat. Tidak bisa diharapkan adanya sikap lain, karena tidak ada ilmu sosial yang netral dalam suatu masyarakat yang berdasarkan perjuangan kelas. Lewat satu dan lain cara, semua ilmu pengetahuan borjuis, yang resmi dan liberal, membela perbudakan upahan (*wage slavery*). Sedangkan Marxisme telah jauh-jauh hari menyatakan perang tanpa henti terhadap perbudakan itu. Mengharapkan sikap netral dari ilmu pengetahuan dalam masyarakat perbudakan

---

<sup>13</sup> Artikel ini ditulis oleh Lenin untuk memperingati 30 tahun kematian Marx dan dipublikasikan dalam *Prosveshcheniye* No. 3 tahun 1913. *Prosveshcheniye* (Pencerahan)—adalah terbitan teoritik bulanan kaum Bolshevik yang diterbitkan secara legal di St.Petersburg mulai bulan Desember 1911 sampai Juni 1914. Oplahnya mencapai 5000 eksemplar. Lenin memimpin penerbitan ini dari luar negeri, awalnya di Paris, kemudian Cracow dan Poronin; dia mengedit artikel-artikelnya melalui korespondensi yang intense dengan para editor. Pada masa PD I majalah ini dibredel oleh rejim tsar. Kemudian terbit lagi pada musim gugur tahun 1917 tapi hanya sekali terbit. Sumber: Dari *Collected Works*, Volume 19, pp. 23-28. Penerjemah: Thanks to Lembaga Penerbitan, Pendidikan, dan Pengembangan Pers Mahasiswa (LP4M) and Situs Indo-Marxist–Situs Kaum Marxist Indonesia.

upahan adalah bodoh, sama naifnya dengan mengharapkan sikap netral dari para pemilik pabrik dalam menghadapi pertanyaan apakah upah buruh dapat dinaikkan tanpa mengurangi keuntungan modal.

Tapi bukan hanya itu. Sejarah filosofi dan sejarah ilmu-ilmu sosial memperlihatkan dengan jelas bahwa dalam Marxisme tidak terdapat adanya sektarianisme. Tidak terdapat adanya doktrin-doktrin yang sempit dan picik, doktrin yang dibangun jauh dari jalan raya perkembangan peradaban dunia. Sebaliknya, si jenius Marx dengan tepat menempatkan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh pikiran-pikiran termaju dari umat manusia. Doktrin-doktrinnya bangkit sebagai kelanjutan langsung dari ajaran-ajaran besar dalam bidang filosofi, ekonomi-politik, dan sosialisme. Doktrin-doktrin Marxist bersifat serba guna karena tingkat kebenarannya yang tinggi. Juga komplis dan harmonis, serta melengkapi kita dengan suatu pandangan dunia yang integral, yang tidak bisa dipersatukan dengan berbagai macam tahyul, reaksi, atau tekanan dari pihak borjuis. Marxisme merupakan penerus yang sah dari beberapa pemikiran besar umat manusia dalam abad ke-19, yang direpresentasikan oleh filsafat klasik Jerman, ekonomi-politik Inggris dan sosialisme Prancis. Inilah tiga sumber dari Marxisme, yang akan kita bahas secara ringkas beserta komponen-komponennya.

## (I)

Filsafat yang dipakai Marxisme adalah materialisme. Sepanjang sejarah Eropa modern, dan khususnya pada akhir abad ke-18 di Prancis, di mana terdapat perjuangan yang gigih terhadap berbagai sampah dari abad pertengahan, terhadap perhambaan dalam berbagai lembaga dan gagasan, materialisme terbukti merupakan satu-satunya filosofi yang konsisten, benar terhadap setiap cabang ilmu alam dan dengan gigih memerangi berbagai bentuk tahyul, penyimpangan dan seterusnya. Musuh-musuh demokrasi selalu berusaha untuk menyangkal, mencemari dan memfitnah materialisme, membela berbagai bentuk filosofi idealisme, yang selalu, dengan satu dan lain cara, menggunakan agama untuk memerangi materialisme. Marx dan Engels membela filosofi materialisme dengan tekun dan berulang kali menjelaskan bagaimana kekeliruan terdahulu merupakan penyimpangan dari basis ini. Pandangan-pandangan mereka dijelaskan secara panjang lebar dalam karya Engels, Ludwig Feuerbach dan Anti-Dühring,<sup>14</sup> yang seperti halnya *Communist Manifesto*, merupakan buku-buku pegangan bagi setiap pekerja yang memiliki kesadaran kelas. Tetapi Marx tidak berhenti pada materialisme abad 18, ia mengembangkannya lebih jauh, ke tingkat yang lebih tinggi.

Marx memperkaya materialisme dengan penemuan-penemuan dari filosofi klasik Jerman, khususnya sistem Hegel, yang kemudian mengarah kepada pemikiran Feuerbach. Penemuan yang paling penting adalah dialektika, yaitu doktrin tentang perkembangan dalam bentuknya yang paling padat, paling dalam dan amat komprehensif. Doktrin tentang relativitas pengetahuan manusia yang melengkapi kita dengan suatu refleksi terhadap materi-materi yang terus berkembang. Penemuan-penemuan terbaru dalam bidang ilmu alam: radium, elektron, transmutasi elemen, merupakan bukti nyata dari materialisme dialektis yang diajarkan Marx, berbeda dengan ajaran-ajaran para filosof borjuis dengan idealisme mereka yang telah usang dan dekaden. Marx memperdalam dan mengembangkan filosofi materialisme sepenuhnya, serta memperluas pengenalan terhadap alam dengan memasukkan pengenalan terhadap masyarakat manusia.

Materialisme Historisnya yang dialektis merupakan pencapaian besar dalam pemikiran ilmiah. Kekacauan yang merajalela dalam berbagai pandangan sejarah dan politik digantikan dengan suatu teori ilmiah yang amat integral dan harmonis, yang memperlihatkan bagaimana, dalam konsekwensinya dengan pertumbuhan kekuatan-kekuatan produktif, suatu sistem kehidupan sosial muncul dari sistem kehidupan sosial yang ada sebelumnya dan berkembang melalui berbagai tahapan. Contoh kongkretnya: kapitalisme yang muncul dari feodalisme. Seperti halnya pengetahuan manusia merefleksikan alam (yang merupakan materi yang berkembang), yang keberadaannya tidak tergantung dari manusia, begitu pula pengetahuan sosial (berbagai pandangan

<sup>14</sup> Referensinya adalah tulisan Engels *Anti Dühring*

dandoktrin yang dihasilkan manusia: filosofi, agama, politik, dan seterusnya) merefleksikan sistem ekonomi dari masyarakat. Berbagai lembaga politik merupakan superstruktur di atas fondasi ekonomi. Kita melihat, sebagai contoh, bahwa berbagai bentuk politis dari negara-negara Eropa modern memperkuat dominasi pihak borjuasi terhadap pihak proletariat. Filosofinya Marx merupakan filosofi materialisme terapan, yang mana membekali umat manusia, khususnya kelas pekerja, dengan alat-alat pengetahuan yang ampuh.

## (II)

Setelah menyadari bahwa sistem ekonomi merupakan fondasi, yang di atasnya superstruktur politik didirikan, Marx mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk mempelajari sistem ekonomi ini. Karya Marx yang prinsipal, *Das Kapital*, merupakan hasil studinya yang mendalam terhadap sistem ekonomi modern: kapitalisme. Ekonomi politik yang klasik, sebelum Marx, berkembang di Inggris, negeri kapitalis yang paling maju saat itu. Adam Smith dan David Ricardo, dengan investigasi mereka terhadap sistem ekonomi, meletakkan dasar-dasar dari teori nilai kerja. Marx melanjutkan karya mereka, ia menguji teori itu dan mengembangkannya secara konsisten. Ia melihat bahwa nilai dari setiap komoditi ditentukan oleh kuantitas waktu kerja yang diharuskan secara sosial, yang digunakan untuk memproduksi komoditi itu. Jika para ahli ekonomi borjuis melihat hubungan antar-benda (pertukaran antar-komoditi), Marx memperhatikan hubungan antar-manusia. Pertukaran komoditi mencerminkan hubungan-hubungan di antara para produser individual yang terjalin melalui pasar. Uang memperlihatkan bahwa hubungan itu menjadi semakin erat, yang tanpa terpisahkan menyatukan seluruh kehidupan ekonomi dari para produser. Modal (kapital) memperlihatkan suatu perkembangan lanjutan dari hubungan ini: tenaga kerja manusia menjadi suatu komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik tanah, pemilik pabrik dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk menutup biaya hidupnya dan keluarganya (mendapat upah), sebagian lain waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkannilai lebih untuk para pemilik modal. Nilai lebih merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal.

Doktrin tentang nilai lebih merupakan batu-penjuru dari teori ekonomi yang dikemukakan oleh Marx. Modal, yang sebenarnya terbentuk dari hasil kerja para pekerja, justru menghantam para pekerja, memporakporandakan para pemilik modal kecil dan menciptakan barisan pengangguran. Dalam bidang industri, kemenangan produksi berskala besar segera tampak, tetapi gejala yang sama juga dapat dilihat pada bidang pertanian, di mana keunggulan pertanian bermodal besar semakin dikembangkan. Penggunaan mesin-mesin pertanian ditingkatkan, mengakibatkan ekonomi para petani kecil terjebak oleh modal-uang, kemudian jatuh dan hancur berantakan disebabkan teknik produksi yang kalah bersaing. Penurunan produksi berskala kecil mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dalam bidang pertanian, akan tetapi proses penurunan itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan. Dengan menghancurkan produksi berskala kecil, modal mendorong peningkatan produktivitas kerja dan menciptakan posisi monopoli bagi asosiasi kapitalis besar. Produksi itu sendiri menjadi semakin sosial—ratusan ribu, bahkan jutaan pekerja di-ikat dalam suatu organisme ekonomi reguler—tapi hasil dari kerja kolektif ini dinikmati oleh sekelompok pemilik modal. Anarki produksi, krisis, kekacauan harga pasaran, serta ancaman terhadap sebagian terbesar anggota masyarakat, semakin memburuk.

Dengan mengembangkan ketergantungan para pekerja pada modal, sistem ekonomi kapitalis menciptakan kekuatan besar dari persatuan para pekerja. Marx menyelidiki perkembangan kapitalisme dari ekonomi komoditi tahap awal, dari pertukaran yang sederhana, hingga bentuk-bentuknya yang tertinggi, produksi berskala besar. Dan dari pengalaman negeri-negeri kapitalis, yang lama dan baru, dari tahun ke tahun, terlihat dengan jelas kebenaran dari doktrin-doktrin Marxian ini. Kapitalisme telah menang di seluruh dunia, tetapi kemenangan ini hanyalah merupakan awal dari kemenangan para pekerja terhadap modal yang membelenggu mereka.

**(III)**

Ketika feodalisme tersingkir, dan masyarakat merdeka kapitalis muncul di dunia, maka muncullah suatu sistem untuk penindasan dan eksploitasi terhadap golongan pekerja. Berbagai doktrin sosialis segera muncul sebagai refleksi dari dan protes terhadap penindasan ini. Sosialisme pada awalnya, bagaimanapun, merupakan sosialisme utopis. Ia mengkritik masyarakat kapitalis, mengutuknya, memimpikan keruntuhan kapitalisme. Ia mempunyai gagasan akan adanya pemerintahan yang lebih baik. Ia berusaha membuktikan kepada orang-orang kaya bahwa eksploitasi itu tak bermoral.

Namun sosialisme utopis tidak memberikan solusi nyata. Ia tak dapat menjelaskan sifat sebenarnya dari perbudakan upahan di bawah sistem kapitalisme. Ia tak mampu mengungkapkan hukum-hukum perkembangan kapitalis atau memperlihatkan kekuatan sosial apa yang mampu membentuk suatu masyarakat yang baru. Sementara itu, berbagai revolusi terjadi di Eropa, khususnya di Prancis, mengiringi kejatuhan feodalisme, perhambaan, yang semakin lama semakin jelas mengungkapkan perjuangan kelas-kelas sebagai basis dan kekuatan pendorong dari semua perkembangan. Setiap kemenangan politis atas feodalisme merupakan hasil dari perlawanan serentak dan tiba-tiba. Setiap negeri kapitalis berkembang di atas basis yang kurang-lebih demokratis, diakibatkan adanya perjuangan hidup-mati di antara kelas-kelas yang ada dalam masyarakat kapitalistik.

Kejeniusan Marx adalah karena ia yang pertama kalinya menyimpulkan pelajaran sejarah dunia dengan tepat dan menerapkan pelajaran itu secara konsisten. Kesimpulan yang dibuatnya menjadi doktrin dari perjuangan kelas. Rakyat selalu menjadi korban dari penipuan dan kemunafikan dunia politik, mereka akan selalu begitu sampai mereka mencoba mencari tahu apa kepentingan dari kelas-kelas yang ada dalam masyarakat, apa yang ada di balik segala macam ajaran moral, agama dan janji-janji politik. Para pemenang dari proses reformasi dan pembangunan akan selalu terkecoh oleh para pendukung pemerintahan lama, sampai mereka menyadari bahwa setiap lembaga yang lama, sekeji apapun tampaknya, akan tetap dijalankan oleh kekuatan-kekuatan dari kelas-kelas tertentu yang berkuasa. Hanya ada satu kelompok yang mampu menghantam usaha perlawanan dari kelas-kelas itu, dan itu bisa ditemukan dalam masyarakat kita, kelompok yang mampu dan harus menggalang kekuatan untuk perjuangan menyingkirkan yang lama dan mendirikan yang baru.

Filosofi materialisme yang dipaparkan Marx menunjukkan jalan bagi proletariat untuk bebas dari perbudakan spiritual yang membelenggu setiap kelas yang tertindas hingga kini. Teori ekonomi yang dijabarkan Marx menjelaskan posisi sebenarnya dari proletariat di dalam sistem kapitalisme. Organisasi-organisasi independen milik proletariat semakin bertambah banyak jumlahnya, dari Amerika hingga Jepang, dari Swedia hingga Afrika Selatan. Proletariat menjadi semakin tercerahkan dan terdidik dengan membiayai perjuangannya sendiri. Mereka membuktikan kesalahan tuduhan-tuduhan masyarakat borjuis; mereka terus memperbaiki strategi perjuangan, menggalang kekuatan dan tumbuh tanpa bisa ditahan.

*Prosveshcheniye* No. 3, Maret 1913.

Ditandatangani V.I. Lenin.

### **Manifesto Komunis**

Masyarakat borjuis modern yang muncul dari keruntuhan masyarakat feodal tidak menyingkirkan antagonisme kelas itu. Malah ia memunculkan kelas-kelas baru, kondisi baru untuk melakukan tekanan, bentuk-bentuk baru persaingan dengan menggantikan yang lama. Borjuis menempatkan negeri di tangan penguasa kota. Ia telah menciptakan kota-kota besar, telah banyak menambah penduduk kota dibanding penduduk pedesaan dan dengan demikian menyelamatkan sebagian besar penduduk dari kehidupan desa yang bodoh. Persis seperti yang berlaku bagi sesuatu negeri dengan ketergantungan pada kota, borjuis itu telah pula membuat negeri-negeri barbar dan semi barbar bergantung pada negeri beradab, bangsa petani (bergantung pada) bangsa borjuis, timur pada barat. Senjata yang dipergunakan borjuis untuk merobohkan feodalisme, ini dipergunakan

untuk borjuis itu sendiri. Akan tetapi bukan saja borjuis itu mengumpulkan senjata untuk membunuh dirinya sendiri, ia juga membunuh orang-orang yang mengadakan senjata tersebut yaitu kelas pekerja modern dikalangan proletar. Dengan perkembangan industri, proletar bukan saja bertambah jumlahnya, ia berkumpul dalam kumpulan yang tambah besar, kekuatannya berkembang dan ia merasakan kekuatannya yang bertambah itupun mulai membentuk kombinasi (organisasi buruh) melawan borjuis. Di sana-sini pertentangan berkobar dan berkembang menjadi kerusuhan.

### **Sejarah Materialisme dan Dialektika**

Pandangan materialis sejarah adalah teori Karl Marx tentang hukum perkembangan masyarakat. Inti pandangan ini ialah bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi adalah basis, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi-institusi sosial, terutama negara, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas. Oleh karena faktor penentu adalah basis, maka harus memperhatikan dahulu bidang ekonomi. Ciri yang menurut Marx paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi sampai sekarang adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja. Masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang membedakan diri satu sama lain berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses produksi. Pada garis besarnya (terutama semakin produksi masyarakat mendekati pola kapitalis) kelas-kelas sosial termasuk salah satu dari dua kelompok kelas. Yaitu kelas-kelas pemilik dan kelas-kelas pekerja. Yang pertama memiliki sarana-sarana kerja, sedangkan yang kedua hanya memiliki tenaga kerja mereka sendiri. Oleh karena kelas-kelas pemilik begitu berkuasa. Misalnya para pemilik tanah mengontrol para buruh tani. Itu berarti bahwa para pemilik dapat menghisap tenaga kerja para pekerja, jadi mereka hidup dari penghisapan tenaga mereka yang harus bekerja. Kelas-kelas pemilik merupakan kelas-kelas atas dan kelas-kelas pekerja merupakan kelas-kelas bawah dalam masyarakat. Jadi menurut Marx ciri khas semua pola masyarakat sampai sekarang ialah, bahwa masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas atas dan bawah. Struktur ekonomi tersusun sedemikian rupa hingga yang pertama dapat hidup dari penghisapan tenaga kerja yang kedua.

Bangunan atas mencerminkan keadaan itu. Negara adalah alat kelas-kelas atas untuk menjamin kedudukan mereka, jadi untuk seperlunya menindas usaha kelas-kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas-kelas atas sedangkan “bangunan atas idealis” istilah Marxis bagi agama, filsafat, pandangan-pandangan moral, hukum, estetis dan lain sebagainya berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu. Jadi Marx menolak paham bahwa negara mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Negara dikuasai oleh dan berpihak pada kelas-kelas atas, meskipun kadang-kadang juga menguntungkan kelas-kelas bawah. Walaupun negara mengatakan ia adalah milik semua golongan dan bahwa kebijaksanaannya demi kepentingan seluruh masyarakat namun sebenarnya negara melindungi kepentingan kelas atas ekonomis. Maka negara menurut Marx termasuk lawan kelas-kelas bawah. Negara bukan milik dan bukan kepentingan mereka. Dari negara mereka tidak dapat mengharapkan sesuatu yang baik. Seperti halnya negara, begitu pula agama, filsafat, pandangan tentang norma-norma moral dan hukum dan sebagainya menurut Marx tidak mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk melegitimasi kepentingan kedudukan kelas atas.

Seperti halnya negara, begitu pula agama, filsafat, pandangan tentang norma-norma moral, serta hukum dan sebagainya menurut Marx tidak mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk melegitimasi kepentingan kedudukan kelas atas. Cara suatu masyarakat berfikir, apa yang dianggapnya sebagai baik, bernilai, dan masuk akal, menurut Marx ditentukan oleh kelas-kelas yang menguasai masyarakat. Maka bentuk-bentuk kesadaran sosial itu menurut kekhasan masing-masing, mengemukakan sebagai baik bagi seluruh masyarakat apa yang sebenarnya hanya baik bagi kelas-kelas atas. “Bangunan atas ideologis” itu menciptakan kesan bahwa kesediaan masing-masing kelas untuk menerima kedudukannya dalam masyarakat adalah sesuatu yang baik dan rasional. Jadi fungsinya ialah membuat kelas-kelas bawah bersedia untuk menerima kedudukan mereka sebagai kelas-kelas bawah.

Bila tingkat produksi tadi yang diambil sebagai tesis, dan mulai dengan tingkat feodalisme (jadi ini merupakan tesis). Anti tesisnya adalah tingkat produksi borjuis atau kapitalisme, sintesisnya nanti adalah tingkat produksi sosialisme. Teori dialektika dengan tesis, antitesis, dan sintesis dapat diharapkan baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, maupun pada tingkat-tingkat produksi itu sendiri. Demikian tesis golongan bangsawan (di Abad Tengah) menimbulkan antitesis golongan peminjam tanah, tetapi keduanya ini menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Ini merupakan tesis kembali dan antitesisnya ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia komunis yang terdapat dalam masyarakat komunisme. Dengan demikian maka Marx melihat negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa (berpunya) untuk menindas kelas yang dikuasa (tidak berpunya). Negara dan pemerintahan identik dengan kelas penguasa, artinya dengan kelas berpunya, berturut-turut dalam sejarah umat manusia dikenal kelas pemilik budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), kelas borjuasi. Soal hak dan keadilan, oleh sebab itu adalah sekedar ucapan penghias bibir dari pihak yang berkuasa.

Dialektika Marx sebenarnya mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat feodalisme ke masyarakat borjuasi atau kapitalisme dan seterusnya ke masyarakat sosialisme merupakan suatu kelanjutan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia berdiam diri saja dengan menanti perkembangan itu berjalan sebagaimana maunya. Kelas-kelas itu sendiri adalah kelas-kelas yang berjuang untuk kelasnya, jadi manusia yang dilihat Marx adalah manusia yang berbuat. Bagi Marx masalah pokok bukanlah memahami sejarah atau dunia ini, melainkan bagaimana mengubahnya. “manusia membuat sejarahnya sendiri”.

Oleh sebab itu, maka revolusi yang digambarkan oleh Marx itu terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah revolusi yang dipelopori oleh golongan Borjuis yang hendak menghancurkan feodal. Tahap kedua adalah revolusi yang dilakukan oleh kelas pekerja dalam menghancurkan golongan borjuis. Dengan lenyapnya kelas borjuis, fungsi pemerintahan tidak lagi mempunyai sifat politik. Kelas pekerja yang memegang kekuasaan itu pun tidak lagi merupakan kelas, sehingga tidak ada kelas yang ditindas dan negara akan lenyap. Masing-masing orang akan melakukan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Orang bekerja bukan karena ingin mencukupi nafkah tapi karena panggilan hati. Oleh karena itu tiap orang memberikan sumbangan sesuai dengan kesanggupannya. Pada saat ini tingkat produksi menjadi berlimpah, dan pendapatan tidak lagi berupa upah, melainkan bergantung pada keperluan manusia yang bersangkutan.

### **Teori Nilai Lebih**

Dalam memahami teori Marx tentang masyarakat dan negara tidak boleh dilupakan sama sekali teorinya di bidang ekonomi. Teori ekonominya itu berupa teori nilai berdasar pada tenaga, teori nilai lebih, teori akumulasi kapital, teori konsentrasi kapital dan teori pemiskinan semuanya pada pokoknya merupakan teori eksploitasi untuk memperlihatkan bahwa golongan berpunya hidup dari tenaga golongan tidak berpunya. Tentu saja teori demikian ini timbul dalam pemikiran Marx setelah melihat masyarakat yang dihadapinya, sekurang-kurangnya mengingat masyarakat yang telah berupa negara. Marx berpendapat bahwa pada mulanya, dalam kehidupan primitif komunal dimana alat-alat produksi dimiliki bersama, pengisapan manusia oleh manusia tidak didapati. Kelas masyarakat tidak ada, penindasan pun tidak pula. Masyarakat pun tidak mengenal kekuasaan, dan oleh karena itu tidak mengenal negara. Marx berpendapat bahwa bentuk negara itu tidak selamanya ada.

Menurut pendiri komunisme ini, maka sejarah manusia sesudah terbentuknya negara memperlihatkan empat tingkatan produksi. Produksi berdasar perhambaan, feodalisme, produksi kapitalis atau borjuasi dan produksi sosialisme. Sesuai pendapatnya tentang unerbau dan oberbau diatas, maka dalam tingkat-tingkat produksi kapitalisme atau borjuasi pembagian kelas itu lebih sederhana, yang terpenting ialah kelas-kelas yang bertentangan: kelas borjuasi atau kapitalis dan kelas pekerja. Teori dialektika dengan tesis, anti tesis, dan sintesis dapat diterapkan baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, maupun pada tingkat-tingkat produksi itu sendiri. Demikianlah tesis golongan bangsawan (di abad tengah) menimbulkan anti tesis golongan peminjam tanah, tetapi keduanya ini menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Hal itu merupakan tesis kembali dan anti

tesis ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia komunis yang terdapat dalam masyarakat komunisme.

Bila tingkat produksi diambil sebagai tesis, dan kita mulai dengan tingkat feodalisme (merupakan tesis), maka anti tesisnya ialah tingkat produksi borjuis atau kapitalisme, sintesisnya adalah tingkat produksi sosialisme. Dengan demikian, maka Marx melihat negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa (berpunya) untuk menindas kelas yang dikuasai (yang tidak berpunya). Negara dan pemerintahan identik dengan kelas penguasa, artinya dengan kelas berpunya, berturut-turut dalam sejarah umat manusia dikenal kelas pemilik budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), kelas borjuis. Soal hak dan keadilan, oleh karena itu adalah sekedar ucapan penghias bibir

### **Komunisme dan Masyarakat Tanpa Kelas**

Yang dimaksud Marx dengan komunisme bukanlah sebuah kapitalisme negara, jadi dimana hak milik diadministrasikan oleh negara. Marx mengatakan bahwa hanya pada permulaan, sosialisasi berarti nasionalisasi- jadi negara mengambil alih hak milik pribadi. Ciri-ciri masyarakat komunis adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi penghapus adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja. Kelas-kelas tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kelas kapitalis ditiadakan karena kapitalis sendiri sudah menghapus semua kelas, sehingga hanya tinggal proletariat. Itulah sebabnya revolusi sosialis tidak akan menghasilkan masyarakat dengan kelas atas dan kelas bawah.

Marx tidak pernah menguraikan bagaimana ia membayangkan organisasi masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi. Ia hanya berbicara secara umum dan abstrak. Satu-satunya tempat ia berbicara banyak dengan agak romantis (dan bertolak dari sebuah teks Feuerbach) adalah dalam *German Ideology*: “Dalam masyarakat komunis masing-masing orang tidak terbatas pada bidang kegiatan eksklusif, melainkan dapat mencapai kecakapan dalam bidang apapun, masyarakat mengatur produksi umum, dengan memungkinkan hal ini saya kerjakan hari ini, hal itu besok, pagi hari berburu, siang hari memancing ikan, sore hari memelihara ternak, sesudah makan mengkritik....” (MEW 3,33). Marx mempergunakan istilah sosialisme dan komunisme dalam arti yang sama, yaitu keadaan masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Langkah pertama adalah kediktatoran proletariat dan sosialisme negara, lalu sesudah kapitalisme dihancurkan, negara semakin kehilangan fungsinya. Sosialisme tercapai apabila tidak ada lagi sedangkan negara komunis yang dimaksud Marx adalah bahwa negara bukan hanya menghilang bahkan menjadi maha kuasa.

### **Analisis**

Salah satu alasan mengapa Marx menjadi tokoh yang begitu penting ialah karena ia mewakili suatu campuran intelektual yang berhasil dalam politik, yang memandang dunia dengan perasaan dingin dan mencari suatu masa depan yang lebih bermoral dan lebih bebas bagi manusia; politisi praktis yang terlibat dalam konflik-konflik dengan musuh-musuh politiknya, kanan dan kiri; serta profesional yang mengembangkan suatu teori perubahan ilmiah seperti materialisme dialektika. Serangan utama Marx difokuskan pada kapitalisme dan liberalisme politik, terutama karena dalam permulaan abad ke-19, telah nyata bahwa sistem liberal dapat berjalan. Secara fundamental, pengandaian-pengandaian abad ke-19 timbul dari kontradiksi-kontradiksi luar biasa dalam kapitalisme industri, yang tidak cukup dipahami oleh para teoritis. Kontrak sosial terdahulu dan yang menimbulkan hal-hal yang tidak mampu ditangani baik oleh teori hak alamiah, maupun oleh penegasan kembali secara sederhana asas-asas moral publik (Apter, 1996: 104).

Bila paradigma sosialis ingin berhasil dalam menentang paradigma liberal, maka secara intelektual ia harus kuat. Memang, ia harus menangani secara teoritis apa yang tidak mampu ditangani oleh paradigma liberal, yaitu masalah konflik dan polarisasi kelas. Marx mengakui bahwa evolusi mengikuti suatu garis lengkung tertentu, tetapi bukan dalam cara-cara mudah atau segera. Rakyat perlu berusaha mewujudkan hasil revolusioner dengan menyadari peranan mereka dalam sejarah sebagai satu kelas. Jadi alam, kebebasan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan hukum dinamis dari perkembangan industri dipadukan oleh Marx dalam sebuah sintesa revolusioner

(Apter, 1966:123). Pandangan Marx mengenai Materialisme Dialektika, ia memadukan suatu yang empiris dengan yang deduktif dalam rumusan sejarah yang dinamakan materialisme dialektika. Materialisme dalam masalah manusia mengacu pada proses ekonomi dan cara produksinya. Hipotesa Marx adalah bahwa ketimpangan akan tumbuh bersama dengan produktivitasnya, ketika suatu lompatan besar pada karakter teknologi akan memungkinkan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, suatu keadaan yang berlebihan, bukan kelangkaan. Tetapi apa yang paling ditekankan oleh Marx, bukanlah aspek moral kondisi-kondisi sosial pada kekejaman kapitalisme melainkan ia berusaha menjelaskan bagaimana dialektika, jika diterapkan pada cara produksi, akan mengungkapkan cara kerja dinamika pertukaran, yang di bawah kapitalisme menghasilkan nilai lebih atau keuntungan, dalam menggerogoti kapitalisme itu sendiri.

Marx dan Engels menggabungkan sejumlah unsur intelektual yang berlainan sebagai garis pemisah radikalisme. Marx berusaha menjadikan radikalisme kurang sebagai visi, dan lebih merupakan ilmu pengetahuan tentang sosialisme dengan menerapkan suatu interpretasi sejarah yang khusus. Kini, tekanan perhatian dari pra-Marxis menjadi bagian diskusi atau perdebatan seksama mengenai bagaimana mendorong bentuk-bentuk politik baru. Rancangan-rancangan masa kini meliputi usaha mencari ide-ide generatif baru, yang telah timbul bukan hanya dari penolakan-penolakan terhadap teori-teori yang lebih utilitarian, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman dengan sosialisme otokratis dan ekseseks stalinisme. Marx telah menjadi seorang monopolis yang berhasil dalam lingkungan ide-ide sosialis (Apter, 1996: 106 dan 111).

Bagi Marx perhatian pada kebebasan manusia menjadi masalah bagaimana orang menjadi tidak teralienasi secara sosial. Hal ini merupakan proses yang membutuhkan bentuk ekonomi khusus yakni sosialisme; suatu kondisi perkembangan khusus-suatu pemahaman bahwa rantai yang membelenggu rakyat adalah politik dan bahwa hal itu diakibatkan oleh dominasi kelas. Marx mengemukakan (1) metode penafsiran sejarah, dan (2) penerapan metode itu tujuan khusus.

## **PETA PEMIKIRAN KARL MARX (1818-1883):**

### **MATERIALISME DIALEKTIKA & MATERIALISME HISTORIS**

#### **Karl Marx dalam Lintasan Sejarah**

Karl Marx, pelopor utama gagasan “*sosialisme ilmiah*” dilahirkan tahun 1818 di kota Trier, ayahnya ahli hukum dan diumur tujuh belas tahun Karl Marx masuk Universitas Bonn, juga belajar hukum. Belakangan dia pindah ke Universitas Berlin dan kemudian dapat gelar doktor dalam ilmu filsafat dari Universitas Jena. Entah karena lebih tertarik, Marx menceburkan diri ke dunia jurnalistik dan sebentar menjadi redaktur *Rheinische Zeitung* di Cologne. Tapi pandangan politiknya yang radikal menyeretnya kedalam kesulitan dan memaksanya pindah ke Paris. Disitulah dia mula pertama bertemu dengan Friedrich Engels. Tali persahabatan dan persamaan pandangan politiknya mengikat kedua orang ini selalu dwi tunggal hingga akhir hayatnya. Karl Marx tak bisa lama tinggal di Paris dan segera ditendang dari sana dan pindah ke Brussel.

Di kota inilah, tahun 1847, dia pertama kali menerbitkan buah pikirannya yang penting dan besar *The Poverty of Philosophy* (Kemiskinan Filsafat). Tahun berikutnya bersama dengan Friedrich Engels mereka menerbitkan *Communist Manifesto*, buku yang akhinya menjadi bacaan dunia. Pada tahun itu juga Karl Marx kembaji ke Cologne untuk kemudian diusir lagi dari sana hanya selang beberapa bulan. Sehabis terusir dari sana-sini, akhinya Marx menyeberang selat Canal dan menetap di London hingga akhir hayatnya.

Meskipun hanya sedikit uang dikoceknya berkat pekerjaan jurnalistik, Marx menghabiskan sejumlah besar waktunya di London melakukan penyelidikan dan menulis buku-buku tentang politik dan ekonomi. (di tahun-tahun itu Marx dan familinya mendapat bantuan dari Friedrich Engels kawan karibnya). Jilid pertama *Das Kapital*, karya ilmiah Marx terpenting terbit tahun 1867. Tatkala Marx meninggal di tahun 1883, kedua jilid sambungannya belum sepenuhnya rampung. Kedua jilid sambungannya itu disusun dan diterbitkan oleh Engels berpegang pada cacatan-catatan dan naskah yang ditinggalkan Marx. Karya tulisan Marx merumuskan dasar teoretis komunisme. Ditilik dari perkembangan luar biasa gerakan ini di abad ke-20. Komunisme mempunyai am penting jangka panjang dalam sejarah. Sejak timbulnya komunisme sebagai bagian



tak terpisahkan dari masa kini, terasa sedikit sulit menentukan dengan cermat perspektif masa depannya. Kendati tak seorangpun sanggup memastikan seberapa jauh Komunisme bisa berkembang dan seberapa lama ideologi ini bisa bertahan, yang sudah pasti dia merupakan ideologi kuat dan tangguh serta berakar kuat menghujam ke Bumi, dan sudah bisa dipastikan punya pengaruh besar di dunia untuk paling sedikit beberapa abad mendatang.

Pada saat ini sekitar seabad sesudah kematian Marx jumlah manusia yang sedikitnya terpengaruh oleh Marxisme mendekati angka 1,3 Milyar banyaknya. Jumlah penganut ini lebih besar dari penganut ideologi manapun sepanjang sejarah manusia. Bukan sekedar jumlahnya yang mutlak, melainkan sebagai kelompok dari keseluruhan penduduk dunia. Ini mengakibatkan kaum komunis dan juga sebagian yang bukan komunis percaya bahwa, di masa depan tidak bisa tidak Marxisme akan merebut kemenangan diseluruh dunia. Namun, adalah sukar untuk memantapkan kebenarannya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Telah banyak contoh-contoh ideologi yang tampaknya sangat punya pengaruh penting pada jamannya tapi akhirnya melayu dan sirna. (Agama yang didirikan oleh Mani bisa dijadikan misal yang menarik). Jika kita surut ke tahun 1900, akan tampak jelas bahwa demokrasi konstitusional merupakan arus yang akan menjadi anutan masa depan.

### **Komunisme**

Menyangkut komunisme, seseorang sangat percaya dan tahu persis betapa hebatnya pengaruh komunisme di dunia saat ini dan dunia masa depan, Orang pasti masih mempertanyakan arti penting Karl Marx di dalam gerakan komunis. Pemerintah Uni Soviet sekarang tidak terawasi oleh karya karya Mark yang menulis dasar dasar pikiran sepem dialektika gaya Hegel dan tentang teori "nilai lebih", Teori teori itu kelihatan kecil pengaruhnya dalam praktek perputaran roda politik pemerintah Uni Soviet, baik politik dalam maupun luar negeri.

Komunisme masa kini menitik beratkan empat ide: (1) Sekelumit kecil orang hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya bergelimpang papa sengsara, (2) Cara untuk merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat produksi dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi swasta, (3) Pada umumnya, satu-satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan, (4) Untuk menjaga kelanggengan sistem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, sedangkan ide yang keempat berasal dari gagasan Marx mengenai "diktatur proletariat", sementara itu lamanya berlaku kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan langkah-langkah Lenin dan Stalin daripada gagasan tulisan Marx, Hal ini nampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam Komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenarnya, dan penghinaan orang-orang terhadap tulisantulisannya lebih menyerupai etalase untuk membenarkan sifat "keilmiahan" dari pada ide dan politik yang sudah terlaksana dan diterima.

Sering dituding bahwa teori Marxis dibidang ekonomi sangatlah buruk dan banyak keliru. Tentu saja banyak dugaan-dugaan tertentu Marx terbukti meleset Misalnya Marx meramalkan bahwa dalam negeri-negeri kapitalis kaum buruh akan semakin melarat dalam pengalanan sang waktu. Jelaslah bahwa ramalan ini tidak terbukti. Marx juga meramalkan bahwa kaum menengah akan disapu dan sebagian besar orangnya akan masuk kedalam golongan proletar dan hanya sedikit yang bisa bangkit dan masuk dalam kelas kapitalis. Ini pun jelas tak terbukti. Marx tampaknya juga percaya, meningkatnya mekanisasi akan mengurangi keuntungan kapitalis, kepercayaan yang bukan saja salah tetapi juga tampak tolol. Tapi lepas apakah teori ekonomi benar atau salah, semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengaruh Marx. Arti penting filosof bukan terletak pada kebenaran pendapatnya tetapi terletak pada masalah apakah buah pikirannya telah menggerakkan orang untuk bertindak atau tidak. Diukur dari sudut ini, tak perlu diragukan lagi bahwa Marx punya arti penting dalam perkembangan sejarah masyarakat.

## Hakekat Manusia Menurut Karl Marx

Pendirian Marx tentang hakekat manusia sangat menentukan jawaban yang diberikannya terhadap masalah, seperti, "Apakah negara itu? Dan "Apakah sejarah itu? Dipaparkan oleh Louis O. Kattsoff tentang hakekat manusia dalam penyelesaian materialisme historis, yaitu; (1) hakekat manusia adalah berubah-ubah, manusia selalu berubah secara dialektis dan historis, (2) hakekat manusia adalah tingkah laku, manusia ialah apa yang mereka kerjakan, (3) hakekat manusia adalah menguasai dan merencanakan, manusia mengubah sejarah dengan teknologinya dan ia juga mengubah dirinya sendiri, (4) hakekat manusia ditentukan oleh alat-alat produksi, orang dapat membayangkan betapa pentingnya menguasai alat produksi bagi penganut Marxisme. Sebab, manusia ialah apa yang mereka kerjakan, dan yang mereka kerjakan ditentukan oleh cara-cara produksi, maka menguasai alat-alat produksi berarti menguasai hakikat manusia.

## Keterasingan & Emansipasi Manusia

Marx meletakkan dasar emansipasi atas keterasingan manusia pada tiga hal: *Pertama*, emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap hukum negara Hegel. Hegel melukiskan masyarakat sebagai kacau balau, sebagai *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua) karena satu-satunya hukum batinnya adalah pemuasan kebutuhan individu-individu. Masyarakat semacam itu mesti menghancurkan diri sendiri karena semua anggota hanya mencari kepentingan egois mereka masing-masing. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditampung oleh negara. Maka, Hegel menganggap negara sebagai realitas dan tujuan masyarakat yang sebenarnya sedangkan keluarga dan masyarakat luas ini merupakan unsur-unsurnya. Anggapan itu dikritik oleh Marx, pertama, Hegel memutar balikkan tatanan yang sebenarnya. Bukan negara sebagai subyek yang unsur-unsurnya adalah keluarga dan masyarakat luas, melainkan keluarga dan masyarakat luas adalah pengandaian-pengandaian negara. Dengan sarkasme tajam Marx menulis: "*Logika ini bukan untuk membuktikan negara, melainkan negara dipakai sebagai bukti logika*". Marx mengkritik bahwa masyarakat luas merupakan realitas yang terpisah dari negara. Masyarakat hidup dalam dunia *skizofren*: Dalam masyarakat luas ia hidup sebagai individu egois terisolasi, sedangkan hakikat sosialnya terpisah daripadanya dijadikan negara yang menghadapinya sebagai kekuatan represif. Manusia harus memecahkan hakikatnya, eksistensi negara sebagai pemerintah selesai tanpa anggota masyarakat, dan eksistensinya dalam masyarakat luas selesai tanpa negara". Marx mengkritik Hegel pada dua hal; (1) Bahwa ia memutar membalikkan subyek dan obyek: Hegel menyatakan negara sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, padahal kenyataan adalah kebalikannya, (2) Hegel hendak mengatasi egoisme masyarakat melalui negara sebagai penertib, hal ini berarti bahwa kesosialan (anti-egoisme) tidak masuk kembali kedalam masyarakat, melainkan hanya dipaksakan dari luar kepadanya oleh negara; padahal yang perlu adalah mengembalikan kesosialan manusia sendiri.

*Kedua*, emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap agama. Gagasan Karl Marx tentang kritik terhadap agama bertolak dari pemikiran Feurbach (1804-1872). Feurbach memandang Hegel sebagai puncak rasionalisme modern, tetapi dalam suasana semacam ini dominasi agama tetap mewarnai kehidupan sehingga dunia materi khususnya "manusia" tidak ditempatkan pada martabat semestinya. Feurbach menggariskan filsafatnya dengan corak materialistis, tetapi nama yang lebih disukainya adalah filsafat organisme. Kecenderungan ini timbul karena Feurbach pun tidak setuju dengan paham materialisme kasar yang dikembangkan oleh penganut materialisme mekanis-menurut Marx materialisme Feurbach tetap vulgar karena manusia sehakikat dengan mesin. Pada bagian ini Marx menentang paham Feurbach, karena manusia tidak semata tergantung pada kondisi materi, tetapi pada kondisi sosial, yaitu hidup dalam masyarakat '*social being that it, the live of community*'. Disini Feurbach telah mengabaikan corak historis serta hubungan sosial manusia. Bagi Marx agama hanyalah pernyataan radikal manusia yang menjadi korban sistem ekonomi yang tidak manusiawi, manusia terasing secara sosial. Kritik agama bagi Marx, adalah sekunder. Yang seharusnya dikritik adalah keterasingan nyata manusia dalam masyarakat modern. "Kritik surga menjadi kritik bumi, kritik agama menjadi kritik hukum, kritik teologi menjadi kritik politik". Tuntutan emansipasi manusia berubah membawa Marx secara

konsekuen ke kritik masyarakat

*Ketiga*, emansipasi dari keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap masyarakat kapitalisme. Terjadinya masyarakat borjuis erat kaitannya dengan kapitalisme. Hakekat masyarakat borjuis adalah uang, "pelacur umum, makcomblangnya orang-orang dan bangsa-bangsa". Uang menjadikan manusia menjadi budak, yang tergantung, yang ditentukan dari luar. Ia menjadi komoditi. Emansipasi berarti penghapusan masyarakat seperti itu. Oleh karena itu masyarakat kapitalis berdasarkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, emansipasi menurut Karl Marx hanya dapat tercapai kalau hak milik pribadi itu dihapus. Marx menggambarkan dehumanisasi ini terjadi dibawah sistem produksi kapitalis dengan sebutan "keterasingan" (*Etfremdung*). Bahwa emansipasi manusia itu perlu diusahakan dan tercapai apabila manusia dapat mewujudkan diri secara bebas dari heteronomi, secara sosial, bebas dari kepentingan, secara produktif. Hubungan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalistik bersifat eksploitatif.

### **Tendensi Akar Materialisme**

Materialisme dalam konteks pembahasan filsafat sering dilawankan dengan idealisme, sebab kedua aliran (*school*) ini memiliki kawasan yang bertitik pisah dan masing-masing mempunyai ciri atau penganut dalam sejarah kemanusiaan. Materialisme yang juga lazim disebut serba zat merupakan bagian dari filsafat metafisika dan terutama ontologi. Zatliah yang menjadi sifat dan keadaan terakhir kenyataan. Segala keadaan dan kejadian berasal dari materi. Unsur dasar seluruh kenyataan adalah zat. Tendensi akar materialisme terlihat pada filosof Ionian, dan filsafat Yunani Kuno.

### **Materialisme Dialektis**

Materialisme dialektika timbul dari perjuangan sosial yang hebat, yang muncul sebagai akibat dari Revolusi Industri. Ide tersebut banyak kaitannya dengan Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895), dan telah menjadi filsafat resmi dari Rusia dan RRC; doktrin Marx dan Engels telah diberi tafsiran dan diperluas oleh *Lenin, Stalin, Mao Tse Tung* dan lain-lainnya. Materialisme dialektik walaupun sangat menghormati sains dan menyatakan bahwa persepsi indrawi sains memberi kita pengetahuan yang riil, adalah suatu pendekatan dari segi politik dan sejarah dan bukan dari segi sains alam. Disitu ditekankan pandangan bahwa perkembangan sejarah dimana materi dalam bentuk organisasi ekonomi dalam masyarakat dianggap sebagai dasar. Dengan begitu maka dipakai istilah: materialisme sejarah dan determinisme ekonomi.

Untuk memahami materialisme dialektik, kita harus memahami dan menelusuri kembali ide-ide George Hegel (1770-1831). Hegel, seorang idealis yang pikirannya banyak mempengaruhi Marx, berpendapat bahwa alam ini adalah proses menggelarnya fikiran-fikiran. Disitu timbullah proses alam, sejarah manusia, organisme dan kelembagaan masyarakat. Bag; Hegel, materi adalah kurang riil dari pada jiwa, karena jiwa atau pikiran adalah esensi dari alam. Marx menolak idealisme Hegel ia membalikkan filsafat Hegel dan mengatakan bahwa materilah (dan bukan jiwa atau ide) yang pokok. Materi, yang khususnya diperlihatkan oleh organisasi ekonomi dari masyarakat serta cara-cara produksi, menentukan kelembagaan politik dan sosial dari masyarakat. Kemudian hal-hal tersebut mempengaruhi pemikiran, filsafat, etika dan agama. Walaupun Karl Marx dan Friedrich Engels menolak idealisme Hegel, tetapi mereka menerima metodologi filsafatnya, hampir seluruhnya. Dunia menurut Hegel adalah selalu dalam proses perkembangan. Proses-proses perubahan tersebut bersifat dialektik, artinya, perubahan-perubahan itu berlangsung dengan melalui tahap afirmasi atau tesis, pengingkaran atau antitesis dan akhirnya sampai pada integrasi atau Sintesa.

Salah satu contoh proses dialektika yang berasal dari Hegel misalnya, menyangkut tiga bentuk negara. Bentuk negara yang pertama ialah diktatur. disini masyarakat diatur dengan baik, tetapi warga negara tidak mempunyai kebebasan apapun juga (tesis). Keadaan ini menampilkan lawannya: anarki (antitesis). Dengan bentuk negara seperti ini para warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup kemasyarakatan menjadi kacau. Tesis dan antitesis ini diperdamaikan dalam suatu sintesis, yaitu demokrasi konstitusional. Dalam bentuk negara yang

ketiga ini dijamin dan dibatasi oleh undang-undang dan kehidupan masyarakat berjalan dengan memuaskan. Seperti semua Hegelian haluan kiri, Marx pun sangat mengagumi metode dialektika yang diintroduksi Hegel kedalam filsafat Tetapi dialektika Hegel-katanya-berjalan pada kepalanya dan ia mau meletakkannya diatas kakinya. Maksudnya ialah bahwa pada Hegel dialektika ialah dialektika pada ide, dan ia mau menjadikannya dialektika materi. Untuk Hegel dan dialektika pada umumnya, alam merupakan buah dari roh, tetapi bagi Marx dan Engels segala sesuatu yang bersifat rohani merupakan buah dari materi dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian Marx dan Engels memihak pada usaha Feuerbach untuk mengganti idealisme dengan materialisme. Dengan menganut suatu materialisme yang bersifat dialektis, Marx dan Engels menolak materialisme abad ke-18 dan juga materialisme abad ke-19 yang kedua-duanya bersifat mekanistik. Menurut materialisme abad ke-18 tidak ada perbedaan prinsipil antara sebuah mesin dan makhluk hidup (termasuk manusia). Hanya dalam hal terakhir ini mekanisme adalah lebih pelik. Salah satu prinsip materialisme dialektik adalah perubahan dalam hal kualitas. Itu berarti bahwa kejadian pada taraf kuantitatif (misalnya pengintergrasian lebih rapat dari bagian-bagian materi) dapat menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru. Dengan cara itulah kehidupan berasal dari materi mati dan kesadaran manusiawi berasal dari kehidupan organis.

### Materialisme Historis

Produksi ditentukan oleh alat. Alat-alat itu adalah materi, yang dihasilkannya juga materi. Perkembangan sejarah adalah history (sejarah). History ditentukan oleh materi. Oleh karena itulah filsafat Marx disebut sebagai *historis materialime*. Manusia dapat menggunakan yang lain dari alam untuk keperluan-keperluannya. Ialah satu-satunya makhluk yang dapat mengganti kehidupannya, dan ikut mengganti sejarahnya. Tetapi pendorong untuk tindakan tidak terdapat dalam ide atau dalam keinginan seseorang atau dalam otaknya, akan tetapi pada pokoknya dalam proses produksi dan hubungan kelas masyarakat. Pada tahun 1848 Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan *Manifesto Komunis*, suatu dokumen yang banyak mempengaruhi gerakan revolusioner. Akhirnya Karl Marx menerbitkan karyanya yang besar, *Das Kapital*, Jilid pertama terbit pada tahun 1867. Marx membentuk interpretasi ekonomi tentang sejarah, dan interpretasi tersebut telah berpengaruh kuat selama seratus tahun terakhir ini. Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. sejarah digambarkan sebagai pertempuran kelas, dimana alat-alat produksi, didistribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, sosial, moral dan agama.

Terdapat lima macam sistem produksi, empat macam telah muncul bergantian dalam masyarakat manusia. Sistem kelima diramalkan akan muncul pada hari esok yang dekat, dan sekarang sudah mulai terbentuk; (1) Sistem komunisme primitif, (2) Sistem produksi kuno yang didasarkan atas perbudakan, (3) Tingkatan dimana kelompok-kelompok feodal menguasai penduduk-penduduk, (4) Timbullah sistem borjuis atau kapitalis dengan meningkatnya perdagangan, penciptaan dan pembagian pekerjaan, sistem pabrik menimbulkan industrialis kapitalis, yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi, (5) Masyarakat tanpa kelas atau komunisme murni. Pikiran dasar materialisme historis adalah arah yang ditempuh sejarah sama sekali ditentukan atau dideterminasi oleh perkembangan sarana-sarana produksi yang materiil. Jika sebagai contoh kita memilih pengolahan tanah, maka perkembangan sarana produksi adalah; tugal, pacul, bajak, mesin. Walaupun sarana-sarana produksi merupakan buah hasil pekerjaan manusia, tetapi sejarah tidak tergantung pada kehendak manusia. Menurut pendapat Marx manusia memang mengadakan sejarahnya, tetapi ia tidak bebas dalam mengadakan sejarahnya. sebagaimana juga materi sendiri, sejarahnyapun dideterminasi secara dialektis bukan secara mekanistik. Kemanakan arah perkembangan sejarah? Apakah titik akhir dari sejarah? Marx berkeyakinan bahwa sejarah manusia menuju ke suatu keadaan ekonomis tertentu, yaitu komunisme, dimana hak milik pribadi akan diganti dengan milik bersama. Perkembangan menuju fase sejarah ini bertanggung secara mutlak dan tidak mungkin dihindarkan. Tetapi manusia dapat mempercepat proses ini dengan menjadi lebih sadar dan dengan aksi-aksi revolusioner yang berdasar atas penyadaran itu.

## Epilog

Dari uraian yang dipaparkan diatas, penulis setidaknya memiliki harapan kepada segenap insan pergerakan untuk selalu menyadarkan diri sendiri akan realitas disekeliling kita yang timpang, tidak adil, dan menindas. Akan menjadi suatu hat yang sangat fatal dan busuk jika manusia selu diam melihat dan merasakan penindasan tetapi diam dan acuh. Pemikiran Karl Marx memberikan inspirasi bagi gerakan buruh di seluruh dunia untuk bergerak melawan sistem ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi, menghisap dan menindas hakekat kesosialan manusia. Pemikiran Karl Marx bisa dijadikan alat atau kaca mata analisa atas sekian ketidakadilan yang disebabkan oleh negara yang repressif dan instrumen kapitalistik internasional yang memiskinkan dan mengasingkan manusia dari fitrahnya. Maka, revolusi sosial menjadi penting untuk segera praxisikan.

## PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG KRITIK EKONOMI-POLITIK

### Prawacana: Tentang Das Kapital

Proses Produksi Kapital<sup>15</sup>, adalah suatu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi politik yang ditulis oleh Karl Marx. Marx melakukan suatu analisis kritis terhadap kapitalisme dan aplikasi praktisnya dalam ekonomi serta dalam bagian tertentu, merupakan kritik terhadap teori-teori terkait lainnya. Kekuatan pendorong utama kapitalisme, menurut Marx, terdapat dalam eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Sumber utama dari keuntungan baru dan nilai tambahnya adalah bahwa majikan membayar buruh-buruhnya untuk kapasitas kerja mereka menurut nilai pasar, namun nilai komoditi yang dihasilkan oleh para buruh itu melampaui nilai pasar. Para majikan berhak memiliki nilai keluaran (*output*) yang baru karena mereka memiliki alat-alat produksi (*kapital*) yang produktif. Dengan menghasilkan keluaran sebagai modal bagi majikan, para buruh terus-menerus mereproduksi kondisi kapitalisme melalui pekerjaan mereka.

Namun, meskipun Marx sangat prihatin dengan aspek-aspek sosial dari perdagangan, bukunya bukanlah sebuah pembahasan etis, melainkan sebuah upaya (yang tidak selesai) untuk menjelaskan tujuan dari “hukum gerak” (*“laws of motion”*) dari sistem kapitalis secara keseluruhan, asal-usulnya dan masa depannya. Ia bermaksud mengungkapkan sebab-sebab dan dinamika dari akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja bayaran, transformasi tempat kerja, konsentrasi modal, persaingan, sistem bank dan kredit, kecenderungan tingkat keuntungan untuk menurun, sewa tanah, dan banyak hal lainnya. Marx memandang komoditi sebagai "bentuk sel" atau satuan bangunan dari masyarakat kapitalis—ini adalah obyek yang berguna bagi orang lain, tetapi dengan nilai jual bagi si pemilik. Karena transaksi komersial tidak menyiratkan moralitas tertentu di luar apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksinya, pertumbuhan pasar menyebabkan dunia ekonomi dan dunia moral-legal menjadi terpisah dalam masyarakat: nilai subyektif moral menjadi terpisah dari nilai obyektif ekonomi.

Ekonomi politik, yang mulanya dianggap sebagai “ilmu moral” yang berkaitan hanya dengan distribusi kekayaan yang adil, atau sebagai suatu "aritmetika politik" untuk pengumpulan pajak, dikalahkan oleh disiplin ilmu ekonomi, hukum dan etika yang terpisah. Marx percaya bahwa para ekonom politik dapat mempelajari hukum-hukum kapitalisme dalam cara yang “obyektif”, karena perluasan pasar pada kenyataannya telah mengobyektifikasikan sebagian besar hubungan ekonomi: cash nexus membuang semua ilusi keagamaan dan politik sebelumnya (namun kemudian menggantikannya dengan ilusi jenis lain—fetishisme komoditi). Marx juga mengatakan bahwa ia memandang "formasi ekonomi masyarakat sebagai suatu proses sejarah alam". Pertumbuhan perdagangan terjadi sebagai suatu proses di mana tak seorangpun dapat menguasai atau mengarahkan, menciptakan suatu kompleks jaringan kesalingterkaitan sosial yang sangat besar secara global. Dengan demikian, suatu "masyarakat" terbentuk "secara ekonomi" sebelum orang

---

<sup>15</sup> Marx menerbitkan jilid pertama dari Das Kapital pada 1867, tetapi ia meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan jilid kedua dan ketiganya yang sudah dibuat naskahnya. Buku-buku ini kemudian disunting oleh teman dan rekan kerjanya Friedrich Engels dan diterbitkan 1885 dan 1894; jilid keempat, yang berjudul, yang disebut *Theories of Surplus-Value*, pertama-tama disunting dan diterbitkan oleh Karl Kautsky pada 1905-1910. Naskah-naskah persiapan lainnya diterbitkan baru beberapa dasawarsa kemudian.

benar-benar secara sadar menguasai kapasitas produktif yang sangat besar dan kesalingterkaitan yang telah mereka ciptakan, untuk membangunnya secara kolektif untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jadi, analisis Marx dalam *Das Kapital*, difokuskan terutama pada kontradiksi-kontradiksi struktural, daripada antagonisme kelas, yang mencirikan masyarakat kapitalis—"gerakan kontradiktif" (*gegensätzliche Bewegung*) yang berasal pada sifat ganda pekerjaan," bukannya dalam perjuangan antara tenaga buruh dan modal, atau antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Lebih jauh, kontradiksi-kontradiksi ini beroperasi (seperti yang digambarkan oleh Marx dengan menggunakan suatu ungkapan yang dipinjam dari Hegel) "di belakang punggung" kaum kapitalis maupun buruh, artinya, sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas mereka, namun demikian tidak dapat diminimalkan ke dalam kesadaran mereka baik sebagai individu maupun sebagai kelas. Oleh karena itu, *Das Kapital*, tidak mengusulkan suatu teori revolusi (yang dipimpin oleh kelas buruh dan wakil-wakilnya) melainkan teori tentang krisis sebagai kondisi untuk potensi revolusi, atau apa yang dirujuk oleh Marx dalam *Manifesto Komunis* sebagai "senjata" potensial, "ditempa" oleh para pemilik modal, "berbalik memukul kaum borjuis sendiri" oleh kelas pekerja. Krisis seperti itu, menurut Marx, berakar dalam sifat komoditi yang kontradiktif, bentuk sosial yang paling dasar dari masyarakat kapitalis. Dalam kapitalisme, perbaikan-perbaikan dalam teknologi dan meningkatnya tingkat produktivitas menambah jumlah kekayaan materi (atau nilai pakai) dalam masyarakat sementara pada saat yang bersamaan mengurangi Nilai (ekonomi) dari kekayaan ini, dan dengan demikian merendahkan tingkat keuntungan—suatu kecenderungan yang membawa kepada situasi tertentu, yaitu ciri khas dalam kapitalisme, yakni "kemiskinan di tengah kelimpahan," atau lebih tepatnya, krisis produksi yang berlebihan di tengah konsumsi yang terlalu rendah.

Marx mendasarkan karyanya pada para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan bahkan Benjamin Franklin. Namun, ia mengolah kembali gagasan-gagasan para pengarang ini, sehingga bukunya merupakan sintesis yang tidak mengikuti gagasan pemikir manapun. Buku ini juga mencerminkan metodologi dialektis yang diterapkan oleh G.W.F. Hegel dalam bukunya *The Science of Logic* dan *The Phenomenology of Mind*, dan pengaruh para sosialis Perancis seperti Charles Fourier, Comte de Saint-Simon, dan Pierre-Joseph Proudhon. Marx sendiri mengatakan bahwa tujuannya adalah "membawa suatu ilmu [artinya, ekonomi politik] melalui kritik kepada suatu titik di mana ia dapat secara dialektis digambarkan", dan dalam cara ini "mengungkapkan hukum gerak masyarakat modern". Dengan memperlihatkan bagaimana perkembangan kapitalis itu adalah pendahulu dari suatu cara produksi sosialis yang baru, ia berusaha memberikan dasar ilmiah bagi gerakan buruh modern. Dalam mempersiapkan bukunya ini, ia mempelajari literatur ekonomi yang tersedia pada masanya selama dua belas tahun, terutama di British Museum di London. Aristoteles, dan filsafat Yunani pada umumnya, merupakan pengaruh penting lainnya (meskipun seringkali diabaikan) dalam analisis Marx terhadap kapitalisme. Pendidikan Marx di Bonn terpusat pada para penyair Yunani dan Romawi. Disertasi yang diselesaikannya di universitas adalah tentang perbandingan antara filsafat alam dalam karya Demokritus dan Epikurus. Lebih dari itu, sejumlah pakar telah mengajukan pendapatnya bahwa rancangan dasar *Das Kapital*—termasuk kategori-kategori penggunaan dan nilai tukar, serta "silogisme" untuk sirkulasi sederhana dan diperluas (M-C-M dan M-C-M')—diambil dari Politik (Aristoteles) dan Etika Nikomakea. Lebih dari itu, gambaran Marx tentang mesin di bawah hubungan-hubungan produksi kapitalis sebagai "otomat" yang bertindak sendiri, adalah sebuah rujukan langsung kepada spekulasi Aristoteles kepada alat-alat yang tidak bernyawa yang mampu mengikuti perintah sebagai kondisi untuk penghapusan perbudakan.

### Dasar Kritik Ekonomi-Politik

Dalam studi kritik ekonomi-politik pandangan Karl Heinrich Marx (1818-1883) dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah dan sebagainya. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan

kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya Marx menggunakan berbagai argumen untuk “membuktikan” bahwa sistem liberal atau kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari sisi moral, sosiologi maupun ekonomi.<sup>16</sup>

Menurut ramalan Marx sistem kapitalis hancur bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain, melainkan karena keberhasilannya sendiri. Sistem kapitalis dinilai Marx mewarisi daya self destruction, suatu daya dari dalam yang akan membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. Bagi Marx sistem kapitalis adalah suatu sistem yang “sudah busuk dari dalam” dan tidak mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, tidak ada jalan lain, sistem liberal atau kapitalis tersebut harus dihancurkan dan diganti dengan sistem yang lain yang lebih manusiawi, yaitu sistem sosialis atau komunis.

Dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan.

Disamping itu juga ada masyarakat kelas kaya (*the haves*) dan kelas masyarakat tak berpunya (*the have not*). Semua kelas-kelas masyarakat ini dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini di sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Sekarangpun (maksudnya di masa Marx) tak terkecuali, tetap ada perjuangan kelas. Dengan anggapan seperti ini Marx meramal bahwa kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Bagaimana Marx menganggap bahwa kaum proletar dihisap dan diproses oleh para pemilik modal? Teori yang digunakan untuk menjelaskan penindasan tersebut adalah teori lebih (*theory of surplus value*), yang sebenarnya berasal dari kaum klasik sendiri.

Menurut pandangan kaum klasik (Ricardo), nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami (*natural wages*). Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup secara subsistem, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Padahal nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami inilah yang disebut

---

<sup>16</sup> Dari segi *moral* Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Walau ada pengakuan bahwa sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar ini lebih efisien, akan tetapi sistem ini tetap dikecam sebab sistem liberal tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem “upah besi” kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena—sebagaimana diucapkan Marx—“pasar bebas memang telah mentakdirkannya demikian”. Untuk mengangkat harkat para buruh yang sangat menderita dalam sistem liberal tersebut Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu, dan sistem perekonomian liberal-kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian sosialis-komunis. Dari segi *sosiologi*, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis yang diamati Marx ada sekelompok orang (yaitu para pemilik modal) yang menguasai kapital, dan ada sekelompok orang lainnya (yaitu kaum buruh) sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi kelas bawah. Jika tidak dilakukan sesuatu, demikian argumentasi Marx, jumlah kaum nestapa ini akan semakin besar. Sebagai langkah antisipasi, Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita tersebut harus diperbaiki, atau lebih tepat lagi, diganti dengan sistem sosialis yang lebih “berpihak” pada golongan kaum buruh. Dari segi *ekonomi*, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktur melalui revolusi sosial. Jika langkah ini berhasil, maka langkah berikutnya yang harus diambil ialah penataan kembali hubungan produksi (khususnya dalam sistem pemilikan tanah, alat-alat produksi dan modal). Menurut Marx, hanya atas dasar hubungan yang lebih manusiawi ini pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan rakyat. Atas pandangan yang sangat skeptis di atas, tidak heran jika Marx meramal bahwa suatu masa sistem kapitalis akan hancur.

Marx sebagai nilai lebih (*surplus value*)<sup>17</sup>, dinikmati oleh para pemilik modal. Makin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal, yang bagi Marx berarti makin besar penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atau kaum buruh.

Di sini tampak perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith dalam memandang persaingan. Kalau Smith menganggap persaingan bebas sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sejahtera, sebaliknya Marx memandangnya sebagai penyebab terjadinya konsentrasi-konsentrasi ekonomi atau monopoli. Kompetisi dinilai Marx mengandung sesuatu daya yang kalau tidak diawasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar akan mencaplok yang kecil. Yang lemah akan tergusur dari pasar. Akibatnya jumlah golongan menengah menciut, jumlah kaum proletar akan semakin banyak. Sebagai eksekusi dari persaingan yang tidak sehat tersebut maka sebagian yang kalah tercampak dari pasar. Mereka yang tergusur dari pekerjaan semula akan berkumpul di pusat-pusat industri, membentuk perkampungan-perkampungan kumuh. Tetapi adanya pemusatan para penganggur ini justru menguntungkan kaum kapitalis, sebab mereka bisa dijadikan sebagai cadangan tenaga kerja murah. Dengan banyaknya orang yang antri mencari pekerjaan, maka kaum buruh yang “cukup beruntung memperoleh pekerjaan” walau dengan upah sangat rendah tersebut tidak akan bisa macam-macam. Kalau mereka membuat ulah, dengan segera mereka bisa dipecat (PHK) dan seribu orang siap menggantikannya. Akibat yang lebih nyata dari keadaan ini: kehidupan buruh kian lama semakin tergecet. Tetapi dengan praktek “gencet menggencet” seperti ini siapa sesungguhnya yang rugi? Kaum buruh jelas rugi, sebab mereka hanya bisa memperoleh nafkah sekedar penyambung hidup belaka. Bagaimana dengan pemilik modal? Pada mulanya dengan menekan upah buruh mereka memang untung. Tetapi dengan jumlah buruh yang sangat banyak, sedang pendapatan mereka sangat rendah, siapa yang akan membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik? Karena daya beli masyarakat rendah, barang-barang yang dihasilkan menjadi tidak laku. Pabrik-pabrik terpaksa tutup. Semua ini bukan karena salah siapa-siapa, melainkan karena tingkah kaum kapitalis sendiri. Lebih lanjut Marx menganalisis: jika pabrik-pabrik pada tutup, pengangguran akan semakin merajalela, yang akan membawa kekalutan pada masyarakat. Marx meramal akan datang suatu masa, di mana terjadi krisis besar-besaran, yang akan mengakhiri riwayat sistem kapitalistik.

Dari setiap argumen yang dilontarkan Marx di atas jelas sekali bahwa ide tentang konflik selalu ditekankan: konflik antara ideal dan realitas; antara kapital dan labor; juga antara pertumbuhan dan stagnasi. Dari setiap konflik akan muncul perubahan, dan untuk alasan ini Marx berpendapat bahwa sistem kapitalisme mesti diganti dengan sistem lain di mana konflik diganti dengan harmoni atau keselarasan etis, sosial dan ekonomi. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik.<sup>18</sup> Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum

---

<sup>17</sup> Sebagaimana yang tertulis oleh Marx dalam *Das Capital* (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Samuel Moore dan Edward Aveling menjadi: *Capital: A Critique of Political Economy* (1984): *The Rate of surplus-value is therefore an expression for the degree of exploitation of labour-power by capital, or of the labourer by capitalist*. Menurut Marx, sebagian dari nilai surplus itu merupakan hak para pekerja, tetapi semuanya dikangkangi oleh para pemilik modal. Mereka (para pemilik modal tersebut) telah memakan yang bukan hak mereka. Sebagian dari nilai lebih tersebut kembali ditanamkan untuk investasi, apakah perluasan usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru. Dari hasil investasi ini para pemilik modal akan menerima hasil yang lebih besar. Kekayaan mereka terus menumpuk, sehingga makin lama semakin besar. Akumulasi kapital akan semakin berhasil jika para kapitalis bisa menindas kaum buruh sekeras-kerasnya, yaitu dengan memberikan tingkat upah yang sangat rendah.

<sup>18</sup> Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan: sesuatu yang pasti bakal terjadi. Yang jelas, jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi, mereka akan melancarkan revolusi. Para pekerja akan menghancurkan pabrik-pabrik dan merusak segala milik kaum kapitalis. Tetapi jika ini terjadi, semua pihak akan rugi; baik kaum kapitalis maupun mereka sendiri. Sebab, jika pabrik-pabrik hancur, berarti mereka akan tergusur dari lapangan kerja. Untuk menghindari tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak, di sinilah peran kaum komunis diharapkan. Menurut Marx, kaum komunis yang memperjuangkan nasib kaum proletar harus menuntun revolusi yang dilancarkan kaum proletar ke arah yang benar, dan revolusi harus dilancarkan sebaik-baiknya.

Agar revolusi berjalan sukses, Marx menganjurkan agar kaum komunis mendukung setiap gerakan melawan tatanan sosial politik sistem kapitalis. Kaum proletar yang sudah sangat menderita dan tidak memiliki apa-apa di bawah sistem kapitalis tidak akan kehilangan apa-apa dalam memperjuangkan revolusi. Bagi Marx, untuk memperjuangkan



pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan adalah karena dilakukannya penghisapan atau eksploitasi dari para kapitalis terhadap kaum buruh. Eksploitasi terhadap buruh tersebut telah memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pihak pemilik modal, tetapi menyebabkan pemiskinan di kalangan buruh. Perbedaan yang sangat menyolok antara pemilik kapital dan kaum proletariat sebagaimana dijelaskan di atas akan membawa ke arah revolusi sosial. Bagaimana revolusi sosial tersebut terjadi sebagai akibat dilakukannya eksploitasi terhadap labor. Uraian tentang dasar kritik-ekonomi politik di atas dapat dijadikan kerangka teoretik dan kemudian membatasi sekaligus sebagai alat analisa dan verifikasi terhadap logika perkembangan masyarakat dalam menyusun teori negara menurut Marx.

### Kelas dan Kapitalisme<sup>19</sup>

Kritik Marx terhadap konsep negara liberal dan Hegelian perlu dipahami dalam kerangka pemikiran Marx yang lebih luas tentang posisi Indonesia dalam masyarakat, hubungan-hubungan produksi, dan sistem produksi modern yang ia sebut kapitalisme. Pada dasarnya Marx bisa menerima keberadaan individu sebagai organisme yang memiliki kapasitas unik, hasrat dan kepentingan untuk memilih secara bebas. Namun, ia menolak pandangan liberal yang melihat individu sebagai organisme yang abstrak tanpa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat riil. Ia juga mengkritik kecenderungan menempatkan individu sebagai entitas sosial yang paling utama untuk memahami kehidupan politik dan perilaku negara. (Giddens and Held, 1982). Dalam *Critique Hegel's Philosophy of Right* (1843a). Marx menegaskan, “*man is not an abstract being squatting outside the world. Man is the human world, the state, society*” (h. 131). Keberadaan individu karenanya hanya bisa diterima dalam kaitannya dengan sesama individu lainnya. Individu bukanlah sekumpulan organisme yang bertindak secara otonom yang terlibat aktif dalam produksi dan kehidupan politik, melainkan manusia beings yang hidup dalam jaring-jaring interaksi dan relasi sosial dengan sesama manusia lainnya. Sifat-sifat dasar dan perilaku setiap individu merupakan produk sejarah yang bersumber dari berbagai bentuk interaksi sosial antara manusia. Bagi pemikir liberal, perbedaan antara seorang budak dan majikan menjadi tidak penting karena kedua-duanya merupakan individu yang berdaulat. Akan tetapi bagi Marx perbedaan itu sangat nyata karena merupakan produk interaksi antar manusia yang membawa efek ekonomi dan sosial yang bertolak belakang (Marx, 1858).

Kunci untuk memahami perilaku individu adalah struktur kelas. Akan tetapi tidak semua masyarakat mengalami proses pemilahan berdasarkan kelas. Masyarakat tribal, diantaranya, tidak mengenal kelas karena masyarakat tidak mengenal *surplus* dan tidak mengakui pemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Sistem produksi dijalankan secara gotong royong dan dibagikan secara merata kepada setiap anggota masyarakat. Sebaliknya, pemilahan kelas hanya berkembang dalam sistem produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak pemilikan pribadi. *Surplus* tersebut dicapai setelah kelas sosial non-produktif berhasil menguasai alat-alat produksi dan memaksakan eksploitasi atas kelas sosial produktif (Marx, 1867). Kelas sosial yang menguasai alat-alat produksi menjadi kelas dominan, sementara kelas sosial produktif yang ditindas atas nama keuntungan menjadi kelas sub-ordinan. Pada gilirannya, ketika sistem produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak properti ini berkembang menjadi sistem produksi yang utama, kelas dominan dan subordinan akan menjadi dua kelas utama yang membelah masyarakat. Hubungan antara kedua kelas ini selalu ditandai oleh eksploitasi dan konflik, yang berpengaruh besar terhadap dinamika sebuah masyarakat. (Marx dan Engels, 1848). Sayangnya tulisan Marx tidak memberikan perhatian cukup serius pada kemungkinan hubungan yang saling tumpang tindih antar penindasan berdasarkan kelas dan penindasan berbasis gender. Topik ini baru menjadi perhatian yang cukup serius dalam tulisan Engels, *On Origins of The Family, Private Property and The State*. Menurut Engels (1881), dalam masyarakat kuno yang bersifat *matriarchal* posisi perempuan sedikit lebih

---

nasib mereka sendiri kaum buruh di seluruh negeri harus bersatu memperjuangkan sebuah sistem baru yang lebih berpihak kepada kaum buruh, yaitu sistem sosialis atau komunis.

<sup>19</sup> Lih. Eric Hiariej, *Teori Negara Marxis*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas ISIPOL UGM, Volume 7, Nomor 2, November 2003 (261-282) h. 268-272.

dominan dibanding laki-laki. Namun hubungan antara keduanya berubah total setelah pengakuan atas hak-hak pemilikan pribadi. Laki-laki menjadi lebih beruntung karena hak atas warisan memungkinkan laki-laki menguasai hak-hak pemikiran tersebut.

Dalam masyarakat modern struktur kelas merupakan produksi sisten kapitalisme. Sistem ini dibangun berdasarkan hak pemilikan pribadi atas faktor produksi, kebebasan mempertukarkan barang dan jasa, dan relasi yang tidak seimbang antara modal dan tenaga kerja. Produksi ditujukan untuk menghasilkan *profit* dan *surpluse value* dan bukan untuk kepentingan jangka panjang memuaskan kebutuhan manusia. (Held, 1996; Brown, 1995; MacEwan, 1999). Menurut Marx, sistem ini pada dasarnya mengandung ketegangan-ketegangan yang melekat secara inheren dalam keseluruhan proses menghasilkan *profit* dan *surpluse value*. Perkembangan sejarah dalam banyak hal ditentukan oleh hasil ketegangan-ketegangan ini, di antaranya ketegangan hubungan produksi dan tehnik produksi dan konflik kelas. Menurut Marx, sistem produksi kapitalisme terdiri dari, setidaknya, dua macam struktur dasar yang disebut Marx dengan *social formation* dan *mode of production* (Marx, 1859). Formasi sosial merupakan sekumpulan kumpulan interaksi dan lembaga-lembaga sosial yang membentuk sebuah masyarakat. Struktur ini meliputi seluruh aspek kehidupan sosial termasuk sistem ekonomi, sistem kekuasaan dan kehidupan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Formasi sosial dibentuk oleh determinasi *mode of production* atau infrastruktur ekonomi atas kesadaran sosial, kehidupan budaya dan sistem politik.

Di lain pihak, infrastruktur ekonomi—atau sering juga disebut *economic base*—merupakan kombinasi dari *relation of production* menyangkut tiga jenis relasi sosial: *pertama*, hubungan-hubungan produksi yang bersifat primer seperti hubungan butuh dan majikan, *kedua*, hubungan-hubungan produktif yang bersifat sekunder seperti serikat buruh, asosiasi pemilik modal dan pola-pola dasar kehidupan keluarga yang berkaitan erat dengan sistem produksi kapitalistik; dan *ketiga* hubungan-hubungan politik dan sosial yang bersumber dari hubungan produksi primer dan sekunder seperti negara, lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang mencerminkan hubungan buruh-majikan. Sementara itu, *forces of productions* meliputi alat-alat produksi, tehnik produksi, sumber daya alam dan manusia dan pengorganisasian produksi berdasarkan alat, tehnik dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Marx, infrastruktur ekonomi berpengaruh besar terhadap bentuk dasar masyarakat. Hubungan produksi, diantaranya, menentukan proses menghasilkan *surplus*. Sebuah formasi sosial dapat dikategorikan kapitalistik jika hubungan produksi ini ditujukan untuk merebut *use value* yang dihasilkan pekerja dan mengubahnya menjadi *exchange value* yang dilekatkan pada komoditi tertentu sebelum menghasilkan *profit*. Pemisahan antara kelompok sosial yang menghasilkan *profit*—dan karenanya menguasai kapital—dan kelompok sosial yang hanya mampu menjual tenaga kerjanya bukan saja menentukan hubungan kelas, tetapi juga menjadi basis eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat modern.

Pemahaman tentang kelas dan kapitalisme membawa implikasi luas terhadap pemahaman Marx dan Engels tentang negara. Bertolak belakang dengan Hegel yang memisahkan negara dari masyarakat (sipil) sembari menempatkan negara sebagai aktor yang otonom dan menentukan. Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terutama hubungan antar kelas sosial yang konfliktual. Marx dan Engels juga berbeda dengan para pemikir liberal yang memusatkan perhatiannya pada ketegangan antara hak-hak individu dan netralitas negara karena ia melihat keberadaan otoritas politik dalam konteks sistem produksi untuk menghasilkan *surplus value* yang menjadi basis material hubungan tidak seimbang antara kelas dominan dan subordinan. Bagi Marx, gagasan tentang negara harus selalu dikaitkan dengan dua faktor: *pertama*, negara merupakan orde politik yang merepresentasikan kepentingan kelas sosial dominan, termasuk didalamnya menjamin keberlangsungan dominasi modal atas tenaga kerja. *Kedua*, negara juga merupakan orde politik yang menjamin keberlangsungan akumulasi kapital tanpa gangguan perjuangan kelas.

## KAPITALISME

### 1. Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996). Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah “*a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned*”. (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat) Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah “formasi sosial” yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (*primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme*).

### 2. Sejarah Perkembangan Kapitalisme

Robert E. Lerner dalam *Western Civilization* (1988) menyebutkan bahwa revolusi komersial dan industri pada dunia modern awal dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kapitalisme dan merkantilisme. Direduksi kepada pengertian yang sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didisain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional, di mana pasar berada dan bagaimana memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka. Penjelasan Robert Lerner ini paralel dengan tuduhan Karl Marx bahwa imperialisme adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme. Sistem kapitalisme, menurut Ebenstein (1990), mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara. Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations* (1776), diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan “*laissez faire*” dalam ekonomi. Bertentangan sekali dengan merkantilisme yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara.

Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara (Robert Lerner, 1988). Awal abad 20 kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadinya konsentrasinya pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis memaksa pemerintah (Barat) mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti undang-undang anti-monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan. Fenomena intervensi negara terhadap sistem pasar dan meningkatnya tanggungjawab pemerintah dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan indikasi terjadinya transformasi kapitalisme. Transformasi ini, menurut Ebenstein, dilakukan agar kapitalisme dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Lahirlah konsep negara kemakmuran (*welfare state*) yang oleh Ebenstein disebut sebagai “perekonomian campuran” (*mixed economy*) yang mengkombinasikan inisiatif dan milik swasta dengan tanggungjawab negara untuk kemakmuran sosial.

Habermas memandang transformasi itu sebagai peralihan dari kapitalisme liberal kepada kapitalisme lanjut (*late capitalism, organized capitalism, advanced capitalism*). Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebutkan bahwa *state regulated capitalism* (nama lain kapitalisme lanjut) mengacu kepada dua fenomena: (a) terjadinya proses konsentrasi ekonomi seperti korporasi-

korporasi nasional dan internasional yang menciptakan struktur pasar oligopolistik, dan (b) intervensi negara dalam pasar. Untuk melegitimasi intervensi negara yang secara esensial kontradiktif dengan kapitalisme liberal, maka menurut Habermas, dilakukan repolitisasi massa, sebagai kebalikan dari depolitisasi massa dalam masyarakat kapitalis liberal. Upaya ini terwujud dalam sistem demokrasi formal.

### 3. Tiga Asumsi Kapitalisme Menurut Ayn Rand

Ayn Rand dalam *Capitalism* (1970) menyebutkan tiga asumsi dasar kapitalisme, yaitu: (a) kebebasan individu, (b) kepentingan diri (selfishness), dan (c) pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme, karena dengan pengakuan hak alami tersebut individu bebas berpikir, berkarya dan memproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Pada gilirannya, pengakuan institusi hak individu memungkinkan individu untuk memenuhi kepentingan dirinya. Menurut Rand, manusia hidup pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Rand menolak keras *kolektivisme*, *altruisme*, *mistisisme*. Konsep dasar bebas Rand merupakan aplikasi sosial dan pandangan epistemologisnya yang natural mekanistik. Terpengaruh oleh gagasan "*the invisible hand*" dari Smith, pasar bebas dilihat oleh Rand sebagai proses yang senantiasa berkembang dan selalu menuntut yang terbaik atau paling rasional. Smith pernah berkata: "...*free market forces is allowed to balance equitably the distribution of wealth*". (Robert Lerner, 1988).

### 4. Sistem Perekonomian/ Tata Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

### 5. Teori Dasar Ekonomi-Kapitalis

Membicarakan dasar teori ekonomi kapitalisme, sosok Adam Smith dengan buku termasyhurnya, *The Wealth of Nations*, dapat disebut sebagai Bapak Kapitalisme. Dalam membahas teori dasar kapitalisme adalah dengan mengetahui ciri dasar sistem tersebut, yaitu pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik.

Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut, oleh Adam Smith diilustrasikan dengan sangat jelas: "Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan ia kejar adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat (*the invisible hands*) untuk mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti suatu yang lebih buruk dari masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kepentingan publik".<sup>20</sup> Penjelasan ilustratif tersebut sebenarnya tidak bermaksud lain kecuali kehendak untuk memaknai kapitalisme dengan memadukan kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan publik di pihak yang lain. Dari premis itu ialah

<sup>20</sup> Premis ini di kemukakan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* pendahuluan dan catatan pinggir oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1973, hlm. 14, 423.

bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individu. Meskipun demikian, orientasi individu tetap merupakan tahapan awal bagi kepentingan publik atau sosial. Motif sosial yang tersembunyi (*hidden social motive*) yang disebut Smith sebagai *the invisible hands*.

Kehendak untuk memadukan kepentingan privat dan publik ini selanjutnya dijelaskan bahwa setiap manusia, dengan demikian, dipimpin langsung oleh kepentingan dan tindak tanduk ekonominya. Manusia yang bersangkutanlah yang mengetahui apa kepentingan mereka sesungguhnya. Oleh sebab itu, dialah yang dapat memenuhi kepentingan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan kepentingan bersama, tetapi mereka berfikir bahwa kepentingan bersama ini akan dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya pula apabila setiap individu mendapat kesempatan untuk memenuhi, memuaskan, dan mengekspresikan kepentingannya masing-masing tanpa restriksi.

Setelah ia menulis *The Wealth of Nations*, Smith sudah mengemukakan dalam *Theory of Moral Sentiments* sebagai dasar filsafat teori ekonominya. Ia menentang dengan tegas pendapat de Mandeville bahwa *privet vice makes public benevit*. De Mandeville memandang bahwa kemewahan atau pengejaran keuntungan ekonomi itu dosa, meski dosa itu sendiri diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Smith justru melihat sebaliknya, dengan meniru gurunya Francis Hutcheson, ia mengatakan bahwa kebajikan adalah pengendali nafsu dan bukan sebuah antipati yang mutlak. Dalam *The Wealth of Nations* sendiri, Smith pernah mengatakan bahwa: "*The nature and causes of the wealth of nations is what is properly called political economy*". Ini menunjukkan bahwa nama bukunya saja sudah cukup untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari aktifitas ekonomi.<sup>21</sup>

Mempelajari paradigma dan ide dasar kapitalisme juga bisa dilakukan dengan membuat interpretasi-interpretasi karya Smith seperti yang banyak dilakukan. Kita memahami bahwa *masterpiece* Smith tersebut sesungguhnya hanya meletakkan gagasan-gagasan cemerlangnya secara umum saja. Sjahrir (1995) menerjemahkan *The Wealth of Nations* yang membidani lahirnya teori kapitalisme itu dengan membuat rincian sederhana seperti, apa yang harus diproduksi dan dialokasikan, bagaimana cara memproduksi dan mengalokasikan sumber daya, serta bagaimana cara mendistribusikan sumber daya dan hasil produksi.<sup>22</sup>

Pemahaman lain tentang ide dasar kapitalisme juga diberikan oleh Max Weber<sup>23</sup>. Ia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari keuntungan. Ciri produksi berdasarkan upah buruh itu merupakan karakter mendasar bagi kapitalisme. Bagi Weber, ciri kapitalisme yang lebih mendasar lagi adalah pada sistem pertukaran di pasar. Sistem di pasar ini menimbulkan konsekuensi logis berupa rasionalisasi yang mengacu pada bagaimana cara meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bagaimana melakukan akumulasi kapital secara terus menerus. Akumulasi kapital itu dimaksudkan untuk melakukan produksi barang atau jasa yang lebih menguntungkan (*more profitable*). Keuntungan inilah yang secara dominan bagi rasionalitas teknologi.

Sedangkan bagi Marx, kapitalisme tidak didefinisikan oleh motif atau orientasi kaum kapitalis. Apapun motif yang mereka sadari, mereka sebenarnya didorong oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Kapitalisme bagi Marx suatu bentuk masyarakat kelas yang distrukturasikan dengan cara khusus di mana manusia diorganisasikan untuk produksi kebutuhan hidup.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> L. J. Zimmerman, *Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi*, Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, 'S-Gravenhage, 1995, hlm. 42-43. Edisi Indonesia dikerjakan oleh K. Siagian. Periksa buku aslinya yang berjudul *Geschiedenis Van Het Economisch Denken*.

<sup>22</sup> Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 113-114.

<sup>23</sup> Max Weber, *The Protestant ethic of Spirit Capitalism*, New York, Scribner, 1958, Edisi Inggrisnya dikerjakan oleh Talcot Parson dengan Pengantar RH Tawney.

<sup>24</sup> Pada tahun 1887, muncullah *Das Capital*-nya Marx yang amat termashur itu. Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu mempunyai ciri mutlak, yakni borjuis dan eksploitasi. Oleh karenanya, begitu Marx, dengan revolusi kekerasan pemerintah sosialis harus didirikan. Demi terjaminnya stabilitas sistem ini, maka ia harus dijaga oleh sistem kepemimpinan yang diktator proletariat.

Sejalan dengan zaman, kapitalisme terus berkembang, bergerak dan beradaptasi dengan sejarah. Jorge Larrain mengemukakan, “Kapitalisme dicirikan oleh dominasi obyek atas subyek, modal atas pekerja, kondisi produksi atas produsen, buruh mati atas buruh hidup. Bahkan menurut Marx, kapitalisme adalah hasil dari praktek reproduksi manusia. Marx menganalisa hal tersebut tidak hanya untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja dan memproduksi diri sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kondisi yang mampu menggantikannya”.<sup>25</sup>

Kapitalisme yang dibuat oleh Lorens Bagus, berasal dari bahasa Inggris, *capitalism* atau kata latin, *caput* yang berarti kepala. Kapitalisme itu sendiri adalah sistem perekonomian yang menekankan peranan kapital atau modal.<sup>26</sup> Poin-poin penting yang bisa dilihat dan biasa digunakan untuk mengartikan kapitalisme adalah:

*Pertama*, kapitalisme adalah ungkapan kapitalisme klasik yang dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Adam Smith sebagai permainan pasar yang memiliki aturan sendiri. Ia yakin bahwa dengan kompetisi, pekerjaan dari tangan yang tidak kelihatan akan menaikkan harga pada tingkat alamiah dan mendorong tenaga kerja atau modal mengalami pergeseran dari perusahaan yang kurang menguntungkan. Ini berarti kapitalisme merupakan usaha-usaha kompetitif manusia yang akan dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama atau kesejahteraan sosial (*social welfare*).

*Kedua*, kapitalisme merupakan ungkapan Prancis *laissez-faire, laissez-passer*, yang berarti ‘semaunya’, yang dilekatkan sebagai ungkapan penyifat. Ungkapan *laissez-faire* menekankan sebuah pandangan bahwa dalam sistem ini, kepentingan ekonomi dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangan berlangsung tanpa pengendalian Negara dan dengan regulasi seminimal mungkin.

*Ketiga*, kapitalisme adalah ungkapan Max Weber bahwa ada keterkaitan antara bangkitnya kapitalisme dengan protestanisme. Kapitalisme merupakan bentuk sekuler dari penekanan protestanisme pada Individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatan sendiri.

## 6. Akar Historis Kapitalisme

Sistem perekonomian kapitalisme muncul dan semakin dominan sejak peralihan zaman feodal ke zaman modern. Kapitalisme seperti temuan Karl Marx menjadi sistem yang dipraktekkan di dunia bermula di penghujung abad XIV dan awal abad XV. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia terkait erat dengan kolonialisme. Pada zaman kolonialisme ini akumulasi modal yang terkonsentrasi di Eropa (Inggris) didistribusikan ke penjuru dunia, yang menghadirkan segenap kemiskinan di wilayah jajahannya.

Kelahiran kapitalisme ini dibidani oleh tiga tokoh besar, yaitu Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik, Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya. Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik adalah seorang Jerman yang melakukan gerakan monumentalnya, 31 Oktober 1571 dengan menempelkan tulisan protesnya di seluruh penjuru Roma. Ia tidak menerima kenyataan praktik pengampunan dosa yang diberlakukan gereja Roma. Kemudian ia meletakkan ajaran dasarnya, yaitu: “Manusia menurut kodratnya menjadi suram karena dosa-dosanya dan semata-mata lewat perbuatan dan karya yang lebih baik saja mereka dapat menyelamatkan dirinya dari kutukan abadi”. Sedangkan bagi Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik, mengajak orang untuk bekerja keras mengakumulasi modal atas usahanya sendiri.

Kemudian Franklin mengamanatkan: “Waktu adalah Uang”. Bagi Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya dan tarcantum dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*, Adam Smith lebih mengkongkretkan spirit kapitalismenya dalam sebuah konsep sebagai mekanisme pasar. Basis folologisnya adalah *laissez-faire, laissez-passer*. Ia mengatakan bahwa barang langka akan menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal sehingga menjadi sulit didapatkan terutama oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Tetapi

<sup>25</sup> Lihat Jorge Larrain, *The Concept of Ideology*, Forteword by Tom Bottomore, First Published, Australia: Hotchinson Publishing Group, 1979, versi Indonesia oleh Ngatawi al Zastrouw (editor) dan Ryadi Gunawan (penerjemah), Yogyakarta: LKPSM, 1997, hlm. 55.

<sup>26</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia, 1996, hlm.391.

menurut Smith bahwa yang harus dilihat adalah perilaku produsen. Ketika harga barang mahal, maka keuntungan akan meningkat. Ketika keuntungan yang dijanjikan atas barang tersebut tinggi, maka banyak produsen yang memproduksinya. Sehingga dengan demikian kelangkaan barang tersebut akan terpenuhi dan menjadi murah dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga masalah yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan oleh *the invisible hands*.

Banyak pakar memberikan penjelasan bahwa kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia baru dimulai sejak abad XVI. Menurut Dudley Dillard pada zaman kuno sebenarnya sudah terdapat model-model ekonomi yang merupakan cikal-bakal kapitalisme. Bagi Dillard, kapitalisme tidak saja dipahami sebagai sistem ekonomi pasca abad XVI. Kantong-kantong kapitalisme sebagai cikal-bakal dan ruh kapitalisme justru mulai berkembang diakhir abad pertengahan. Dillard membagi urutan perkembangan kapitalisme menjadi tiga tahapan.<sup>27</sup> Secara kronologis dalam tahapan sejarah perkembangannya: Kapitalisme Awal, Kapitalisme Klasik dan Kapitalisme Lanjut.

### 1.1 Kapitalisme Awal (1500-1750).

Kapitalisme untuk periode ini masih mendasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris sejak abad XIV sampai abad XVIII. Meski industri sandang tersebut masih menggunakan mesin pemintal yang sangat sederhana, pada gilirannya mampu meningkatkan apa yang disebut sebagai surplus sosial. Seperti dijelaskan Dillar, dalam prakteknya industri sandang menghadapi banyak problem dan kesulitan. Namun demikian, berbagai kendala tersebut tak mampu menjadi penghalang bagi kesuksesan industri tersebut. Bahkan di beberapa wilayah pelosok Inggris, industri tersebut terus berkembang pesat selama kurun waktu abad XVI sampai XVII. Surplus sosial yang didapatkan terus menerus secara produktif ternyata mampu menjadikan kapitalisme mampu bersaing dengan sistem ekonomi sebelumnya. Kelebihan itu didayagunakan untuk usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi untuk kekayaan yang lain.

Perluasan demi perluasan dengan argumentasi produktifitas yang dilakukan selanjutnya mengahdirkan fenomena dramatis dengan munculnya kolonisasi atau imperealisme ke daerah-daerah lain yang tak memiliki keseimbangan produksi. Lebih lanjut pada informasi yang sama, Dillar juga pernah menguraikan bahwa perkembangan kapitalisme pada tahapan ini didukung oleh tiga faktor yang sangat penting yaitu: (1) dukungan agama dengan menanamkan sikap dan karakter kerja keras dan ajuran untuk hidup hemat, (2) hadirnya logam mulia terhadap distribusi pendapatan atas upah, laba dan sewa, serta (3) keikutsertaan Negara dalam membantu membentuk modal untuk berusaha.

Studi Russel, *Modes of Productions individu Wolrd History* London and New York, Routledge, 1988, menjelaskan bahwa kapitalisme pada fase ini tidak bisa tidak menyebut bahwa Eropa dan Inggris abad ke-12 adalah sebagai lokasi awal perkembangan kapitalisme. Russel menunjuk wilayah perkotaan untuk mencontohkan bahwa saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka hanya menjual barang kepada teman sesama saudagar perjalanan. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi perdagangan publik.

### 1.2 Kapitalisme Klasik (1750-1914).

Pada fase ini terjadi pergeseran perilaku para kapitalis yang semula hanya perdagangan publik, ke wilayah yang mempunyai jangkauan lebih luas yaitu industri. Transformasi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri yang seperti itu merupakan ciri Revolusi Industri di Inggris. Perubahan dalam cara menentukan pilihan teknologi dan cara berorganisasi berhasil memindahkan industri dari pedesaan ke sentra-sentra perdagangan lama di perkotaan selama Revolusi Industri. Akumulasi kapital yang terus menerus membengkak selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil yang baik pada abad XVIII. Penerapan praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang tumbuh selama berabad-abad dapat sedikit demi sedikit dilakukan. Kapitalisme mulai

<sup>27</sup> Sudono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985, hlm. 10.

menjadi penggerak bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan berbagai inovasi.

Tepat pada fase ini kapitalisme mulai meletakkan dasarnya yaitu *laissez-faire, laissez-passer* sebagai doktrin mutlak Adam Smith. Dillar menerangkan bahwa perkembangan kapitalisme pada fase kedua ini semata-mata menggunakan argumentasi ekonomis. Perkembangan ini tentu saja menjadi parameter keberhasilan bagi kaum borjuis dalam struktur sosial masyarakat. Kesuksesan ekonomis berimbas pada kesuksesan di bidang politik, yaitu hubungan antara kapitalis dan Negara. Proses ini menguntungkan kapitalisme terutama dalam penentuan gaya eksplorasi, eksploitasi dan perluasan daerah kekuasaan sebagai lahan distribusi produksi. Periode kapitalisme klasik erat kaitannya dengan karya Adam Smith *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations* (1776) melalaui karya ini terdapat analisa bahwa kapitalisme kuno sudah berakhir dan bergeser menjadi kapitalisme klasik.

### 1.3 Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914).

Kapitalisme lanjut dijelaskan mulai berkembang sejak abad XIX, tepatnya tahun 1914, Perang Dunia I sebagai momentum utama. Abad XX ditandai oleh perkembangan kapitalisme yang sudah tidak lagi bisa disebut sebagai kapitalisme tradisional. Kapitalisme fase lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. *Pertama*, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. *Kedua*, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa sebagai eksekusi dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. *Ketiga*, Revolusi Bolzhevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan kapital secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemapanan agama. Dari sana kemudian muncul ideologi tandingan, yaitu komunisme.

Kapitalisme abad XX berhasil tampil meliuk-liuk dengan *performance* yang selalu bergerak mengadaptasikan kebutuhan umat manusia pada zaman dan situasi lingkungannya. Bagi Daniel Bell,<sup>28</sup> fleksibilitas ini sukses membawa kapitalisme sebagai akhir ideologi (*The End of Ideology*) yang mengantarkan umat manusia tidak hanya menuju gerbang yang penuh pesona ekstasi melainkan juga pada gerbang yang berpeluang besar untuk kehancuran umat manusia.

Budiman (1997: 86) menyebut bahwa kapitalisme seolah menjadi pesolek tanpa tanding dalam merebut perhatian para teoritis sosial dunia. Salah satu hal yang membuat kapitalisme bertahan adalah kelenturan produk yang ditawarkan. Produk-produk yang disediakan bersifat adaptif dengan zamannya. Citra-citra yang disodorkan tidak pernah dibiarkan begitu saja dan menjadi sebetuk kesombongan ideologis yang menjenuhkan, melainkan disesuaikan dengan berbagai desakan pluralisasi wacana kehidupan. Kapitalisme berhasil tetap bertahan karena ia mampu menghadirkan demokrasi ekonomi dan politik sebagai bentuk keinginan umat manusia yang paling mutakhir, tapi sebatas citra, demokrasi yang semu. Produk kapitalisme yang menggairahkan tersebut dipandang Guy Debord sebagai *trap*, bahwa saat ini kapitalisme sedang menyiapkan perangkat kebudayaan yang mengantarkan umat manusia pada kondisi komoditi yang final dan melelahkan.<sup>29</sup>

Produk lain yang ditunjukkan oleh kapitalisme lanjut adalah sedemikian menjamurnya korporasi-korporasi modern. Korporasi sudah tidak lagi bergerak di bidang industri manufaktur, melainkan jasa dan informasi. Ia berusaha mendominasi dunia dengan kecanggihan teknologi serta

<sup>28</sup> Penjelasan ini sekaligus mengawali kajian tentang Kapitalisme fase lanjut atau kapitalisme mutakhir seperti yang diratapi oleh Daniel Bell. Beberapa kajian dalam poin ini sepenuhnya mengacu ke sana. Untuk memperjelas keterangan ini periksa karya Bell seperti (1) *The End of Ideology*, New York: Free Press, 1960; (2) *The Coming of Post Industrial Society*, New York: Penguin Books Edition, 1973; (3) *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books, 1976. Sedangkan untuk edisi Indonesia, karya Bell ini dapat diperhatikan di Y.B. Mangunwijaya (ed.), *Tekhnologi dan Dampak Lingkungannya*, Volume II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985; atau Daniel Bell dan Irving Kristol (ed.), *Model dan Realita di Dalam Wacana Ekonomi, Dalam Krisis Teori Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1988.

<sup>29</sup> Guy Debord, *The Society of The Spectacle*, seperti dikutip oleh Fredric Jameson, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990, hlm. 8.



orientasi menghadapi ekonomi global. Ia lazim berbentuk MNC/TNC (*MultiNational Corporation/Trans National Corporation*). Kehadirannya semakin mempertegas bahwa pelaku aktifitas ekonomi sesungguhnya bukanlah institusi Negara, melainkan para pengusaha bermodal besar. Sebab hanya dengan modal mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi apa dan di mana saja.

Dengan semakin pentingnya modal, peranan Negara menjadi tereduksi, tapi juga hilang sama sekali. Negara hanya sekedar menjadi aktor pelengkap (*Complement Actor*) saja dalam percaturan ekonomi dunia, meski dalam beberapa kasus peran Negara tetap dibutuhkan sebagai fasilitator untuk mendukung roda ekonomi yang sedang diputar kapitalis. Inilah yang dinubuat Galbraith dengan mengatakan bahwa korporasi modern menerapkan kekuasaan melalui pemerintahan. Para kapitalis ini tetap membutuhkan keterlibatan Negara untuk memfasilitasi setiap produk yang dipasarkan. Hubungan simbiosis mutualisme ini selanjutnya menjadi karakter dasar dari kapitalisme lanjut. Peristiwa ini menyebabkan para pakar menyebut bahwa kapitalisme lanjut adalah kapitalisme monopoli (*monopoly capitalism*) atau kapitalisme kroni (*crony capitalism*).<sup>30</sup>

Korporasi modern dan Negara menjalin hubungan yang didasarkan pada distribusi kekuasaan dan profit. Hubungan yang berkembang antara korporasi modern dan birokrasi publik, seperti kapitalis yang membuat mobil dan Negara yang membangun jalan raya, kapitalis yang membuat pesawat tempur dengan Negara yang mengendalikan Departemen Udara dan sebagainya.<sup>31</sup> Selain hal itu, apa yang diungkap Galbraith sebagai kapitalisme lanjut adalah pemfungsian institusi Negara sebagai jaminan kontrol dari doktrin mekanisme pasar. Bahkan para kapitalis dengan sengaja berani membiayai dan merekayasa Negara. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi sistem sosial dalam struktur masyarakat yang diakibatkan oleh kontradiksi-kontradiksi dalam tubuh kapitalisme itu sendiri. Asumsi ini diperkuat oleh fakta pertumbuhan industri-industri kapitalisme hingga menciptakan sindroma korporasi-korporasi modern ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuasaan politik.

Dalam hal ini Galbraith memperkuat argumentasinya dengan uraian yang mendalam tentang keterkaitan Negara dalam dimensi politis dan kapitalis dalam dimensi ekonomis. Semakin menguatnya campur tangan institusi Negara ke dalam aktifitas-aktifitas ekonomi acap mendisfungsionalisasikan fungsi dari Negara itu sendiri. Hal itu bisa ditunjukkan dengan merosotnya atensi Negara yang bersangkutan terhadap persoalan-persoalan lain di luar masalah teknis administratif.

Sementara menurut pandangan Clauss Offe dalam Habermas, sejauh kegiatan Negara diarahkan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, politik selalu menampilkan sifat negatif yang khas. Politik diarahkan untuk mengatasi disfungsionalitas dan menghindari resiko-resiko yang membahayakan sistem. Politik tidak diupayakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan, melainkan pada pemecahan masalah-masalah teknis. Kegiatan Negara dibatasi hanya pada persoalan-persoalan teknis yang bisa dipecahkan secara administratif sehingga dimensi praksisnya hilang.<sup>32</sup> Hubungan faktor politik-kapitalis dengan melakukan kolaborasi adalah cara pandang Keynes, dan persoalan itu susah untuk dihindarkan. Keynes sangat tertarik pada keseluruhan adegan sosial dan politik yang diproduksi secara bersamaan. Ia memandang teori ekonomi sebagai suatu alat kebijakan politik. Ia membelokkan apa yang disebut metode ilmu ekonomi klasik yang bebas nilai untuk melayani tujuan dan target mental, dan untuk itu ia membuat ilmu ekonomi menjadi persoalan politik dengan cara yang berbeda.

Keterkaitan Negara-kapitalis yang ditunjukkan dengan bergesernya mekanisme kapitalisme bisa dipahami dari Negara Amerika. Yang terjadi di Amerika dewasa ini bukanlah paham kapitalisme yang asli yang menganut paham *laissez-faire*, *laissez-passer*, melainkan suatu sistem ekonomi yang tetap menggunakan prinsip dasar kapitalisme yang disesuaikan dengan berbagai

---

<sup>30</sup> Kapitalisme monopoli sebagai bentuk dari kapitalisme fase lanjut seringkali diberi pengertian yang merujuk pada peran penting dari kolaborasi di tingkat birokrat Negara dan pengusaha kapitalis untuk menguasai lahan produksi yang ditujukan pada kepentingan-kepentingan publik.

<sup>31</sup> Lihat John Kenneth Galbraith, *The New Industrial State*, New York: Mentor Book Paperback Edition, 1972, hlm. 258. Periksa juga Budiman, *Op. Cit.*

<sup>32</sup> Jürgen Habermas, *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 76-77.

rambu hukum yang membatasi penguasaan *resources* dan konsumsi yang berlebihan, baik secara individual maupun pada tingkat perusahaan.<sup>33</sup> Nilai-nilai yang berlaku pada sistem kapitalisme Amerika selalu mempertimbangkan beberapa aspek.

*Pertama*, Asas Kebebasan (*freedom*), dengan pengertian, bebas berkonsumsi dan berinvestasi (*free entry individu consumption and investment*) serta pembatasan investasi pemerintah sekaligus mengikhtikarkan model politik yang demokratis.

*Kedua*, Asas Keseimbangan (*equality*), dengan pengertian, adanya difusi antara kekuatan politik dan ekonomi; adanya *bargaining power* yang sama untuk produsen dan konsumen serta adanya kesempatan yang sama sekaligus upaya untuk menciptakan pemerataan.

*Ketiga*, Asas Keadilan (*fairness*), dengan pengertian, sebuah upaya untuk menghindari praktik yang tidak adil seperti adanya upah buruh yang tidak memenuhi standar; hubungan tuan dan majikan yang eksploitatif dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap praktek ekonomi harus dilandasi dengan sikap yang penuh dengan kejujuran dan keterbukaan (*full honesty and disclosure*).

*Keempat*, Asas Kesejahteraan (*welfare*), dengan pengertian, adanya pertimbangan efisiensi alokasi dan produksi. Parameter kesejahteraan bisa diketahui melalui pengawasan pemerintah terhadap stabilitas harga serta upaya untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang bersifat *full employment*. Kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup juga mendapat perhatian yang besar.

*Kelima*, Asas Pertumbuhan Berkesinambungan (*sustainable growth*) yang indikasinya adalah pertumbuhan pendapatan riil dan kemajuan teknologi. Ada beberapa kebijaksanaan pemerintah Amerika yang menjadi prioritas dalam menjamin kebesaran kapitalisme. Di antaranya adalah kebijaksanaan yang menjamin terciptanya kompetisi seperti terciptanya UU *Anti Trust* (*Sherman Act and Clayton Act*). Tujuannya untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara pihak yang bersaing. Peraturan ini secara teknis bertujuan untuk menjamin kebebasan dan keamanan dalam berinvestasi (*free exit and entry*). Kemudian kebijaksanaan yang mengatur ke mana arah kompetisi digerakkan. Pengaturan-pengaturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dan produsen. Hal itu bisa dilakukan dengan menetapkan etika periklanan dan standarisasi barang-barang dari segi kualitas maupun kuantitas. Perlindungan merk dagang dan hak cipta juga mendapatkan perhatian yang cukup serius. Selain itu, adanya kebijaksanaan yang menjadi jaminan bagi distribusi pendapatan, yakni melalui pajak. Pajak bisa difungsikan sebagai sarana pemerataan, insentif serta regulator untuk mempengaruhi alokasi produksi maupun konsumsi.

Yang penting lagi adalah adanya kebijaksanaan yang mengatur *public utility*. Ide dasar kapitalisme klasik *laissez-faire*, *laissez passer* dan jargon *the invisible hand* merupakan asas fundamental yang terus-menerus diperbaiki dan digunakan untuk mencirikan kapitalisme. Mereka berpandangan bahwa teori ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak akan mampu menyelesaikan proses alokasi barang-barang publik seperti hukum, pertahanan dan lingkungan. Padahal barang-barang ini merupakan sesuatu yang vital bagi terjaminnya hidup manusia. Jika mekanisme pasar dibiarkan dengan sendirinya untuk menentukan alokasi barang-barang publiknya, maka penyediaannya akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan permintaan masyarakat (*socially desirable*). Karenanya diperlukan peranan pemerintah untuk menyediakannya. Tindakan ini menjamin produksi barang-barang kebutuhan dasar (*merit goods*) diproduksi pada tingkat optimal secara sosial.<sup>34</sup>

Suasana lain dari kapitalisme lanjut adalah kompetisi (*competition*), dan kompetisi dalam kapitalisme Amerika merupakan poin penting dari buku *The New Industrial State* (1971) yang ditulis Galbraith. Menurutny, dalam ilmu ekonomi klasik persaingan adalah banyaknya penjual

<sup>33</sup> Dalam banyak hal, pembahasan kapitalisme fase lanjut tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pembahasan tentang sistem ekonomi kapitalisme yang ada di Amerika. Sebab seperti yang sudah dijelaskan terdahulu bahwa salah satu ciri pokok yang mendasari kapitalisme fase lanjut adalah pergeseran modal dari kapitalisme klasik yang didominasi oleh Negara-negara Eropa menuju kapitalisme Amerika. Posisi Amerika sebagai pusat perdagangan dunia (*world trade center*), dengan demikian, bisa dijadikan referensi dan parameter perkembangan kapitalisme global selanjutnya.

<sup>34</sup> Ini semakin memperjelas bahwa teori mekanisme pasar tidak bisa dibiarkan sebeb apa yang sudah didoktrinkan dalam teori ekonomi kapitalisme klasik. Pemerintah atau Negara dibutuhkan kehadirannya dalam mengurus bidang-bidang yang bersangkut-paut dengan kebutuhan publik seperti penjelasan di atas. Dengan demikian, hadirnya Negara sebagai wasit adalah berfungsi untuk mengatur pasar.

yang memperoleh bagian yang kecil dari pasaran. Galbraith kemudian mengatakan bahwa model persaingan klasik ini sebagian besar sudah lenyap karena banyak pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Galbraith juga mengatakan bahwa dalam perkembangan kapitalisme, timbul institusi yang berusaha mengimbangi kelas kapitalis, yang disebutnya sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*). Kekuatan tersebut bisa berupa lembaga konsumen yang mengontrol perilaku dan pengaruh produsen, himpunan buruh yang mengimbangi kekuatan kelas pemilik modal dan kelas manajer. Lembaga pelindung konsumen, pelindung alam serta organisasi-organisasi *volunteer* lain yang berusaha untuk mempertahankan sekaligus memperjuangkan kepentingan golongan lemah (*marginal*) dalam masyarakat, yang tentunya mayoritas. Deskripsi awal dengan menyebut Amerika sebagai pusat segala sesuatu untuk mengkaji kapitalisme lanjut harap dimaklumkan mengingat kita tidak bisa menolak bahwa Amerika adalah sentral kapitalisme dunia dari pasca perang dingin atau awal abad XIX sampai detik ini. Namun *sample* ini bukan serta merta ingin menunjukkan bahwa kapitalisme lanjut hanya terbatas (*limited*) seperti yang tercermin di Amerika. Seorang sejarawan peranakan Jepang, Francis Fukuyama, yang kemudian tenar dengan karyanya, *The End of History and Last Man*, menyatakan bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme Amerika merupakan titik akhir dari perkembangan ideologi manusia.<sup>35</sup> Fukuyama menjelaskan bahwa sejarah manusia ini sudah berhenti pada satu titik yang ekstrim, yakni kapitalisme. Karenanya akhir sejarah akan merupakan saat yang menyedihkan. Tatkala keberanian, semangat, imajinasi, idealisme dan humanisme mulai digantikan dengan perhitungan-perhitungan ekonomi yang rasional. Pada saat itu pula manusia akan terjebak pada pemecahan masalah teknis yang tidak ada habis-habisnya. Kapitalisme sibuk merancang kebutuhan konsumen yang bercita rasa melangit. Sehingga Galbraith dalam karya yang sama juga menuturkan bahwa selama paruh terakhir abad ini hampir tidak ada topik lain yang dibahas secara serius dan mendalam kecuali tentang masa depan kapitalisme (*The Future of Capitalism*).<sup>36</sup>

Akumulasi modal sekarang tidak sekedar menjadi kebiasaan. Ia telah menjadi sebuah hukum, di balik nuansa ini, tersimpan keniscayaan akan adanya alienasi bagi mereka, para kelompok mayoritas seperti buruh, petani dan perempuan. Kita menyadari bahwa kapitalisme model baru menyimpan keniscayaan atas penindasan kelompok mayoritas. Segitiga konspirasi ala O'Donnell sampai hari ini masih relevan dalam menjelaskan mekanisme ketertindasan struktural rakyat. Secara empiris konspirasi itu dapat dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan Negara terbentuk atas pengaruh kepentingan TNC. Tiga pilar neo klasik, TNC/ MNC, World Bank/ IMF, dan WTO berjalan linier, sevisi, setujuan menuju kepentingan yang sama, yakni liberalisasi pasar. Di samping itu ketiga institusi itu adalah kekuatan terbesar dunia abad ini. Sehingga kita tidak pernah menemukan kebijakan internasional yang tanpa memuat kepentingan ketiganya. Kita memang bisa menyadari bahwa kapitalisme lanjut tidak hanya dipahami sesederhana itu. Jika hujatan terpedas hari ini pada kapitalisme diserang oleh kelompok Marx dengan asumsi konflik kelas, sesungguhnya saat ini kita juga menyaksikan bagaimana kapitalisme menghadapinya dengan dada terbuka. Cita-cita Marx yang tertuang dalam kata-kata masyarakat tanpa kelas, justru secara mengejutkan, bukan terjadi dalam masyarakat komunisme, melainkan dalam masyarakat kapitalisme. Konsep pilihan publik (*public choice*) yang mencoba mengagregasikan kebutuhan-kebutuhan individu berhadapan dengan Negara, justru pada akhirnya mampu menciptakan masyarakat tanpa kelas. Maka pada saat kapitalisme, dalam kaitannya dengan Negara, mampu memelihara Negara dengan mengupayakan *reinventing government*, bukan barang mustahil apabila masyarakat tanpa kelas adalah milik kapitalisme, bukan komunisme. Masyarakat tanpa kelas ternyata gagal dipraktekkan oleh komunisme. Barangkali inilah yang disebut sebagai akhir sejarah itu, *threshold capitalism*.

---

<sup>35</sup> Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992. bandingkan dengan pandangan-pandangan dalam literatur abad ke-19 yang dikenal sebagai abad ideologi (*the age of ideology*). Bandingkan juga dengan literatur abad ke-20 yang dianggap sebagai abad: (1) Akhir Ideologi (*The End of Ideology*) karya sosiolog Daniel Bell, (2) Akhir Alam Semesta (*The End of Nature*) karya Paul MacKibben.

<sup>36</sup> Lihat Galbraith, *op. cit.*

## SOSIALISME

### 1. Pengertian Sosialisme

Sosialisme pada hakekatnya berpangkal pada kepercayaan diri manusia, melahirkan kepercayaan pula bahwa segala penderitaan dan kemelaratan yang dihadapi dapat diusahakan melenyapkannya.<sup>37</sup> Penderitaan dan kemelaratan yang diakibatkan pembajakan politik dan ekonomi dimana penguasa dan pengusaha dengan semangat liberal dan kapitalnya, memiliki kekuatan penuh mengatur kaum kebanyakan warga negara, dengan segala keserakahan yang didasarkan rasionalisme dan individualisme itu, mendorong sebagian orang mencari cara baru guna pemecahan masalah sosial tanpa harus dilakukan dengan kekerasan.

George Lansbury, pemimpin partai buruh, menulis dalam bukunya *My England* (1934), dijelaskan:

“Sosialisme, berarti cinta kasih, kerjasama, dan persaudaraan dalam setiap masalah kemanusiaan merupakan satu-satunya perwujudan dari iman Kristiani. Saya sungguh yakinapakah orang itu tahu atau tidak, mereka yang setuju dan menerima persaingan dan pertarungan satu dengan yang lain sebagai jalan untuk memperoleh roti setiap hari, sungguh melakukan penghianatan dan tidak menjalankan kehendak Allah.”<sup>38</sup>

Sosialisme adalah sebuah masyarakat dimana kaum pekerja sendiri yang menguasai alat-alat produksi dan merencanakan ekonomi secara demokratik; dan semua ini secara internasional. Istilah “sosialisme” atau “sosialis” dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan: ideologi atau kelompok ideologi. sistem ekonomi. negara. Kata ini mulai digunakan paling tidak sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, pertama digunakan untuk mengacu kepada pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, digunakan untuk mengacu pada pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 dan kemudian oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopedie nouvelle*. Penggunaan kata sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda oleh berbagai kelompok, namun hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 dan ke-20, yang berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian, yang dengan sistem ekonomi, menurut mereka, dapat melayani masyarakat banyak, ketimbang hanya segelintir elite.

Sosialisme sebagai ideologi menurut penganut Marxisme (terutama Friedrich Engels), model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia, sebagai sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa Pencerahan di abad ke-18, para pemikir dan penulis revolusioner seperti Marquis de Condorcet, Voltaire, Rousseau, Diderot, abbe de Mably, dan Morelly mengekspresikan ketidakpuasan berbagai lapisan masyarakat di Prancis. Kemudian Sistem Ekonomi dalam sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Marx tentang penghapusan kepemilikan hak pribadi, prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditi penting dan kepentingan masyarakat banyak. Seperti Air, Listrik, bahan pangan dll.

Sejumlah pemikir, pakar ekonomi dan sejarah, telah mengemukakan beberapa masalah yang berkaitan dengan teori sosialisme, termasuk di antara mereka adalah antara lain Milton Friedman, Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, dan Joshua Muravchik. Kritik dan keberatan tentang sosialisme dapat dikelompokkan menjadi kategori berikut: Insentif, Harga, Keuntungan dan kerugian, Hak milik pribadi. Keuntungan dalam anutan sosialisme kekinian telah dimungkinkan. Berhubungan dalam keuangan dari suatu negara sosialis, untuk transaksi atas barang, walaupun bukan terhadap pertanian.

### 2. Sejarah Kelahiran Sosialisme

Setelah melebarnya sayap-sayap ideologi liberalisme dan kapitalisme, maka dunia telah tersebut ideologi ini dipenuhi dengan pragmatisme hidup, sikap individualistis, konsumeris,

<sup>37</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 188.

<sup>38</sup> William Ebenstein & Edwin Fogelman, *Isme-isme Dewasa ini*, Edisi 9 (Jakarta: Erlangga, 1990) hlm. 220.

hedonisme, materialisme, dan sekulerisme. Ini telah menimbulkan masalah sosial sampai pada tingkat unit sosial terkecil, seperti melemahkan ikatan emosional dalam keluarga, disorientasi, disorganisasi sosial, pada skala yang besar timbulnya aliansi sosial sebab jauh dari agama dan kepentingan sosial dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lahirlah paham sosialisme. Mereka menentang individu sebagai dasar pribadi, juga kebebasan ekonomi yang perlu melibatkan negara. Paham sosialis mengusahakan industri negara bukan semata untuk digunakan mencari keuntungan yang melebihi usaha keuntungan kapitalis yang mungkin berhasil, mungkin tidak. Akan tetapi untuk menyelenggarakan industri yang lebih demokratis, bermanfaat dan bermartabat, penggunaan mesin yang lebih memperhatikan manusia dan penggunaan hasil kecerdasan manusia yang lebih bijak.<sup>39</sup> Lahirlah tokoh-tokoh sosialis, seperti St. Simon (1760-1825), Fourier (1837), Robert Owen (1771-1858), Louis Blane (1813-1882), Bakunin (1814-1876).

### 3. Sistem Politik Sosialisme

Sosialisme dengan demokrasi, memiliki hubungan yang sangat penting, ia menjadi bagian dari kebijakan sosialis. Sosialisme dalam konteks demokrasi memiliki tujuan dengan inti yang sama, yakni untuk lebih mewujudkan demokrasi dengan memperluas penerapan prinsip-prinsip demokrasi dari hal-hal yang bersifat politis sampai pada yang bersifat non-politis dalam masyarakat. Oleh sebab itu untuk mencapai cita-citanya, sosialis menggunakan cara-cara yang demokratis:

*Pertama*, sosialisme menolak terminologi proletariat yang menjadi bagian konsep komunisme. *Kedua*, kepemilikan alat-alat produksi oleh negara harus diusahakan secara perlahan-lahan atau secara bertahap. *Ketiga*, kaum sosialis menuntut pendirian umum yang demokratis bahwa pencabutan hak milik warga negara harus melalui proses hukum dan warga negara tersebut harus mendapat kompensasi. *Keempat*, kaum sosialis menolak pengendalian kekuasaan oleh sekelompok minoritas yang mengatasnamakan kekuatan revolusioner.<sup>40</sup> *Kelima*, tidak sependapat bahwa dalam demokrasi hanya ada dua pilihan antara liberalis-kapitalis dan komunisme. Partai-partai yang demokratis tidak menyibukkan dirinya untuk menyelesaikan perjuangan seribu tahun dalam sehari, melainkan mereka berusaha untuk memecahkan persoalan yang relatif dapat ditangani dan dihindarkan pemecahan kaku yang tidak dapat ditarik kembali.<sup>41</sup>

### 4. Sistem Ekonomi Sosialisme

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pada dasarnya sosialisme mewarisi tujuan pokok yang sama dari kapitalisme, yakni melestarikan kesatuan faktor tenaga kerja dan pemilikan. Pada abad ke-17 dan ke-18, saat kapitalisme melewati tahap awal perkembangannya, kesatuan itu menjadi kenyataan. Inggris di zaman John Locke masih hidup dan Amerika di zaman Thomas Jefferson menyaksikan pertanian yang berukuran rata-rata, toko-toko, bengkel hanya dalam skala kecil keluarga saja. Tenaga kerja dan pemilik berada dalam keseiringan. Ancaman utama dalam kesatuan ini justru datang dari negara, yang berusaha untuk menetapkan dan mengatur.

<sup>39</sup> Mas'ud An Nadwi, *Islam dan Sosialisme* (Bandung: Risalah, 1983) hlm. 32-36.

<sup>40</sup> Clement Attle, Perdana Menteri Inggris tahun 1945-1951, juga seorang Pemimpin Partai Buruh 1935-1955, menulis dalam buku *The Labour Party in Perspective* (1937) bahwa kekuatan partainya bukan bergantung pada kepemimpinan, melainkan kualitas rakyat jelata.

<sup>41</sup> William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.*, hlm. 210.

Singkatnya negara memainkan peranan suatu badan yang berkuasa penuh dalam urusan ekonomi. Akan tetapi, tatkala ekonomi kapitalis mengalami kemajuan, tanggungjawab individu dan keluarga dalam urusan kepemilikan alat-alat produksi serta pengaturan tenaga kerja perlahan-lahan digantikan oleh sistem ekonomi dalam mana perusahaan besar mengambil alihfungsi-fungsi tersebut. Ketika bentuk usaha industri tumbuh semakin besar, tanggungjawab tenaga kerja semakin beralih ke tangan masyarakat, sementara pemilikan tetap secara perorangan.<sup>42</sup>

Isu yang dalam mengembangkan sosialisme di Eropa berkaitan erat dengan masalah ekonomi adalah: *Pertama*, pemerataan sosial, salah satu kekuatan pendorong, yakni penentangannya terhadap ketimpangan kelas sosial yang diterima oleh negara Eropa (maupun bagian dunia yang lain) dari zaman feodal dimasa lalu.

*Kedua*, penghapusan kemiskinan. Yakni kemiskinan sebagai akibat dari akumulasi sistem kapitalisme, maka bagi sosialisme; 'tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi, bahwa alat produksi harus menjadi kepemilikan komunal'. Dengan menekankan solidaritas sosial dan kerjasama sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi dan membangun suatu jaringan ikatan sosial dan ekonomi yang kuat guna membantu membentuk kepaduan nasioal. Karena, begitu jauhnya kenyataan ekonomi dan politis telah melahirkan kegagalan.<sup>43</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Sosialisme

Sosialisme memiliki prinsip-prinsip dalam menegakkan suatu pemerintahan dan negara dalam mewujudkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ini meliputi masalah agama, idealisme etis dan estetis, empirisme febian dan liberalisme. Prinsip-prinsip ideologi sosialisme menurut Sydney Webb sebagaimana dalam bukunya *Fabian Essays* (1889) itu, menganggap sosialisme sebagai hasil yang tidak dapat diletakkan dari keberhasilan demokrasi dengan kepastian yang datang secara bertahap (*inevitability of gradualness*) yang berbeda dengan pandangan Karl Marx tentang kepastian revolusi.<sup>44</sup> Prinsip-prinsip ideologi sosialisme adalah sebagai berikut:

*Pertama*, masalah agama. Dalam pembentukan gerakan sosialis pengaruh agama merupakan yang paling kuat. Menemukan berbagai hal yang berhubungan dengan doktrin keagamaan, sosial dan ekonomi serta banyaknya jumlah sekte keagamaan telah membuktikan betapa adanya berbagai ajaran yang dipegangnya. Hal ini tampak terlihat di Inggris pada masa itu menurut Attle.<sup>45</sup> Hal ini karena dulu ada gerakan Kristiani Sosialis yang beranggapan bahwa agama itu harus disosialisasikan dan sosialisme harus dikristianikan.<sup>46</sup>

*Kedua*, idealisme etis dan estetis. Ini menjadi sumber sosialisme di Inggris, John Ruskin dan William Morris mengungkapkan ini bukan suatu program politik dan atau ekonomi, tetapi merupakan pemberontakan melawan kemelaratan, kebosanan, dan kemiskinan hidup dibawah kapitalisme industri. Sebagaimana kedua tokoh itu, Charles Dickens dan Thomas Carlyle serta pengarang lainnya yang melihat pengaruh peradaban industri terhadap pribadi seseorang sebagai manusia. Pemberontakan etis dan estetis masa Inggris Victoria merusak rasa percaya diri yang tumbuh pada masa itu. Sebab keraguan itu, dirinya mendapatka banyak sosialis yang positif dapat dikembangkan mengenai langkah demi langkah.<sup>47</sup> Ini bukan merupakan program politik dan ekonomi, melainkan pemberontakan dari kehidupan yang kotor dan keadaan masyarakat yang miskin akibat kapitalis industri.<sup>48</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*, 217-218.

<sup>43</sup> Lyman Tower Sargen, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer; Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1987) hlm. 149.

<sup>44</sup> Mas'ud An Nadwi, *op. cit.*, hlm. 32-36.

<sup>45</sup> Adanya gerakan Sosialis Kristiani yang dipimpin oleh dua orang biarawan, yaitu Fredrick Maurice dan Charles Kingsley mencapai puncak kejayaannya dalam pertengahan abad kesembilan belas serta menjadi sumber penting untuk perkembangan organisasi kelas buruh serta sosialis kemudian. Prinsip yang menjadi pedoman bagi kalangan Sosialis Kristen adalah konsep yang menandakan bahwa sosialisme harus dikristenkan dan Kristianitas harus disosialisasikan. Lihat dalam William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.*, hlm. 219-220.

<sup>46</sup> Firdaus Syam, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>47</sup> William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.*, hlm. 222-223.

<sup>48</sup> *Ibid.*

*Ketiga*, empirisme fabian. Ini merupakan ciri gerakan sosialis Inggris yang paling khas. Masyarakat fabian didirikan pada tahun 1884, serta mengambil nama seorang Romawi, yakni Quintus Fabius Maximus Cunctator, si “penunda”. Moto awal dari masyarakat itu adalah ‘Engkau harus menunggu saat yang tepat; kalau saat yang tepat itu tiba engkau harus melakukan serangan yang dahsyat, sebab jika tidak, penundaan yang engkau lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil. Tokoh-tokoh dari kalangan ini antara lain George Bernard Shaw, Sydney dan Beatrice Webb, H.G. Wells dan Graham Wallis, mereka bukan berasal dari kalangan miskin. Dalam hal politik menghendaki suatu perubahan masyarakat secara konstitusional. Perubahan itu jangan sampai melalui revolusi yang radikal dengan membalikkan struktur politik dengan cara paksa atau kekerasan. Prinsip bahwa tidak mungkin ada kemajuan kecuali kepada kelas menengah dan atas ditunjukkan bahwa tuntutan dasar pikiran serta politik sosialis tadi masuk akal dan bersifat adil.<sup>49</sup>

*Keempat*, liberalisme. Ini telah menjadi sumber yang semakin penting bagi sosialisme, terutama sejak Partai Liberal merosot peranannya, dan meningkatnya peran oleh Partai Buruh. Dalam sosialisme juga ada kecenderungan berorientasi pada negara, masa dan kolektivitas. Kedua kecenderungan itu masih Sunan Kalijaga menjadi seorang pribadi dan bukan menjadi seorang anggota dalam daftar nasional. Namun demikian, dalam 40 tahun terakhir semakin banyak orang Liberal yang menggabungkan diri dengan Partai Buruh.<sup>50</sup> Hal ini penting terutama setelah partai liberal terjadi tidak berarti banyak beralih ke partai buruh. Sebab dalam partai buruhlah, gagasan mereka dapat dikembangkan.<sup>51</sup>

Oleh sebab itu sosialisme sebagai bentuk kekuatan politik, sosial dan ekonomi sangat berpihak kepada tindakan populis dan untuk rakyat, ini dilakukan berupa pemberian kesempatan kerja, menghapus diskriminasi, memperjuangkan mengenai persamaan hak, memperjuangkan hak-hak pekerja, kerjasama serta menghapuskan persaingan dan mengatur mekanisme ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat.

## 6. Sosialisme Utopis

Sosialisme Utopis atau Sosialisme Utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk menyebut diri mereka; istilah "Sosialisme Utopis" awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya, untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotesis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan suatu cara dimana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan.

Kata utopia sendiri diambil dari kisah pulau Utopia karangan Thomas Moore. Karena Sosialisme utopis ini lebih merupakan sebuah kategori yang luas dibanding sebuah gerakan politik yang spesifik, maka sebenarnya sulit untuk mendefinisikan secara tepat istilah ini. Merujuk kepada beberapa definisi, disini sosialisme utopis ini sebaiknya melihat para penulis yang menerbitkan tulisan-tulisan mereka pada masa antara Revolusi Perancis dan pertengahan 1930-an. Definisi lain mengatakan awal mula sosialisme utopis jauh lebih ke masa lalu, dengan mengambil contoh bahwa figur Yesus adalah salah satu diantara penganut sosialisme utopis. Walaupun memang terbuka kemungkinan siapapun yang hidup dalam waktu kapanpun dalam sejarah dapat disebut sebagai seorang sosialis utopis, istilah ini lebih sering dipakai terhadap para sosialis utopis yang hidup pada seperempat masa pertama abad 19. Sejak pertengahan abad 19 dan selanjutnya, cabang-cabang

<sup>49</sup> Firdaus Syam, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>50</sup> Dalam pemilihan umum pasca perang yang diadakan pada tanggal 5 Juli 1945, partai buruh meraih 394 dari 640 kursi, dengan demikian untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris pemerintahan Partai Buruh dibentuk dengan mayoritas yang mantap di Majelis Rendah. Antara tahun 1900 sampai 1918, partai buruh secara resmi tidak terikat dengan sosialisme, meskipun mereka menghimpun banyak individu yang berhalauan sosialis. Pada tahun 1918, ketika partai itu mengambil sosialisme sebagai programnya, komitmennya kepada nasionalisasi industri hampir penuh. Partai buruh berubah secara drastis pandangannya dan mendorong nasionalisasi hanya kalau secara pragmatis telah terbukti bahwa pemilikan oleh negara akan mendatangkan lebih banyak manfaat bagi kemakmuran negara daripada pemilikan secara perorangan. Lihat dalam William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.*, hlm. 223 & 229.

<sup>51</sup> Firdaus Syam, *op. cit.*, hlm. 50.

sosialisme yang lain jauh melebihi versi utopisnya, baik dalam perkembangan pemikirannya maupun jumlah penganutnya. Para sosialis utopis sangat penting dalam pembentukan pergerakan modern bagi komunitas intentional dan koperasi, techno komunisme. Istilah "sosialisme ilmiah" kadang digunakan oleh para penganut paham Marxisme untuk menguraikan versi sosialisme mereka, terutama untuk tujuan membedakannya dari Sosialisme Utopis dimana telah terdeskripsi dan idealistis (dalam beberapa hal mewakili suatu yang ideal) dan bukan ilmiah, yaitu, yang dibangun melalui pemikiran dan berdasarkan pada ilmu-ilmu sosial.

## 7. Pemikir Utama Sosialisme Utopis

Robert Owen (1771-1858) adalah seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnisnya demi peningkatan hidup karyawannya. Reputasi dia meningkat ketika dia mendirikan suatu pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia dan memperkenalkan waktu kerja lebih pendek, membangun sekolah untuk anak-anak dan merenovasi rumah-rumah tempat tinggal pegawainya. Ia juga merancang suatu komunitas Owenite yang disebut New Harmony (Keselarasan Baru) di Indiana, AS. Komunitas ini bubar ketika salah satu dari mitra bisnisnya melarikan diri dengan membawa semua laba yang ada. Kontribusi utama Owen bagi pikiran kaum sosialis adalah pandangan tentang dimana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yg mereka inginkan. Otienne Cabet (1788-1856) dipengaruhi oleh pemikiran Robert Owen. Di dalam bukunya *Travel and adventures of Lord William Carisdall in Icaria* (1840) ia memaparkan suatu masyarakat komunal idealis. Usaha nya untuk membuatnya kembali (gerakan Icarian) gagal. Charles Fourier (1772-1837) sejauh ini adalah seorang sosialis yang paling utopis. Menolak semua tentang Revolusi Industri dan semua permasalahan yang timbul menyertainya, ia membuat berbagai pendapat fantastis tentang dunia yang ideal yang ia impikan. Selain beberapa kecenderungan yang jelas-jelas tidak sosialis, ia tetap memberi kontribusi berarti bagi gerakan sosialis. Tulisan-tulisannya membantu Karl Marx muda dan membantunya memikirkan teori alienasinya. Fourier juga seorang feminisme radikal.

## KOMUNISME

### 1. Pengertian Komunisme

Komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi di tahun 1830 di Perancis. Suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapusannya raja. Istilah komunis, awalnya mengandung dua pengertian. *Pertama*, ada hubungannya dengan komune (*commune*) suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasian *komune-komune* itu. *Kedua*, ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Pada esensinya adalah sebuah alra berfikir berlandaskan kepada *atheisme*, yang menjadikan materi sebagai asal segala-galanya. Ditafsirkannya sejarah berdasarkan pertarungan kelas faktor ekonomi. Karl Marx dan Frederich Engels adalah tokoh utamanya dalam mengembangkan faham ini.<sup>52</sup>

Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "*Marxisme-Leninisme*". Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politburo sebagai *think-tank*. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politburo. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi.

<sup>52</sup> Abu Ridho, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (WAMY, 1999) hlm. 198.



Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.

## 2. Ide Dasar Komunisme

Komunisme masa kini menitik beratkan empat ide: 1] Sekelumit kecil orang hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya bergelimang papa sengsara, 2] Cara untuk merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat produksi dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi swasta, 3] Pada umumnya, satu-satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan, 4] Untuk menjaga kelanggengan sistem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, sedangkan ide yang keempat berasal dari gagasan Marx mengenai “diktatur proletariat”, sementara itu lamanya berlaku kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan langkah-langkah Lenin dan Stalin daripada gagasan tulisan Marx. Hal ini nampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam Komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenarnya, dan penghinaan orang-orang terhadap tulisantulisannya lebih menyerupai etalase untuk membenarkan sifat “keilmiahannya” dari pada ide dan politik yang sudah terlaksana dan diterima.

## 3. Ciri-ciri Inti Masyarakat Komunis

Ciri-ciri inti masyarakat komunis adalah; 1] penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, 2] penghapusan kelas-kelas sosialisme, 3] penghilangnya negara, 4] penghapusan pembagian kerja. Kelas-kelas tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kelas kapitalisme ditiadakan karena kapitalisme sendiri sudah menghapus semua kelas, sehingga hanya tinggal proletariat. Itulah sebabnya revolusi sosialis tidak akan menghasilkan masyarakat atas dan masyarakat bawah lagi.<sup>53</sup>

## 4. Filsafat Perubahan Sosial dalam *Manifesto Komunis*<sup>54</sup>

Dalam materialisme dialektik, tindakan adalah yang pertama dan fikiran adalah yang kedua. Aliran ini mengatakan bahwa tak terdapat pengetahuan yang hanya merupakan pemikiran tentang alam; pengetahuan selalu dikaitkan dengan tindakan. Pada zaman dahulu, menurut Marx, para filosof telah menjelaskan alam dengan cara yang berbeda-beda. Kewajiban manusia sekarang adalah untuk mengubah dunia, dan ini adalah tugas dan misi yang bersejarah dari kaum komunis. Dalam melakukan tugas ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan menggunakan kekerasan guna mencapai maksud mereka. Sesungguhnya, kebanyakan orang komunis percaya bahwa kekerasan adalah perlu untuk menghilangkan kejahatan dari masyarakat.

Masyarakat, seperti benda-benda lain, selalu dalam proses perubahan. Ia tidak dapat diam (statis) karena materi itu sedniri bergerak (dinamis). Akan tetapi perubahan atau proses perkembangan itu tidak sederhana, lurus atau *linear*. Selalu terjadi perubahan-perubahan yang kecil, yang tidak terlihat, dan kelihatannya tidak mengubah watak benda yang berubah itu, sampai terjadilah suatu tahap dimana suatu benda tidak dapat berubah tanpa menjadi benda lain. Pada

<sup>53</sup> Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 171.

<sup>54</sup> Titus Smith Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Judul Asli: *Living Issues in Philosophy*, Seven Edition, D. Van Nostrand Company, New York, 1979. Penerjemah: Prof. Dr. H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 304-306.

waktu itu terjadi suatu perubahan yang mendadak. Sebagai contoh, air dipanaskan pelan-pelan, ia menjadi bertambah panas sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya secara mendadak, pada suatu tahap, ia menjadi uap, dan terjadilah perubahan keadaan. Ada perkembangan yang lalu dari perubahan kuantitatif yang sangat kecil dan tidak berarti, kemudian menjadi perubahan yang penting terbuka dan kemudian menjadi perubahan kualitas; terjadi juga suatu perkembangan dimana perubahan kualitatif terjadi dengan lekas dan mendadak, berupa suatu loncatan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain.<sup>55</sup> Begitu juga dalam hubungan ekonomi dari suatu masyarakat dan dalam pertarungan kepentingan antara kelas, situasi revolusioner akan muncul. Jika ditafsirkan dengan cara ini maka materialisme dialektik memberi dasar kepada perjuangan kelas dan tindakan revolusioner.

Pada tahun 1848 Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan *Manifesto Komunis*, suatu dokumen yang banyak mempengaruhi gerakan revolusioner. Akhirnya Karl Marx menerbitkan karyanya yang besar, *Das Kapital*, Jilid pertama terbit pada tahun 1867. Marx membentuk interpretasi ekonomi tentang sejarah, dan interpretasi tersebut telah berpengaruh kuat selama seratus tahun terakhir ini. Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. Sejarah digambarkan sebagai pertempuran kelas, dimana alat-alat produksi, didistribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, sosial, moral dan agama.

Terdapat lima macam sistem produksi, empat macam telah muncul bergantian dalam masyarakat manusia. Sistem kelima diramalkan akan muncul pada hari esok yang dekat, dan sekarang sudah mulai terbentuk. Yang *pertama* adalah sistem komunisme primitif. Sistem ini adalah tindakan ekonomi yang pertama dan mempunyai ciri-ciri pemilikan benda secara kolektif, hubungan yang damai antar perorangan dan tidak adanya teknologi. Tingkat *kedua* adalah sistem produksi kuno yang didasarkan atas perbudakan. Cirinya adalah timbulnya hal milik pribadi, yang terjadi ketika pertanian dan pemeliharaan binatang mengganti perburuan sebagai sarana hidup. Dengan lekas, kelompok aristokrat dan kelas tinggi memperbudak kelompok lain. Pertarungan kepentingan timbul ketika kelompok minoritas menguasai sarana hidup. Tingkatan *ketiga* adalah tingkatan dimana kelompok-kelompok feodal menguasai penduduk-penduduk. Pembesar-pembesar feodal menguasai kelebihan hasil para penduduk yang hanya dapat hidup secara sangat sederhana.

Pada tingkatan *keempat*, timbulah sistem borjuis atau kapitalis dengan meningkatnya perdagangan, penciptaan dan pembagian pekerjaan; sistem pabrik menimbulkan industrialis kapitalis, yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi. Si pekerja hanya memiliki kekuatan badan, dan terpaksa menyewakan dirinya. Sebagai giliran tangan menimbulkan masyarakat dengan pengusaha kapitalis.

Sejarah masyarakat mulai pecahnya masyarakat primitif bersama adalah sejarah pertarungan kelas. Selama seratus lima puluh tahun terakhir, kapitalisme industri dengan doktrin *self-interest* (kepentingan diri sendiri)-nya telah membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang bertentangan: borjuis atau kelompok yang memiliki dan proletar atau kaum buruh. Oleh karena kelas yang memiliki menguasai lembaga-lembaga kunci dari masyarakat dan tidak mengizinkan perubahan besar dengan jalan damai, maka jalan keluarnya adalah penggulingan kondisi sosial yang ada dengan kekerasan.

Setelah revolusi, menurut materialisme dialektik dan filsafat komunis, akan terdapat dua tingkat masyarakat. Pertama tingkat peralihan, yaitu periode kediktatoran dari kaum proletar. Dalam waktu tersebut orang mengadakan perubahan sosial yang revolusioner, dan kelas-kelas masyarakat dihilangkan dengan dihilangkannya hak milik pribadi terhadap sarana produksi, distribusi dan pertukaran (*exchange*). Tingkat kedua setelah revolusi adalah tingkat kelima dan tipe terakhir dari sistem produksi. Itu adalah “masyarakat tanpa kelas” atau komunisme murni. Pada tingkatan tersebut bentrokan dan eksploitasi akan telah selesai, dan semua orang, pria dan wanita akan terjamin kehidupannya yang layak. Negara tidak lagi menjadi alat kelas dan dialektik tidak berlaku

<sup>55</sup> Joseph Stalin, *Dialectical and Historical Materialism* (New York: Inter. Publisher, 1950) h. 8.

lagi dalam masyarakat tanpa kelas. Akan terdapat kemerdekaan, persamaan, perdamaian dan rizki pun melimpah. Masyarakat akan menyaksikan realisasi kata-kata: dari setiap orang menurut kemauannya, bagi setiap orang menurut kebutuhannya.

## 5. Kedudukan Proletariat dalam Komunisme

Komunisme adalah doktrin mengenai keadaan bagi kemerdekaan proletariat.<sup>56</sup> Bahwa terwujudnya komunisme membutuhkan keniscayaan terciptanya proletariat, dan proletariat adalah Proletariat merupakan kelas dalam masyarakat yang hidup hanya dengan menjual tenaga kerjanya dan tidak menarik keuntungan dari mana-mana jenis kapital; kebiluran dan kesengsaraan mereka, hidup dan mati mereka, kewujudan semena-mena mereka bergantung kepada keperluan tenaga pekerja—dan oleh kerana itu, bergantung kepada keadaan perniagaan yang senantiasa berubah, dan ketidak-tentuan persaingan yang tidak terkawal. Proletariat, atau kelas proletariat, merupakan, dalam sekata dua, kelas pekerja abad ke-19.<sup>57</sup>

Proletariat menjelma semasa revolusi perindustrian, yang berlaku di England pada hujung abad ke-18, dan yang diulangi di setiap negara bertamadun di seluruh dunia. Revolusi perindustrian ini dijana oleh penciptaan enjin stim, mesin menenun mekanikal dan pelbagai peralatan mekanikal yang lain. Mesin-mesin ini, yang begitu mahal sekali dan, oleh kerana itu, hanya dapat dibeli oleh kapitalis besar, mengubah cara pengeluaran dan mengambil tempat bekas pekerja, kerana mesin-mesin tersebut menghasilkan komoditi yang lebih murah dan lebih baik daripada yang dapat dihasilkan oleh para pekerja dengan roda penenun dan penenun tangan mereka yang tidak memadai. Mesin-mesin tersebut menghadiahkan bidang indutsri ke dalam tangan kapitalis besar dan

---

<sup>56</sup> Diambil dari Prinsip-prinsip Komunisme, oleh Frederick Engels, Ditulis pada Oktober-November 1847, Dari *Selected Works*, Jilid1, muka surat 81-97, diterbitkan oleh Penerbit Progress, Moskow; 1969.

<sup>57</sup> Marx-Engels, *Selected Works*; Peking, Penerbit Foreign Languages, 1977. [Mukadimah] Pada tahun 1847, Engels menulis dua program draf untuk Liga Komunis dalam bentuk soalan bersiri, satu pada bulan Jun dan satu pada bulan Oktober. Yang kedua, yang dikenali sebagai Prinsip-prinsip Komunis, diterbitkan buat kali pertama pada tahun 1914. Dokumen Draff Pengakuan Keimanan Komunis yang lebih awal, hanya dijumpai pada tahun 1968. Ia diterbitkan buat kali pertama pada tahun 1969 di Hamburg, dengan empat dokumen yang lain berkaitan dengan kongres pertama Liga Komunis, dalam risalah bertajuk *Grundungs Dokumente des Bundes der Kommunisten (Juni bis September 1847)* atau *Dokumen Pengasas Liga Komunis*. Di Kongress Liga Keadilan pada bulan Jun 1847, yang juga merupakan kongres pengasasan Liga Komunis, mereka mengambil keputusan untuk meluluskan sebuah draf ‘pengakuan keimanan’ untuk diperdebatan oleh Liga itu. Dokumen yang dijumpai itu sudah pasti merupakan draf ini. Bandingan di antara dua dokumen itu menunjukkan bahawa Prinsip-prinsip Komunisme merupakan edisi yang disemak. Dalam Prinsip-Prinsip Komunisme, Engels tidak menjawab tiga soalan, dalam dua kes dengan nota ‘tidak berubah’ (*bleibt*); ini jelasnya merujuk kepada jawapan yang diberi dalam draf awal. Draff baru untuk program ini diusahakan oleh Engels di bawah arahan badan pemimpin Liga Komunis cawangan Paris. Arahan tersebut disetujui selepas kritikan tajam Engels pada 22hb Oktober, 1847 terhadap program draf yang ditulis oleh ‘sosialis benar’ Moses Hess, yang kemudiannya ditolak. Sambil mempertikaikan Prinsip-Prinsip Komunisme sebagai draf awal, Engels menyatakan pendapat beliau, dalam surat kepada Karl Marx bertarikh 23-24hb November 1847, bahwa ia mungkin baik untuk mengetepikan susunan soalan bersiri dan menulis sebuah program dalam bentuk manifesto. “Timbangkanlah Pengakuan Keimanan sedikit. Saya percaya kita harus mengetepikan susunan soalan bersiri dan memanggilkannya: Manifesto Komunis. Kerana sedikit sebanyak sejarah harus dikaitkan dengannya, cara susunannya sekarang tidak berapa sesuai. Saya akan membawa apa yang saya sudah selesaikan dengan saya; ia dalam susunan penceritaan, tetapi tidak ditulis dengan baik, kerana saya menulisnya dengan cepat...” Pada kongres kedua Liga Komunis (9hb November – 8 Disember 1847), Marx dan Engels mempertahankan prinsip-prinsip saintifik komunisme dan diberi tugas menulis program dalam bentuk manifesto untuk Parti Komunis. Dalam menulis manifesto tersebut, pengasas Marxisme menggunakan kalimah-kalimah yang ditulis dalam Prinsip-prinsip Komunisme. Engels menggunakan ungkapan *Manufaktur* dan usulan seperti itu, yang telah diterjemahkan sebagai ‘pengeluaran,’ ‘bidang pengeluaran’ dan sebagainya. Engels menggunakan perkataan ini secara benar, untuk menandakan pengeluaran dengan tangan, bukannya pengeluaran kilang, yang Engels memberi nama ‘industri besar.’ *Manufaktur* berbeda daripada kraftangan (pengeluaran tukang di pekan-pekan Zaman Pertengahan), di mana kraftangan diusahakan oleh artisan bebas. *Manufaktur* diusahakan oleh pekerja yang bekerja untuk pedagang kapitalis, atau oleh kumpulan tukang kraf yang bekerja di bengkel-bengkel besar yang dimiliki oleh kapitalis. Oleh kerana itu, ia merupakan keadaan peralihan di antara kesatuan tukang (kraftangan) dan cara pengeluaran moden (kapitalis). Dalam karya mereka yang ditulis pada waktu-waktu lain, Marx dan Engels menggantikan ungkapan ‘penjualan tenaga pekerja,’ ‘nilai tenaga pekerja’ dan ‘harga tenaga pekerja’ yang digunakan di sini dengan ungkapan ‘penjualan kuasa tenaga pekerja,’ ‘nilai kuasa tenaga pekerja’ dan ‘harga kuasa tenaga pekerja’ (yang diperkenalkan oleh Marx) yang lebih tepat.

menghancurkan nilai harta para pekerja (peralatan, alat penenun dan sebagainya). Akibatnya, pihak kapitalis berjaya merangkul kesemuanya dalam tangan mereka dan tidak terdapat apa-apa yang tinggal untuk para pekerja. Ini menandakan pengenalan sistem perkilangan kepada industri tekstil. Selepas dorongan bagi pengenalan mesin-mesin dan sistem perkilangan diberi, sistem ini menjalar dengan pantas ke setiap bidang industri yang lain, khususnya pencetakan buku dan pengecapan kain, pembuatan barangan tembikar, dan industri logam.

Pekerjaan-pekerjaan semakin dibahagikan di kalangan individu sehingga pekerja yang dahulunya melaksanakan tugas yang menyeluruh, sekarang hanya melaksanakan sebahagian daripada tugas tersebut. Pembahagian tugas ini membenarkan benda-benda dihasilkan dengan lebih cepat dan lebih murah. Ia mengurangkan aktiviti pekerja kepada gerakan mekanikal senang dan berterusan yang dapat dilaksanakan dengan lebih baik oleh mesin-mesin. Dalam cara ini, segala industri tersebut jatuh, satu demi satu, di bawah kekuasaan sistem, mesin-mesin dan sistem perkilangan, seperti yang berlaku kepada penenunan dan penganyaman.

Tetapi, pada masa yang sama, bidang-bidang tersebut turut jatuh ke dalam tangan kapitalis besar, dan para pekerja dilucutkan kebebasan mereka. Lama-kelamaan, bukan sahaja pengilangan tulen bahkan juga kraftangan jatuh ke dalam cengkaman sistem perkilangan, apabila kapitalis besar mengambil tempat tukang mahir kecil dengan mendirikan bengkel-bengkel besar, yang lebih menjimatkan dan membenarkan pembahagian tugas yang lebih terperinci.

Begitulah hampir segala jenis pekerjaan diusahakan di kilang-kilang di setiap negara bertamadun-dan, dalam hampir setiap bidang kerja, kraf-tangan dan pengeluaran telah dilintasi. Proses ini telah menghancurkan kelas menengah lama pada tahap yang lebih teruk lagi, khususnya tukang kraftangan kecil-kecilan; ia telah mengubah keadaan pekerja secara menyeluruh; dan dua kelas baru telah diwujudkan yang, secara perlahan-lahan, sedang menelan kelas-kelas yang lain. Ini merupakan: 1] Kelas kapitalis besar yang, di setiap negara bertamadun, memiliki secara eksklusif segala keperluan hidup dan peralatan (mesin-mesin dan kilang-kilang) dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penghasilan keperluan hidup. Ini merupakan kelas borjuas, atau borjuasi. 2] Kelas yang tidak berharta, yang terpaksa menjual tenaga pekerja mereka kepada borjuasi untuk mendapat, secara berbalas, keperluan hidup untuk kesenangan mereka. Mereka diberikan nama kelas proletariat, atau pendek kata, proletariat.

## 6. Sejarah Perkembangan Komunisme

Rusia, merupakan pusat kegiatan pembaharuan untuk menegakkan negara yang berdasarkan faham komunisme setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di tahun 1917. Pada tahun 1919 didirikan *Third International* atau yang dikenal dengan Komunisme Internasional. Sosialisme-komunis dikenal juga dengan istilah Bolshevikism, kelompok ini yang memenangkan puncak revolusi di Rusia di tahun 1917 itu. Sebelumnya pada tahun 1889, setelah berdiri *Social Democracy Party* yang membuka cakrawala berfikir baru bagi paripenulis Rusia. Rapat kerja yang dilakukan di kota Perlyt dipenuhi dengan tantangan yang tajam sesama mereka, sampai akhirnya kemudian terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama memilih cara kerja melalui cara berjuang yang tidak revolusioner diberi nama Menshevik atau kelompok minoritas. Adapun golongan kedua dengan pengikut mayoritas memilih perjuangan dengan cara revolusioner, kelompok ini disebut Bolshevik. Golongan ini berhasil memegang kekuasaan tertinggi di Rusia dibawah kepemimpinan Lenin, didukung Trotsky<sup>58</sup>, yang dilanjutkan oleh Stalin, Krushev, Brezhnev, Andropov, Chernenko sampai Gorbachev.

## 7. Sistem Politik Komunisme

Secara teoretis, pemerintahan komunis yang didasarkan ideologinya memperlakukan semua negara bagian mereka, rakyat dan cita-citanya menciptakan masyarakat sama rata-sama rasa. Dalam kenyataannya kekerasan, penyingkiran lawan-lawan, pembuangan, pengasingan, agitasi dan

---

<sup>58</sup> Dalam pertarungan perebutan kekuasaan di Rusia sepeninggal Lenin, Trotsky orang kepercayaan Lenin, pada akhirnya disingkirkan oleh Stalin sebagai penguasa baru Rusia. Trotsky memiliki perbedaan pendapat, disingkirkan dari Dewan Tertinggi Organisasi, kemudian terusir dari negaranya tahun 1928, serta terbunuh di pengasingan.

propaganda untuk menghancurkan bagi mereka yang tidak sejalan merupakan tindakan yang biasa dan harus dijalankan dengan cara revolusioner dan radikal. Dengan demikian ideologi komunisme dengan Marxisme-nya cenderung untuk melahirkan sistem politik yang otoriter dan tiranik seperti yang diperlihatkan oleh penguasa Stalin dan Lenin di Rusia, Mao Tse Tung di China, Fidel Castro di Kuba, Rezim Kemer Merah dengan Polpot dan Khrushchev di Kamboja, Kim Sung di Korea Utara, Afganistan di masa Babrak Karmal. Sejumlah negara dikawasan Eropa Timur yang menjadi satelit Uni Sovyet seperti Hungaria, Bulgaria, Jerman timur, Latvia, Lithuania, Estonia, Rumania, Polandia. Kemudian negara dibawah Konfederasi Rusia yang menjadi Uni Sovyet seperti Georgia, Turkistan, Azerbaijan, Turkmistan, Kazakstan, Armenia. Selain itu negara yang berporos kepada paham Marxis dikawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Melalui partai komunis yang menganut *single party* memegang kekuasaan dengan mutlak-diktator. Rakyat tidak mungkin mengembangkan buah pikirannya, apalagi melakukan partisipasi politik yang berbeda dengan partai komunis yang berkuasa, termasuk untuk mengemukakan kebijaksanaan partai negara.<sup>59</sup> Bagaimana Stalin dan Breznev, menumpas sejumlah negara yang menuntut persamaan hak atau keinginan melepaskan diri dari satelit Uni Sovyet seperti Georgia, Rumania, Polandia, Hongaria, Cekoslovakia dan Afganistan di era 1950-an sampai 1970-an.

Dalam membawa misi komunismenya untuk mencapai dan menguasai politik dalam masyarakat maupun negara, kalangan ini bila mungkin membentuk partai politik berupa partai komunis. Dalam struktur politik, negara yang berfaham ideologi komunis menganut sistem komando, hierarkis dari atas, dengan pola yang sentralistik, dan diktatur atas nama proletar, sehingga sering disebut diktatur proletariat. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan ada tiga tingkat atau jalur untuk lahirnya suatu kebijakan politik, yakni; 1] Polit Biro (*vanguard*) merupakan pimpinan tertinggi dan pemutus, 2] partai atau parlemen, 3] negara terakhir masyarakat. Secara resmi, negara komunis mengaku kemajemukan masyarakat, sebagai realisasinya ada wadah yakni partai. Akan tetapi masyarakat komunis, Marxisme, Leninisme mengajarkan bahwa sosialisme dibentuk dan dipertahankan melalui "Kediktaturan Proletariat."<sup>60</sup> Kediktaturan Proletariat dilakukan melalui partai hanya mungkin melalui kediktaturan Polit Biro. Inilah doktrin Sentralisme Demokrasi.

## 8. Sistem Perekonomian/ Tata Ekonomi Komunisme

Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.

Lenin dalam melihat kemakmuran ekonomi yang menjadi syarat utama untuk mencapai cita-cita komunis. Ia bersandar kepada tiga prinsip untuk mencapai tujuan tersebut: *Pertama*, industrialisasi secara pesat, terutama sekali dengan mengandalkan pembangunan industri; *Kedua*, perencanaan menyeluruh dengan mengkoordinasikan kehidupan anggota masyarakat secara seksama oleh suatu organisasi teknik birokratis (kita harus meniru kapitalis); *Ketiga*, perlebagaan persaingan sebagai cara untuk model dan rangsangan bagi usaha individu dan kolektif, melalui pemberian rangsangan bagi kepentingan pribadi dalam bentuk gaji serta imbalan yang tidak sama, dan insentif material dan jabatan untuk mereka yang ahli secara teknis dan cakap secara administratif.<sup>61</sup>

Pada hakikatnya dalam penerapannya, ideologi komunisme dalam satu negara dengan masyarakatnya tercipta bentuk pemerintahan serta sistem politiknya yang diktatur dan otoriter penguasa dan partai terhadap rakyatnya. Dalam bidang ekonomi, telah menciptakan kelas baru antara pemegang kekuasaan dengan rakyat, yakni ditindasnya hak rakyat dalam berkeaktivitas

<sup>59</sup> Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm. 45.

<sup>60</sup> Firdaus Syam, *op. cit.*, hlm. 59.

<sup>61</sup> Ali Syariati, *Kritik Islam atas Marxisme* (Bandung: Mizan, 1983) hlm. 139.

dibidang ekonomi serta pemilikan. Dibidang sosial budaya telah menciptakan manusia yang tidak lagi memiliki harkat kemanusiaan yang asasi dan universal.

## 9. Prinsip-prinsip Komunisme

*Pertama*, yang dimasud dengan ideologi komunisme ialah sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. *Kedua*, ideologi komunis yang berasal dari pemikiran Marx memberikan ekspresi harapan. Filsafat Marx yang komunis telah menyadarkan janji penyelamatan sosial.<sup>62</sup> *Ketiga*, orang komunis percaya bahwa historical materialis, sebab mereka memandang soal-soal spiritual hanya sebagai efek sampingan hakikat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Agama muncul menurut Marx disebabkan adanya perbedaan kelas sosial. Agama menjadi produk perbedaan kelas. Agama merupakan perangkat yang dipasang kelas penguasa untuk menjerat kelas proletariat yang tertindas. Apabila perbedaan kelas itu hilang, maka agama dengan sendirinya akan lenyap sebab pada saat itu perangkat (agama) tidak dibutuhkan lagi.<sup>63</sup> Komunisme juga tidak menerima pikiran orang lain (*distrust of others reasons*), penyanggahan terhadap persamaan manusia (*denial of human equality*), dan interpretasi secara ekonomi sistem terhadap sejarah (*economic interpretation of history*). Oleh karena itu mereka tak segan-segan melakukan penipuan, pengkhianatan dan pembunuhan untuk melenyapkan lawan-lawannya, meskipun dari anggota partainya sendiri.<sup>64</sup> *Keempat*, karena cara mencapai tujuan, sangat menghalalkan segala cara, sangat menghalalkan kekerasan radikal, revolusioner dan perjuangan kelas, dengan sendirinya etika tingkah laku didasarkan atas kekerasan (*code of behavior of violence*) serta tidak mengakui pernyataan hak asasi manusia (*denial of declaration of human right*). *Kelima*, cita-cita perjuangannya adalah membangun masyarakat tanpa negara, tanpa kelas dengan konsep sama rata-sama rasa, ideologi komunis itu bersifat internasional dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. *Keenam*, pengendalian segala kebijakan berada ditangan segelintir orang yang diebut Polit Biro, dengan sendirinya kebijakan ekonomi juga dilakukan secara tersentral (*central economic system*) dengan manajemen yang juga secara diktator (*dictatorial management*) dan pemerintahan yang dikendalikan oleh sejumlah orang yang sedikit (*government by the few*).<sup>65</sup> []

---

<sup>62</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *Agama dan Ideologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) hlm. 9.

<sup>63</sup> Murtadho Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam atas Marxisme dan Teori lainnya*, lihat dalam Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h. 292. Kajian mengenai Marxisme dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dalam tulisan Ali Syariati, *Kritik atas Marxisme dan Aliran Barat Lainnya* (Bandung: Mizan, 1982).

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Sukarna, *Ideologi* (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 45, 48 dan 68.

## Hand-Out 06

### KERANGKA PIKIR REVOLUSI SOSIAL & REVOLUSI POLITIK

Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### HAKEKAT REVOLUSI<sup>66</sup>

Didalam *Manifesto Komunis*, Marx menguraikan tahapan revolusi seperti yang dicita-citakannya:

- 1) Perlawanan individu dari kaum buruh yang sudah tidak tahan ditindas oleh majikannya. Individu-individu yang berani inilah yang memulai seluruh tahapan perjuangan kaum buruh;
- 2) Pemogokan yang dilakukan di pabrik oleh mayoritas pekerja. Perjuangan individu ini akan segera memecah dinding kebekuan dan semangat perlawanan akan seketika meluap. Pada awal tahapan ini, kaum buruh masih bertindak destruktif dimana pola perlawanan adalah dengan merusak pabrik yang dianggapnya sebagai sumber kesengsaraan. Ini adalah tahapan spontanisme dari gerakan buruh;
- 3) Dengan semakin berkembangnya industri, kaum buruh pun berkembang baik dalam pengalaman organisasi kerjanya maupun dalam perspektifnya tentang pergerakan. Disinilah kaum buruh mulai berfikir tentang perlunya satu serikat sekerja (*union*). Tahapan ini disebut sebagai tahapan *ekonomisme*. Pemogokan dengan serikat sekerja lebih efektif dan menghasilkan banyak kemenangan disana-sini bagi kaum buruh seperti jam kerja yang lebih pendek maupun upah yang lebih tinggi. Menyadari bahwa serikat sekerja ini sangat efektif dalam memperjuangkan tuntutannya, kaum majikan pun menghadapi pemogokan dengan kekerasan. Salah satu contoh yang amat baik menjelaskan hal ini adalah sejarah serikat buruh di Amerika Serikat dimana pawai menuntut 8 jam kerja sehari di Haymarket Square (1 Mei 1886) berubah menjadi ajang pembantaian oleh polisi terhadap buruh. Sebuah bom yang tidak perah terungkap dari mana datangnya tiba-tiba meledak dan polisi seketika itu juga membuka tembakan. Peristiwa ini menjadi alasan untuk sebuah *crackdown* terhadap semua serikat buruh di Amerika Serikat dan gerakan menuntut 8 jam kerja sehari terbungkam selama beberapa tahun. Peristiwa inilah yang kelak akan terus diperingati oleh kaum buruh sedunia sebagai *May Day*.
- 4) Kemajuan teknologi komunikasi adalah jembatan yang akan menghubungkan serikat-serikat sekerja inidan menempunya menjadi satu partai proletariat. Partai proletariat inilah yang akan membawa kaum buruh menuju puncak perlawanannya; berhadapan dengan kaum kapitalis sebagai kelas, bukan sebagai individu atau organisasi.
- 5) Setelah itu, kaum proletar sebagai kelas penguasa yang baru harus;

Mengambil alih, secara bertahap seluruh kapital dari tangan borjuasi, memusatkan seluruh alat produksi di tangan Negara, yaitu di tangan proletariat sebagai kelas penguasa; dan untuk meningkatkan produktifitas total selekas mungkin.

Bagi Marx, peralihan kekuasaan politik merupakan langkah awal, syarat perlu bagi revolusi yang sesungguhnya. Marx mencermati mutlak pentingnya peralihan kekuasaan politik ketangan kaum borjuasi dalam rangka penegakan sistem ekonomi kapitalisme. Bahkan, tanpa peralihan kekuasaan politik ini, sistem ekonomi kapitalisme tidak akan tumbuh subur, bahkan bisa saja tidak tumbuh sama sekali karena terhalang oleh keseluruhan sistem ekonomi-politik kaum feodal. Hanya setelah kekuasaan ada ditangan kelas yang berbeda, pola produksi masyarakat akan

---

<sup>66</sup> Ken Budha Kusumandaru, *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan terhadap Franz Magnis-Suseno* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. II., 2004) h. 138-139.

dapat diubah sesuai dengan pola produksi yang memberikan keuntungan bagi kelas yang berkuasa tersebut.<sup>67</sup> Demikian Marx merumuskan:

Langkah pertama dalam revolusi oleh klas pekerja adalah menaikkan kaum proletariat ke tampuk kekuasaan untuk memenagka pertempuran demi demokrasi.

## REVOLUSI SOSIAL DAN REVOLUSI POLITIK<sup>68</sup>

Semakin stabil masyarakat berkelas, maka dominasi kelas berkuasa semakin kurang ditantang, dan semakin pula perjuangan kelas terserap dalam konflik terbatas yang tidak mempertanyakan struktur masyarakat tersebut, yang disebut oleh kaum Marxis sebagai dasar *hubungan produksi* atau *modus produksi*. Tetapi semakin stabilitas ekonomi dan sosial dari sebuah modus produksi tergoncang, semakin dominasi kelas berkuasa ditantang, dan semakin pula perjuangan kelas akan berkembang pada suatu titik untuk mengajukan pertanyaan *penggulingan* donimasi tersebut—pertanyaan mengenai revolusi sosial.

Sebuah revolusi sosial terjadi ketika kelas yang dieksploitasi dan tertindas tidak lagi menerima dominasi tersebut sebagai tidak dapat dihindari, permanen dan pantas; revolusi sosial terjadi ketika mereka tidak lagi membiarkan dirinya diintimidasi dan ditindas pemaksaan dengan kekerasan oleh penguasa, ketika mereka tidak lagi menerima ideologi yang membenarkan tatanan tersebut, ketika mereka mengumpulkan kekuatan material dan moral yang dibutuhkan untuk menggulingkan kelas yang berkuasa.

Perubahan ekonomi yang sangat besarlah yang mengolah kondisi bagi terjadinya revolusi sosial. Organisasi sosial yang ada dan modus produksinya yang memungkinkan tenaga produktif dan kekayaan material masyarakat berkembang selama periode tertentu, telah menjadi rem bagi berkembangnya dominasi. Ekspansi produksi mengalami benturan dengan organisasi sosialnya, dengan hubungan sosial dalam produksi. Disanalah terdapat sumber utama revolusi sosial dalam sejarah.

Sebuah revolusi sosial menggantikan tatanan satu kelas dengan kelas yang lainnya. Revolusi sosial mensyaratkan penyingkiran kelas berkuasa sebelumnya dari kekuasaan negara. Setiap revolusi sosial diiringi oleh revolusi politik Revolusi borjuis dicirikan oleh penyingkiran monarki absolut dan menggantikan dengan kekuasaan politik ditangan majelis-majelis yang dipimpin oleh borjuasi. Estates-General menekan kekuasaan Philip I dari Spanyol pada Revolusi Belanda. Parlemen Inggris mengancurkan absolutisme Charkes I pada Revolusi Inggris 1649. Kongres Amerika menghancurkan dominasi George III atas tiga belas koloni. Berbagai majelis saat Revolusi Perancis menghancurkan monarki Bourbon.

Jika setiap revolusi sosial pada saat yang bersamaan juga berujud revolusi politik, tetapi setiap revolusi politik belum tentu berujud revolusi sosial. *Sebuah revolusi yang hanya politik* menunjukkan perubahan, dengan cara-cara revolusioner, dari *satu bentuk dominasi*, *satu bentuk negara* sebuah kelas, *dengan bentuk negara yang lain dari kelas yang sama*.

Demikian juga Revolusi Perancis 1830, 1848 dan 1870 adalah revolusi politik yang berturut-turut menempatkan Monarki Juli, Republik Kedua, Kerajaan Kedua dan Republik Ketiga, semua bentuk politik pemerintahan yang berbeda dari kelas sosial yang sama—borjuasi. Secara umum, revolusi politik menggulingkan bentuk negara dari kelas sosial yang sama sebagai fungsi kepentingan utama dari berbagai lapisan, dan fraksi kelas yang sama, lain dalam kekuasaan. Tetapi modus produksi pokok tidak akan digulingkan oleh revolusi-revolusi tersebut.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 141

<sup>68</sup> Ernes Mendel, *Tesis-tesis Pokok Marxisme*, Penerjemah: Ing. Mahendra K., (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2006) h. 21-23.



## REVOLUSI DALAM PERSPEKTIF SOSIALISME<sup>69</sup>

Sebagaimana termuat dalam tesis ke XI-nya kepada Feuerbach<sup>70</sup>, bahwa tugas filsafat bukan sekedar menginterpretasikan dunia, tapi justru yang pokok adalah mendobraknya. Endapan pemikiran ini mencuat dua tahun kemudian ketika Marx menulis Manifesto Komunis yang diakhiri kalimat-kalimat agitatif yang ditunjukkan kepada kaum buruh, yakni anggota dan simpatisan Partai Komunis yang didirikannya. Disini Marx tidak menyembunyikan nada revolusioner dan dari ajarannya. Bahwa kaum komunis tidak perlu lagi menyembunyikan pendapat dan tujuan-tujuannya. Hendaknya kaum komunis mengumumkan niat mereka untuk merobohkan segenap susunan masyarakat dengan cara kekerasan. Sebab “*the proletarians*” begitu tulis Marx “*have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working man of all countries, unite!*”.”<sup>71</sup>

Dalam upaya merealisasi cita-cita masyarakat tanpa kelas, Marx memberikan rumusan bahwa masyarakat yang ingin dicapai adalah bentuk sosialis, yakni dari tiap orang diminta menurut kecakapannya dan kepada tiap-tiap orang diberikan menurut kebutuhannya, “*from each according to his ability, to each according to his needs*”.”<sup>72</sup> Masyarakat semacam ini tidak dapat ditunggu tapi harus dibuat, untuk itu kaum proletar yang kini tergabung dalam partai komunis memainkan peranan pentingnya. Yaitu merebut kekuasaan dari tangan kapitalis dengan cara merebut segala alat produksi dan melalui tahap transisi yang disebut dengan diktatur proletariat. Jadi barisan proletar dengan partai komunislah sebagai barisan pelopor dalam usaha mencapai kekuasaan.<sup>73</sup> Marx, meskipun sedikit menulis tentang diktatur proletariat ini, namun ketua Partai Komunis ini pernah merumuskan bahwa:

Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary transformation of the one into the other. There corresponds to this also of political transition period individu which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat.<sup>74</sup>

Revolusi yang dijabarkan oleh Karl Marx dapat dijabarkan dalam dua tahap. *Pertama*, revolusi-revolusi yang dipelopori oleh golongan borjuis yang hendak menghancurkan golongan feodal. *Kedua*, adalah revolusi yang dilakukan oleh kelas pekerja dalam upaya meruntuhkan kelas borjuis. Sewaktu revolusi pertama berlangsung kelas buruh modern sebenarnya sudah eksis membantu borjuis meruntuhkan golongan feodal. Bantuan yang diberikan oleh kelas pekerja dalam revolusi tahap awal semata-mata dimaksudkan sebagai ajang latihan dan pematangan tekad mengantisipasi kekuasaan, melatih diri berorganisasi serta memahami cara-cara mengatur negara.

Setelah mencapai kekuasaan, kaum komunis sebagai juru bicara kelas buruh mempunyai tugas untuk mempergunakan kekuasaannya di zaman peralihan sampai tiba di suatu zaman sisa-

<sup>69</sup> Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. IV., 2004) h. 157-161. Khususnya pada BAB. III.

<sup>70</sup> “*The philosopher have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it*”. Tesis XI Tentang Feuerbach Karl Marx (1845). Ditulis oleh Marx dalam musim semi 1845. Mula-mula diterbitkan oleh Engels dalam 1888 sebagai Lampiran pada edisi yang tersendiri dari karyanya Ludwig Feuerbach. Dicitak menurut naskah edisi tersendiri pada tahun 1888 dan diperiksa dengan manuskrip Karl Marx. Diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris.

<sup>71</sup> Karl Marx and Frederick Engels, *Manifesto The Communist Party* (1948) h. 65.

<sup>72</sup> Karl Marx, “*Critique of The Gotha Programme*”, termuat dalam *Selected Work Vol. I.*, (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1962). h. 24.

<sup>73</sup> Karl Marx and Frederick Engels, *Manifesto The Communist Party, Op. Cit.*, h. 46. Kepeloporan kaum komunis ini menurut Marx didasarkan pada kenyataan bahwa: The Communist, practically, the most advanced and resolute section of the working parties of every country, that section which pushes forward all other, on other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general result of the proletariat movement. (Kaum Komunis, praktisnya adalah bagian yang termaju dan teguh dari partai-partai kelas pekerja di negeri mana saja, bagian yang memberikan dorongan bagi lain-lain, sebaiknya secara teoretis juga mereka itu dibanding dengan massa besar dari proletariat mempunyai kelebihan dalam memahami dengan jelas garis perjuangan, kondisi serta hasil-hasil umum terakhir dari gerakan proletar).

<sup>74</sup> Karl Marx, *Op. Cit.*, h. 32-33.

siswa persoalan kelas tidak menjadi beban pikiran. Persis pada tempat inilah masyarakat tanpa kelas (*class less society*) terbangun bersamaan dengan hilangnya negara.

Persoalan hilangnya negara—*the withering away of the state*—sesudah kemenangan kelas buruh ini bertitik tolak dari ajaran bahwa negara bagi komunis adalah bersifat internasional, dan sesungguhnya komunis yang asli seperti yang disinyalir Marx tidak memiliki negara. Negara modern hanyalah suatu panitia belaka yang menjalankan urusan bersama dari seluruh kelas borjuis. Bahkan dalam Manifesto Komunis dinyatakan bahwa, negara modern apapun bentuknya pada hakekatnya adalah suatu mesin kapitalisme, negara dari kelas kapitalis. Dengan demikian negara tidak mempunyai fungsi selain sebagai alat penindas, “*and the modern representative state Islam an instrument of the exploitation of wage labour by capital*”.<sup>75</sup>

Dalam pemerintahan proletariat setelah runtuhnya kaum kapitalis, kelas-kelas dalam masyarakat dengan sendirinya turut hilang. Alienasi juga akan hilang sebab alat produksi—selalu dipahami sebagai penentu hubungan sosial—tidak lagi menjadi milik pribadi, tapi kini menjadi milik kolektif dan dikelola secara kolektif pula. Marx menggambarkan masyarakat macam ini terdiri dari orang-orang yang mudah pindah kerja, segalanya akan gampang dilakukan, tidak ada perbedaan antara kerja otak dengan kerja mesin dan karenanya “pembagian ini” diberikan tidak didasarkan atas jenis kerja sebagaimana dalam masyarakat kapitalis, tetapi kepada keperluan hidup atau dengan kata lain dalam masyarakat ini pengelolaan kebutuhan masing-masing orang menjadi dasar tujuannya.

## MATERIALISME HISTORIS TEORI MULTIDIMENSIONAL<sup>76</sup>

Piotr Sztompka menjelaskan tentang materialisme historis dalam perspektif perubahan sosial; bahwa asumsi utama materialisme historis adalah sebuah teori multidimensional tentang sejarah yang diuraikan di tiga tahap bahasan yang berbeda: sejarah dunia, struktur sosial, dan tindakan individual. Dengan kata lain, sebenarnya ada tiga bagian teori materialisme historis yang saling berkaitan: (1) teori formasi sosial-ekonomi ditingkat puncak; (2) teori perjuangan kelas ditingkat menengah; dan (3) teori tindakan individual (disebut Marx ‘*species-being*’) ditingkat bawah. Masing-masing menerangkan masalah pokok yang berbeda, terletak didalam pikiran Marx yang berbeda dan dirumuskannya dalam bahasa yang berbeda pula. Beberapa teori kelas dan teori tindakan individual dalam bahasa empiris kongkret yang digunakan Marx dalam melukiskan fenomena, segera akan terlihat; individu dengan tindakan mereka, kelompok dengan bentuknya, produk dengan tenaga kerjanya, dan seterusnya. Contoh bahasan empiris kongkret itu terdapat dalam *The Class Struggle in France* (1850), *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1852), *The Civil War in France* (1871) dan ada kalanya sebagai ilustrasi dalam karya yang lain.

Tetapi jelas perhatian Marx tidak pada tingkat realitas empiris itu. Masalah yang menantanginya ketika menganalisis realitas empiris itu adalah justru untuk menemukan “mekanismenya” atau “hukum perubahannya”. Bahasa empiris dibuangnya dan kita berhadapan dengan pemikiran teoretis abstraknya. Sebagian besar karyanya (misalnya, teori formasi sosial-ekonomi, sebagian besar teori kelas dan beberapa bagian teori tindakan individual dan alienasi individual) dibahas menurut pemikiran teoritis-abstrak itu. Konsep-konsep utama yang digunakan Marx tak segera dapat kita hubungkan dengan fenomena empiris karena memang merupakan *konstruk*, *model* atau *idealisasi* yang berguna untuk menata pengalaman empiris yang sangat kompleks itu. Ditingkat teoretis abstrak ini tak ada lagi pembicaraan mengenai individu atau kelompok, tetapi bicara tentang nilai surplus; hubungan sosial-produksi; basis ekonomi; superstruktur; kesadaran kelas; kepentingan kelas objektif; kelas untuk dirinya sendiri; keterasingan; dan sebagainya. *The German Ideology* (1859) dan *The Capital* (1867) merupakan dua contoh yang bagus mengenai gaya pemikir Marx yang unik itu.

<sup>75</sup> Frederick Engels, “*The Origin of The Family, Private Property and The State*,” termuat dalam *Selected Work* Vol. I., (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1962). h. 320.

<sup>76</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Judul Asli: *The Sociology of Social Change*, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 181-209.

Tiga teori yang dibedakan diatas saling berkaitan logis dan merupakan satu bangunan teori bertingkat. Ketiganya dikaitkan oleh hubungan interpretasi (dari atas ke bawah) dan oleh hubungan agregat (dari bawah ke atas). Teori yang berada di ditingkat yang lebih rendah, menjelaskan mekanisme proses yang ditetapkan ditingkat yang lebih tinggi, memberikan interpretasi yang kongkret atas pernyataan teoretis yang dikemukakan di tingkat lebih tinggi itu. Teori ditingkat lebih tinggi, melukiskan efek gabungan dari proses yang terjadi ditingkat lebih rendah, menggenalisis kemungkinan hasil gabungan yang sering tak diharapkan dan tak disadari.

Mekanisme perubahan formasi sosial-ekonomi disediakan oleh teori kelas sosial. Contoh, pernyataan umum mengenai kehancuran sendiri kapitalisme yang tak terelakkan itu diberi “daging empiris” melalui mekanisme pemiskinan relatif dan mobilisasi kelas buruh yang akhirnya meledak dalam bentuk revolusi antikapitalis. Meminjam komentar Raymod Aron: *Mekanisme kehancuran sendiri kapitalisme adalah sebuah mekanisme sosiologis dan bekerja melalui perilaku kelompok sosial*.<sup>77</sup>

Tetapi alasan mengapa kelas-kelas muncul dan mengapa terjadi perjuangan kelas, hanya dapat ditemukan dalam teori yang lebih rendah, yakni dalam teori individu dan tindakan mereka. Manusia mewarisi kecenderungan khusus, “kekuasaan”, dan aspirasi mereka.

Teori individual inipun menerangkan mengapa individu yang mengalami keterasingan menyebabkan mereka mempunyai kepentingan ekonomi serupa dan mengakibatkan munculnya kelas sosial. Perkembangan perjuangan antar kelas mencapai titik puncaknya dalam revolusi dan menghasilkan perubahan keseluruhan formasi sosial-ekonomi.

*Pertama*, kita akan menelusuri implikasi ketiga kerangka teoretis itu bagi semua masalah utama dinamika sosial. Jelas ada tiga pandangan tentang masa depan yang akan dituju oleh gerakan masyarakat, tiga keadaan akhir yang akan dipakai sebagai kriteria kemajuan. Pada tingkat sejarah dunia, Marx membayangkan kemunculan sosialisme, yakni terutama melimpahnya komoditi ekonomi yang dipelihara oleh ledakan perkembangan kekuatan produktif (tehnologi), lenyapnya sistem pemilikan pribadi dan lenyapnya negara. Pada tingkat struktur sosial, ia meramalkan akan terciptanya masyarakat yang adil dan merata, terwujudnya prinsip “setiap orang akan terpenuhi kebutuhannya”. Pada tingkat tindakan individual, ia berharap keterasingan anggota masyarakat akan lenyap sama sekali, dalam arti tercapainya kebebasan penuh: secara negatif bebas dari semua hambatan struktural dan secara positif bebas untuk membentuk lembaga dan organisasi sosial menurut keinginan orang.

*Kedua*, ada tiga jalan yang dilalui oleh perubahan sosial, tiga tempat pola perubahan spiral mewujudkan dirinya sendiri dalam sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, terjadi pergeseran dari pemilikan bersama dan pengaturan diri sendiri masa primitif, melalui pemilikan pribadi dan kekuasaan politik, ke perekonomian komunis dan persamaan politik, “kebebasan berserikat dan kebebasan memproduksi”. Pada tingkat struktur sosial, terjadi gerakan dari komunitas yang sebelumnya tidak mengenal kehidupan kelas, melalui masyarakat yang terbagi-bagi atas kelas-kelas, ke masyarakat tanpa kelas dimasa mendatang. Pada tingkat tindakan individual, terjadi pergeseran dari spontanitas primitif, melalui keterasingan dan kongkretisasi individu, menuju lenyapnya keterasingan dan timbulnya emansipasi dan kebebasan.

*Ketiga*, ada tingkat gagasan tentang revolusi yang menandai permulaan perubahan kualitatif dalam perjalanan sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, revolusi menandai transformasi fundamental keseluruhan formasi sosial ekonomi. Pada tingkat struktur sosial, revolusi berarti pergantian kelas penguasa oleh kelas penentangnya. Pada tingkat individual, revolusi mengacu pada tindakan kolektif raksasa dimana kepentingan (terutama ekonomi) orang tertentu mengungguli kepentingan orang lain.

*Keempat*, gagasan tentang kepentingan pun mempunyai tiga makna. Pada tingkat sejarah dunia, *vested-interest* yang sistematis adalah objektif, diperjuangkan melalui posisi didalam formasi sosial-ekonomi, yakni di dalam sistem produksi. Pada tingkat struktur sosial, kepentingan kelas dipandang sebagai kepentingan subjektif dan kesadaran mereka berubah menjadi kesadaran kelas.

---

<sup>77</sup> Raymod Aron, *Main Currens in Sociological Thought*, Vol I., (Gardem City: Doubleday Anchor, 1968) h. 174.

Pada tingkat tindakan individual, kepentingan berarti pamrih, motivasi dan tujuan pribadi. Diantara berbagai pamrih, motivasi dan tujuan pribadi, kepentingan ekonomi dianggap menempati posisi tertinggi.

*Kelima*, ada tiga urutan mekanisme dialektika perubahan sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, terdapat kontradiksi objektif antara segmen-segmen formasi sosial-ekonomi dan ada urutan standar (rantai) pemecahan masalahnya, mulai dari basis ekonomi menuju superstruktur politik dan hukum, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial. Pada tingkat struktur sosial, terdapat konflik kelas yang berkembang dari kontradiksi kelas objektif, melalui antagonisme kelas dan permusuhan, ke perjuangan kelas sesungguhnya dan pecahnya revolusi. Pada tingkat tindakan individual, terdapat dorongan kreatif yang dihambat oleh kondisi alam atau sosial, adanya upaya terus-menerus untuk mengatasi hambatan itu, yang menghasilkan peningkatan kontrol manusia terhadap alam dan lingkungan sosial.

*Keenam*, ada tiga jenis faktor penyebab perubahan yang bekerja ditingkat yang berbeda. Jawaban untuk pertanyaan mendasar, yakni apakah perubahan sosial itu suatu keharusan atau tergantung, ataukah ditentukan oleh sebagian fakultatif, ataukah ada akhirnya atau tak terbatas, semuanya akan tergantung ditingkat teoretis mana perubahan itu dilihat. Ditingkat sejarah dunia, Marx menegaskan determinisme yang kuat. Proses sejarah menyeluruh dilihat sebagai sesuatu yang pasti, tak dapat ditawar-tawar, berlangsung melalui tahapan yang seragam dan tanpa terelakkan menuju terciptanya komunisme. Ditingkat struktur sosial, pengaruh faktor penentu jauh lebih lemah. Kelas yang menentukan tindakan kolektif akhirnya dipandu oleh kepentingan ekonomi mereka dan bertujuan untuk menguatkan atau mempertahankannya. Mereka mungkin kekurangan kesadaran, telah keliru atau mempunyai kesadaran palsu mengenai kepentingan mereka. Adakalanya mereka mungkin disesatkan dan ditipu untuk bertindak oleh pemimpin yang tak bertanggungjawab, demagog, atau oleh agen provokasi. Dalam semua kasus itu mungkin kelas bertindak bertentangan dengan kepentingan ekonomi mereka. Ditingkat tindakan individual, terdapat unsur terkuat kesukarelaan, pilihan bebas, keputusan spontan, kemungkinan, atau peluang. Pada dasarnya setiap individu dapat bertindak bertentangan dengan kepentingannya. Banyak orang yang mengutamakan pertimbangan lain diluar pertimbangan ekonomi (misalnya, emosi, tradisi dan ideologi). Tetapi secara keseluruhan, manusia adalah rasional dan kepentingan ekonomi memberikan alasan mendasar bagi pamrih, motivasi dan tujuan mereka. Jadi, meskipun tindakan secara individual tak ditentukan oleh pertimbangan ekonomi tetapi secara kolektif faktor ekonomi menentukan tindakan massa. Setiap orang bebas memilih tetapi juga dapat diramalkan pilihan apa yang diambil orang banyak.

Marx melukiskan perubahan sejarah melalui tiga tahap. Proses perubahannya bermula ditingkat tindakan individual. Tindakan individual yang menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial dan sejarah. Individu adalah agen perubahan terakhir. Tetapi dalam tindakannya, individu harus menyadari kondisi struktural disekitar mereka. Kesamaan kepentingan ekonomi (dan pertentangan kepentingan ekonomi dengan orang lain) mempersatukan orang menjadi sebuah kelas sosial dan sekaligus mempertentangkan mereka, kelas sosial memasuki perjuangan kelas dengan kelas yang berlawanan. Kelas yang progressif, yakni yang berkepentingan mengembangkan "kekuatan produktif" (tehnologi modern), akan lebih unggul. Mereka menciptakan produksi baru. Kelas lain sisanya terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi yang baru ini. Lengkaplah transformasi fundamental seluruh masyarakat, yakni revolusi sosial. Kemudian cerita ini akan terulang dengan sendirinya.

## REVOLUSI SOSIAL<sup>78</sup>

Revolusi adalah wujud perubahan sosial paling spektakuler, sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis; pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Revolusi tak menyisakan apapun seperti keadaan sebelumnya. Revolusi menutup epos lama dan membuka epos baru. Di saat revolusi, masyarakat mengalami puncak agennya,

<sup>78</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Judul Asli: *The Sociology of Social Change*, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 357-379.

meledakkan transformasi dirinya sendiri. Segera sesudah revolusi, masyarakat dan anggota seperti dihidupkan kembali, hampir menyerupai kelahiran kembali. Dalam artian ini revolusi adalah tanda kesejahteraan sosial.<sup>79</sup>

Dibandingkan dengan bentuk perubahan sosial lain, revolusi berbeda dalam lima hal; (1) menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat: ekonomi, politik, kultur, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia, (2) dalam semua bidang tersebut, perubahan radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial, (3) perubahan yang terjadi sangat cepat, tiba-tiba, seperti ledakan dinamit ditengah aliran lambat proses historis, (4) dengan semua alasan itu, revolusi adalah pertunjukkan perubahan paling menonjol; waktunya luar biasa cepat dan karena itu sangat mudah diingat. Revolusi membangkitkan emosi khusus dan reaksi intelektual pelakunya dan mengalami ledakan mobilisasi massa, antusiasme, kegemparan, kegirangan, kegembiraan, optimisme dan harapan; perasaan hebat dan perkasa; keriangangan aktivisme; dan menggapa kembali makna kehidupan; melambungkan aspirasi dan pandangan utopia masa depan.<sup>80</sup>

Konsep revolusi modern berasal dari dua tradisi intelektual: filsafat sejarah dan sosiologi. Konsep filsafat sejarah tentang revolusi berarti terobosan radikal terhadap kontinuitas jalannya sejarah (Brinton 1965: 237). Perhatian ditujukan pada pola umum proses sejarah dan revolusi menandai terobosan kualitatif pola umum ini. Tokoh teori perkembangan sangat sering berasumsi demikian. Contoh khususnya adalah pandangan Marx tentang rentetan formasi sosial-ekonomi dimana “revolusi sosial” menandai lompatan kualitatif ke fase perkembangan lebih tinggi.<sup>81</sup>

Konsep sosial tentang revolusi mengacu pada penggunaan gerakan massa atau acaman paksaan dan kekerasan terhadap penguasa untuk melaksanakan perubahan mendasar dan terus-menerus dalam masyarakat mereka. Pusat perhatian bergeser dari pola menyeluruh, dari arah dan hasil akhir yang dipentingkan, ke agen penyebab, mekanisme, dan skenario alternatif dari proses sosial yang berarti bahwa orang digunakan untuk membentuk dan membentuk ulang sejarah. Revolusi dipandang sebagai perwujudan terkuat kreativitas manusia yang dinyatakan dalam tindakan kolektif disaat proses historis berada di titik kritis. Ini berarti pandangan yang lebih bebas, yang menekankan pada agen dan peluang. Konsep ini lebih khas digunakan dalam teori perubahan-sosial tokoh post-perkembangan kini. Tokoh ini membuang gagasan “hukum besi” sejarah.<sup>82</sup>

Cerminan kedua tradisi itu (filsafat sejarah dan sosiologi) terdapat dalam devibisi revolusi sekarang. Definisi revolusi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok<sup>83</sup>; (1) revolusi mengacu pada perubahan fundamental, menyeluruh dan multidimensional, menyentuh inti tatanan sosial. Menurut pengertian ini, perombakan sebagian dari hukum dan administrasi, penggantian pemerintahan dan sebagainya tak terhitung sebagai revolusi, (2) revolusi melibatkan massa rakyat yang besar jumlahnya yang dimobilisasi dan bertindak dalam satu gerakan revolusioner. Dalam banyak kasus melibatkan pemberontakan petani (Jenkins 1982) dan pemberontakan urban. Menurut pengertian ini, meski suatu gerakan dapat menimbulkan perubahan paling dalam dan fundamental, tetapi jika dipaksakan oleh penguasa dari atas (misalnya, restorasi Meiji di Jepang, revolusi Attaturk di Turki, reformasi Nasser di Mesir, perestroika Ghorbachev) maka ia tak terhitung sebagai revolusi. Begitu pula, meski terjadi perubahan fundamental, jika ditimbulkan oleh kecenderungan sosial spontan, tak termasuk pengertian revolusi (kecuali dalam kata kiasan ketika kita berbicara tentang revolusi teknologi atau ilmu pengetahuan, (3) Kebanyakan pakar yakin bahwa revolusi memerlukan keterlibatan kekerasan dan penggunaan kekerasan.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 357.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 360.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 360-362.

## TEORI UTAMA REVOLUSI<sup>84</sup>

Berikut ini dibahas empat aliran utama teori revolusi. Masing-masing adalah aliran: tindakan, psikologi, struktural, dan politik.

*Pertama*, teori revolusi tindakan. Teori revolusi modern pertama diajukan oleh Sorokin tahun 1925 (1967). Kesimpulannya terutama didasarkan pada pengalaman revolusi Rusia 1917, tempat ia berpartisipasi dan memerankan peran politik tertentu. Teorinya dapat dianggap sebagai contoh pendekatan tindakan karena ia memusatkan perhatian pada tindakan individu yang menandai revolusi (1967: 367). Penyebab tindakan menyeleweng itu dicarinya dalam bidang kebutuhan dasar (naluri) individu. Pertunjukan tragedi besar, drama dan tragedi revolusi di panggung sejarah, terutama dibawa oleh naluri menindas bawaan (*Ibid.*, h. 372). Revolusi ditandai oleh perubahan mendasar ciri perilaku manusia. Perilaku beradab cepat dibuang dan digantikan oleh perilaku seperti binatang buas yang hendak saling memangsa (*Ibid.*, h. 372). Sorokin meneliti dan mencatat perubahan seperti itu di enam bidang: (1) transformasi reaksi terhadap ucapan, (2) penyelewengan reaksi terhadap pemilikan, (3) penyelewengan reaksi seksual, (4) penyelewengan reaksi terhadap tugas, (5) penyelewengan reaksi terhadap kekuasaan dan bawahan, (6) reaksi terhadap agama, moral, estetika dan berbagai bentuk perilaku yang dipelajari lainnya (*Ibid.*, h. 41-169). Berbagai bentuk penyelewengan ini menghancurkan kepekaan naluriiah. Orang bertindak tanpa menghiraukan kepatuhan, disiplin, aturan, dan berbagai kriteria perilaku beradab lainnya. Manusia berubah menjadi gerombolan buas manusia gila (*Ibid.*, h. 367).

*Kedua*, teori revolusi psikologi. Aliran psikologi mengabaikan bidang tindakan reflek atau nalurian dasar dan beralih ke bidang orientasi sikap dan motivasi. Teori ini paling erat kaitannya dengan pemikiran akal sehat (*common sense*). Karena itu tak heran, teori itu paling populer dan paling rinci dari semua pendekatan yang ada. Teori paling berpengaruh diajukan oleh James Davis (1962) dan Ted Gurr (1970) dengan teori kerugian relatif. Revolusi disebabkan sindrom mental yang menyakitkan yang tersebar di kalangan rakyat, diperburuk karena menjangkiti banyak orang sehingga memotivasi perjuangan kolektif untuk meredakannya.

*Ketiga*, teori revolusi struktural. Teori struktural memusatkan perhatian pada tingkat struktur makro dengan mengabaikan faktor psikologi. Menurut teori ini revolusi adalah hambatan dan ketegangan struktural dan terutama bentuk hubungan khusus tertentu antara rakyat dan pemerintah. Penyebab revolusi lebih dicari ditingkat hubungan sosial khusus, yakni dalam kondisi hubungan antar kelas dan antar kelompok (nasional dan internasional) ketimbang di kepala rakyat, dalam arti mentalitas atau sikap mereka. Tokoh terkenal teori ini, Theda Skocpol, menyebutnya “perspektif struktural” dengan maksud untuk lebih menekankan pada hubungan dan konflik obyektif yang terjadi antar kelompok dan antar bangsa dalam revolusi tertentu (1979: 291). Dengan mengutip Eric Hobsbawm, ia menyatakan: *Pentingnya bukti peran aktor dalam revolusi tak berarti bahwa mereka juga adalah pelaku, pencipta dan perencananya.* (*Ibid.*, h. 18).

Dengan membandingkan bukti historis revolusi Perancis, Rusia dan Cina, Skocpol menghasilkan analisis struktural umum tentang penyebab, proses dan hasil ketiga revolusi itu. Revolusi itu ternyata mengikuti pola tiga tahap: (1) terjadi kehancuran struktural dan krisis politik dan ekonomi dalam rezim lama. Mereka terjepit dalam tekanan bersilang antara struktur kelas domestik dan kepentingan hubungan internasional, penguasa otokrasi, administrasi sentral dan kekuatan militernya tercerai-berai. Keadaan ini membuka jalan bagi transformasi revolusioner yang dimulai dengan pemberontakan di bawah (*Ibid.*, h. 47), (2) krisis rezim membuka peluang pemberontakan petani dan atau buruh perkotaan. Kehancuran rezim lama adalah perlu (*necessary*), tetapi tak cukup (*sufficient*) untuk menyulut revolusi. Pemberontakan petani telah menjadi unsur huru-hara penting dalam revolusi sosial hingga kini (*Ibid.*, h. 112-13), tetapi revolusi hanya dapat terjadi dalam kondisi kehancuran politik sebelumnya. Melemahnya kemampuan menindas dari pemerintah yang sebelumnya bersatu dan terpusatlah yang akhirnya menciptakan kondisi yang secara langsung menyebabkan, atau yang pada akhirnya menguntungkan bagi, meluasnya pemberontakan petani menentang tuan tanah (*Ibid.*, h. 117), (3) tema revolusi utama selama tahap ketiga ini adalah

<sup>84</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Judul Asli: *The Sociology of Social Change*, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 366-373.

bidang politik yakni, konsolidasi ulang, penataan ulang, dan penyatuan ulang pemerintah dan administrasinya oleh elit politik baru yang mulai berkuasa setelah berhasil menyingkirkan rezim lama. Revolusi hanya dapat diwujudkan dengan sempurna segera setelah organisasi negara yang baru (administrasi dan militer) dikoordinasikan oleh eksekutif yang memerintah atas nama simbol revolusi yang dibentuk ditengah-tengah konflik situasi revolusioner (*Ibid.*, h. 163). Keunikan teori Skockpol adalah penekanannya pada faktor politik dan hubungan internasional. Baik itu terciptanya situasi revolusioner maupun wujud rezim baru yang muncul dari konflik revolusioner itu, keduanya pada dasarnya terikat pada struktur organisasi negara, derajat otonominya dan hubungan dinamis dengan kelas-kelas dan kekuatan politik dalam negeri serta posisinya dalam hubungan dengan negara lain (*Ibid.*, h. 284). Ia memprediksi: *Dalam revolusi dimasa mendatang, seperti di masa lalu, bidang kehidupan negara tetapi akan menjadi pusat perhatian* (*Ibid.*, h. 293).

Teor struktural pun dituduh berat sebelah dan mengabaikan psikologi individual. Teori jelas memusatkan perhatian pada kondisi dan dampak struktural, mengabaikan keseluruhan proses kompleks yang terjadi diantara keduanya. Ketika massa rakyat diorganisir dan dimobilisasi oleh pemimpin yang melakukan revolusi. Skockpol lupa bahwa manusia yang berfikir dan bertindak itu (meski dengan sembrono) merupakan mata rantai yang menghubungkan antara kondisi struktural dan hasil sosialnya. Kondisi struktural tak bisa menentukan secara mutlak tentang apa yang akan dilakukan manusia. Kondisi struktural semata meletakkan batas tertentu terhadap tindakan manusia atau menetapkan sederetan peluang (Kommel, et. al., 1981: 1153). Pesan kritik yang diperoleh dari analisis struktural, sama dengan yang dikemukakan sebelumnya: memerlukan pendekatan sistesis atau multidimensional. Skockpol lebih melihat analisis struktural dan voluntaris sebagai *saling bertentangan ketimbang sebagai dua unsur penting dari penjelasan sosiologis yang lengkap* (*Ibid.*, h. 1154).

*Keempat*, teori revolusi pendekatan politik. Pendekatan ini melihat revolusi sebagai sifat fenomena politik yang muncul dari proses yang khusus terjadi dibidang politik. Revolusi dilihat sebagai akibat pergeseran keseimbangan kekuatan dan perjuangan memperebutkan hegemoni antara pesaing untuk mengendalikan negara (Aya, 1979: 49). Contoh yang baik dari pemikiran serupa itu dikemukakan oleh Tilly (1978). Ia yakin revolusi bukanlah fenomena luar biasa, kekecualian atau penyimpangan tetapi justru kelanjutan proses politik dengan cara lain. Artinya, berbagai proses politik normal dimana berbagai kelompok berupaya mewujudkan tujuannya dengan merebut kekuasaan. Revolusi adalah bentuk ekstrim pertikaian untuk mengontrol politik. Revolusi hanya akan terjadi bila pesaing mampu memobilisasi sumber daya secara besar-besaran yang diperlukan untuk merebut kekuasaan dari rezim lama (Goldstone, 1982: 193). Kondisi lebih luas untuk menempatkan revolusi secara konseptual, disebut “model negara”. Ini adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan, diantaranya: “pemerintah” yakni organisasi yang mengontrol cara utama penggunaan paksaan terhadap rakyat. “Pesaing” yakni kelompok yang selama periode tertentu menghimpun sumber daya untuk memengaruhi pemerintah. Pesaing ini mencakup penantang dan anggota (aparatur) negara. Anggota adalah pesaing yang memiliki akses murah untuk mendapatkan sumber daya yang dikendalikan pemerintah. Penantang adalah pesaing lainnya (Tilly, 1978: 52). Memobilisasi kekuatan revolusioner terjadi dikalangan penantang yang tak mempunyai cara lembaga dan yang sah untuk mewujudkan kepentingan mereka. Mobilisasi berarti peningkatan sumber daya yang berada dibawah kontrol kolektif penantang atau peningkatan derajat kontrol kolektif (*Ibid.*, h. 5). Mobilisasi adalah syarat tindakan kolektif untuk mencapai tujuan akhir bersama. Revolusi adalah bentuk tindakan kolektif khusus yang dibedakan oleh kondisi khusus (situasi revolusioner). Ciri terpenting situasi revolusioner adalah “kedaulatan ganda” atau dengan kata lain pelipatgandaan pemerintah yang sebelumnya dibawah kontrol tunggal kemudian menjadi sasaran persaingan antara dua atau lebih kekuatan yang berbeda. Situasi ini akan berakhir bila kontrol atas pemerintahan diraih kembali oleh kekuasaan tunggal (*Ibid.*, h. 191). Rakyat dihadapkan sekurangnya pada dua pusat kekuasaan dengan kepentingan yang bertentangan: pemerintah terdahulu dan yang menentang. Dalam hal ini ada empat jenis situasi politik: (1) sebagai taklukan, jika suatu negara berdaulat menaklukkan negara berdaulat yang lain, (2) ketika sebuah negara taklukan menyatakan kemerdekaannya (misalnya, sebuah koloni yang tunduk kepada kekuasaan

asing). Pola dasar situasi ini adalah pemberontakan anti kolonial atau pemberontakan nasional, (3) ketika penantang memobilisasi dan mendapatkan kontrol atas sebagian aparatur negara, (4) ketika negara terpecah menjadi dua blok atau lebih, masing-masing blok mendapat sebagian kontrol atas pemerintahan (*Ibid.*, h. 191-2). Revolusi meledak jika sebagian besar rakyat mengalihkan kesetiaan mereka ke pusat kekuasaan tandingan. Revolusi menang bila pengalihan kekuasaan benar-benar terjadi dan perangkat pemegang kekuasaan digantikan oleh yang lain. Revolusi besar bersifat ekstrim dalam dua hal: *kekuasaan terbelah dua dan terjadi pergantian besar-besaran aparatur negara.* []



## Hand-Out 07

# REINVENTING SISTEM KAPITALISME GLOBAL: CRITICAL ANALYSIS GEO-EKONOMI, GEO-POLITIK DAN GEO-STRATEGI

Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### A. TIGA FASE IMPERIALISME

Untuk mengawali proses analisis dalam sistem kapitalisme global perspektif ekonomi-politik, maka menurut hemat penulis perlu diuraikan mulai dari akar masalahnya. Berikut ini penulis uraikan sejarah imperialisme yang dipaparkan oleh Noam Chomsky,<sup>85</sup> dan selanjutnya penulis kaitkan dengan logika terjadinya proses sistemik dalam perspektif ekonomi-politik yang kemudian terjadi masalah sosial dalam era neo-liberalisme. Menurut Noam Chomsky, bahwa sepanjang beberapa dekade imperialisme telah menjadi bahan perdebatan serius diantara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm dan Vladimir Lenin adalah diantara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang meneorisasikan imperialisme. Seorang penggerak revolusi Rusia, Vladimir Ilyich mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. Imperialisme lahir dari suatu krisis kapitalisme dari suatu negeri. Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah. Dalam pandangan Lenin, imperialisme dicirikan oleh lima hal, *pertama*, konsentrasi kapital, baik dalam bentuk konglomerasi maupun monopoli; *kedua*, meleburnya kekuasaan kapital finans, industri dan birokrasi; *ketiga*, ekspor kapital dalam bentuk investasi-investasi industrial, *keempat*, pembagian ekonomi dunia oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan korporasi transnasional melalui kartel internasional; *kelima*, pembagian politik dunia oleh negara-negara maju. Meskipun teori Lenin banyak dikritik, tetapi ia telah meletakkan bangunan teori imperialisme yang penting dalam perdebatan selanjutnya, utamanya pengaitannya dengan kapitalisme dan perkembangan kapital finans.

Pendekatan Lenin atas imperialisme ini salah satunya dikritik oleh Samir Amin, seorang Marxis berkebangsaan Mesir. Bagi Samir Amin, imperialisme bukan merupakan *tahap*, melainkan *inheren* dalam setiap ekspansi kapitalisme. Sepanjang sejarahnya imperialisme telah memasuki dua fase dan sedang memasuki fase yang ketiga.

Fase pertama terjadi pada masa ekspansi kapital Eropa Atlantis yang menghancurkan benua Amerika. Dua aktor utamanya adalah Spanyol dan Inggris. Hasil yang terjadi akibat dari penaklukan kolonialis ini adalah hancurnya peradaban Indian, terjadinya Hispano-Kristenisasi, dan genosida total atas masyarakat Indian, dimana negara Amerika Serikat berdiri diatasnya. Penaklukan ini masih dibumbui oleh kehendak untuk memperadabkan 'dunia lain' dengan dalih agama. Imperialisasi tahap pertama ini pada akhirnya melahirkan sejumlah perlawanan seperti pemberontakan kaum budak di Haiti, serta revolusi Meksiko dan Kuba.

Fase kedua terjadi pada masa revolusi industri Inggris yang berujung pada penaklukan Asia dan Afrika. Penundukan kolonial ini berupaya untuk berupaya untuk mencari dan membuka 'pasar baru' bagi perdagangan Eropa. Cecil Jhon Rhodes adalah salah satu figur pendukung gagasan kolonialisme ini, dengan menyatakan bahwa kolonialisme Inggris di Afrika akan menyebabkan ekonomi Inggris bangkit kembali dan menghindarkan revolusi sosial di dalam negeri. Imperialisme fase kedua ini berakibat pada membesarnya jurang ketidakadilan sosio-ekonomi yang terus dihadapi oleh dunia hingga kini. Jika pada tahun 1800-an rasio ketidaksetaraan adalah dua berbanding satu, maka sejak terjadinya kolonialisme hingga saat ini

---

<sup>85</sup> Noam Chomsky, *Neo Imperialisme Amerika Serikat* (Yogyakarta: Resist Book, 2008) h. vii-x.

rasio ketidaksetaraan ini menjadi enam puluh berbanding satu, dengan sekitar 20% dari penduduk dunia yang bisa mengambil keuntungan dari sistem yang terjadi saat ini. Sementara 80% lainnya hidup dalam ketidakpastian dan ketidaksamaan sosio-ekonomi secara persisten. Imperialisme fase kedua ini menghasilkan perang-perang dunia besar antar kekuatan imperialis untuk mempertahankan koloninya. Namun juga menghasilkan berbagai perlawanan yang terus menentang proyek-proyek imperialis, seperti lahirnya revolusi sosialis di Rusia dan China, dan tumbuhnya berbagai revolusi pembebasan nasional di negara-negara Asia dan Afrika.

Kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut tidak lantas menghancurkan sistem imperialis itu sendiri. Kekuatan-kekuatan imperialis, yang diantaranya merupakan kekuatan kolonialis lama seperti Belanda, Inggris dan Perancis serta negara kapitalis baru yang muncul pada Abad ke-19 seperti Jerman, Amerika Serikat dan Jepang, tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan 'situasi baru' ini. Kaum imperealisme ini segera mengubah pandangan tradisionalnya bahwa pertumbuhan kapitalis mereka sangat tergantung dari berapa besar wilayah koloni yang mereka ekspansi. Dengan keunggulan yang dimiliki sebagai negara yang maju, kaya raya dan memiliki sumber daya manusia serta teknologi yang tinggi, mereka segera mengubah modus dominasinya menjadi imperialisme baru, imperialisme tanpa koloni.

Saat ini sedang memasuki fase imperialisme ketiga yang ditandai oleh runtuhnya sistem Soviet dan rezim-rezim nasionalis-populis di Dunia Ketiga. Pada dasarnya, tujuan dari imperealisme fase ini masih sama dengan fase-fase sebelumnya, yaitu untuk mengukuhkan dominasi kapital, memperluas dan mengekskspansi pasar baru, menjarah sumber daya agraria, dan melakukan supereksploitasi pada tenaga kerja di negara-negara pinggiran. Berbagai wacana ideologis disiapkan untuk mengukuhkan hegemoni imperialisme tahap ketiga ini, diantaranya dengan menggembarkan demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, pemerintahan yang bersih dan baik. Tetapi wacana-wacana ini dikerjakan oleh model standar ganda dan hanya dilakukan demi memperlulus akumulasi kapital oleh negara-negara maju pada negara-negara pinggiran.

Fase ketiga ini juga berhadapan dengan suatu zaman yang dicirikan oleh terjadinya persenyawaan yang halus antara menguatnya kekuasaan ekonomi korporasi dengan globalisasi teknologi informasi dan pengetahuan. Berbagai fenomena globalisasi seperti: meningkatnya kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional dan perdagangan global, revolusi informasi dan ilmu pengetahuan, serta munculnya masyarakat yang berbasis jaringan (*network society*), menguatnya peranan-peranan lembaga keuangan internasional, serta zona-zona perdagangan bebas yang melampaui negara-bangsa, membuat para teoretisi tidak bersepaham satu sama lain dalam memandang tatanan global pada zaman ini. Sebagian mendefinisikan tatanan global ini dengan cara pandang baru, sembari mendeklarasikan suatu zaman 'pos-imperealisme'. Sementara yang lain berpendapat bahwa imperialisme tak pernah berakhir, hanya memakai modus baru dengan motif lama yang tetap sama. Seperti anggur lama yang dituangkan dalam botol baru.

Dalam perspektif ekonomi-politik imperialisme ini berkaitan erat dengan sejarah perkembangan kapitalisme dan proses panjang transformasi masyarakat dari masyarakat feodal ke masyarakat modern, atau sering disebut pada masa kini dengan era globalisasi. Globalisasi inilah yang kemudian berdampak pada krisis masyarakat kapitalisme.

## **B. INTERNATIONAL TRADE TO IMPERIALISM: GLOBAL EXPANSION OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY**

Salah satu pemicu berkembangnya ekonomi politik internasional<sup>86</sup> adalah revolusi industri. Terjadinya revolusi industri menyebabkan berbagai perubahan dalam sektor industri,

---

<sup>86</sup> Ekonomi Politik Internasional adalah salah satu kajian dalam studi Hubungan Internasional yang berkembang pesat pasca berakhirnya perang dunia pertama. Jika kita menilik ke belakang, ekonomi politik itu sendiri sebagai akar dari ekonomi politik internasional, telah muncul sejak adanya revolusi industri. Abad pencerahan menandai beralihnya pola pikir manusia, yang sebelumnya bersifat mistis dan dikekang oleh doktrin gereja, menjadi lebih berpikir secara rasional dan menggunakan logika. Perkembangan yang signifikan dalam sistem ekonomi dari yang sebelumnya

seperti misalnya negara yang awalnya mengembangkan agrikultur berubah menjadi perindustrian. Selain itu tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin demi memaksimalkan produksi. Akibat lain dari revolusi industri adalah terbentuknya kelas-kelas sebagai akibat dari penyebaran paham kapitalis dalam pembangunan dunia. Kelas-kelas yang terbentuk disini adalah berdasarkan pembagian kerja internasional yaitu negara yang memproduksi dan negara pemasok bahan baku.

Pada tahun 1873 hingga pertengahan 1890an terjadi depresi akut pada siklus perdagangan internasional di mana yang terjadi adalah depresi harga, depresi kebutuhan, dan depresi keuntungan. Pertanian adalah korban utama dari penurunan *profit* yang terjadi. *Great Deperession* ini bukanlah masa yang baik bagi seluruh petani yang ada di pasar dunia. Beberapa negara seperti Denmark, dengan bebas memodernisasi sektor pertanian mereka, menggantinya dengan produk ternak yang lebih menguntungkan. Sedang pemerintahan yang lain, seperti Jerman, namun terutama Perancis dan Amerika, lebih memilih *tariffs* guna menjaga stabilitas harga. Sementara bisnis juga menghadapi permasalahannya sendiri. Ini adalah era pendoktrinasi kepercayaan bahwa suatu kenaikan harga (inflasi) merupakan suatu bencana ekonomi, di mana pada abad ke-19 hal ini merupakan suatu yang sulit diterima oleh anggapan umum para pelaku bisnis saat itu yang lebih mencemaskan akan terjadinya suatu kejatuhan harga (deflasi). *Great Depression* ini seolah telah mengakhiri era ekonomi liberal yang panjang, setidaknya pada komoditas dagangnya.<sup>87</sup> Persaingan ekonomi terjadi di antara negara-negara sebagai akibat adanya industrialisasi dan depresi ekonomi internasional tersebut. Pendapatan atau profit ekonomi suatu negara dipandang sebagai ancaman bagi negara lain. Hal ini direspon oleh banyak negara dengan menerapkan proteksionisme.

Hal ini serupa dengan tahun 1880, migrasi banyak terjadi. Banyaknya perpindahan yang terjadi memunculkan bentuk pemberontakan dan revolusi. Permasalahan di bidang industri, dirasakan pula pada bidang bisnis, dimana terjadi laju inflasi yang cukup tinggi pada abad ke 19, para pembisnis sangat takut akan turunnya harga pasar. Jauh sebelum itu, pada tahun 1873-1896 terjadi hal yang berkebalikan, yaitu adanya deflasi, dimana Inggris mengalami penurunan mata uang sampai 40 %. Deflasi mengakibatkan jatuhnya angka keuntungan, produksi barang begitu dicari namun pasar perkembangannya tidak sejalan dengan tuntutan tersebut. Hal itu disebabkan kurang berkembangnya teknologi dan alat-alat industri. Perbandingan harga alat dengan harga hasil produksi, cukup jauh. Alat industri dijual mahal sedangkan hasil industri murah.<sup>88</sup>

Ekonomi politik modern internasional ditandai oleh globalisasi produksi dan keuangan (dominasi modal). Dalam tiga dasawarsa terakhir, masyarakat dunia menyaksikan perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan ekonomi politik global. Dunia menjadi demikian kompleks ketika fenomena interdependensi antar bangsa kian meningkat. Kemajuan inovasi teknologi, arus informasi, serta komunikasi yang dibarengi dengan semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan global menandai proses yang disebut sebagai globalisasi ekonomi. Proses tersebut juga dicirikan dengan kian massifnya peran aktor non negara dalam politik internasional. Tidak hanya institusi- institusi global seperti WTO, IMF, Bank Dunia, atau perusahaan-perusahaan multinasional, namun juga disertai dengan kemunculan gerakan masyarakat sipil yang lintas batas negara misalnya terjadinya pergolakan politik di berbagai negara yang mendorong orang bermigrasi.<sup>89</sup>

Berdasarkan tulisan Hobsbawm "*Economy Changes Gear*" terdapat beberapa karakteristik ekonomi internasional pada *age of empire*. Karakteristik-karakteristik tersebut

---

menekankan kolektivitas dan tradisional menjadi produksi massal yang modern dan efisien mengubah pola interaksi dalam masyarakat.

<sup>87</sup> Eric Hobsbawm, 1987. "An Economics Changes Gear" dalam *The Age of Empire 1875-1914*, London: Weidenfeld & Nicholson, hlm. 35. dalam [http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori\\_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html](http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html).

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

antara lain adalah ekonomi yang berbasis geografis, ekonomi dunia yang lebih plural daripada sebelumnya, revolusi teknologi, transformasi struktur kapitalis, transformasi pasar baik secara kualitas maupun kuantitas, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya keterkaitan antara ekonomi dan politik.<sup>90</sup> Sebagai dampak perluasan ekonomi secara geografis, sektor agrikultur berganti ke industri. Tak hanya Eropa yang mengembangkannya, tapi juga Amerika dan Jepang dan Rusia. Ekonomi dunia yg lebih prular bisa dilihat dari hubungan antara negara berkembang dan tidak berkembang semakin kompleks dan bervariasi. Didorong oleh revolusi teknologi, negara-negara telah banyak melakukan aktivitas ekonomi yang terbuka satu sama lain.

Ekonomi Politik Internasional sebagai suatu social practice muncul ketika tahun 1873-1890an terjadi suatu fenomena yang dikenal sebagai *great depression* dalam siklus perdagangan internasional. Sebelumnya telah terjadi revolusi industri yang memicu terjadinya *great depression* tersebut di mana adanya revolusi tersebut meningkatkan rivalitas negara-negara dalam perekonomian serta menyebabkan terjadinya transformasi dalam pola-pola ekonomi yang terjadi. Semakin kompleksnya perekonomian internasional tersebut memicu tumbuhnya titik temu antara politik dan ekonomi, di mana terdapat skeptisme mengenai efektivitas otonomi dan perbaikan diri sendiri dari ekonomi pasar seperti yang populer ditawarkan oleh Adam Smith sehingga menyebabkan perlunya campur tangan dari pemerintah dan otoritas publik untuk mengaturnya.

### C. TATANAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Dinamika ekonomi politik internasional sejak tahun 1938 hingga saat ini menunjukkan bahwa ekonomi politik internasional merupakan interaksi dari berbagai aspek, dan bukan suatu sistem yang berjalan dengan sendirinya. Mekanisme pasar, kepemimpinan, pemerintah, maupun hegemoni bertujuan untuk menjaga stabilitas dunia. Apalagi dengan semakin berkembangnya globalisasi, menuntut semua aspek dalam tatanan ekonomi politik internasional untuk meningkatkan kualitas interaksinya. Menurut Gilpin, setidaknya ada tiga teori yang menerangkan tatanan ekonomi politik internasional. Ketiga teori tersebut adalah teori dualisme ekonomi, teori *modern world system*, dan teori *hegemonic stability*.<sup>91</sup> Dengan melihat ketiga teori tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai struktur yang sedang terjadi, siapa aktor-aktor dalam EPI dan peraturan yang mengatur berjalannya tatanan ekonomi politik internasional tersebut.

Teori dualisme ekonomi berasumsi bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan perubahan sektor-sektor yang pada awalnya bersifat tradisional menjadi modern.<sup>92</sup> Sektor tradisional disini maksudnya adalah belum banyaknya modernisasi dan efisiensi serta *self-sufficiency*, sedangkan sektor modern berarti banyak modernisasi dan efisiensi. Secara tradisional, kegiatan produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik saja, tapi dalam perkembangannya kini proses produksi dibuat lebih efisien bahkan mengintegrasikan keseluruhan aktivitas perekonomian negara-negara. Dengan demikian, institusi-institusi dan pasar terintegrasi secara global meningkatkan persaingan yang memicu para produsen untuk terus berkembang dan berinovasi. Teori ini bersifat liberalis karena menganggap manusia akan selalu berusaha menjadi baik.

Teori yang kedua adalah teori *modern world system*. Teori sistem dunia modern didefinisikan sebagai sebuah unit dengan divisi buruh tunggal dan sistem budaya yang jamak.<sup>93</sup> Teori ini menganut ideologi marxisme karena masih mempercayai adanya *class struggle* yakni adanya dominasi suatu kelas terhadap kelas yang lain. Wallerstein yang menganut marxisme

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 51-55.

<sup>91</sup> Robert Gilpin, 1987. "The Dynamics of Internastional Political Economy" dalam *The Political Economy of Internastional Relations*, Princeton: Princeton University Press, hlm. 64. dalam [http://reinhardt-k-fisip09.web.unair.ac.id/kategori\\_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html](http://reinhardt-k-fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html).

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

membagi dunia menjadi tiga kelas yaitu *core*, *periphery*, dan *semi-periphery*.<sup>94</sup> Dalam sistem dunia modern, *core* atau negara-negara kuat akan selalu mengeksplorasi *periphery* atau negara lemah dan *semi-periphery* demi mendapat keuntungan. Kapitalisme, sebagai salah satu kejadian yang telah mengglobal, turut memunculkan hirarki-hirarki dalam ekonomi domestik serta EPI. Dalam kehidupan nyata, bisa kita lihat bahwa negara-negara barat yang maju seperti Amerika, Inggris, dan Jerman cenderung selal mengeksploitasi negara-negara berkembang di Asia dan Afrika.

Teori yang terakhir adalah teori *hegemonic stability*. Teori ini pertama kali diuraikan oleh Charles Kindleberger (1973). Teori ini menjelaskan tentang tatanan dunia ekonomi yang liberal dan terbuka, yang di dalamnya terdapat keterlibatan kekuatan negara-negara hegemoni. Menyadari sulitnya kerjasama tanpa ada komando yang jelas dari satu negara untuk mengarahkan negara-negara yang tergabung dalam aktivitas ekonomi internasional, maka eksistensi kekuasaan dominan diperlukan (Keohane, 1980). Hegemoni tidak hanya akan menjadi pemimpin perekonomian internasional tetapi juga bertindak sebagai stabilisator yang mengawasi kelancaran perekonomian dunia, membatasi konflik antar negara, mendorong kerjasama dalam keseimbangan dan mencegah terjadinya kecurangan. Contohnya adalah Amerika Serikat yang berhasil memulihkan perekonomian internasional setelah perang dunia kedua.<sup>95</sup> Tanpa adanya Amerika Serikat yang muncul sebagai hegemon, kemungkinan perekonomian dunia akan terus mengalami kekacauan.

Tatanan ekonomi politik internasional yang ada saat ini berevolusi dari ketiga teori tersebut. Sesuai dengan teori dualisme ekonomi yang bersifat liberal, perekonomian dunia memang berubah dari yang tradisional menjadi modern dan penuh persaingan. Hal ini tidak lepas dari kompetisi yang dihadirkan oleh liberalisme itu sendiri sehingga manusia selalu berusaha menjadi lebih baik. Namun kebebasan serta persaingan dalam liberal tersebut juga memunculkan kelas-kelas serta eksploitasi dari *core* terhadap *periphery* dan *semi-periphery* sesuai dengan pandangan teori sistem dunia modern. Untuk menstabilkan perekonomian dunia diperlukan adanya hegemon seperti yang diungkapkan oleh teori stabilitas hegemoni.

Jika melihat sistem perekonomian internasional pada kenyataannya negara hegemoni saja tidak akan mampu menjaga kestabilan ekonomi internasional. Sesuai dengan tulisan Lairson (1993), bahwa kehegemonian Amerika Serikat pun mengalami dinamika yang cukup bervariasi. Dimulai dengan AS yang menjadi penyelamat perekonomian dunia, menjadi penguasa ekonomi internasional, menurunnya ekonomi AS, defisit keuangan, ketidakstabilan dollar, hingga mencapai keseimbangan kembali. Dari dinamika tersebut, terlihat bahwa pasar, organisasi internasional, dan *Multi National Corporation* (MNC) juga terlibat dalam ekonomi politik internasional. Namun peran hegemon tetap diperlukan disini sebagai stabilisator.

Tatanan ekonomi politik internasional terbentuk dari tiga teori yang diungkapkan oleh Gilpin sebagaimana diungkapkan di atas yaitu teori liberalis dualisme ekonomi, teori sistem dunia modern, dan teori stabilitas hegemoni. Ketiganya membentuk tatanan ekonomi politik internasional seperti yang ada saat ini dengan aktor-aktor yang tidak hanya negara saja tetapi juga organisasi internasional, institusi internasional, MNC, dan lain sebagainya, namun tetap ada hegemoni yang menjadi pengatur tatanan sistem ekonomi politik internasional tersebut. Teori dualisme ekonomi tak lagi relevan di tengah modernisasi yang memang telah terjadi. Teori ini masih bisa digunakan apabila dalam konteks pertengahan abad ke-20 yang memang masih terdapat banyak transformasi struktur ekonomi, sosial, serta politik. Tapi kini hampir semua negara sudah memiliki identitas serta karakteristik masing-masing mengenai dasar praktek ekonommi, sosial, serta politik mereka, termasuk pada negara-negara yang baru merdeka di dekade 90an. Secara struktur, EPI masih didominasi oleh aktor-aktor dominan (hegemon), seperti Amerika atau korporasi raksasa negara *core*.

<sup>94</sup> I Wallerstein, 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press

<sup>95</sup> Thomas D. Lairson, And D. Skidmore, 1993. "The Political Economy of American Hegemony: 1938-1973, dalam *International Political Economy: the Struggle for Power and Wealth*, Orlando: Harcourt Brace College Publishers, hlm. 66.

#### D. VARIAN PENDEKATAN UTAMA DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Karena sedemikian kompleksnya studi Ekonomi Politik Internasional seperti yang telah dijelaskan oleh Robert Gilpin, maka kemudian terdapat beberapa ideologi yang dapat membantu dalam memahami lebih lanjut berkenaan dengan studi Ekonomi Politik Internasional dan dirasa merupakan ideologi besar dalam perkembangan studi ini, yakni liberalisme, marxisme serta nasionalisme. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan menjelaskan ketiga macam ideologi tersebut serta kontribusinya yang begitu besar dalam perekonomian dunia.

Yang pertama, dalam pandangan liberalisme, terdapat serangkaian nilai yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai teori liberal tentang ekonomi dan politik serta membuat kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan. Dalam teori ekonomi liberal, hal yang menjadi fokus utama ialah bagaimana menciptakan pasar bebas serta meminimalisir intervensi pemerintah terhadap pasar atau yang biasa disebut sebagai *laissez-faire*. Sedang dalam teori politik liberal, yang menjadi kajian utamanya ialah berkenaan dengan kesetaraan individu serta kebebasan. Kemudian, hubungan ekonomi dan politik dalam liberalisme salah satunya dapat kita temui pada masa Adam Smith yakni ketika ide pasar bebas dengan non-intervensionisme yang dikembangkannya atas asumsi filosofi dasar manusia sebagai makhluk bebas yang ternyata memang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian internasional.<sup>96</sup>

Tak jarang kaum liberalis menganggap antara politik dan ekonomi ibarat *guns and butter*, banyak yang percaya bahwa politik cenderung untuk memisahkan dan ekonomi cenderung untuk menyatukan. Akan tetapi, bagaimanapun juga untuk membuat ide tersebut menjadi sebuah kebijakan tentu tidak hanya berdasar pada asumsi yang berasal dari ekonom saja, namun juga berasal dari dukungan politik yang diberikan. *Laissez-faire* tidak dapat diterapkan jika bertujuan untuk benar-benar menghapus intervensi negara, karena bagaimanapun juga, seseorang tentu tinggal di suatu wilayah dan sistem tertentu yang disebut negara dalam menjalankan seluruh kegiatannya. Selain itu, para liberalis juga memiliki kekhawatiran akan terjadinya *market failure*, yakni tidak beroperasinya pasar sebagai harapan akan efisiensi dan keuntungan bersama.<sup>97</sup>

Berbagai regulasi politik tentu sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memperbaiki ataupun menanggulangi terjadinya *market failure*. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa pasar merupakan keuntungan besar bagi manusia, namun juga memiliki resiko buruk akan ketidakpastian keuntungan. Situasi tersebut tentu hanya dapat diperbaiki melalui pengembangan manajemen politik tentang pasar. Keynes juga mengusulkan agar pasar 'diatur dengan bijak' (*wisely managed*) oleh Negara.<sup>98</sup> Karenanya, *laissez-faire* masih membutuhkan negara sebagai penyusun dasar-dasar yang dianggap sangat penting bagi pasar untuk dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dari itulah, dapat ditunjukkan bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi. Jika dilihat lebih luas dalam kajian hubungan internasional, kaum liberalis percaya bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan dapat menjadi salah satu sumber hubungan yang damai antar negara dikarenakan sifat perdagangannya yang saling menguntungkan (*positive sum game*) akan sangat membantu hubungan antar negara yang kooperatif.<sup>99</sup>

Sedangkan ideologi ekonomi nasionalisme atau terkadang disebut juga sebagai ekonomi merkantilisme memiliki ide dasar bahwasanya segala bentuk aktivitas ekonomi hendaknya merupakan salah satu subordinat dalam tujuan pembangunan negara serta menjadi kepentingan negara dalam menjalankan fungsi sistem internasional.<sup>100</sup> Tentu saja dalam hal ini

<sup>96</sup> Robert Gilpin, (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press. hlm. 27. dalam [http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori\\_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html](http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html).

<sup>97</sup> Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *International Political Economy*, dalam *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 182.

<sup>98</sup> Keynes dalam Jackson, Robert & Georg Sorensen. (1999). *International Political Economy*, dalam *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 183.

<sup>99</sup> Robert Gilpin, (1987). *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

kemudian jelas terlihat bahwasanya kegiatan ekonomi sekaligus dijadikan sebagai alat politik suatu negara demi mendapatkan *power*. Berbeda dengan ekonomi liberalisme yang cenderung berusaha memainkan *positive sum game* dengan saling menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi internasional, maka merkantilisme bergerak dengan memainkan *zero sum game* dan perekonomian internasional dipandang sebagai sebuah arena konflik yang terjadi antara berbagai kepentingan nasional yang saling berlawanan.<sup>101</sup>

Ekonomi merkantilisme sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni merkantilisme *benign* serta merkantilisme *malevolent*. Merkantilisme *benign* dapat disebut pula sebagai merkantilisme yang bersifat defensif, artinya suatu negara memandang bahwa kekuatan ekonomi digunakan sebagai alat perlindungan (*safeguarding*) sekaligus menjadi alat untuk mempertahankan diri dari saingan negara lain yang dianggap memiliki *power* yang besar.<sup>102</sup> Sebaliknya, merkantilisme *malevolent* lebih bersifat ofensif, artinya merkantilisme jenis ini memandang bahwasanya kekuatan ekonomi dan kekuatan politik serta militer bersifat saling melengkapi dengan tujuan untuk menyerang kekuatan ekonomi negara lain, karena itulah merkantilisme jenis ini sering menggunakan kebijakan-kebijakan ekspansi untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>103</sup> Sebagai contoh nyata ialah kebijakan ekspansi kekuatan kolonial negara-negara Eropa ke Asia atau kebijakan ekonomi Jerman pada masa pemerintahan NAZI yang dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Hjalmar Schacht kepada negara-negara kawasan Eropa Timur pada sekitar tahun 1930an.

Selain ideologi ekonomi merkantilisme, ideologi ekonomi yang diusung marxisme juga muncul sebagai kritik terhadap ideologi liberalisme. Karl Marx menolak pandangan liberalisme tentang keuntungan bagi semua pihak (*benefits for all*) dan menganggapnya hanya sebagai alat untuk pengeksploitasian manusia serta ketidaksetaraan kelas. Dalam hal ini, Marx lebih menaruh perhatian kepada prinsip *zero sum game* seperti halnya yang diterapkan oleh ekonomi merkantilisme, hanya saja, ketika merkantilisme mengaplikasikan hal tersebut dalam hubungan antar negara, maka Marx mengaplikasikan prinsip tersebut dalam hubungan antar kelas, proletar dan borjuis,<sup>104</sup> karena Marx menempatkan ekonomi menjadi prioritas utama daripada politik, berbeda dengan merkantilisme yang menempatkan politik menjadi prioritas utama.

Dalam tulisannya, Robert Heilbroner juga menambahkan bahwa marxisme juga memiliki empat elemen dasar yang sangat penting, yang pertama yaitu pendekatan dialektis akan pengetahuan dan masyarakat yang menjelaskan sifat asli realitas yang dinamis dan konfliktual. Dalam hal ini, ketidaksetaraan sosial dan perubahan konsekuensi terjadi karena adanya perjuangan kelas serta berbagai kontradiksi yang melekat dalam berbagai fenomena sosial dan politik. Karenanya, Marx menganggap bahwa tidak ada harmoni sosial ataupun *equilibrium* sebagaimana yang dipercayai oleh kaum liberal.<sup>105</sup> Elemen dasar yang kedua ialah pendekatan materialis. Dalam elemen kedua ini, perkembangan kekuatan produksi dan aktivitas ekonomi menjadi faktor utama perubahan sejarah dan akan beroperasi melalui perjuangan kelas dalam rangka pendistribusian kesejahteraan sosial.<sup>106</sup>

Elemen dasar Marxisme yang ketiga ialah pandangan umum tentang perkembangan kapitalis. Dalam elemen ketiga ini mode produksi kapitalis dijalankan oleh serangkaian hukum gerak ekonomi dalam masyarakat modern. Dan elemen terakhir yang ditulis Robert Heilbroner ialah komitmen normatif akan sosialisme. Dalam elemen ini dijelaskan bahwasanya seluruh kaum marxis percaya bahwa masyarakat sosial merupakan cita-cita akhir yang sangat penting dan diharapkan dalam perkembangan sejarah.<sup>107</sup>

<sup>101</sup> Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *Op. Cit.*, hlm. 178.

<sup>102</sup> Robert Gilpin, (1987). *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>103</sup> Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *Op. Cit.*, hlm. 179.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>105</sup> Heilbroner dalam Gilpin, Robert. (1987). *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>107</sup> *Ibid.*

Meskipun marxisme muncul sebagai kritik terhadap liberalisme, namun kaum marxis menganggap bahwa kapitalisme yang diusung kaum liberal bukan merupakan sesuatu yang negatif dan membawa dampak buruk bagi perkembangan marxisme. Justru sebaliknya, kapitalisme merupakan proses yang sangat baik bagi kelas proletar untuk menggunakannya sebagai momentum revolusi. Kapitalisme dimanfaatkan melalui dua proses, yang pertama, kapitalisme akan menghancurkan sistem perekonomian yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu feodalisme, karena sistem feodalisme dianggap lebih bersifat eksploitatif terhadap kelas pekerja dengan menganggapnya sebagai budak yang tidak harus dibayar. Sedangkan kapitalisme memungkinkan para pekerja tersebut untuk bebas menjual kemampuan bekerjanya kepada pihak manapun dan mencari upah yang paling layak.<sup>108</sup>

Proses kedua, ketika kemudian proses produksi tidak dapat berjalan dengan sendirinya dan sangat membutuhkan tenaga pekerja untuk dapat menjalankannya, maka kelas pekerja akan memiliki kekuatan tawar yang lebih. Dari sinilah momentum revolusi terjadi, di bawah kontrol sosial, kelas pekerja akan mengambil alih tujuan awal produksi yang ditujukan bagi keuntungan individual menjadi tujuan produksi bagi keuntungan seluruh kelas pekerja yang merupakan kelas mayoritas dengan jumlah yang sangat banyak.<sup>109</sup>

Dalam memahami studi Ekonomi Politik Internasional, marxisme memiliki kerangka kerja bahwasanya negara tidak bergerak secara otomatis, namun negara digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa. Sebagai contohnya ialah negara-negara kapitalis yang digerakkan oleh kepentingan kaum borjuis. Hal tersebut kemudian berarti bahwa segala macam perjuangan antar negara haruslah dilihat dalam konteks ekonomi sebagai persaingan antar kelas kapitalis yang berbeda negara, karena marxis memiliki paham bahwa konflik kelas merupakan hal yang sangat fundamental daripada konflik antar Negara.<sup>110</sup>

## E. EKSPANSI KAPITALISME

Sebagaimana bidang studi lain yang memiliki sejarah yang melatarbelakanginya, maka pada kesempatan ini pula penulis akan menjelaskan tentang sejarah Ekonomi Politik Internasional terutama pada masa ekspansi kapitalisme. Kapitalisme awalnya mungkin banyak dilihat sebagai cara pengaturan ekonomi dengan melibatkan ekspansi secara berangsur-angsur ke luar wilayah dalam jaringan pertukaran barang. Namun, kapitalisme sebenarnya memiliki cakupan yang lebih dari itu, hal ini dikarenakan ekspansi kapitalisme tidak hanya dianggap sebagai taktik pasar, melainkan juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cakupan tidak hanya pada aktifitas ekonomi saja, namun juga di bidang sosial dan politik.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Ankie Hoogvelt dalam tulisannya yang berjudul *The History of Capitalist Expansion* bahwasanya dengan adanya revolusi industri, semakin mendorong minat negara-negara Eropa untuk melakukan penjelajahan di luar negaranya. Motif yang paling awal ialah dikarenakan oleh faktor perekonomian dalam negeri negara-negara Eropa yang mengharuskannya melakukan perdagangan di luar teritorial mereka (*mercantile phase*). Paul Baran menganggap fase yang terjadi sekitar tahun 1500 hingga 1800an ini tidak lebih dari sekedar bentuk penjarahan yang disamarkan, dengan alasan untuk mentransfer kembali surplus ekonomi kembali ke Eropa yang dapat membantu dalam pembiayaan revolusi industri serta pengembangannya.<sup>111</sup> Tentu saja, perdagangan yang dilakukan tidak hanya sekedar perdagangan biasa, namun negara-negara Eropa juga ‘mengamankan’ pasokan *raw materials* serta bahan makanan melalui berbagai peraturan dagang.

<sup>108</sup> Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *Op. Cit.*, hlm. 184.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>111</sup> Baran dalam Hoogvelt, Ankie. (1997). *The History of Capitalist Expansion, dalam Globalization and Post-Colonial World: The New Political Economy of Development*. Baltimore: The John Hopkins University Press, hlm. 17. dalam [http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori\\_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html](http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html).



Tidak berhenti pada fase merkantilisme, negara-negara Eropa yang telah melihat pasar dan sumber *raw materials* baru di luar wilayahnya kemudian merasa perlu untuk melegitimasi temuan-temuan tersebut, mengingat pada saat itu telah muncul kembali persaingan-persaingan antar negara Eropa yang didasarkan atas peningkatan kekuatan dan kekuasaan. Negara-negara Eropa merasa bahwa kontrol dan administrasi politik secara langsung pada teritori luar negara merupakan metode yang sesuai untuk mengatur sistem produksi dan meletakkan infrastruktur demi menambah lancarnya kegiatan perekonomian yang ada pada saat itu.<sup>112</sup> Disebutkan oleh Ankie Hoogvelt bahwa keadaan kolonialisme sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi negara *periphery* karena keadaan ini melibatkan negara *periphery* untuk dapat turut serta ke dalam jaringan ekonomi yang intensif dan ekspansif dengan negara-negara *core*.<sup>113</sup>

Kolonialisme tentu identik dengan praktek aneksasi terhadap wilayah lain di luar teritori negara. Kebijakan aneksasi wilayah tersebut sangat mendapatkan dukungan dari para pembayar pajak di negara asal penjajah, karena melalui hal tersebut, maka kemudian negara pun akan mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari pajak wilayah yang diduduki. Dengan demikian, negara akan memiliki pendapatan lebih dalam membiayai berbagai perkembangan sektor yang ada, serta semakin membuat negara tersebut untuk dapat bertambah besar dan kuat dalam persaingan antar Negara.<sup>114</sup> Kemudian, daerah jajahan juga dipandang sebagai hak milik negara penjajah. Karenanya, negara penjajah merasa perlu untuk menggalakkan kegiatan para misionaris demi memberikan ‘peradaban’ kepada masyarakat daerah jajahan yang dirasa kurang beradab (*civilizing the uncivilized*). Adapun maksud misi memberi peradaban ialah mengajarkan budaya-budaya Eropa hingga gaya hidup Eropa, sehingga diharapkan masyarakat daerah jajahan akan mampu berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan serta aktifitas industri yang lebih modern.<sup>115</sup>

Dengan adanya partisipasi tersebut, nantinya penjajah tidak akan hanya berfokus pada pencarian *raw materials* sebagai bahan baku kegiatan produksi mereka di Eropa namun lebih dari itu, para penjajah berharap masyarakat di wilayah jajahan akan tunduk terhadap peraturan negara penjajah dan dapat membantu mereka untuk semakin meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga penjajah akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Selain itu, kolonialisme juga dipandang sebagai satu-satunya kebijakan untuk dapat mempertahankan diri, karena jika suatu negara mengabaikan kolonialisme, maka negara tersebut akan dengan mudah dikuasai negara lain yang memiliki power lebih kuat.<sup>116</sup>

*Analisis:* Secara historis, ekspansi kapitalisme yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai motif, mulai dari masalah rivalitas antara negara-negara Eropa melalui pengembangan kekuasaan, kelangkaan *raw materials* hingga kelebihan produksi. Jika dilihat dari segi rivalitas dan pengembangan kekuasaan, negara-negara Eropa memiliki *norms* tersendiri mengenai masalah wilayah. Karenanya pada saat itu banyak negara-negara Eropa yang melakukan ekspansi di luar batas-batas teritorial negaranya dalam rangka pendistribusian *power* dan semakin memperluas wilayah karena didukung oleh terjadinya revolusi industri. Prinsip *bellum omni contra omnes* semakin meningkatkan situasi persaingan antar negara-negara Eropa pada saat itu, karena mereka memiliki asumsi bahwa manusia cenderung akan memerangi manusia lain dan semakin luas wilayah, maka suatu negara akan mendapatkan *power* yang semakin besar.

Selain itu, revolusi industri juga menimbulkan kebingungan bagi negara-negara Eropa berkenaan dengan masalah *raw materials*, mengingat negara-negara Eropa tidak memiliki banyak *raw materials* sebagai bahan baku produksi mereka. Kelangkaan tersebut yang kemudian juga mendorong negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi di luar Eropa demi mencari dan mendapatkan *raw materials* agar kegiatan produksi mereka dapat berjalan lancar.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Kemudian, permasalahan tidak hanya sampai pada masalah *raw materials*. Revolusi industri yang pada saat itu terpusat di Eropa akhirnya membuat banyak sekali barang produksi yang menumpuk di Eropa. Mengapa demikian? Logikanya di negara-negara Eropa yang cenderung *profit oriented*, ketika revolusi industri terjadi, tenaga buruh semakin tergantikan perannya oleh tenaga mesin karena didasarkan oleh berbagai hal. Beberapa diantaranya ialah tenaga mesin dapat meminimalisir pengeluaran karena mesin dipakai secara gratis, sedangkan buruh harus dibayar upah.

Tenaga mesin juga dirasa lebih efisien dan sangat produktif dibandingkan dengan tenaga buruh. Sebagai misal, jika kinerja mesin selama 1 jam sama dengan kinerja 20 atau 30 orang buruh selama 1 jam, maka dapat dibayangkan betapa besar pengeluaran yang dapat dipangkas. Ketika kemudian produktivitas pabrik semakin besar, sedangkan daya beli masyarakat (terutama buruh) semakin menurun karena lapangan pekerjaan pun semakin berkurang, maka kemudian barang-barang produksi tersebut banyak yang tidak laku dijual. Hal ini dapat disebut pula sebagai fenomena *over-production, under-consumption*. Jika situasi yang ada dibiarkan terjadi, maka barang produksi tersebut akan mengalami penurunan harga dan industri akan mengalami kerugian besar. Hal ini yang juga menjadi salah satu faktor pendorong negara-negara Eropa melakukan ekspansi perdagangan demi mencari pasar-pasar baru yang potensial.

## F. GLOBALISASI DAN SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL

Globalisasi kegiatan ekonomi dan persoalan pengelolaannya sering dianggap baru muncul setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1960-an. Masa sesudah tahun 1960-an adalah masa munculnya perusahaan multinasional (MNC) dan berkembangnya perdagangan internasional. Kemudian, setelah sistem nilai tukar setengah-tetap Bretton Woods ditinggalkan pada tahun 1971-1973, investasi dalam bentuk surat-surat berharga internasional dan pemberian kredit oleh bank mulai berkembang dengan cepat, seiring dengan meluasnya pasar modal ke seluruh dunia, yang menambah rumit hubungan ekonomi internasional dan membuka jalan bagi globalisasi ekonomi dunia yang terintegrasi dan saling tergantung.

Sejarah meluasnya kegiatan perusahaan ke seluruh dunia adalah sejarah yang teramat panjang, dan bukannya baru dimulai pada tahun 1960. kegiatan dagang, misalnya, telah ada sejak zaman peradaban kuno, tetapi pada Abad Pertengahan, barulah di Eropa, muncul kegiatan dagang yang teratur lintas Negara, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya korporasi swasta, meski seringkali mendapat dukungan dan bantuan yang besar dari pemerintahannya. Pada abad ke-14, para pedagang petualang memperdagangkan wol dan tekstil yang dihasilkan Inggris ke Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Negara-negara lain. Selain itu, di Italia, perusahaan-perusahaan dagang dan bank-bank memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan ke seluruh dunia pada masa-masa awal Renaissance. Pada akhir abad ke-14, di Italia, ada sekitar 150 bank yang sudah melakukan kegiatan di berbagai Negara (Duning, 1993, hlm. 97-98). Dalam abad ke-17 dan ke-18 dukungan oleh Negara meluas dengan berdirinya perusahaan-perusahaan dagang besar kolonial, seperti Dutch East India Company, British East India Company, Muscovy Company, Royal Africa Company dan Hudson Bay Company. Semua perusahaan ini memelopori perdagangan berskala besar di wilayah yang kelak menjadi wilayah jajahan yang penting.

Tetapi, penyebaran industri ke seluruh dunialah, sebagai akibat dari revolusi industri, yang paling dekat dengan perusahaan multinasional di zaman modern. Di sini peranan perusahaan Inggris sebagai perusahaan multinasional pertama penghasil barang pabrik tampak jelas. Mula-mula Amerika Utara dan Amerika Selatan membuka peluang untuk penanaman modal yang paling menguntungkan, disusul kemudian oleh Afrika & Australia. Muncul perdebatan apakah “investasi kolonial” dapat dianggap pendahulu penanaman modal asing, tetapi yang pasti produksi untuk pasar lokal mulai dengan cara ini. Perkembangan teknik & organisasi setelah tahun 1870-an memungkinkan berbagai jenis barang yang sama dapat dihasilkan di dalam & di luar negeri oleh perusahaan yang sama, eksplorasi & pengelolaan

bahan tambang & bahan baku lainnya juga menarik penanaman modal asing dalam jumlah besar (Dunning, 1993, Bab 5).

Namun, salah satu masalah dengan klasifikasi yang berlaku surut seperti itu adalah konsep model “penanaman modal asing” di satu pihak (ada pengendalian dari luar) dan investasi “portofolio” di pihak lain (jual beli surat berharga yang diterbitkan lembaga luar negeri untuk mendapat keuntungan tanpa ikut serta mengendalikan atau mengelola) baru pada tahun 1960-an muncul, bersamaan dengan munculnya istilah MNC (*multinational corporation*). Meski tidak ada klasifikasi data yang konsisten, pada umumnya disepakati, MNC sudah ada dalam ekonomi dunia setelah pertengahan abad ke-19 dan berdiri kokoh tidak lama sebelum Perang Dunia I. kegiatan bisnis internasional tumbuh pesat pada tahun 1920-an ketika perusahaan multinasional yang benar-benar terdiversifikasi dan terintegrasi kokoh, tetapi kemudian menurun selama masa depresi tahun 1930-an, hancur lebur karena perang pada tahun 1940-an, dan bangkit kembali setelah tahun 1950.<sup>117</sup>

Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah perang berbasis kepentingan ekonomi. Perang meliputi perang senjata, perang ekonomi, dan perang budaya. Perang senjata adalah perangnya antar Negara penjajah dalam memperebutkan daerah jajahan yang kaya sumberdaya alam. Perang yang demikian adalah perwujudan dari kerakusan sistem kapitalisme-kolonialisme dalam akumulasi modal melalui peperangan, akibatnya adalah Negara-negara terjajah bangkit rasa nasionalismenya melawan penjajah dan melahirkan Negara-negara merdeka, yang lazim disebut Negara Sedang Berkembang (NSB).<sup>118</sup>

Kapitalisme sebagai suatu sistem dunia bermula pada akhir abad 15 dan awal abad 16 ketika orang-orang Eropa yang menguasai pengetahuan pelayaran jarak jauh, menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi tujuh lautan, untuk melanklukan, merampas dan berniaga. Sejak itu kapitalisme terdiri dari dua bagian yang berbeda tajam: di satu pihak ada sejumlah kecil Negara-negara dominan yang memeras, dan di pihak lain, dengan jauh lebih besar Negara-negara yang dikuasai dan diperas. Keduanya terjalin secara tak terpisahkan dan tidak ada kejadian dalam kedua Negara itu yang dapat dimengerti jika dilihat terpisah dari sistem itu yang menjadi sebuah keharusan. Penting untuk menekankan bahwa hal itu benar, baik untuk “*kapitalisme modern*”, dalam arti sistem kapitalisme masa kini, maupun ketika ia masih merupakan kapitalisme merkantilis dari masa sebelum revolusi industri.<sup>119</sup>

Seperti sejarah yang mengalir mengikuti perubahan zaman, pola eksploitasi kapitalisme internasional pun mengalami perubahan wujud eksploitasinya. Pada awal abad ke-16 di Inggris terjadi revolusi industri yang memacu laju perkembangan kapitalisme awal. Proses ini didorong lagi oleh munculnya revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu revolusi yang mengakhiri hegemoni kaum feodal di Eropa Barat dan mendorong matangnya kekuasaan kaum borjuis. Di tangan para borjuis Eropalah kapitalisme mulai menanamkan kuku eksploitasinya sampai ujung dunia.<sup>120</sup>

Ketika di Eropa Barat terjadi over-produksi akibat maraknya industrialisasi, maka yang kemudian harus dilakukan oleh Negara-negara Eropa adalah ekspansi ke daerah-daerah terbelakang seperti Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika. Maka lahirlah pembagian kekuasaan atas wilayah-wilayah tersebut untuk memasarkan hasil industri dari Eropa dan juga untuk mengambil bahan-bahan mentah bagi kepentingan industrialisasi di Eropa. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang ketika itu belum mengalami proses perubahan sejarah masyarakat seperti Eropa Barat zaman itu. Karena perubahan kepentingan pula, maka dua Perang Dunia dihasilkan oleh kepentingan kapitalisme internasional, Perang Dunia Pertama pada tahun 1918-

<sup>117</sup> Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001. Hlm. 31-34.

<sup>118</sup> Liaht Darsono P, dalam *Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru*, <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2006-november/000189.htm>.

<sup>119</sup> Paul M Sweezy, “Kapitalisme Modern”, dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 5

<sup>120</sup> Lihat [www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm](http://www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm)

1939 dan kemudian Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-1945 adalah sejarah nyata di mana kapitalisme Vs kapitalisme berperang untuk menanamkan pengaruhnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Jadi perang yang dilakukan antara Blok Sekutu dan Blok Fasis adalah perang antara dua kapitalis yang ingin melebarkan sayap eksploitasinya terhadap Negara-negara dunia ketiga.

James Petras mengatakan bahwa globalisasi telah dimulai pada abad 15, yaitu sejak mulai berkembangnya kapitalisme yang ditandai dengan ekspansi, penaklukan dan penghisapan Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan bahkan Amerika Utara dan Australia oleh kekaisaran global pada waktu itu, Spanyol dan Portugis. Karena itulah globalisasi selalu diasosiasikan dengan imperialisme, yaitu hubungan global yang didasarkan pada akumulasi untuk Eropa, penghisapan dunia ketiga untuk akumulasi dunia pertama.<sup>121</sup> Menurut Pieterse, globalisasi dimulai sejak 1950-an. Menurut Marx dimulai 1500-an dengan tema kapitalisme modern. Wallerstein mencatat mulai 1500-an dengan tema sistem dunia baru. Robertson menilai globalisasi mulai 1870-1920-an dengan tema multidimensional, Giddens tahun 1800-an dengan tema modernitas, dan Tomilson tahun 1960-an dengan tema planetarisasi budaya.<sup>122</sup>

Sementara Scholte, menyatakan bahwa globalisasi berlangsung sejak tahun 1960-an, hal ini telah membantu memperluas jangkauan dalam tiga komodifikasi dalam tiga wilayah. *Pertama*, konsumerisme yang menghubungkan dengan produk-produk global yang diperluas oleh kapitalisme industri. *Kedua*, pertumbuhan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam lingkup global (*supra territorial*) seperti *global banking* dan *global securities* sehingga memperluas jangkauan modal uang. *Ketiga*, globalisasi telah mendorong perluasan komodifikasi dalam wilayah baru yang melibatkan informasi dan komunikasi sebagai akibatnya, item-item *software* komputer dan telepon panggil telah menjadi objek akumulasi.<sup>123</sup>

Sebenarnya sejak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) berdiri pada tahun 1944 serta GATT (sekarang WTO) pada tahun 1947, praktis dunia sudah memasuki globalisasi ekonomi, karena masalah pembangunan menjadi tanggung jawab internasional. Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman berbunga rendah bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai Negara untuk memajukan ekonominya, sedangkan IMF memberikan pinjaman bagi Negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran luar negeri dan GATT berfungsi untuk mengatur perdagangan global.<sup>124</sup>

Pada fase pasca PD II, strategi ekonomi politik yang dilancarkan oleh AS dan para sekutunya adalah strategi *Developmentalisme*<sup>125</sup> (pembangunanisme), untuk mengamankan investasi modalnya, kapitalisme internasional memberikan dukungan bagi orang-orang kuat di sejumlah negara dunia ketiga yang berasal dari jajaran militernya. Di Amerika Latin kita jumpai sejumlah regime yang dipimpin oleh militer (otoriter), di Asia Tenggara dan Selatan juga dijumpai regime otoriter yang kebanyakan dipimpin oleh militer. Militer pada zaman ini adalah anak emas yang dibesarkan oleh kapitalisme dengan tujuan mengamankan investasi modal. Pada fase ini (1960-1970-an)<sup>126</sup> dekolonisasi ditawarkan pada sejumlah Negara-negara jajahan Eropa Barat dan Amerika Serikat di Asia, Afrika dan Pasifik serta sebagian Negara-negara Amerika Latin.<sup>127</sup>

<sup>121</sup> Lihat, Links, International Journal of Socialist Renewal, No. 7 tahun 1996, hlm. 59

<sup>122</sup> Jan Nederveen Pieterse, "Globalization as Hybridization", individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities*, Sage Publications, London, 1995, hlm. 47

<sup>123</sup> Budi Winarno, "Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi", dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004, hlm. 7

<sup>124</sup> Lihat <http://www.theindonesianinstitute.org/gglob02.htm>.

<sup>125</sup> Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi pembangunanisme. Developmentalisme adalah sebuah istilah ekonomi-politik. Sebuah konsep atau kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada masa Presiden Harry S Truman pada tahun 1949 untuk menjawab berbagai permasalahan kemiskinan atau keterbelakangan (*Underdevelopment*) yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, sekaligus sebagai alat ideologi untuk membendung sosialisme.

<sup>126</sup> Fase di mana dekolonisasi ditawarkan bagi dunia ketiga dan terjadi proses eksploitasi kapitalisme dari yang bersifat kolonilistik kepada fase yang bersifat lunak

<sup>127</sup> Lihat [www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm](http://www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm)

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Sovyet pudar dan blok komunisme hancur, secara riil AS menghadapi musuh barunya: Negara-negara Eropa. Kelompok politik dan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perdagangan dunia. Di sisi lain, Negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan Negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa setelah Negara-negara itu berpindah dari sosialisme ke sistem kapitalisme.

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan AS. Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya memperlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkan kembali, mendirikan NAFTA yang beranggotakan Canada, AS, dan Mexiko dan juga, membentuk APEC.

Pada bulan November 1992, atas undangan Presiden Clinton, telah diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi bagi Negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan menekan bea masuk. Pendiriannya tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa. Pendirian APEC justru untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari persaingannya dengan pasar bersama Eropa.<sup>128</sup>

AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah: *Pertama*, kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi. *Kedua*, Eropa memiliki kemampuan bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi barang dan jasa. *Ketiga*, setelah berakhirnya perang dingin dan hancurnya Uni Sovyet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya digunakan AS untuk mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi dan bersiap-siap dengan serius untuk terjun ke dalam kancah ekonomi internasional. Diantara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa yang merupakan Negara-negara industri yang produktif telah menghilangkan hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas Negara masing-masing untuk memudahkan pemindahan tenaga kerja, dan berusaha mewujudkan kesatuan mata uang.<sup>129</sup> Hal ini kemudian mendorong Eropa untuk memasuki pasar-pasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas. Di samping itu AS terdorong pula untuk memperkokoh pasarnya di Asia dan Eropa dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan AS pun dalam hal ini telah sukses pula menunggangi WTO (*World Trade Orgazation*) untuk semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia.

APEC mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua; AS, Canada, Mexiko, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand. Organisasi ekonomi internasional ini menggabungkan keanggotaan dua kelompok ekonomi besar, yaitu NAFTA yang beranggotakan Negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan Negara-negara Asia Tenggara.

Negara-negara anggota APEC menguasai 40 % dari keseluruhan volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. Dari seluruh penjelasan tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak terus mengembangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap, bahkan menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tidak bisa dihindari lagi. Akan

<sup>128</sup> <http://www.al-islam.or.id/tampil.php?halaman=buletin&id=24>

<sup>129</sup> *Ibid.*

tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di samping itu, produksi melimpah dari banyak Negara dan blok ekonomi akan terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi penimbunan-penimbunan produk yang melimpah.<sup>130</sup>

Dalam analisis Friedman, dunia saat ini adalah dalam era globalisasi kedua, yang dimulai sejak tahun 1989 setelah AS, Inggris dkk, memenangkan perang dingin. Jadi setelah era perang dingin itulah tonggak globalisasi dengan tahapan yang lebih massif. Globalisasi kedua hakikatnya adalah suatu proses dunia menjadi satu atap di bawah hegemoni dan dominasi pemenang perang dingin. Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara sedang berkembang mau tidak mau harus menerima kenyataan yang demikian, yaitu menjadi bawahan AS dkk. Thomas L Friedman menyatakan bahwa globalisasi diberi makna modernitas (*the lexis*) di mana masyarakat harus berpersepsi fungsional melalui solidaritas organik<sup>131</sup> yaitu menempatkan manusia (bangsa) sebagai fungsi manusia lain (bangsa lain) untuk mencapai tujuannya. Lawan dari *the lexis* (modernisasi) adalah *the olive tree* yaitu masyarakat yang berpersepsi mistis, di mana mereka merasa menikmati hidup dalam kungkungan tradisi. *The lexis* adalah symbol dari Negara-negara maju (Canada, AS, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris) dan *the olive tree* adalah symbol dari negara-negara sosialis dan Negara-negara sedang berkembang. *The olive tree* harus menyesuaikan diri dengan *the lexis*, jika mereka ingin tetap eksis.<sup>132</sup>

Globalisasi kedua ini ditandai oleh lahirnya revolusi teknologi, revolusi telekomunikasi, dan revolusi informasi. Ketiga revolusi itu mengakibatkan biaya produksi kapitalis rendah dan kapital bisa menjelajah dunia tanpa kendala sehingga kapital dan komoditi Negara-negara maju (*the lexis*) dapat menguasai dunia. Bagi dunia kedua (blok sosialis) dan dunia ketiga harus menerima kenyataan ini. Anthony Giddens, bahkan mengatakan jika globalisasi yang ditopang oleh revolusi teknologi komunikasi tersebut tidak hanya baru, melainkan revolusioner.<sup>133</sup>

Akhirnya, globalisasi adalah bentuk baru hegemoni ekonomi, legitimasi baru terhadap pasar, kompetisi dan profit. Setelah dekolonisasi dan runtuhnya blok sosialis, globalisasi menjadi bentuk baru hegemoni atas nama pasar bebas, revolusi informasi, dunia sebagai satu dunia dan lain sebagainya. Akhir sejarah juga merupakan legitimasi baru kapitalisme setelah runtuhnya komunisme, seolah-olah sejarah berhenti dan waktunya habis. Revolusi informasi merupakan dalih baru untuk menyatukan dunia atas nama teknologi komunikasi baru, dunia sebagai satu desa dan hukum pasar.<sup>134</sup>

## G. FAKTOR PENDORONG GLOBALISASI

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dalam saling keterhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham yang demikian itu disebut globalisasi atau neo-liberalisme. Beberapa faktor pendorong globalisasi yaitu: *Pertama*, kekuatan kaum kapitalis internasional, yaitu Negara-negara imperialis pusat, Negara menjadi motor penggerak globalisasi karena ia memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global termasuk MNC. MNC yang mampu beroperasi hampir di seluruh dunia, dan merupakan sumber kekuatan dari globalisasi itu sendiri dikemudian hari yang pada akhirnya peran MNC dalam dinamika globalisasi ini begitu kuatnya seolah-olah MNC telah menjadi parasit yang memakan induk semangnya dan

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> Istilah yang digunakan Talcot Person.

<sup>132</sup> Thomas L Friedman, *The Lexus and The Olive Tree*, Harper Collins Publisher, London, 2000, hlm. 31

<sup>133</sup> Anthony Giddens, *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 5

<sup>134</sup> Hasan Hanafi, *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisme, Pluralisme, Egalitarianisme Antar Peradaban*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2003, hlm. 69

menjadi lebih kuat dan lebih besar. Kekuatannya ini didukung oleh *Bretton Woods Institution*, yaitu: Bank Dunia (*World Bank*), Dana Moneter Internasional (IMF) dan GATT/WTO kemudian diaplikasikan pada tiga sistem yaitu liberalisasi perdagangan, keuangan, investasi. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi. *Ketiga*, dukungan pemerintah Negara-negara sedang berkembang (NSB) terhadap ekspansi kaum kapitalis internasional di Negara mereka.

### [1] Kekuatan Kaum Kapitalis Internasional

Sejak lima abad yang lalu perusahaan-perusahaan di Negara-negara yang perekonomiannya telah maju, telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan, yang semakin intensif di masa penjajahan ke berbagai belahan dunia. Namun, sejak dua atau tiga dekade yang lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi dan terutama kebijakan-kebijakan liberalisasi yang telah menjalar ke seluruh dunia.

Liberalisasi perdagangan berarti menghilangkan segala peraturan yang bersifat melindungi industri dan pasar domestik. Menurut logika neo-liberal, ekonomi Negara akan berkembang bila ada kebebasan pasar. Liberalisasi ini juga berarti penghapusan beban-beban yang harus ditanggung oleh swasta. Liberalisasi berarti kebebasan yang seluas-luasnya bagi kapitalis untuk mengeruk keuntungan.<sup>135</sup> Aspek-aspek terpenting yang tercakup dalam proses globalisasi ekonomi adalah runtuhnya hambatan-hambatan ekonomi nasional, meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan dan perdagangan secara internasional serta semakin berkembangnya kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional dan institusi-institusi Moneter Internasional. Walaupun globalisasi ekonomi merupakan proses yang terjadinya tidak secara merata, dengan peningkatan perdagangan dan investasi hanya terfokus di segelintir Negara saja, namun hampir semua Negara di dunia sangat dipengaruhi oleh proses tersebut. Sebagai contoh, sebuah Negara berpendapatan rendah yang pangsa perdagangannya sangat kecil dalam perdagangan dunia, namun perubahan permintaan atau harga komoditas-komoditas ekspornya atau kebijakan untuk secara cepat menurunkan bea-bea impornya dapat secara sosial dan ekonomi berpengaruh besar pada Negara tersebut. Negara tersebut mungkin hanya memiliki peran yang kecil dalam perdagangan dunia, namun perdagangan dunia memiliki pengaruh yang sangat besar atas Negara tersebut, yang mungkin saja pengaruhnya jauh lebih luas dibandingkan dengan pengaruhnya atas perekonomian-perekonomian yang telah maju.<sup>136</sup>

Liberalisasi eksternal dari perekonomian nasional mencakup penghapusan hambatan-hambatan nasional atas aktivitas ekonomi, meningkatkan keterbukaan dan integrasi dari Negara-negara ke dalam pasar dunia. Di kebanyakan Negara, hambatan-hambatan nasional dalam bidang moneter dan pasar uang, perdagangan dan investasi asing langsung secara umumnya telah dihapus. Liberalisasi moneter adalah persoalan yang paling mendapat perhatian. Selama ini telah terjadi liberalisasi yang ekstensif dan progresif atas berbagai kontrol terhadap aliran dan pasar uang. Gugurnya sistem Bretton Woods pada tahun 1972-1973, telah membuka peluang perdagangan valuta asing, dan kegiatan tersebut telah berkembang secara spektakuler. Volume yang diperdagangkan di pasar valuta asing dunia meningkat dari \$ 5 milyar per hari di tahun 1973 menjadi melebihi \$ 900 milyar di tahun 1992, dan saat ini bahkan telah melampaui \$ 1000 milyar. Banyak dari transaksi tersebut merupakan transaksi spekulatif, dan diperkirakan hanya sebagian kecil (kurang dari 2 %) dari total valuta asing yang diperdagangkan digunakan sebagai pembayaran perdagangan. Sehubungan dengan saling terkaitnya antara pasar uang, sistem moneter dan aliran uang yang sangat besar, secara umum terdapat keprihatinan yang semakin meningkat mengenai kerentanan dan ketidakstabilan maupun resiko dari melemahnya bagian-bagian atau keseluruhan sistem yang ada, pada suatu

<sup>135</sup> Lihat [http://www.pds.or.id/globalisasi\\_penghisapan\\_rakyat.htm](http://www.pds.or.id/globalisasi_penghisapan_rakyat.htm).

<sup>136</sup> Martin Khor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cindelar Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2000, hlm. 10.

saat kesalahan terjadi dan berkembang di satu bagian dunia atau suatu bagian sistem, dan dampaknya dapat tersebar luas.

Nilai tukar mata uang telah menciptakan ketidakstabilan nilai tukar yang sangat tajam yang berbalik mendorong terciptanya sebuah masa yang sangat besar pada dunia uang. Uang tersebut tidak memiliki eksistensi di luar ekonomi global dan itu adalah pasar-pasar uang utama. Hal itu belum pernah ada sebelumnya dalam praktek ekonomi tradisional mengenai definisi uang, apakah itu standar ukurannya, muatan nilainya, atau media pertukarannya. Benar-benar baru, tidak dikenal. Hal tersebut tampak maya (*virtual*) dibanding dengan hal yang nyata (*real*). Tetapi kekuatannya begitu nyata. Volume peredaran uang dunia begitu besar pergerakannya yang masuk maupun yang keluar, mata uang memiliki dampak yang besar dan jauh dibandingkan arus keuangan di sektor perdagangan, atau investasi. Dalam satu hari uang maya (*virtual money*) yang diperdagangkan senilai dengan seluruh uang yang dibutuhkan dalam transaksi keuangan sektor perdagangan dan investasi selama satu tahun penuh. *Virtual money* ini memiliki daya gerak yang sangat tinggi karena tidak terkait dengan fungsi-fungsi ekonomi yang sudah ada. Masalah tersebut dimungkinkan karena hal tersebut tidak memiliki kaitannya dengan fungsi ekonomi maupun fungsi keuangan sama sekali, uang ini bahkan tidak mengikuti logika ekonomi maupun hal-hal yang rasional. Hal itu begitu rentan dan mudah panik oleh isu-isu dan rumor atau sesuatu peristiwa yang tidak diperkirakan. Satu contoh adalah ketika dollar Amerika diburu pada musim gugur 1995 yang membuat tekanan terhadap Presiden Clinton mengabaikan rencana dia tentang rencana pengeluaran dan neraca belanja seimbang. Kekacauan dimulai oleh kegagalan para politikus Partai Republik di senat untuk meloloskan amandemen konstitusi mengenai neraca belanja. Meskipun amandemen tersebut lolos hal itu tidak akan berarti apa-apa. Hal tersebut akan sulit karena harus melalui upaya ratifikasi di 38 negara bagian untuk dibuat menjadi peraturan yang biasanya akan memakan waktu selama satu tahun. Tentu saja hal itu membuat para pedagang mata uang menjadi panik dan mulailah kekacauan dollar Amerika. *Virtual money* selalu muncul sebagai pemenangnya, ini membuktikan bahwa ekonomi global telah menunjukkan kemampuannya menjadi penengah yang baik disektor keuangan dan kebijakan dalam sektor fiskal. Kekacauan mata uang, bagaimanapun juga bukan hal yang baik bagi ketidakstabilan fiskal suatu Negara. Kasus di Mexico sesuatu yang mengerikan telah terjadi yang konon lebih parah dari epidemik penyakit. Pada tahun 1995 kekacauan yang menimpa Peso menghempaskan perjuangan ekonomi selama enam tahun yang berhasil mengangkat Mexico dari Negara miskin menjadi Negara yang makmur. Sejauh ini belum ada yang dapat mengontrol ketidakstabilan fiskal.<sup>137</sup>

Satu-satunya sistem yang dapat bekerja ialah kebijakan fiskal dan keuangan satu Negara yang terbebas dari hutang jangka pendek. Mudah berubahnya uang yang mampu menutupi defisit. Jelas ini sepertinya membutuhkan suatu neraca seimbang atau sesuatu yang lebih cenderung ke bentuk keseimbangan, selama tiga atau lima tahun periode berjalan. Dan hal ini lalu menempatkan keterbatasan kepada otonomi kebijakan keuangan dan fiskal *nation-state* yang pada tahun 1973 nilai tukar mengambang telah terlepas sepanjang masa. Proses perbaikan di tingkat non nasional dan supranasional sedang berjalan. Bahwa keputusan ekonomi yang mendasar diputuskan oleh pengaruh ekonomi global daripada pengaruh yang terjadi di dalam negeri *nation-state*. Bentuk tidak mengekangnya keuangan dan kedaulatan kebijakan keuangan yang diberikan *nation-state* dalam nilai tukar mengambang 25 tahun yang lalu sama sekali tidak baik lagi bagi pemerintah. Terjadi pemindahan pengaruh, pengambil keputusan bukan lagi pemerintah tetapi malah para kelompok yang lebih khusus. Sehingga pemerintah kehilangan kewibawaannya dan hal itu tentu saja mengganggu jalannya kebijakan-kebijakan yang lain. Dan itu hampir terjadi di setiap Negara di dunia. Ada fenomena menarik, yaitu ketika *nation-state* kehilangan kedaulatan atas sistem keuangan dan fiskal malah terjadi penguatan.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*



Keprihatinan-keprihatinan terhadap kemungkinan krisis moneter global diperkuat oleh krisis keuangan di Asia Timur, yang dimulai pada paruh kedua tahun 1997 dan menjalar hingga Rusia, Brasil dan Negara-negara lain, menyebabkan kekacauan moneter dan resesi ekonomi terburuk dalam periode pasca Perang Dunia II.

Liberalisasi perdagangan juga meningkat secara gradual, namun tidak seperti yang terjadi pada liberalisasi moneter. Peran perdagangan yang meningkat dibarengi dengan pengurangan tarif secara umum, baik di Negara-negara maju maupun di NSB (Negara sedang berkembang), sebagian sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan otonom dan sebagian lagi sebagai akibat dari babak-babak putaran perdagangan multilateral di bawah GTT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Namun demikian, tarif-tarif yang tinggi tetap masih muncul di Negara-negara maju, dalam sektor-sektor seperti pertanian, tekstil dan produk-produk manufaktur tertentu, yang merupakan sektor dimana (NSB) memiliki keunggulan komparatif. Lebih jauh lagi, terdapat peningkatan penggunaan hambatan non tarif yang mempengaruhi akses dari NSB ke pasar Negara-negara maju.<sup>139</sup>

Juga telah terjadi pertumbuhan yang mantap dalam liberalisasi investasi asing langsung (FDI), meski pada skala yang lebih kecil dari aliran moneter internasional. Kebanyakan FDI dan peningkatannya merupakan akibat dari aliran-aliran dana investasi langsung di antara Negara-negara maju. Akan tetapi, sejak awal tahun 1990-an, aliran FDI ke NSB telah meningkat secara relatif, dari rata-rata 17 % pada tahun 1981-1990 menjadi 32 % pada tahun 1991-1995. Hal tersebut sejalan dengan liberalisasi kebijakan-kebijakan investasi asing di kebanyakan NSB dalam waktu belakangan ini. Namun, banyak dari FDI tersebut memusat hanya di beberapa NSB. Secara khusus, Negara-negara terbelakang (*Least Developed Countries*) menerima bagian yang sangat kecil dari aliran-aliran FDI tersebut, meskipun mereka telah meliberalisasi kebijakan-kebijakannya. Dengan demikian, FDI bukan merupakan suatu sumber keuangan eksternal yang signifikan kebanyakan NSB, yang benar, kemungkinan masih tetap berlangsung dalam beberapa tahun mendatang.

Ciri utama dari globalisasi adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional, maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan dan dana global. Proses ini sering diistilahkan sebagai transnasionalisasi, di mana semakin sedikit perusahaan transnasional yang mampu meraih pangsa besar atau peningkatan proporsi secara cepat dari pembagian sumberdaya ekonomi, produksi dan pangsa pasar. Jika dulu perusahaan multinasional mendominasi pasar dari sebuah produk tunggal, saat ini perusahaan transnasional yang besar secara khusus memproduksi dan menjual berbagai produk, pelayanan di bidang-bidang yang kian beragam. Melalui merger dan akuisisi, makin sedikit perusahaan transnasional yang saat ini mampu menguasai pangsa pasar global yang lebih besar, baik dalam komoditas, barang-barang manufaktur ataupun jasa.

## [2] Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pada permulaan abad 21 ini, trend global semakin variatif. Barang, uang, manusia, teknologi, dan informasi dalam era globalisasi telah menyebar secara luas melewati batas Negara (*nation state cross border*), yang berimplikasi terhadap semakin saling terhubungnya setiap dinamika perubahan global saat ini, dan mengikat semakin kuat membentuk suatu komunitas tunggal yang terintegrasi dan dalam hal ekonomi telah menjadi semacam pasar tunggal. Hal ini telah menjadikan dunia sebuah *global village*. Kehadiran teknologi komputer yang merupakan terobosan baru sebagai infrastruktur global, bahkan sampai saat ini komputer telah menyandang sebagai simbol kedua dari globalisasi. Tidak ada satu arenapun (ekonomi, politik, sosial dan budaya) di dunia ini yang kebal dari teknologi komputer.<sup>140</sup> Pada saat ini lebih dari 400 juta komputer digunakan di dunia,<sup>141</sup> dan pertumbuhan penggunaan komputer

<sup>139</sup> Martin Khor, *Op. Cit.*, hlm. 11

<sup>140</sup> Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopt, *World Politics: Trend and Transformation 7<sup>th</sup> Edition*, Worth Publishers, London, 1999, hlm. 249

<sup>141</sup> *Kompas*, "Lengser a'la Bill Gates", 22 Januari 2000

saat ini menembus angka 18 sampai 20 juta pertahun. Salah satu penyebab utama dari pertumbuhan itu adalah teknologi mikroarsitektur yang memungkinkan komputer dapat dibuat dengan ukuran mini yang praktis.

Perusahaan multinasional (MNC) merupakan salah satu topik yang menarik dalam wacana kompetisi global. Karakteristik utama dari sebuah MNC adalah pengelolaan jaringan bisnis yang rumit dan mempunyai skala global oleh perusahaan induk, agar perusahaan cabang dapat melakukan proses-proses produksi dan juga pemasaran sehingga tercapai suatu bisnis secara global.<sup>142</sup> MNC sebagai salah satu pemain terbesar dalam kompetisi global tumbuh dengan cepat setelah era Perang Dunia II, kunci keberhasilan itu adalah temuan berbagai inovasi teknologi yang selalu direspon dengan positif oleh mereka.<sup>143</sup> Teknologi informasi sebagai perkembangan terbaru dalam dunia teknologi juga mendapatkan tempat yang strategis dalam dunia bisnis berskala global, seperti yang dilakukan oleh *Microsoft Corporation*. Dengan adanya teknologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi, telah menyebabkan berakhirnya dominasi Negara-negara dalam melakukan monopoli dalam dunia telekomunikasi,<sup>144</sup> dengan adanya internet perusahaan dapat menyelenggarakan sistem informasi mereka sendiri secara lebih efisien tanpa campur tangan yang berarti dari Negara. Pemotongan birokrasi dalam proses-proses perdagangan antar Negara yang dapat dilakukan oleh teknologi ini akan berimplikasi terhadap efisiensi yang cukup tinggi.

Sistem syaraf digital yang merupakan suatu upaya eksplorasi teknologi informasi yang dibangun Microsoft layak disebut sebagai salah satu infrastruktur terjadinya globalisasi, karena sistem tersebut dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan hubungan komunikasi secara global dengan sistem yang tunggal yang melewati batas-batas Negara tanpa campur tangan yang berarti dari Negara yang bersangkutan. Di masa datang jika sistem syaraf digital dapat di bangun dengan sempurna, maka akan terciptalah pola hubungan yang sangat kompleks antar manusia di bumi di mana kegiatan sekelompok orang, individu maupun sebuah institusi di tempat lain dapat dipantau dengan kecepatan teknologi informasi tersebut. Di sinilah kemudian akan terjadi apa yang disebut *complex interdependence*, di mana jika sudah mencapai tahap *interlocking*, kehidupan manusia di bumi harus senantiasa selaras dengan meminimalisasi konflik, sebab jika pada tahap ini terjadi sebuah konflik yang besar akan memicu sebuah efek yang destruktif.

Era digital atau sering disebut dengan abad informasi yang ditandai dengan kehadiran teknologi internet, telah merubah segalanya, dan salah satu perubahan itu terjadi pada dunia bisnis. Terobosan-terobosan yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi telah terbukti mampu meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Teknologi ini kemudian dijadikan sebagai salah satu infrastruktur utama di sebuah perusahaan ataupun pemerintahan suatu Negara dalam rangka menyusun strategi kompetisi global. Teknologi Informasi (TI) yang kini berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi ini.

Mulai dari wahana TI yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protocol aplikasi tanpa kabel (WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Perubahan harga saham sebuah perusahaan farmasi di Bursa Efek Jakarta hanya membutuhkan waktu kurang dari sepersepuluh detik untuk diketahui di Surabaya. Indeks nilai tukar dollar yang ditentukan di Wall Street, AS, dalam waktu kurang dari satu menit sudah dikonfirmasi oleh Bank Indonesia di Medan Merdeka.

Hal ini akhirnya menuju pada sebuah *Global Brain* yang memungkinkan akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Dunia penelitian, bisnis, industri

<sup>142</sup> Charles W. Kegley & Eugene R. Wittkopt, *Op. Cit*, hlm. 196

<sup>143</sup> David Held & Anthony Mc Grew, David Goldblat & Jonathan Peraton, *Global Transformation: Politics, Economics and Culture*, Polity Press, Great Britain, 1999, hlm. 260

<sup>144</sup> *Ibid.* hlm. 253

dimungkinkan untuk menggunakan suberdaya manusia maupun fasilitas lainnya tanpa terikat pada dimensi-dimensi ruang dan batas-batas Negara.<sup>145</sup>

Sebuah Negara, perusahaan, ataupun organisasi untuk memikirkan sebuah alternatif dalam tingkat persaingan yang tinggi yaitu mengembangkan sistem informasi dan menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin sebagai alat untuk melakukan persaingan dengan yang lainnya. Karena di era global ini setiap informasi yang didapat tidaklah dapat dilepaskan dari rantai teknologi, informasi adalah hasil pengolahan data mentah, sedangkan teknologi informasi merupakan tulang punggung pengolahan dan penyimpanan informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Hanya pihak yang menguasai teknologi informasi yang dapat eksis dalam era revolusi global saat ini. Joseph S. Nye menjelaskan bahwa globalisasi bukan menyengsarakan masyarakat miskin, tetapi justru menguntungkan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan modal internasional, manusia bisa mendapatkan keuntungan besar. Argumen ini dikuatkan oleh beberapa hasil penelitian di beberapa Negara berkembang, misalnya perbandingan antara Korea Selatan dan Ghana, pada tahun 1960-an kedua Negara tersebut mempunyai pendapatan perkapita yang sama, tetapi sekarang Korea Selatan lebih mampu memanfaatkan globalisasi, sehingga lebih kaya 30 kali lipat dibanding Ghana, dan dapat menghilangkan ketimpangan tingkat kesejahteraannya, dapat mengirit ongkos dan mempermudah informasi dengan Negara-negara industri yang telah lama maju.<sup>146</sup> Meskipun globalisasi berhasil mengembangkan berbagai teknologi dan komunikasi yang memudahkan atau dapat memecahkan persoalan-persoalan, tak urung pula secara faktual keberhasilan tersebut makin mempertajam kemiskinan, baik ditingkat nasional maupun hubungan antar Negara.

### [3] Dukungan Pemerintah Negara-negara Sedang Berkembang

Pelaku utama dari globalisasi adalah Negara imperialis yang berkuasa<sup>147</sup> artinya Negara yang mempunyai prinsip ekonomi *world competitive* dan mereka tidak mempunyai kerugian apa-apa karena semua biaya yang dikeluarkan berasal dari pembukaan pasar (*open market*). Kelompok ini hendak memperjuangkan globalisasi yang bebas (*unrestricted globalization*), mereka cenderung untuk membuka perekonomian mereka dan sebagai gantinya mereka juga menuntut Negara lain agar membuka perekonomiannya. Kelompok kedua yang pro globalisasi adalah Negara-negara pelayan (*clients*) dari kelompok pertama. Kelompok kedua (NSB) ini mengkhususkan dirinya pada ekspor barang-barang agromineral, kelautan, dan kehutanan yang semua itu mendukung produk dan memberi keuntungan bagi kelompok pertama.<sup>148</sup>

Negara imperialis juga memainkan peran penting dalam membuka pintu perekonomian dunia dengan menciptakan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO. Lembaga-lembaga ini dikontrol oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Negara imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa. Fungsi mereka adalah menggantikan peran pasar domestik dan produsen lokal serta menghancurkan lembaga sosial setempat dengan tujuan memfasilitasi masuknya MNC dan terjaminnya ekspor barang-barang kebutuhan Negara dunia pertama. Negara imperialis memainkan peran penting dalam pembangunan kembali ekonomi perusahaan-perusahaan raksasa, mereka memberikan bantuan militer dan perlindungan politik bagi perluasan MNC, sementara MNC tersebut membiayai lembaga keuangan internasional yang bertugas untuk membuka pasar baru dan tempat investasi yang baru. Di bawah bayang-bayang modal multinasional korporasi, Negara imperialis juga

<sup>145</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/28/nasional/280846.htm>

<sup>146</sup> Lihat. Kita, Dunia dan Globalisasi: Menelusik Pemikiran Joseph S. Nye, dalam <http://isac.blogdrive.com/archive/10.htm>

<sup>147</sup> Dari Negara-negara imperialis inilah muncul korporasi-korporasi global yang menjadi pelaku utama juga pada saat ini, dan agen utama eksploitasi berbagai sumberdaya di berbagai belahan dunia ketiga, yang pada akhirnya hasilnya dibawa kembali ke Negara-negara metropolis

<sup>148</sup> Lihat: James Petras, "Negara Sebagai Agen Imperialis", dalam *Globalisasi Perspektif Sosialis*, Ali Sugihardjanto, dkk, Penerbit Cubuc, Jakarta, 2001, hlm. 164

ikut mensubsidi dan membiayai ekspansi modal, sementara di sisi lain penghisapan terhadap pasar domestik terus dilakukan untuk membiayai ekspansi tersebut.<sup>149</sup>

Kebijakan domestik maupun internasional pemerintah Negara-negara berkembang itu ditransformasikan melalui introduksi dan adopsi semacam reformasi liberalisasi ekonomi yang diniatkan untuk menata kembali peran dan keterlibatan Negara dalam ekonomi.<sup>150</sup> Reformasi ini didukung dengan berbagai derajat antusiasme yang berlainan di berbagai Negara berkembang, tapi jelas efeknya mengarah pada sebuah reduksi internasional terhadap intervensi pemerintah dalam perekonomian, mengarah pada meningkatnya kepercayaan atas mekanisme pasar dan kebebasan yang lebih besar bagi sektor swasta, yaitu makin banyak dianutnya marketisasi dan privatisasi. Bahkan di Negara seperti India, Brasil, dan Nigeria di mana nasionalisme ekonomi mengakar secara historis, investor asing tidak hanya disambut dengan penghapusan pembatasan penanaman modal asing, melainkan juga dengan tawaran insentif bagi investasi baru.<sup>151</sup>

Sementara itu di Dunia Ketiga, peran Negara tidak bisa dihilangkan. Ada relasi yang dialektis antara peran Negara di pasar domestik dan proses globalisasi. Dengan kebijakan upah rendah, pengurangan subsidi, dan pemupukan modal swasta, Negara Dunia Ketiga mengonsentrasikan pendapatannya untuk ekspansi ke luar (globalisasi ataupun *capital relocation*). Proses ini sudah terlihat jelas dalam program yang dikenal dengan istilah *Struktural Adjustment Programs* (SAPs) atau program pengetatan ekonomi. Program ini dirancang oleh Bank Dunia dan IMF yang bekerja sama dengan elite Negara Dunia Ketiga, tujuannya adalah meningkatkan arus keluar modal dan kesediaan pasar nasional untuk melakukan swastanisasi bagi kepentingan MNC.<sup>152</sup> Berikut adalah contoh beberapa persyaratan SAP.<sup>153</sup>

1. *Penghapusan tarif-tarif yang membantu industri-industri kecil lokal agar tetap mampu bertahan hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar global.* Padahal, tarif-tarif tersebut sesungguhnya memberi ruang bernafas bagi Negara-negara miskin untuk berkembang secara internal dalam menghadapi pesaing-pesaing yang lebih besar dan lebih kaya.
2. *Penghapusan berbagai peraturan dalam negeri yang mungkin dapat menghambat atau terlalu banyak mengatur masuknya investasi luar negeri.* Dengan demikian ini memungkinkan para pemodal dan korporasi global untuk secara bebas masuk dan dengan mudah menguasai bisnis-bisnis di tingkat lokal, bahkan tak jarang di seluruh lini perekonomian.
3. *Penghapusan kontrol harga (bahkan berkenaan dengan kebutuhan pokok seperti pengadaan air sekalipun) dan secara tidak adil mewajibkan pemberlakuan terhadap kontrol atas upah.* Alhasil, sudah dapat dipastikan para pekerja yang upahnya sudah teramat kecil, menjadi semakin kecil kemampuannya untuk bertahan hidup.
4. *Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan yang menjalankannya, seperti pelayanan kesehatan, perawatan medis, pendidikan, bantuan pangan, bantuan usaha kecil, angkutan, sanitasi, air dll.* Kerap kali berbagai pelayanan tersebut diprivatisasi sehingga bantuan yang sebelumnya diterima Cuma-Cuma oleh rakyat, kini memerlukan biaya yang ujung-ujungnya harus dibayarkan kepada korporasi global. Akibatnya, begitu banyak orang tidak mampu membayarnya, sehingga secara otomatis mereka tersingkir keluar dari sistem.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>150</sup> Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, ed., *Introduction: Institution and Economic Adjustment*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992, hlm. 3

<sup>151</sup> Thomas J Bierstecker., "The Logic of Unfulfilled Promise of Privatization in Developing Countries", individu Louis Puterman & Dietrich Rueschmeyer, eds, *State and Market in Development: Synergy of Rivalry?*, Boulder, CO: Liene Riener, Publisher, Inc, 1992, hlm. 106

<sup>152</sup> James Petras, *Negara Sebagai Agen Imperialis*, Op. Cit., hlm. 166-167

<sup>153</sup> Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, "Globalisasi Membantu Kum Miskin", dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelar Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm. 10-12

5. *Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat*, yang menjadi sarana bagi bangsa-bangsa untuk bisa mencapai kemandirian dalam hal kebutuhan pokok. Tentu saja, korporasi-korporasi global tidak bisa mendapatkan keuntungan jika bangsa-bangsa mampu memecahkan persoalan dalam negeri mereka sendiri, keuntungan korporasi global itu sendiri berasal dari pengembangan proses-proses penciptaan nilai tambah, khususnya melalui perdagangan global.
6. *Perubahan yang dilaksanakan secara cepat atas perekonomian dalam negeri untuk menekankan produksi ekspor*, yang biasanya dikelola tanpa ketatalaksanaan langsung dari investor asing dan korporasi global. Produksi yang terdiversifikasi secara lokal dan berskala kecil, seperti dalam bidang industri atau pertanian, akan digantikan dengan produksi berorientasi ekspor yang terspesialisasi dalam skala besar. Dalam hal ini, teori yang berlaku adalah ketika Negara-negara memusatkan produksi mereka pada sejumlah kecil produk ekspor, maka mereka akan mendapatkan cadangan devisa (*foreign exchange*) dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dengan demikian mereka akan mampu membeli barang-barang kebutuhan mereka di pasar-pasar asing.

## H. GLOBALISASI DAN KRISIS MASYARAKAT KAPITALISME

Dampak perkembangan konstelasi politik-ekonomi internasional adalah efek globalisasi yang telah masuk ke segala sendi kehidupan manusia di dunia internasional. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan telah timbul berbagai masalah. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan tidak mampu mengatasi, jurang yang besar antara Negara kaya dan miskin, masyarakat marginal, kelaparan, kemiskinan internasional, dan masalah perkembangan *indigeneous technology* di dunia ketiga.<sup>154</sup> Jelaslah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, dinamik yang menguasai jurusan-jurusan pertumbuhannya serta pilihan-pilihan masalahnya seperti juga teknologi, tidak berdiri sendiri, merupakan bagian dari sistem sosial, lengkap dengan tujuan-tujuan, kepentingan, prioritas, serta sistem nilainya.<sup>155</sup> Oleh karena itu pilihan teknologi tidak boleh diambil hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai implikasi sosialnya.<sup>156</sup>

Dalam hal ini ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan krisis di masyarakat kapitalisme. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang masyarakat kapitalisme, penulis paparkan lebih mendetail perihal relasi Negara, globalisasi dan logika neo-liberalisme. Karena paham tersebut merupakan sebuah ideologi sebagai dampak dari krisis kapitalisme. Dan tentunya seluruh sistem sosial.

Globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor globalisasi yakni perusahaan-perusahaan transnasional (TNC, Trans-National Corporations) dan Bank Dunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat di World Trade Organization (WTO, Organisasi Perdagangan Dunia) sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang dikenal dengan sebutan “neo-liberalisme”. Neo-liberalisme pada dasarnya tidak ada bedanya dengan liberalisme. Para penganut neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil normal “kompetisi bebas”. Mereka percaya bahwa ‘pasar bebas’ itu efisien, dan cara yang tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa menjadi indikator apakah sumberdaya telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah, berarti persediaan memadai. Harga mahal artinya produksinya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa neo-liberalisme tidak ingin pemerintah ikut campur tangan dalam ekonomi. “Serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar”, demikian keyakinan mereka. Keputusan individual atas interest pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari

---

<sup>154</sup> Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LP3ES, 1984. hlm. 277.

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

*invisible hand* (tangan yang tidak tampak), sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut pada akhirnya akan *trickle down* (menetes ke bawah) kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau perlu jangan dipajaki.

Krisis berkepanjangan yang menimpa kapitalisme awal abad 19, yang berdampak depresi ekonomi 1930-an berakibat tenggelamnya paham liberalisme. Pendulum beralih memperbesar pemerintah sejak Roosevelt dengan “*New Deal*” tahun 1935. Tetapi dalam perjalanan kapitalisme, di akhir abad 20 pertumbuhan dan akumulasi kapital menjadi lambat. Kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dan pasar bebas, dengan memberlakukan perlindungan hak milik intelektual, *good governance* (pemerintahan yang baik), penghapusan subsidi dan program proteksi rakyat, deregulasi, penguatan *civil society*, program anti-korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neo-liberalisme. Neo-liberalisme sesungguhnya ditandai dengan kebijakan pasar bebas, yang mendorong perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan “parasit” pemerintah, yang tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberal adalah “Liberalisasikan perdagangan dan keuangan”, “Biarkan pasar menentukan harga”, “Akhirilah inflasi, Stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi”, “Pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan”. Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan “*consensus*” yang dipaksakan yang dikenal dengan “Globalisasi”, sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal “*The Neo-Liberal Washington Consensus*”, yang terdiri dari para pembela ekonomi swasta terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Pokok-pokok pendirian neo-liberal meliputi, *pertama*, bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi, harga serta biarkan perusahaan itu mengatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan. *Kedua*, hentikan subsidi Negara kepada rakyat karena bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Negara harus melakukan swastanisasi semua perusahaan Negara, karena perusahaan Negara dibuat untuk melaksanakan subsidi Negara pada rakyat. Ini juga menghambat persaingan bebas. *Ketiga*, hapuskan ideologi “kesejahteraan bersama” dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat “tradisional” karena menghalangi pertumbuhan. Serahkan manajemen sumberdaya alam kepada ahlinya, bukan kepada masyarakat “tradisional” (sebutan bagi masyarakat adaptif) yang tidak mampu mengelola sumberdaya alam secara efisien dan efektif.

## I. TEORI SISTEM DUNIA

Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, merupakan reaksi atas teori ketergantungan yang dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Dalam perspektif sistem dunia, setiap Negara atau kawasan dilihat sebagai entitas yang tak terpisahkan dari sistem dunia seperti sistem ekonomi global. Berdasarkan pandangan ini, fenomena mobilitas antar Negara merupakan dampak dari proses perkembangan ekonomi kapitalis di berbagai Negara. Semenjak kapitalisme tumbuh dan berkembang ke luar dari Negara intinya di Eropa, Amerika Utara, Oceania dan Jepang, belahan bumi ini seolah-olah

terus membesar tanpa batas yang jelas dan akhirnya melahirkan suatu masyarakat yang global.<sup>157</sup>

Immanuel Wallerstein mendefinisikan sistem dunia sebagai “*A Unit With A Single Division of Labour And Multiple Cultural System*”.<sup>158</sup> Ini merupakan sistem yang lahir dari proses transformasi struktural yang pernah ada dalam sejarah. Dalam bahasa Wallerstein, sistem ini merupakan sistem yang menyejarah (*Historical System*): suatu sistem yang dengan isinya lahir, berkembang dan mati serta timbul kembali sebagai akibat adanya semacam proses pembagian kerja terus-menerus dan lebih canggih. Dalam perkembangan itulah Wallerstein menyebut adanya 3 sistem yang menyejarah: Sistem Mini (*The Mini System*), Sistem Kekaisaran Dunia (*The World Empires*) dan Sistem Ekonomi Dunia (*The World Economic System*).

Farchan Bulkin menyebutkan empat hal mengapa pendekatan sistem dunia penting dalam memahami dunia ketiga. *Pertama*, sebagai usaha untuk meletakkan perkembangan politik dan ekonomi dunia ketiga ke dalam pergolakan ekonomi dan politik, serta dinamika dan potensi untuk perubahan dan transformasinya. Hal ini menjadi penting mengingat hampir sebagian besar Negara dunia ketiga telah terintegrasi ke dalam pergolakan dan ekonomi dunia. *Kedua*, watak dan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Negara dunia ketiga juga bisa diuraikan logikanya dan diurut pertumbuhannya dalam kaitannya dengan interaksinya dengan perekonomian dunia. *Ketiga*, pendekatan sistem dunia telah menawarkan suatu logika atas perbedaan-perbedaan substansial antara kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh di wilayah kapitalisme pusat dan pinggiran (*peripheri*), sehingga hubungan-hubungan antara kekuatan-kekuatan di kedua wilayah menjadi jelas, sekalipun tidak langsung dan masing-masing memainkan perannya dalam jaringan sistem ekonomi dunia. *Keempat*, dengan pendekatan ini kita dapat menempatkan kekuatan-kekuatan politik di dunia ketiga dalam suatu dinamika perubahan yang menyeluruh dan global sifatnya.<sup>159</sup>

Proyek perang Amerika atas Irak memiliki kecenderungan imperialistik, perang ini sejak awal tidak dilandasi oleh sebuah alasan masuk akal yang bisa digunakan untuk membenarkan invasi bersenjata sebuah Negara terhadap Negara lain. Karena perang tersebut dalam banyak Hal bersandar pada kepentingan Amerika untuk mempertahankan dominasinya dalam dunia internasional. Kepentingan untuk memperoleh keuntungan, terutama atas minyak, pembangunan ekonomi pasca perang, dan kontrol serta penguasaan terhadap pemerintah Irak yang baru oleh pemerintah Bush atau Amerika tanpa batas waktu. Dalam politik internasional, imperialisme sering didefinisikan sebagai penguasaan satu Negara kuat atas suatu wilayah atau Negara yang lebih lemah dengan maksud untuk mengambil dan menguasai penduduknya. Dalam pandangan kaum sosialis, imperialisme tidak dapat dipisahkan dari ideologi kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat dan sekutunya, orang-orang kapitalis harus menguasai dan mengeksploitasi wilayah atau Negara lain agar modal atau kapital yang dimiliki tetap berjumlah banyak. Pandangan ini pernah secara eksplisit dikatakan Vladimir Ilych Lenin, pencetus Revolusi Bolshevik di tahun 1917 dan pendiri Republik Sosialis Uni Sovyet dalam bukunya *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism* yang terbit di tahun 1919. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa Negara-negara kapitalis harus menjadi imperialis untuk mempertahankan pasar atas barang mereka dan akses atas sumberdaya alam. Bahwa penguasaan Negara kuat atas Negara lemah akan menyebabkan perang. Perang juga dapat ditimbulkan karena persaingan antar Negara kapitalis dalam memperebutkan wilayah jajahan. Irak dipilih sebagai Negara tujuan untuk dikuasai mengingat Negara ini mempunyai banyak kelebihan yang diperlukan untuk mempertahankan kebesaran Amerika. Cara-cara Amerika untuk menguasai dunia termasuk Irak bukan terjadi demikian saja, tetapi penuh dengan perencanaan dan strategi dalam kerangka politik global.

<sup>157</sup> Lihat M. Arif Nasution, *Globalisasi & Migrasi Antar Negara*, Penerbit Alami, Bandung, 1999, hlm. 65

<sup>158</sup> Wallerstein, seperti dikutip Roland H Chilcote, *Theories of Development and Under-Development*, Westview Press, Colorado, 1994, hlm. 94

<sup>159</sup> Frachan Bulkin, dalam pengantarnya untuk *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1985

Teori Sistem-Dunia adalah perspektif makrososiologi yang berupaya menjelaskan dinamika “ekonomi dunia kapitalis” sebagai sistem yang bersifat total”. Pendekatan ini dipakai oleh Immanuel Wallerstein terutama melalui karya *The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis* (1974). Pada 1976 Wallerstein mempublikasikan bukunya berjudul *The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Dengan karya tersebut Wallerstein memberikan kontribusi besar di dalam pemikiran sejarah dan sosiologi dan memancing berbagai respon dan inspirasi bagi pemikir lainnya.<sup>160</sup>

Konsep-konsep utamanya dan juga blok bangunan intelektualnya berhasil menancapkan dampak sekaligus sambutan hangat dari negara-negara berkembang. Kajian Wallerstein mencakup sosiologi sejarah dan sejarah ekonomi. Karena tekanannya yang begitu besar terhadap pembangunan dan ketimpangan antar bangsa-bangsa, maka teori-teorinya dianut oleh para teoritikus dan praktisi pembangunan. Kombinasi ini membuat Proyek Sistem-Dunia bermakna intelektual sekaligus politik. Selain itu, pendekatan Wallerstein bersifat praxis, dalam arti antara teori dan praktek saling berkorelasi. Sementara itu tujuan aktifitas intelektual adalah menciptakan pengetahuan yang membongkar struktur-struktur tersembunyi yang memungkinkan seorang intelektual bertindak dan merubah dunia.

Metode Wallerstein seringkali diasosiasikan dengan sejarah dan sosiologi interpretatif, dan secara metodologis karya-karyanya berada di antara Marx dan Weber.

Wallerstein lahir pada 1930 di New York. Dia masuk Universitas Columbia dan meraih gelar BS, MA and PhD di sana. Mentor utamanya adalah C. Wright Mills. Dari Mill tersebut, Wallerstein belajar soal sensitifitas historis, soal makrostruktur, dia menolak liberalisme dan, dalam beberapa hal, Marxisme. Untuk beberapa saat, Wallerstein pernah tinggal di Paris. Di sana dia dipengaruhi oleh dua arus intelektual utama: kelompok sejarawan Annales dan gagasan politik radikal. Paris saat itu merupakan pusat radikalisme politik dan intelektual di antara masyarakat Afrika, Asia dan Amerika Latin, dan menjadi penantang utama empirisme dan liberalisme Anglo-Amerika. Dalam penelitiannya di Afrika, Wallerstein bersentuhan dengan dunia ketiga, dan dia menulis disertasinya mengenai proses pembentukan nasionalisme di Afrika Barat. Penelitiannya mengenai dunia ketiga berdampak besar terhadap karyanya. Dalam pengantar bukunya *The Modern World System*, Wallerstein menyatakan “*In general, in a deep conflict, the eyes of the downtrodden are more acute about the reality of the present. For it is in their interest to perceive correctly in order to expose the hypocrisies of the rulers. They have less interest in ideological deflection.*” (p. 4).

Karya Wallerstein berkembang ketika teori modernisasi dan pembangunan diserang habis-habisan. Sementara dia mengaku bertujuan menciptakan suatu penjelasan alternatif sebagai kritik terhadap teori-teori tersebut. Wallerstein sendiri bertujuan membangun “perbedaan konseptual yang jelas dengan teori-teori modernisasi dan lalu memberikan paradigma teoritik yang baru untuk menginvestigasi muncul dan berkembangnya kapitalisme, industrialisme dan negara-negara nasional” (Skocpol, 1977, p 1075). Kritisismenya terhadap modernisasi meliputi: (1) reifikasi negara bangsa sebagai unit inti analisis, (2) asumsi bahwa semua negara hanya bisa mengikuti jalan perkembangan evolusioner yg tunggal, (3) mengesampingkan perkembangan sejarah dunia dari struktur transnasional yang membatasi perkembangan lokal dan nasional, (4) menjelaskan tipe-tipe ideal ahistoris tentang “tradisi” versus “modernitas, yang dielaborasi dan diterapkan dalam kasus-kasus nasional.

Di dalam merespon teori modernisasi, Wallerstein menyusun agenda penelitian dengan 5 tema utama. (1) fungsi ekonomi-dunia kapitalis sebagai sebuah sistem, (2) bagaimana dan mengapa asal muasalnya, (3) bagaimana relasinya dengan struktur-struktur kapitalis pada abad-abad terdahulu, (4) kajian komparatif terhadap mode-mode produksi alternatif, dan (5) proses transisi menuju sosialisme (Goldfrank, 2000, Wallerstein, 1979).

---

<sup>160</sup> Herry Haryanto Azumi, *Immanuel Wallerstein, World-System & Geopolitics Global*, Makalah Bahan Kajian di Gedung NU, 11 Agustus 2006.



Ada 3 blok bangunan intelektual dari teori Sistem-Dunia yang dirujuk Wallerstein: Sekolah Annales, Marx dan Teori Ketergantungan (dependency theory). Blok bangunan ini diasosiasikan dengan pengalaman hidup Wallerstein dan keterlibatannya di dalam berbagai isu, teori dan situasi. Teori Sistem-Dunia berutang pada Sekolah Annales yang diwakili oleh Fernand Braudel mengenai pendekatan kesejarahan (historical approach). Wallerstein mengambil gagasan Braudel perihal *la long duree* (long term). Dia juga melakukan studi dengan fokus pada kawasan geoeologis sebagai unit analisis, sejarah pedesaan, dan keyakinan pada material empiris dari Braudel. Dampak Annales ini bagi Wallerstein terletak pada level metodologis.

Dari Marx, Wallerstein belajar bahwa (1) realitas fundamental konflik sosial berbasis pada kelompok manusia, (2) konsen dengan totalitas yang relevan, (3) hakikat transiter bentuk-bentuk sosial dan teori-teori tentangnya, (4) sentralitas proses akumulasi yang menghasilkan perjuangan kelas secara kompetitif, dan (5) dialektika gerak melalui konflik dan kontradiksi. Melalui kajian ini, ambisi Wallerstein adalah hendak merevisi Marxisme itu sendiri.

Teori Sistem-Dunia juga mengadaptasi teori ketergantungan (dependency theory). Dari teori ini Wallerstein menjelaskan pandangan neo-Marxis mengenai proses pembangunan, yang populer di negara-negara berkembang dan diantara tokohnya adalah Fernando Henrique Cardoso. Teori dependensia memahami “peripheri”. dengan cara melihat relasi pusat-pinggiran yang tumbuh di kawasan periperal seperti Amerika Latin. Dari sanalah kritik terhadap kapitalisme global sekarang ini berkembang.

Pengaruh penting lainnya adalah Karl Polanyi dan Josep Schumpeter. Dari sini Sistem-Dunia tertarik pada lingkaran bisnis, dan juga gagasan mengenai tiga mode organisasi ekonomi: yakni mode reciprok, mode redistribusi dan pasar. Tiga mode ini analog dengan konsep Wallerstein mengenai *mini-system*, *world-system* dan *world-economy*.

## J. MARXISME, TEORI KRITIS DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam studi ilmu-ilmu Sosial membahas perspektif Marxisme dan Teori Kritis secara bersamaan, berarti menganalisis sebuah bangun pemikiran (*school of thoughts*) yang memiliki kecenderungan sama; baik akar filsafatnya, karakter pemikirannya, dan proyek masa depan yang bersifat emansipatoris. Dalam kategori Femia, Teori Kritis ditempatkan sebagai ‘kelanjutan’ dari Marxisme [orthodoks], bukan hanya karena para pemikir teori kritis banyak menggunakan kritik Marx terhadap kapitalisme (konsep keterasingan dan fethisme) melainkan tetap juga memiliki kepentingan (sama dengan Marxisme melalui revolusi proletariat) untuk mengemansipasi struktur sosial yang timpang tersebut.<sup>161</sup> Sementara itu, Fakih menempatkan kedua perspektif tersebut kedalam apa yang disebut ‘teori ilmu sosial kritis.’<sup>162</sup>

Tulisan ini akan mencoba mengurai dasar-dasar pemikiran Marxisme, bagaimana perkembangannya yang ‘melahirkan’ Teori Kritis, dan bagaimana keduanya menganalisis Studi Hubungan Internasional, berikut persamaan dan perbedaannya. Menempatkan Teori Kritis sebagai ‘kelanjutan’ dari Marxisme, bagi penulis adalah penting, selain karena kedua perspektif tersebut memiliki keterhubungan, dalam konteks Hubungan Internasional-pun, Istilah ‘Teori Kritis’ juga digunakan oleh para ilmuwan Hubungan Internasional untuk menjelaskan sejumlah perspektif yang didalamnya termasuk; Marxisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt, dan Teori Kritis yang dekat dengan pemikiran-pemikiran Gramsci [Neo-Gramscian].<sup>163</sup>

<sup>161</sup> Joseph V. Femia, 2001, *Marxisme dan Komunisme, dalam Ideologi Politik Kontemporer*, editor Eatwell & Anthony Wright (terj), Yogyakarta: Penerbit Jendela. Disadur dari <http://www.timurmatahari.com>

<sup>162</sup> Mansour Fakih, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

<sup>163</sup> Martin Griffiths, 2001, *Lima Puluh Pemikir Studi hubungan Internasional*, terj. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sterling-Folker, Jennifer, 2006. *Making Sense of Internatioanl Relations Theory*, London: Lynne Rienner Publishers

## [1] Marxisme

Perspektif ini merujuk pada pemikiran-pemikiran Karl Marx (1818-1883). Marx banyak menganalisis mengenai perubahan-perubahan struktur ekonomi-politik di abad kesembilan belas, transformasi dari corak produksi feodalisme menuju kapitalisme. Berbeda dengan para pemikir sebelumnya (Adam Smith dan David Ricardo)—kedua tokoh tersebut sangat mempengaruhi pemikiran Marx—yang menganggap bahwa hubungan produksi dalam masyarakat kapitalis bersifat dinamis dan saling-menguntungkan, Marx justru menganggap bahwa hubungan produksi tersebut bersifat timpang dan eksploitatif.<sup>164</sup> Kapitalisme (sebagaimana Feodalisme) merupakan gerak dialektik yang menyejarah dari hubungan produksi dan menempatkan masyarakat kedalam dua bentuk kelas sosial yang bersifat antagonistik, yakni kelas Burjois (pemilik modal) dan kelas Buruh (Pekerja).

Teori *surplus value* ini adalah kontribusi penting Marx untuk melihat eksploitasi dan pencurian terhadap buruh yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Intinya adalah, adanya perbedaan antara kemampuan bekerja yang dibeli oleh majikan dengan pembelanjaan actual dari energi manusia dan keahlian, yang dimiliki oleh buruh ketika bekerja. Pada akhirnya, teori ini berpandangan bahwa dalam sistem kapitalis pemilik modal selalu mengupah buruh dengan harga yang kurang dari nilai yang diciptakan kemampuan tersebut digunakan dan komoditi diproduksi. Posisi buruh yang lemah dalam struktur kapitalis ketika berhadapan dengan pemilik modal, membuat situasi eksploitasi semakin besar.

Kapitalisme pada akhirnya akan mengakibatkan konsentrasi modal yang besar ditangan para kapitalis dan menyebabkan meluasnya kemiskinan dan pengangguran. Eksploitasi yang kejam terhadap kelas pekerja akan menimbulkan perlawanan dan solidaritas sesama kelas pekerja. Dalam kondisi yang penuh kontradiksi ini, kelas pekerja akan mengorganisir dirinya untuk mengambil-alih kepemilikan alat-alat produksi dari tangan pemilik modal, dan yang pada akhirnya mengubah seluruh relasi dan struktur produksi secara fundamental melalui sebuah revolusi sosial.

Pada titik ini, Marx adalah orang pertama yang menerapkan 'dialektika-materialisme-historis' untuk menganalisis fase-fase perkembangan masyarakat. Berbeda dengan idealisme Hegel, Marx memandang bahwa fase perkembangan masyarakat dipenuhi oleh kontradiksi antara kekuatan-kekuatan produksi. Kontradiksi tersebut melahirkan krisis, memicu terjadinya revolusi dan pada akhirnya membentuk sebuah formasi baru dalam tahap perkembangan masyarakat.

Bagi Marx, hubungan produksi juga merupakan landasan bagi masyarakat, tempat ditegakannya supra-struktur hukum dan politik, dan menghubungkan bentuk-bentuk kesadaran tertentu. Sistem hukum, lembaga politik dan kebijakan hanyalah mengabdikan pada hubungan kelas yang ada. Kesadaran umum masyarakat – ide, nilai – dibentuk oleh hakekat produksi.<sup>165</sup> Dengan kata lain, setiap fase sejarah selalu mencerminkan hubungan-hubungan produksi dan pertarungan kelas (terbagi menjadi dua dan bersifat antagonistik), bahwa kondisi material tersebutlah yang akan menghasilkan kesadaran.

Dititik ini, Marx sangat 'mengagungkan' determinisme ekonomi sebagai penggerak perubahan dalam struktur sosial-politik masyarakat. Dengan kata lain, dari sudut pandang materialisme historis, sejarah direduksi hanya sebagai manifestasi dari mode produksi. Sejarah bisa dianalisis sebagai proses objektif evolusi, tidak memiliki hubungan dengan kita dan apa yang kita perbuat, dan tunduk pada hukum-hukum yang tak terelakan.<sup>166</sup> Perubahan pada level mode of production (basis struktur) adalah determinan utama yang mempengaruhi perubahan pada level supra-struktur (ideologi, politik, sosial, kebudayaan, hukum). Konsekuensinya, fase

<sup>164</sup> Mochtar Mas'ood, 1998, *Merkantilisme dan Strukturalisme: Gagasan anti-liberal, dalam Perspektif Ekonomi-Politik dalam Studi Hubungan Internasional*, Bahan Matrikulasi, Program Pasca Sarjana Konsentrasi Studi Hubungan Internasional, UGM.

<sup>165</sup> Joseph V. Femia, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 144.

<sup>166</sup> Muhadi Sugiono, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 23.

menuju masyarakat komunisme sebagai 'akhir sejarah' (meminjam 'roh absolut' Hegel) adalah kemutlakan sejarah – sebuah Darwinisme Sosial.

Pada perkembangannya, pemikiran-pemikiran Marx tersebut berkembang menjadi suatu pandangan-dunia yang sistematis dan komprehensif yang menginspirasi banyak orang, baru muncul ketika Marx wafat–Marxisme.<sup>167</sup> Empat orang yang berperan besar untuk menjadikannya marxisme adalah Engles, Kautsky, Plekanov dan Lenin. Ketiga tokoh awal lebih banyak memfokuskan dirinya untuk mengembangkan Materialisme-Dialektika-Historisnya Marx menjadi semacam doktrin 'sains sosial'. Determinisme ekonomi dikembangkan dengan mendasarkan pada hukum-hukum mutlak gerak materi pada alam. Akibatnya, Marxisme 'berubah' menjadi sangat 'ilmiah' dan berkarakter positivisme. Hal ini juga lah yang akhirnya menguatkan persepsi para Marxist orthodox mengenai kemutlakan komunisme–ideologi gerakan buruh dibawah panji Sovyet–dan melahirkan beragam kritik dari 'dalam', terutama para 'Marxist Barat'; Gramsci dan para teoritis Mazhab Frankfurt.

Disaat yang sama, Lenin (tokoh revolusi Rusia, 1917) mengembangkan sebuah teori yang sangat menarik mengenai Imperialisme – sebuah teori yang juga sangat berpengaruh dalam studi ilmu hubungan internasional. Dengan merujuk pada fenomena Perang Dunia I, Lenin memandang bahwa imperialisme berhubungan perkembangan internal kapitalisme serta hubungan antara negara maju dengan negara terbelakang. Fase kapitalisme internasional ini ditandai dengan (1) tumbuhnya monopoli, (2) bertambahnya kontrol lembaga-lembaga keuangan atas industri, (3) mengalirnya modal ke negara terbelakang untuk mengeksploitasi buruh murah dan terbelakang, (4) kontrol politik (neo-kolonial) yang langsung atau tidak langsung terhadap negara-negara yang kurang berkembang oleh kekuatan-kekuatan kapitalis.

Dengan kata lain, imperialisme sesungguhnya didorong oleh perkembangan dan krisis internal kapitalisme. Eksploitasi terhadap negara-negara jajahan adalah cara untuk untuk menghasilkan laba tinggi dan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, tenaga buruh yang murah, dan dengan begitu mampu menghindari krisis internal kapitalisme akibat merosotnya tingkat keuntungan dan over-produksi. Kemerosotan ekonomi dan pertumbuhan monopoli merupakan dua kata kunci yang mendorong terjadinya imperialisme.

Dengan demikian, teori imperialisme sesungguhnya hanya memindahkan pertarungan kelas yang bersifat domestik menjadi internasional–teori semacam inilah yang pada perkembangannya banyak mempengaruhi para sarjana Hubungan Internasional, semisal Wallerstein dengan 'Teori Sistem Dunia' dan para penganut teori Dependensia. Lebih lanjut, persaingan negara-negara kapitalis untuk merebut tanah jajahan memicu ketegangan internasional dan perang. Bagi Lenin, perang tersebut adalah indikasi bagi kemunduran (kehancuran) kapitalisme internasional–sebuah pandangan yang implisit merujuk pada kehancuran kapitalisme akibat perkembangan sejarah.

## [2] Menuju 'Teori Kritis'

Perkembangan Marxisme [orthodox] yang terlampau ekonomistik dan mereduksi manusia hanya sebagai 'objek' dari struktur produksi yang ada, mendorong Gramsci (seorang Marxis Italia) untuk 'menambahkan' unsur subjektif dalam pendekatan Marxisme. Bagi, Gramsci sains sosial yang dikembangkan oleh Marxisme orthodox, mendistorsi peran-peran manusia sebagai 'agen', dimana fluktuasi ideologi dan politik hanya merupakan ekspresi dari basis struktur (ekonomi).<sup>168</sup>

Lebih lanjut, Gramsci berpendapat bahwa bertahannya kapitalisme dari krisis internalnya, bukan semata-mata karena mampu memperbaiki hubungan-hubungan produksinya menjadi fleksibel melainkan karena mampu membangun konsensus mengenai universalisasi ide-ide kapitalisme dengan kelompok subordinat. Artinya, manipulasi melalui mekanisme sosialisasi seperti media massa mengenai keunggulan spritual dan kultural kelas penguasa

<sup>167</sup> Joseph V. Femia, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 148.

<sup>168</sup> Muhadi Sugiono, 1999, *Op. Cit.*, hlm. 22.

menjadikan kelas subordinat secara tak sadar menerima ketertindasan tersebut. 'Perang ide' merupakan gambaran Gramsci mengenai kondisi ini.<sup>169</sup>

Dalam konteks ini, Gramsci kemudian mengembangkan apa yang disebutnya sebagai 'hegemoni'; seluruh kompleks aktivitas praktis dan teoritis dimana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi juga berusaha memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai. Artinya, sebuah hubungan hegemonik akan terjadi apabila kelompok berkuasa mendapat legitimasi dari kelompok subordinat atas subordinasinya. Legitimasi tersebut tidak ditantang karena baik ideologi, nilai, kultur diinternalisasikan sedemikian rupa sebagai 'milik' kelompok tertindas.

Pada perkembangannya, terminologi teori kritis lebih banyak dihubungkan dengan pandangan *Frankfurt School* (Mazhab Frankfurt), seperti, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benyamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm dan Jürgen Habermas. Implisit dari karakter pemikiran mereka ialah upaya untuk membangun emansipasi manusia terhadap modernitas dan kemajuan kapitalisme yang 'menghancurkan' potensi kemanusiaan.

Karakter emansipatoris teori kritis tercermin melalui beberapa syarat, yaitu; a) bersikap kritis dan curiga terhadap zamannya; b) berpikir secara historis, berpijak pada masyarakatnya dalam kondisi yang 'historis'; c) tidak memisahkan teori dari praktek, tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang objektif.<sup>170</sup> Dengan demikian, teori kritis lebih bersifat reflektif (yaitu, 'membongkar' segala bentuk tatanan sosial yang dominatif, timpang, tidak adil dan tidak setara) ketimbang mengutamakan objektivitas ilmu pengetahuan. Pada titik ini, teori kritis sebenarnya berposisi dengan pandangan kaum behaviorisme yang menekankan pada positivisme ilmu pengetahuan, bebas nilai, objektivitas dan perbedaan tegas antara subjek (peneliti) dan objek (yang diteliti), sehingga oleh beberapa ilmuwan teori kritis dikategorisasikan kedalam postbehavioralism.

Kemunculan teori kritis adalah 'reaksi' dan kritik terhadap positivisme ilmu pengetahuan yang sangat dijunjung oleh kaum behaviorism. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kehadiran teori kritis bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa melainkan hasil dialektika dari pelbagai pemikiran tradisi kritis sebelumnya – sebuah perpaduan apik dari pemikiran Kant, Hegel, Marx dan Psikoanalisis Freud; Kant memahami kritik sebagai upaya untuk mengenal keterbatasan rasio dalam setiap klaim pengetahuan; Hegel memahami kritik sebagai refleksi diri atas berbagai rintangan, tekanan, dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan-diri dari rasio dalam sejarah; Marx memahami kritik sebagai usaha-usaha emansipatoris dari penindasan dan usaha-usaha alienasi yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, sementara Freud memahami Kritik sebagai pembebasan individu dari irrasionalitas, dari ketidaksadaran menjadi sadar.

Horkheimer menyebutnya Teori Kritis (sebagai pembeda atas Teori Tradisional – Behaviorisme), yang setidaknya memiliki empat karakter, yaitu; pertama, teori kritis bersifat historis, artinya diperkembangkan oleh berdasarkan situasi masyarakat yang konkret dan berpijak di atasnya; kedua, teori kritis disusun atas kesadaran akan keterlibatan para pemikirnya; ketiga, teori kritis memiliki kecurigaan kritis terhadap masyarakat aktual; dan keempat, teori kritis itu merupakan teori yang bersifat praktis.<sup>171</sup>

### [3] Marxisme dan teori Kritis dalam Studi Hubungan Internasional

Dalam studi Hubungan Internasional, kedua perspektif ini memiliki kecenderungan yang sama, yakni sikap kritisnya terhadap kapitalisme internasional, yang eksploitatif dan timpang. Bahkan tak jarang digunakan secara 'bersamaan' untuk menganalisis dominasi sistem kapitalis dunia, sumber-sumber ketidakadilan struktural yang terdapat dalam sistem

<sup>169</sup> Joseph V. Femia, 2001, *Op. Cit.*

<sup>170</sup> Doni Gaharal Adian, 2005, *Percik Pemikiran Kontemporer; Sebuah Pengantar Komprehensif*, Bandung: Jalasutra.

<sup>171</sup> Fransisco Budi Hardiman, 2004, *Kritik Ideologi; Menyingkap Kepentingan Ilmu Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Buku Baik.

internasional, merefleksikan secara kritis kondisi-kondisi historis yang mendasari ketidakadilan tersebut, kekuatan-kekuatan material dan ideologis yang mempertahankannya, dan berupaya untuk menciptakan kekuatan-kekuatan potensial yang memungkinkan terjadinya transformasi radikal struktur internasional yang lebih adil.<sup>172</sup>

Selain itu, baik Marxisme maupun Teori Kritis memiliki kecenderungan untuk membangun konstruksi baru tatanan internasional yang memungkinkan tercapainya emansipasi universal. Jika perspektif Marxisme melalui Immanuel Wallerstein lebih menekankan pada upaya untuk menciptakan tata ekonomi dunia yang berkeadilan ekonomi dan politik, melalui gerakan sosial nasional menuju skala global, upaya untuk mencapai emansipasi universal tersebut bagi kelompok Teori Kritis, dapat dilakukan dengan membongkar diskursus dominan yang menguasai sistem internasional sekaligus mensubordinasi kelas sosial tertentu untuk mewujudkan seluruh kapasitas potensialnya.

Perbedaan pokok diantara keduanya ialah, jika Marxisme lebih menekankan pada analisis ekonomi (perdagangan internasional) untuk membongkar berbagai ketimpangan dalam sistem kapitalis dunia, dan 'mengabaikan' peran ide/subjek (manusia), Teori Kritis lebih memfokuskan dirinya pada 'agen', yakni berupaya untuk menjelaskan bagaimana peran agen (ide/diskursus) dan hubungan-hubungan intersubjektif (melibatkan individu, kelas sosial tertentu) yang berupaya untuk 'melanggengkan' kekuasaan politik tertentu – dititik ini, penulis melihat bahwa Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional berada dalam konteks untuk 'mengenapi' beberapa hal yang tak mampu dijangkau oleh Marxisme.

Teori '*Modern World System*' oleh Wallerstein, seringkali direpresentasikan sebagai salah satu pendekatan Marxisme dalam memahami ekonomi-politik internasional. Menurut Wallerstein, ekonomi dunia merupakan satu-satunya sarana pengorganisasian dalam sistem internasional. Sistem dunia modern itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut; suatu mekanisme pembagian kerja tunggal dimana masing-masing negara saling tergantung pada pertukaran ekonomi; penjualan produk dan barang untuk memperoleh keuntungan; dan yang terakhir adalah, pembagian dunia kedalam tiga wilayah fungsional atau unit-sosio ekonomi, yang sesuai dengan peran yang dimainkan oleh negara dari masing-masing wilayah tersebut didalam ekonomi internasional.<sup>173</sup> Ketiga wilayah tersebut terdiri dari *core*, *semi-periphery* dan *periphery*. Yang kaya dari wilayah *core* (Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang) digerakan atas penderitaan wilayah *periphery* (Dunia Ketiga).<sup>174</sup> Sementara wilayah *semi-periphery* adalah perantara dari dua kutub wilayah tersebut.

Secara umum Wallerstein, memandang bahwa politik kekuasaan dan perbedaan yang ada di dunia ini ditentukan oleh struktur ekonomi dunia yang bercorak kapitalistik. Negara-negara inti berupaya sedemikian rupa untuk untuk memaksimalkan keuntungan ekonominya atas eksploitasi terhadap negara-negara pinggiran. Dengan demikian, politik global sesungguhnya ditentukan oleh kepentingan para kapitalis internasional untuk memonopoli pasar dan sengaja menciptakan ketergantungan bagi negara-negara pinggiran. Teori ini juga menekankan pada konsep 'unequal exchange' (pertukaran tak seimbang) antara pusat dan pinggiran yang memungkinkan negara-negara pusat untuk menyerap nilai-lebih dari negara pinggiran karena adanya 'perbedaan dalam upah'.<sup>175</sup>

Kritik terhadap struktur ekonomi global juga datang dari kelompok Dependensia (Gunder Frank, Codoso, Dos Santos) secara umum kelompok ini mempermasalahkan ketergantungan ekonomi negara-negara Amerika Latin terhadap struktur ekonomi 'eksternal', yang menyebabkan *underdevelopment* di kawasan tersebut. Ketergantungan tersebut disebabkan oleh integrasi penuh negara-negara Amerika Latin kepada sistem kapitalis global. Sistem perdagangan yang tak seimbang antara center dan periphery merupakan salah satu objek

<sup>172</sup> Martin Griffiths, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 147.

<sup>173</sup> Mochtar Mas'oed, 1998, *Op. Cit.*

<sup>174</sup> Robert Jackson & Sorensen, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>175</sup> Bonnie Setiawan, 1999, *Peralihan Kapitalisme ke Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

analisis dari kelompok ini untuk membongkar struktur kapitalisme internasional yang bersifat eksploitatif—kondisi dimana hegemoni AS menjadi sangat dominan dalam struktur ekonomi-politik di kawasan ini.

Secara umum, kedua pemikiran ini mengadopsi pendekatan Marxisme terutama mengenai struktur imperial dalam tatanan internasional yang dikembangkan oleh Lenin. Kendati demikian, pemikiran tersebut tidak serta merta merefleksikan perspektif Marxisme secara penuh, mengingat pendekatan mereka yang lebih memfokuskan pada ketimpangan dalam struktur perdagangan internasional sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan para kapitalis internasional, ketimbang mempermasalahkan '*mode of production*'. Konteks ini jugalah yang kemudian banyak dikritik oleh para pemikir Marxist lainnya, yaitu kelompok 'produksi' yang lebih menekankan pada mode produksi sebagai cara untuk menganalisis peralihan kapitalisme ke negara-negara dunia ketiga.<sup>176</sup>

Disisi lain, Perspektif Marxisme yang berpandangan bahwa negara merupakan refleksi dari pertarungan kelas, dan menjadi 'alat' bagi kelas pemilik modal (berkuasa) untuk menjaga keamanan kekuasaannya, dengan sekaligus mensubordinasi pekerja (kelas tertindas) lewat aparatus negara. Maka dalam konteks Hubungan Internasional, Perspektif Marxisme juga memandang struktur internasional juga merupakan representasi dari kontradiksi kelas dalam batasan yang lebih luas. Kelas dominannya ialah kapitalisme internasional, yang beroperasi dengan memanfaatkan institusi internasional (lembaga keuangan dan perdagangan), pasar bebas, dan perkembangan teknologi. Dalam konsepsi Marxisme, globalisasi hanyalah bentuk lanjut dari perkembangan kapitalisme, yang pada masa lalu orang menyebutnya kolonialisme. Negara (baik *core-periphery*) bertugas untuk mengamankan kepentingan para kapitalis ini, begitu juga sistem internasional pun harus dikonstruksi sedemikian rupa untuk melanggengkan kepentingan kapitalisme internasional.

Sementara itu, seperti juga yang digambarkan sebelumnya, Teori Kritis dalam Hubungan Internasional dipengaruhi oleh dua bentuk pemikiran, yaitu Gramscian dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt.<sup>177</sup> Secara umum mereka menentang pandangan kaum realis dan liberalis yang sangat percaya bahwa struktur hubungan internasional (termasuk negara) merupakan sesuatu yang 'taken for granted'. Menurut mereka, realitas hubungan internasional merupakan cerminan dari hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial (material, ideologi, institusi) yang berada didalamnya. Olehnya, struktur internasional dipandang sebagai konstruksi kekuatan-kekuatan tersebut untuk mempertahankan kepentingannya.

Artinya, tidak ada politik internasional dan ekonomi global yang berjalan dengan hukum yang kekal. Segala sesuatu, termasuk hubungan internasional adalah historis sifatnya, sehingga dunia sosial merupakan konstruksi waktu dan tempat; sistem internasional merupakan konstruksi khusus dari negara-negara yang paling kuat. Sejak politik dunia dikonstruksi daripada ditemukan, tidak ada perbedaan mendasar antara subjek (analisis) dan objek (fokus analisis).<sup>178</sup> Karena bersifat emansipatoris, teoritis kritis dalam hubungan internasional berupaya mengkondisikan adanya kemungkinan transformasi global, yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk penindasan dalam hubungan internasional sehingga tercapai kebebasan universal dan kesetaraan

Berbeda dengan Marxisme yang lebih mengedepankan relasi ekonomi semata, Teori Kritis lebih banyak berhubungan dengan peran ide dan gagasan dalam membentuk formasi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mengukuhkan dominasi kelompok tertentu dalam struktur internasional. Bangun pengetahuan dan gagasan yang oleh kalangan Marxis tidak banyak dianalisis dan dianggap sekedar refleksi dari hubungan-hubungan produksi, oleh Teori Kritis dianggap bersifat 'otonom' dan turut mempengaruhi perkembangan kapitalisme (fleksibilitas kapitalisme dan berhasil melewati krisis internalnya); pemberhalaan terhadap konsumen (konsumen fetishism) dalam fase kapitalisme lanjut melalui reproduksi wacana

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Jennifer Sterling-Folger, 2006. *Op. Cit.*

<sup>178</sup> Robert Jackson, & Sorensen, 2005, *Op. Cit.*

konsumerisme, telah mendistorsi ide dan 'menghilangkan' kemungkinan terwujudnya revolusi sosial.

Sebagaimana pandangan dasar teori kritis mengenai karakter teori (pengetahuan) yang bersifat politis, para teoritikus kritis Hubungan Internasional memandang bahwa pengetahuan bukan dan tidak dapat netral secara moral maupun secara politik atau ideologi. Pengetahuan dengan demikian membuka suatu kecenderungan—sadar atau tidak—selalu merupakan (berisi) kepentingan, nilai-nilai kelompok-kelompok, golongan-golongan, kelas-kelas, bangsa-bangsa tertentu dan seterusnya. Dengan kata lain, tak ada satupun teori Hubungan Internasional yang bisa dikatakan bebas nilai—semuanya memiliki kepentingan.

Robert Cox menunjukkan pandangan tersebut dengan menyebutkan bahwa "teori selalu bagi seseorang dan untuk tujuan tertentu".<sup>179</sup> Dengan meminjam pembedaan teori (antara teori tradisional dan kritis) menurut Horkheimer, Cox kemudian membedakan teori hubungan internasional menjadi; pengetahuan penyelesaian masalah (*problem-solving knowledge*) dan pengetahuan emansipatoris (*emancipatory knowledge*). Bagi Cox 'pengetahuan penyelesaian masalah' bersifat konservatif, memandang struktur hubungan internasional bersifat *given*, dan hanya untuk mengetahui (menjelaskan) tatanan dunia yang ada saat ini.

Sebaliknya, pengetahuan emansipatoris memandang klaim pengetahuan seperti ini sesungguhnya menyiratkan berbagai kepentingan dari kekuatan sosial dalam struktur internasional. Sehingga klaim realist mengenai dunia yang anarki maupun liberalis mengenai 'desentralisasi sistem politik internasional' berada dalam konteks historis dan politis. Artinya, keduanya tak lebih dari refleksi kepentingan berbagai aktor untuk 'menguasai' struktur politik internasional—status quo internasional. Dengan kata lain, teori kritis tidak bersifat netral; politis dan etis, untuk membebaskan kemanusiaan dari struktur internasional yang 'menindas'.

Cox adalah orang yang menerapkan pendekatan Gramscian dalam studi Hubungan Internasional. Dengan mengembangkan konsep hegemoni Gramsci pada level internasional, Cox berpandangan bahwa tatanan dunia bersifat hegemonik (dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan hegemon). Sistem hegemonik ini dikonstruksikan sedemikian rupa oleh 'blok historis' tertentu (berupa negara, kelas sosial, institusi) untuk menjaga dominasinya dalam struktur internasional. Untuk menjamin dominasi tersebut, sebuah konsep universal mengenai tatanan dunia dikembangkan oleh negara hegemonik, sebuah tatanan yang dikonstruksi mampu berhubungan dengan kepentingan kebanyakan negara di dunia ini.

Lebih lanjut, hegemoni dalam hubungan internasional tidak hanya menyangkut tatanan antar negara, melainkan juga berhubungan dengan tatanan ekonomi dunia, dimana adanya penetrasi mode produksi dominan ke seluruh dunia dan mensubordinasi mode produksi lainnya. Hubungan internasional lebih merupakan refleksi dari hubungan antara kelas-kelas sosial dari berbagaimacam negara. Secara umum, tatanan dunia yang hegemonik, melahirkan berbagaimacam norma universal, institusi dan mekanisme, yang pada akhirnya menjadi aturan bersama yang mengatur hubungan-hubungan antar negara dan kelas sosial yang ada. Tentunya, aturan tersebut bertujuan untuk menyokong '*mode of production*' dominan.

Disisi lain, Teori Kritis yang dekat dengan pemikiran Habermasian (Mazhab Frankfurt) lebih banyak menekan pada upaya untuk menerapkan 'paradigma komunikasi' guna mendekonstruksi meta-narasi liberalisme yang menghilangkan realisasi potensial individu-individu. Bagi kelompok ini, kebenaran dan etika merupakan sesuatu yang inheren dalam bahasa, sehingga diperlukan ruang komunikasi ideal yang bebas dan setara, yang memungkinkan tercapainya konsensus rasional. Jika kelompok Gramscian lebih menekankan pada counter-hegemony dan gerakan sosial sebagai 'pemicu' emansipasi, maka teori kritis Habermasian lebih berfokus pada 'ketiadaan komunikasi'. Dengan demikian, teori kritis sesungguhnya percaya bahwa tatanan dunia bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal, abadi dan statis. Melainkan selalu berubah seiring dengan perubahan-perubahan kekuatan sosial didalamnya.

---

<sup>179</sup> Robert W Cox, 1983, *Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method*, Millenium: Jurnal of International Studies Vol 12 (2).

Dalam pandangan penulis, perbedaan mendasar antara kedua perspektif ini adalah secara epistemologi, Teori Kritis lebih bersifat konstruktivis dengan tetap merujuk pada tradisi-tradisi Marxisme. Sementara, Marxisme lebih bersifat positivis dan lebih menkankan pada analisis ekonomi dalam hubungan internasional. Ini juga lah yang membuat Marxisme sebenarnya berada pada posisi yang sama dengan Realisme dan Liberalisme, yakni kelompok behavioralisme dalam Hubungan Internasional. Namun demikian, menurut penulis dalam studi Hubungan Internasional, kedua perspektif ini terlihat sebagai suatu 'bangunan' pengetahuan yang saling menopang untuk menjelaskan 'realitas' tatanan internasional. Hal ini bukan berarti membangun generalisasi diantara keduanya, melainkan berpijak pada berbagai penjelasan diatas, bahwa baik para teoritis sistem dunia dan dependensia maupun para teoritis kritis dalam Hubungan internasional sangat kuat merujuk pada pemikiran-pemikiran Karl Marx mengenai struktur sosial dalam masyarakat.

## K. ANALISIS GEO-EKONOMI, GEO-POLITIK DAN GEO-STRATEGI

### [1] Napak Tilas Ekonomi Politik Orde Baru

Keberadaan rezim Orde Baru tidak lepas dari pergulatan dan pertarungan perebutan kekuasaan politik ditingkat global. Eric Nordlinger (1990) menyebut Keberadaan Orde Baru tidak lepas dari kudeta berdarah (*disguised of coup*) tahun 1965 yang disponsori negara-negara kapitalis untuk membendung perkembangan komunisme di Asia. Krisis ekonomi yang melanda rezim Orde Lama di bawah bendera “Nasionalisme-Sosialisme-Komunisme” (Nasakom) Soekarno, melahirkan secara prematur bayi tirani Orde Baru yang dibidani oleh agen-agen kapitalis. Tapi, bayi prematur ini akhirnya tumbuh menjadi bayi normal karena asuhan “tangan-tangan ajaib” negara kapitalis yang selalu memberinya makanan dan susu bergizi produksi mereka.

Orde Baru membangun kembali Indonesia yang tercabik krisis yang diwarnai kebangkrutan ekonomi dengan tingkat inflasi mencapai 650 persen dan pergolakan politik berdarah-darah dengan bantuan dukungan negara-negara kapitalis. Satu-satunya program pemulihan ekonomi yang yang dicanangkan pada masa awal pemerintahan Orde Baru adalah kebijakan menarik investor untuk mengalirkan modalnya ke Indonesia, bahkan dengan menerima semua persyaratan yang mereka tetapkan untuk merangsang mereka agar mau menanamkan investasi. Karenanya tak heran kalau tahun-tahun pertama berkuasanya Orde Baru ditandai dengan aturan dan kebijakan yang semuanya ditetapkan oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan konsultan asing yang pro paham kapitalis.

Alternatif ini menjadi pilihan praktis para ekonom Orde Baru untuk bisa segera keluar dari krisis dengan membuka diri pada investasi dan modal asing sebanyak-banyaknya.<sup>180</sup> Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas'od (1989), tentang bagaimana perjuangan dan upaya Orde Baru untuk mencari dukungan dana guna membiayai pembangunannya, bahkan sampai harus meminta-minta kepada negara-negara kreditor agar Indonesia diberi pinjaman utang. Apa yang menjadi cita-cita dari rezim sebelumnya tentang konsep “berdikari,” sama sekali diabaikan.<sup>181</sup> Persoalan riil yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah bagaimana

---

<sup>180</sup> Ada dua pilihan rezim Orde Baru pada masa-masa awal pembangunannya, pertama, membangun koalisi dengan sebuah partai politik dan dengan demikian memungkinkan bekerjanya sistem politik yang mendorong partisipasi rakyat; kedua, mereformasi kerangka konstitusional yang ada sedemikian rupa guna menciptakan satu kesepakatan baru. Dan Soeharto menolak pilihan pertama karena strategi itu bertentangan dengan kebijakan ekonominya yang berorientasi ke luar, sementara partai-partai itu adalah kebanyakan pendukung usahawan pribumi. Soeharto meyakini keberhasilan program pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang cepat telah dijamin oleh modal asing, perusahaan-perusahaan negara yang diaktifkan kembali, dan para pengusaha dalam negeri yang memiliki koneksi internasional, serta Angkatan Darat. Soeharto menganggap pengusaha pribumi tidak bisa diharapkan untuk memberi jaminan semacam itu, sehingga dukungan mereka tidak dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya lihat Mochtar Mas'od, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 128 dst.

<sup>181</sup> Dalam menentang pendekatan ‘kembali dengan Barat,’ Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 September 1966 memperingatkan bahwa, “nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri,” dan karena itu tidak boleh “meminta-minta” dalam usaha merehabilitasi ekonomi. *FEER*, 15 September 1966, dalam Mochtar Mas'od, 1989, *ibid.*, hlm. 79.



mencari sebanyak mungkin dana-dana pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja negara.<sup>182</sup>

Setidaknya ada tiga teori yang dijadikan pedoman kalangan intelektual Orde Baru tentang perlunya prioritas pembangunan ekonomi daripada pembangunan politik.<sup>183</sup> Pertama, mereka percaya dengan hipotesa Seymour M Lipset (1963: 2) bahwa, demokrasi politik didahului oleh pembangunan ekonomi. Hanya bangsa-bangsa yang telah mengalami pembangunan ekonomi tingkat tinggilah yang berhasil mencapai demokrasi liberal tingkat tinggi. Kedua, adalah pendapat Daniel Bell tentang “berakhirnya ideologi.” Pada dasarnya kemajuan-kemajuan teknologi telah membawa pembangunan ekonomi di Barat berhasil memecahkan masalah yang dihadapinya selama revolusi industri. Dan bangsa-bangsa Barat sekarang melihat politik yang didasarkan pada ideologi sebagai sesuatu yang ketinggalan jaman. Bahkan Bell menyatakan bahwa, politik masa kini adalah politik berdasarkan konsensus atau kesepakatan.

Ketiga, argumen yang diajukan Samuel P Huntington tentang akibat-akibat yang berbahaya dari mobilisasi sosial yang tidak terkendali dan pentingnya negara-negara yang kurang berkembang untuk terlibat langsung dalam pembangunan. karenanya, hal terpenting dari pendapat Huntington adalah perlunya pelembagaan politik. Agar dapat bertahan, pemerintah negara-negara baru harus mampu menyalurkan tuntutan rakyat terhadap partisipasi politik secara tertib.<sup>184</sup> Jadi pada paruh kedua 1960-an, kaum intelektual yang mendukung Orde Baru telah memiliki suatu dasar teoretis yang utuh untuk mengajukan suatu jenis politik baru yang bisa mendukung pembangunan ekonomi, yang “bebas dari konflik ideologis” serta didasarkan atas pragmatisme, rasionalitas, ketertiban, dan keahlian praktis.

Sebagai negara Dunia Ketiga yang mencapai kemerdekaannya pasca Perang Dunia II, keberadaan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Logika negara pembangunan Menurut Gerschenkron (1962), semakin terlambat suatu negara melakukan proses industrialisasi, maka semakin diperlukan campur tangan negara dalam proses pembangunannya. Artinya, jalan yang ditempuh negara industri generasi pertama (AS dan Eropa Barat) yang melakukan industrialisasi berbeda dengan negara-negara yang menyusul belakangan (Jerman, Jepang, Rusia, dan Asia Timur). Selain peran negara yang makin besar, jumlah modal yang harus dikumpulkan juga makin besar guna melakukan industrialisasi. Pada negara industri generasi pertama, proses industrialisasi membutuhkan modal relatif kecil sehingga dapat dijalankan oleh swasta, tanpa campur tangan negara. Pada negara industri generasi berikutnya, modal yang dibutuhkan makin besar sehingga negara terlibat proses industrialisasi. Keterlibatan negara dalam proses pembangunan ekonomi industri inilah yang disebut dengan model negara pembangunan (*model of developmental state*). Negara lalu terjun langsung dalam proses-proses ekonomi, seperti melakukan akumulasi kapital baik domestik maupun asing, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, mendorong terciptanya kelas pengusaha, dan melakukan regulasi aktif di sektor fiskal, finansial, moneter, dan perdagangan. Inilah yang membedakan antara lahirnya kapitalisme di Eropa Barat dengan

---

<sup>182</sup> Dalam mencari sumber pendanaan baik untuk menggerakkan roda perekonomian nasional yang hampir ambruk oleh krisis yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi yang mencapai 650 persen maupun untuk menutup defisit anggaran negara akibat utang yang sudah mencapai 3,1 milyar dollar AS dan sudah akan jatuh tempo sebesar 727,7 juta dollar AS, maka secara ekonomis pilihan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia guna mendapatkan *cash flow* besar dalam waktu singkat adalah pilihan yang menguntungkan bagi rezim Orde Baru. Hal ini tercermin dalam peraturan yang melegalisasi eksploitasi kekayaan alam, seperti dalam UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

<sup>183</sup> Dalam menjalankan roda pemerintahan selama berkuasa, Orde Baru selalu berlandaskan konstitusi untuk memperoleh legitimasi yang sah dan kuat dalam membuat keputusan. Begitu juga dalam pembangunan ekonomi yang lebih bercorak kapitalistik dengan orientasi mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya melalui penetrasi modal asing. Orde Baru pun melakukan hal serupa dengan melakukan reformasi hukum yang bersifat instrumental terhadap ekonomi untuk membuka diri bagi pembangunan kapitalisme seperti membuat peraturan mengenai Penanaman Modal Asing (UU No.1/1967) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 8/1968).

<sup>184</sup> Samuel P Huntington, 1965, ‘Political Development and Political Decay,’ *World Politics*, 17,3 (April) dalam Mochtar Mas’oed, 1989, *loc.cit.*, hlm. 137.

kapitalisme di Indonesia. Jika kapitalisme yang tumbuh di Eropa Barat murni dari swasta (*pure capitalism*), maka kapitalisme di Indonesia berasal dari bentukan dan sokongan negara (*state-sponsored capitalism*).<sup>185</sup>

Konsekuensinya dari pilihan ini adalah, kelas menengah yang amat diperlukan bagi tumbuhnya demokrasi tidak pernah lahir. Yang terbentuk justru adalah sekumpulan konglomerat atau pengusaha yang amat tergantung pada proteksi, patronase, dan subsidi negara. Oleh Kunio, gejala yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara ini dinamakan dengan kapitalisme semu atau *ersatz capitalism*.<sup>186</sup>

Dalam konteks kapitalisme semu, terjadi persekutuan segitiga antara modal asing, negara, pengusaha domestik, serta di *back-up* kelompok militer sebagai kekuatan represi. Persekutuan yang oleh Peter Evans (1986) dinamakan *triple alliance* ini diwujudkan dengan proyek-proyek kontrak karya seperti Freeport, Caltex, dan proyek-proyek industri strategis lain. Pada gilirannya aliansi segitiga ini amat merugikan rakyat karena sarat dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, suntikan modal asing hanya dialokasikan pada proyek-proyek “mercusuar” yang tidak mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang dibutuhkan untuk membangun fondasi perekonomian rakyat (*rentier capitalism*). Pertanyaannya kemudian adalah mengapa aliansi segitiga ini berlangsung mulus, tanpa gejolak politik kelompok elite? Menurut Walden Bello (1998) ada tiga alasan. Pertama, para investor asing yang membawa modal besar dan mencari lahan untuk produksi menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Kedua, para teknokrat negara bersikap represif terhadap rakyat demi stabilitas politik. Ketiga, elite ekonomi menganggap, akumulasi kapital secara cepat merupakan strategi yang bisa menciptakan kemakmuran dan pertumbuhan secara cepat.<sup>187</sup>

## [2] Interaksi Ekonomi Politik Orde Baru

Perjalanan ekonomi politik Orde Baru selama 32 tahun diwarnai oleh bagaimana modal dan kekuasaan saling berinteraksi.<sup>188</sup> Proses interaksi antara modal dan kekuasaan tersebut menimbulkan fluktuasi dan distorsi ekonomi yang berdampak pada ketidakjelasan arah pembangunan dan rapuhnya basis fundamental ekonomi Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh dominannya intervensi tiga jajaran lembaga negara dalam struktur kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu lembaga kepresidenan, militer, dan birokrasi (R William Liddle, 1985). Semasa Orde Baru, militer memang terlihat memenangkan kekuatan ekonomi-politik baik dari tingkat nasional sampai tingkat regional, bahkan disemua lini jajaran birokrasi dipegang oleh militer dari tingkat presiden sampai kepala desa. Tetapi perlu dicatat bahwa, kekuatan ekonomi birokrat militer diperoleh bukan dengan modal pribadi, melainkan lebih didasarkan kepada kekuasaan birokrasi yang memungkinkan akses untuk menguasai pasar. Richard Robison (1990: 38) menjelaskan bahwa, komandan-komandan

<sup>185</sup> Lihat Agus Subagyo, ‘Mengurai Gagalnya Negara Pembangunan,’ *Kompas Cyber Media*, 2002.

<sup>186</sup> Lebih jelasnya lihat Yoshihara Kunio, 1990, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

<sup>187</sup> Agus Subagyo, 2002, *op.cit.*

<sup>188</sup> Ada tiga kelompok yang terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi semasa awal Orde Baru. Ketiga kelompok itu adalah, kelompok teknokrat, kelompok intervensionis, dan kroni kapitalis. Kelompok teknokrat dimotori “Mafia Berkeley” terdiri atas para ekonom yang berorientasi pada bekerjanya mekanisme pasar dengan baik, sementara kelompok intervensionis terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda namun mementingkan perlunya pemerintah melakukan intervensi atau proteksi dengan alasan nasionalisme ekonomi murni, maupun dengan tujuan kepentingan kelompok/individu. Termasuk kelompok ini adalah lembaga-lembaga seperti Pertamina yang pada saat *oil boom* sangat aktif berperan melakukan investasi besar-besaran di berbagai bidang yang bukan merupakan bisnis inti (*core-business*), Habibie dan kawan-kawan, kelompok pengusaha pribumi yang dipayungi oleh Ginandjar Kartasasmita, dan lain sebagainya. Kroni kapitalis tak lain adalah sekelompok pengusaha atau kroni dari penguasa—termasuk keluarga Soeharto—yang lebih mementingkan keuntungan perusahaannya dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Kroni kapitalis selalu terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah sebagai parasit ekonomi yang menghisap dan membebani setiap transaksi. Untuk lebih jelasnya lihat Anton H. Gunawan, ‘Mengkaji Pengalaman Masa Lalu dan Menggagas Masa Depan,’ St. Kartono (ed.), 2000, *Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 13-14.

militer melakukan kontrol pengamanan terhadap berbagai bidang strategis dari aparatus negara yang mencakup departemen pemerintahan, kredit, dan kontrak. Para pejabat yang menduduki posisi strategis yang secara ekonomis dipegang oleh para pejabat militer, memanfaatkan sumber daya jabatan dan kekuasaannya untuk memperbesar kekayaan pribadi. Mereka menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengalokasikan lisensi, konsesi, kredit, monopoli, kontrak, bahkan menilep dana pembangunan bantuan asing yang diperoleh dengan mengemis dan menjual kemiskinan rakyat.<sup>189</sup>

Dengan posisi-posisi strategis tersebut, para politiko birokrat membangun kekayaan pribadi para individu pemegang jabatan kekuasaan (Robison, 1982: 7). Pengelolaan keputusan penting dan mendasar seperti strategi ekonomi berada di tangan birokrasi—khususnya presiden—dan bukan dalam parlemen atau partai politik. Inilah yang oleh Robison disebut kelas “kapitalis birokrat,” yang awal titik singgung mereka dalam ekonomi memang terjadi melalui korupsi, ekonomi rente, dan bisnis *mark up*, yang kemudian mencoba mentransformasikan dirinya sebagai wiraswasta yang mengakumulasi kapital untuk investasi yang produktif (Basri, 2001: 34).

Di samping itu watak patrimonialisme dimana keputusan ekonomi politik dibuat lebih untuk kepentingan pribadi birokrat yang memegang kekuasaan, membuat setiap keputusan ekonomi politik dibuat mengikuti filosofi *patron-client*: pengusaha yang berhasil adalah pengusaha yang memiliki hubungan pribadi dengan pembuat keputusan. Akhirnya, kebijakan yang muncul merupakan kebijakan yang menguntungkan keduanya.<sup>190</sup> Dengan pencampuran antara kekuasaan politik dan otoritas birokrasi, sektor-sektor strategis dipakai aparatus negara sebagai barang jaran, membagi-bagikan pada klan mereka atas departemen-departemen yang mengontrol perdagangan dan kebijakan ekonomi, bank-bank, juga perusahaan-perusahaan negara sebagai sapi perahan untuk akumulasi kapital. Munculnya kapitalisme kroni misalnya, kerap dijelaskan dalam kerangka pendekatan patrimonial.<sup>191</sup> Melalui hubungan-hubungan khusus dengan para elite politik dalam pemerintahan, beberapa pengusaha berhasil memperoleh banyak kemudahan hak-hak monopoli, duopoli, atau oligopoli.<sup>192</sup> Itulah kenapa fondasi ekonomi Indonesia sangat rapuh dan keropos karena gerak laju investasi produktif yang ada dibiayai dengan uang haram hasil kejahatan korupsi.

Begitu dalam dan luasnya pengaruh patronase ekonomi-politik yang ditancapkan oleh kuku-kuku Orde Baru dalam berbagai sektor strategis yang menjadi sendi-sendi perekonomian

---

<sup>189</sup> Bank Dunia memperkirakan tak kurang dari 30 persen dari dana pembangunan bantuan asing yang diterima pemerintah Indonesia selama dua dekade telah menguap tanpa ketahuan rimbanya karena korupsi yang meluas di lingkungan birokrasi dari atas sampai ke bawah.

<sup>190</sup> Muhammad Chatib Basri, ‘Antara Marx dan Schindler: Perihal Modal dan Kekuasaan di Indonesia,’ dalam Kiri di Asia, *Jurnal Yayasan Kalam*, 2001, hlm. 31.

<sup>191</sup> Soeharto membuat fondasi untuk kekayaan keluarganya dengan menciptakan sistem patron yang berskala nasional yang mampu mempertahankannya dalam kekuasaan selama 32 tahun. Anak-anaknya, pada gilirannya memfungsikan kedekatan dengan Presiden kedalam peranan calo (perantara) untuk pembelian dan penjualan dari produk-produk minyak, plastik, senjata, bagian-bagian pesawat terbang dan petrokimia yang dimiliki pemerintah. Mereka memegang monopoli pada distribusi dan impor komoditi-komoditi utama. Mereka mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah melalui kerja sama dengan bankir-bankir, yang seringkali takut untuk menanyakan pembayaran kembali. Bahkan dalam laporan majalah *Time* mengenai harta jaran keluarga Soeharto, enam anak Soeharto memiliki saham dalam jumlah signifikan sekurang-kurangnya di 546 perusahaan dengan total *cash flow* mencapai 15 milyar dollar, dan kekayaan luar negeri mereka mencakup ratusan perusahaan yang tersebar dari Amerika ke Uzbekistan, Belanda, Nigeria, dan Vanuatu.

<sup>192</sup> Chaniago (2001: 28 dst) mencatat bahkan sejak 1968 misalnya, hak impor cengkeh hanya diberikan kepada dua pengusaha, yaitu Liem Sioe Liong dan Probosutedjo. Keistimewaan lain yang diterima Liem Sioe Liong adalah hak monopoli pemasaran terigu di wilayah Indonesia bagian Barat yang terkenal di bawah bendera PT Bogasari Flour Mills. Keistimewaan ini tidak lepas dari politik balas jasa yang pernah dilakukannya ketika menjadi pemasok barang-barang kebutuhan tentara Divisi Diponegoro di akhir tahun 1940-an di mana Soeharto pernah menjadi panglima. Sedangkan pemberian privilese pada Probosutedjo tidak lepas dari hubungan darah sebagai adik tiri Soeharto. Nama lain yang cukup kental adalah Mohammad Hasan (The Kian Seng, atau yang lebih dikenal dengan Bob Hasan) yang mendapat konsesi di beberapa bidang usaha, antara lain sebagai pemasok bijih besi PT Krakatau Steel, Pemasok barang-barang keperluan industri minyak lepas pantai, dan konsesi hak pengusaha hutan.

Indonesia hingga membuat fundamental ekonomi Indonesia menjadi keropos. Dalam investigasi yang dilakukan oleh para koresponden majalah *Time* pasca terjadinya krisis moneter 1997 yang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, menemukan indikasi bahwa sekurang-kurangnya 73 milyar dollar transaksi bisnis melewati tangan-tangan keluarga Soeharto—baik lewat yayasan-yayasan<sup>193</sup> maupun lewat perusahaan-perusahaan yang dibentuk—antara tahun 1996-1998. Sebagian besar transaksi itu berasal dari pertambangan, perkayuan, dan komoditi-komoditi dari industri perminyakan. Meski krisis keuangan di Indonesia telah menurunkan jumlah kekayaan tersebut, tapi bukti mengindikasikan bahwa Soeharto dan enam anaknya tetap memiliki kekayaan \$ 15 milyar dollar tunai dari saham-saham modal perusahaan, *real estate*, perhiasan, dan benda-benda seni.

Dibidang kehutanan, David W. Brown (1999: 14) mensinyalir adanya kecurangan dan permainan kotor dari terkonsentrasinya kepemilikan konsesi kayu pada lima perusahaan HPH terbesar,<sup>194</sup> dengan kesanggupan beberapa perusahaan untuk memberikan saham atau posisi-posisi penting di berbagai perusahaan konsesi kepada anggota keluarga Soeharto sebagai imbalan atas fasilitas dan izin yang diberikan kepada mereka (lihat tabel 3). Imbalan yang mereka berikan tidak cuma pembagian saham dan kedudukan penting di perusahaan-perusahaan tersebut, bahkan PT Barito Pacific (Prajogo Pangestu) sejak tahun 1991 telah membantu Soeharto mencapai ambisinya menjadi pemain dan wasit dalam dunia percaturan bisnis keuangan di Indonesia dengan menyediakan dana sekitar US\$ 220 juta untuk memberi jaminan bagi Bank Duta—bank yang dimiliki oleh Nusamba (Nusantara Ampera Bhakti), perusahaan yang 80 persen sahamnya dikuasai tiga yayasan besar Soeharto—dan juga membantu Soeharto dengan memberikan jaminan kepada grup Astra ketika perusahaan itu nyaris ambruk akibat permainan valas.

Di bidang pertambangan, perusahaan *holding* milik keluarga Soeharto, Nusantara Ampera Bhakti (Nusamba)<sup>195</sup> sebagaimana dituturkan Schwarz (1994), menguasai pabrik lempeng timah di Indonesia. Perusahaan ini juga menguasai monopoli bisnis asuransi kerugian di sektor perminyakan yang sangat menguntungkan, yang pendapatan per tahunnya mencapai US\$ 120 juta melalui perusahaan afiliasi Nusamba, yakni Tugu Pratama Indo. Di samping itu, perusahaan ini juga menguasai 10 persen saham dalam kontrak produksi Unocol di dua blok pantai Kalimantan Timur, di mana Pertamina memperkirakan bahwa selama Soeharto berkuasa, mereka telah melakukan sebanyak 159 kontrak karya dengan perusahaan milik keluarga dan teman dekat Soeharto. Lewat perusahaan Nusamba pula, Soeharto memperoleh 4,7 persen saham dari perusahaan Freeport Indonesia yang mengeksploitasi tembaga dan emas di Irian Barat dan termasuk perusahaan tambang terbesar di dunia. Bob Hasan dan Hutomo Mandala Putra, alias Tommy, bersama-sama menguasai jaringan bisnis yang cukup besar, yakni monopoli impor minyak mentah dan hasil bahan bakar yang dilakukan oleh Perta Oil Marketing, di mana kedua orang itu menguasai saham 50 persen, sementara sisanya dikuasai

<sup>193</sup> Dengan berkedok yayasan amal yang menyalurkan layanan sosial seperti untuk membiayai sejumlah besar rumah sakit, sekolah, dan Masjid, yayasan-yayasan yang didirikan Soeharto—George J Aditjondro menemukan 105 yayasan yang dibentuk Soeharto, istri, anak, dan kerabat dekatnya, empat di antaranya adalah yang terbesar yaitu Dharmais, Supersemar, Dakab, dan Amalbakti Muslim Pancasila—merupakan salah satu sumber penting untuk mengeruk dana raksasa tidak resmi untuk mendanai investasi proyek-proyek Soeharto, anak-anak, dan kroninya, maupun untuk membiayai mesin yang menjadi kendaraan politiknya, yaitu Golkar. Mantan Jaksa Agung saat Habibie berkuasa, Soedjono, melakukan penyelidikan atas yayasan-yayasan yang dikuasai Soeharto menemukan bahwa salah satu yayasan terbesar, Supersemar, telah menyebarkan 84 persen dananya pada sasaran yang tidak diketahui, termasuk pinjaman kepada perusahaan milik anak-anak dan teman-teman Soeharto. Lihat *Time* edisi 24 Mei 1999.

<sup>194</sup> Tak kurang dari 62 juta hektar areal hutan Indonesia dibabat dan dijarah oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH yang dilegalkan rezim Orde Baru dengan UU No.5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai jalan pintas mengeruk devisa. Kebijakan eksploitatif ini berdampak pada hancurnya kekayaan ekosistem hutan tropis Indonesia dan menyebabkan punahnya masyarakat adat yang hidup dari hutan-hutan yang dibabat tersebut karena terusir dari habitat hidup mereka.

<sup>195</sup> Perusahaan ini dipimpin Bob Hasan dengan 10 persen saham, Sigit Harjojudanto 10 Persen, dan sisanya (80 persen) dikuasai tiga yayasan sosial yang dibentuk Soeharto, Dharmais, Supersemar, dan Dakab (*Time*, 1999: 22).

Pertamina.<sup>196</sup>

Di samping melalui kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan karena akses kekuasaan yang dimiliki, keluarga Soeharto juga melakukan tindakan represi, kekerasan, dan pelanggaran HAM berat dalam membesarkan bisnisnya. Ketika Soeharto ingin membangun peternakan sapi modern (*ranch*) di Tapos Jawa Barat tahun 1971, ia merampas tanah lebih dari 751 ha yang dihuni oleh 5 desa tanpa ganti rugi. Pada tahun yang sama Soeharto juga mengusir sekitar 500-an keluarga dari tanah mereka ketika istrinya, Ny. Tien Soeharto, berencana membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Begitu juga ketika PT Bandung Asri Mulia yang sebagian sahamnya dimiliki anak-anak Soeharto merampas tanah petani Cimacan pada tahun 1987 untuk dijadikan Lapangan Golf Cibodas dan kawasan wisata.<sup>197</sup>

Banyak cerita sama. Di tahun 1996 sebuah perusahaan milik Tommy merampas tanah penduduk desa di Bali seluas 650 hektar untuk resort. Perusahaan itu sebenarnya hanya memperoleh izin untuk 130 ha, yang kemudian diperluas secara ilegal, demikian menurut Sonny Qodri, ketua LBH Bali. Penduduk yang menolak untuk menandatangani perjanjian menjual tanah, diintimidasi, dipukuli, dan sering direndam dalam air sebatas leher. Dan selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, tak terhingga jumlah yang menjadi korban kekerasan pembangunan yang dilakukan.

Argumentasi negara kekuasaan yang mementingkan patronase ekonomi seperti diuraikan di atas, terkadang mental ketika keadaan ekonomi memburuk dan memaksa ekonomi mengikuti kemauan pasar (baca: modal). Di sini kebijakan ekonomi yang merupakan representasi teknokrat dengan program ekonomi liberal dan propasar dianggap sebagai dewa penolong yang menyelamatkan ekonomi nasional dari parasit ekonomi yang mendistorsi pasar. Para teknokrat Orde Baru yang dimotori oleh “Mafia Berkeley” meletakkan dasar bagi bekerjanya mekanisme pasar bebas dengan melakukan sejumlah deregulasi sektor moneter dan fiskal dengan membuat tiga pilar utama untuk menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Ketiga pilar itu adalah, kebijakan anggaran berimbang,<sup>198</sup> pembukaan ekonomi Indonesia bagi arus modal asing,<sup>199</sup> dan kebijakan lalu lintas devisa bebas.<sup>200</sup>

Inilah kemudian yang memunculkan kebijakan yang bersifat “tambal sulam,” yang menjadi ciri tersendiri yang membuat roda perekonomian Indonesia tidak ubahnya seperti memaksa sebuah lokomotif tua berjalan di atas bantalan-bantalan rel yang seharusnya perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum rel menuju tempat pemberhentian berikutnya yang juga masih akan dibangun (Chaniago, 2001). Dengan ibarat seperti itu, Indonesia selalu

<sup>196</sup> Lihat David W Brown, 1999, *Ketagihan Rente: Distribusi Korporasi dan Spesial Sumber Daya Hutan Indonesia; Implikasi bagi Kelestarian Hutan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: DFIF, hlm. 18-19. Bandingkan juga dengan riset George J. Aditjondro yang berusaha menelusuri kekayaan keluarga Soeharto dan para kroninya serta kekayaan yayasan yang dibentuknya dalam *Adili Soeharto: Upaya Mengungkap Kekayaan Keluarga dan Yayasan Soeharto*, yang bisa diperoleh lewat akses situs di internet.

<sup>197</sup> Untuk lebih memahami kasus ini, baca hasil penelitian Dianto Bachriadi dan Anton Lucas dalam *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan* yang diterbitkan oleh Pustaka Gramedia.

<sup>198</sup> Konsep ‘kebijakan anggaran berimbang’ adalah proses pembohongan publik yang dilakukan rezim Orde Baru karena pada dasarnya anggaran APBN selalu mengalami defisit. Dan untuk menyeimbangkan defisit tersebut, pemerintah menutupnya dengan pinjaman dan utang luar negeri yang jumlahnya kian membengkak. Lihat Ary Arryman, ‘Momentum untuk Keluar dari Perangkap Utang Luar Negeri,’ dalam Roem Topatimasang (Ed.), 1999, *Hutang itu Hutang*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, hlm. 174.

<sup>199</sup> Sritua Arif (1998) misalnya menyebut data neraca pembayaran tahun 1973-1990, bahwa arus masuk investasi asing ke Indonesia secara kumulatif sebesar 5,8 miliar dollar AS sedangkan nilai keuntungan kumulatif investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri mencapai 58,9 miliar dollar AS. Ini berarti setiap satu dollar yang dimasukkan investor asing ke Indonesia telah diikuti oleh mengalirnya sumber keuangan dalam nilai sepuluh kali lipat dari ekonomi Indonesia.

<sup>200</sup> Kebijakan ini ternyata justru malah memberi kontribusi signifikan terhadap pembengkakan utang luar negeri di Indonesia, terjadinya pelarian modal asing, dan instabilitas nilai tukar mata uang karena spekulasi. Selama periode 1970-1980, dalam catatannya Mubarik Ahmad (1993), secara kumulatif sebesar 9,4 miliar dollar AS atau sekitar 51 persen dari pertambahan utang luar negeri Indonesia yang nilainya sebesar 18,26 miliar dollar AS, telah digunakan untuk membiayai pelarian modal. Dan selama periode 1980-1991 sebesar 11,17 miliar dollar AS atau 42 persen dari pertambahan utang luar negeri Indonesia juga telah digunakan untuk membiayai pelarian modal.

menyelesaikan dua persoalan sekaligus di setiap etape perjalanan pembangunannya. Pertama, adalah mengganti ruas-ruas yang dirusak oleh para parasit ekonomi politik agar perjalanan dapat sampai ke stasiun tujuan; kedua, adalah desakan untuk membangun ruas-ruas baru untuk melayani tuntutan ekonomi global yang semakin liberal. Proses tarik-menarik ini menimbulkan distorsi pasar yang serius dan berakhir dengan krisis ekonomi pada medio tahun 1997.

Mungkin karena itulah, sulit sekali menyimpulkan satu pola kebijakan Orde Baru yang bersifat ideologis, sebagaimana dikemukakan Mohammad Chatib Basri (2001: 37-38):

“Saya menduga aspek perdebatan ideologis dalam kebijakan ekonomi di Indonesia belum matang benar. Yang terjadi sebenarnya hanyalah satu proses keputusan ekonomis rasional tentang pilihan kebijakan yang paling menguntungkan bagi legitimasi pemerintah Orde Baru. Menguntungkan di sini harus diterjemahkan dalam arti memiliki biaya ekonomi dan politik yang paling murah. Dalam konteks ini, negara menjadi pragmatis dalam menjalankan kebijakan ekonominya. Di satu sisi negara bisa menjadi wahana bagi akumulasi modal, tetapi di sisi lain negara juga berangkat dari satu kepentingan mempertahankan legitimasi politik.”

Dengan kata lain, peran ideologis muncul sebagai akibat dari pilihan kebijakan dan bukan merupakan sebab. Yang terjadi hanyalah sebuah upaya mempertahankan legitimasi Orde Baru—pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah—dengan biaya politik dan ekonomi yang paling murah, dan tarik-menarik kelompok kepentingan dalam pilihan kebijakan. Jika peran kelompok *interventionist* menguat, maka harga kebijakan yang propasar menjadi mahal dan pilihan kebijakan akan menuju kepada intervensi pemerintah. Sedangkan di masa krisis, ketika peran kelompok propasar menguat, maka harga intervensi pemerintah menjadi mahal, dan pilihan beralih kepada kebijakan yang propasar. Di sini tidak terlihat bagaimana bingkai ideologi berperan, karena kenyataan yang terjadi hanyalah mempertahankan legitimasi rezim dengan pelbagai alasan ideologis. Dengan kata lain, persoalannya liberal atau bukan liberal, tetapi seberapa jauh kelompok “kapitalis kroni” dengan ekonomi rentenya serta legitimasi politik Orde Baru dalam posisi terancam. Jika ada ancaman, kita akan mendengar seruan antiliberalisme, jika posisi kapitalis kroni membaik, kita akan mendengar perlunya privatisasi dan deregulasi. Semuanya kemudian seperti membantu kita membentuk satu mosaik: soalnya bukan pada liberal atau proteksionis, kapitalis atau sosialis, tetapi lebih kepada kebijakan ekonomi yang *hyper-pragmatis* dan demi mempertahankan *status quo*.<sup>201</sup>

### [3] Nasib Kaum Miskin di Era Globalisasi

Meskipun menunjukkan prestasi yang luar biasa—ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu *newly industrial economics*—sistem ekonomi yang dibangun rezim Orde Baru ternyata menyimpan berbagai macam kebobrokan yang mendehumanisasikan dan menyengsarakan kehidupan rakyat kecil. Strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang digerogeti oleh parasit ekonomi rente (*rent seek*) para kroni, ternyata tidak hanya menimbulkan akibat samping yang serius dalam perekonomian masyarakat perkotaan saja, tetapi juga merembet pada sistem perekonomian dan sistem politik nasional. Dalam lingkup ekonomi nasional, strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan menimbulkan ketimpangan di berbagai aspek kehidupan antara lain: ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta, ketimpangan ekonomi antarsektor, kesenjangan antarwilayah, ketimpangan antarsubwilayah, ketimpangan antargolongan sosial ekonomi, ketimpangan pembangunan diri manusia Indonesia, dan ketimpangan kota-desa. Sementara dibidang politik, bersamaan melebarnya berbagai macam kesenjangan sosial-ekonomi tersebut menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat (Chaniago, 2001: 10).

<sup>201</sup> Muhammad Chatib Basri, 2001, “Antara Marx dan Schindler: Perihal Modal dan Kekuasaan di Indonesia,” dalam Jurnal *Yayasan Kalam*, hlm. 38-44.

Pembangunan memang telah menciptakan berbagai macam kemajuan yang mengagumkan. Setiap tahun terus bertambah pusat-pusat perbelanjaan yang menjamur di setiap kota besar, bandar udara modern dengan toko bebas cukai yang dipadati barang, jalan-jalan tol yang dipenuhi mobil-mobil model terbaru yang membawa orang dari bandara ke hotel-hotel berbintang lima yang mewah, gedung-gedung perkantoran dan apartemen mewah yang menjulang di setiap ruas jalan protokol. Makin banyak pula rumah-rumah besar lagi mewah ber-AC dan dipenuhi perlengkapan perabotan modern lainnya. Semua itu adalah penampilan depan dari pembangunan, dan merupakan ‘tugu keberuntungan’ sejumlah kecil orang yang telah diuntungkan oleh pembangunan itu. Tapi di balik itu semua, ada pula kenyataan lain yang mengesankan. Di belakang kemegahan dan kemewahan pembangunan, terdapat berjuta-juta orang yang menjalani hidupnya dalam kemiskinan yang tidak manusiawi sebagaimana tampak di sudut-sudut gang kecil kota Jakarta yang kumuh. Banyak di antara mereka yang menjadi korban dari menyusupnya pembangunan ke dalam kehidupan mereka. Karena adanya proyek pembangunan, sekumpulan manusia yang jumlahnya mengagetkan telah terusir keluar dari rumah, kampung halaman, dan masyarakat mereka, yang tadinya telah berhasil memberikan suatu kehidupan yang sederhana namun bermartabat bagi mereka.

Bendungan, proyek kehutanan, dan banyak investasi lainnya yang didanai Bank Dunia dan badan-badan bantuan asing dengan mengatasnamakan ‘pembangunan,’ telah mengacaulakukan kehidupan mereka, karena tujuan-tujuan yang hanya menguntungkan elite penguasa dan orang yang memang telah kaya raya. David C Korten (2002: 6-7) mengingatkan bahwa, usaha yang tidak henti-hentinya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi telah mempercepat kehancuran sistem pendukung kehidupan yang ada di planet ini, memperhebat persaingan dalam memperebutkan sumber daya, memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

Beragam penjelasan muncul berusaha menganalisa penyebab terjadinya krisis yang menghantam Indonesia. Pertama, krisis finansial yang disebabkan oleh rapuhnya kebijakan makro. Analisa ini didasarkan pada model Krugman (1979) yakni model yang melihat krisis pada *balance of payment* (depresiasi uang, jatuhnya nilai tukar) yang dipicu oleh ekspansi kredit domestik bank sentral yang tidak konsisten dalam menetapkan nilai tukar. Kedua, terjadinya *financial panic*—sebuah argumen yang mulanya dikemukakan oleh Dybvig-Diamond (1983)—yakni kepanikan nasabah bank yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pasar uang dari peminjam.

Ketiga, adalah penjelasan yang umumnya diyakini paling dekat dengan krisis, yakni *moral hazard crisis* yang mulanya dikembangkan oleh Akerlof dan Romer (1996). Model ini percaya bahwa suatu krisis akan terjadi karena suatu alasan ketidakjujuran, yakni ketika bank-bank dapat meminjam dana negara hanya berdasarkan garansi liabilitas bank publik secara implisit maupun eksplisit. IMF sendiri percaya bahwa krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor *moral hazard*.

Keempat, penjelasan dari teori *bubble collapse* atau model gelembung pecah yang dinisbatkan oleh Blanchard (1983). Menurut model ini, krisis terjadi ketika para spekulator banyak membeli aset finansial di atas harga (*fundamental value*) dalam rangka mencari keuntungan. Dalam waktu singkat seringkali memang gelembung-gelembung itu membesar, tapi pada akhirnya gelembung balon tersebut akan meletus juga. Penjelasan ini cukup relevan untuk menjelaskan penyebab terjadinya krisis moneter jika kita menengok ke belakang tentang bagaimana sempitnya basis ekonomi akibat terkonsentrasi ke tangan para kroni yang tumbuh menjadi konglomerat, sistem perbankan yang keropos, dan sistem keuangan yang dililit utang sebagai salah satu fundamental ekonomi Indonesia, serta munculnya sektor ‘ekonomi baru’ yang difasilitasi pemerintah untuk tumbuh menjadi ‘macan kertas’ sejak akhir 1980-an. Sektor ekonomi baru tersebut adalah sektor properti dan sektor infrastruktur yang memanfaatkan lokasi dan ruang-ruang strategis bagi mobilitas publik. Sebelum sektor properti dan sektor infrastruktur tersebut menghantarkan Indonesia ke jurang krisis, oleh pemerintah sektor ini dianggap sebagai mukjizat ekonomi dalam mencapai angka pertumbuhan.

Lebih jauh, Korten (2002: 67) melihat pemasukan yang besar dari mata uang luar negeri dengan cepat sekali mencetuskan gelembung-gelembung keuangan yang berkembang dalam permainan saham dan *real estate*, dan suatu pertumbuhan yang cepat dalam impor dan penjualan barang-barang konsumsi mewah, sehingga menciptakan sebuah khayalan kemakmuran ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan suatu pertambahan dalam hasil produktif yang sesungguhnya. Gelembung-gelembung yang semakin berkembang itu lalu menarik lebih banyak lagi uang, yang kebanyakan diciptakan oleh bank-bank internasional yang menerbitkan utang yang diperoleh karena aset-aset yang digelembungkan. Karena hasil keuntungan yang diperoleh dari investasi industri dan pertanian yang produktif tidak dapat bersaing dengan keuntungan dari spekulasi saham dan *real estate*, maka semakin cepat investasi asing masuk ke dalam sebuah negara, maka semakin cepat pula uang yang benar-benar mengalir keluar dari sektor-sektornya yang produktif, untuk ikut serta dalam spekulasi itu. Dampak dari dianutnya model pembangunan seperti ini adalah munculnya sektor baru yang komoditasnya bersifat *nontraded*—meliputi sektor properti yang menghasilkan komoditas berupa tanah, gedung apartemen mewah, gedung perkantoran, perumahan, lapangan golf, reklamasi pantai—yang hanya menciptakan gelembung ekonomi dan sangat rentan terhadap permainan spekulasi. Dalam fase kehancuran, para investor bergegas menarik uang mereka keluar untuk mengantisipasi keambrukan, harga saham *real estate* jatuh, bank-bank dan lembaga-lembaga utang lainnya dibiarkan begitu saja dengan sejumlah besar daftar utang yang tidak dapat ditagih, dan kehancuran keuangan mengancam, karena likuiditas telah kering.

Tumbangnya rezim otoriter Orde Baru yang pembangunan ekonominya bercorak *hyper-pragmatis* dan hanya mengejar angka pertumbuhan oleh krisis moneter pada medio 1997 menjadi sebuah penanda baru bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam aroma *euforia* ekonomi-politik yang menghiasai setiap wajah rakyat di Indonesia, kita semua merayakan kejatuhan rezim diktator yang penuh ketidakadilan ini dengan suka cita. Pada masa Orde Baru berkuasa, kita mendapati betapa hegemoni dan dominasi negara mencengkeram sangat kuat segala aspek kehidupan bermasyarakat. Negara mendapat kesempatan untuk memiliki kekuasaan mengelola dan mengontrol sepenuhnya urusan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dasar negara. Namun amanat tersebut ternyata telah dikhianati dan diselewengkan sehingga mengakibatkan proses dehumanisasi dan kesengsaraan sebagian besar rakyat. Penggusuran, pencaplokan tanah demi untuk pembangunan serta berbagai pemaksaan program pembangunan seperti program KB, program pertanian maupun berbagai program kesehatan telah mengakibatkan jutaan rakyat menderita. Namun pada tahun 1997 model ‘kapitalisme negara’ ini akhirnya mengalami keruntuhan, dimana salah satu sebabnya adalah akibat ditenggelamkan oleh kekuatan neoliberalisme global.

Namun ironisnya, runtuhnya pembangunan dan paham *state-led development*, tidak ditangisi oleh rakyat sama sekali. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa rakyat justru ikut merendahkan dan memasung kewenangan negara, institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat sendiri. Rakyat sudah sangat marah dan trauma oleh kesewenang-wenangan aparat negara yang ditunjukkan rezim Orde Baru selama 32 tahun. Rakyat sudah muak dengan janji dan retorika pembangunan untuk mensejahterakan dan melindungi kepentingan rakyat, namun kenyatannya justru pembangunan menjadikan rakyat sebagai korban pembangunan. Pembangunan bagi rakyat tidak lebih dari penggusuran tanah demi untuk pembangunan proyek-proyek *mercusuar*, penangkapan, penghilangan paksa, dan pembunuhan.

Runtuhnya paham *state-led development* dan krisis yang dialami negara, justru dirayakan oleh rakyat sebagai kemenangan. Paham neoliberalisme segera menggantikan model pembangunanisme yang telah membawa bencana bagi rakyat. Namun kegembiraan rakyat ternyata tidak berlangsung lama. Harapan akan berakhirnya penderitaan yang disebabkan oleh hegemoni dan dominasi negara buyar. Bukan kebahagiaan yang didapat, tapi justru kehidupan rakyat miskin tambah berat ketika pemerintah mengadopsi paham neoliberalisme. Terlebih sejak negara kita menjadi anggota WTO sekaligus menjadi pasien IMF.



Sejarah terulang kembali sebagaimana setback kehidupan masyarakat kita. Kehidupan kita mungkin mundur ratusan tahun lalu di mana kekautan feodalisme mencengkeram kuat sendi-sendi rakyat kecil. Rakyat kecil ditindas dan dipaksa membayar upeti kepada kaum bangsawan dan mereka mendapatkan jaminan rasa aman dari tentara kerajaan. Namun setelah datangnya kaum penjajah Belanda, penindasan berganda pun terjadi, dimana kaum penjajah menekan kaum bangsawan untuk memberi upeti kepada mereka, dan kaum bangsawan kemudian mencekik leher rakyat kecil sampai mati.

Sejarah tentang hancurnya dan kegagalan pembangunan di Indonesia dan juga ekonomi negara-negara Dunia Ketiga lainnya tak bisa dipisahkan dari andil lembaga-lembaga keuangan internasional IMF dan Bank Dunia.<sup>202</sup> Banyak kalangan akademik dan para pakar yang menuding resep IMF untuk Meksiko, Argentina, Thailand, dan Indonesia justru memperburuk krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut. Sebab IMF menyarankan kebijakan moneter yang sangat ketat dan kenaikan pajak, sementara yang diperlukan untuk menggerakkan ekonomi yang mengalami krisis adalah menlonggarkan likuiditas dan menurunkan tarif pajak.

Sebelumnya, mantan wakil presiden bank dunia dan pemenang hadiah nobel ekonomi untuk tahun 2001, Prof Joseph E Stiglitz, bahkan secara keras mengkritik bahwa obat IMF justru semakin memperdalam krisis ekonomi di Asia. Stiglitz melakukan evaluasi kritis terhadap rendahnya efektivitas program IMF dan lemahnya profesionalisme IMF dalam menangani kasus negara berkembang. IMF tak ubahnya seperti seorang dokter pada abad pertengahan yang tak peduli apa pun penyakit yang diderita pasiennya, pokoknya pengobatannya adalah tempelkan lintah untuk menghisap habis darah kotor yang masih tersisa dalam tubuh si pesakitan. Dalam rangka menghemat sumber daya agar mampu membayar kembali utang-utang mereka kepada bank-bank tersebut, pemerintah negara-negara pengutang ditekan sedemikian rupa oleh IMF agar memotong anggaran bagi program-program kesejahteraan sosial dan kredit-kredit yang disubsidikan kepada para petani.

Bahkan dengan semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat ke tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah—baik yang demokratis maupun yang tidak—dari kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi dasar.

#### **[4] Tataan Ekonomi-Politik Indonesia**

Jalan panjang yang telah ditempuh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tataan ekonomi yang lebih adil dan mensejahterakan seluruh rakyat, dapat dikatakan berawal dengan mencari alternatif terhadap ekonomi liberal zaman kolonial (1830-1870). Sebagai diketahui sistem kapitalisme Eropa meluas ke Benua Asia dan Afrika dalam wujud kolonialisme, sesuai dengan sifat kapitalisme yang ekspansif. Pertimbangan ekonomi-politik ekspansi tersebut ialah guna menguasai sumber-sumber kekayaan alam, tenaga murah dan pasaran yang sangat potensial karena ratusan juta penduduk, serta kesediaan tanah yang luas. (E. Wallerstein, 1974, Rutgers, 1937).

Disamping terjadinya eksploitasi tenaga kerja manusia (J. C. Breman, 1987) yang sudah melampaui batas-batas perikemanusiaan, meluasnya ekonomi uang ke dalam masyarakat pedesaan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut, sehingga ketergantungan dari perekonomian kita semakin kuat. Terhadap eksploitasi petani dan buruh perkebunan tadi, sejak awal abad ke-20 mulai timbul oposisi kaum sosialis di Belanda yang kemudian berpengaruh kepada golongan-golongan Belanda-Hindia juga “Politik Etnik” (1900) mulai diterapkan

---

<sup>202</sup> Lahir sebagai sepasang kembar siam dari Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944, IMF dan Bank Dunia ditugaskan bekerja sama menggalang ekonomi dunia setelah diporak-poranda perang dunia II. IMF bertugas menciptakan stabilitas ekonomi global, sedangkan Bank Dunia bertugas membiayai pembangunan. Namun, dengan paket kebijakan ekonomi “Consensus Washington,” keduanya malah bahu-membahu mengusung paham neoliberalisme dan neokolonialisme di muka bumi, tulis peraih nobel ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz dalam *Globalization and Its Discontent*.

dengan memberikan pelayanan kesehatan umum yang lebih baik, memperluas kesempatan menempuh pendidikan, serta memberikan otonomi desa yang lebih besar (1906).

Di jajaran birokrasi Hindia-Belanda yang dipimpin oleh orang-orang Belanda juga, untungnya terdapat tokoh-tokoh yang progresif juga dan ajaran-ajaran sosial demokrat memasuki masyarakat kita (Rutgers, 1937). Perluasan kesempatan pendidikan membuka peluang bagi putera-puteri pribumi untuk mengenal dasar-dasar Demokrasi Barat yang memang tumbuh bersamaan dengan Liberalisme dan Kapitalisme. Tetapi di Eropa pengendalian “Kapitalisme dini” (vroeg-kapitalisme) sudah mulai menjelang abad ke-19, dan kaum sosial-demokrat diseluruh Eropa Barat memegang peranan penting dalam usaha ke arah membangun suatu negara sejahtera (welfare state).

Lebih-lebih setelah perang dunia pertama (1914 – 1918) dan krisis ekonomi dunia (1930) politisi dan pakar ekonomi Barat semakin yakin bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam turut mengawasi perputaran roda ekonomi, apabila kesejahteraan rakyat ingin diciptakan secara merata. Sistem hukum, baik yang membatasi monopoli dan oligopoli, maupun yang mengatur hak buruh dan kewajiban para pemodal dikembangkan, agar segi-segi negatif kapitalisme dapat ditiadakan, atau paling tidak dikurangi dampaknya.

### **Bangkitnya Nasionalisme**

Sebenarnya bangkitnya Nasionalisme terjadi di seluruh Asia, sejalan dengan perkembangan di Eropa tadi. Gerakan dipimpin oleh para cendekiawan di India, Tiongkok, Jepang, Asia Tenggara dan sebagainya, yang memahami Demokrasi, dan terlebih setelah perang Jepang-Rusia (1904 – 1905) yang untuk pertama kali dalam sejarah dimenangkan oleh satu bangsa Asia. Kesadaran inilah yang kemudian bagaikan angin taufan, mengembus di seluruh benua Asia dan menumbuhkan partai-partai nasional (Congres Party, Kuomintang, Sarekat Islam dan lain-lain). Nasionalisme yang mencari alternatif kehidupan politik, ekonomi dan sosial tersebut hampir diseluruh daerah jajahan di Asia sedikit banyak merangkul sosialisme (Tjondrongoro, 1996, Wertheim, 1959).

Lebih khusus di Indonesia (Blumbergerm, 1931, Rutgers, 1937) pendekar-pendekar nasional kita seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ir. Maruto Darusman, Syahrir dan masih lebih banyak lagi menggali nilai-nilai keadilan, kesamarataan, kesejahteraan rakyat dan sebagainya karena suatu proses yang mengakar terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Pengaruh sosialisme tersebut secara paling jelas dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidatonya mengenai Marhaenisme (1957) dan kemudian bahkan dijadikan kebijaksanaan : Sosialisme ala Indonesia. Unsur-unsur tersebut di atas yang dimuat dalam UUD 1945 maupun berbagai UU antara lain No. 5/1960 tercermin dari kebijaksanaan sampai 1965.

Setelah perkembangan ekonomi tidak mampu melahirkan kesejahteraan yang diidamkan, dan masalah pertanian juga tak berhasil dipecahkan, dicarilah jalan keluar yang lain. Sistem ekonomi yang antara 1958–1965 cenderung tertutup untuk modal asing dibuka kembali dan dengan ketenangan/stabilitas politik tatanan ekonomi dapat diatur kembali dengan bantuan Bank Dunia dan negara-negara di luar blok Sosialis. Pertumbuhan ekonomi meningkat juga karena sektor swasta diberi peluang lebih besar disamping BUMN, tetapi dalam periode Orde Baru setelah kita menghadapi pasaran dunia yang semakin terbuka ternyata BUMN semakin tidak efisien dan kurang mampu menunjang kesejahteraan yang lebih merata. BUMN yang dimodali pemerintah mampu menumbuhkan suatu lapisan menengah, tetapi seberapa jauh mereka juga menunjang perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan sehat masih sangat dipertanyakan.

### [5] Perpolitikan Untuk Mendukung Ekonomi Alternatif<sup>203</sup>

*"The discipline (of economics) become progressively more narrow at precisely the moment when the problems demanded broader, more political, and social insights"*<sup>204</sup> Kutipan ini adalah keluhan seorang ilmuwan ekonomi senior yang jengkel terhadap kecenderungan "myopic" dalam disiplin ilmunya. Yaitu, ketika masyarakat sedang memerlukan jawaban yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan, ilmuwan ekonomi datang dengan resep ekonomis-teknis. Ketika dihadapkan pada persoalan pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas, yang diajukan adalah usulan pembenahan mekanisme pasar. Seolah-olah, kalau mekanisme pasar berlangsung bebas dari gangguan campur tangan pemerintah, maka semua persoalan itu akan dengan mudah diselesaikan.

Untuk memahami konteks kejengkelan itu kita perlu menengok kembali perdebatan yang selama ini berlangsung antara dua kubu pendekatan: liberal neoklasik dan ekonomi-politik. Yang pertama adalah pendekatan (teoritis-cum-ideologis) yang mendominasi wacana mengenai pembangunan ekonomi di kalangan pemerintah Indonesia, terutama sejak Orde Baru. Sedangkan yang kedua adalah yang berkembang di kalangan oposisi.

### Liberalisme Neo-Klasik versus Ekonomi-Politik Klasik

Menurut pendukung pendekatan liberal neo-klasik (yang sejak 1980-an dikenal juga dengan nama "neo-liberalisme"), isu pokok yang ditangani ilmu ekonomi adalah bagaimana menciptakan atau meningkatkan kekayaan atau kemakmuran materiil. Karena itu, pembangunan ekonomi adalah upaya akumulasi kapital; yang keberhasilannya diukur dengan produk nasional bruto tahunan. Dalam proses itu, semua yang membantu akumulasi kapital harus digalakkan; yang tidak membantu dipersilahkan minggir.

Bagaimana cara mencapai tujuan itu? Proses akumulasi kapital itu diorganisasikan melalui mekanisme transaksi atau pertukaran dalam pasar. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu pertukaran. Yang menjadi pusat perhatian adalah kegiatan produktif yang melalui transaksi pasar, sedangkan yang tidak melalui transaksi pasar tidak dianggap penting. Akibatnya, hasil kerja petani yang menanam padi untuk dikonsumsi sendiri tidak dicatat sebagai kegiatan ekonomi, dan tidak termasuk dalam perhitungan produk domestik bruto, karena tidak melibatkan transaksi pasar. Begitu juga, hasil kerja wanita yang produktif dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga tidak dihargai dalam perhitungan hasil kerja nasional itu karena, sekali lagi, tidak melibatkan transaksi pasar.

Bagaimana karakter metodologi yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi liberal? Yang menonjol adalah positivisme dan saintisme. Metodologi ini mendukung cara pandang yang memusat pada persoalan materiil, yang empirik dan kasat-indera; mengutamakan variable yang bisa diukur ("Yang tidak terukur, tidak bisa dianalisis"). Akibatnya, banyak persoalan penting yang bersifat normatif diabaikan. Bahkan pendukung metodologi ini cenderung bersikap netral terhadap nilai-nilai etika dan moral, seperti keadilan. Karena itu, tidak mengherankan kalau persoalan pokok yang dibahas oleh para pembuat kebijakan yang berpikir atas dasar ilmu pengetahuan positivistik itu adalah persoalan bagaimana "memperbesar kue nasional". Terutama bagaimana meningkatkan kekayaan dan kemakmuran materiil melalui penggalakan transaksi di pasar. Yaitu, akumulasi kapital melalui pasar. Dan ukuran keberhasilannya juga berujud prestasi dalam mendorong pertumbuhan kapital.

Ideologi yang mendasari ilmu ekonomi liberal itu juga mengajukan asumsi khas tentang hakekat manusia. Yaitu, manusia dipandang semata-mata sebagai "makhluk ekonomi" yang berperilaku seperti "utility-maximizing machine" (mesin yang berfungsi memaksimalkan keuntungan) dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Manusia dianggap banya akan

<sup>203</sup> Dr. Mohtar Mas'ood: Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Makalah disampaikan pada Seminar "Pembangunan Alternatif di Indonesia" ISEI Cabang Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 12 Agustus 2002.

<sup>204</sup> Abert O. Hirschman, *Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). hal. v.

bergerak kalau kepadanya ditunjukkan “iming-iming” yang sifatnya materiil. Karena itu sering muncul anggapan bahwa asal perutnya kenyang orang akan mudah diatur. Inilah yang mendasari munculnya kebijakan publik yang dalam praktek membanjiri warga masyarakat dengan kepuasan materiil, dengan harapan kepuasan itu akan menimbulkan ketenangan. Yang dilupakan adalah perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh filantropi, moralitas dan pertimbangan etika.

Terakhir, pendekatan liberal neo-klasik itu juga mengembangkan sikap yang khas mengenai organisasi dan lembaga sosial. Seperti sudah tersirat di atas, lembaga sosial yang paling diutamakan adalah pasar, sedangkan organisasi dan lembaga sosial lain dianggap “given”. Yang paling penting adalah mekanisme pasar. Karena itu, mereka yang memiliki modal dan melibatkan diri dalam kegiatan pasar akan menentukan apa yang akan terjadi dalam proses ekonomi. Apa peran negara? Negara berperan mendefinisikan dan melindungi hak milik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar.

Yang menarik adalah pandangan kaum ekonom liberal mengenai keluarga. Dalam ideologi ini, keluarga (rumah tangga) dipandang sebagai lembaga sosial yang berperan ganda. *Pertama*, sebagai rumah tangga yang berfungsi sebagai mesin yang diprogram untuk memaksimalkan kepuasan dengan mengkonsumsi barang yang diproduksi secara massal oleh perusahaan (yang juga berperan sebagai mesin yang diprogram untuk memaksimalkan keuntungan). Karena itu tiap hari rumah tangga kita dibombardir dengan iklan yang menawarkan berbagai jenis barang dan jasa yang seringkali tidak jelas manfaatnya. Semakin getol rumah tangga mengkonsumsi barang dan jasa itu, semakin “maju” ekonomi itu, demikian argumennya.

*Kedua*, rumah tangga juga berfungsi sebagai produsen input abstrak yang disebut “tenaga kerja”. Cara menyebut tenaga kerja dengan sebutan “sumberdaya manusia” juga memuat unsur ideologi kapitalistik itu. Istilah ini sebenarnya muncul dalam lingkungan pabrik. Di sana bisa ditemui mesin (sumberdaya fisik) dan manusia yang menanganinya (sumberdaya manusia). Status keduanya pada dasarnya disamakan, yaitu sebagai sumberdaya. Karena itu upaya memenuhi keperluan buruh seringkali berujud upaya memenuhi kebutuhan manusia sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh. Sebagai sumberdaya, manusia memerlukan ketrampilan, lapangan kerja, upah minimum yang memadai, dan sebagainya. Karena semata-mata dipandang sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh, ia dianggap tidak memerlukan pemenuhan hak sebagai manusia utuh, misalnya hak untuk berserikat dan hak-hak lain demi pengembangan identitas dirinya.

Sementara itu, di sisi lain, ada pendekatan alternatif yang sebenarnya memiliki akar sejarah yang lebih jauh ke belakang, dengan argumen yang bertentangan dengan gagasan di atas, yang disebut “*ekonomi-politik klasik*”. Yang menjadi fokus perhatian pendekatan ini bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan, tetapi juga bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan “*who get what, when, how and how much*”. Persoalan yang hanya bisa dipahami melalui pendekatan yang menggabungkan ekonomi dengan dimensi-dimensi sosial lainnya.

Berbeda dengan pendekatan liberal, ekonomi-politik mengandalkan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode impretivis dan instroktif, ekonomi politik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia.

Mengenai hakekat manusia, pendukung pendekatan ekonomi-politik klasik yakin bahwa perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh filantropi, moralitas dan pertimbangan etika. Kepentingan manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga diimbangi dengan rasa tanggungjawab sosial. Pasar, menurut pendekatan ekonomi-politik, bukan lembaga sosial yang paling penting. Banyak proses produksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga sosial lain, seperti keluarga dan birokrasi. Di Indonesia, misalnya, proses produksi beras, gula, baja, semen, mobil, dan berbagai produk penting lain tidak bertumpu pada

mekanisme pasar. Di masa Orde Baru, beberapa melalui keputusan birokratik; beberapa yang lain melalui pertemuan keluarga presiden. Karena itu, yang diutamakan oleh pendekatan ekonomi-politik adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan, dan manifesto sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi. Dalam praktek, lembaga-lembaga itu memang sering dipakai oleh banyak orang untuk memproduksi kemakmuran.

Dalam konteks perdebatan dikotomis di atas, karya ilmiah yang berjudul “*A Development Alternative for Indonesia*” yang ditulis Prof. Mubyarto dan Prof. Daniel Bromley mencerminkan keberpihakan pada yang kedua. *Pertama*, analisis dalam tulisan itu memusatkan pada masalah pengorganisasian sosial-politik proses produksi. Seperti dikatakan oleh kedua ilmuwan itu:

*It is our contention that development will be sustainable if and only if it leads to new settings and circumstances that will enhance the emergence and persistence of new economic opportunities for the large mass of individuals ... (Such) new policies ....represent the conscious modification in the specifics of prevailing economic institutions. Such innovations in the public policy always bring together a consideration of three essential elements ethics, economics, and the law.*<sup>205</sup>

Mengikuti logika argumen di atas. Yang diperlukan oleh para usahawan menengah dan kecil, petani plasma, buruh, dan berbagai aktor lain dalam perekonomian rakyat adalah suatu “enabling setting” yang memungkinkan mereka untuk berkembang. “Setting” itu bisa berujud kebijakan politik, ekonomi maupun hukum. *Kedua*, tulisan ini juga mengembangkan argumen dan diwarnai oleh isu normatif. Persoalan etika ditekankan. Persoalan keadilan dijadikan ukuran pokok dan dibahas dengan penuh empati. Sebagai bagian dari proklamasi kelahiran Pusat Studi Ekonomi Pancasila, tulisan itu jelas mengungkapkan kecenderungan normatifnya, yaitu pemihakan pada ekonomi kerakyatan. *Ketiga*, analisis dalam tulisan ini adalah buah dari olah pikir yang eklektik, bersedia memanfaatkan metodologi dan metode yang relevan. Penulis tulisan itu memanfaatkan kerangka analisis sosiologis, antropologis, filsafat, politik, dan disiplin sosial lain dengan terbuka. Seperti dikatakan oleh Prof. Sartono Kartodirdjo dalam “Introduction” tulisan itu: “Instead of studying the new economics (Mubyarto) is pleading strongly for the study of economic with a multi-dimensional approach”.<sup>206</sup>

### Dari “exchange” ke “sharing”

Pertanyaannya adalah mekanisme dan tindakan politik apa yang bisa mendukung keberhasilan reformasi ekonomi menurut jalan “ekonomi kerakyatan” yang digagas Pak Mubyarto? Kenyataan menunjukkan bahwa para aktor dan mekanisme politik Indonesia masih belum bisa memahami gagasan itu. Mundurnya Prof. Mubyarto dan Prof. Dawam Rahardjo dari panitia ad hoc di MPR menunjukkan hal itu. Ilmuwan dan praktisi ilmu politik perlu dibantu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan lembaga-lembaga yang sesuai dengan tujuan penciptaan ekonomi kerakyatan itu.

Salah satunya adalah membongkar kembali konseptualisasi tentang politik dan ekonomi sebagai transaksi pertukaran. Praktek bisnis umumnya terdiri dari transaksi seperti itu: yaitu, A memberikan sesuatu pada B dan menerima sesuatu dari B sebagai balasan yang nilainya setara. Ini disebut “exchange” dengan hasil nol (zero-sum). Tetapi kalau A memberikan sesuatu pada B, tetapi si A tidak kehilangan sesuatu yang diberikan itu, maka yang terjadi bukan transaksi “exchange”, tetapi suatu proses “sharing” yang bisa punya implikasi “positive-sum”. Inilah yang terjadi dalam hal sumberdaya informasi. Berbeda dengan sumberdaya lain, yang berkurang kalau diberikan pada pihak lain, sumberdaya informasi justru semakin membesar ketika disebar pada pihak lain.

<sup>205</sup> Mubyarto dan Daniel W. Bromley, *A Development Alternative for Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 9

<sup>206</sup> *Ibid.*, hal. 5.

Sayangnya, ilmuwan politik maupun ilmuwan ekonomi belum mengembangkan teori untuk menjelaskan atau memikirkan tentang ekonomi dunia yang sebagian besar terdiri-dari transaksi “*sharing*”. Ilmuwan politik juga belum menghasilkan teori tentang implikasi dari “*a politics of sharing a plentiful resource*” (seperti informasi) yang sangat berbeda dengan “*a politics of allocating scarce resources*”.

Yang kita perlukan adalah lembaga dan perspektif yang lebih luas yang memusatkan perhatian pada persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga kemiskinan di seluruh dunia dan ketimpangan antar-bangsa. Inilah yang harus menjadi pusat perhatian ilmu politik dan ilmu ekonomi, kalau kita ingin membuatnya relevan bagi persoalan masa kini.

#### **[6] Kilas Balik Keterpurukan Indonesia: Analisa Ekonomi-Politik<sup>207</sup>**

Sejarah ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966-1998) kebablasan karena paham internasional liberalisme cum neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.

Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengalir ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian

---

<sup>207</sup> Gagasan dasar Seminar Ekonomi Rakyat di Jakarta selama 6 bulan sejak 22 Januari hingga 2 Juli 2002, diselenggarakan oleh Pusat P3R-YAE (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat-Yayasan Agro Ekonomika), Komisi Ilmu-ilmu Sosial-AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), Bina Swadaya Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia), Gema PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia).

usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Krisis Moneter juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri, lebih-lebih melalui cara-cara pengobatan Dana Moneter Internasional (IMF) yang tidak mempercayai serta mempertimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dalam negeri khususnya di daerah-daerah. Kebijakan, program, dan teori-teori ekonomi yang menjadi dasar penyusunannya didasarkan pada model-model pembangunan Neoklasik Amerika yang agresif tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat plural di Indonesia. Pakar-pakar ekonomi yang angkuh, yang terlalu percaya pada model-model teoritik-abstrak, berpikir dan bekerja secara eksklusif tanpa merasa memerlukan bantuan pakar-pakar non-ekonomi seperti sosiologi, ilmu-ilmu budaya, dan etika. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.

Kemerosotan Etika Pembangunan khususnya di bidang hukum dan bisnis modern berkaitan erat dengan pemaksaan dipatuhinya aturan main global yang masih asing dan sulit dipenuhi perusahaan-perusahaan nasional. Aturan main globalisasi dengan paham Neoliberal yang garang terutama berasal dari ajaran “Konsensus Washington” telah menyudutkan peranan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan jalan pintas para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan secara tidak bermoral yang merasuk pada birokrasi yang berciri semi-feodal. Etika Ekonomi Rakyat yang jujur, demokratis, dan terbuka, yang menekankan pada tindakan bersama (*collective action*) dan kerjasama (*cooperation*), merupakan kunci penyehatan dan pemulihan ekonomi nasional dari kondisi krisis yang berkepanjangan. Inilah moral pembangunan nasional yang percaya pada kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa sendiri.

#### [7] Peta Baru Geo-Ekonomi Asia Timur Pasca ACFTA<sup>208</sup>

Begitu ACFTA dinyatakan berlaku pada 1 Januari 2010 yang lalu, Indonesia langsung minta negosiasi-ulang kepada Cina karena alasan belum siap. Ini dilakukan tanpa perasaan risih atau sungkan kepada Cina dan negara-negara Asean lainnya. Padahal Indonesia sudah meratifikasi ACFTA (*Asean-China Free Trade Agreement*) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Cina sejak 15 Juni 2004 melalui Kepres Nomor 24 tahun 2004. Keikut-sertaan Indonesia selama ini di dalam diplomasi mempersiapkan ACFTA cukup menonjol. Tapi entah mengapa setelah ACFTA ini diberlakukan tiba-tiba ada pihak-pihak di dalam negeri yang menjerit dan protes karena tidak siap? Ternyata penyakit lama kita masih saja belum hilang. Walaupun untuk sebuah kesepakatan penting dan strategis seperti ACFTA, koordinasi antara diplomasi ke luar dan kesiapan di dalam negeri masih saja *kedodoran*.

Sudah lama kita mendengar pemoe yang mengatakan bahwa *koordinasi* bukanlah titik kekuatan bangsa Indonesia. Tapi kalau kita melihat cara bekerja para *markus* (makelar kasus) di negeri ini, yang mempunyai jejaring begitu luas, yang bisa bekerjasama lintas unit, lintas instansi bahkan lintas departemen secara rapi dan efektif, pemoe yang tersebut diatas seharusnya tidak ada. Para mafia hukum di Indonesia ternyata mampu berkoordinasi dengan baik secara “profesional” melebihi para *mafiosi* yang asli di negeri asalnya di Sicilia, Italia sana. Terus terang, hal ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Kalau menghadap ACFTA

<sup>208</sup> Suhandi Taman Timur, *Peta Baru Geo-Ekonomi Asia Timur Pasca ACFTA*, Jakarta, 26 April 2010.

saja kita sudah tidak siap, apalagi menghadapi pasca ACFTA, dimana peta geo-ekonomi Asean plus Cina, bahkan di seluruh Asia Timur diramalkan akan berubah total.

Ditinjau dari tingkat kesiapannya, negara-negara yang terlibat di dalam ACFTA dapat dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama adalah kategori negara *inisiator* yaitu Republik Rakyat Cina dan Republik Singapura. Ke dua negara ini sudah lebih dari siap dan sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mengimplementasikan ACFTA dengan segera. Kategori ke dua adalah negara-negara *pendukung*, yaitu Malaysia, Thailand, Brunei Darusalam yang sudah siap dengan konsep perdagangan bebas, namun masih mempersiapkan diri untuk program-program pendukungnya. Yang ke tiga adalah kategori negara-negara *pengikut* yaitu Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam dan Myanmar, yang relatif cukup siap namun bersikap *low profile* dan mewaspadai setiap perkembangan yang terjadi. Kategori ke empat adalah negara kita, Indonesia. Sikap dan kedudukan Indonesia cukup unik karena “penyakit” sindroma negara besar yang dideritanya. Ini terlihat dari perilakunya yang *high profile* pada tingkat diplomasi, tapi pada kenyataannya tidak terlalu siap di berbagai sektor di dalam negeri. Indonesia seperti tidak sadar bahwa dirinya adalah “sasaran tembak” baik oleh Cina maupun oleh negara-negara tetangga sesama anggota Asean. Indonesia adalah pasar terbesar nomor tiga di Asia setelah Cina dan India. Namun, berbeda dengan Cina yang merupakan pasar terbesar tapi sekaligus produsen yang sangat kompetitif, Indonesia adalah bukan produsen yang kompetitif. Di mata negara-negara ACFTA yang lain, Indonesia adalah produsen yang tidak perlu ditakuti, dan mitra konsumen yang memiliki pasar yang sangat potensial.

Dari sudut kepentingan regional, ACFTA adalah sebuah kesepakatan strategis yang sudah dirintis secara komprehensif sejak lama. Visi kesepakatan ini sudah lama dirumuskan bersama-sama sejak lebih dari dua dasawarsa yang lalu. Untuk menunjang ACFTA sebagai kesepakatan induk, semua pihak kini sibuk merumuskan program-program pendukung di tingkat nasional dan regional. Di forum ini negara-negara anggota bersaing dan menguji kejelian mata mereka masing-masing untuk melihat peluang yang ada. Dengan berlakunya perdagangan bebas, sudah dapat dipastikan bahwa arus pergerakan orang dan barang diantara negara-negara ACFTA ini akan meningkat tajam. Dengan semakin tingginya intensitas interaksi antar pelaku usaha di kalangan negara-negara ACFTA ini, maka hubungan sosial-budaya akan semakin baik, tingkat saling pengertian akan semakin tinggi dan hubungan politik akan bertambah erat. Disinilah peran sektor transportasi dan telekomunikasi akan menjadi sangat penting.

Sub-sektor angkutan laut dan angkutan udara menjadi sektor andalan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan program-program pendukung tersebut. Diantara program-program pendukung tersebut, ada rencana untuk mengkaji-ulang semua perjanjian-perjanjian bilateral yang masih berlaku antara Cina dan negara-negara Asean di bidang angkutan laut dan angkutan udara. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan umum ACFTA adalah untuk menghilangkan segala hambatan biaya-masuk (*tariff barriers*). Oleh karena itu semua perjanjian bilateral mengenai hubungan angkutan laut dan angkutan udara yang sekarang berlaku di antara negara-negara Asean dengan Cina akan diselaraskan dengan kebijakan umum ACFTA tersebut. Semua klausul-klausul yang ada dan bersifat membatasi atau restriktif akan dirubah. Tujuannya adalah mendukung kelancaran perdagangan bebas. Bila kesepakatan pendukung ini nanti tercapai, maka praktis antara Cina dan Asean akan berlaku kebijakan pelabuhan bebas, baik di bidang angkutan laut maupun angkutan udara. Meski nantinya angkasa dan laut Indonesia akan menjadi terbuka bagi semua kapal-kapal dari negara-negara Asean dan Cina, dampaknya terhadap perkembangan industri angkutan laut dan angkutan udara niaga di dalam negeri tidak perlu terlalu dikuatirkan. Tapi dominasi Singapura di kawasan Asean akan lebih menonjol lagi. Tanpa memerlukan kesepakatan politik legal dari sesama negara Asean yang lain, Singapura akan menjadi “ibukota” atau titik-pusat Asean secara *de facto*. Untuk hal ini Singapura memiliki segalanya. Disamping letak geografis yang strategis, Singapura mempunyai sarana dan prasarana yang kuasi paripurna sebagai pelabuhan transit laut dan udara antara Asean dan Cina, dan sebaliknya. Kedudukan pelabuhan Singapura yang ideal di “beranda” teritori Asean, tepat dimuka Laut Cina Selatan siap untuk menampung lalulintas



komoditas perdagangan laut antara ke dua kawasan ini. Secara emosional, Singapura juga memiliki kedekatan yang lebih khusus dengan Cina dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya. Jangan dilupakan bahwa Singapura juga dikenal sebagai negara Cina ke tiga (*the third China*) sesudah RRC dan Taiwan. Sementara itu di pihak Cina, secara historis mereka tidak menerapkan sistim bandar-pengumpul (*hub*) tunggal. Kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Hongkong atau Guangzhou adalah bagian dari sistim *multi gateways* di Cina. Oleh sebab itu, dibawah naungan ACFTA nanti, Singapura berpotensi menjadi bandar penghubung tunggal antara kota-kota di Cina dan kota-kota di Asean. Inilah kira-kita gambaran peta geo-ekonomi Asia Timur yang akan datang.

Tibanya era keterbukaan adalah keniscayaan yang hanya menunggu waktu. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali memperkuat diri. Tapi sementara Kuala Lumpur dan Bangkok berusaha untuk membayang-bayangi Singapura, kita masih berkutat di dalam negeri dengan masalah-masalah keselamatan penerbangan yang sangat mendasar. Kasus pesawat tergelincir dan ban pecah waktu mendarat masih jadi kejadian “rutin”! Di laut, kapal-kapal asing mendominasi laut interinsuler kita, karena Pemerintah alpa menerapkan asas cabotage tanpa pertimbangan yang jelas. Kasus-kasus kelebihan muatan masih selalu terjadi. Bagaimana dengan sektor telekomunikasi? Ingat bahwa jauh sebelum ACFTA ini, Indosat sudah kita *lego* ke asing! Lalu kapan kita akan mampu bangkit agar sumber daya alam kita bisa mencapai pasar melalui sektor angkutan niaga kita sendiri? Apa yang akan kita lakukan bila peta geo-ekonomi Asia Timur akan berubah kanti? Jawabannya adalah pekerjaan rumah kita bersama!

#### **[8] PDB, Perubahan Geoekonomi Menuju Tahun 2050<sup>209</sup>**

Riset yang dilakukan oleh Goldman Sachs memperkirakan bahwa pada sekitar tahun 2040, kemampuan ekonomi Brasil, Rusia, India, dan China (untuk selanjutnya disingkat BRIC) akan melampaui G-6, kelompok negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Perancis, dan Itali. Kemampuan ekonomi di sini diukur dari produk domestik bruto (PDB). Kalau ini benar, akan terjadi perubahan geoekonomi yang pada gilirannya akan membawa pergeseran geopolitik.

Peranan Indonesia dalam perubahan geopolitik ini akan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengembangkan ekonomi nasional dalam dinamika Asia yang berkembang pesat. Pada tahun 2003, Goldman Sachs melakukan suatu proyeksi terhadap empat negara, yaitu China, India, Brasil, dan Rusia. Negara yang dipilih ini termasuk negara yang berpenduduk terbesar pertama, kedua, kelima, dan kedelapan di dunia.

Dengan mempertimbangkan aspek demografi, pemupukan modal, produktivitas ekonomi, dan peningkatan nilai tukar mata uangnya, kemampuan ekonomi keempat negara ini (diukur dari PDB) akan melampaui G-6 pada tahun 2039. Kalau ini terus berlanjut, pada tahun 2050 ekonomi BRIC akan meningkat menjadi 1,5 kali lipat dari G-6. Gambaran ini tersusun dari perkiraan sebagai berikut. Ekonomi China diperkirakan akan tumbuh rata-rata 8,0 persen per tahun pada tahun 2000-2005 (pada kenyataannya tumbuh 9,4 persen per tahun) dan secara bertahap melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2045-2050. Perekonomian Brasil diperkirakan tumbuh 4,2 persen per tahun pada tahun 2005-2010 kemudian melambat menjadi 3,4 persen pada tahun 2045-2050. Ekonomi Rusia tumbuh 5,9 persen per tahun pada tahun 2000-2005 dan secara bertahap melambat menjadi 1,9 persen pada tahun 2045-2050. Adapun ekonomi India diperkirakan tumbuh rata-rata 5,3 persen per tahun pada tahun 2000-2005 (pada kenyataannya tumbuh 6,4 persen). Kemudian melambat dan meningkat lagi pada tahun 2030-2035 karena siklus demografi dan melambat lagi menjadi 5,2 persen pada tahun 2045-2050.

Dengan memperkirakan peningkatan nilai tukar mata uang BRIC sekitar 2,5 persen per tahun, PDB China diperkirakan akan melampaui Jerman pada tahun ini, Jepang pada tahun 2015, dan AS pada tahun 2040. Ekonomi India akan melampaui Italia pada tahun 2016,

<sup>209</sup> Bambang Prijambodo, *PDB, Perubahan Geoekonomi Menuju Tahun 2050*, Kompas, Senin, 19 November 2007 [Direktur Perencanaan Makro, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional], dalam <http://www.madani-ri.com/2007/11/22/pdb-perubahan-geoekonomi-menuju-tahun-2050/>

Perancis pada tahun 2019, Jerman pada tahun 2023, dan Jepang pada tahun 2032. PDB Rusia akan melampaui Itali pada tahun 2018, Perancis pada tahun 2024, Inggris pada tahun 2027, dan Jerman pada tahun 2028.

Adapun ekonomi Brasil diperkirakan akan melampaui Italia pada tahun 2025, Perancis pada tahun 2031, dan Jerman pada tahun 2026. Secara keseluruhan, pada tahun 2050, enam perekonomian terbesar di dunia diukur dari PDB dalam dollar AS akan ditempati oleh China, AS, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Adapun Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia akan bergeser ke posisi 7 sampai 10.

Meskipun kemampuan ekonomi BRIC melampaui PDB G-6, setiap negara BRIC belum menjadi negara terkaya di dunia. PDB per kapita China pada tahun 2050 baru akan mencapai sekitar 31.000 dollar AS, hampir sama dengan pendapatan per kapita rakyat AS pada tahun 2000, sedangkan PDB per kapita AS pada waktu itu akan mencapai hampir 84.000 dollar AS. Satu-satunya pendapatan per kapita BRIC yang akan melampaui beberapa negara G-6 adalah Rusia. Pada tahun 2050, PDB per kapita Rusia akan mencapai sekitar 50.000 dollar AS, melampaui pendapatan per kapita rakyat Italia dan Jerman.

Pengertian PDB per kapita sangat berbeda dengan PDB. PDB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan rakyat meskipun belum menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di dalam suatu negara. Adapun PDB lebih menggambarkan kemampuan ekonomi suatu negara, kekuatan pasar dalam negeri yang bisa digerakkan, dan pada gilirannya dapat menjadi kekuatan di dalam menentukan politik luar negerinya. Rakyat Swiss dan Singapura dengan pendapatan per kapita lebih dari 52.000 dollar AS dan 27.000 dollar AS dapat dikatakan lebih sejahtera dibandingkan dengan rata-rata rakyat China yang hanya berpendapatan 1.700 dollar AS. Namun secara agregat, kemampuan ekonomi Singapura dan Swiss jauh di bawah China. Demikian juga kekuatan politik dan pertahanannya.

Ada beberapa catatan yang cukup baik dari riset yang dilakukan oleh Goldman Sachs. *Pertama*, dengan tingkat pertumbuhan itu, pada tahun 2010 peningkatan pengeluaran BRIC diperkirakan melebihi peningkatan pengeluaran G-6. Adapun pada tahun 2025, peningkatan pengeluaran BRIC akan menjadi dua kali lipatnya dan pada tahun 2050 akan menjadi empat kali lipat dari peningkatan pengeluaran G-6. BRIC akan menjadi penggerak dari sisi permintaan dan pengeluaran yang sangat besar dan dapat mengimbangi pengaruh dari struktur penduduk yang menua dan pertumbuhan ekonomi yang lambat di negara-negara maju.

*Kedua*, tidak tertutup kemungkinan BRIC mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mencapai tingkat pembangunan sebagaimana yang diperkirakan. Peluang China untuk mencapai tingkat pembangunan tersebut sangat besar.

Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, sejak tahun 1979-2005 ekonomi China tumbuh rata-rata 9,7 persen per tahun dengan hanya tiga tahun tumbuh di bawah 6 persen. India dan Rusia juga mempunyai histori yang cukup kuat, meskipun lebih singkat dan lebih fluktuatif dibandingkan dengan China. Ekonomi India dan Rusia berturut-turut tumbuh 6,3 persen per tahun (1996-2005) dan 6,7 persen (1999-2005). Keraguan terletak pada ekonomi Brasil. Gejolak eksternal dengan ketergantungan utang yang besar pada dasawarsa 1980-an serta transisi dari rezim militer ke demokrasi yang lemah masih berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Brasil. Meskipun negara ini sebelumnya pernah mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu rata-rata 8,7 persen per tahun antara tahun 1971 dan tahun 1980, tren pertumbuhan ekonomi Brasil masih dalam kecenderungan melambat.

*Ketiga*, dengan BRIC yang mewakili Asia, Eropa, dan Amerika Latin, bagaimana dengan benua Afrika? Afrika tetap tertinggal dalam pembangunan. Afrika Selatan, perekonomian terbesar di benua Afrika, pada tahun 2050 PDB-nya diperkirakan hanya mencapai kurang dari seperlima PDB Brasil. Afrika tetap merupakan kawasan yang seakan-akan terkunci dalam sejarah pembangunan sejak beratus tahun yang lalu.

## **Perubahan Geo-Ekonomi**

Meskipun gambaran yang diberikan oleh Goldman Sachs belum pasti akurat, ada beberapa implikasi yang penting:

*Pertama*, Asia akan menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia. Pada tahun 2025, ekonomi Jepang, China, dan India akan melampaui PDB AS. Secara berangsur, kebijakan ekonomi dan politik Jepang dari yang selama ini lebih condong ke Barat akan bergeser ke Asia dengan semakin kuatnya China dan India. Pada tahun 2050, PDB ketiga negara Asia itu akan meningkat menjadi 2,2 kali lipat PDB AS. Ini belum memperhitungkan macan Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Kegiatan perdagangan antara negara-negara Asia akan meningkat luar biasa, padahal sebelumnya banyak bergantung pada pasar AS dan Eropa.

*Kedua*, dengan semakin meningkatnya kekuatan ekonomi Asia, terbuka peluang bagi Asia untuk menyatukan ekonomi sebagaimana Eropa. Meskipun karakteristik ekonomi di Asia jauh lebih beragam dibandingkan dengan Eropa, peluang ini tetap ada. Kalau kemungkinan ini terbuka, beberapa negara Asia yang maju itu bukan tidak mungkin akan mempunyai mata uang tunggal sebagaimana euro. Potensi ini tetap ada dengan tren menurunnya nilai tukar dollar AS terhadap mata uang dunia lainnya. Goldman Sachs sendiri memperkirakan nilai tukar riil mata uang BRIC akan meningkat sekitar 300 persen selama 50 tahun.

*Ketiga*, kekuatan ekonomi China yang melampaui AS pada tahun 2040 akan membawa perubahan geopolitik. Politik luar negeri dan kekuatan pertahanan yang selama ini didominasi oleh AS secara berangsur-angsur akan terbagi menjadi tiga kekuatan besar, yaitu China, AS, dan Rusia. Perubahan ini secara bertahap telah terlihat dari politik luar negeri China yang lebih progresif serta meningkatnya anggaran dan kekuatan pertahanan China. Ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya perekonomian suatu negara. Selama satu dasawarsa terakhir anggaran pertahanan China meningkat dua digit setiap tahun. Ketertinggalan teknologi China dari AS, baik dalam bidang ekonomi maupun pertahanan, secara berangsur akan dikejar oleh China.

## **Implikasinya bagi Indonesia**

Gambaran di atas memberi implikasi yang penting bagi Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi mencakup aspek yang lebih luas termasuk politik luar negeri dan pertahanan.

*Pertama*, ekonomi Indonesia perlu menyiapkan diri sebaik-baiknya agar dinamika Asia yang berkembang cepat itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Semua potensi pembangunan, tidak hanya sumber daya alam, tetapi yang lebih pokok adalah sumber daya manusia, infrastruktur, ruang (teritori), dan teknologi harus dioptimalkan. Dua potensi pembangunan terakhir selama ini kurang dimanfaatkan secara baik bagi peningkatan kemampuan ekonomi kita. Di sini pentingnya strategi industrialisasi dan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan ekonomi mendatang.

*Kedua*, mempertegas arah pembangunan ekonomi yang akan ditempuh dalam jangka panjang. Secara konsep kita sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sampai tahun 2025. Yayasan Indonesia Forum juga menyusun Visi Indonesia 2030. Apa pun rencana dan visi pembangunan jangka panjang sampai tahun 2050, di dalam menjabarkannya kepada prioritas pembangunan untuk kurun waktu yang lebih pendek harus konkret, konsisten, dan berkelanjutan. Di sini peranan kepemimpinan dan pemerintah yang kuat serta sistem sosial, politik, dan budaya yang mendukung sangat besar. Ini kenapa China sewaktu di bawah kepemimpinan Mao tidak mampu memberi sinyal bahwa satu saat China akan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

*Ketiga*, meningkatkan peranan Indonesia paling tidak di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Agar berperan lebih besar dalam dinamika Asia menuju tahun 2050, Indonesia perlu

secepatnya kembali memainkan peran yang lebih besar di ASEAN, baik bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan. Langkah ini penting mengingat geoekonomi dan geopolitik ASEAN sangat strategis. Dengan demikian, posisi tawar Indonesia tidak saja sebagai negara, tetapi satu kawasan yang sangat strategis. Kuncinya ekonomi kita harus maju, stabilitas politik dalam negeri harus mantap, dan politik luar negeri kita harus progresif.

#### [9] Geopolitik dan Geo-Strategi Indonesia di Antara Dua Samudera

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan dengan sejumlah 17.508 pulau-pulau besar dan kecil. Total luas wilayah Indonesia adalah sembilan juta kilometer persegi; terdiri dari tiga juta kilometer persegi dalam bentuk daratan pulau-pulau, tiga juta kilometer persegi perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) yaitu perairan di antara atau sekeliling pulau-pulau tersebut, serta tiga juta kilometer persegi lagi berupa perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan sebagai sabuk sebesar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereign rights*) di atas maupun di bawah permukaan, serta lapisan bawah dasar lautnya (Wahyono SK. *Indonesia Negara Maritim*. Teraju, 2009. Dalam <http://geostrategicpassion.blogspot.com/2011/08/geopolitik-indonesia-di-antara-dua.html>).

Ditinjau dari konstelasi geografis, posisi Indonesia sangat strategis karena berada pada posisi silang dunia yakni berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia, yang juga merupakan jalur lalu lintas dunia baik laut maupun udara yang sangat padat.

Posisi Indonesia membentang di khatulistiwa, dari 95 derajat Bujur Timur sampai dengan 141 derajat Bujur Timur, serta dari 6 derajat Lintang Utara sampai dengan 11 derajat Lintang Selatan. Dengan panjang garis pantai pulau-pulainya kurang lebih 81.000 kilometer. Di sepanjang garis pantai tersebut terdapat landas kontinen yang merupakan lanjutan daratan pantai yang menjorok ke luar sampai sejauh 200 mil laut. (*Ibid*).

Kondisi geopolitik Indonesia sangat sarat dengan unsur-unsur strategis, dari unsur sumber daya alam hingga *sea lanes of communication* (SLOC). SLOC atau jalur-jalur pelayaran/perhubungan laut tersebut secara politik dan ekonomi sangat strategis, karena menyangkut kelangsungan hidup berbagai negara. Jalur laut tersebut membentang dari Teluk Persia ke arah barat menuju Eropa Barat, dan ke arah Timur menuju Asia Timur dan Amerika Serikat. Jalur ini merupakan bentangan garis energi minyak dan gas bumi yang tidak boleh terputus, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan industri negara-negara maju. Dari 7 (tujuh) selat strategis di dunia, 4 (empat) di antaranya berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan demikian lautan Nusantara menjadi lautan yang kedudukannya sangat strategis tapi juga rawan keamanan dan bahaya ekologis. (Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Suara Bebas 2005)

Jika uraian di atas dikontekstualisasikan dengan kondisi geostrategik Indonesia maka bisa dilihat posisi geostrategis Indonesia, antara lain: (1) Indonesia menjadi bagian penghubung penting dari *Eurasian Blue Belt*; (2) Indonesia mengambil peranan sangat besar dalam *Global Logistic Support System* dan khususnya terkait dengan SLOCs (*Sea Lanes Of Communications*) dan COWOC (*Consolidated Ocean Web Of Communication*); (3) Wilayah lautan dan ALKI Indonesia menjadi penghubung penting dalam HASA (*Highly Accesed Sea Areas*) dimana ketiga lautan yaitu India, Southeast dan South Pacific bertemu didalamnya; (4) Terkait dengan *World Shipping* yang melintasi ALKI dengan muatan *Dry Cargo* maupun *Liquid Cargo* (dalam <http://indomaritimeinstitute.org>, *Alur Laut Kepulauan Indonesia: Peluang dan Ancaman bagi NKRI*).[]

#### REFERENSI PRIMER

- Adelman dan C. Morris, *Economics Growth and Social Equaity in Developing Countries*, Standford, Standford University Press, 1973.
- Anthony Giddens, *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Adam Smith, *The Wealth of Nations*, New York: The Modern Library, 1973.
- Adian, Doni Gaharal, 2005, *Percik Pemikiran Kontemporer; Sebuah Pengantar Komprehensif*, Bandung: Jalasutra
- Arif, Saiful, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & Averroes, 2000.
- Arendt, Hannah, *Pembangunan Ekonomi, Studi Tentang Sejarah Pemikiran*, Jakarta, LP3ES, 1991
- Budi Hardiman, Fransisco, 2004, *Kritik Ideologi; Menyingkap Kepentingan Ilmu Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Buku Baik
- Budiman, Arif, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia, Cet. IV., 2000.
- Cox, Robert W, 1983, *Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method*, *Millenium: Jurnal of International Studies* Vol 12 (2).
- Clements, Kevin, *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*, Yogyakarta, PP, 1997.
- Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books, 1976.
- Engels, Frederick, *Tentang Das Kapital*, Judul Asli: *On Marx's Capital*, Penerjemah: Oey Hay Djoen (Bandung: Ultimius dan Yayasan Akatiga, Cet. I., 2006).
- \_\_\_\_\_, *Dialektika Alam*, Judul Asli: *Dialectics of Nature* (Moscow: Progress Publisher, 1964) Penerjemah: Oey Hay Djoen, (Jakarta: Jasta Mitra, 2005).
- \_\_\_\_\_, *Anti Duhring; Revolusi Herr Eugen Duhring dalam Ilmu Pengetahuan*, Judul Asli: *Anti Duhring: Herr Eugen Duhring's Revolution in Science*, Foreign Languages Publishing House, (Jakarta: Hasta Mitra, 2005).
- Francis Fukuyama, *The End of History and Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992.
- Fredric Jameson, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990.
- Fakih, Mansour, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, *Sesat Pikir Teori Pembangunan & Globalisasi*, INSIST, 2001.
- Femia, Joseph V, 2001, *Marxisme dan Komunisme*, dalam *Ideologi Politik Kontemporer*, editor Eatwell & Anthony Wright (terj), Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme & Teori Sosial Modern*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Gilpin, Robert, 1987. "The Dynamics of Internastional Political Economy" dalam *The Political Economy of Internastional Relations*, Princeton: Princeton University Press, pp.66-117.
- \_\_\_\_\_, (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Griffiths, Martin, 2001, *Lima Puluh Pemikir Studi hubungan Internasional*, terj. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Hobsbawm, Eric. 1987. "An Economics Changes Gear" dalam *The Age of Empire 1875-1914*, London: Weidenfeld & Nicholson
- Hoogvelt, Ankie. (1997). *The History of Capitalist Expansion, dalam Globalization and Post-Colonial World: The New Political Economy of Development*. Baltimore: The John Hopkins University Press, pp. 14-28.
- [http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori\\_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html](http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html) dan <http://www.timurmatahari.com>
- Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang, Indonesiatara, 2004.
- Jamil Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat HAM*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003.
- Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, *Globalisasi Membantu Kaum Miskin*, dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
- Jurgen Habermas, *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, Tahun 1990.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. (1999). *International Political Economy*, dalam *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Jackson, Robert & Sorensen, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Komaruddin, *Pengantar untuk Memahami Pembangunan*, Bandung, Angkasa, 1985.

- Kuncaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas & Pembangunan*, Jakarta, Gmd, Cet. XVIII., 1997.
- Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Kristeva, Nur Sayyid-Santoso, *Negara Marxis & Revolusi Proletariat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1., 2011).
- \_\_\_\_\_, *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik*, Buku Panduan Pelatihan Basis 1 (2007).
- \_\_\_\_\_, *Teori Analisis Geo-Ekosopol*, Buku Panduan Pelatihan Basis 2 (2009).
- \_\_\_\_\_, *Seri Ideologi Dunia (Marxisme, Sosialisme, Komunisme, Kapitalisme, Fasisme, Anarkisme, Sindikalisme, Anarko-Sindikalisme, Konservatisme, Sosialisme-Demorasi, dll)*, Buku Panduan Sekolah Ideologi 1 (2008).
- Lairson, Thomas D. And D. Skidmore, 1993. "The Political Economy of American Hegemony: 1938-1973, dalam *Internastional Political Economy: the Struggle for Power and Wealth*, Orlando: Harcourt Brace College Publishers, pp.63-94.
- Larrain, J., *Theories of Development, Capitalism, Colonialism & Dependensy*, Dalas Brewely, 1989.
- Marx, Karl, *Kapital I; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Pertama: Proses Produksi Kapital*, Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume I: A Critical Analysis of Capitalist Production*, Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2004).
- \_\_\_\_\_, *Kapital II; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Kedua: Proses Sirkulasi Kapital*, Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume II: The Process of Circulation of Capital*, Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2006).
- \_\_\_\_\_, *Kapita III; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Ketiga: Proses Produksi Kapitalis secara Menyeluruh*, Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume III: The Process of Capitalist Production as a Whole*, Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2007).
- \_\_\_\_\_, *The Poverty of Philosophy; Answer to The "Phylosophy of Poverty" By M. Proudhon* (Moscow: Foreign Languages Publishng House, 1884).
- Mas'oe'd, Mochtar, 1998, *Merkantilisme dan Strukturalisme: Gagasan anti-liberal*, dalam *Perspektif Ekonomi-Politik dalam Studi Hubungan Internasional*, Bahan Matrikulasi, Program Pasca Sarjana Konsentrasi Studi Hubungan Internasional, UGM.
- Martin Koor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2000.
- Ritzer, George & D. J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Strahm, H. Rudolf, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1999.
- Soejatmoko, dkk., *Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta, PLP2M, Cet. I., 1984.
- Sritua, Arif, *Pembangunaisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung CPSM, Cet. I., 1998.
- Smith, Adam, *The Wealth of Nations*, NY, 1937.
- Setiawan, Bonnie, 1999, *Peralihan Kapitalisme ke Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sterling-Folker, Jennifer, 2006. *Making Sense of Internatioanl Relations Theory*, London: Lynne Rienner Publishers
- Sugiono, Muhadi, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001.
- Wallerstein, I, 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press
- Weber, Max, *The Protestan Ethics and The Spirit of Capitalism*, London, 1990.[]

## **Hand-Out 08** **PETA DAN LANGKAH PRAXIS ANALISIS SOSIAL**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **Apakah Analisa Sosial Itu?**

Suatu proses analisa sosial adalah usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis. Sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Suatu analisis pada dasarnya "mirip" dengan sebuah "penelitian akademis" yang berusaha menyingkap suatu hal atau aspek tertentu. Dalam proses ini yang dilakukan bukan sekedar mengumpulkan data, berita atau angka, melainkan berusaha membongkar apa yang terjadi sesungguhnya, bahkan menjawab mengapa demikian, dan menemukan pula faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh kepada kejadian tersebut. Lebih dari itu, analisis sosial, seyogyanya mampu memberikan prediksi ke depan: kemungkinan apa yang terjadi.

Analisa sosial merupakan upaya untuk mengurai logika, nalar, struktur, atau kepentingan dibalik sebuah fenomena sosial. Analisa sosial bukan semata deskripsi sosiologis dari sebuah fenomena sosial. Analisa sosial hendak menangkap logika struktural atau nalar dibalik sebuah gejala sosial. Analisa sosial dengan demikian material, empiris, dan bukan sebaliknya, mistis, atau spiritualistik. Analisa sosial menafsirkan gejala sosial sebagai gejala material. Kekuatan dan gagasan ideologis dibalik gejala sosial harus dianalisa.

### **Wilayah Analisa Sosial**

1. Sistem-sistem yang beroperasi dalam suatu masyarakat.
2. Dimensi-dimensi obyektif masyarakat (organisasi sosial, lembaga-lembaga sosial, pola perilaku, kekuatan-kekuatan sosial masyarakat)
3. Dimensi-dimensi subyektif masyarakat (ideologi, nalar, kesadaran, logika berpikir, nilai, norma, yang hidup di masyarakat).

### **Pendekatan Dalam Analisa Sosial**

1. **Historis:** dengan mempertimbangkan konteks struktur yang saling berlainan dari periode-periode berbeda, dan tugas strategis yang berbeda dalam tiap periode.
2. **Struktural:** dengan menekankan pentingnya pengertian tentang bagaimana masyarakat dihasilkan dan dioperasikan, serta bagaimana pola lembaga-lembaga sosial saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada.

### **Bagaimana Hasil Analisa Sosial?**

Apakah hasil kesimpulan dari analisa sosial bersifat final? tentu saja tidak. Karena hasil dari analisa tersebut dapat dikatakan hanya merupakan kebenaran tentatif, yang bisa berubah sesuatu dengan fakta atau data dan temuan-temuan yang baru. Dengan demikian, analisa ini bersifat dinamis, terus bergerak, memperbarui diri, dikaji ulang dan terus harus diperkuat dengan fakta-fakta pendukung. Hasil analisa bukan suatu dogma, atau sejenis kebenaran tunggal.

### **Batas Analisa Sosial**

1. Analisa sosial bukanlah kegiatan monopoli intelektual, akademisi, atau peneliti. Siapapun dapat melakukan analisa sosial.
2. Analisa sosial tidaklah bebas nilai.
3. Analisa sosial memungkinkan kita bergulat dengan asumsi-asumsi kita, mengkritik, dan menghasilkan pandangan-pandangan baru.

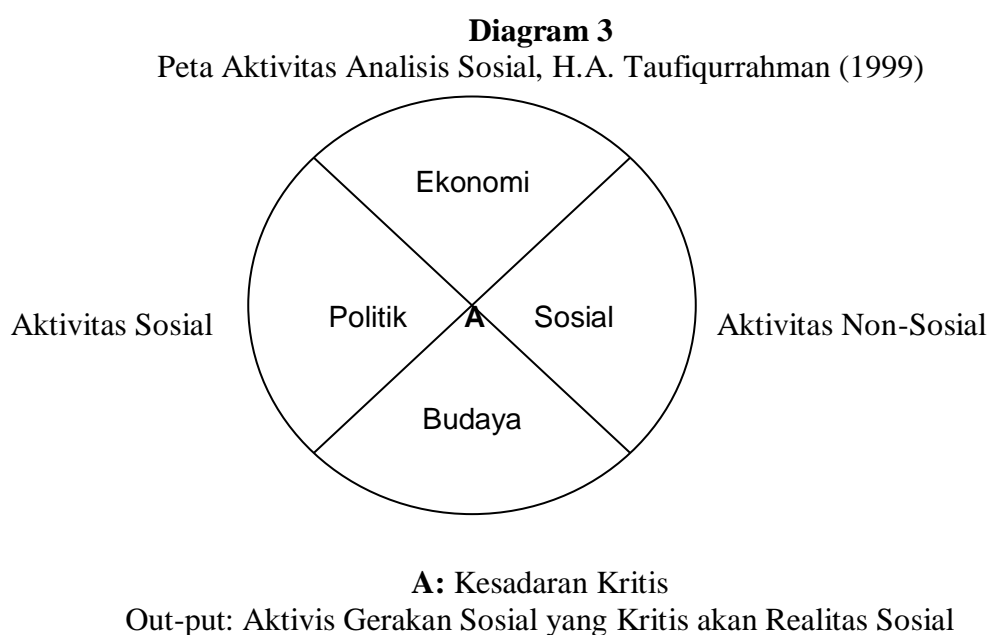
### Siapa Pelaku Analisa Sosial?

Semua pihak atau pelaku sosial yang menghendaki untuk mendekati dan terlibat langsung dengan realitas sosial. Bicara tentang analisis sosial, pada umumnya selalu dikaitkan dengan dunia akademik, kaum cendekiawan, ilmuwan atau kalangan terpelajar lainnya. Ada kesan yang sangat kuat bahwa analisis sosial hanya milik "mereka". Masyarakat awam tidak punya hak untuk melakukannya. Bahkan kalau melakukan, maka disediakan mekanisme sedemikian rupa, sehingga hasil analisis awam itu dimentahkan.

Pemahaman yang demikian, bukan saja keliru, melainkan mengandung maksud-maksud tertentu yang tidak sehat dan penuh dengan kepentingan. Pengembangan analisis sosial di sini, justru ingin membuka sekat atau dinding pemisah itu, dan memberikannya kesempatan kepada siapapun untuk melakukannya. Malahan mereka yang paling dekat dengan suatu kejadian, tentu akan merupakan pihak yang paling kaya dengan data dan informasi. Justru analisis yang dilakukan oleh mereka yang dekat dan terlibat tersebut akan lebih berpeluang mendekati kebenaran. Dengan demikian, tanpa memberikan kemampuan yang cukup kepada masyarakat luas untuk melakukan analisis terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka, atau apa yang mereka alami, maka mereka menjadi sangat mudah "dimanipulasi", "dibuat bergantung" dan pada gilirannya tidak bisa mengambil sikap yang tepat.

### Mengapa Gerakan Sosial Membutuhkan Analisa Sosial ?

Kalau kita pahami secara lebih mendalam, aktivitas sosial adalah sebuah proses penyadaran masyarakat dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lain yang lebih baik (baca: kesadaran kritis). Kalau kita menggunakan istilah yang lebih populer, aktivitas semacam itu bisa juga disebut sebagai aktivitas pemberdayaan (*Empowerment*) untuk suatu entitas atau komunitas masyarakat tertentu. Dari statemen tersebut, maka akan termuat suatu makna bahwa sebenarnya kesadaran kritis atas realitas sosial ini pada dasarnya ada pada setiap diri manusia. Hanya saja tingkat kesadaran kritis pada masing-masing orang itu kadarnya berbeda-beda. Dan aktivitas sosial adalah alat untuk menyadarkan atau memotivasi bagi munculnya kesadaran tersebut. Meskipun, sebagaimana kita ketahui, bahwa membangun kesadaran kritis atas realitas sosial itu tidaklah semudah membalik tangan, karena kesadaran itu dilingkupi oleh persoalan-persoalan (sosial dan sebagainya), yang senantiasa membelenggunya. Kalau kita gambarkan, maka persoalan yang melingkupi kesadaran kritis akan realitas sosial itu adalah sebagai berikut:





Oleh karena itu, untuk masuk pada titik sentral kesadaran kritis atas realitas sosial sebagaimana dimaksud dalam gerakan sosial di atas, maka tidak mungkin untuk tidak membongkar, mengurai dan menganalisa persoalan-persoalan yang ada disekitarnya. Pada konteks inilah kompetensi analisis sosial dalam gerakan sosial.

### **Signifikansi Analisa Sosial**

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami persoalan-persoalan yang berkembang (ada) secara lebih mendalam dan seksama (teliti); berguna untuk membedakan mana akar masalah (persoalan mendasar) dan mana yang bukan, atau mana yang merupakan masalah turunan.
2. Akan dapat dipakai untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan kelemahan) yang hidup dalam masyarakat.
3. Dapat mengetahui dengan lebih baik (akurat) mana kelompok masyarakat yang paling dirugikan (termasuk menjawab mengapa demikian).
4. Dari hasil analisa sosial tersebut dapat proyeksikan apa yang mungkin akan terjadi, sehingga dengan demikian dapat pula diperkirakan apa yang harus dilakukan.

### **Orientasi Analisa Sosial**

1. Analisa sosial jelas didedikasikan dan diorientasikan untuk keperluan perubahan.
2. Analisa sosial adalah watak mengubah yang dihidupkan dalam proses identifikasi. Justru karena itu pula, maka menjadi jelas bahwa analisa sosial merupakan salah satu titik simpul dari proses mendorong perubahan.
3. Analisa sosial akan menghasilkan semacam peta yang memberikan arahan dan dasar bagi usaha-usaha perubahan.

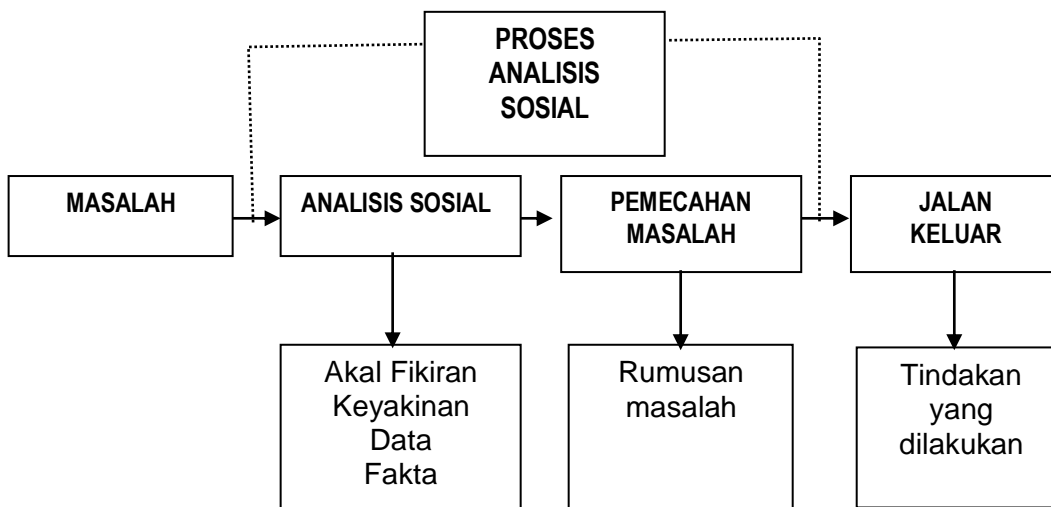
### **Prinsip-Prinsip Analisa Sosial**

1. Analisa sosial bukan suatu bentuk pemecahan masalah, melainkan hanya diagnosis (pencarian akar masalah), yang sangat mungkin digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah, karena analisa sosial memberikan pengetahuan yang lengkap, sehingga diharapkan keputusan atau tindakan yang diambil dapat merupakan pemecahan yang tepat.
2. Analisa sosial tidak bersifat netral, selalu berasal dari keberpihakan terhadap suatu keyakinan. Soal ini berkait dengan perspektif, asumsi-asumsi dasar dan sikap yang diambil dalam proses melakukan analisa. Karena pernyataan di atas, maka analisa sosial dapat digunakan oleh siapapun.
3. Analisa sosial lebih memiliki kecenderungan mengubah; tendensi untuk menggunakan gambaran yang diperoleh dari analisa sosial bagi keperluan tindakan-tindakan mengubah, maka menjadi sangat jelas bahwa analisa sosial berposisi sebagai salah satu simpul dan siklus kerja transformasi.
4. Analisa sosial selalu menggunakan ‘tindakan manusia’ sebagai sentral atau pusat dalam melihat suatu fenomena nyata.

### **Tahap-Tahap Analisa Sosial**

1. Tahap menetapkan posisi, orientasi: pada intinya dalam tahap ini, pelaku analisa perlu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen (ideologis) dari tindakan analisa sosial.
2. Tahap pengumpulan dan penyusunan data: tujuan dan maksud dari tahap ini, agar analisa memiliki dasar rasionalitas yang dapat diterima akal sehat. Ujung dari pengumpulan data ini adalah suatu upaya untuk merangkai data, dan menyusunnya menjadi diskripsi tentang suatu persoalan.
3. Tahap analisa: pada tahap ini, data yang telah terkumpul diupayakan untuk dicari atau ditemukan hubungan diantaranya.

**Diagram 4**  
Peta Proses Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)



### Apa Yang Penting Ditelaah dalam Melakukan Analisa Sosial

1. Kaitan Historitas (Sejarah Masyarakat).
2. Kaitan Struktur.
3. Nilai.
4. Reaksi yang berkembang dan arah masa depan.

### Model Telaah dalam Analisa Sosial

1. **Telaah Historis**, dimaksudkan untuk melihat ke belakang. Asumsi dasar dari telaah ini bahwa suatu peristiwa tidak dengan begitu saja hadir, melainkan melalui sebuah proses sejarah. Dengan ini, maka kejadian, atau peristiwa dapat diletakkan dalam kerangka masa lalu, masa kini dan masa depan.
2. **Telaah Struktur**. Biasanya orang enggan dan cemas melakukan telaah ini, terutama oleh stigmatisasi tertentu. Analisa ini sangat tajam dalam melihat apa yang ada, dan mempersoalkan apa yang mungkin tidak berarti digugat. Struktur yang akan dilihat adalah: ekonomi (distribusi sumberdaya); politik (bagaimana kekuasaan dijalankan); sosial (bagaimana masyarakat mengatur hubungan di luar politik dan ekonomi); dan budaya (bagaimana masyarakat mengatur nilai).
3. **Telaah Nilai**. Penting pula untuk diketahui tentang apa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Mengapa demikian. Dan siapa yang berkepentingan dengan pengembangan nilai-nilai tersebut.
4. **Telaah Reaksi**. Melihat reaksi yang berkembang berarti mempersoalkan mengenai siapa yang lebih merupakan atau pihak mana yang sudah bereaksi, mengapa reaksi muncul dan bagaimana bentuknya. Telaah ini penting untuk menuntun kepada pemahaman mengenai "peta" kekuatan yang bekerja.
5. **Telaah Masa Depan**. Tahap ini lebih merupakan usaha untuk memperkirakan atau meramalkan, apa yang terjadi selanjutnya. Kemampuan untuk memberikan prediksi (ramalan) akan dapat menjadi indikasi mengenai kualitas tahap-tahap sebelumnya.

**Diagram 5**  
Peta Kerangka Pikir Analisis Sosial

Paradigma Konsensus		Paradigma Konflik
Konservatif	Liberal	Konflik/ Transformis
Dalam masyarakat ada kelas-kelas sosial, dan ada kerukunan kelas		Ada kelas sosial, ada konflik antar-kelas
Struktur sosial merupakan hasil konsensus antar anggota masyarakat, struktur sosial tidak pernah dipemasalahkan, bahkan dipertahankan		Struktur sosial adalah hasil konstruksi kelas sosial tertentu, yang dipaksakan untuk ditaati oleh masyarakat. Struktur sosial selalu dipemasalahkan
Akar permasalahan terletak pada manusia itu sendiri, atau karena sesuatu kekuatan suprasejarah	Akar permasalahan terletak pada kesenjangan kesadaran, kurangnya kesempatan, kurangnya keterampilan, kesempatan, dan lainnya.	Akar permasalahan berakar pada struktur sosial yang tidak adil, menindas.
Meringankan beban korban	Modernisasi sosial	Mentransformasikan struktur yang tidak adil ke struktur yang adil
Pembagian sembako, bakti sosial, pengobatan gratis, khotbah, bantuan untuk kelaparan, pelayanan kaum cacat, himbauan moral, dan lainnya	Pelatihan, kursus, pembangunan infrastruktur	Pengorganisasian masyarakat, pendidikan politik, gerakan sosial, advokasi kebijakan, gerakan massa, pemogokan, pemboikotan, gagasan-gagasan sosial dan struktur alternatif
Masyarakat itu sendiri	Kaum elite, pemerintah, agamawan, LSM, dan lainnya	Masyarakat dan kepemimpinan perubahan/gerakan
Otoritas	Instruktif, konsultatif	Delegatif, kependamuan, transformatif
Kasih sayang, menolong orang miskin, kepedulian, rasa kemanusiaan	Persamaan hak dan kesempatan	Kesadaran struktural
Karitatif	Reformatif	Transformatif

**Diagram 6**  
Model-Model Perubahan dan Implikasinya

Implikasi	Model EKonomi	Model Sosial	Model Politik
Ekonomi	Akumulasi kapital/kapitalisasi	(Re)Distribusi	Transformasi struktural
Politik	Stabilitas	Bantuan	Mobilisasi/transformasi politik
Kebudayaan	Pertumbuhan	Kesamaan	Trasnformasi

			kultural/Imajinasi
Transformasi	Pertumbuhan infrastruktur	Penguatan daya beli	Struktural
Missi	Panggilan kelas menengah	Bekerja dengan masyarakat marjinal	Mendorong transformasi struktural dalam semua level
Pendidikan	Peningkatan infrastruktur sekolah	Pemberian atau pencarian beasiswa	Akses struktural Pendidikan

**Diagram 7**  
Model Perubahan Interpretatif

Variabel	Tradisional	Liberal	Radikal
Pandangan waktu	Siklis	evolusioner	Transformatif
Pandangan ruang	organis	pluralis	Interdependen
Prinsip pengatur	Otoritarian/ketertiban	Managerial/ Keseimbangan	Partisipatif/masyarakat
Perubahan utama	Biologis/ Tubuh	mekanistik	Transformasional
Sikap terhadap konflik	Menyerap atau menolak	Mengawasi	Mengelola konflik

Keterangan:

#### *Tradisional*

1. Siklis: kepingan-kepingan episode (masa lalu, kini, masa depan) diintegrasikan dalam keseluruhan sejarah
2. Organik: hanya ada susunan tunggal yang diatur sesuai kepentingan umum
3. Otoritarian: masyarakat dipandang seperti piramida yang dikendalikan dari puncak dengan sedikit partisipasi bawah
4. Biologis: masyarakat dipandang seperti organisme yang analog dengan tubuh manusia
5. Menyimpang: perubahan yang mengubah siklus sejarah dianggap menyimpang

#### *Liberal*

1. Evolusioner: perkembangan sejarah bersifat linear. Gerak sejarah bukan siklis, tapi kemajuan/progresif
2. Pluralis: ruang sosial disusun berdasarkan berbagai macam bagian yang tidak terpisah dan tak berhubungan
3. Manajerial: menjaga keseimbangan semua unsur atau bagian
4. Mekanistik: masyarakat dipandang sebagai mesin yang bekerja
5. Pengawasan: perubahan sosial merupakan kehendak sejarah, namun tidak mengubah struktur dasar yang mendasarinya. Perubahan selalu diawasi agar tidak menyimpang

#### *Transformatif*

1. Transformatif: setiap peristiwa sejarah dipandang secara fundamental menimbulkan tahapan baru, masa lalu, sekarang, dan masa depan, terkait secara dialektik
2. Interdependen: masyarakat dianggap sebagai keseluruhan sistem yang kreatif, dialektik.
3. Partisipasi: kepentingan umum merupakan input masyarakat, hasil definisi masyarakat

4. Transformasi kultural: masyarakat terbentuk secara kreatif melalui dialog maupun cita-cita utopis anggotanya.
5. Kreatif: konflik merupakan penggerak sejarah, dan kemajuan.

### **Tahap Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial**

Pada tahap ini, setelah berbagai aspek tersebut ditemukan, maka pada akhirnya suatu kesimpulan akan diambil; kesimpulan merupakan gambaran utuh dari suatu situasi, yang didasarkan kepada hasil analisa. Dengan demikian kualitas kesimpulan sangat bergantung dari proses tahap-tahap analisa, juga tergantung pada kompleksitas isu, kekayaan data dan akurasi data yang tersedia, ketepatan pertanyaan atau rumusan terhadap masalah, dan kriteria yang mempengaruhi penilaian-penilaian alas unsur-unsur akar masalah.

### **Dasar Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial**

Yang tidak kalah penting adalah menemukan apa yang menjadi akar masalah. Untuk menemukan akar masalah dapat dituntun dengan pertanyaan: *mengapa?* Untuk sampai kepada akar masalah, maka penting dilakukan kualifikasi secara ketat, guna menentukan faktor mana yang paling penting. Kesimpulan tidak lain berbicara mengenai faktor apa yang memberikan pengaruh paling dominan (paling kuat) dan demi kepentingan siapa unsur akar tersebut bekerja. Sebagaimana diungkapkan di depan, kesimpulan tidak menjadi sesuatu yang final, melainkan akan mungkin diperbaiki menurut temuan-temuan atau data baru.[]

## **Hand-Out 09** **TEHNIK ADVOKASI DASAR**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **Prawacana**

Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata. Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh Prof. Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (kini Universitas Negeri Malang) yang diterbitkan sejak tahun 1980, kata *advocate* dalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-macam. *Advocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis.

Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari berbagai pengertian advokasi diatas, kita dapat membagi penjelasan itu atas empat bagian, yakni aktor atau pelaku, strategi, ruang lingkup dan tujuan.

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik. Meminjam bahasa Mansour Faqih, advokasi yang dimaksud adalah advokasi keadilan sosial. Penegasan ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman yang akan berujung pada kesalahan menerapkan strategi dan tujuan. Bagaimanapun banyak lembaga atau organisasi yang merasa prihatin dengan kenyataan sosial, kemudian mengupayakan sesuatu, namun pada akhirnya terjebak pada kesalahan dalam mendiagnosa masalah. Misalnya saja organisasi yang berjuang memberantas kemiskinan yang menggunakan pendekatan sedekah (*charity*) belaka dengan membagi-bagi uang dan sebagainya tanpa pernah mempertanyakan apa yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Membantu orang yang sedang dalam kesulitan/kemiskinan dengan sedekah memang tidak salah, bahkan dianjurkan. Namun tindakan itu tidak strategis karena tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dengan kata lain, sedekah merupakan tindakan yang hanya menyelesaikan akibat, bukan sebab. Demikian halnya dengan masalah-masalah lain yang menyangkut harkat hidup orang banyak, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan keadilan sosial.

## Mengapa Kebijakan?

Sesungguhnya masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat merupakan dampak dari hubungan dan tarik-menarik kepentingan antara tiga aktor/pelaku governance, yakni negara, swasta dan masyarakat. Ketika hubungan itu berjalan tidak seimbang, biasanya terjadi karena ada persekongkolan antara negara dan swasta, maka dapat dipastikan akan lahir kebijakan-kebijakan korup yang sangat merugikan masyarakat. Ruang lingkup kebijakan publik itu sendiri meliputi peraturan (rules), regulasi, standarisasi, Undang-Undang, pernyataan dan Instruksi (Decree) yang memiliki fungsi sebagai norma umum, standar etika maupun sanksi.

Satu bentuk produk kebijakan yang merugikan masyarakat luas misalnya saja kebijakan Pemerintah Megawati mengeluarkan Inpres No. 8 Tahun 2002 mengenai Release and Discharge (R&D) yang membebaskan sekaligus memberikan jaminan tidak akan dituntut secara hukum bagi para konglomerat pengguna BLBI yang telah melunasi utang mereka.

Kebijakan ini sungguh konyol dan merugikan masyarakat luas karena pemerintah sama sekali tidak memperhatikan dimensi pidana korupsi, adanya moral hazard, pelanggaran prinsip prudential dalam berbagai kasus BLBI. Pemerintah menganggap kasus BLBI hanya merupakan perkara perdata utang-piutang saja. Padahal dana negara (baca: masyarakat) yang digunakan untuk BLBI mencapai Rp 600 triliun. Di sisi lain, Pemerintah SBY telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi BBM bagi masyarakat miskin karena subsidi dianggap membebani anggaran negara. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mensubsidi BBM? Menurut Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie, mencapai Rp 69 Triliun dengan asumsi harga minyak dunia per barel adalah US\$ 37. Coba bandingkan dengan dana BLBI yang dipakai untuk 'mensubsidi' para konglomerat perbankan yang mencapai Rp 600 triliun.

Kebijakan yang mengantarkan pada terciptanya situasi ketidakadilan, kerusakan dan kemiskinan tidak hanya berdimensi nasional, namun juga menjadi masalah di tingkat lokal. Misalnya saja kebijakan penyusunan APBD yang telah disahkan dalam Perda di beberapa daerah banyak diprotes warga. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, dari sisi perimbangan, dana yang dialokasikan untuk belanja rutin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja publik. Kedua, kebutuhan akan belanja publik seringkali tidak ada kaitannya langsung dengan kebutuhan real masyarakat sehingga rawan dikorupsi. Kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama yang menyangkut pembelian kapal, pesawat, helikopter yang saat ini sedang ramai diperbincangkan merupakan salah satu contoh kecil betapa alokasi anggaran untuk belanja publik seringkali tidak mengacu pada kebutuhan konkret masyarakat. Ketiga, anggaran untuk menopang operasional eksekutif dan legislatif kerap kali tidak masuk akal karena alokasinya sangat besar.

Dari beberapa contoh kasus diatas, kita dapat melihat secara jelas bahwa akar masalah yang menjadi penyebab kerugian bagi masyarakat luas adalah karena adanya kebijakan. Dengan demikian, advokasi sesungguhnya adalah mempersoalkan ketidakadilan struktural dan sistematis yang tersembunyi di balik suatu kebijakan, undang-undang atau peraturan yang berlaku. Maka melakukan advokasi juga mempersoalkan hal-hal yang berada di balik suatu kebijakan, secara tidak langsung mulai mencurigai adanya bibit ketidakadilan yang tersembunyi di balik suatu kebijakan resmi. Oleh karena itu, tujuan dari advokasi keadilan sosial adalah bagaimana mengupayakan/mendorong lahirnya sebuah kebijakan publik yang adil, bagaimana merubah kebijakan publik yang tidak adil dan bagaimana mempertahankan kebijakan yang sudah adil dengan suatu strategi. Sebuah kebijakan publik tidak akan pernah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Walaupun dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat wakil rakyat, tapi hal itu tidak akan pernah menjamin bahwa kepentingan rakyat akan menjadi prioritas. Hal ini karena aktor perumus dan pembuat kebijakan memiliki logika kekuasaan dan kepentingan sendiri untuk beroperasi. Apalagi jika ruang publik dalam kehidupan politik tidak mendapatkan jaminan dalam sistem dan konstitusi.

Agar kebijakan publik tidak menjadi alat yang justru meminggirkan kepentingan publik, karena digunakan sebagai alat kekuasaan sebuah bangsa untuk melakukan/melegitimasi perbuatan-perbuatan korup dan manipulatif bagi kepentingan segelintir orang, kebijakan publik harus selalu bersinggungan dengan konsep demokrasi. Artinya kebijakan publik tidak sekedar disusun atau

dirancang oleh para pakar dan elit penguasa yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak, melainkan harus menoleh pada opini publik yang beredar. Demokratis atau tidaknya perumusan kebijakan publik yang telah dilakukan akan sangat tergantung dari luas atau tidaknya ruang publik sendiri. Oleh karenanya, perluasan ruang publik dengan melakukan reformasi konstitusional yang mengarahkan pada transparansi dan keterbukaan yang lebih besar dalam proses politik yang ada pada sebuah negara harus dilakukan.

### **Advokasi: Kerangka Analisis, Kerangka Kerja dan Kerangka Jaringan**

Mengingat advokasi merupakan kegiatan atau usaha untuk memperbaiki/merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut, maka menjadi penting untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik itu. Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat sebuah kebijakan itu sebagai suatu sistem hukum. Secara teoritis, sistem hukum mengacu pada tiga hal:

- *Pertama*, isi hukum (content of law) yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk UU, PP, Keppres dan lain sebagainya atau karena adanya ‘kesepakatan umum’ (konvensi) tidak tertulis yang dititikberatkan pada naskah (teks) hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku.
- *Kedua*, tata laksana hukum (structure of law) yang merupakan seperangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi, partai politik dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen).
- *Ketiga* adalah budaya hukum (culture of law) yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran, penafsiran terhadap dua aspek hukum diatas, isi dan tata-laksana hukum. Oleh karena itu idealnya suatu kegiatan atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan ketiga-tiganya. Dengan demikian, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis didesain untuk mendesakkan terjadinya perubahan, baik dalam isi, tata-laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Perubahan itu tidak harus selalu terjadi dalam waktu yang bersamaan, namun bisa saja bertahap atau berjenjang dari satu aspek hukum tersebut yang dianggap merupakan titik-tolak paling menentukan.

Untuk melakukan advokasi pada tiga aspek hukum diatas, perlu dilakukan pendekatan yang berbeda mengingat ketiga aspek hukum tersebut dihasilkan oleh proses-proses yang memiliki kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, menurut Roem, kegiatan advokasi harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang disesuaikan sebagai berikut:

- Proses-proses legislasi dan yuridiksi, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya.
- Proses-proses politik dan birokrasi, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi, mulai dari lobi, negoisasi, mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya.
- Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi, yakni suatu kegiatan untuk membentuk pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam pengertian mampu menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai, keahlian dan ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan.



Mengingat advokasi merupakan pekerjaan yang memiliki skala cukup besar (karena sasaran perubahan ada tiga aspek), maka satu hal yang sangat menentukan keberhasilan advokasi adalah pada strategi membentuk jaringan kerja advokasi atau jaringan kerja organisasi. Pasalnya kegiatan advokasi adalah pekerjaan multidimensi, sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda dalam satu koordinasi yang sistematis dan terpadu. Sebagai catatan, tidak ada satu organisasi pun yang dapat melakukan sendiri kegiatan advokasi tanpa ada jaringan atau dukungan dari kelompok lainnya. Justru semakin besar keterlibatan berbagai pihak, akan semakin kuat tekanan yang dapat diberikan dan semakin mudah kegiatan advokasi dilakukan.

Untuk membentuk jaringan organisasi advokasi yang kuat, dibutuhkan bentuk-bentuk jaringan yang memadai. Sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk jaringan organisasi advokasi yang satu sama lainnya memiliki fungsi dan peranan advokasi yang berbeda, namun berada pada garis koordinasi dan target yang sama.

- *Pertama*, jaringan kerja garis depan (front lines) yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi juru bicara organisasi, melakukan lobi, melibatkan diri dalam aksi yuridis dan legislasi serta penggalangan lingkaran sekutu (aliansi). Tentunya pihak-pihak yang hendak terlibat dalam kegiatan advokasi jaringan kerja garis depan setidaknya harus memiliki teknik dan ketrampilan untuk melakukan tugas dan fungsi jaringan ini.
- *Kedua*, jaringan kerja basis yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian, membangun basis massa, pendidikan politik kader, mobilisasi aksi dan membentuk lingkaran inti.
- *Ketiga*, jaringan kerja pendukung yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung kerja-kerja advokasi dengan cara mengupayakan dukungan logistik, dana, informasi, data dan akses.

Berhasil atau tidaknya advokasi yang kita lakukan sangat tergantung dari penyusunan strategi yang kita buat. Oleh karena itu dalam menyusun strategi advokasi harus mempertimbangkan beberapa aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan advokasi. Aspek-aspek itu adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, bahwa dalam advokasi kita harus menentukan target yang jelas. Maksudnya kita harus menentukan kebijakan publik macam apa yang akan kita ubah. Apakah itu UU, Perda atau produk hukum lainnya.
- *Kedua*, kita juga harus menentukan prioritas mengingat tidak semua kebijakan bisa diubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kita harus menentukan prioritas mana dari masalah dan kebijakan yang akan diubah.
- *Ketiga*, realistis. Artinya bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah seluruh kebijakan publik. Oleh karena itu kita harus menentukan pada sisi-sisi yang mana kebijakan itu harus dirubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan atau yang lainnya.
- *Keempat*, batas waktu yang jelas. Alokasi waktu yang jelas akan menuntun kita dalam melakukan tahap-tahap kegiatan advokasi, kapan dimulai dan kapan akan selesai.
- *Kelima*, dukungan logistik. Dukungan sumber daya manusia dan dana sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi.
- *Keenam*, analisa ancaman dan peluang.[]

## **Hand-Out 10**

### **MANAJEMEN & RESOLUSI KONFLIK**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### **Definisi Konflik**

- Menurut Webster (1966) dalam Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin, istilah “conflict” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan”.
- Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas. Konflik merupakan sebuah duo yang dinamis.

#### **Definisi Manajemen Konflik**

- Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik.
- Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.
- Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.
- Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.
- Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga.
- Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

#### **Transformasi Konflik**

- Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.
  1. *Pencegahan Konflik*, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
  2. *Penyelesaian Konflik*, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
  3. *Pengelolaan Konflik*, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
  4. *Resolusi Konflik*, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
  5. *Transformasi Konflik*, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

- Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.

### **Proses Manajemen Konflik**

- Sementara Minnery (1980:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Minnery (1980:220) juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal.
- Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan meliputi beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik.
- Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam konteks perencanaan dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga.

### **Teori-teori Utama Mengenai Sebab-sebab Konflik**

1. *Teori hubungan masyarakat.* Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
2. *Teori kebutuhan manusia.* Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.
3. *Teori negosiasi prinsip.* Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran: membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
4. *Teori identitas.* Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
5. *Teori kesalahpahaman antarbudaya.* Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.
6. *Teori transformasi konflik.* Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

### Penyebab Konflik (1)

- Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integrative dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.
- Aspirasi dapat mengakibatkan konflik karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa berhak memiliki objek tersebut. Pertimbangan pertama bersifat realistis, sedangkan pertimbangan kedua bersifat idealis.

### Penyebab Konflik (2)

#### A. Faktor Manusia

1. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya.
2. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku.
3. Timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter.

#### B. Faktor Organisasi

1. **Persaingan dalam menggunakan sumberdaya.** Apabila sumberdaya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit/departemen dalam suatu organisasi.
2. **Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi.** Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Misalnya, unit penjualan menginginkan harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen, sementara unit produksi menginginkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan.
3. **Interdependensi tugas.** Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lainnya.
4. **Perbedaan nilai dan persepsi.** Suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif, karena merasa mendapat perlakuan yang tidak “adil”. Para manajer yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana.
5. **Kekaburan yurisdiksional.** Konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih.
6. **Masalah “status”.** Konflik dapat terjadi karena suatu unit/departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit/departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hirarki organisasi.
7. **Hambatan komunikasi.** Hambatan komunikasi, baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit/ departemen.

### Akibat Negatif Konflik

- Menghambat komunikasi.
- Mengganggu kohesi (keeratan hubungan).
- Mengganggu kerjasama atau “team work”.
- Mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi.
- Menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan.
- Individu atau personil mengalami tekanan (stress), mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustrasi, dan apatisme.

- Apabila konflik mengarah pada kondisi destruktif, maka hal ini dapat berdampak pada penurunan efektivitas kerja dalam organisasi baik secara perorangan maupun kelompok, berupa penolakan, resistensi terhadap perubahan, apatis, acuh tak acuh, bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif, berupa demonstrasi.

### Akibat Positif Konflik

- Membuat organisasi tetap hidup dan harmonis.
- Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- Melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan per-baikannya dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi.
- Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif.
- Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat.
- Konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakkan suatu perubahan: Membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, Memberikan saluran baru untuk komunikasi, Menumbuhkan semangat baru pada staf, Memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi, Menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi.

### Strategi Mengatasi Konflik

- Munculnya konflik tidak selalu bermakna negatif, artinya jika konflik dapat dikelola dengan baik, maka konflik dapat memberi kontribusi positif terhadap kemajuan sebuah organisasi. Beberapa strategi mengatasi konflik antara lain adalah:
  1. *Contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai salah satu pihak atau pihak lain;
  2. *Yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang sebetulnya diinginkan;
  3. *Problem Solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak;
  4. *With Drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis. *With drawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, dan
  5. *Inaction* (diam) tidak melakukan apapun, dimana masing-masing pihak saling menunggu langkah berikut dari pihak lain, entah sampai kapan.

### Konflik Sebagai Suatu Oposisi

- Konflik, dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam bidang manajemen serta menimbulkan perbedaan pendapat, keyakinan, dan ide.
- Dalam pada itu, ketika individu bekerja sama satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka wajar seandainya dalam waktu yang cukup lama terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Ibarat piring, banyak yang pecah atau retak, hanya karena bersentuhan dengan piring lainnya.

### Tahap-tahap Berlangsungnya Konflik

- Menurut Mulyasa pada umumnya konflik berlangsung dalam lima tahap, yaitu tahap potensial, konflik dirasakan, pertentangan, konflik terbuka, dan akibat konflik.
  1. **Tahap potensial**, yaitu munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkungan merupakan potensi terjadinya konflik;
  2. **Konflik dirasakan**, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu, dan mereka mulai memikirkannya;

3. **Pertentangan**, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat di antara individu atau kelompok yang saling bertentangan;
4. **Konflik terbuka**, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka;
5. **Akibat konflik**, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Jika konflik terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan, seperti tukar pikiran, ide dan menimbulkan kreativitas. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dan melampaui batas, maka akan menimbulkan kerugian seperti saling permusuhan.



Ron Claassen (1999), *Center for Peacemaking and Conflict Studies*, Adapted from Shawchuck. Ada dalam Duane Ruth-Heffelbrow, *Conflict & Peacemaking Across Cultures Training for Trainers*, Fresno Pacific University, 1999.

### Latar Belakang Konflik

- Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.
- Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi.
- Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

### Faktor-faktor Penyebab Konflik

- Adapun faktor-faktor penyebab konflik antara lain:
  1. **Perbedaan individu**, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan;
  2. **Perbedaan latar belakang kebudayaan** sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya;
  3. **Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok**, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial; dan
  4. **Perubahan-perubahan nilai** yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

## Tingkatan Konflik

1. **Konflik intrapersonal**, yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik intrapersonal akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan, dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan.
2. **Konflik interpersonal**, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Konflik yang terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan dimana hasil bersama sangat menentukan.
3. **Konflik intragrup**, yaitu konflik antara anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda, ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Sedangkan konflik efektif terjadi karena tangapan emosional terhadap suatu situasi tertentu.
4. **Konflik intergrup**, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik intergrup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatkannya tuntutan akan keahlian.
5. **Konflik intraorganisasi**, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi.
6. **Konflik interorganisasi**, yang terjadi antar organisasi. Konflik inter organisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain, konflik terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya konflik yang terjadi antara lembaga pendidikan dengan salah satu organisasi masyarakat.

## Konflik Intraorganisasi

- Konflik intraorganisasi meliputi empat sub jenis :
  1. **Konflik vertikal**, yang terjadi antara pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya konflik antara Rektor dengan tenaga kependidikan;
  2. **Konflik horizontal**, yang terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi Misalnya antara tenaga kependidikan;
  3. **Konflik lini-staf**, yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Misalnya konflik antara Rektor dengan tenaga administrasi;
  4. **Konflik peran**, yang terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran. Misalnya Rektor menjabat sebagai ketua dewan pendidikan;

## Metode Penyelesaian Konflik

- **Dominasi atau Supresi**
- **Kompromis**
- **Pemecahan Problem Integrative**

## Penyelesaian Konflik: Dominasi atau Supresi

- Metode-metode dominasi dan supresi biasanya memiliki dua macam persamaan, yaitu:
  1. Mereka menekan konflik, dan bahkan menyelesaikannya dengan jalan memaksakan konflik tersebut menghilang “di bawah tanah”;
  2. Mereka menimbulkan suatu situasi manang-kalah, di mana pihak yang kalah terpaksa mengalah karena otoritas lebih tinggi, atau pihak yang lebih besar kekuasaannya, dan mereka biasanya menjadi tidak puas, dan sikap bermusuhan muncul.

## Tindakan Supresi dan Dominasi

- **Memaksa (Forcing)**. Apabila orang yang berkuasa pada pokoknya menyatakan “Sudah, jangan banyak bicara, saya berkuasa di sini, dan Saudara harus melaksanakan perintah saya”, maka semua argumen habis sudah. Supresi otokratis demikian memang dapat

menyebabkan timbulnya ekspresi-ekspresi konflik yang tidak langsung, tetapi destruktif seperti misalnya ketaatan dengan sikap permusuhan (*Malicious obedience*) Gejala tersebut merupakan salah satu di antara banyak macam bentuk konflik, yang dapat menyebar, apabila supresi (peneanan) konflik terus-menerus diterapkan.

- **Membujuk (*Smoothing*)**. Dalam kasus membujuk, yang merupakan sebuah cara untuk menekan (*mensupresi*) konflik dengan cara yang lebih diplomatic, sang manager mencoba mengurangi luas dan pentingnya ketidaksetujuan yang ada, dan ia mencoba secara sepihak membujuk pihak lain, untuk mengikuti keinginannya. Apabila sang manager memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak lain tersebut, dan sarannya cukup masuk akal, maka metode tersebut dapat bersifat efektif. Tetapi andaikata terdapat perasaan bahwa sang menejer menguntungkan pihak tertentu, atau tidak memahami persoalan yang berlaku, maka pihak lain yang kalah akan menentanginya.
- **Menghindari (*Avoidence*)**. Apabila kelompok-kelompok yang sedang bertengkar datang pada seorang manajer untuk meminta keputusannya, tetapi ternyata bahwa sang manajer menolak untuk turut campur dalam persoalan tersebut, maka setiap pihak akan mengalami perasaan tidak puas. Memang perlu diakui bahwa sikap pura-pura bahwa tidak ada konflik, merupakan sebuah bentuk tindakan menghindari. Bentuk lain adalah penolakan (*refusal*) untuk menghadapi konflik, dengan jalan mengulur-ulur waktu, dan berulang kali menanggguhkan tindakan, “sampai diperoleh lebih banyak informasi”
- **Keinginan Mayoritas (*Majority Rule*)**. Upaya untuk menyelesaikan konflik kelompok melalui pemungutan suara, dimana suara terbanyak menang (*majority vote*) dapat merupakan sebuah cara efektif, apabila para anggota menganggap prosedur yang bersangkutan sebagai prosedur yang “fair” Tetapi, apabila salah satu blok yang memberi suara terus-menerus mencapai kemenangan, maka pihak yang kalah akan merasa diri lemah dan mereka akan mengalami frustrasi.

### Penyelesaian Konflik: Kompromis

- Melalui tindakan kompromi, para manajer mencoba menyelesaikan konflik dengan jalan menghimbau pihak yang berkonflik untuk mengorbankan sasaran-sasaran tertentu, guna mencapai sasaran-sasaran lain.
- Keputusan-keputusan yang dicapai melalui jalan kompromi, agaknya tidak akan menyebabkan pihak-pihak yang berkonflik untuk merasa frustrasi atau mengambil sikap bermusuhan.
- Tetapi, dipandang dari sudut pandangan organisatoris, kompromis merupakan cara penyelesaian konflik yang lemah, karena biasanya tidak menyebabkan timbulnya suatu pemecahan, yang paling baik membantu organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuannya.
- Justru, pemecahan yang dicapai adalah bahwa ke dua belah pihak yang berkonflik dapat “hidup” dengannya.

### Bentuk-bentuk Kompromis

- **Separasi (*Separation*)**, pihak yang berkonflik dipisahkan sampai mereka mencapai suatu pemecahan;
- **Aritrasi (*Arbitration*)**, pihak-pihak yang berkonflik tunduk terhadap keputusan pihak ketiga (yang biasanya tidak lain dari pihak manajer mereka sendiri);
- **Mengambil keputusan berdasarkan factor kebetulan (*Settling by chance*)**, keputusan tergantung misalnya dari uang logam yang dilempar ke atas, mentaati peraturan-peraturan yang berlaku (*resort to rules*) , dimana para pihak yang bersaing setuju untuk menyelesaikan konflik dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku;
- **Menyogok (*Bribing*)**, Salah satu pihak menerima imbalan tertentu untuk mengakhiri konflik terjadi.



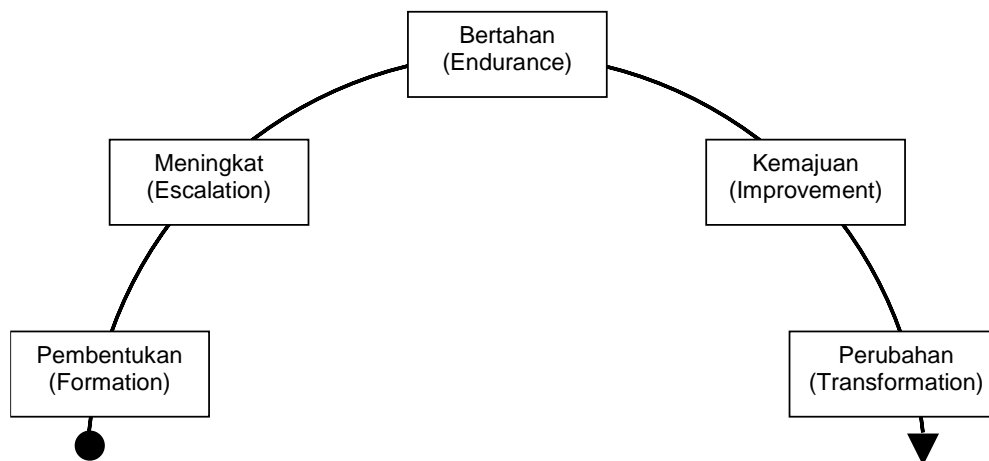
### Penyelesaian Konflik: Pemecahan Problem Integrative

- Dengan metode ini konflik antar kelompok dialihkan menjadi sebuah situasi pemecahan masalah bersama, yang dapat dipecahkan dengan bantuan teknik-teknik pemecahan masalah.
- Pihak-pihak yang berkonflik, bersama-sama mencoba memecahkan problem yang timbul antara mereka.
- Justu mereka tidak menekan konflik ataupun mencoba mencari suatu kompromis, tetapi mereka secara terbuka bersama-sama mencoba mencari sebuah pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak.

### Tipe Penyelesaian Konflik Secara Integrative

- Ada tiga macam tipe metode penyelesaian konflik secara integrative yaitu metode:
  1. Consensus (*Concensus*);
  2. Konfrontasi (*Confrontation*); dan
  3. Penggunaan tujuan-tujuan superordinat (*Superordinate goals*)

### Tahap-tahap Kehidupan Konflik



Ron Claassen (1999), *Center for Peacemaking and Conflict Studies*, Adapted from Shawchuck. Ada dalam Duane Ruth-Heffelbrow, *Conflict & Peacemaking Across Cultures Training for Trainers*, Fresno Pacific University, 1999.

### 6 Tipe Pengelolaan Konflik

- Manajemen harus mampu meredam persaingan yang sifatnya berlebihan (yang melahirkan konflik yang bersifat disfungsional) yang justru merusak spirit sinergisme organisasi tanpa melupakan continuous re-empowerment. Ada 6 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik yang muncul (Dawn M. Baskerville, 1993:65) yaitu :
  1. **Avoiding**; gaya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Hal-hal yang sensitif dan potensial menimbulkan konflik sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka.
  2. **Accomodating**; gaya ini mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik, selanjutnya dicari jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan-masukan yang diperoleh.
  3. **Compromising**; merupakan gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi (jalan tengah) atas konflik yang sama-sama memuaskan (lose-lose solution).
  4. **Competing**; artinya pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik, dan pada akhirnya harus ada pihak yang dikorbankan (dikalahkan) kepentingannya

demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa (win-lose solution).

5. **Collaborating**; dengan cara ini pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan, karena mereka justru bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan, dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain. Singkatnya, kepentingan kedua pihak tercapai (menghasilkan win-win solution).
6. **Conglomeration** (mixed type); cara ini menggunakan kelima style bersama-sama dalam penyelesaian konflik.

### Gaya dalam Penyelesaian Konflik

- Perlu kita ingat bahwa dalam memilih style yang akan dipakai oleh seseorang atau organisasi di dalam pengelolaan konflik akan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian/karakter (personality), motivasi, kemampuan (abilities) atau pun kelompok acuan yang dianut oleh seseorang atau organisasi.
- Dapat dikatakan bahwa pilihan seseorang atas gaya mengelola konflik merupakan fungsi dari kondisi khusus tertentu dan orientasi dasar seseorang atau perilakunya dalam menghadapi konflik tersebut yang juga berkaitan dengan nilai (value) seseorang tersebut.
- Pada level subkultur (subculture), shared values dapat dipergunakan untuk memprediksi pilihan seseorang pada gaya dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Subkultur seseorang diharapkan dapat mempengaruhi perilakunya sehingga akan terbentuk perilaku yang sama dengan budayanya (M. Kamil Kozan, 2002:93-96).

### Taktik Penyelesaian Konflik

- **Rujuk**: Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.
- **Persuasi**: Usaha mengubah po-sisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
- **Tawar-menawar**: Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit.
- **Pemecahan masalah terpadu**: Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.
- **Penarikan diri**: Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.
- **Pemaksaan dan penekanan**: Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak hams mengalah dan menyerah secara terpaksa.
- **Intervensi (campur tangan) pihak ketiga**: Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

### Penyelesaian Konflik dengan Pihak Ketiga

- **Arbitrase (arbitration):** Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.
- **Penengahan (mediation):** Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mela-pangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.
- **Konsultasi:** Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

### Empat Kelompok Cara Pendekatan Terhadap Konflik

1 PENYELESAIAN KONFLIK SECARA PRIBADI OLEH PIHAK- PIHAK YG BERKONFLIK	Menghindari Konflik
	Penyelesaian Informal
	Negosiasi
2 PENYELESAIAN SECARA PRIBADI DENGAN BANTUAN PIHAK KE III	Mediasi
	Administrative: 1) Privat, 2) Publik
	Arbitrasi: 1) Nasihat, 2) Mengikat
3 PENYELESAIAN DENGAN PIHAK KE III SECARA LEGAL/ RESMI/ PUBLIK	Pengadilan/ Yudikatif
	Legislatif: 1) Voting
4 PENYELESAIAN DI LUAR JALUR HUKUM (PEMAKSAAN)	Non-Violent Action: 1) Privat, 2) Publik
	Violent Action

Pemaksaan semakin meningkat  
dan hasilnya: WIN - LOSE

### Faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan kita pada konflik (KAPOW)

#### K= KNOWLEDGE (Pengetahuan)

- Se jauh mana anda mengetahui isu pihak lain?
- Se jauh mana pihak lain mengetahui isu anda?
- Se jauh mana anda mengetahui masalahnya?

#### A= AUTHORITY (Wewenang)

- Apakah anda punya wewenang untuk mengambil keputusan?
- Apakah pihak lain punya wewenang untuk mengambil keputusan?

#### P= POWER (Kekuatan)

- Se jauh mana anda dapat memberi pengaruh terhadap situasi?
- Seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak lain atas diri anda?

#### O= OTHER (Relasi)

- Seberapa tinggi pentingnya relasi bagi anda?
- Seberapa tinggi pentingnya relasi bagi pihak lain?

#### W= WINNING (Kemenangan)

- Seberapa pentingnya unsur kemenangan?
- Apakah anda harus menang?
- Apakah pihak lain harus menang?
- Apakah kompromi dapat diterima?
- Apakah kekalahan dapat diterima?

### **Menangani Konflik dengan Cara ACES**

- **A= Asses** the Situation (Mengetahui Situasi)
- **C= Clarify** the Issues (Memperjelas Permasalahan)
- **E= Evaluate** Alternative Approaches (Menilai Pendekatan-pendekatan Alternatif)
- **S= Solve** the Problem (Mengurai Permasalahan)

### **Petunjuk Pendekatan pada Situasi Konflik**

- Diawali melalui penilaian diri sendiri
- Analisa isu-isu seputar konflik
- Tinjau kembali dan sesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri.
- Atur dan rencanakan pertemuan antara individu-individu yang terlibat konflik
- Memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat
- Mengembangkan dan menguraikan solusi
- Memilih solusi dan melakukan tindakan
- Merencanakan pelaksanaannya

### **Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengatasi Konflik**

- Ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif.
- Cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi.
- Tetapkan peraturan dan prosedur yang baku terutama yang menyangkut hak karyawan.
- Atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul.
- Ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis.
- Bentuklah team work dan kerja-sama yang baik antar kelompok/ unit kerja.
- Semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit/eselon merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung, jangan ada yang merasa paling hebat.
- Bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit/departemen/ eselon.

## **RESOLUSI KONFLIK**

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

### **Teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik**

#### **1. Teori Hubungan Masyarakat**

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
- Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

## **2. Teori Negosiasi Prinsip**

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

## **3. Teori Kebutuhan Manusia**

Berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia – fisik, mental, dan sosial – yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
- Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

## **4. Teori Identitas**

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
- Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

## **5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya**

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
- Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.
- Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

## **6. Teori Transformasi Konflik**

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
- Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
- Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

## **Empat Tahap Resolusi Konflik**

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi

elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.

### **Tahap I : Mencari De-eskalasi Konflik**

Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.

Kajian tentang entry point ini didominasi oleh pendapat Zartman (1985) tentang kondisi “hurting stalemate”. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Pendapat ini didukung oleh Bloomfield, Nupen dan Haris (2000). Namun, ripeness thesis ini ditolak oleh Burton (1990, 88-90) yang menyatakan bahwa “problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary”. Dengan demikian, entry point juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik (Kriesberg: 1991). De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB (Crocker, 1996).

Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa agensi internasional. UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 1995 yang berjudul “A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operations”. Panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide to Peace Support Operations”.

### **Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik**

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war operations (Loescher dan Dwoty: 1996; Widjajanto: 2000). Prinsip ini –yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusiaan minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (commodity-based humanitarianism) dianggap tidak lagi memadai.

Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (entry) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (political settlement) antara aktor konflik.

### **Tahap III: Problem-solving Approach**

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996, 149).

Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeksplorasi

alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (1990, 202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (total environment).

Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh misalnya, Rothman (1992, 30) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving. Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Komponen kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik. Komponen ketiga adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian. Komponen terakhir adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik.

#### **Tahap IV: Peace-building**

Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.

Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik. Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu: (1) pemilihan bentuk struktur negara; (2) pelimpahan kedaulatan negara; (3) pembentukan sistem trias-politica; (4) pembentukan sistem pemilihan umum; (5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan (5) pembentukan sistem peradilan.

Tahap kedua dari proses peace-building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut.

Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344).

Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan preventive diplomacy yang oleh Lund (1996, 384-385) didefinisikan sebagai: *“preventive diplomacy, or conflict prevention, consists of governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are taken deliberately to keep particular states or organized groups within them from threatening or using organized violence, armed force, or related forms of coercion such as repression as the means to settle interstate or national political disputes, especially in situations where the existing means cannot peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and international change”*.

Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjajanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs) (Aall:1996), mediator internasional (Zartman dan Touval: 1996), atau institusi keagamaan (Sampson: 1997; Lederach: 1997).

Tulisan ini telah berusaha menghadirkan empat tahap resolusi konflik. Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas.[]

## Referensi

- Bass, B.M. and Avolio, B.J., 1994, *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership*, Sage, Thousand Oaks.
- Bass, B.M., 1960, *Leadership, Psychology and Organizational Behavior*, Harper and Brothers, New York.
- Bennis, W.G. and Nanus, B., 1985, *Leaders: The Strategies for Taking Charge*, Harper and Row, New York.
- Bryman, A., 1992, *Charisma and Leadership in Organizations*, Sage, London.
- Burns, J.M., 1978, *Leadership*, Harper and Row, New York.
- Baskerville, Dawn M., May 1993. *How Do You Manage Conflict?. Black Enterprise*. Evert Van De Vliert (University of Groningen) and Boris Kabanoff (University of New South Wales).
- Brown, Waren B. dan Denis J. Moberg, *Organization Theory and Mangement: A Macro Approach*, (New York : John Wiley & Sons,1980)
- Carrol, Stephen J., & Henry L. Topsy, *Organizational Behavior*, John Willey & Son, New York, 1977
- Claassen, Ron, (1999). *Center for Peacemaking and Conflict Studies*, Adapted from Shawchuck. Ada dalam Duane Ruth-Heffelbowr, *Conflict & Peacemaking Across Cultures Training for Trainers*, Fresno Pacific University, 1999.
- C. Handy, *Understanding Organizations*, (London : Penguin, 1985), dikutip langsung oleh Eugene McKenna dan Nic Beec, *The Essence of : Manajemen Sumber Daya Manusia*,Trj. Toto Budi Santoso, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002)
- Davis, Richard, 1998. *Exploding the Myths Of High Performance Teams*. Buckingham. UK: Vanguard Consulting Ltd.
- Desmond graves, *Corporate Culture : Diagnosis and Change Auditing and Changing the Culture of Organization*, (London : Frances Pinter Publishing, 1986)
- Etzioni, Amitai, *Complex Organization : A Sociological Reader*, (New York: Rine Hart & Winston, 1961)
- Fiedler, F.E., 1967, *A Theory of Leadership Effectiveness*, McGraw-Hill, New York.
- French, J. and Raven, B., 1967, 'The basis of social power', in D. Cartwright and A. Zander (eds.), *Group*
- Kozan, M. Kamil, 2002. *Subcultures and Conflict Management Style*. Management International Review.
- March 1990. *Toward Theory-Based Measures Of Conflict Management*. Academy of Management Journal.
- Moedjiono, Imam. (2002). *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, Yogyakarta: UII Press.
- Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright. 2000. *Human Resource Management:Gaining a Competitive Advantage*. International Edition. Third Edition. McGraw-Hill Companies. Inc.
- Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, Cet. VIII.,1998)



- Ridwan, *Teori Kepemimpinan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa (PKM) BEM STAIN Purwokerto, 23-24 November 2007.
- Robbins, Stephen P., *Organizational Theory: Structure Design and Application* (New Jersey : Prentice Hall, Inc., 1990)
- Robbins, Stephen dan Mary Coulter. 2007. *Management, 8th Edition*. NJ: Prentice Hall.
- Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, Cet. II., 1971.
- Sutarto, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gadjah Mada University Press, 1986.
- Stoner, James A.F., *Management*, Second Editions, Prentice-Hall International, Inc., 1982.
- Swansburg, R.C. ( 1996 ) *Management and Leadership for Nurse Managers* ( 2 th ed) Jones and Bartlett Publishers Inc, London England.
- Schermerhorn, Jr, John R., James G. Hunt and Richard N. Osborn, *Managing Organizational Behavior*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta : Grafindo, 2003)
- Sathe, Vijay, *Culture and Related corporate Realities*, (Homewood : Richard D. Irwin, Inc., 1985)
- Schein, Edgar H., *Organizational Culture and Leadership*, (San Fransisco : Josseybass Publ, 1992).
- Silalahi, Bennet, *Corporate Culture and Performance Appraisal*, (Jakarta: Republika, 27 Juli 1994
- Sallis, Edward, (1993). *Total Quality Management in Education*, Philadelphia, London
- Thierauf, Robert J., Robert C. Klekamp, Daniel W. Gedding, *Management Principles and Practices: A Contingency and Questionnaire Approach*, John Willey & Son, New York, 1997
- Tomey, Ann Marriner, (1996). *Guide To Nursing Management and Leadership*. Mosby-Year Book, Inc St Louis USA.
- Tosi, Henry L. John R. Rizzo, and Stephen J. Carrol. *Managing Organizational Behavior*, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1986.
- Thoha, Miftah. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, Pandi & Anastasia Diana. (2001). *Total Quality Management*, Yogyakarta: Andi.
- Wursanto. (2002). *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Andi.
- Yukl, Garry, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, terj. Jusuf udaya, Prehalindo, Jakarta, 1994.

## **Hand-Out 11**

### **ANALISIS WACANA MEDIA**

#### **(MEDIA DISCOURSE ANALYSIS)**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### **Contents**

- Teori Wacana dan Bahasa
- Memahami Makna
- Media
- Simbol
- Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat
- Pendekatan Analisis Wacana
- Wacana Tulis, Teks dan Konteks
- Wacana dan Ideologi
- Karakteristik Analisis Wacana
- Kerangka Analisis Wacana

#### **Apakah Wacana itu?**

- Komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan; konversasi atau percakapan.
- Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok telaah.
- Risalat tulis; disertasi formal; kuliah; ceramah; khotbah. (Webster, 1983: 522).

#### **Sudjiman, 1993: 6**

- Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan yang lain.
- Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula menggunakan bahasa tulisan.

#### **Firth, Samsuddin, 1992: 2**

- *Language as only meaningfull in its context of situation.* Makna suatu bahasa berada pada rangkaian *konteks* dan *situasi*.
- Pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang terdapat di dalam teks.
- Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran (*utterances*) yang membentuk wacana.

#### **Foucault, Mills: 1994**

- **Kontekstual Teoretis**; Wacana berarti domain umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran/ teks yang mempunyai makna & efek dalam dunia nyata.
- **Konteks Penggunaan**; Wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan kedalam kategori konseptual tertentu (Misalnya: *imperealisme/ feminisme*)
- **Metode Penjelasan**; Wacana berarti suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

#### **Kebutuhan Dasar Wacana**

- Keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain mengenai suatu hal.
- Keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai kebenaran suatu hal dan mempengaruhi sikap/pendapat orang lain.

- Keinginan untuk mendeskripsikan cita-rasa suatu bentuk, wujud, objek.
- Keinginan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang terjadi. (Keraf, 1995: 6).

### Bentuk Retorika Wacana

- **Wacana Transaksional**; jika yang dipentingkan ialah ‘isi’ komunikasi.
- **Wacana Interaksional**; jika yang dipentingkan hubungan timbal balik antara penyapa (*addresses*) dan pesapa (*addressee*). (Sudjiman, 1993: 6).

### Otoritas Analisis Wacana

- **Dalam Linguistik**; Analisis wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur yang luas melebihi batasan-batasan kalimat. (Sunarto, 2001: 119-120)
- **Dalam Teks Tertulis**; Analisis wacana bertujuan untuk mengeksplisitkan norma-norma & aturan-aturan bahasa yang implisit. Analisis wacana bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu struktur diskursif (Mills, 1994)

### Bahasa

- Manusia adalah mahluk berfikir. Demikian tesis klasik yang kita temukan dalam dunia filsafat. Konsekuensi logis dari tesis ini, bahwa manusia adalah mahluk berbahasa.
- Hubungan pikiran dan bahasa sangat erat. Bahasa menunjukkan jalan pikiran seseorang.
- Dalam bahasa terdapat sesuatu kekuatan yang tidak tampak yang diberi nama komunikasi. (Loren Bagus, 1990).

### Filsafat Bahasa

- Dalam filsafat bahasa dikatakan, bahwa orang yang mencipta realitas dan menatanya lewat bahasa.
- Bahasa mengangkat kepermukaan hal yang tersembunyi sehingga menjadi kenyataan.
- Bahasa dapat dipakai untuk menghancurkan realitas orang lain. Bahasa dapat menjadi tiran. (Loren Bagus, 1990).

### Fungsi Bahasa

- **Fungsi Ideasional**: untuk membentuk, mempertahankan dan memperjelas hubungan diantara anggota masyarakat.
- **Fungsi Interpersonal**: untuk menyampaikan informasi diantara anggota masyarakat.
- **Fungsi Tekstual**: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus (wacana) yang relevan dengan situasi (*features of the situation*). (Halliday, 1972: 140-165)

### Makna

- Makna merupakan kata yang subjektif (Jalaluddin Rahmat, 1996)
- Para ahli filsafat dan linguistik, membedakan antara struktur logis dan struktur bahasa, sehingga memudahkan kita untuk membedakan antara ungkapan yang tidak mengandung makna (*meaningless*) dan yang mengandung arti (*meaningfull*). (Mustansyir, 2001: 153-154)

### Makna dalam Konteks Wacana

- Dalam konteks wacana, makna dapat dibatasi sebagai “hubungan antara bentuk dengan hal/ barang yang diwakilinya (*referen-nya*)” (Keraf, 1994: 25)
- Kata *rumah*: adalah *bentuk/ ekspresi*. Barang yang diwakili oleh kata *rumah*: sebuah bangunan yang beratap, berpintu, berjendela yang menjadi tempat tinggal manusia. Barang itu disebut *referen*. Hubungan bentuk dan referen menimbulkan *makna/ referensi*.
- *Makna* atau *referensi* kata *rumah* timbul akibat hubungan antara bentuk itu dengan pengalaman-pengalaman non linguistik atau barang yang ada di alam.

### Jenis-jenis Makna

- Makna Emotif (*emotive meaning*)
- Makna Kognitif (*cognitive meaning*)
- Makna Deskriptif (*descriptive meaning*)
- Makna Referensial (*referential meaning*)
- Makna Piktorial (*pictorial meaning*)
- Makna Kamus (*dictionary meaning*)
- Makna Samping (*fringe meaning*)
- Makna Inti (*core meaning*) (Shipley, 1962)

### Makna Denotatif & Konotatif

- **Makna Denotatif**; Kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan.
- **Makna Konotatif**; Kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu atau nilai rasa tertentu, disamping makna dasar yang umum. (Keraf, 1994: 27-31)

### Perubahan & Pemberian Makna

- Makna yang dikode oleh pemirsa terjadi dalam ruang yang berbeda dan individu yang berbeda berdasarkan pada kemampuan kognitif dan kemampuan afektif pemirsa.
- Makna yang dikode oleh pemirsa terikat pada bagaimana individu melakukan dekonstruksi terhadap iklan televisi/ tulisan di media cetak.
- Setiap individu memiliki kebebasan menentukan metode interpretasi, termasuk kepentingan dalam melakukan dekonstruksi. (Bungin, 2001: 199-200).

### Peran Makna

- Peran tanda (*sign*) di dalam masyarakat (*semiotics*), makna-makna tanda (*semantics*), serta kode-kode sosial (*social codes*) dibalik tanda dan makna tersebut diperlukan dalam studi kebudayaan, oleh karena itu makna tersebut merupakan pembentuk (*construct*) utama dari kebudayaan. (Piliang, 2001: 308).
- Kata memperoleh maknanya melalui penggunaannya sehari-hari dalam konteks kebudayaan. (van Peursen, 1990: 2).

### Bias Media

- Bias media terjadi karena media tidak berada dalam ruang vakum.
- Media sesungguhnya berada ditengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam.

### Louis Althusser, 1971

- Media dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi.
- Media massa sebagaimana lembaga pendidikan, agama, seni, kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological states apparatus*).

### Antonio Gramsci, 1971

- Pandangan Althusser tentang media dianggap oleh Gramsci mengabaikan resistensi ideologis dari kelas ter subordinasi dalam ruang media.
- Media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (*the battle ground for competing ideologies*).
- Media adalah ruang dimana ideologi direpresentasikan. Media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol wacana publik.
- Pada sisi lain, media bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan,

sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

### **Kepentingan Media**

- Althusser dan Gramsci sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial.
- Ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Kepentingan ideologis antara masyarakat dan negara, juga kepentingan lain, misalnya; kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (*sustainability*) lapangan kerja bagi para karyawan.
- Dalam kondisi ini media harus bergerak dinamis di antara pusaran yang bermain. Hal inilah yang menyebabkan bias berita di media yang sulit dihindari.

### **Faktor Penyebab Bias Media**

- Kapasitas dan kualitas pengelola media.
- Kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas sosial.
- Taraf kekritisasi dari masyarakat. (Winarko, 2000: xi)
- *[Dari ketiga faktor tersebut menimbulkan derajat bias media yang berbeda-beda]*

### **Makna Bahasa Menimbulkan Bias**

- Dalam sebuah penelitian terhadap fenomena perkosaan dalam pemberitaan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dan *Suara Merdeka*, ditemukan 22 kata yang digunakan untuk menggantikan kata “perkosaan”, yaitu: 1) merenggut kegadisan, 2) mencabuli, 3) menggauli, 4) menggagahi, 5) menakali, 6) dianui, 7) dikumpuli, 8) menipu luar dalam, 9) digilir, 10) dinodai, 11) digarap, 12) dihamili, 13) korban cinta paksa, 14) dipaksa berhubungan intim, 15) berbuat tidak senonoh, 16) memaksa bersetubuh, 17) korban kudakudaan, 18) memaksa memenuhi nafsu birahi, 19) dipaksa melayani, 20) melakukan perbuatan asusila, 21) digelandang, 22) dipaksa melakukan permainan ibu-ibuan.
- Pilihan atau pemakaian istilah tersebut jelas menimbulkan bias (Winarko, 2000: 50)

### **Media & Politik Pemaknaan**

- Politik pemberitaan media berhubungan dengan strategi media dalam meliput peristiwa, memilih dan menampilkan fakta serta dengan cara apa fakta itu disajikan—yang secara langsung atau tidak berpengaruh dalam merekonstruksi media. (Eriyanto, 2000)
- Makna media tidak bergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi lebih kepada praktik pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik konstruksi.
- Media massa pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata yang dipilih.
- Makna tidak secara sederhana bisa dianggap sebagai produksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial (*social struggle*) sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan tempat memasukkan bahasa didalamnya. (Hall, 1982: 67).

### **Bahasa Sebagai Sistem Simbol**

- Proses komunikasi sebenarnya mencakup pengiriman pesan dari sistem saraf seseorang kepada sistem saraf orang lain, dengan maksud untuk menghasilkan sebuah makna yang sama dengan yang ada dalam benak sipengirim. Pesan verbal melakukan hal tersebut melalui kata-kata, yang merupakan unsur dasar bahasa, dan kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. (Tubbs & Moss, 1994: 66)
- Bahasa adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis sehingga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kata itu sendiri merupakan bagian integral dari simbol yang dipakai oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu kata bersifat simbolis. (Wibowo, 2001: 3-4)

### Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat

- Aliran strukturalisme berpendapat bahwa arti bahasa tidak tergantung dari maksud pembicara atau pendengar ataupun dari referensinya pada kenyataan tertentu; arti bergantung pada struktur makna itu sendiri.
- Yang dimaksud struktur disini ialah jaringan hubungan intern elemen-elemen terkecil bahasa yang membentuk suatu kesatuan otonom yang tertutup. (Hjelmslev, dalam Kleden, 1997: 34).

### Pendekatan Analisis Wacana

- **Pertama**, Analisis wacana seluruhnya mengenai cara-cara wacana disusun, prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya.
- **Kedua**, Analisis wacana dipandang sebagai aksi, cara melakukan segala hal dengan kata-kata.
- **Ketiga**, Analisis wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang digubakan oleh komunikator aktual dari perspektif mereka. (Littlejohn, 1996: 84-85).

### Wacana Tulis, Teks & Konteks

- **Tulisan** bukan cuma sekedar “*literal pictographic*” atau sekedar inskripsi yang bersifat ideografik, tetapi tulisan dapat merupakan suatu totalitas, termasuk kemampuannya untuk melampaui apa yang hanya bisa ditunjuk secara fisik. (Derrida 1984, dalam Kleden-Probonegoro, 1998).
- **Teks** adalah fiksasi atau pelebagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. (Hidayat, 1996:129).
- **Konteks** memasukkan semua situasi dan hal yang berada diluar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dsb. (Eriyanto, 2001: 9).

### Konteks

- **Konteks Fisik (*physical context*)**, yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam suatu peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam peristiwa komunikasi itu.
- **Konteks Epistemis (*epistemic context*)**, yaitu latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara maupun pendengar.
- **Konteks Linguistik (*linguistic context*)**, yaitu terdiri atas kalimat-kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi.
- **Konteks Sosial (*social context*)**, yaitu relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar. (Syafi’ie, 1990, dalam Lubis, 1993: 58).

### Wacana dan Ideologi

- Implikasi ideologi terhadap wacana; 1) ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual, ia membutuhkan *share* diantara anggota kelompok, organisasi atau kolektifitas, 2) ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas.
- Wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks, terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana.
- Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah teks yang muncul tersebut pencerminan dari ideologi seseorang, apakah feminis, kapitalis, sosialis, dsb. (Eriyanto, 2001: 13-14).

### Karakteristik Analisis Wacana

- **Pertama**, dalam analisisnya analisis wacana lebih bersifat kualitatif dibandingkan analisis isi yang umumnya kuantitatif.
- **Kedua**, analisis isi kuantitatif pada umumnya hanya digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat *manifest* (nyata), analisis wacana berpretensi memfokuskan pada pesan *latent* (tersembunyi).
- **Ketiga**, analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan” (*what*) tetapi tidak dapat menyelidiki “bagaimana ia dikatakan” (*how*).
- **Keempat**, analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi. Karena peristiwa selalu bersifat unik, karena itu tidak dapat diperlakukan prosedur yang sama untuk isu dan kasus yang berbeda. (Eriyanto, 2001: 337-341).

### Kerangka Analisis Wacana (Elemen Wacana Van Dijk)

Struktur wacana	Hal yang diamati	Elemen
Super Struktur	<b>TEMATIK</b> (Apa yang dikatakan?)	Topik
Struktur Makro	<b>SKEMATIK</b> (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?)	Skema
Struktur Mikro	<b>SEMANTIK</b> (Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita)	Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi
Struktur Mikro	<b>SINTAKSIS</b> (Bagaimana pendapat disampaikan?)	Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti
Struktur Mikro	<b>STILISTIK</b> (Pilihan kata apa yang dipakai?)	Leksikon
Struktur Mikro	<b>RETORIS</b> (Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan?)	Grafis, metafora, ekspresi

### Elemen-elemen Struktur Wacana

- **Tematik**: Informasi yang paling penting atau inti pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator.
- **Skematik**: dalam konteks penyajian berita ada dua kategori skema besar, 1) *Summary*; yang ditandai judul (*head line*) & teras berita (*lead*), 2) *Story*; isi berita secara keseluruhan.
- **Semantik**: makna tertentu dalam suatu bangunan teks, dimensi teks, presupposition, makna yang implisit atau eksplisit, makna yang sengaja disembunyikan. Struktur wacana juga bisa menggiring kearah tertentu dari suatu peristiwa.
- **Sintaksis**: seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan frase. Dianalisis dari koherensi, bentuk kalimat, kata ganti.
- **Stilistik**: gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan maksudnya. Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Pilihan *leksikal* atau *diksi* pada dasarnya menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atau frase atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.
- **Retoris**: gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Misalnya *hiperbolik* (pemakaian kata yang berlebihan), *repetisi* (pengulangan), *aliterasi* (pemakaian kata seperti sajak), *interaksi* (bagaimana penulis menempatkan diri di antara khalayak), *metafora* (makna kiasan) *visual image* (membuat anggapan).

## Penjelasan:

Yang diamati	Elemen
<b>TEMATIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TOPIK:</b> Informasi paling penting, inti pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator</li> </ul>
<b>SKEMATIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>HEAD LINE:</b> Judul berita utama (<i>to attract the reader</i>)</li> <li>▪ <b>LEAD:</b> Teras berita terletak pada paragraf pertama, bagian paling pokok dalam berita</li> <li>▪ <b>STORY:</b> Isi berita secara keseluruhan; 1) <i>situasi</i>, yakni proses jalannya peristiwa, a] kisah utama dari peristiwa, b] latar untuk mendukung kisah utama dipakai untuk memberi konteks, 2) <i>komentar</i>, yang ditampilkan dalam teks, komentar dari pihak yang terlibat dengan peristiwa itu, a] reaksi/ komentar verbal dari tokoh yang dikutip wartawan, b] kesimpulan yang diambil wartawan dari berbagai tokoh.</li> </ul>
<b>SEMANTIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LATAR:</b> Latar belakang peristiwa, hendak kemana makna suatu teks dibawa (Ex: Perselisihan politik, Krisis ekonomi, Konflik)</li> <li>▪ <b>DETAIL:</b> Apakah sisi informasi tertentu diuraikan secara panjang atau tidak</li> <li>▪ <b>ILUSTRASI:</b> Apakah sisi informasi tertentu disertai contoh atau tidak</li> <li>▪ <b>MAKSUD:</b> Apakah teks itu disampaikan secara eksplisit atau implisit</li> <li>▪ <b>PRESUPPOSITION:</b> Pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks</li> <li>▪ <b>PENALARAN:</b> Elemen yang digunakan untuk memberi basis nasional, sehingga teks tampak benar dan meyakinkan.</li> </ul>
<b>SINTAKSIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>KOHERENSI:</b> Kata hubungan yang dipakai untuk menghubungkan fakta/ proposisi (Ex: Peristiwa penjarahan massal, “karena tingkat pendidikan mereka rendah”—dapat memberi kesan bahwa rendahnya pendidikan yang menyebabkan mereka melakukan penjarahan.</li> <li>▪ <b>NOMINALISASI:</b> Sugesti kepada khalayak dengan generalisasi</li> <li>▪ <b>ABSTRAKSI:</b> Apakah komunikator memandang objek sebagai suatu yang tunggal berdiri sendiri/ sebagai suatu kelompok (komunitas)</li> <li>▪ <b>BENTUK KALIMAT:</b> Makna yang dibentuk oleh susunan kalimat, dengan cara berfikir logis (prinsip kausalitas). Dalam kalimat berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, dalam kalimat pasif, seseorang menjadi objek dari pernyataannya.</li> <li>▪ <b>PROPOSISI:</b> Proposisi diatur dalam satu rangkaian kalimat. Prosisi mana yang ditempatkan diawal, dan mana yang diakhir kalimat. Penempatan itu dapat mempengaruhi makna yang timbul dan menunjukkan bagian mana yang lebih ditinjokan kepada khalayak.</li> <li>▪ <b>KATA GANTI:</b> Kata ganti timbul untuk menghindari pengulangan kata (anteseden) dalam kalimat berikutnya. Dalam analisis wacana kata ganti merupakan alat yang dipakai komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana. (Ex: saya, kami, kita)</li> </ul>



<b>STILISTIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>STYLE:</b> Cara/ gaya bahasa yang digunakan seseorang untuk menyatakan maksudnya. Ciri-ciri penggunaan bahasa yang khas, kecenderungannya untuk secara konsisten menggunakan struktur bahasa tertentu, gaya bahasa pribadi seseorang.</li> <li>▪ <b>PILIHAN LEKSIKAL/ DIKSI:</b> Bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atau frase atas berbagai kemungkinan frase yang tersedia. Pilhan kata/ frase yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. (Ex: Terorisme—pembela kebenaran, Pembunuhan—kecelakaan, Meninggal—mati, tewas, gugur, meninggal, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir).</li> </ul>
<b>RETORIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>RETORIKA:</b> Gaya yang diungkapkan penulis, apakah menggunakan kata yang berlebihan (hiperbolik), atau retorik persuasif, apakah menggunakan pengulangan untuk penegasan makna (repetisi), apakah kata-kata seperti sajak (aliterasi), apakah menggunakan retorik ejekan (ironi), atau menggunakan majas untuk menggantikan nama yang ada hubungannya dengan nama yang digantikan (metonimia).</li> <li>▪ <b>INTERAKSI:</b> Bagaimana pembicara/ penulis menempatkan/ memposisikan dirinya diantara khalayak, apakah memakai gaya formal, informal atau santai yang menunjukkan kesan bagaimana ia menampilkan dirinya.</li> <li>▪ <b>EKSPRESI:</b> Bagaimana ekspresi maksud penulis untuk membantu menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. Dalam teks tertulis, ekspresi ini muncul misalnya dalam bentuk grafis, gambar foto, raster atau tabel untuk mendukung gagasan atau untuk bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan.</li> <li>▪ <b>METAFORA:</b> Apakah ada kiasan, ungkapan, ornamen atau bumbu dari suatu teks. Metafora dipakai oleh komunikator secara strategis sebagai landasan berfikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik.</li> <li>▪ <b>VISUAL IMAGE:</b> Dalam teks, elemen ini ditampilkan dengan penggambaran detail beberapa hal yang ingin ditonjolkan. (Ex: Tentang pentingnya peran kelompok tertentu dalam masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, memarginalkan kelompok lain yang menjadi lawannya, saingannya, atau kelompok yang akan mengancam eksistensi dan peran kelompok yang menjadi pilihannya.[])</li> </ul>

## Referensi

- Brown, Gillian, George Yule (1996), *Analisis Wacana; Discourse Analysis*, Jakarta, Gramedia.
- Cook, Mark Elsom (2001), *Principles of Interactive Multimedia*, USA, McGraw-Hill International.
- Flournoy, Don Michael (ed.) (1989), *Analisis Isi Surat Kabar Indonesia*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press.
- Santana K., Septiawan (2004), *Jurnalisme Investigatif*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sobur, Alex (2002), *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

## **Hand-Out 12**

### **PARADIGMA ANALISIS WACANA MEDIA**

#### **(MODEL TEUN A VAN DIJK)**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **Pendahuluan**

Mempelajari media merupakan tantangan yang menarik tanpa pernah habis dimakan waktu, bahkan cukup banyak penelitian sebelumnya yang berfokus pada permasalahan seputar media. Beberapa diantaranya mengangkat tema yang menarik, atau sudut pandang permasalahan yang berbeda. Akhirnya penulis menjatuhkan pilihan pada konstruksi wacana media dengan paradigma kritis.

Analisis Wacana Kritis media, merupakan bentuk kesimpulan dari sudut pandang yang penulis kemukakan mengenai media, yang bersentuhan dengan perihal analisis isi, analisis framing, wacana, maupun semiotika. dilihat dari wujud kekuasaan, bentuk hegemoni serta dampak ideologi dominan yang tersampaikan dalam teks. Namun penulis juga mulai memahami bahwa kemampuan masyarakat dalam memilah media serta mengartikan makna, menjadi semacam perisai yang membatasi terpaan-terpaan informasi dari berbagai media. Tentunya sebagai bagian dari pelaku akademik, penulis hanya berupaya memenuhi tuntutan dalam usaha untuk lebih memahami fungsi serta peran media, dan memperlihatkan wacana ideologi media kepada masyarakat sebagai bagian dari alur mediasi pembentukan realitas melalui teks berita.

Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu referensi dalam penulisan karya ilmiah mengenai media yang mengarah pada paradigma kritis, dengan tujuan mengkritisi konstruksi wacana media yang selama ini menjadi wadah idealisme pelaku media. Penulis berharap dapat lebih jauh melihat kekuasaan terhadap teks, dan menemukan konsep yang menarik perihal kekuatan media, serta mengungkap makna yang tersembunyi dengan pandangan kritis terhadap wacana media.

Munculnya analisis wacana, khususnya dalam bidang analisis teks media melahirkan berbagai varian analisis yang pada akhirnya memunculkan persinggungan antara model analisis yang satu dengan yang lain. Analisis model teks media versi *Norman Fairclough* dan *Teun A Van Dijk* misalnya, keduanya menekankan analisis teks berdasarkan konteks sosial. Dalam versi Indonesia teori analisis teks media disadur cukup baik oleh *Eryanto*. Dalam buku *Eryanto* memaparkan berbagai kompilasi model analisis teks media dari berbagai perspektif yang dikemukakan *Foulcault*, *Roger Fowler*, *Theo van Leeuwen*, *Sara Mills*, *Teun A Van Dijk*, dan *Norman Fairclough* dengan contoh teks surat kabar Indonesia. Pemahaman perspektif teks media juga diteliti oleh *Suroso* yang memetakan empat macam perspektif media Indonesia yang pro masyarakat, negara, yang lain, dan netral.

### **Landasan Teori**

#### **Tiga Paradigma Analisis Wacana**

Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Dalam studi linguistik, wacana menunjuk suatu kesatuan bahasa yang lengkap, yang umumnya lebih besar dari kalimat, baik disampaikan secara lisan atau tertulis. Wacana adalah rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan proporsi satu dan yang lain, kalimat satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan. Kesatuan bahasa itu bisa panjang, bisa pendek. Sebagai sebuah teks, wacana bukan urutan kalimat yang tidak mempunyai ikatan sesamanya, bukan kalimat yang dideretkan begitu saja.

Analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/pemakaian bahasa. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang analisis wacana, kita perlu bertanya Bagaimana bahasa dipandang dalam analisis wacana?

Dalam hal ini, A.S Hikam menyampaikan adanya tiga paradigma analisis yang digunakan untuk melihat bahasa. Ketiga paradigma analisis wacana ini yang akan mendapatkan porsi banyak untuk di jelaskan dalam tulisan ini selanjutnya.

Pandangan pertama diwakili oleh kaum Positivisme - Empiris. Penganut aliran ini melihat bahasa sebagai jembatan antara manusia dengan objek yang ada di luar dirinya. Pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala aatau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu cirri dari pemikiran ini adalah pemisahan antara ide/pemikiran dan realitas. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan seemantik. Oleh karena itu, kebenaran sintaksis (tata bahasa) adalah bidang utama dari aliran positivisme tentang wacana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, titik perhatian utama aliran positivisme didasarkan pada benar tidaknya bahasa itu secara gramatikal. Istilah yang sering disebut adalah kohesi dan koherensi. Wacana yang baik selalu mengandung kohesi dan koherensi di dalamnya. Kohesi merupakan keserasian hubungan antar unsur-unsur dalam wacana, sedangkan koherensi merupakan kepaduan wacana sehingga membawa ide tertentu yang dipahami oleh khalayak.

Pandangan kedua dalam analisis wacana adalah Konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan positivisme/empirisme dalam analisis wacana yang memisahkan subyek dan objek bahasa. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap bahwa subjek adalah aktor utama atau faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya.

Dalam hal ini, mengutip A.S Hikam yang mengatakan bahwa, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Bahasa yang dipahami dalam paradigma ini diatur dan dihidupkan dalam pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jatidiri dari sang pembicara.

Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis yang membongkar makna dan maksud-maksud tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang memngemukakan suatu pernyataan. pengungkapan itu dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara.

Pandangan ketiga disebut pandangan kritis. Pandangan ingin mengoreksi pandangan pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi ssecara historis maupun secara institusional. Seperti ditulis A.S Hikam, pandangan konstruktivisme masih belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inhern dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut perilaku-perilakunya. hal inilah yang melahirkan paradigma kritis.

Analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada pandangan konstruktivisme. Analisis wacana dalam paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikiran-pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang adal dalam masyarakat. Bahasa disini tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri si pembicara.

Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa seperti, batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai,

topik apa yang dibicarakan. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena memakai perspektif kritis, (paradigma) analisis wacana yang ketiga ini sering juga disebut *Critical Discourse Analysis/CDA*.

## Pembahasan

Tulisan ini ingin mendeskripsikan model analisis Wacana *Teun A van Dijk* yang dalam banyak hal diteruskan model analisisnya oleh *Norman Fairclough*. Untuk memperkaya bahan analisis juga disinggung pemahaman wacana dan ideologi dalam pers *Roger Fowler*, dengan kasus analisis surat kabar Indonesia pasca era reformasi.

## Analisis Wacana Model Teun Van Dijk

Menurut Van Dijk, penelitian analisis wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi. Pemahaman produksi teks pada akhirnya akan memperoleh pengetahuan mengapa teks bisa demikian. Van Dijk juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks-teks tertentu.

Pada rejim Soeharto misalnya konsolidasi kekuasaan dilakukan melalui bahasa dengan beberapa cara. *Pertama*, penghalusan konsep-konsep dan pengertian yang bersentuhan dengan kekuasaan. Penghalusan ini untuk melenyapkan konsep yang membahayakan Orde Baru. Pemasyarakatan kata *masa bakti, persatuan dan kesatuan, ketahanan nasional, rawan pangan, daerah tertinggal, pengentasan kemiskinan, negara hukum, dll.* *Rawan pangan* lebih baik dari *kelaparan* dan *masa bakti* lebih baik dari *masa jabatan*. *Kedua*, memperkasar, bertujuan untuk menyudutkan kekuatan lain yang dapat mengancam kekuasaan. Pemroduksian kata-kata *SARA, GPK, subfersif, bersih diri, ekstrim kanan, ekstrim kiri, golongan frustrasi, OTB (organisasi Tanpa Bentuk), anti Pancasila*. Kata-kata itu berdampak buruk pada golongan oposisi. *Ketiga*, penciptaan kata-kata yang bisa mengerem dan menurunkan emosi masyarakat. Kata-kata ini sering diambil dari leksikon bahasa Jawa, misalnya *mendhem jero mikul dhuwur, jer basuki mawa bea, lengser keprabon* dan pemakaian kata yang referensinya tidak jelas seperti *demi kepentingan umum, mengencangkan ikat pinggang, dll.* *Keempat*, penyeragaman istilah. Hal ini dilakukan oleh pejabat dan birokrat, misalnya *SDSB bukan judi, darah pengacau halal hukumnya, siapa pun boleh mendirikan partai baru, dll.* *Kelima*, eufemisme bahasa. Pemakaian kalimat “*Keterlibatan 7 oknum Kopasus merupakan pil pahit*” utang diganti dengan *bantuan luar negeri*, pelacur diganti dengan *pekerja seks komersial*, penjara menjadi *lembaga pemasyarakatan*, dst.

Wacana digambarkan oleh Van Dijk mempunyai tiga dimensi/bangunan yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis model van Dijk adalah menggabungkan tiga dimensi wacana tersebut dalam satu kesatuan analisis. **Dimensi teks** yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level **kognisi sosial** dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek **konteks** mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Analisis van Dijk menghubungkan analisis tekstual ke arah analisis yang komprehensif bagaimana teks diproduksi, baik dalam hubungannya dengan individu wartawan dan masyarakat.

## Representasi Peristiwa dalam berita menurut Teun Van Dijk

Membicarakan sebuah makna tersirat dari sebuah berita tidak lepas dari bagaimana sebuah teks hadir atau dihadirkan menjadi sebuah kalimat. Pada berita cetak, suatu berita yang telah diamati oleh seorang wartawan kemudian direpresetasikan kedalam teks berita, dalam proses representasi berita yang berbentuk suatu kejadian tertentu menjadi susunan teks, dapat diperhatikan bagaimana seorang wartawan menyampaikan sebuah kenyataan, pembaca berita dapat memperhatikan bagaimana suatu kelompok mendominasi wacana dalam berita tersebut.

Mendominasi wacana yang dimaksudkan adalah, adanya kekuatan yang dimiliki oleh sebuah kelompok untuk memegang kendali penafsiran pembaca dari sebuah berita. Dominasi yang terjadi dalam teks berita berbentuk sebuah pencitraan media terhadap pelaku dan korban dalam sebuah berita. Misalnya, kaum buruh, tani, pengemis, anak jalanan adalah golongan yang meresahkan masyarakat. Atau demonstrasi mahasiswa yang marak bisa menjadi contoh, bahwa mahasiswa dihadirkan dengan image bahwa mereka adalah kelompok yang anarkis, sering merusak dan senang membuat rusuh. Segala bentuk pencitraan seperti itu dilakukan hanya dengan merepresentasikan suatu kejadian yang benar terjadi menjadi susunan teks dengan pilihan kata dan bentuk kalimat.

Dalam Analisis Wacana, Eriyanto menyampaikan bahwa salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan kelompok adalah media. Lewat pemberitaan yang terus menerus disebarkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan mendelegitimasi atau memarginalkan kelompok lain. Kita seringkali merasa adanya ketidakadilan dalam berita mengenai pemerkosaan terhadap wanita. Bagaimana pihak yang menjadi korban ini digambarkan secara buruk, sehingga khalayak tidak bersimpati dan justru lebih bersimpati kepada laki-laki yang menjadi pelaku.

Dalam kasus seperti ini, bahwa berita di media menyampaikan sebuah wacana tertentu. Theo van Leeuwen memperkenalkan sebuah model dalam analisis wacana, model analisis tersebut untuk mendeteksi atau mengetahui bagaimana sebuah kelompok hadir sebagai kelompok yang dimarginalkan.

Secara umum, analisis van Leeuwen menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (perorangan atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Menurutny, terdapat dua titik fokus perhatian. Pertama, proses pengeluan (exclusion) yaitu apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, yang dimaksudkan dengan pengeluan seseorang atau aktor dalam pemberitaan adalah, perilaku menghilangkan atau menyamarkan pelaku/aktor dalam berita, sehingga dalam berita korbanlah yang menjadi perhatian berita.

Proses pengeluan ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Katakanlah dalam berita mengenai “demonstrasi mahasiswa yang berlangsung ricuh sehingga polisi melepaskan tembakan, akhirnya seorang mahasiswa tewas karena tertembak”. Dari kejadian demonstrasi mahasiswa di atas, apakah pemberitaan kemudian mengeluarkan polisi dari pemberitaan, sehingga korban penembakan yang ditonjolkan dalam suatu berita, sehingga kesan yang hadir kemudian bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi pantas mendapatkan tembakan hingga tewas.

Kedua adalah proses pemasukan (inclusion). Proses ini adalah lawan dari proses exclusion, proses ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang atau kelompok aktor dalam suatu kejadian dimasukkan atau direpresentasikan ke dalam sebuah berita. Baik exclusion maupun inclusion, terdapat sebuah strategi wacana. Dengan menggunakan kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan ke dalam sebuah teks. Pada pembahasan selanjutnya. Akan dijelaskan lebih detail tentang bagaimana pola kerja exclusion dan inclusion dalam representasi aktor dalam berita.

### **Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough**

Norman Fairclough dikenal dengan pemikirannya tentang analisis wacana kritis. Konsep yang ia bentuk menitikberatkan pada tiga level, pertama, setiap teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Fungsi representasi berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan untuk menampilkan realitas sosial ke dalam bentuk teks. Kedua, praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media memproduksi teks. Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi; sifat jaringan kerja wartawan dengan sesama pekerja media lainnya; pola kerja media sebagai institusi, seperti cara meliput berita, menulis berita, sampai menjadi berita di dalam media.

Ketiga, praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media, dan wacananya. Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga tingkatan Tingkat situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya Tingkat institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Tingkat sosial, berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.

Fairclough sebenarnya bukanlah akademisi ilmu komunikasi. Dia meminati masalah kajian kritis wacana dalam teks berita dimulai sejak tahun 1980-an. Dia melihat bagaimana penempatan dan fungsi bahasa dalam hubungan sosial khususnya dalam kekuatan dominan dan ideologi. Fairclough berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah, bagaimana bahasa menyebabkan kelompok sosial yang ada bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing. Konsep ini mengasumsikan dengan melihat praktik wacana bias jadi menampilkan efek sebuah kepercayaan (ideologis) artinya wacana dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas dimana perbedaan itu direpresentasikan dalam praktik sosial. Analisis Wacana melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana dipandang menyebabkan hubungan yang saling berkaitan antara peristiwa yang bersifat melepaskan diri dari dari sebuah realitas, dan struktur sosial.

Dalam memahami wacana (naskah/teks) kita tak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan "realitas" di balik teks kita memerlukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks. Dikarenakan dalam sebuah teks tidak lepas akan kepentingan yang bersifat subjektif.

Didalam sebuah teks juga dibutuhkan penekanannya pada makna (Meaning) (lebih jauh dari interpretasi dengan kemampuan integratif, yaitu inderawi, daya pikir dan akal budi) Artinya: Setelah kita mendapat sebuah teks yang telah ada dan kita juga telah mendapat sebuah gambaran tentang teori yang akan dipakai untuk membedah masalah, maka kita langkah selanjutnya adalah kita memadukann kedua hal tersebut menjadi kesatuan yaitu dengan adanya teks tersebut kita memakai sebuah teori untuk membedahnya.

Kemudian Norman Fairclough mengklasifikasikan sebuah makna dalam analisis wacana sebagai berikut:

1. **Translation** (mengemukakan substansi yang sama dengan media). Artinya: Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan idea, kepentingan atau ideologi tertentu kelas tertentu. Sedangkan sebagai seorang peneliti memulainya dengan membuat sampel yang sistematis dari isi media dalam berbagai kategori berdasarkan tujuan penelitian.
2. **Interpretation** (berpegang pada materi yang ada, dicari latarbelakang, konteks agar dapat dikemukakan konsep yang lebih jelas). Artinya: Kita konsen terhadap satu pokok permasalahan supaya dalam menafsirkan sebuah teks tersebut kita bisa mendapat latar belakang dari masalah tersebut sehingga kemudian kita bisa menentukan sebuah konsep rumusan masalah untuk membedah masalah tersebut.
3. **Ekstrapolasi** (menekankan pada daya pikir untuk menangkap hal dibalik yang tersajikan). Artinya: kita harus memakai sebuah teori untuk bisa menganalisis masalah tersebut, karena dengan teori tersebut kita bisa dengan mudah menentukan isi dari teks yang ada
4. **Meaning** (lebih jauh dari interpretasi dengan kemampuan integrative, yaitu inderawi, daya pikir dan akal budi). Artinya: Setelah kita mendapat sebuah teks yang telah ada dan kita juga telah mendapat sebuah gambaran tentang teori yang akan dipakai untuk membedah masalah, maka kita langkah selanjutnya adalah kita memadukann kedua hal tersebut menjadi kesatuan yaitu dengan adanya teks tersebut kita memakai sebuah teori untuk membedahnya.

Dan menurutnya dalam analisis wacana Norman Fairclough juga memberikan tingkatan, seperti sebagai berikut:

1. **Analisis Mikrostruktur** (Proses produksi): menganalisis teks dengan cermat dan fokus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarkan representasi teks. Dan juga secara detail aspek yang dikejar dalam tingkat analisis ini adalah garis besar atau isi teks, lokasi, sikap dan tindakan tokoh tersebut dan seterusnya.
2. **Analisis Mesostruktur** (Proses interpretasi): terfokus pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks.
3. **Analisis Makrostruktur** (Proses wacana) terfokus pada fenomena dimana teks dibuat.

Dengan demikian, menurut Norman Fairclough untuk memahami wacana (naskah/teks) kita tak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan "*realitas*" di balik teks kita memerlukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks. (Sumber: Analisis Wacana/ cetakan II Februari 2009, Eriyanto).

### **Pendekatan terhadap Fenomena Perspektif dalam Studi Wacana**

Fenomena perspektif dapat dikaji dalam tiga pendekatan yaitu *visi*, *fokalisasi*, dan *empati*. *Visi* adalah penekatan yang lebih mendasarkan diri pada bidang sosiologi politik dan mengaitkan kajian perspektif dengan ideologi. *Fokalisasi* merupakan pendekatan yang memasukkan teori naratif dalam analisisnya. Seorang narator dapat menjadi seorang individu lain yang telah atau sedang menyaksikan peristiwa. Pendekatan ini lazim digunakan dalam sastra. Wartawan pun dapat menggunakan pendekatan ini dalam menulis *features* berita yang dapat mengungkapkan unsur emosi yang bersifat sugestif dan reflektif.. Pendekatan *empati* mendasarkan diri pada bidang psikolinguistik. Pembicara mengenalkan seseorang atau objek yang merupakan bagian dari peristiwa yang dideskripsikan dalam kalimat.

Pengkajian perspektif (kekuasan) dalam surat kabar Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan visi, bertujuan mengungkap aspek-aspek ideologi yang mendasari dan membentuk perspektif pemberitaan surat kabar di Indonesia. Mereproduksi pemikiran van Dijk tentang analisis wacana media, berikut dipaparkan strategi penyajian informasi (SPI) dan bentuk-bentuk ekspresi bahasa.

#### **1. Strategi Penyajian Informasi**

Dalam wacana tulis atau teks, perspektif dibangun sejak penulis memutuskan apa yang dipilih sebagai tema dalam tulisannya. Tema merupakan apa yang dipakai penulis sebagai titik tolak permulaan tulisannya. Pemilihan tema tertentu sebagai titik tolak pembicaraan akan mendasari pengembangan tulisannya lebih lanjut dan membawa konsekuensi pada masuknya informasi-informasi tertentu, baik berupa keadaan, kejadian, atau peristiwa serta partisipan-partisipan yang relevan.

Selain pilihan tema, perspektif juga dibangun melalui pemilihan judul. Judul wacana berbeda dengan topik, judul dalam hal ini berfungsi sebagai upaya tematisasi. Upaya tematisasi menggunakan judul ini selain menjadi titik tolak pengembangan mengenai informasi yang relevan dengan tulisan, juga memiliki titik tolak membatasi tafsiran makna dari informasi yang dikembangkan dalam isi berita. Lima judul berita tentang sekolah berprestasi dan ujian nasional (UN) ditulis media yang sama berikut ini memiliki perspektif berbeda.

- (1) UN Pemetaan Mutu yang Penuh Kejutan (Kompas, 10/4/07)
- (2) Mereka Punya Kiat "Menaklukkan" UN (Kompas, 11/4/07)
- (3) Ujian Nasional dan Kultur Akademik (Kompas, 12/4/07)
- (4) Dari Bangil untuk Indonesia ... (11/4/07)
- (5) Ujian Nasional "Algojo Itu Telah Datang..." (Kompas Yogya, 18/4/07)

Berdasar ke lima judul berita tersebut wartawan Kompas mengajak pembaca mentertawakan kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan penyelenggaraan UN yang kurang jelas parameter mutunya

- (1) kurang tepat dalam proses ujiannya,
- (2) salah dalam penilaian proses belajar,
- (3) dan parameter kemajuan sekolah dibandingkan sekolah lain,
- (4) monster yang menakutkan siswa,
- (5) Demikian juga dalam *headline* tentang kekerasan di IPDN, wartawan menulis judul berikut dengan pespektif yang berbeda.
- (6) IPDN Tunda Terima Praja Baru; Nyoman Sumaryadi Dilaporkan ke Mabes Polri (Kompas 10/4/07)
- (7) DPR Harus Ikut Selidiki IPDN; Penonaktifan Inu Kencana sebagai Pengajar Dipertanyakan IPDN (Kompas 11/4/07)
- (8) DPRD Sulut Minta Pembubaran IPDN; Formalin Kaburkan Penyebab Kematian Cliff Muntu (Kompas, 11/4/07)
- (9) IPDN Harus Disesuaikan UU
- (10) Terpidana Kasus Kematian Wahyu Hidayat Belum Dieksekusi. (Kompas, 12/4/07)

Berdasarkan ke empat judul tersebut pemerintah menghentikan tidak menerima praja baru 2007/2008 menyusul kematian Cliff Muntu akibat kekerasan seniornya, DPR harus segera turun tangan menyelidiki kekerasan di IPDN, apalagi seorang dosen yang kritis dinonaktifkan (7), 17 anggota DPRD sulut meminta kepada Depdagri membubarkan IPDN, menyusul kematian Cliff Muntu, praja asal Sulut (8), dan Depdiknas mendorong IPDN dan lembaga pendidikan lain di bawah departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (9) Sedang data (10) adalah ketakutan siswa dalam menyongsong Unas.

## 2. Bentuk Bentuk Ekspresi Bahasa

Perspektif dalam produksi bahasa ternyata tidak hanya dapat diamati keberadaannya dalam struktur wacana tetapi dapat juga diamati dalam struktur yang lebih rendah dari wacana. Perspektif suatu ideologi dipengaruhi secara sistematis pada pemilihan bentuk-bentuk ekspresi linguistik baik pada tatanan leksikal (kosakata), sintaksis (kalimat) dan wacana seperti pemakaian kosakata, sistem ketransitifan, struktur nominalisasi, modalitas, tindak tutur, metafora, dan struktur informasi.

### a. Kosakata

Pemakaian kosakata bukan semata persoalan teknis tetapi sebagai praktik ideologi. Pilihan kata dalam suatu teks menandai secara sosial dan ideologis bidang pengalaman yang berbeda dari penulisanya baik berupa nilai eksperiental, nilai relasional, dan nilai ekspresif. *Nilai eksperiental* berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan yang dibawa oleh kata-kata tersebut. *Nilai rasional* berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial yang tercipta oleh kata tersebut. *Nilai ekspresif* berkaitan dengan pemilihan atau evaluasi tentang sesuatu yang dicerminkan oleh kata tersebut. Perkosaan dapat dimaknai “*memperkosa, meniduri, menindih, menggagahi, menodai, memerawani, dst*”. Pembunuhan dapat diganti dengan “digebug”, “dilibas”, “diamankan dan “disukabumikan”

### b. Sistem Ketransitifan

Menurut Fowler bahasa dipandang sebagai model yang menghubungkan antara objek dan peristiwa. Terdapat tiga model transitifitas yaitu *transitif, intransitive dan relasional*. Dalam model transitif berhubungan dengan proses melihat suatu tindakan dan bagian-bagian lain sebagai akibat suatu tindakan. “*Polisi memukul mahasiswa*” adalah bentuk transitif. Polisi sebagai aktor yang menyebabkan suatu tindakan melakukan sesuatu “memukul”. Model intransitif seorang aktor dihubungkan dengan suatu proses tetapi tanpa menjelaskan atau menggambarkan akibat atau objek



yang dikenai. “*Polisi menembak*”, “*Polisi mengamankan*”. Sedangkan model relasional menggambarkan sama-sama kata benda. “*Korban Polisi itu adalah seorang ayah dari seorang balita*”. Hubungan juga bersifat *atributi*, benda dihubungkan dengan kata sifat untuk menunjukkan kualitas atau penilaian tertentu. Misalnya “*Polisi itu sangat garang*”

Bentuk transitif memasukkan suatu pandangan dan sikap penulis yang berbeda tentang peristiwa yang dilaporkan, Berikut disajikan klausa yang memiliki berbagai perspektif.

(10) Polisi *menembak* mati enam demonstran

(11) Enam demonstran *ditembak* mati

(12) Enam demonstran tewas

(13) “Enam demonstran *ditembak* mati” Ujar saksi mata

(14) Saksi mata melihat enam demonstran mati *tertembak*

(15) Enam mahasiswa yang tewas itu diantaranya Elang Mulya

Lesmana, Hendriawan Sie, dan Hafidin R...

### c. Struktur Nominalisasi

Nominalisasi adalah transformasi sintaksis secara radikal dalam suatu klausa, yang memiliki konsekuensi struktural yang luas dan memberikan kesempatan menyampaikan ideologi. Dalam bahasa Indonesia predikat verba direalisasikan secara sintaksis menjadi nomina. Salah satunya dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”. Kata memperkosa menjadi perkosan, membunuh menjadi pembunuhan, menembak menjadi penembakan. Contoh berikut ini memiliki perspektif berbeda:

(16) Seorang ayah *memperkosa* anak gadisnya sendiri yang berusia 12 tahun.

(17) *Perkosaan* menimpa anak gadis yang baru berumur 12 tahun.

(18) Polisi *menembak* secara membabi-buta dalam insiden Semanggi

(19) *Penembakan* secara membabi buta terjadi dalam insiden Semanggi.

### d. Modalitas

Modalitas diartikan sebagai komentar atau sikap yang berasal dari teks, baik secara eksplisit atau implisit diberikan oleh penulis terhadap apa yang dilaporkan, yakni keadaan, peristiwa, dan tindakan. Modalitas memiliki peluang besar untuk digunakan jurnalis dalam membangun perspektif pemberitaan yang mempengaruhi opini pembaca. Dengan modalitas, penulis dapat memasukkan pandangan pribadi atau institusinya ke dalam proposisi yang ditulisnya melalui pilihan modalitas. Modalitas sebagai komentar atau sikap penulis yang tertuang dalam teks dibagi menjadi empat yaitu (1) kebenaran, (2) keharusan, (3) izin, (4) keinginan. Contoh berikut modalitas yang menyiratkan pespektif pemberitaan.

(20) Tommy Soeharto *harus* ditangkap

(21) Tommy Soeharto *seharusnya* ditangkap

(22) Tommy Soeharto *bisa* ditangkap

(23) Tommy Soeharto *mungkin* ditangkap

(24) Tommy Soeharto *tidak akan* tertangkap

(25) Tindakan penangkapan Tommy Soeharto dinilai *sangat tepat*

Pemakaian modalitas *harus*, *seharusnya*, dan *sangat tepat* pada (20), (21), dan (25) menunjukkan dukungan tindakan yang tercermin dalam proposisi. Sementara (22) dan (23) memperlihatkan sikap netral bila dibandingkan dengan (20), (22) dan (25)

### e. Tindak Tutur

Bentuk ekspresi bahasa yang dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan perspektif adalah elemen-elemen interpersonal seperti tindak tutur (*Speech acts*). Pandangan yang melandasi tindak tutur, jika orang mengatakan sesuatu, orang akan melakukan sesuatu untuk tuturan itu. Hal itu merupakan aspek dalam fungsi interpersonal bahasa. Contoh (26) dan (27) berikut dapat menjelaskan tindak tutur yang dapat menimbulkan perspektif berbeda. (26) Ada unjuk rasa, (27)

Kongres Umat Islam merekomendasikan presiden dan wapres mendatang harus pria, beriman, dan bertaqwa (Jawa Pos, 7/11/8).

Pada tuturan (26) dituturkan oleh seorang polisi, tidak sekedar menginformasikan sesuatu, tetapi juga berfungsi sebagai perintah ke lokasi untuk pengamanan. Hal itu berbeda maknanya jika dituturkan oleh mahasiswa di kampus, ujaran itu bukan informasi tetapi ajakan. Demikian pula dalam (27), bagi mereka yang mengikuti perkembangan pasca Pemilu 1999, maka dengan cepat dapat menangkap bahwa ilokusi yang tersirat yang menghambat Megawati Soekarno Putri maju menjadi presiden.

#### f. Metafora

Menurut Aristoteles seperti yang dikutip Abdul Wahab, metafora merupakan ungkapan kebahasaan yang menyatakan ungkapan kebahasaan yang menyatakan hal-hal yang bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya. Metafora digunakan sebagai ungkapan kebahasaan yang maknanya tidak bisa dijangkau secara langsung dari lambang karena makna yang dimaksud terdapat pada prediksi ungkapan kebahasaan itu. Artinya, metafora merupakan pemahaman pengalaman sejenis hal yang dimaksudkan untuk perihal lain. Metafora digunakan jurnalis untuk membangun perspektif dalam surat kabar. Berikut adalah contoh metafora yang dapat menimbulkan perspektif berbeda

(28) *Gelombang* mahasiswa mendatangi Gedung DPR Senayan mendesak agar anggota dewan ikut mengusut 4 mahasiswa yang ditembak di Universitas Trisakti

(29) Ibarat pemain sepakbola, saat ini penyelesaian utang PT Garuda Indonesia sudah memasuki *injury time*, tinggal menunggu peluit panjang.

Metaforik gelombang untuk menggambarkan laut yang bergulung-gulung dan menakutkan (28) metaforik *injury time* menggambarkan sedikitnya waktu PT Garuda Indonesia untuk melunasi utang.

(30) Debitor *Nakal* Perlu Dicekal

(31) Amin, Gus Dur, Hamzah, dan Nur Mahmudi Bertemu

Mereka Bahas "*Buah Simalakama*" Mega

Kata nakal dalam (30) memiliki adanya tiga kesamaan sifat nakal yaitu (1) masih kanak-kanak, sehingga kurang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, (2) sudah tahu aturan yang sudah disepakati tetapi tetap saja melanggar, (3) sudah dinasihati tetapi tidak memperbaiki. Demikian dengan "*buah simalakama*", jika Megawati terpilih menjadi presiden keadaan belum tentu bertambah baik. Sebaliknya jika Megawati tidak terpilih akan berpotensi buruk. Bagi partai berbasis massa Islam perempuan memang tidak diijinkan menjadi pemimpin.

Kita perlu memahami praktik diskursif dari komunitas pemakai bahasa yang disebut sebagai *order of discourse*. Ketika menganalisis teks berita Sebelum dimensi tersebut dianalisis perlu melihat dulu *order of discourse*, apakah bentuknya *hardnews*, *features*, *artikel*, atau *editorial*. Ini akan membantu peneliti untuk memaknai teks, produksi teks, dan konteks sosial dari teks yang dihasilkan. **Order of discourse** secara sederhana seperti layaknya pakaian: pakaian di kantor berbeda dengan pakaian tidur dan pakaian renang. Pemakaian bahasa menyesuaikan dengan praktik diskursif di tempat mana ia berdatang, ia tidak bebas memakai bahasa.

Paparan berikut ini merupakan contoh manifestasi perspektif pemberitaan surat kabar Indonesia dalam bentuk ekspresi bahasa. Data diambil dari berita media pasca reformasi, Mei-Juli 1999, satu tahun runtuhnya rejim Soeharto.

#### Pilihan Kata

Berikut dicontohkan pilihan kata tentang "*penyelidikan harta mantan Presiden Soeharto Rp 120 triliun di Bank Swiss*"

(32) Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H. menilai langkah Habibie mengirim Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman ke Swiss dan Austria untuk menyelidiki kebenaran harta Soeharto *tidak akan efektif* karena diumumkan secara terbuka.

- (33) Ketua Gempita (Gerakan Peduli Harta Negara\_ Dr. Albert Hasibuan, S.H. *merasa pesimis* pemerintah sekarang bisa mengusut dan mengadili mantan Presiden Soeharto.
- (34) *Berbagai kalangan pesimis*, dengan hasil yang bakal dicapai oleh Tim yang dipimpin oleh Jaksa Agung Andi Ghalib yang akan berangkat ke Swiss dan Austria.
- (35) *Pesimisme* seperti itu juga dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Syaiful Anar Hussein
- (36) Di Ujung Pandang , Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan *tidak percaya* upaya Muladi-Ghalib ke Austria dan Swiss untuk melacak kekayaan Soeharto dapat membuahkan hasil
- (37) Perjalanan Andi Ghalib dan Muladi ke Swiss dan Austria adalah *sandiwara politik* dan hampir tidak ada maknanya.
- (38) Upaya tesebut hanya sia-sia dan merupakan lelucon politik selama Soeharto belum dijadikan tesaangka)

Perbedaan pengalaman para wartawan atau surat kabarnya tentang “*penyelidikan harta Soeharto ke Swiss dan Austria oleh Muladi dan Ghalib*” secara jelas diwujudkan dalam enam pilihan kata *tidak akan efektif, merasa pesimis, pesimisme, tidak percaya, sandiwara politik, dan hanya sia-sia.*

### Struktur Informasi

Pengaturan struktur informasi atau organisasi isi proposisi dalam kalimat atas informasi latar dan informasi baru dapat dipergunakan menandai perspektif pemberitaan. Perspektif pemberitaan akan terlihat dari memilih bagian proposisi tertentu sebagai informasi baru dan bagian proposisi lain sebagai informasi latar. Berikut contoh fenomena pengaturan informasi.

(39) Sebelum bentrok sebenarnya sempat dilakukan negosiasi dengan tawaran 50 wakil PRD berdialog dengan KPU di ruang sidang, dengan catatan yang lain menunggu di jalan.

(40) Sebelum terjadi bentrokan, aparat keamanan yang menjaga pintu masuk kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sempat membiarkan pengunjung rasa dengan atribut PRD lengkap di seujur tubuh mereka membaswakan orasi 50 menit..

Kedua proporsisi di atas menginformasikan tentang bentrokan antara PRD dengan aparat kepolisian di KPU. Perbedaan itu tampak dalam proposisi pengisi informasi latar baru. Jika disederhanakan , struktur proposisi kedua data (39) dan (40) adalah sebagai berikut.

(39a) Bentrok PRD dan polisi—*negosiasi PRD dan polisi, 50 perwakilan PRD bertemu wakil KPU*—bentrok PRD dan Polisi 28 luka-luka .

(40a) Bentrok PRD dan Polisi—*PRD dibiarkan polisi berorasi 50 menit*—*aparat keamanan membubarkan orsi PRD*—bentrok polisi dengan PRD 28 luka-luka.

Pada kedua data tersebut yang ditulis dengan huruf miring adalah data informasi baru dan yang ditulis dengan huruf tegak adalah informasi latar. Untuk mendukung analisis ini, berikut disajikan kalimat yang mendahului kedua kalima tersebut.

(41) Pengamat kepolisian Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. menyatakan, insiden penembakan massa PRD oleh aparat keamanan justru bertepatan dengan peringatan hari Bhayangkara makin memperburuk momentum tersebut

(42) Demonstrasi fanatik sekitar 500 massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) di depan Gedung KPU, kemarin berubah berdarah.

Dari struktur proposisi pada data (39) dan konteks data sebelumnya (41) terlihat bahwa proposisi *Demo PRD* merupakan informasi latar. Kedua informasi itu dapat ditemukan rujukannya dalam data (41) yakni penembakan massa PRD pada hari Bhayangkara makin memperburuk citra polisi. Sementara itu, proposisi demonstrasi fanatik sekira 500 massa PRD berubah berdarah tidak ditemukan dalam rujukannya. Perbedaan Proposisi pengisi informasi latar baru dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data	Informasi Latar	Informasi baru
39	Bentrok di KPU antara PRD dan Polisi	Negosiasi 50 perwakilan PRD berdialog dengan KPU
40	Bentrok di KPU antara PRD dan Polisi	Polisi membiarkan PRD berorasi 50 menit

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa proposisi yang mengisi informasi latar sama yaitu *Bentrok di KPU antara PRD dan Polisi*, namun informasi baru yang dimunculkan oleh wartawan berbeda yaitu *Negosiasi 50 perwakilan PRD berdialog dengan anggota KPU* (Suara Pembaruan) dan *Polisi membiarkan PRD berorasi 50 menit* (Media Indonesia).

Berdasarkan struktur dan konteks kedua data, serta pra-anggapan masing-masing pengisi informasi latar dan informasi baru disimpulkan bahwa surat kabar Suara Pembaruan pro masyarakat. Seharusnya polisi tidak perlu bentrok dengan PRD, apalagi dengan menembak, menendang, memukul, dan menginjak-injak.

## Penutup

Analisis wacana berdasarkan perspektif sosiokultural pada dasarnya menggunakan pola analisis teks, preses produksi teks, dan konteks. Analisis teks digunakan untuk melihat struktur teksnya untuk memahami struktur kata, kalimat, dan makna. Pada langkah selanjutnya penganalisis memahami proses produksi teks dengan menganalisis struktur tema dan konteks sosial budaya teks itu dihasilkan. Baik van Dijk maupun Fairclough masih sepakat memahami wacana dari teks. Namun keduanya masih melengkapi pemahaman teks itu dengan memahami kognisi sosial dan konteks (van Dijk) dan proses produksi dan proses interpretasi berdasarkan konteks sosial budaya. Dalam hubungannya dengan aspek produksi kekerasan oleh media sangat tergantung bagaimana teks tersebut dikonstruksi oleh orang-orang di belakangnya berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, dan struktur budaya media.

Sekreatif apa pun, manusia sebagai “diri” merupakan pencipta makna dalam bahasa atau karya seni. Manusia tidak hanya subjek perajut makna kata dan makna estetika, tetapi pada saat bersamaan, distrukturkan oleh sistem tanda atau kode bahasa yang ada. Artinya, manusia dikonstruksi oleh kode bahasa dan ia harus patuh mengikuti kode tanda ini bila mau berkomunikasi dalam wacana dengan sesamanya. Dengan kata lain, diri manusia dihadapkan pada kode-kode bahasa yang merupakan konsensus-konsensus dan konvensi bersama masyarakat pengguna bahasa mengenai makna kata, nuansa bahasa yang dalam sistem tanda dirumuskan menjadi semiotika. Kemudian, dalam perkembangan wacana yang dinamis, kode tanda bahasa yang diaksarakan dan menjadi simbol-simbol yang lebih luas dari cakupan bahasa sementara ini disepakati sebagai teks. Di sinilah letak pentingnya memahami dan menangkap kode bahasa dan artinya dari teks melalui dialog-dialog bukan hirarkis atau dikotomis dua posisi (oposisi biner) tetapi antar teks (intertextuality).

Untuk memahami kode bahasa dalam menangkap makna teks itu, ilmu menafsirkan teks yaitu hermeneutika diluaskan dari teks eksegeze (menafsir teks-teks kitab suci) menjadi hermeneutika tekstual antar teks berkat jasa Dilthey dan tokoh Gadamer---yang berutang budi pada Martin Heidegger lantaran bahasa eksistensi meng-ada manusia sebagai Dasein dalam ruang dan waktu harus diperbarui agar manusia menjadi sang pendengar Sabda dan sang pencipta bahasa. Hermeneutika teks dalam konteks diri manusia dengan relasi sosialnya, dan dalam relasi berbahasa dan berelasi sistem tanda itulah dirumuskan “siapa aku atau diri ini dan siapa diri yang lain atau ‘the other’ (alterity) itu? Bila tafsirannya “terlalu menyempit” pada identitas diri secara relasi politis yang muncul hanyalah keramaian wacana-wacana politik identitas dalam pidator retorik tanpa studi penafsiran-penafsiran teks yang mendalam apalagi antar teks. Namun, kode bahasa yang digunakan secara kreatif untuk bersastra tekstual tertulis bisa amat memperjuangkan pemuliaan diri manusia merdeka, egaliter Indonesia melawan seluruh konstruksi-konstruksi kultur yang menjajah, feodal dan memperbudak.[]

**Hand-Out 13**  
**TEKNIK AGITOP (AGITASI, ORASI DAN PROPAGANDA)**  
“Banyak Bicara, Banyak Bekerja!” (Soekarno, 1933)

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,  
Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama  
Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **Introduksi**

Istilah agitasi, propaganda, dan retorika atau orang sering menyebutnya AGITOP (Agitasi, Orasi dan Propaganda) adalah bagian dari “cara” berkomunikasi. Sebetulnya ada banyak cara berkomunikasi lainnya seperti penerangan, jurnalistik, humas, publisitas, pameran, dll. Seperti apa yang menjadi tujuan umum dari komunikasi maka AGITOP ditujukan juga untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain seperti yang diharapkan oleh komunikator (pengirim pesan).

Karena terkait masalah perilaku individu dalam situasi sosial, AGITOP tidak lepas dari masalah psikologi sosial. AGITOP akan menjadi efektif apabila disertai dengan pemahaman atas faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi sikap, maupun perilaku individu maupun kelompok. Faktor internal seperti kepribadian, sistem nilai, motivasi, serta sikap terhadap sesuatu yang ada disekitarnya, sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh sistem nilai yang hidup ditengah masyarakat, kondisi lingkungan alam, tata ruang dan kondisi sosial ekonomi.

AGITOP menjadi penting bagi organisasi masyarakat (ormas) maupun partai politik (parpol) hingga perusahaan komersial sekalipun karena menyangkut upaya-upaya untuk mencapai kemenangan maupun mempengaruhi sikap, pendapat maupun perilaku dari pihak-pihak lain baik itu pihak musuh (politik, ideologi, saingan bisnis), pihak netral maupun kawan. Bagi ormas atau Parpol, muara dari AGITOP ditujukan bagi sasaran pencapaian ke arah cita-cita perubahan sosial dari ideologi ormas, atau parpol yang bersangkutan.

Seorang Komunikator (agitator, propagandator, ataupun orator) yang baik, setidaknya harus mengerti unsur-unsur dasar komunikasi. Pakar komunikasi Harold Lasswell (1972) menyebutnya dalam pertanyaan: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect ?. ( Siapa mengatakan apa melalui apa untuk siapa dan pengaruhnya apa?). Siapa (Komunikator), mengatakan apa (Pesan), melalui apa (Media), untuk siapa (komunikas/penerima pesan), pengaruhnya apa (efek). Analisa yang mendalam terhadap unsur-unsur komunikasi diatas juga akan turut mempertajam strategi komunikasi bagi sebuah organisasi.

### **Pemikiran Plekhanov & Lenin: Tentang agitasi dan propaganda<sup>210</sup>**

Menurut kamus Oxford, mengagitasi adalah “membangkitkan perhatian (*toexcite*) atau mendorong (*stir it up*)”, sedangkan propaganda adalah sebuah “rencana sistematis atau gerakan bersama untuk penyebarluasan suatu keyakinan atau doktrin. Definisi ini bukan merupakan titik pijak yang buruk. Agitasi memfokuskan diri pada sebuah isu aktual, berupaya ‘mendorong’ suatu tindakan terhadap isu tersebut. Propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-gagasan secara terinci dan lebih sistematis.

Seorang marxis perintis di Rusia, Plekhanov, menunjukkan sebuah konsekuensi yang penting dari perbedaan ini. “Seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke satu atau sedikit orang; seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tetapi menyajikannya ke sejumlah besar orang (a mass of people)”. Seperti semua generalisasi yang seperti itu, pernyataan di atas jangan dipahami secara sangat harfiah. Propaganda, dalam keadaan yang menguntungkan, bisa meraih ribuan atau puluhan ribu orang. Dan ‘sejumlah besar orang’ yang dicapai oleh agitasi jumlahnya sangat tidak tetap. Sekalipun demikian, inti dari pernyataan Plekhanov itu memiliki landasan yang kuat (sound).

---

<sup>210</sup> Sumber: *What do we mean by ...?*, Socialist Worker Review, No.68, Sep 1968, hlm.10; Disalin & diberi tanda baca oleh Einde OCallaghan untuk Marxists Internet Archive. Oleh: Duncan Hallas (September 1984)

## Banyak gagasan ke sedikit orang

Lenin, dalam *What is to be done*, mengembangkan gagasan ini:

*"Seorang propagandis yang, katakanlah, berurusan dengan persoalan pengangguran, mesti menjelaskan watak kapitalistis dari krisis, sebab dari tak terhindarkannya krisis dalam masyarakat modern, kebutuhan untuk mentransformasikan masyarakat ini menjadi sebuah masyarakat sosialis, dsb. Secara singkat, ia mesti menyajikan "banyak gagasan", betul-betul sangat banyak, sehingga gagasan itu akan dipahami sebagai suatu keseluruhan yang integral oleh (secara komparatif) sedikit orang. Meskipun demikian, seorang agitator, yang berbicara mengenai persoalan yang sama, akan mengambil sebagai sebuah ilustrasi, kematian anggota keluarga seorang buruh karena kelaparan, peningkatan pemelaran (impoverishment) dsb., dan penggunaan fakta ini, yang diketahui oleh semua orang, akan mengarahkan upayanya menjadi penyajian sebuah gagasan tunggal ke "massa". Sebagai akibatnya, seorang propagandis bekerja terutama dengan memakai bahasa cetak; seorang agitator dengan memakai bahasa lisan."*

Mengenai pokok pikiran yang terakhir, Lenin keliru, karena ia terlalu berat-sebelah. Seperti yang ia sendiri nyatakan, sebelum dan sesudah ia menulis pernyataan di atas, sebuah surat kabar revolusioner bisa dan mesti menjadi agitator yang paling efektif. Tetapi ini merupakan masalah sekunder. Hal yang penting adalah bahwa agitasi, apakah secara lisan atau tertulis, tidak berupaya menjelaskan segala sesuatu. Jadi kita menyatakan, dan mesti menyatakan, bahwa para individu buruh tambang yang menggunakan pengadilan kapitalis untuk melawan NUM adalah buruh pengkhianat, bajingan (villains), dipandang dari segi perjuangan sekarang ini; betul-betul terpisah dari argumen umum tentang watak negara kapitalis. Tentu kita akan mengajukan argumen, tetapi kita berupaya 'membangkitkan perhatian', 'mendorong', 'membangkitkan rasa tidak senang dan kemarahan' terhadap pengadilan di sebanyak mungkin buruh. Ini mencakup mereka (mayoritas besar) yang belum menerima gagasan bahwa negara, negara apapun dan pengadilannya, pasti merupakan sebuah instrumen dari kekuasaan kelas.

Atau ambil sebuah contoh lain. Lenin berbicara tentang "ketidakadilan yang amat parah" (crying injustice). Namun, sebagai seorang pengikut Marx yang mendalam, ia betul-betul mengetahui bahwa tidak ada 'keadilan' atau 'ketidakadilan' yang terlepas dari kepentingan kelas. Di sini, ia menunjuk dan berseru pada kontradiksi antara konsep 'keadilan' ('justice' or 'fairness') yang dipromosikan oleh para ideolog masyarakat kapitalis dengan realitas yang terekspos dalam perjalanan perjuangan kelas. Dan hal itu mutlak benar dari sudut pandang agitasi.

Seorang propagandis, tentu saja, mesti menyelidiki secara lebih mendalam, mesti meneliti konsep keadilan, perkembangan dan transformasinya melalui berbagai masyarakat berkelas yang berbeda, isi kelasnya yang tak terhindarkan. Tetapi hal itu bukan merupakan tujuan utama dari agitasi. Para 'marxis' yang tidak memahami perbedaan ini menjadi korban dari ideologi borjuis, menjadi korban dari generalisasi yang lepas dari konteks waktu (timeless generalisations), yang mencerminkan masyarakat berkelas yang diidealisasikan. Yang paling penting, mereka tidak memahami secara konkrit bagaimana sebenarnya sikap kelas buruh berubah. Mereka tidak memahami peran pengalaman, sebagai contoh, pengalaman tentang peran polisi dalam pemogokan para buruh tambang. Mereka tidak memahami perbedaan antara agitasi dan propaganda.

Kedua hal itu penting, sangat diperlukan, tetapi keduanya tidak selalu bisa dikerjakan. Agitasi memerlukan kekuatan yang lebih besar. Tentu saja seorang individu terkadang bisa mengagitasi sebuah keluhan tertentu secara efektif, katakanlah, keluhan mengenai kurangnya sabun atau tissue toilet yang layak di sebuah tempat kerja tertentu, tetapi sebuah agitasi yang luas dengan sebuah fokus yang umum tidaklah mungkin tanpa sejumlah besar orang yang ditugaskan dengan pantas untuk melaksanakannya, tanpa sebuah partai.

Jadi apa pentingnya perbedaan tersebut sekarang ini? Untuk sebagian besar, para sosialis di Inggris tidak berbicara ke ribuan atau puluhan ribu orang. Kita sedang berbicara ke sejumlah kecil orang, biasanya berupaya meyakinkan mereka (to win them) melalui politik sosialis yang

umum, dan bukan melalui agitasi massa. Jadi apa yang kita usulkan (arguing) pada dasarnya adalah propaganda. Tetapi di sinilah kebingungan muncul. Karena terdapat lebih dari satu jenis propaganda. Ada sebuah pembedaan antara propaganda abstrak dan jenis propaganda yang diharapkan dapat mengarah ke suatu aktivitas, yaitu propaganda yang konkrit atau realistik.

Propaganda abstrak memunculkan gagasan yang secara formal benar, tetapi tidak terkait dengan perjuangan atau dengan tingkat kesadaran yang ada di antara mereka yang menjadi sasaran dari penyebaran gagasan itu. Sebagai contoh, menyatakan bahwa di bawah sosialisme sistem upah akan dihapuskan adalah mutlak benar, menempatkan usulan yang seperti itu kepada para buruh sekarang ini bukanlah agitasi, melainkan propaganda dalam bentuk yang paling abstrak. Begitu pula, usulan terus-menerus (constant demand) untuk sebuah pemogokan umum, terlepas dari apakah prospek untuk melakukannya bersifat riil dalam situasi yang sekarang, mengarah tidak ke agitasi, melainkan ke penarikan diri (abstaining) dari perjuangan yang riil di sini dan sekarang.

Di sisi lain, propaganda realistik berpijak dari asumsi bahwa kelompok-kelompok sosialis yang kecil tidak dapat secara meyakinkan mempengaruhi kelompok-kelompok buruh yang besar sekarang ini di hampir setiap keadaan. Tetapi hal itu juga mengasumsikan bahwa terdapat argumen tentang isu-isu spesifik, yang dapat dicoba untuk dibangun oleh para sosialis. Jadi seorang propagandis realistik di sebuah pabrik tidak akan mengusulkan penghapusan sistem upah. Ia (laki-laki atau perempuan) akan mengusulkan serangkaian tuntutan yang diharapkan dapat mengarahkan perjuangan ke kemenangan, dan sudah tentu melebihi kemenangan kecil (tokens) yang diberikan oleh bikorasi serikat buruh. Jadi mereka akan mengusulkan, misalnya, peningkatan ongkos rata-rata setiap produk (a flat rate increase), pemogokan mati-matian dengan tuntutan penuh (the full claim, all out...strike) dan bukan pemogokan yang selektif, dsb.

Menyeimbangkan agitasi dengan propaganda secara benar (Getting the balance right). Semua ini bukanlah agitasi dalam arti yang dibicarakan oleh Lenin, hal itu adalah satu atau dua orang sosialis yang memunculkan serangkaian gagasan tentang bagaimana untuk menang. Tetapi hal itu juga bukan propaganda abstrak karena hal itu terkait dengan sebuah perjuangan yang riil dan karenanya bisa terkait dengan minoritas buruh yang cukup besar di suatu wilayah. Ini berarti bahwa propaganda realistik dapat membangun hubungan (strike a chord) dengan sekelompok orang yang jauh lebih besar daripada mereka yang sepenuhnya terbuka untuk gagasan-gagasan sosialis. Bahwa sekarang ini hanya sekelompok orang yang sangat kecil yang akan terbuka untuk semua gagasan-gagasan sosialisme. Kelompok yang lebih besar tidak akan seperti itu, tetapi masih bisa menerima banyak propaganda dari kaum sosialis untuk tidak mempercayai para pejabat, untuk mengorganisir di lapisan bawah (the rank and file) dan sebagainya.

Pentingnya pembedaan ini ada dua (twofold). Para sosialis yang mempercayai bahwa mereka harus melakukan propaganda di kelompok-kelompok diskusi mereka yang kecil, dan mengagitasi di tempat kerja mereka, sangat mungkin menaksir terlalu tinggi (overestimate) pengaruh mereka di sejumlah besar buruh dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk membangun basis di sekitar sejumlah kecil pendukung. Mereka yang percaya bahwa mereka hanya harus melakukan propaganda abstrak dalam diskusi-diskusi mereka dengan para sosialis yang lain dan di tempat kerja mereka bisa mengambil sikap menarik diri ketika perjuangan yang riil benar-benar meletus.

Dengan melakukan propaganda realistik pada sebuah periode di mana agitasi massa secara umum tidak mungkin, kaum sosialis akan jauh lebih mungkin untuk dapat menghindari kedua jebakan tersebut.

## **Agitasi**

Dalam makna denotatifnya, agitasi berarti hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan dan lain sebagainya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh tokoh/aktivis partai politik, ormas dan lain sebagainya dalam sesi pidato maupun tulisan. Dalam praktek, dikarenakan kegiatan agitasi yang cenderung “menghasut” maka seringkali disebut sebagai kegiatan “provokasi” atau sebagai perbuatan untuk membangkitkan kemarahan. Bentuk agitasi sebetulnya bisa dilakukan secara individual maupun dalam basis kelompok (massa).

Beberapa perilaku kolektif yang dapat dijadikan sebagai pemicu dalam proses agitasi adalah :

1. Perbedaan kepentingan, seperti misalnya isu SARA (Suku, Agama, Ras). Perbedaan kepentingan ini bisa menjadi titik awal keresahan masyarakat yang dapat dipicu dalam proses agitasi
2. Ketegangan sosial, ketegangan sosial biasanya timbul sebagai pertentangan antar kelompok baik wilayah, antar suku, agama, maupun pertentangan antara pemerintah dengan rakyat.
3. Tumbuh dan menyebarnya keyakinan untuk melakukan aksi, ketika kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lainya, memungkinkan timbul dendam kesumat dalam dirinya. Hal ini bisa menimbulkan keyakinan untuk dapat melakukan suatu aksi bersama;

Dalam politik, ketiga perilaku kolektif diatas akan menjadi ledakan sosial apabila ada faktor penggerak (provokator)nya. Misalnya ketidakpuasan rakyat kecil terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada mereka juga bisa menjadi sebuah alat pemicu yang efektif untuk mendongkel sebuah rezim. Dalam tahap selanjutnya, mobilisasi massa akan terbentuk apabila ledakan sosial yang muncul dapat memancing solidaritas massa. Hingga pada eskalasi tertentu mebis munculkan kondisi collaps.

Dalam proses agitasi pemahaman perilaku massa menjadi penting. Agar agitasi dapat dilakukan secara efektif maka perlu diperhatikan sifat orang-orang dalam kelompok(massa) seperti ; massa yang cenderung tidak rasional, mudah tersugesti, emosional, lebih berani mengambil resiko, tidak bermoral. Kemampuan seorang agitator untuk mengontrol emosi massa menjadi kunci dari keberhasilan proses agitasi massa. Sedangkan pendekatan hubungan interpersonal merupakan kunci sukses dalam agitasi individu.

## **Propaganda**

Propaganda sendiri berarti penerangan ( paham, pendapat, dsb) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang lain agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Kegiatan propaganda ini banyak dipakai oleh berbagai macam organisasi baik itu orgnisasi massa, parpol, hingga perusahaan yang berorientasi profit sekalipun baik kepada kawan, lawan maupun pihak netral. Propaganda juga merupakan inti dari kegiatan perang urat syaraf (nerve warfare) baik itu berupa perang ideologi, politik, ide, kata-kata, kecerdasan, dll.

Sebagai komunikasi satu ke banyak orang (one-to-many), propaganda memisahkan propagandis dari khalayaknya. Namun menurut Ellul, propagandis sebenarnya merupakan wakil suatu organisasi yang berusaha mengontrol anggotanya. Sehingga disimpulkan, propagandis adalah seorang teknikus kontrol sosial. Dengan berbagai macam teknis, setiap penguasa negara atau yang bercita-cita menjadi penguasa negara, mempergunakan propaganda sebagai suatu mekanisme kontrol sosial.

Ellul membagi tipologi propaganda menjadi propaganda politik dan sosiologi. Propaganda politik melibatkan usaha pemerintah, partai atau golongan untuk mencapai tujuan strategis dan taktis. Sementara propaganda sosiologis merupakan perembesan cara hidup yang berangsur-angsur masuk ke dalam lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan politik.

Ellul juga membedakan propaganda integrasi dengan agitasi dan propaganda vertikal dengan horisontal. Agitasi berusaha agar orang-orang bersedia memberikan pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung, mengorbankan jiwa mereka dalam usaha mewujudkan cita-cita. Sedang propaganda integrasi bertujuan menggalang kesesuaian di dalam mengejar tujuan-tujuan jangka panjang.

Yang dimaksud propaganda vertikal adalah propaganda satu satu ke banyak dengan mengandalkan media massa bagi penyebarannya. Sedangkan propaganda horisontal lebih banyak melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi dibanding komunikasi massa. Jika dihubungkan dengan kelima dasar identifikasi unsur-unsur komunikasi yang dikemukakan Harold Lasswell (1948)—siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa, titik fokus kampanye propaganda dirumuskan Dan Nimmo (2000) lebih ke arah: siapa, mengatakan apa dan melalui saluran mana.



Beberapa pertimbangan untuk fokus pada siapa meliputi status komunikator, kredibilitas komunikator serta daya tarik komunikator. Sedang untuk mengatakan apa, berbagai pesan propagandis berhubungan isi dan struktur pesan. Fokus dengan saluran mana, berkaitan dengan media apa yang digunakan dan dipercaya orang serta media yang sesuai dengan orang tertentu.

Kegiatan propaganda menurut bentuknya seringkali digolongkan dalam dua jenis, yaitu propaganda terbuka dan tertutup. Propaganda terbuka ini dilakukan dengan mengungkapkan sumber, kegiatan dan tujuannya secara terbuka. Sebaliknya, propaganda tertutup dilakukan dengan menyembunyikan sumber kegiatan dan tujuannya.

Para pakar organisasi menggolongkan 3 (tiga) jenis model propaganda. Menurut William E Daugherty, ada 3 (tiga) jenis propaganda :

1. Propaganda putih (white propaganda ), yaitu propaganda yang diketahui sumbernya secara jelas, atau sering disebut sebagai propaganda terbuka. Misalnya propaganda secara terang-terangan melalui media massa. Biasanya propaganda terbuka ini juga dibalas dengan propaganda dari pihak lain (counter propaganda).
2. Propaganda Hitam (black propaganda), yaitu propaganda yang menyebutkan sumbernya tapi bukan sumber yang sebenarnya. Sifatnya terselubung sehingga alamat yang dituju sebagai sumbernya tidak jelas.
3. Propaganda abu-abu (gray propaganda), yaitu propaganda yang mengaburkan proses indentifikasi sumbernya.

Penerbit Harcourt, Brace and Company menyebarkan publikasi berjudul *The Fine Art of Propaganda* atau yang sering disebut sebagai *the Device of Propaganda* (muslihat propaganda) yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis propaganda sebagai berikut :

1. *Name-calling* (penggunaan nama ejekan). Teknik ini menggunakan kata-kata yang menghubungkan seseorang atau ide dengan konsep yang negatif. Tujuannya untuk membuat orang menolak sesuatu karena asosiasi negatif yang melekat pada orang atau ide tersebut tanpa melihat kenyataannya. Contoh kata yang digunakan ; ‘Teroris’, ‘Nazi’, ‘Rasis’, ‘Homo’.
2. *Glittering Generalities* (penggunaan kata-kata muluk). Kebalikan dari name-calling, taktik ini menggunakan *highly valued concepts* dan *beliefs* yang membuat audien merasa positif dan mengundang tepuk tangan meriah bila di-orasikan di depan massa. Kata-kata yang digunakan biasanya bermakna rancu, namun atraktif seperti; ‘Freedom’, ‘Honor’, ‘Love’. Arti kata di atas bisa berbeda untuk tiap pendengar, namun teknik ini dapat berfungsi karena secara umum mempunyai konotasi positif.
3. *Transfer*. Ini adalah teknik yang digunakan oleh pelaku propaganda untuk «memindahkan» otoritas dan penerimaan atas sesuatu yang anda hormati atau puja menjadi sesuatu yang ingin anda miliki. Cara yang digunakan yaitu dengan memproyeksikan sifat-sifat entitas, orang, atau simbol ke dalam wujud lainnya melalui asosiasi/penghubungan visual atau mental. Hal ini menstimulasi penerima pesan/resipien untuk mengidentifikasikan dirinya dengan otoritas tersebut.
4. *Testimonial*. Tujuan testimonial adalah untuk menguatkan pengalaman, otoritas dan rasa hormat seseorang dan menggunakannya untuk mempromosikan sebuah produk atau hal. Testimonial memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat terhadap emosi daripada terhadap logika, karena testimonial sejatinya memberikan membenaran yang lemah atas suatu produk atau tindakan.
5. *Plain Folks*. Teknik di mana pelaku propaganda menempatkan dirinya sebagai orang biasa seperti halnya *target audience*, untuk menunjukkan kemampuannya ber-empati dan memahami kepedulian/perasaan massa. Pelaku menunjukkan perilaku atau menggunakan bahasa dan sikap yang menyatu dengan sudut pandang audien.
6. *Card Stacking*. Sebuah cara yang memanipulasi persepsi audien dengan menekankan satu sisi argumen yang memperkuat posisi anda, sambil di sisi lain menekan/meminimalisir opini yang bertentangan. Contohnya memperbandingkan *best possible scenarios* dengan *worse examples*.

7. *Bandwagon*. Dalil dasar teknik *bandwagon* adalah '*since everyone is doing it, you should too*'. Tujuannya mem-persuasi orang lain untuk mengikuti trend umum dengan cara memperkuat keinginan manusia untuk berada pada sisi yang menang. Pelaku 'mengompori' audien bahwa mereka akan kehilangan atau ketinggalan sesuatu bila tidak ikut bergerak dengan massa lainnya. Manipulasi rasa takut dan rasa tidak aman.

Seperti halnya komunikasi lainnya maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan propaganda :

1. Siapa yang dijadikan sasaran propaganda, kawan, lawan, atau pihak netral
2. Media apa yang akan dipergunakan, surat kabar, radio, majalah, televisi, sms, buku, film, pamlet, poster dll. Untuk musuh misalnya melalui desas-desus dan pihak netral dengan negosiasi atau diplomasi
3. Pesan apa yang akan disebarkan
4. Apa yang menjadi tujuan dari propaganda, misalnya ketakutan, kekacauan, ketidakpercayaan dsb.

Studi propaganda telah mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20. Ketujuh teknik propaganda ini adalah model awal propaganda dan tidak terlalu komprehensif, meski demikian model awal ini akan memberi anda pengenalan tentang bagaimana propaganda dapat berperan dalam lingkungan sosial.

## Retorika

Retorika menurut arti katanya adalah ilmu bicara (rhetorica). Menurut Cleanth Brooks dan Robert Penn Warren adalah seni penggunaan bahasa secara efektif. Namun sebagian besar pakar komunikasi mengartikan retorika tidak hanya menyangkut pidato (public speaking), tapi juga termasuk seni menulis. Menurut A. Hitler hakekat retorika adalah senjata psikis untuk untuk memelihara massa dalam keadaan perbudakan psikis.

Retorika sebagai seni berbicara sudah dipelajari sejak abad ke lima sebelum masehi, yaitu sejak kaum Sophis di Yunani mengajarkan pengetahuan mengenai politik dan pemerintahan dengan penekanan utama dalam kemampuan berpidato. Georgias (480-370 SM) sebagai tokoh aliran Sophisme menyatakan kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan.

Namun karena dalam praktek retorika lebih cenderung dimaksudkan untuk memutarbalikan fakta demi kemenangan, maka Plato mendirikan akademi sebagai proses pencarian kebenaran dengan pengembangan thesa dan antithesa. Menurut Plato sendiri retorika bertujuan untuk memberikan kemampuan menggunakan bahasa yang sempurna dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan dalam terutama dalam bidang politik.

Retorika merupakan bentuk persuasi yang menonjolkan komunikasi dua arah, dialektika, negosiasi dan drama. Melalui retorika, yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan dan pengharapan mereka. Ini yang dikatakan Kenneth Burke (1969) sebagai konsubstansialitas.

Karena merupakan komunikasi dua arah, satu ke satu dan bukan satu ke banyak, retorika politik, merupakan proses yang memungkinkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi. Melalui retorika politik, kita menciptakan masyarakat dengan negosiasi yang terus berlangsung tentang makna situasi dan tentang identitas kita dalam situasi tersebut.

Adapun tipe-tipe retorika politik, seperti digolongkan Aristoteles dalam Retorika, meliputi deliberatif, forensik dan demonstratif. Retorika deliberatif memfokuskan pada apa yang akan terjadi di masa depan jika ditetapkan kebijakan tertentu. Retorika forensik bersifat yuridis dan berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan bersalah atau tidak, pertanggungjawaban atau ganjaran. Retorika demonstratif memfokuskan pada epideiktik, wacana memuji atau

menjatakannya dengan tujuan memperkuat sifat baik atau sifat buruk seseorang, lembaga maupun gagasan.

Fokus kampanye retorik, menurut Dan Nimmo adalah bagaimana menciptakan dan merayu khalayak. Sementara yang dimaksud khalayak, diklasifikasikan Hugh Duncan (1962) meliputi: khalayak umum, pelindung komunitas, kawan dan orang dekat, diri sendiri dan khalayak ideal.

Dari ketiga cara berpikir tentang persuasi politik tersebut, nampak bahwa persuasi merupakan transaksi kreatif yang dimana yang dipersuasi ikut memberi tanggapan terhadap lambang dalam imbauan persuader. Hal itu membantah argumentasi di banyak literatur bahwa persuasi hanya manipulatif dimana khalayak bereaksi terhadap lambang-lambang secara otomatis. Dalam pengertian Burke, yang dipersuasi terlibat secara aktif dalam persuasi itu sendiri.

Agar persuasi tidak seperti robot yang digerakkan oleh propaganda, periklanan dan retorika, William McGuire (1968) mengatakan bahwa ada enam tahap pemrosesan informasi agar persuasi itu terjadi: harus ada imbauan persuasif, orang harus memperhatikannya, harus memahaminya isinya, menerimanya, tetap pada opini yang baru dianutnya serta bertindak lebih lanjut berdasarkan pandangan itu. Keenam langkah persuasi McGuire dapat dipandang sebagai tahap-tahap yang diidentifikasi di dalam proses persuader dan yang dipersuasi menyusun makna atau citra bersama tentang pesan persuasif. Dengan mengikuti langkah McGuire kita dapat menggabungkan tahap penyusunan citra dengan kelima unsur komunikasi Lasswell: sumber (siapa?), pesan (mengatakan apa?), saluran, penerima (dengan siapa?) dan tujuan (dengan akibat apa?).

Menurut Effendy, dengan mencontohkan pada figur Bung Karno, seorang orator politik yang baik setidaknya harus memiliki tiga prasyarat sebagai berikut : Ethos, kredibilitas sumber. Pathos, menunjukkan imbauan emosional. Logos, menunjukkan imbauan logis.

Menurut teori, setidaknya ada empat bagian dalam pidato :

1. Exordium (kepala), adalah bagian pendahuluan. Fungsinya sebagai pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk menyiapkan mental para hadirin. Yang terpenting adalah membangkitkan perhatian. Beberapa cara untuk mengundang perhatian adalah sebagai berikut : Mengemukakan kutipan, mengajukan pertanyaan, menyajikan ilustrasi yang spesifik, memberikan fakta yang mengejutkan, menyajikan hal yang mengundang rasa manusiawi, menengahkan pengalaman yang ganjil. Tentu dari sekian cara tersebut juga harus disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan dan pendidikan.
2. Protesis (Punggung), adalah bagian pokok pembahasan yang ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakangnya.
3. Argumenta (Perut), adalah batang tubuh dari pidato yang merupakan satu kesatuan dengan punggung atau pokok pembahasan. Argumenta adalah alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian protesis.
4. Conclusio (ekor), adalah bagian akhir dari naskah pidato yang merupakan kesimpulan dari uraian keseluruhan sebelumnya. Konklusia adalah merupakan sebuah penegasan , hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi si orator. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun conclusio : jangan mengemukakan fakta baru, jangan menggunakan kata-kata mubazir, jangan menampilkan hal-hal yang menimbulkan antipati.

Pidato dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan teks dan tanpa teks. Namun semuanya harus tetap dipersiapkan dengan baik. Pepatah tua mengatakan “Qui ascendit sine labore, descendit sine honore” (siapa yang naik tanpa kerja, akan turun tanpa penghormatan”. Jacques Ellul (1965) mendefinisikan propaganda sebagai komunikasi yang “digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi.” Bagi Ellul, propaganda erat kaitannya dengan organisasi dan tindakan, yang tanpa propaganda praktis tidak ada.[]

## **Hand-Out 14** **TEHNIK & MANAJEMEN AKSI MASSA**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,  
Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama  
Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **Komunikasi Politik**

Adalah proses penyampaian politik dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi politik dapat terjadi secara intern, ekstern, horisontal, vertikal. Tujuan komunikasi politik adalah mengkomunikasikan kehendak, kepentingan, tuntutan, aspirasi, nilai-nilai.

### **Jenjang dan Jenis Komunikasi Politik**

Jenjang komunikasi politik terdiri dari: komunikasi politik vertikal dan horisontal dan dilihat dari jenisnya komunikasi politik internal dan eksternal.

### **Teori Komunikasi Politik**

1. Teori Jarum Suntik hipodermik/ teori peluru. Mempunyai asumsi bahwa khalayak atau penerima tidak berdaya. Dalam organisasi militer, birokrasi tero ini sangat efektif digunakan. Bentuk kegiatannya antara lain; indoktrinasi, perintah, instruksi, dll.
2. Teori Khalayak Kepala Batu (*The ordinate audience*). Mempunyai asumsi bahwa khalayak sangat cerdas, kuat dan kritis. Khalayak melakukan reaksi keras, protes, pembangkangan dan penolakan, maka yang dilakukan adalah dengan persuasif.
3. Teori Empati dan Hemofili. Mempunyai asumsi bahwa khalayak dijadikan sahabat. Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada orang lain, sedangkan hemofili adalah kemampuan menciptakan kebersamaan (fisik dan mental). Kegiatan yang paling sesuai dengan teori ini adalah *lobbying* atau komunikasi antar pribadi.
4. Teori komunikasi non-verbal. Mempunyai asumsi bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Kegiatan dalam teori ini; pakaian, panji-panji, umbul-umbul, spanduk dll.

### **Bentuk Komunikasi Politik**

1. Dialog, Diskusi, Pelatihan Kader, Forum Interaktif.
2. Agitasi, Propaganda, Perang Urat Syaraf.
3. Komunikasi Politik Dua Arah. (*public understanding, public convidence, image building*)
4. Kampanye (*informaif, edukatif, persuasif, koersif*)

### **Efektifitas Komunikasi Politik**

1. Memberikan pengaruh pola pikir massa, dengan komunikasi politik yang efektif.
2. Menyusun pesan politik secara taktis; AIDDA:
  - a. Attention (perhatian).
  - b. Interest (kepentingan)
  - c. Desire (hasrat, keinginan)
  - d. Decision (keputusan)
  - e. Action (tindakan)
3. Sifat komunikasi politik; informative, edukatif, persuasif, instruktif.
4. Kesiapan psikologis massa.
5. Kredibilitas komunikator.

### **Tehnik Orasi Politik**

1. Orasi politik adalah kemampuan menyamoaikan gagasan dimuka umum (public speking/ retorika dengan melakukan Persiapan tehnik, fisik, mental.
2. Memenuhi public speaing yang baik;

- a. pengetahuan
- b. penguasaan tema pokok
- c. kepercayaan publik
- d. semangat
- e. motivasi
3. Langkah yang harus disiapkan;
  - a. perkiraan situasi dan kondisi khalayak
  - b. pilihan materi dan logika urutan pidato/ orasi
  - c. garis besar pidato
4. Hal-hal yang mempengaruhi;
  - a. penampilan/ performance
  - b. kata-kata yang lugas, jelas dan ritme yang tepat
  - c. memastikan khalayak mendengar pesan
5. Hambatan dalam orasi;
  - a. bahasa yang berbeda dengan khalayak
  - b. massa/ suasana yang tidak terkondisikan

### **Pengertian Aksi Massa**

Aksi massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah/pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat.

### **Latar Belakang Psiko-Sosiologis Aksi Massa**

Dorongan terpokok yang melahirkan aksi massa adalah keinginan massa akan perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi mahasiswa, aksi rakyat, dan gerakan lain dari kelompok kepentingan dalam rangka mewujudkan mimpi perubahan. Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan pemenuhannya. Secara sosiologis ada tiga kategori kebutuhan: 1] Kebutuhan biologis/primer, yaitu kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan jasmani manusia. Tergolong kebutuhan ini adalah makanan dan minuman, pakaian, bernafas dan istirahat, dan lain-lain. 2] Tergolong kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan biologis/primer. Tergolong kedalam kebutuhan ini adalah pendidikan, rekreasi, komunikasi, hubungan sosial, dan lain-lain. 3] Kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kerinduan manusia akan hal-hal yang bersifat kerohanian, supranatural, dan metafisik. Misalnya kebutuhan akan shalat, kebaktian, klenteng, dan lain-lain. Semua kebutuhan tersebut bisa dituntut sesuai dengan tuntutan yang didiskusikan sebelum melakukan aksi.

Setiap manusia memiliki ketiga jenis kebutuhan tersebut, karenanya dalam pemenuhannya harus diatur supaya tidak terjadi penumpukan dan benturan. Peraturan mutlak diperlukan untuk tujuan keseimbangan dalam masyarakat. Peraturan atau hukumlah yang menentukan batasan antara hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan sosial pranata diperlukan untuk mengatur tata kehidupan antar manusia dalam masyarakat. Pranata sosial menjadi kebutuhan bersama dan karena itu pula harus disepakati bersama serta dilaksanakan secara konsisten secara bersama-sama pula. Namun demikian, walaupun perwakilan yang duduk pada institusi (trias politika dalam istilah Montesqueu) dipilih rakyat, tidak mustahil dapat terhindar dari penyimpangan terhadap aturan-aturan, membuat aturan untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya, mempertahankan kelangsungan kekuasaan dan mempertahankan status quo. Kelemahan utama dari sistem demokrasi adalah fasifnya rakyat dalam kebijakan, seolah rakyat hanya terlibat dalam pemilihan umum semata. Kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah inilah yang menimbulkan jalan lain perjuangan aspirasi, yaitu jalan ekstra parlementer yang sering mengambil bentuk aksi massa atau demonstrasi.

## Bentuk-Bentuk Aksi Massa

Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan sasaran aksi. Di lihat dari aktivitas, aksi massa dibedakan dalam dua bentuk, yaitu aksi statis dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Aksi dinamis adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi:

- 1] Rapat akbar,
- 2] Rally/ long march,
- 3] Mimbar bebas,
- 4] Panggung kesenian, dll.

Hampir tidak ada aksi massa yang berjalan spontan. Umumnya aksi massa dipersiapkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan terlibat, perangkat aksi, isu dan tuntutan serta institusi yang dituju.

## TAHAPAN-TAHAPAN AKSI MASSA

### Persiapan

Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya lahir dari adanya syarat objektif bahwa institusi/lembaga berwenang tidak tanggap terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu diperlukan adanya tekanan (*pressure*) massa untuk mendorong persoalan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di intra parlemen maupun dimuka pendapat umum (*public opinion*) di luar parlemen. Semua hal yang berkaitan dengan tekanan mengandalkan kekuatan massa harus dipersiapkan sehingga dapat berjalan optimal. Persiapan aksi massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran diskusi yang diorientasikan mampu memunculkan:

### Isu/ Tuntutan

Isu atau tuntutan yang akan diangkat dalam aksi massa harus dibicarakan dan diperdebatkan. Penentuan isu sangat penting karena akan memberi batasan gerak secara keseluruhan dari proses aksi massa di lapangan.

### Prakondisi aksi

Prakondisi aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi massa berlangsung. Pra kondisi tersebut biasanya dalam bentuk aksi penyebaran selebaran, penempelan poster, grafiti action, dst. Tujuan pra kondisi aksi adalah untuk mensosialisasikan rencana aksi massa beserta isu/tuntutannya, serta memanaskan situasi pada sasaran kampanye atau sasaran aksi.

### Perangkat Aksi Massa

Perangkat aksi adalah mbagian kerja partisipan aksi massa. Perangkat aksi massa disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat sebagai berikut:

1. **Koordinator Umum.** Pemimpin umum dan penanggungjawab umum massa aksi. Kordum berfungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua panitia aksi harus tunduk pada keputusan kordum saat aksi berjalan.
2. **Koordinator lapangan.** Korlap bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi kepada peserta aksi/ massa. Keputusan untuk memulai ataupun membubarkan/mengakhiri aksi massa ditentukan oleh korlap. Korlap hendaknya orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan komunikatif.
3. **Wakil koordinator lapangan.** Wakorlap adalah pembantu korlap di lapangan dan berfungsi sama dengan korlap.
4. **Divisi Acara.** Divisi acara bertugas menyusun acara yang berlangsung pada saat aksi massa dan bertugas mengatur dan mengemas jalannya acara agar massa tidak jenuh. Termasuk mencatat kronologi aksi.
5. **Orator.** Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi massa dalam

bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa.

6. **Humas dan Jaringan Aksi.** Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi massa kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.
7. **Negosiator,** berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung DPR/DPD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat keamanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.
8. **Mobilisator.** Bertugas memobilisasi massa, menyerukan kepada massa untuk bergabung pada aksi massa yang akan digelar. Kerja mobilisasi massa berlangsung sebelum aksi dilaksanakan.
9. **Kurir.** Berfungsi sebagai penghubung ketika sebuah aksi massa tidak bisa dipastikan hanya dimanfaatkan oleh satu komite aksi atau kelompok saja. Bisa jadi pada saat bersamaan komite aksi lainnya sedang menggelar aksi massa, menuju sasaran yang sama. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diperlukan fungsi kurir untuk menghubungkan kedua atau lebih komite aksi yang menggelar acara yang sama. Selain itu kurir juga berfungsi menjembatani komite aksi-komite aksi agar terjadi penyatuan massa atau aliansi taktis di lapangan. Dalam hal ini kurir bertugas memberikan laporan pada korlap perihal aksi massa yang dilakukan komite aksi lain.
10. **Advokasi.** Perbenturan antara kedua massa dengan aparat keamanan perlu dihindari, akan tetapi jika hal itu terjadi dan berakhir dengan penangkapan terhadap aktivis massa diperlukan peran tim advokasi yang bertugas membela dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
11. **Asisten teritorial/ keamanan/ sweeper/ dinamisator lapangan.** Sering terjadi aksi massa radikal menjadi aksi massa anarkis karena emosi terpancing untuk melakukan tindakan destruktif. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam ini dilakukan dengan melengkapi aksi massa dengan perangkat asisten teritorial (aster). Aster atau disebut juga keamanan atau sweeper bertugas mencegah terjadinya penyusupan oleh pihak luar yang bertujuan memperkeruh suasana. Tugasnya mengamati kondisi massa. Selain itu juga aster berfungsi mengagitasi massa dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan agar aksi massa tetap tampil semangat.
12. **Logistic dan medical rescue.** Perangkat logistic bertugas menyediakan perlengkapan-perengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. Sedangkan medical rescue bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantuan p3k terhadap massa yang kesehatan fisiknya terganggu ketika aksi massa berlangsung.
13. **Dokumentasi.** Divisi ini bertugas mengabadikan penyelenggaraan aksi massa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan kronologi.
14. **Sentral informasi.** Sentral informasi adalah nomor telepon yang dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi massa, situasi lapangan, sampai dengan informasi-informasi lainnya.

### Kelengkapan Aksi Massa

Selain kelengkapan struktur berupa perangkat aksi massa, dibutuhkan pula kelengkapan material yang berupa instrumen aksi massa.

1. **Poster** adalah kertas ukuran lebar yang bertuliskan tuntutan aksi massa dipermukaanya. Poster berisi tuntutan aksi yang ditulis tebal dengan spidol atau cat agar jelas dibaca oleh massa ditulis dengan singkat dan jelas.
2. **Spanduk** adalah bentangan kain yang ditulis tuntutan-tuntutan atau nama komite aksi yang sedang menggelar aksi massa.
3. **Selebaran** adalah lembaran kertas yang memuat informasi agitasi dan propaganda kepada massa yang lebih luas agar memberikan dukungan terhadap aksi massa.
4. **Pengeras suara** adalah perangkat keras elektronika yang berfungsi memperbesa suara.
5. **Pernyataan sikap/ statemen** adalah pernyataan tertulis yang memberikan gambaran sikap massa terhadap satu kebijakan satu institusi/perorangan dibacakan dibagian akhir proses aksi

massa. Penyusunannya dilakukan oleh humas atau divisi logistik.

6. **Rute Aksi**, harus dipersiapkan dan dipahami seluruh massa aksi.

### Nama Komite Aksi/ Organ Taktis

Aksi massa meskipun bersifat temporer, tetap membutuhkan nama sebagai identitas pelaksana kegiatan. Nama komite aksi harus ditentukan, baik melalui perdebatan pada saat persiapan aksi massa. Apalagi kalau aksi massa merupakan tindakan bersama dari beberapa kelompok/orgaisasi, nama komite mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi klaim dan kesalahpahaman antar organisasi. Nama awal komite aksi yang lazim dipakai untuk mengidentifikasi diri massa, sebagai berikut:

- |                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1. Forum       | 7. Jaringan    | 13. Serikat     |
| 2. Front       | 8. Aliansi     | 14. Komite      |
| 3. Barisan     | 9. Koalisi     | 15. Liga        |
| 4. Persatuan   | 10. Gerakan    | 16. Gabungan    |
| 5. Kesatuan    | 11. Pergerakan | 17. Asosiasi    |
| 6. Solidaritas | 12. Himpunan   | 18. Dewan, dsb. |

### Langkah Taktis Selanjutnya

Semua nama diatas sebenarnya mempunyai hakekat yang satu bahwa komite aksi yang sedang menyelenggarakan aksi massa mempunyai basis massa yang solid, bersatu, maju, dan tidak dapat dpecah oleh kekuatan dari luar organisasi komite bersangkutan. Namun demikian komite aksi yang profesional persoalan nama sudah tidak menjadi hal penting yang perlu dibicarakan apalagi diperdebatkan, karena hanya akan memakan waktu yang sia-sia saja. Beberapa organisasi yang namanya sudah populer dan mapan tak perlu merumuskan nama komite aksi karena hal yang demikian tidak lagi menjadi kebutuhan.

1. **Massa persiapan aksi.** Kehadiran massa dalam jumlah yang massif dalam aksi massa merupakan faktor yang menentukan keberhasilan aksi massa. Semakin besar kemampuan aksi suatu komite aksi dalam hal mobilisasi massa untuk memberikan support akan semakin memberikan kontribusi positif terhadap aksi massa. Maka pada tahap persiapan aksi massa dipersiapkan perangkat aksi/divisi khusus bekerja memobilisasi sebelum aksi berlangsung.
2. **Target aksi.** Target aksi adalah tujuan-tujuan minimal dan maksimal yang akan diraih dalam aksi massa tersebut. Misalnya aksi massa dengan target membangun persatuan dan solidaritas target mengkampanyekan isu/tuntutan, target memenangkan tuntutan dll.
3. **Sasaran dan waktu.** Mobilisasi massa akan diarahkan kemana senantiasa dibicarakan dalam pra aksi massa. Instansi atau lokasi yang dituju disesuaikan dengan isu isi tuntutan yang diangkat. Oleh karena itu ditentukan pula metode aksi massa yang diterapkan: rally dari satu titik awal menuju sasaran atau massa langsung memobilisasi kesasaran tujuan. Sasaran aksi massa adalah institusi perwakilan rakyat atau institusi lain yang relevan dengan tuntutan massa . misalnya : tuntutan aksi massa tentang pencabutan dwi fungsi ABRI/TNI maka sasaran yang relevan untuk tuntutan tersebut adalah instansi militer. Sedangkan waktu aksi ditentukan berdasarkan kebutuhan yang paling mungkin dengan segala pertimbangan seperti basis massa, sasaran aksi massa, jika basis massa direncanakan mahasiswa, maka aksi diselenggarakan pada hari libur mahasiswa, begitu pula dengan sasaran kantor-kantor pemerintah indonesia aktif dari senin hingga jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00 maka aksi tidak menarik jika dilaksanakan diluar waktu tersebut misalnya pada hari sabtu dan minggu dan tanggal merah lainnya.momentum aksi massa yang jelas sangat menentukan. Aksi pada satu momentum bersejarah akan membuka kembali memori massa akan satu peristiwa yang tidak dihindaki terjadi oleh semua. Maka momentum dapat dibagi 2 yaitu:
  - a) Momentum yang dibuat sendiri (ourself made momentum). Momentum pengajuan tuntutan terhadap pemerintah untuk mencabut atau mengukuhkan kebijakan saat tertentu yang tidak ada basis materialnya pada massa lalu, bahwa pernah terjadi suatu peristiwa penting yang diketahui orang banyak pada hari atau tanggal yang bersangkutan.



- b) Momentum yang disediakan (provided momentum). Yaitu saat penyelenggaraan aksi massa yang dipaskakan dengan memperingati satu kejadian pada masa silam. Misalnya aksi massa buruh pada tanggal 1 Mei memperingati hari buruh sedunia. Aksi massa yang dilaksanakan pada momentum yang disediakan ini akan dapat mengingatkan kembali massa luas kepada peristiwa yang tragis atau bahkan monumental yang pernah terjadi pada masa lalu.

### **Pelaksanaan Aksi Massa/ Demonstrasi**

Pada saat aksi massa dilakukan, segala tindakan massa di setting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan para perangkat yang telah diberi tugas. Semua bekerja sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama dalam persiapan sebelum aksi massa digelar penyimpangan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama akan dikoreksi pada saat forum evaluasi diadakan.

### **Evaluasi**

Evaluasi adalah tahap akhir dari rangkaian aksi massa. Merupakan forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan setting aksi massa yang telah disepakati bersama. Evaluasi ini berfungsi melahirkan ide-ide baru yang dapat membangun struktur pemikiran alternatif terhadap pola aksi yang telah dilaksanakan oleh komite aksi. Dialektika pola aksi massa justru dapat terungkap ketika evaluasi terhadap pelaksanaan aksi massa digelar. Aksi massa atau sering disebut demonstrasi telah marak di Indonesia sejak periode akhir kejayaan rejim Soeharto. Fenomena aksi massa ini tidaklah lahir secara spontanitas belaka, kemunculannya lebih dilatar belakangi oleh latar belakang sosiologis dan psikologis massa yang tidak puas terhadap keadaan sosial yang melingkupinya. Keadaan sosial tersebut disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, politik dan kompleksitas sistem yang lain.

### **LANGKAH TAKTIS ADVOKASI**

1. MENGUPAYAKAN ADANYA KPEMIMPINAN ORGANISASI YANG KUAT
2. MELAKUKAN INVESTIGASI ISU YANG MENDESAK
3. PEMBACAAN, ANALISIS DATA ATAU ISU/ PENCARIAN DAN PENELITIAN FAKTA
4. MERUMUSKAN STRATEGI DINAMIS
  - a. Statement misi (*Mission statement*)
  - b. Tujuan dan sasaran advokasi
  - c. Rancangan strategi dan tindakan
  - d. Rencana aksi (*plan of actions*)
5. Mencari Dukungan Yang Besar Dari Konstituen Atau Kelompok Pendukung
6. MOBILISASI DAN AKSI YANG TERLIBAT
  - a. Pertemuan para pembuat keputusan
  - b. Pertemuan para pelanggar HAM
  - c. Interview media massa
  - d. Public Hearing
  - e. Public Meeting
  - f. Parlementary Hearing
  - g. Kesaksian Pengadilan
  - h. Pengajuan Petisi
  - i. Boikot, Pawai Protes, Aksi Massa.[]

## **Hand-Out 15** **TEKNIK LOBBY DAN NEGOSIASI**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,  
Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama  
Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

### **Teknik Negosiasi Untuk Sukses**

Seringkali orang awam akan menangkap kesan bahwa negosiasi merupakan istilah lain untuk mengatakan “keterlibatan dalam konflik”. Namun menurut Oxford Dictionary negosiasi didefinisikan sebagai: “pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kompromi atau kesepakatan, untuk mengatur atau mengemukakan.” Istilah-istilah lain kerap digunakan pada proses ini seperti: pertawaran, tawar-menawar, perundingan, perantaraan atau barter.

Dengan kata lain negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi diperlukan ketika kepentingan seseorang atau suatu kelompok tergantung pada perbuatan orang atau kelompok lain yang juga memiliki kepentingan-kepentingan tersebut harus dicapai dengan jalan mengadakan kerjasama. Negosiasi adalah pertemuan antara dua pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang :

1. Penting dalam pandangan kedua belah pihak
2. Dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak
3. Membutuhkan kerjasama kedua belah pihak untuk mencapainya.

Dalam konteks bisnis/ kerja, negosiasi terjadi secara ajeg antara:

1. Majikan dan karyawan [upah, fasilitas]
2. Duta penjualan dengan pembeli di seputar harga dan kontrak
3. Departemen sehubungan dengan alokasi sumber daya

Negosiasi tidaklah untuk mencari pemenang dan pecundang; dalam setiap negosiasi terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Berdasarkan uraian singkat di atas, bisa dikatakan bahwa negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:

1. Senantiasa melibatkan orang – baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok;
2. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu –baik berupa tawar menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter);
3. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi;
4. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.
5. Hampir selalu berbentuk tatap-muka –yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah;
6. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi;

Walau mengandung konflik, lobby atau negosiasi sejatinya merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dengan mengembangkan kemampuan lobby dan negosiasi, setiap pihak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya tanpa harus melakukan cara-cara ekstrim, seperti perang, pemaksaan, atau perebutan. Secara umum, suatu proses lobby atau negosiasi akan menghasilkan 4 kemungkinan:

1. Kuadran Kalah-kalah (Menghindari konflik). Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan
2. Kuadran Menang-kalah (Persaingan). Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.
3. Kuadran Kalah-menang (Mengakomodasi). Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah – mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama.
4. Menang-menang (Kolaborasi). Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.



## **Pentingnya Sikap Terhadap Perselisihan Dan Konflik**

Negosiator yang berhasil memiliki sikap yang positif. Mereka dapat memandang konflik sebagai sesuatu yang normal dan konstruktif. Keterampilan yang mereka gunakan untuk memecahkan konflik bukanlah “sulap”. Keterampilan tsb dapat dipelajari. Sikap kita selalu penting, dan ini terutama berlaku dalam bernegosiasi. SIKAP mempengaruhi sasaran kita, dan sasaran mengendalikan cara orang bernegosiasi. Cara kita bernegosiasi menentukan hasilnya.

## **Mengembangkan Filosofi Sama-Sama Menang Dalam Negosiasi**

Masing-masing pihak di dalam suatu negosiasi tentu ingin menang. Negosiasi yang berhasil berakhir dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua pihak. Setiap kali seorang negosiator mengancang suatu situasi pertawaran dengan gagasan, “Saya harus menang, dan benar-benar tidak peduli tentang pihak lawan”, maka bencana pun sudah diambang pintu. Konsep negosiasi sama-sama menang tidak sekadar didasarkan pada pertimbangan etika. Pihak yang mengakhiri suatu negosiasi dengan perasaan bahwa ia telah tertipu mungkin berusaha membalas dendam belakangan.

Negosiasi sama-sama menang secara sederhana adalah “bisnis yang baik”. Ketika pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perjanjian merasa puas dengan hasilnya, mereka akan berusaha membuat perjanjian itu berhasil, tidak sebaliknya. Mereka pun akan bersedia untuk bekerja sama satu sama lain pada masa datang. Barangkali anda bertanya, “Bagaimana saya bisa menang di dalam suatu negosiasi bila saya membolehkan pihak lawan juga memenuhi kebutuhan mereka?”. Jawaban pertanyaan ini terletak pada kenyataan bahwa orang yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Bagi sebagian orang, kata kompromi mempunyai makna yang negatif. Bagi yang lain, kata ini menggambarkan prinsip beri/ terima yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya tidak mungkin untuk mendapatkan sesuatu secara gratis – tampaknya selalu ada harga atau konsesi yang harus dibuat untuk menerima apa yang anda inginkan. Kata kompromi secara sederhana berarti membuat dan/ atau menerima konsesi [kelonggaran]. Keberhasilan negosiasi pada intinya dapat ditingkatkan dengan sudut pandang pendekatan yang tepat. Bagian-bagian berikut memberikan tuntunan yang memadai di bawah sub-sub judul :

### **a) Pokok masalah yang dinegosiasikan**

Waspada adanya beberapa konteks dimana negosiasi tidak tepat untuk diadakan :

1. Menegosiasikan syarat-syarat perdagangan yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan aturan yang tegas
2. Menegosiasikan pokok-pokok yang mengabaikan peraturan mengenai diskriminasi ras, jenis kelamin, atau diskriminasi lainnya.
3. Menegosiasikan prosedur dan tata-tertib perusahaan
4. Menegosiasikan keputusan perusahaan yang telah diumumkan.
5. Mengadakan negosiasi ketika semua pihak tidak hadir

### **b) Persiapan negosiasi**

Setelah memastikan persoalan yang dapat Anda negosiasikan, maka selanjutnya adalah menentukan apa yang Anda ingin capai, dan dengan siapa, pada setiap tahap negosiasi. Kenalilah tujuan-tujuan Anda, faktor-faktor yang sangat penting, dan hal-hal yang dapat Anda relakan dalam kondisi tertentu. Hanya setelah Anda menentukan sasaran Anda, maka dapat dimulai mempersiapkan negosiasi. Dengan waktu yang Anda miliki, usahakanlah untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang pihak lain :

1. Apakah dia independen atau bagian dari suatu tim?
2. Apakah dia memiliki wewenang untuk membuat keputusan tanpa harus mengadakan rujukan balik?
3. Jenis orang seperti apakah dia?
4. Bagaimana tingkat pengalamannya sebagai seorang negosiator?
5. Jenis pendekatan apa yang mungkin digunakan untuk mencapai hasil terbaik?

6. Apakah kepentingan-kepentingannya, dan dengan urutan prioritas yang bagaimana?
7. Perilaku seperti apa yang dapat Anda harapkan dari orang tersebut?

**c) Mencapai suasana yang tepat**

Suasana diciptakan dalam waktu yang sangat singkat : beberapa detik atau menit. Suasana dipengaruhi oleh hubungan antara pihak-pihak pada waktu lampau, harapan mereka saat ini, sikap persepsi, dan keahlian yang mereka miliki dalam bernegosiasi. Suasana dipengaruhi oleh konteks pertemuan, lokasi, penataan tempat duduk, tingkat formalitas, penataan ‘domestik’. Pada periode ice-breaking, Anda hendaknya berupaya untuk menciptakan suasana yang hangat, bersahabat, penuh kerja sama, dan praktis. Komunikasi verbal maupun non verbal [spt kontak mata] yang bersahabat dapat membantu menciptakan kondisi yang membuat orang-orang termotivasi untuk bekerja sama ; demikian pula sebaliknya.

**d) Taktik-Taktik Negosiasi**

Negosiator yang berpengalaman akan mencari kerjasama dalam topik-topik yang netral; negosiator yang mencari kekuasaan, akan berusaha untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda, serta prioritas dan perhatian Anda. Setelah menentukan tujuan-tujuan Anda, strategi dan kekuatan relatif tawar menawar Anda, pendekatan apa yang Anda ingin gunakan dalam proses negosiasi? Taktik-taktik apa yang akan Anda gunakan?

1. Apakah Anda membuka dengan mengajukan permintaan-permintaan Anda terlebih dahulu atau belakangan?
2. Bagaimana Anda mengambil inisiatif?
  - a. dengan bersiteguh atau tidak mau berkompromi?
  - b. Dengan mengajukan argumen yang kuat, bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang adil?
3. Rencana cadangan apa yang Anda miliki untuk menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan? Menghentikan negosiasi? Kembali pada unsur pokok untuk mendapatkan tuntunan? Menyetujui, tetapi kemudian tidak menepati kesepakatan tersebut? Apakah konsekuensi dari setiap tindakan ini dalam jangka pendek/ dalam jangka panjang, dalam kaitan dengan kredibilitas Anda dan kekuatan tawar menawar pihak lain?
4. Apakah yang Anda ketahui mengenai individu-individu dalam tim lain? Kekuatan dan kelemahan mereka? Kepribadian mereka? Apakah mereka memilih gaya tertentu yang dapat Anda serang?
5. Bagaimana kemahiran mereka dalam menggertak? Bagaimana dengan kemahiran Anda sendiri? Apakah gertakan merupakan taktik yang bermanfaat dalam situasi tertentu?
6. Apakah Anda yakin dapat membedakan antara fakta, opini, asumsi, dan rumor? Akankah pihak lain menerima fakta-fakta yang Anda miliki?
7. Bagaimana Anda dapat menjual keuntungan-keuntungan proposal Anda dengan sebaik-baiknya?
8. Bagaimana Anda dapat menjelaskan dengan sebaik-baiknya konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan apabila pihak lain menolak usul Anda?
9. Bagaimana Anda menangani kelemahan proposal/ argumen Anda?
10. Apakah argumen Anda masuk akal / logis, atau lebih bersifat emosional? Atau di antara keduanya? Dimana Anda dapat menggunakan salah satu argumen di atas dengan sebaik-baiknya.
11. Kapan saat terbaik untuk mengajukan proposal Anda? Bagaimana agar Anda dapat menggunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya?
12. Dimana Anda ingin negosiasi tersebut diadakan? Dikandang sendiri? Di kandang mereka [lawan]? Di tempat netral?
13. Siapakah yang Anda inginkan untuk memimpin pertemuan? Anda atau mereka?
14. Bagaimana seharusnya tingkat realitas permintaan pertama Anda? Anda ingin mengajukan suatu permintaan pembukaan? atau menggunakan pendekatan problem solving ?

15. Pada tahap apa sebaiknya Anda memberikan informasi? atau menahannya?
16. Apakah Anda memiliki kemampuan teknis/ know how dalam menegosiasikan pokok-pokok persoalan secara efektif? di mana Anda dapat memperoleh dukungan dalam bidang tersebut, jika perlu?
17. Apakah Anda memiliki kemampuan sosial dalam mengelola hubungan Anda dengan pihak lain?

Berkali-kali laporan media massa dipenuhi dengan berita-berita emosional, seperti negosiasi mengalami ‘jalan buntu’/ deadlock , tuntutan-tuntutan, walk-out, dsb. Situasi-situasi semacam itu sebagian besar terjadi karena pihak-pihak yang bernegosiasi bersikeras menyatakan dan mempertahankan posisi mereka, jelas, dalam situasi demikian negosiasi sama sekali tidak akan mencapai kemajuan. Pendirian ini lebih sering disertai kepentingan pihak-pihak yang dilalaikan, dengan hasil kesepakatan akhir yang tidak memuaskan pihak manapun. Oleh karena itu, golden rule dalam bernegosiasi adalah selalu menegosiasikan kepentingan bukan pendirian [position]; jangan mengambil suatu pendirian kecuali jika hal itu bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan tsb. Bukan tujuan-tujuan pribadi anda dalam negosiasi – Anda adalah seorang duta bukan seorang individu.

#### e) Gaya-gaya negosiasi

Dalam gaya negosiasi dapat dijelaskan dalam dua dimensi, yaitu arah dan kekuatan.

- 1) Arah berbicara tentang cara kita menangani informasi.
  1. Mendorong [push] : memberi informasi, mengajukan usul, melalaikan kontribusi orang lain, mengkritik, bertindak sebagai pengganggu – semua taktik yang berlaku tergantung sifat dan konteks negosiasi.
  2. Menarik [pull] : mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi, meminta saran, memastikan pemahaman, meminta kejelasan, menyatakan perasaan kita.
- 2) Kekuatan berbicara tentang keluwesan kita untuk beranjak dari kedudukan kita yang semula.
  1. Bersikap keras : kita ingin menang berapapun harganya, tidak akan mengalah atau mundur, tidak akan menerima tawaran apapun. Kita mengejar sasaran yang tinggi
  2. Bersikap lunak : kita mengalah, ragu-ragu, sulit untuk berkata tidak, menyesuaikan diri – sasaran yang kita kejar rendah. Kita dapat mengambil sikap keras dalam beberapa persoalan dan bersikap lunak dalam persoalan-persoalan yang lain : hal ini memberikan petunjuk jelas mengenai hasil yang menjadi prioritas.

#### f) Mencari penyelesaian

Dalam mencari penyelesaian, tujuan Anda hendaknya agar kedua pihak memperoleh kemenangan, atau seburuk-buruknya dinyatakan seri. Analogi berikut ini adalah contoh pilihan-pilihannya.

1. KALAH/ KALAH Singkirkan kue tsb agar tidak satu pihakpun mendapatkannya.
2. MENANG/ KALAH Berikan kue tsb kepada salah satu pihak atau iris dengan tidak sama rata.
3. SERI Iris kue tsb tepat di tengah-tengah
4. MENANG/ MENANG Buat dua buah kue atau buat kue yang jauh lebih besar.

Temukan dulu kepentingan yang sama, baru kemudian mencari kepentingan yang saling bersaing dengan metode berikut :

1. Ciptakan suasana yang memungkinkan kedua pihak untuk sebanyak mungkin mengemukakan buah pikiran yang relevan bagia suatu pemecahan.
2. Hindari penilaian dini sehingga semua buah pikiran telah dikemukakan.
3. Pusatkan perhatian pada masalah, bukan pada pribadi yang terlibat.
4. Ketahui apa yang hendak Anda capai.
5. Jangang menanggapi pertanyaan-pertanyaan retorik yang dimanfaatkan untuk mendukung kedudukan, bukan untuk mengemukakan kepentingan.

### **g) Situasi fall back**

Sering terjadi dalam negosiasi pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kemajuan dalam negosiasi, betapapun besar keinginan kedua pihak untuk mencapai suatu solusi. Maka Anda perlu mempersiapkan dan menerapkan BATNA [suatu situasi dimana Anda berada dalam posisi harus mencapai kesepakatan, dan mitra Anda menyadari hal tsb]. BATNA = BEST ALTERNATIF TO A NEGOTIATED AGREEMENT atau Alternatif Terbaik untuk Mencapai Kesepakatan melalui Negosiasi [*Fisher dan Urg, Getting to Yes, Hutchinson*]. Dengan adanya BATNA, anda mungkin tertolong untuk meneruskan negosiasi secara fleksibel yaitu :

1. Mengetahui alternatif terbaik dari kegagalan mencapai kepentingan utama Anda.
2. Memperkirakan nilai BATNA Anda dalam hubungan dengan tawaran terbaik yang ada.  
Contoh: Dalam negosiasi harga dengan seorang pembeli, Anda disiapkan [dan diijinkan] untuk memberikan rabat hingga 20 % harga yang ditawarkan. Anda membuka penjualan dengan rabat 10 %, yang segera ditolak, dan ditawarkan 30 %. Sebenarnya, pihak lain bersedia menerima 10 %, namun Anda tidak mengetahui hal itu. Di sini terjadi tumpang tindih posisi fall back, jadi hasil optimal jatuh dalam taksiran realistis kedua pihak mengenai kesepakatan yang dapat dicapai dan hasil antara 15 % hingga 20 % dapat disepakati. Besar rabat yang akhirnya disepakati tergantung pada :
3. Kelihaihan penjual maupun pembeli dalam bernegosiasi
4. Berapa banyak yang dibutuhkan penjual untuk melepaskan penjualan.
5. Tingkat desakan kebutuhan pembeli terhadap barang tsb. Menaksir posisi fall back

### **h) Perilaku dalam negosiasi**

Dalam negosiasi seringkali kita berhadapan dengan dengan orang-orang yang lebih suka mempertahankan pendirian yang kaku, dengan gaya garis keras, tanpa menyadari adanya alternatif yang lebih efektif. Jika hal ini terjadi, petunjuk berikut perlu Anda perhatikan :

1. Pertahankan pendekatan yang sopan dan profesional
2. Jangan membalas perilaku yang tidak menyenangkan
3. Terus menegosiasikan kepentingan Anda, sambil bertanya tentang alasan pendirian mereka dan cobalah untuk memperlihatkan kelemahan pendirian mereka dengan diskusi yang logis dan masuk akal.
4. Mintalah pandangan dan kritikan terhadap pendirian Anda, sarankan lawan Anda untuk mencoba melihat situasi dari sudut pandang Anda.
5. Pusatkan pada permasalahan yang sedang dibahas
6. Jangan tanggap serangan yang bersifat pribadi dan tidak masuk akal dengan tetap berdiam diri.
7. Mintalah kriteria, alasan-alasan, data-data pendukung, kesimpulan atau petunjuk yang obyektif.
8. Perhatikan antusiasme Anda untuk suatu solusi yang adil dan ungkapkan kembali kesediaan Anda untuk mencapai dan menyetujui kriteria yang obyektif.
9. Perhatikan tanda-tanda adanya kerjasama dan beri dukungan, sambutan, pujian, dan kepastian bahwa kerjasama akan menjadi pusat perhatian Anda.
10. Secara periodik buatlah ringkasan bidang-bidang yang telah mencapai kesepakatan, dengan memperlihatkan antusiasme Anda pada langkah-langkah yang telah berhasil membawa kesepakatan.
11. Jangan menanggapi trik-trik berikut :
  - Serangan terhadap pribadi, nama orang, dll
  - Komentar-komentar yang menyesatkan, rumor, dan kebenaran yang tidak utuh.
  - Pertanyaan-pertanyaan retorik
  - Hal-hal yang menyerempet bahaya
  - Tuntutan yang tinggi dan mustahil
  - Sarkasme
  - Upaya-upaya untuk membuat Anda stress

- Diperkenalkannya pada menit terakhir orang baru yang berwenang membuat keputusan, setelah sebelumnya Anda mendapat penjelasan bahwa Anda tengah bernegosiasi dengan pembuat keputusan.
12. Jika semua upaya gagal, bersiaplah untuk menunda diskusi. Gunakan waktu penundaan untuk:
- Menurunkan ketegangan
  - Mempelajari kembali pokok-pokok yang telah disetujui dan item-item yang belum dibahas
  - Mempelajari kembali situasi negosiasi
  - Mengamati lebih lanjut mitra negosiasi Anda.
  - Mencari persetujuan atau otorisasi lebih lanjut yang mungkin Anda butuhkan.

### **i) Mengakhiri Negosiasi**

Untuk memantau perkembangan negosiasi, hal-hal berikut perlu diperhatikan

- Apakah semua pihak memahami dengan jelas apa yang telah disepakati?
- Apakah semua pihak berkomitmen terhadap kesepakatan tsb?
- Apakah diperlukan pertemuan lain untuk membahas pokok-pokok yang kecil [atau yang besar? kapan?
- Bagaimana perasaan kedua pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat? Apakah dirasa adil?
- Apakah kita puas? Apakah justru kita saling mengecam? Saling mempertahankan pendirian ? kecewa?

### **Tahapan-tahapan Negosiasi**

Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi.

Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif. Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai Negotiation Triangle, yaitu terdiri dari HEART (yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi), HEAD (yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi), HANDS (yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi).

Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.



### Langkah-langkah bernegosiasi

**Persiapan.** Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Tahap ini sangat penting karena persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya.

Kedua, kenali karakter dan latar belakang lawan negosiasi kita. Gali informasi sebanyak mungkin mengenai siapa dia/mereka, kekuatan dan kelemahannya, apa tujuan atau kepentingannya. Tujuan yang jelas dan terukur disertai pengetahuan atas lawan negosiasi akan memudahkan kita menyusun elemen ketiga, yaitu beberapa alternatif skenario. Menyusun alternatif ini penting dilakukan agar kita selalu tanggap menghadapi berbagai kemungkinan situasi. Dalam hal ini, menyangkut juga apa tawaran maksimum dan minimum yang bisa kita berikan sesuai tujuan kita. Hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi relaks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious reprogramming) kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri.

**Pembukaan.** Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfir atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi yaitu: pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tips dalam mengawali sebuah negosiasi:

- a. Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika memasuki ruangan negosiasi;
- b. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dulu;
- c. Jabat tangan dengan tegas dan singkat;
- d. Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan.

Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya.

Memulai proses negosiasi. Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah:

- a. Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi;
- b. Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri;
- c. Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka;
- d. Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak;
- e. Sampaikan bahwa “jika anda memberi kami itu, kami akan memberi anda ini— *if you'll give us this, we'll give you that.*” Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan.

- f. Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang relaks namun penuh perhatian.

Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone). Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar menawar, kita perlu mengetahui apa itu The Bargaining Zone (TBZ). TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual (Seller's Opening Price) dan Tawaran awal oleh pembeli (Buyer's Opening Offer). Di antara kedua titik tersebut terdapat Buyer's Ideal Offer, Buyer's Realistic Price dan Buyer's Highest Price pada sisi pembeli dan Seller's Ideal Price, Seller's Realistic Price dan Seller's Lowest Price pada sisi penjual. Kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah terjadi di dalam wilayah yang disebut Final Offer Zone yang dibatasi oleh Seller's Realistic Price dan Buyer's Realistic Price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah Final Offer Zone. Menurut G. Richards Shell, ada tiga macam tipe negosiator dalam etika penawaran yaitu: Poker school, Idealist School, dan Pragmatist School.

### **The “It’s a Game” Poker School**

- Orang yang mempunyai pandangan poker school memandang bahwa negosiasi adalah sebuah permainan dengan aturan pasti. Bertindak sesuai aturan dianggap etis sedangkan apabila bertindak sebaliknya dianggap tidak etis
- Orang yang berpandangan tersebut terkadang mengizinkan cara – cara curang dalam memenangkan negosiasi asal cara – cara tersebut tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.
- Orang yang memiliki pandangan “poker school” memiliki tiga masalah pokok yaitu: (1) Mereka beranggapan bahwa penawaran dengan cara mengancam adalah sebuah permainan (2) Semua orang dianggap memiliki aturan yang sama (setiap orang dianggap akan melakukan hal yang sama), (3) Aturan tersebut dianggap bertentangan dengan sebuah aturan yurisdiksi tunggal yang berlaku (Aturan apapun akan diabaikan jika bertentangan dengan satu aturan pokok negosiasi: MENANG!).

### **The “Do the Right Thing Even If It Hurts” Idealist School.**

- Orang yang mempunyai pandangan Idealis berpendapat bahwa proses penawaran adalah salah satu aspek kehidupan sosial bukan sebuah aktivitas spesial dengan keunikannya sendiri dalam membuat aturan.
- Seorang idealis tidak akan mengizinkan penggunaan cara – cara curang walaupun tidak melanggar aturan dalam sebuah negosiasi.
- Seorang idealis dalam melakukan suatu negosiasi mendasarkan pandangannya pada filosofi dan agama yang dianut.
- Seorang idealis mengizinkan anggapan bahwa kecurangan pada negosiasi akan menurunkan moralitas dan kepercayaan dengan teman, menghilangkan rasa tanggung jawab pada orang lain, dsb.
- Seorang idealist sangat tidak menyetujui bahwa sebuah negosiasi dianggap sebagai permainan. Negosiasi adalah sesuatu hal yang dianggap serius dan memiliki konsekuensi pada masa yang akan datang.
- Seorang idealis juga menganggap bahwa seorang poker school dianggap predator yang akan mematikan lawannya dan egois karena lebih mementingkan dirinya sendiri. The “What Goes Around Comes Around” Pragmatist School.
- Karakter orang seperti ini masih menyadari tentang tidak etisnya sebuah kecurangan dalam bernegosiasi tetapi pada situasi tertentu dia tetap melakukannya karena dianggap tidak melanggar aturan.

- Mereka lebih sering melakukan dan mengijinkan kebohongan sebagai salah satu trik negosiasi dibanding seorang idealis.
- Ada lima cara yang dilakukan seorang pragmatisme untuk memblokir dan menghindari bencana untuk melindungi kepentingan mereka, yaitu: (1) Menyatakan bahwa pertanyaan itu di luar batas; (2) Menjawab dengan pertanyaan yang berbeda; (3) Menghindar dari pertanyaan tersebut; (4) Memberi pertanyaan pada diri anda sendiri; (5) Mengubah subyek dari pertanyaan tersebut.

Membangun Kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Karena itu, penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain, melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya: conciliation, mediation dan arbitration melalui pihak ketiga.[]

## **Hand-Out 16**

### **STRATEGI PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (COMMUNITY ORGANIZER-CO)**

**Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.**

HP. 085 647 634 312/ E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com. Alumnus (S.1) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,  
Alumnus Program Pascasarjana (S.2) Sosiologi FISIPOL UGM, Dosen Muda Universitas Nahdlatul Ulama  
Al-Ghozali (UNUGA) Cilacap, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### **A. PENGANTAR**

Di jaman orde baru, tindakan negara yang melarang warganya berorganisasi melalui disain state corporatism, yakni hanya mengalirkan aspirasi rakyat ke dalam kanal-kanal lembaga bentukan pemerintah telah melahirkan petaka. Rakyat tidak berdaya karena terkerangkeng oleh otoriterisme, dan sistem politik tidak lebih sebagai ajang dominasi sang pemilik otoritas. Fungsinya sebagai penyumbat kebebasan warga. Tak heran, jika politik berasosiasi sebagai pentas mobilisasi, bersemayamnya kesadaran semu, ajang represi, praktik kooptasi dan manipulasi. Pada saat itu, organisasi warga ibarat boneka, dimainkan oleh penguasa yang bertindak sebagai dalang pada drama akrobatik. Nafsu kekuasaan adalah menjinakkan kesadaran rakyatnya. (Mas'oed, 1989)

Segalanya serba diatur negara dengan cara sewenang-wenang. Mungkin dapat diambil contoh tentang perlakuan negara terhadap warga di desa-desa, dimana aparat pemerintah desa selalu bertindak menentukan jalannya arus politik (baik pada tingkat formal maupun everyday politic), yang melampaui kewenangan sesungguhnya. Resikonya, rakyat menjadi tidak berdaya (powerless), tidak mandiri, lalu terjadi ketergantungan, bahkan mengalami kematian partisipasi dan inisiatif. Disanalah bentuk-bentuk mobilisasi, eksploitasi dan domestikasi terus berlangsung sebagai manifestasi grand project negara model orde baru yakni kepentingan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, untuk pembangunan. Pada era itulah diberlakukan secara efektif, apa yang diistilahkan dengan (a) depolitisasi, (b) deideologisasi dan (c) floating mass. (Pabottingi, 1995)

Itu semua memang cerita masa lalu, yang kelam. Sejak struktur kekuasaan bergeser melalui pergelaran reformasi tahun 1998 lalu, tentu memiliki nuansa perbedaan mendasar. Secara normatif, citra dan fungsi negara dipahami bukan lagi sentrum kekuasaan penentu kehidupan warganya. Sebaliknya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Berarti menempatkan rakyat sebagai subjek kekuasaan yang menjalankan kehendaknya secara langsung (disebutnya dengan demokrasi langsung) dan mewakilkannya sesuai dengan selera (politik representasi dan demokrasi perwakilan). Dengan demikian, fungsi negara sesungguhnya justru melayani, memenuhi hak-hak warganya melalui birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya. Itulah prinsip demokrasi substantif. (Demos, 2003)

Dalam konteks itulah pertanyaannya yang perlu dijawab adalah (1) di masa perubahan saat ini apakah fungsi rakyat sebagai subjek politik sudah terwujud? (2) bagaimana peluang menguatkan organisasi rakyat (ORA) melalui gerakan sosial sebagai bagian dari civil society dalam menjalankan demokrasi di level lokal? (3) apa kelemahan mendasar dan potensi yang dimiliki, sehingga proses penguatan ORA dapat dijalankan? (4) bagaimana strategi memperkuat ORA dalam proses politik pada kegiatan di sektor sosial, ekonomi dan budaya? (5) Bagaimana mengefektifkan ORA sebagai instrumen artikulatif kepentingan rakyat di tingkat lokal, sehingga mampu menjadi organisasi berkelanjutan?

Perkembangan lima tahun sejak liberalisasi politik, fenomena ledakan partisipasi warga tidak terbendung lagi, di berbagai tingkatan. Kebangkitan rakyat yang tercermin dari menjamurnya asosiasi, organisasi, atau semacam perhimpunan dst, di sejumlah sektor merupakan indikator dasar semai inisiasi warga kian subur. (IRE, 2000) Para petani, buruh, pedagang kaki lima, pedagang warungan, pengrajin, perempuan, membentuk organisasi yang dijadikan sebagai media partisipasi untuk mengelola kepentingan. kondisi semacam ini secara objektif karena pengaturan organisasi tidak seketat dulu. Mekanismenya relatif longgar dan

tidak birokratis di satu sisi, dan keberanian rakyat untuk berpartisipasi juga kian meningkat di sisi lain.

Artinya, kinilah saat dan kesempatan membangun organisasi yang kokoh yang mampu dijadikan sebagai alat perjuangan warga. Sebagaimana kita tahu, kekuatan penting dalam proses politik di tingkat masyarakat bawah, adalah organisasi rakyat (ORA). Kalau boleh berteori, ORA merupakan bagian dari civil society. Perannya adalah memberikan keseimbangan terhadap institusi negara (pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya) serta political society (semacam partai politik).

Apa manfaat-manfaat mendasar organisasi itu? *Pertama*, menjadi ladang strategis untuk membangun solidaritas sosial dalam nasib dan kepentingan (berbasis kelas); *kedua*, menjadi arena belajar bersama diantara anggota (untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan akses ekonomi atau politik); *ketiga*, membuat jaringan dan mempererat persahabatan; *keempat*, membuat kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan minatnya; *kelima*, menjadi fungsi kontrol komunitas anggota.

Dalam kaitan itulah, keaktifan berorganisasi jelas banyak manfaatnya. Dengan manfaat seperti itulah, maka berorganisasi bagi warga sipil, seperti halnya para pedagang kaki lima atau kaum miskin kota sangat dibutuhkan. Bagaimana kenyataan ORA dalam suasana seperti itu? Dalam perkembangan politik sejauh ini, juga didasarkan pengalaman, ternyata munculnya ORA belum menjadi kekuatan penyeimbang efektif institusi negara atau masyarakat politik, secara konkrit. Kendatipun muncul partisipasi, seperti aktivitas protes sosial dalam bentuk komite aksi, kegiatan sosial-ekonomi mandiri yang menjauhkan dari intervensi negara, adanya jaringan antar kelompok di berbagai sektor, tetapi nampaknya belum menjadi tolok ukur konkrit kekuatan sipil bagi proses perubahan nasib dirinya, ketika harus berhadapan dengan kelompok atau kekuatan-kekuatan lain. Hal yang mudah kita lihat adalah, mengenai keterlibatan dalam hal penentuan kebijakan menyangkut kepentingan warga. Sejumlah kasus, di beberapa daerah, fungsi rakyat sebagai subjek yang terepresentasi dalam lembaga-lembaga politik masih “semu”. Aspirasi yang disuarakan oleh organisasi, kadang-kadang masih kandas dan gagal. Kasus-kasus penggusuran terhadap pedagang kaki lima, atau tukang becak dan kaum miskin kota lain dapat disebut beberapa bukti mengenai masih lemahnya organisasi ini sebagai alat perjuangan. Dengan kata lain, perkembangan partisipasi di era perubahan hanyalah menghasilkan rakyat sebagai subyek “kedalam” ORA, tetapi ketika berinteraksi dengan kekuatan lain masih menjadi objek.

Berikut ini beberapa persoalan dasar yang masih dialami ORA sejauh ini, serta beberapa formula penting yang perlu dilakukan:

- *Pertama*, pengetahuan berorganisasi lemah. Pada prinsipnya, pengetahuan mengenai seluk beluk berorganisasi itu penting bagi para anggota. Terutama menyangkut manfaat, cara membentuk, mengurus, menghidupi dan menjaga kelangsungan organisasi dan kepentingan bersama. Hal itu sebagai syarat utama, agar organisasi ini dapat berlanjut dalam waktu lama, serta sesuai dengan cita-cita anggotanya.
- *Kedua*, partisipasi dan keaktifan anggota yang lemah. Akibat lemahnya partisipasi anggota ini, yang paling nyata adalah organisasi menjadi tidak berkembang padahal usianya sudah lama. Pada umumnya gerak organisasi hanya mengandalkan orang-orang tertentu saja, tanpa dukungan keterlibatan anggota secara memadai. Ibaratnya, organisasi hanya merasa “dimiliki pengurus” karena anggota pada “cuek”. Tentu saja hal seperti ini tidak sehat dan butuh uluran tangan bersama, baik dalam hal manfaat maupun tanggungjawabnya. Karena itu, harus ada pembagian kerja yang baik, terkontrol dan tanggungjawab secara proporsional.
- *Ketiga*, ketergantungan pada pihak luar yang tinggi, atau organisasi kurang mandiri. Gejala ini dapat dilihat dari lemahnya kreativitas organisasi, baik pengurus atau anggota untuk mengambil inisiatif membangun organisasi. Fenomena ini dapat dirasakan, misalnya selalu meminta petunjuk, bantuan atau perintah dari luar terus-menerus. Kalau tidak ada stimulan dari pihak-pihak luar, dalam bentuk ajakan atau fasilitasi maka tidak ada kegiatan atau

program yang dilaksanakan. Nah repotnya, banyak organisasi akhirnya sebatas “papan nama”, yang hanya ada papan dan pengurusnya saja, tetapi tidak ada aktivitasnya, apalagi partisipasi anggota. Masalah ini penting dipikirkan bagaimana agar organisasi mandiri punya program, dana, keaktifan pengurus dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

- *Keempat*, kurang konsisten dalam kesepakatan. Berbagai perencanaan kegiatan atau program, biasanya tidak dilanjutkan dilanjutkan dengan pelaksanaan, evaluasi dan kontrol serta kemanfaatannya. Akibatnya, terlalu banyak rencana. Konsistensi dalam keempat hal itu perlu dilakukan agar organisasi bisa dipercaya (melahirkan kredibilitas kuat) dalam setiap agenda kegiatan. Misalnya mengenai agenda dan kesepakatan, tentu harus dijalankan bagaimana pun mekanisme. Apakah oleh pengurusnya, ataukah melalui partisipasi penuh para anggota secara keseluruhan.
- *Kelima*, pengetahuan dan ketrampilan pengurus yang masih rendah. Pengurus itu ditunjuk atau dipilih karena didukung anggota, berdasarkan kompetensi dan kemampuannya. Oleh karena itu, pengurus hendaknya memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam menjalankan amanat anggota organisasi. Berkaitan dengan hal semacam ini, pengurus hendaknya mengambil inisiatif mencari dan memperoleh pengetahuan berorganisasi supaya roda organisasi dapat berjalan, dari manapun. Kepekaan sungguh diperlukan bagi pengurus untuk hal-hal seperti ini, supaya organisasi berjalan.
- *Keenam*, solidaritas antar anggota masih kurang, cenderung individual. Masalah semacam ini, memang sangat menyulitkan organisasi. Padahal, organisasi diperlukan agar kerjasama antar anggota dijalankan, dan disanalah membutuhkan solidaritas yang berkaitan dengan kepentingan bersama diantara anggota dan pengurus. Hal penting untuk dilakukan misalnya, menumbuhkan rasa saling memiliki, merasa dan tanggungjawab bersama dalam tugas dan kemanfaatannya, serta pembagian kerja yang sehat. Jika seseorang anggota menghadapi masalah, maka anggota lain juga ikut merasakan, sekaligus membantu memecahkan masalah tersebut, jangan menutup diri dan individualistik.
- *Ketujuh*, keterbatasan dana untuk organisasi. Persoalan hidup tidaknya sebuah organisasi juga dipengaruhi oleh faktor dana, bahkan sangat krusial. Sejauh ini pengalaman membuat terobosan untuk menabung, pengadaan produk untuk fundrising (mendapatkan sumber pendapatan alternatif) dalam usaha organisasi perlu ditempuh untuk mengatasi pendanaan semacam ini. hal ini tentu dimaksudkan agar organisasi juga mampu mandiri dalam kelanjutan program.
- *Kedelapan*, kaderisasi dan kepemimpinan yang belum mantap. Bagaimanapun majunya suatu organisasi, jika tidak mempersiapkan kaderisasi dan kepemimpinan maka pada saatnya akan menghadapi kendala. Maksudnya adalah, organisasi dihadapkan tantangan dan kesempatan yang ada sejauh ini perlu memikirkan pentingnya mengkader para pengelola (manajer dan pemimpin) organisasi yang handal, kreatif, inovatif, berwatak maju dan demokratis, yang nantinya menjadi kekuatan penggerak dalam organisasi secara lebih aktif dan efektif.

Masyarakat telah mempunyai organisasi sejak lama atau sejak kelembagaan masyarakat mulai terbentuk. Masyarakat membentuk organisasi kemasyarakatan karena hubungan sosial yang mengatur segala kehidupan secara komunal. Relasi sosial yang menjadi dasar pembentukan masyarakat biasanya dicerminkan ke dalam bentuk ikatan kerabatan atau mengenai tata aturan kehidupan bermasyarakat dalam sebuah kawasan. Tata aturan yang mengatur kehidupan masyarakat jarang sekali tertulis, mengingat tata aturan yang berlaku biasanya diturunkan dari generasi ke generasi melalui tuturkata. Ada beberapa masyarakat yang sudah mengenal budaya tulis menuangkan tata aturan ke dalam bentuk tulisan yang sampai sekarang masih berlaku.

Tata aturan organisasi masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama seluruh masyarakat, lebih dikenal dengan hukum yang di dalam hukum memuat aturan – aturan tentang tata cara kehidupan masyarakat. Selama ini, hukum lah yang mengatur tata cara

berorganisasi masyarakat dan telah menjadi garis besar pedoman untuk mengatur semuanya. Walaupun perkembangan jaman menuju arah modernisasi, masih banyak sekali hukum yang berlaku sebagai aturan dalam masyarakat di Indonesia.

Dalam arus modernisasi, beberapa permasalahan penting yang dihadapi masyarakat saat sangat beragam, mulai dari kebijakan pemerintah, pemodal besar dan tak jarang dari dalam internal masyarakat itu sendiri. Bahkan tak jarang, masyarakat telah mengikuti arus modernisasi sehingga beberapa aturan kehidupan masyarakat yang tertuang dalam hukum telah banyak yang ditinggalkan dan dianggap sebagai hal yang ketinggalan jaman. Beberapa kasus atau masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya berasal dari pemerintah atau penguasa yang menerapkan pola kebijakan yang menegasikan (menganggap tiadanya) masyarakat, hingga kekakayaan alam yang ada di dalam kawasan masyarakat telah dieksploitasi habis demi keuntungan sesaat. Perkembangan selanjutnya, muncul konflik perebutan sumber daya alam antara masyarakat melawan investor yang biasanya bekerja sama dengan pemerintah atau penguasa. Di Indonesia, ketika program pembangunan nasional dicanangkan dan dilakukan secara menyeluruh di seluruh pelosok daerah, keadaan masyarakat tidak semakin berkualitas kehidupannya, tetapi semakin menurun. Bahkan untuk menikmati sumber daya alam yang telah secara turun temurun dikelola, mereka terasing dan terusir dari lingkungannya.

Secara garis besar, kendala yang dihadapi oleh organisasi masyarakat bisa dikategorikan menjadi dua, secara internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi adalah pembangunan organisasi ke dalam masyarakat sendiri. Kendala ini sering kali muncul karena organisasi masyarakat selalu mengalami perpecahan ke dalam dan organisasi yang dibangun tidak sistematis. Masalah yang lain adalah mengenai proses demokratisasi dalam mengambil kesepakatan – kesepakatan di dalam organisasi sendiri masih bersifat elitis di sebagian besar kelompok masyarakat . Akibat dari kekurangan ini, organisasi masyarakat sering dimanfaatkan oleh pemodal besar dan penguasa untuk kepentingannya. Permasalahan eksternal lebih disebabkan oleh kekuatan lawan yang tangguh sehingga masyarakat merasa kebingungan untuk menghadapinya. Permasalahan lain yang sering kali muncul kaitannya dengan permasalahan eksternal adalah ketidak tahuan atau tata cara mempertahankan kepentingan masyarakat jika menghadapi permasalahan yang sifatnya lokal (minimal tingkat Kabupaten) dan menyeluruh secara nasional.

Untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal, maka beberapa langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pengorganisasian rakyat, khususnya mengenai organisasi masyarakat dalam melakukan perjuangan secara internal dan eksternal. Secara internal, masyarakat harus membangun sebuah organisasi yang solid dan melakukan pendidikan organisasi kepada seluruh warga. Sedangkan secara eksternal, secara organisasional masyarakat harus satu suara dalam memperjuangkan kepentingan tingkat lokal maupun tingkat nasional secara bersama – sama.

Dalam draft modul pengorganisasian masyarakat akan membahas tentang organisasi, pengorganisasian dan peran seorang *Community Organizer* (CO) masyarakat . Tujuan dari pembuatan modul adalah seorang *Community Organizer* (CO) mampu mengetahui, memahami dan melakukan kerja – kerja pengorganisasian pada masyarakat , baik secara internal maupun eksternal. Dalam melakukan penulisan, penulis masih banyak mengalami keterbatasan – keterbatasan, khususnya mengenai informasi dan perkembangan masyarakat kekinian. Demi menambah kesempurnaan modul ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

## **B. ORGANISASI MASYARAKAT**

### **1) Pengertian Organisasi**

Organisasi adalah sistem menghimpun warga bersama – sama untuk berpihak dan bergerak sebagai satu kebulatan tekad. Dengan kata lain, organisasi merupakan sistem yang mengikat setiap anggota dan menjadi bagian organisasi untuk bergerak sebagai satu kesatuan tekad untuk mencapai satu tujuan bersamaan

Kita bisa mengibaratkan sapu lidi seperti sebuah organisasi. Apabila setiap lidi diikat bersama-sama dan berubah menjadi sebuah sapu lidi, akan mempunyai kekuatan karena ikatan tersebut. Bila masing - masing lidi tidak disatukan ke dalam sebuah ikatan, maka lidi – lidi tersebut akan lemah, tidak memiliki kekuatan dan mudah sekali dipatahkan. Tetapi bila setiap lidi diikat menjadi satu, ia adalah alat yang efektif untuk membersihkan kotoran.

Sebagai masyarakat, musuh selalu menghendaki organisasi terpecah, sehingga masyarakat tidak bisa secara efektif menyingkirkan penindasan, pemerasan dan kebijakan yang mereka buat. Jika masyarakat terorganisir dan mempunyai persatuan yang kuat seperti sapu lidi, maka kita bisa bergerak menyapu kotoran – kotoran dan persoalan – persoalan masyarakat .

Hanya dengan jalan berorganisasi, masyarakat bisa menunjukkan tenaga dan kekuatan persatuan – persatuan masyarakat yang tertindas untuk mencapai tujuan masyarakat yang demokratis, bebas dan sejahtera.

## 2) Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat adalah organisasi yang mempunyai anggota yang terdiri dari individu – individu masyarakat itu sendiri atau disebut warga masyarakat.

Organisasi masyarakat merupakan kekuatan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam melakukan perjuangan kepentingan masyarakat , organisasi masyarakat tidak akan henti – hentinya sampai kapanpun. Sebab, musuh – musuh masyarakat juga tidak akan henti – hentinya dalam melakukan penindasan terhadap masyarakat.

Bentuk organisasi masyarakat biasanya sudah terdapat dalam tata aturan hukum yang berlaku. Bisa berbentuk paguyuban, , atau kesukuan. Bentuk organisasi masyarakat bisa sangat fleksibel dalam mengikuti tata aturan hukum yang berlaku dalam setiap daerah masing – masing dan tidak ada kriteria khusus yang mengaturnya. Kepemimpinan yang berlaku juga demikian, sangat beragam. Hampir semua masyarakat mempunyai ciri yang khas dalam melakukan kepemimpinannya. Pada prinsipnya, setiap organisasi masyarakat mempunyai bentuk yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda, tetapi semuanya tetap dalam satu tujuan membangun kepentingan bersama masyarakat.

## 3) Landasan dan Tujuan Organisasi Masyarakat

Landasan filosofis dari kebutuhan untuk melakukan pengorganisasian masyarakat adalah *pemberdayaan*. Karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial.

Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam konteks masyarakat , perubahan sosial juga menyangkut multidimensional. Dalam dimensi ekonomi seringkali *'dimimpikan'* terbentuknya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat . Dalam segi politik selalu diinginkan keleluasaan dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berkompetisi serta diakui hak-hak sipil dan politiknya. Sedangkan dalam sisi budaya, dirasakan ada keinginan untuk mengekspresikan kearifan kebudayaan lokal.

## 4) Prinsip – Prinsip Dasar Organisasi Masyarakat

Dalam organisasi masyarakat , ada beberapa prinsip – prinsip dasar yang bisa digunakan dalam menjalankan organisasi. Prinsip dasar ini bisa juga menyesuaikan kearifan budaya lokal yang ada. Bila dalam kehidupan sehari – hari berorganisasi masyarakat sudah ditemukan hal – hal yang baik, maka tidak perlu ditekankan untuk dirubah, tetap dipelihara sebagai persoalan pokok yang tetap dijadikan dasar pijakan, biasanya menyangkut etika tata cara berkehidupan sosial secara organisasional dalam masyarakat.



Beberapa kriteria dasar atau prinsip dasar yang dimiliki oleh organisasi masyarakat adalah :

**a) Kepemimpinan**

Prinsip kepemimpinan organisasi masyarakat dituntut mempunyai watak demokratis, artinya setiap bentuk kepemimpinan harus didasarkan dan diarahkan pada prinsip – prinsip demokrasi. Beberapa prinsip demokrasi yang dilakukan dalam melakukan kepemimpinan organisasi adalah :

**1) Trust**

Trust atau Kepercayaan adalah melukiskan relasi antar anggota organisasi. Relasi kepercayaan merupakan faktor pokok dalam membangun sebuah organisasi. Dalam masyarakat , kepercayaan merupakan bagian dari relasi sosial yang tak pernah lepas dalam kehidupan sehari – hari. Untuk menjaga keharmonisan organisasi masyarakat , kepercayaan yang ada harus tetap dipertahankan mulai dari anggota yang paling bawah (warga masyarakat ) sampai tingkat pemimpin organisasi masyarakat . Kepercayaan yang kuat antar warga masyarakat dalam membangun organisasi masyarakat akan mampu menjauhkan organisasi ke dalam perpecahan.

**2) Aspiratif**

Prinsip aspirasi adalah menggambarkan perwakilan kepentingan dalam sebuah organisasi. Prinsip aspirasi yang dimaksud adalah setiap keputusan yang diambil oleh sebuah organisasi masyarakat harus mengakomodir kepentingan seluruh warga, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan bentuk dari penampilan kepentingan umum seluruh warga masyarakat . Begitu pula keputusan – keputusan yang dijalankan dalam organisasi secara bersama diputuskan atas dan didasarkan pada kepentingan umum.

Kasus yang sering terjadi adalah para pemimpin organisasi masyarakat mengambil keputusan atau kebijakan secara tertutup pada tingkatan pengurus atau berdasarkan pada keputusan beberapa warga saja. Kebiasaan buruk ini masih sering dilakukan. Sebisa mungkin hal ini dihindarkan. Maka dalam setiap organisasi masyarakat, para pemimpin hendaknya selalu memiliki sikap aspiratif dalam mengambil setiap kebijakan atau keputusan organisasi.

**3) Partisipasi**

Partisipasi dalam sebuah organisasi menggambarkan keterlibatan dari keaktifan seluruh warga masyarakat dalam berorganisasi.

Partisipasi tidak hanya dilakukan oleh pemimpin organisasi saja, melainkan seluruh warga masyarakat .

Seluruh warga masyarakat dituntut partisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini, bentuk partisipasi sebisa mungkin berasal dari dua arah, pemimpin dan warga masyarakat .

Kebiasaan buruk pelaksanaan partisipasi dalam organisasi masyarakat selama ini adalah penekanan partisipasi dalam level pelaksanaan kegiatan, sementara partisipasi pada level perencanaan masih tetap didominasi oleh elite-elite pemimpin. Dua tahap partisipasi yang lain, monitoring dan evaluasi, hampir tidak pernah dilaksanakan oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan perencanaan di masyarakat sebisa mungkin difokuskan pada deseminasi wacana-wacana baru kepada warga masyarakat, dan sekaligus mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat .

**4) Transparansi**

Prinsip transparansi menekankan bahwa setiap keputusan atau kebijakan dalam sebuah organisasi mempunyai sifat transparan. Artinya setiap warga masyarakat berhak mengetahui seluruh kepentingan organisasi tanpa ada sedikitpun sesuatu yang disembunyikan. Tujuan dari transparansi adalah organisasi mempunyai

kepentingan yang jelas dan diketahui oleh seluruh warga masyarakat , sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil merupakan bentuk dari perwakilan kepentingan keseluruhan warga masyarakat . Selain itu, prinsip transparansi merupakan bentuk dari manajemen organisasi yang bersih dan terhindar dari kepentingan – kepentingan individu.

Pada implementasi kegiatan organisasi masyarakat , bentuk – bentuk transparansi biasanya tercermin dalam setiap aktivitas organisasi, mulai dari perencanaan kegiatan hingga sampai pada monitoring dan evaluasi.

Kebiasaan buruk dalam organisasi masyarakat dalam hal transparansi sebenarnya bukan saja dalam sistem pengambilan keputusan atau kebijakan, tetapi pada prinsip – prinsip kebijakan pengelolaan anggaran organisasi sering terjadi. Kasus tidak transparansi dalam penggunaan anggaran dalam sebuah organisasi adlah merupakan awal yang baik bagi kehancuran sebuah organisasi. Kasus ini sering terjadi pada setiap organisasi, untuk itu sebisa mungkin transparansi penggunaan anggaran harus dilakukan setia organisasi masyarakat.

#### **5) Akuntabilitas publik**

Setiap keputusan atau kebijakan dari organisasi dituntut untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada semua warga masyarakat . Prinsip akuntabilitas publik menekankan bahwa organisasi yang ada dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang telah dilakukan selama dalam periode tertentu. Pertanggungjawaban ini mencerminkan organisasi mampu bertanggung jawab atas keputusan atau kebijakan yang telah diambilnya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kepentingan bersama.

Pertanggungjawaban dalam setiap organisasi bisa dilakukan pada setiap pertemuan atau rapat – rapat yang dilakukan oleh organisasi, biasanya dilakukan dalam rapat umum organisasi masyarakat yang dihadiri oleh seluruh warga. Pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi selain bertujuan pelaporan kegiatan, juga mempunyai tujuan lain yang lebih penting yaitu semua warga masyarakat semakin menambah percaya pada organisasi.

#### **6) Akses Kontrol**

Setiap organisasi masyarakat mempunyai mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol bertujuan untuk mengontrol kinerja organisasi masyarakat agar lebih responsibel dan bertanggung jawab atas kepentingan seluruh warga masyarakat.

Kontrol yang tepat biasanya dilakukan dalam sebuah organisasi masyarakat bila ditemukan penyimpangan – penyimpangan arah dan tujuan organisasi. Selain itu, kontrol bisa dilakukan bila terjadi praktik-praktik manipulasi atau KKN secara brutal yang dilakukan oleh pengurus organisasi masyarakat .

Kontrol terhadap organisasi masyarakat bisa dilakukan kapan saja bila mayoritas warga masyarakat menghendakinya. Kontrol bisa dilakukan juga dalam rapat – rapat atau pertemuan rutin yang dilakukan oleh organisasi masyarakat . Rapat anggota luar biasa dapat dilakukan bila terjadi penyimpangan arah dan tujuan organisasi, terjadinya praktek – praktek manipulasi atau KKN yang terjadi mengancam organisasi.

Mekanisme kontrol biasanya diatur dan ditetapkan oleh organisasi masyarakat dalam kesepakatan bersama serta dituangkan dalam aturan dasar yang berlaku.

#### b) Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi masyarakat , khususnya ketika di tengah – tengah warga masyarakat , segala pandangan dan pikiran yang muncul akan berada dalam satu garis politik yang memperjuangkan kepentingan warga masyarakat . Tetapi, dalam praktek perjuangan, bisa terjadi perbedaan – perbedaan. Perbedaan dalam suatu organisasi masyarakat adalah hal yang sangat wajar dan sehat ; *pengungkapan pandangan dan diskusi secara terbuka mengenai kebijakan organisasi harus dijamin dalam organisasi masyarakat* .

Walaupun demikian, iklim demokrasi ini belum tentu menjamin keselamatan dan keutuhan organisasi masyarakat dari ancaman unsur – unsur kecenderungan perpecahan. Bahaya perpecahan merupakan salah satu ancaman dari dalam, yang bisa menggerogoti kesetiaan warga terhadap perjuangan organisasi masyarakat . Untuk mensikapi dan mencegah secara dini setiap munculnya unsur perpecahan sekecil apapun yang bertujuan memecah belah organisasi masyarakat , maka penegakan disiplin organisasi harus mutlak dilakukan.

#### c) Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian dalam sebuah organisasi masyarakat mutak dilakukan, terutama ketika melakukan pekerjaan – pekerjaan penting di tengah – tengah warga masyarakat . Dalam menghadapi setiap permasalahan, organisasi masyarakat dituntut untuk secara cepat dan tepat menjawab kebutuhan perjuangan organisasi masyarakat . Setiap organisasi masyarakat mempunyai kemandirian dalam menjawab persoalan – persoalan lokal tanpa harus tergantung dari pihak – pihak lain. Pertanggungjawaban organisasi atas apa yang telah dikerjakannya bisa dilakukan dalam pertemuan – pertemuan organisasi.

Dalam pelaksanaan di lapangan, keluwesan dan kreativitas merupakan unsur pokok yang dituntut ada pada setiap diri warga masyarakat.

### C. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Proses membangun organisasi masyarakat disebut pngorganisasian masyarakat. Pengorganisasian dalam masyarakat mungkin bagi sebagian warga merupakan istilah yang baru, tetapi konsep ini sudah dikenal luas di kalangan organisasi umum yang lain. Pengorganisasian bisa menjadi kebutuhan ketika realitas kehidupan sosial masyarakat sudah berkembang sedemikian kompleksnya, sehingga sebuah usaha tidak bisa dilakukan secara individual lagi (warga-perwargaan) melainkan harus menjadi usaha bersama dalam bentuk kelompok. Dengan demikian, pada pengertian yang paling sederhana, Konsep serba bersama ini merupakan batas pembeda antara upaya pengorganisasian masyarakat dengan upaya perwargaan maupun strategi menyerahkan segala sesuatunya pada pemimpin yang sudah pasti dilakukan secara individual.

*Pengorganisasian adalah strategi/ upaya bersama (kolektif) dari sebuah kelompok masyarakat dengan mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.*

Dalam membangun organisasi masyarakat ada beberapa penekanan dan pemisahan secara manajemen pengorganisasiannya. Pemisahan manajemen pengorganisasian ditujukan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan yang muncul di tingkatan masyarakat . Permasalahan yang muncul bisa dibedakan dalam dua hal, secara internal dan eksternal. Begitu pula cara membangun organisasi masyarakat dengan internal dan eksternal dengan harapan organisasi mampu mengatasi dua persoalan ini secara baik.

## 1) Landasan & Tujuan Pengorganisasian

### a) Landasan Pengorganisasian

Landasan filosofis dari kebutuhan untuk membangun organisasi adalah membangun kepentingan secara bersama – sama pada seluruh masyarakat , karena masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial.

Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam konteks masyarakat, perubahan sosial juga menyangkut multidimensional. Dalam dimensi ekonomi seringkali ‘dimimpikan’ terbentuknya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat . Dalam segi politik selalu diinginkan keleluasaan dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berkompetisi serta diakui hak-hak sipil dan politiknya. Sedangkan dalam sisi budaya, dirasakan ada keinginan untuk mengekspresikan kearifan kebudayaan lokal.

Landasan filosofis pengorganisasian lainnya adalah melakukan *pemberdayaan*. Karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Pengorganisasian masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama sekaligus penentu dan pengendali kegiatan-kegiatan perubahan sosial yang ada dalam organisasi masyarakat.

### b) Tujuan Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi masyarakat ditujukan untuk membangun dan mengembangkan organisasi. Pengorganisasian mempunyai peranan yang luar biasa bagi organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal tujuan pengorganisasian adalah membangun organisasi masyarakat . Secara eksternal tujuan pengorganisasian adalah membangun jaringan antar organisasi masyarakat untuk menghadapi masalah – masalah bersama atau lebih ditujukan untuk membangun kekuatan bersama yang lebih besar lagi.

Selain itu, tujuan pengorganisasian adalah menyelesaikan konflik – konflik atau masalah masalah yang terjadi di tengah warga masyarakat yang setiap saat muncul dan harus segera diselesaikan untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik.

## 2) Manfaat Melakukan Pengorganisasian

Mengorganisir diri punya manfaat *jangka pendek*, mengorganisir diri adalah suatu alat efektif untuk membuat sesuatu terlaksana; memperbaiki pelayanan pada masyarakat, termasuk pelayanan dalam bidang ekonomi (modal-teknologi), menurunkan beban pajak, memastikan jaminan lapangan kerja, perubahan kebijakan di tingkat masyarakat atau di luar , memperbaiki pelayanan angkutan umum dan kesehatan, melindungi lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta sebagainya. Intinya, banyak diantara masalah keseharian yang kita hadapi saat ini dapat dipecahkan dan dirubah dengan cara mengorganisir diri.

Mengorganisir diri juga punya manfaat *jangka panjang* yang mungkin jauh lebih penting. Melalui proses-proses pengorganisasian, masyarakat bisa belajar sesuatu yang baru tentang diri sendiri. Masyarakat akan menemukan bahwa harga diri dan martabat mereka selama ini selalu diabaikan dan diperdayakan. Dengan pengorganisasian, masyarakat , warga dapat menemukan bahwa kehormatan dan kedaulatan mereka selama ini justru tidak dihargai *karena ketiadaan kepercayaan diri di antara warga masyarakat sendiri*. Warga masyarakat dengan demikian akan mulai belajar bagaimana caranya mendayagunakan semua potensi, kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki dalam proses-proses pengorganisasian; bagaimana bekerja bersama dengan warga lain, menyatakan pendapat dan sikap mereka secara terbuka, mempengaruhi kebijakan resmi, menghadapi lawan atau musuh bersama. Akhirnya, melalui pengorganisasian, masyarakat mulai mengenal dan

menemukan diri mereka sendiri. Warga masyarakat akan bisa menemukan siapa mereka sebenarnya selama ini, berasal dari mana, seperti apa latar belakang mereka, sejarah mereka, cikal-bakal mereka, akar budaya mereka serta kepentingan bersama mereka. Warga masyarakat akan menemukan kembali sesuatu yang bermakna dalam lingkungan keluarga mereka, kelompok suku atau bahasa asal mereka yang memberi mereka kembali martabat dan kekuatan baru.

### 3) Kerja Pengorganisasian (Pengorganisir)

Salah satu kerja penting dari pengorganisasian adalah pengorganisir. Hal menakutkan dalam keseluruhan proses mengorganisir adalah ternyata hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengorganisir seringkali dikesankan sulit atau bahkan musykil. Tetapi dalam kenyataannya, mengorganisir adalah suatu proses yang sebenarnya tidak ruwet. Itu tergantung pada *ketrampilan dasar* yang sebagian besarnya sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dalam kadar yang sama dan memadai. Salah satu contoh yang cukup relevan dengan hal ini adalah ketrampilan sehari-hari untuk hidup bersama yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pelembagaan kerja bersama sudah terwujudkan ke dalam berbagai macam kerja organisasi asli seperti “upacara”, “gotong – royong”, dan sebagainya.

Memang tidak ada resep serba jadi dalam proses pengorganisir, ada beberapa langkah tertentu yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu pula. Tetapi semua langkah itu sebenarnya sederhana dan mudah dipelajari oleh warga sekalipun. Dengan demikian, semua warga dapat mengorganisir. Semua warga dapat belajar tentang asas-asas pengorganisasian. Tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain.

#### a) Mengapa Warga Mengorganisir Diri atau Menolak untuk itu?

Warga-warga masyarakat mengorganisir diri karena beberapa alasan yang mungkin berbeda. Adakalanya diperlukan pendekatan agar alasan yang beragam itu bisa dijadikan satu landasan untuk menghimpun diri bersama-sama. Dengan demikian salah satu landasan awal dari upaya mengorganisir diri adalah tersedianya landasan bersama (*common platform*), baik berupa nilai, institusi dan mekanisme bersama. Misalnya, pengorganisasian harus jelas visi dan misi yang ingin dicapai dari upaya pengorganisasian itu. Visi dan Misi itulah kemudian diturunkan ke dalam strategi dan program yang bisa menjawab kebutuhan anggota secara lebih jelas.

*Mengapa sebagian warga tidak mengorganisir diri ?* Tidak semua warga yang mempunyai masalah lantas mengorganisir diri. Beberapa warga akan tetap berkuat mencoba menyelesaikannya sendirian, meskipun sudah terbukti berkali-kali gagal atau kurang berhasil. Ada banyak alasan mengapa warga menolak berhimpun dengan warga lain: ada sebagian warga pengorganisasian merupakan hal baru, merasa cemas karena akan dimintai sesuatu atau melakukan sesuatu yang mereka yakini belum pasti, takut dimintai pertanggungjawaban atau menyatakan pendapatnya di depan umum. Alasan lain adalah takut pada apa yang bakal terjadi jika pengorganisasi itu nanti sudah berjalan, mereka akan mendapatkan tantangan, rintangan ataupun akibat-akibat lain yang dirasakan memberatkan. *Karena alasan-alasan tersebut di atas menyebabkan banyak warga lebih memilih untuk menggunakan cara-cara pemecahan persoalan secara perwargaan, terhadap banyak persoalan yang sebenarnya dirasakan oleh banyak warga.*

#### b) Dimana melakukan Kerja – Kerja Pengorganisasian

Tempat terbaik untuk memulai suatu pengorganisasian adalah suatu pengorganisasian adalah berada, dengan warga-warga yang ada di sekitar anda, tentang masalah yang memang oleh warga diprihatinkan bersama, tentang sesuatu yang oleh warga masyarakat menginginkan terjadi perubahan atasnya. Mulailah dengan bekerja

dan hidup bersama warga, warga masyarakat seperti anda juga, mereka yang membagi minat dan perhatian yang sama dengan anda dan yang lainnya.

Pengorganisasian tidak perlu merupakan sesuatu yang serba besar pada awal mulanya, jika ingin berhasil. Pengorganisasian bisa dimulai dari sebuah kelompok yang kecil.

**c) Apa yang harus Kita Kerjakan dalam Pengorganisasian ?**

*Langkah Pertama*, salah satu yang bisa dilakukan adalah mempelajari situasi sosial kemasyarakatan di masing-masing. sebagai entitas politik, ekonomi bisa dipilah berdasarkan kategori; region (dusun – ), profesi (petani-pengrajin-pengusaha), ataupun kekerabatan (trah). Di sebuah masyarakat yang meletakkan konteks kewilayahan sebagai sesuatu yang penting, maka pengorganisasian bisa menggunakan pemilihan regional yang berbasis dusun. Demikian pula apabila, basis pengorganisasian lebih tepat menggunakan kreteri profesi maka strategi yang dipilih bisa menyesuaikan dengan keadaan sosial tersebut.

*Langkah Kedua*, pengorganisasian juga seharusnya memperhatikan titik masuk institusional (kelembagaan). Pertanyaan yang relevan adalah apakah upaya pengorganisasian dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti kelompok masyarakat , assosiasi lembaga ekonomi atau lembaga lain resmi yang seringkali dalam pembentukannya ‘*dibidani*’ oleh pemerintah. Atau upaya pengorganisasian dilakukan dengan membentuk wadah baru sama sekali. Tentu saja kedua jalan itu mempunyai sejumlah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan lembaga yang sudah ada adalah relatif tersedianya prasarana dan sarana bagi kerja-kerja pengorganisasian. Kelemahan jalan ini adalah bentuknya yang sangat kaku karena *diin* dari atas. Sedangkan jalan pembentukan wadah baru mempunyai kelebihan karena relatif lebih mandiri dan partisipatif namun mempunyai kelemahan yang bersumber dari belum terlembaganya mekanisme organisasi sehingga bersifat *trial and error*.

*Langkah Ketiga*, melakukan dan memperkuat kerja-kerja basis. Yang dimaksud dengan kerja-kerja basis adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (yang mengorganisir diri terus menerus) secara internal berupa;

1. Upaya membangun basis warga masyarakat (melakukan rekrutmen dan pendekatan pada komunitas yang senasib agar mau bergabung dalam pengorganisasian).
2. Pendidikan pada anggota mengenai visi, misi, dan kepentingan bersama dari organisasi masyarakat .
3. Merumuskan strategi untuk memperjuangkan kepentingan bersama organisasi masyarakat .

**d) Membangun Jaringan**

Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah pengorganisasian memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai spesifikasi yang berbeda dalam suatu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Tidak ada satupun organisasi yang mampu mencapai tujuannya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang juga mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama. Semakin banyak warga masyarakat/organisasi menyuarakan hal yang sama maka, semakin kuat kepercayaan bagi timbulnya perubahan yang diinginkan. Hal ini secara sederhana disebut sebagai kebutuhan untuk membangun jaringan.

Secara garis besarnya kerja-kerja jaringan dapat dipilah menjadi tiga bentuk:

▪ *Kerja Basis*

Kerja basis merupakan kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (pengorganisir) dengan melakukan langkah-langkah; membangun basis masa, pendidikan dan perumusan strategi.

- *Kerja Pendukung*  
Kerja pendukung ini dilakukan oleh kelompok-kelompok sekutu yang menyediakan jaringan dana, logistik, informasi data dan akses. Kelompok sekutu bisa berasal dari kalangan LSM, kelompok intelektual/ akademisi, Lembaga pendana (donor) dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap persoalan yang diperjuangkan.
- *Kerja Garis Depan*  
Kerja garis depan dilakukan terutama berkaitan dengan advokasi kebijakan, mobilisasi massa, mempeluas jaringan sekutu, lobbi dan melaksanakan fungsi juru runding. Kerja-kerja garis depan bisa dilakukan oleh kelompok organisasi/individual yang memiliki keahlian dan ketrampilan tentang hal ini.

Dengan pembagian tugas maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari individu dan kelompok yang bersedia membantu warga dalam melakukan perubahan sosial, baik melalui strategi advokasi, maupun penguatan komunitas basis. Akhirnya, pembangunan jaringan merupakan salah satu cara untuk menambah “kawan”, sekaligus mengurangi “lawan” dalam memperjuangkan perubahan yang diinginkan.

#### **D. COMMUNITY ORGANIZER (CO)**

*Seorang tua yang sedemikian tekun menggali gunung bersama anak – anaknya untuk menyingkirkannya, sehingga Tuhan merasa kasihan lalu mengirim dewa untuk membantunya. Maka seorang Organizer berkata; “Yang membantu organisasi rakyat mengalahkan ketidakadilan adalah rakyat itu sendiri, bukan dewa yang dikirimkan Tuhan. Rakyat itu memiliki tenaga kreatif yang tiada habisnya, semakin ditindas, rakyat semakin perkasa. Yang tertimbun lama, pasti akan meledak dengan cepat”.*

Menjadi seorang Organizer bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh setiap orang. Di dalam masyarakat, mereka tidak mengenal Organizer, yang mereka kenal adalah orang yang mempunyai kecakapan atau keahlian yang luar biasa, bahkan dalam beberapa hal, pandangan masyarakat terhadap seorang Organizer adalah dewa yang turun ke bumi sebagai wakil Tuhan. Masyarakat seringkali menuntut sesuatu yang lebih banyak dari Organizer, mulai persoalan kecil hingga persoalan yang besar yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. Misalkan persoalan bagaimana menyelesaikan konflik internal rumah tangga, sampai konflik antar masyarakat, atau konflik yang lebih besar seperti perebutan SDA (Sumber Daya Alam) dengan investor. Oleh karena itu, sebagai seorang Organizer masyarakat, minimal dituntut mempunyai kemampuan standar dan kemampuan khusus baik secara teoritik mengenai masyarakat, skill ataupun pengalaman praksis di lapangan.

Memang berbeda tugas seorang Organizer masyarakat bila dibandingkan dengan pejabat pemerintahan, atau bila dibandingkan dengan seorang tokoh masyarakat sekalipun. Seorang Organizer bisa menjadi tokoh sekaligus pejabat di sebuah organisasi masyarakat. Tetapi seorang pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tentu mempunyai kemampuan sebagai seorang Organizer. Syarat moral praxis harus dimiliki oleh seorang Organizer, dimana kemampuan memahami teoritik dari ilmu – ilmu perubahan sosial diterapkan dengan sepenuh hati dan direfleksikan kembali menjadi sebuah teoritik lagi dan di aplikasikan kembali ke tengah – tengah masyarakat, begitu seterusnya, dialektis dan dinamis.

Seringkali seorang Organizer masyarakat terjebak dengan perannya sendiri ketika gagal mentransformasikan keilmuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada warga masyarakat. Kegagalan ini biasanya disebabkan peran Organizer semakin tahun tidak semakin berkurang, tetapi tetap menciptakan ketergantungan kepada masyarakat yang diorganisirnya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai CO, lebih baik kita tinjau dahulu mulai dari awal tentang CO.

## 1) CO (Community Organizer)

Definisi CO saat ini cukup beragam. Banyak organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggunakan istilah ini untuk kepentingan dan tujuan dari organisasinya dan mereka menyebutnya dengan istilah Organizer, kader, pendamping dan sebagainya kepada petugas yang dikirimkan ke tengah – tengah masyarakat . Namun secara garis besar, definisi CO atau Community Organizer adalah orang atau sekelompok orang dari organisasi tertentu yang dikirimkan ke tengah – tengah masyarakat atau komunitas untuk melaksanakan tugas – tugas dari sebuah organisasi dalam membangun gerakan sosial dalam konteks perubahan sosial yang lebih baik.

CO bisa berasal dari mana saja. Dari sebuah organisasi atau bahkan dari kalangan masyarakat biasa. Namun secara garis besar, CO berasal orang atau anggota organisasi yang mempunyai kemampuan kompleks dalam membangun sebuah kesadaran sosial di masyarakat atau di komunitas yang menjadi basis pengorganisirannya. Seperti yang disebutkan dalam pengantar, sebelum terjun ditengah masyarakat atau komunitas yang menjadi basis pengorganisirannya, CO biasanya dibekali dengan keahlian khusus berupa teoritik atau skill standar yang ditujukan untuk kepentingan organisasi yang mengirimnya. Biasanya kemampuan CO dibedakan menjadi 2 bagian ; kemampuan atau kecakapan standar (umum) dan kemampuan khusus sesuai bidangnya atau sesuai kepentingannya. Misalnya, materi standar umum CO diberikan kepada setiap orang yang menjadi CO sebagai bekal kemampuan atau kecakapan umum. Sedangkan materi khusus diberikan kepada CO yang bertugas untuk kepentingan khusus. Misalnya ; CO yang akan diterjunkan ke komunitas buruh, tani, masyarakat , good governance atau sektor lainnya biasanya mendapatkan materi tambahan di bidang tersebut.

## 2) Bagaimana dan dimana CO bekerja

CO bekerja tentunya ditengah – tengah masyarakat yang menjadi basis pengorganisirannya sesuai dengan kepentingan atau isu yang diamanatkan oleh organisasinya. Secara umum ada 4 tahapan cara CO bekerja ditengah – tengah masyarakat atau komunitas.

### a) *Perception* (persepsi tentang masyarakat atau komunitas)

CO berada di tengah – tengah masyarakat atau komunitas, mempelajari “gagasan yang tercerai berai dan tak sistematis” agar dapat mengidentifikasi masalah, mengkoordinasikan gagasan itu serta menetapkan daerah yang kuat dan yang lemah.

*Artinya:* ketika seorang CO baru memasuki tahap awal terjun ke tengah–tengah masyarakat atau komunitas, maka yang dilakukan adalah mempelajari semua hal yang ada. Tahap ini biasanya disebut investigasi. Tujuannya adalah mempelajari keadaan obyektif dan subyektif yang ada untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendataan. Hasil data ini kemudian dibuat pemetaan masalah dan menentukan hubungan atau relasi antar individu ataupun kelompok yang bermasalah atau berkonflik.

Cara ini biasanya dilakukan dengan wawancara, atau hanya obrolan biasa, bahkan hanya mendatangi segerombolan komunitas yang selalu ramai, pasar, atau tempat orang berkumpul misalnya. Dalam tahap ini, seorang CO harus bisa menentukan:

1. Tema – tema pokok (*Generative Themes*)
2. Relasi – relasi sosial yang ada.

Selain itu, seorang CO harus selalu menjaga hubungan dengan pihak luar untuk mengetahui semua perkembangan dan informasi yang ada mengenai daerah masyarakat yang akan diorganisirnya.

Hal – hal yang harus dijaga pada tahapan ini adalah CO tetap merasa sebagai *orang luar* (bila berasal dari luar komunitas masyarakat ) yang belum mengetahui apa – apa tentang masyarakat yang akan diorganisir. Tetapi biasanya, kendala yang dihadapi



seorang CO adalah dia merasa paling mengerti dan mengenai permasalahan yang ada, serta berusaha cepat untuk menyimpulkannya, atau bisa saja seorang CO merasa orang yang paling ahli dalam menentukan semua masalah yang ada di daerah basis yang diorganisirnya atau dalam istilah pengorganisasian dikenal dengan “*Don’t going native*” (jangan sok pribumi).

**b) *Summarization* (meringkas gagasan dalam sebuah laporan)**

*CO meringkas gagasan yang tersebar – sebar maupun informasi ke dalam satu laporan.* Artinya ; Setelah semua data – data terkumpul, maka analisis terhadap data yang ada mulai dilakukan pada tahap ini.

Tujuannya; untuk menentukan prioritas masalah atau isu strategis yang menjadi milik bersama untuk diolah lebih lanjut.

Pada tahapan inilah seorang CO dituntut untuk menguasai teori analisa sosial, yang merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu untuk merumuskan masalah dan mencari prioritas masalah untuk diselesaikan.

Beberapa hal yang harus dijaga pada tahapan ini adalah seorang CO tetap menjaga persepsi masyarakat dalam sebuah analisis sosial yang obyektif (berdasarkan fakta).

Prinsip awalnya adalah “*Don’t going native*” atau jangan sok pribumi. Yang dikhawatirkan adalah seorang CO akan larut dengan mengidealkan masyarakat tersebut dan terjebak menjadi Romantic terhadap komunitas tersebut.

**c) *Authorization* (otoritas pengambilan keputusan)**

*Organisasi tertinggi, yang bertanggung jawab atas wilayah yang tercakup dalam laporan itu, menerima laporan dari CO yang telah disepakati oleh organisasi lokal, lalu organisasi tertinggi mengeluarkan petunjuk dan perintahnya.*

*Artinya ;* pada tahapan ini segala keputusan yang akan dilakukan oleh seorang CO beserta organisasi masyarakat yang ada harus dikonsultasikan kepada organisasi yang lebih tinggi, dengan catatan ada organisasi di atasnya yang mengontrol pekerjaan CO dan organisasi masyarakat .

Tujuan konsultasi adalah untuk mengontrol segala tindakan ataupun keputusan yang dilakukan oleh CO di lapangan agar tidak menyimpang dari tata aturan organisasi yang telah menjadi kesepakatan.

Hal – hal yang selalu dilanggar oleh seorang CO biasanya tidak suka mengkonsultasikan masalah yang dihadapi di lapangan dengan organisasi yang di atasnya. Beberapa hal yang sering dijadikan alasan adalah CO telah mampu mengerjakan semua dengan seorang diri, tanpa perlu bantuan organisasi, atau seorang CO takut akan kritikan organisasi di atasnya dan sesama CO.

**d) *Implementation* (pelaksanaan keputusan)**

*Petunjuk dan perintah itu kemudian dikirim kembali untuk diterangkan dan diumumkan di tengah – tengah masyarakat atau komunitas sehingga “kesepakatan itu menjadi milik masyarakat atau komunitas sendiri”.* Artinya setiap keputusan yang dirangkum dan diusulkan oleh organisasi masyarakat atau komunitas yang kemudian masuk ke organisasi tertinggi, setelah melalui proses pengambilan keputusan dikembalikan lagi kepada CO dan masyarakat atau komunitas untuk dilaksanakan.

Tujuannya adalah masyarakat atau komunitas yang diorganisir atau organisasi lokal merasa usulan dan saran yang telah diajukan dapat diakomodasi dan merasa tidak ditinggalkan dalam melakukan segala keputusan dan kesepakatan di lapangan.

Ke empat tahapan ini perlu dilakukan berulang – ulang dengan tujuan semakin tepat, hidup dan kaya. Selain itu, cara kerja seperti ini, menghindari seorang CO atau pemimpin dalam organisasi tidak bersikap otoriter, khususnya dalam pengambilan

keputusan. Selain itu, cara kerja sistem ini menghindari seorang CO bekerja adventurer (petualang, suka berspekulasi).

## E. PENUTUP

Dalam memahami sebuah organisasi masyarakat, kita tidak akan terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seorang CO (*Community Organizer*) dalam membangun organisasi masyarakat selain dituntut menguasai materi pengorganisasian, juga dituntut untuk memahami khasanah kearifan budaya lokal masyarakat yang menjadi basis pengorganisirannya. Sering kali seorang CO mengabaikan permasalahan ini sehingga berakibat kegagalan dalam membangun organisasi masyarakat.

Realitas sosial dalam lingkungan bekerjanya seorang CO adalah faktor lain sebagai media mengasah kemampuan. Pengalaman praksis di lapangan merupakan guru yang terbaik bagi seorang CO dalam menjalankan sebuah pengorganisasian rakyat. Untuk itu, dalam memahami isi modul ini diharapkan CO masyarakat mampu melengkapi sendiri dengan berbagai pengalaman dalam melakukan pengorganisasian.[]

## Daftar Pustaka

- Albert. A Manners, David Kaplan. *Teori Budaya*. Cetakan I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1999.
- Bobo. Kim, Jackie Kendall, Steve Max. *Organize. Organizing for sosial Change. A Manual for Activist in The 1990s*. Seven Locks Press. California. 1994.
- Dahana, Bambang Tribuana, et. al. *Merawat Demokrasi Melalui diskusi: Buku Panduan untuk Fasilitator*. SKEPO dan PACT. Jakarta. 2001
- Fakih, Mansour, et. al. *Pendidikan Popular Membangun Kesadaran Kritis*. Read Book. Yogyakarta. 2001
- Fakih, Mansour, et. al. *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*. Insist. Yogyakarta. 1999
- Freirei, Paulo. *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Read dan Pustaka Pekajar. Yogyakarta. Cetakan ke-3. 2002
- Freirei, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES. Jakarta. 1978
- Neill, William F. *Ideologi – ideologi pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2002
- Ivan Illich. *Bebas Dari Sekolah*. Yayasan Obor Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1972.
- John m. Bryson. *Perencanaan Strategis; Bagi Organisasi Sosial* (edisi terjemahan oleh M. Miftahuddin). Cetakan ke V. INSIST, REMDEC, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Juli 2002.
- Neuwmann W. Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and quantitative Approaches*. Allyn and Bacon. Massachusetts. 1994.
- Sintesa, yayasan, SPSU. *Pembangunan Berbuah Sengketa; kumpulan kasus – kasus sengketa pertanahan sepanjang Orde Baru*. Yayasan Sintesa dan SPSU. Medan. 1998
- Smith, William A. *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Friere*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001
- Team IRE. *Modul Fasilitasi*. Tidak di publikasikan. Yogyakarta. 1999

## TENTANG PENULIS



Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I, M.A., lahir di Cilacap 27 Juli 1980 dari *keluarga buruh petani miskin* di Pesisir Selatan Cilacap Jawa Tengah. Berkat ketekunan dan kegigihannya mencari ilmu sejak tahun 1999 ia melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melahirkan karya ilmiah berbentuk *skripsi kontroversial* dan dianggap keluar dari tradisi akademik UIN, dengan judul: *“Emansipasi Keterasingan Manusia Menurut Karl Marx: Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam.”* Kemudian ia telah menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM dengan menyusun tesis ambisius dengan judul: *“Negara Marxis & Revolusi Proletariat: Ajaran Marxis Tentang Negara & Tugas-Tugas Proletariat di Dalam Revolusi Sosial”*, kini telah diterbitkan Pustaka Pelajar Jogjakarta.

Perjalanan akademis dari Sekolah Dasar Negeri Mertasinga III (1987-1993) sampai Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Cilacap (1993-1996) ditempuh di desa kelahirannya Cilacap. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah (1996-1999) sekaligus menjadi santri dan Lurah di Pondok Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) Miftahussalam Al-Haditsah Banyumas. Kegemarannya melahap *buku kiri, filsafat dan sosial* sejak SMU telah menciptakan pemikiran dan pengaruh di lingkungan organisasi dan kelompok studi. Kemudian melanjutkan di perguruan tinggi S1 UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (1999-2005) dan S2 Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM (2008-2010). Kegemarannya berorganisasi, berdiskusi dan berdialektika terus dilanjutkan selama menjadi mahasiswa.

Pengalaman organisasi yang pernah digeluti antara lain: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Presidium Mahasiswa (Presma) Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Himmah Suci UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Himpunan Mahasiswa Cilacap Jogjakarta (HIMACITA), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Paradigma UIN Sunan Kalijaga, Kelompok Studi Ilmu Pendidikan (KSIP) UIN Sunan Kalijaga, Voulentir Lembaga Kajian Islam & Sosial (LKIS) Jogjakarta, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cilacap, Lajnah Bahsul Masail (LBM NU) Kabupaten Cilacap, PC Lajnah Ta’lif Wa Nasr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Kabupaten Cilacap, Direktur Institute For Philosophical and Social Studies (INPHISOS) Jogjakarta. Di Intra kampus ia terlibat secara politik di PRM dan didelegasikan untuk *menjabat posisi prestisius* sebagai Sekretaris Jenderal DEMA UIN Sunan Kalijaga. dan karena nalar pemberontakan jalanan gerakan intra kampus, ia juga terlibat demonstrasi pembubaran Seminar Nasional dan *penolakan konversi* IAIN menjadi UIN, aksi penolakan SISDIKNAS dan aksi pembubaran partai Golkar setelah penumbangan Rezim Orde Baru ‘98.

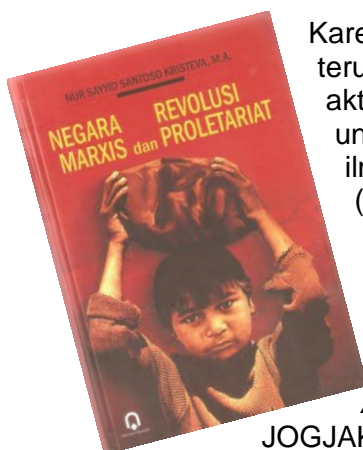
Kemudian di gerakan ekstra kampus pernah aktif secara kultural di PMII Rayon Fakultas Tarbiyah dan terus berproses di PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, Pengurus Cabang PMII D.I. Yogyakarta dan kemudian secara kultural berproses di Bidang Kaderisasi PB PMII. Sehingga ia pernah terlibat advokasi petani di Klaten bersama dengan jaringan Katholik. Terlibat advokasi anak jalanan dengan LSM Humana. Menjadi peserta vouletir diskusi di LKIS. Di kampus dan luar kampus ia gigih membetuk forum diskusi pembebasan. Forum diskusi yang pernah digeluti antara lain Forum Diskusi para seniornya; Forum Diskusi Sosial *“T-Visionary Club”*, Forum Diskusi Filsafat *“Kipas”* dan membidani Forum Diskusi *“Komunitas Kultural”* serta Forum Diskusi *“Lintas Organ Ekstra”*. Di organisasi etnis ia pernah menjabat sekjend HIMMAH SUCI dan ketua umum Himpunan Mahasiswa Cilacap-Jogjakarta (HIMACITA), ia juga membidani berdirinya organ-organ etnis dilingkungan UIN. Menjadi *deklarator* sekaligus menjabat sebagai dewan presidium Komite Mahasiswa Cilacap se-Indonesia (KMCI). Organisasi etis level nasional yang kontroversial yang dianggap subversif.

Selepas studi sebagai sarjana muda ia melanjutkan untuk mengkaji kitab kuning di Ponpes Al-Madaniah Cilumpung-Cilacap terutama mengkaji *ilmu alat, fiqih, tauhid dan tafsir*, juga untuk mengobati *kekeringan spiritualitas* selama menjadi aktivis. Selain mengkaji kitab kuning ia juga

menjadi *dosen muda progressif* di Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap dan tetap aktif di pembasisan kader dan gerakan sosial. Terlibat di Jaringan Kultural PMII Jabar, Jateng, Jatim, khususnya dalam proses-proses kaderisasi formal dan informal untuk membentuk *Jaringan Inti Ideologis*. Selain itu bersama SETAM dan aktivis PMII Cilacap terlibat perebutan (*reclaiming*) tanah petani dengan Perhutani di tumpangsari Cilacap. Terlibat aktif di LAKPESDAM NU, IPNU/IPPNU, Gerakan Pemuda Anshor, Lembaga Advokasi Buruh Migran Cilacap, Yapeknas, Lajnah Bahsul Masail, Dialog Antar Agama FKUB dan LP Ma'arif. Selama beraktivitas secara *manifes* dan *laten* serta gerakan bawah tanah di organ gerakan PMII ia membidani sekolah kader kultural antara lain: *Pelatihan Basis untuk kader inti ideologis*, *Sekolah Ideologi*, *Sekolah Marxis*, *Sekolah Gerakan Sosial*, *Sekolah Pendidikan Kritis*, *Sekolah Filsafat* dan juga menginisiasi pembentukan organ taktis untuk melakukan agitasi dan propaganda gerakan yaitu Front Aksi Mahasiswa Cilacap (FAM-C)—untuk memekikkan aspirasi perlawanan dan mendorong isu-isu polulis. Saatnya berteriak, bangkit, satu komdando satu tujuan, melawan dan merebut!

Jaringan intelektual yang pernah dan sedang digelutinya antara lain: Center for Asia Pacific Studies Gadjah Mada University (PSAP) Jogjakarta, Institute for Islamic and Social Studies (LKIS) Jogjakarta, Indonesia Sanitation Sector Development Program (WSP/ BAPPENAS) Jakarta, Institute for Human Resources Studies and Development (LKPSM) Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LAPPERA) Jogjakarta, Institute for Women and Children's Studies & Development (LSPPA) Jogjakarta, Institute for Human Resources Studies and Development (LKPSM) Cilacap, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Cilacap, Institute for Research and Empowerment (IRE) Jogjakarta, Institute Sosiologi Dialektis (INSIDE) Gadjah Mada University, Institute for Philosophical and Social Studies (INPHISOS) Yogyakarta, Forum Diskusi Eye on The Revolution + Revdem Yogyakarta.

Sampai saat ini masih laten mendampingi pembasisan kader secara kultural di lingkungan PMII Yogyakarta, Jaringan Gerakan Prodem Jawa Tengah + Jawa Barat + Jatim dan Jaringan Kaderisasi PMII secara nasional. Untuk mawadahi dan menjaga spirit intelektual di Jogjakarta ia telah membentuk Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis (LKSD), Institute for Philosophical and Social Studies (INSPHISOS), Forum Diskusi EYE ON THE REVOLUTION + REVDEM. Sampai saat ini ditengah keseriusan menyusun naskah buku-buku kritis, ia terus berusaha membunuh waktu dan terus produktif untuk melahirkan karya intelektual karena terinspirasi oleh karya-karya hebat seperti: *Shahihain* Bukhari Muslim, *Al-Ihya Ulumuddin* Ghazali, Magnum Opus *Das Capital* Karl Marx, *Tetralogi* Pramodya Ananta Toer dan Master Peace *Madilog* Tan Malaka.



Karena karya-karya besar & berpengaruh tersebut maka, penulis berusaha terus menggerus pikiran dalam membuat manuskrip buku panduan praxis aktivis gerakan sosial untuk jaringan revolusi demokratik (revdem) dan untuk Pembasisan Kader Gerakan PMII secara kultural ideologis. Publikasi ilmiah buku antara lain: [01] *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat* (PUSTAKA PELAJAR-JOGJAKARTA), *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat* (PUSTAKA PELAJAR-JOGJAKARTA), [02] *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik* (PUSTAKA PELAJAR-JOGJAKARTA), [03] *Sejarah Teologi Islam & Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah* (PUSTAKA PELAJAR-JOGJAKARTA), [04] *Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Anarkisme-Marxisme, Konservatisme* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [05] *Revolusi Dan Manajemen Aksi* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [06] *Training Of Facilitator: Metodologi Pelatihan Transformatif* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [07] *Kepemimpinan Demokratik Transformatif* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [08] *Strategi Gerakan Sosial* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [09] *Sosiologi Pendidikan Kritis* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [10] *Gender, Gerakan Perempuan dan Developmentalisme* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [11] *Marxisme Untuk Revolusi Demokratik* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [12] *Pemikiran Marx Tentang Kritik Ekonomi* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [13] *Melacak Akar Perubahan Sosial* (INPHISOS-JOGJAKARTA), [14] *Teori Analisis Geo-Ekososol* (INPHISOS-JOGJAKARTA).

## SEKOLAH ANALISIS SOSIAL

HANYA UNTUK MAHASISWA CERDAS DAN TERCERAHKAN  
DITERBITKAN KHUSUS UNTUK AMUNISI INTELEKTUAL JARINGAN INTI IDEOLOGIS

*Bunuhlah waktumu dengan aktifitas produktif dan progressif,  
Jangan engkau terbunuh waktu karena aktifitas  
yang mengasingkan rasionalitas.  
(Nur Sayyid Santoso-Kristeva)*

*Hancurkan kapitalisme yang dibantu  
oleh budaknya imperialisme.  
(Ir. Soekarno)*

*Dalam negeri ini akan terdapat tugu peringatan manusia najis, penghianat  
Negara, penjual rakyat, kusta masyarakat. Puluhan ya ratusan nama dan gelar  
manusia najis yang dituliskan di semua sisi tugu raya ini. Yang masuk golongan  
manusia najis nomor satu ialah mereka yang langsung membantu penjajah,  
penindas, penghisap, atau pembunuh rakyat Indonesia.  
(Tan Malaka)*

*Sejarah dari setiap masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah  
pertentangan kelas. Orang merdeka atau budak, bangsawan dan gembel, tuan  
dan pelayan, kepala tukang dan pekerja ahli, pendeknya yang menindas dan  
tertindas, berada dalam  
pertentangan yang tiada akhirnya.  
(Karl Marx)*

*Progresifitas sejarah akan berjalan dengan hukum-hukumnya sendiri.  
Progresifitas sejarah adalah gerak hidup manusia diselingkupan bumi, garis  
hidup kemanusiaan. Yang menentang, apakah itu kelompok, suku, bangsa atau  
perorangan akan kalah. Dan aku tahu betul, itulah yang akan terjadi, entah  
kapan, entah cepat, entah lambat.  
(Pramoedya Ananta Toer)*



Anti-Copyright © 2014. Dengan mencantumkan penulis sebagai hak dan pengakuan intelektual penulis, maka penulis dan penerbit memperbolehkan untuk mengutip, mereproduksi atau memperbanyak, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dengan cara elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, scanner, microfilm, vcd & cd-room, rekaman suara atau dengan teknologi apapun dengan izin atau tanpa seizin penulis dan penerbit. Dokumen intelektual ini dicetak, diterbitkan dan disebar untuk kebutuhan amunisi intelektual Kader Inti Ideologis dan kebutuhan gerakan sosial. Bukan Panduan Sekolah Analisis Sosial ini adalah edisi khusus komunitas gerakan progresif untuk agitasi & propaganda wacana kiri. Untuk kader inti ideologis jaringan sayap kiri. Sebarkan dan berorganisasilah! Baca & Lawan!